



Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara

PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) Kutai Kartanegara**

Tahun 2016 - 2021

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2021.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD Adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan pelaksanaan pembangunan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung Sejak Tahun 2005-2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD; adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk perencanaan 1 (satu) tahun.
10. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen rencana pembangunan daerah.
12. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 2

- (1) RPJMD ini disusun berdasarkan asas:
 - a. manfaat;
 - b. berkeadilan;
 - c. keterpaduan;
 - d. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
 - e. tata kelola pemerintahan yang baik;
 - f. berkelanjutan;
 - g. berwawasan lingkungan;
 - h. efektif dan efisien; dan
 - i. kemandirian.

- (2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) RPJMD merupakan:
 - a. penjabaran visi, misi, dan program Bupati ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum, program Pembangunan Daerah dan arah kebijakan keuangan Daerah dengan memperhatikan RPJPD; dan
 - b. dokumen rencana Pembangunan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku Pembangunan Daerah dalam mewujudkan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

RPJMD bertujuan untuk:

- a. memberikan panduan bagi penyelenggara Pembangunan Daerah jangka menengah;
- b. mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan Pembangunan Provinsi, serta dengan perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- c. sebagai pedoman dalam:
 - 1. penyusunan Renstra SKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - 2. penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
 - 3. penyusunan Renja SKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 4

Ruang lingkup RPJMD meliputi:

- a. gambaran umum kondisi Daerah;
- b. arah kebijakan keuangan Daerah;
- c. Visi dan Misi;
- d. strategi pembangunan Daerah;
- e. arah kebijakan dan kebijakan umum;
- f. program Pembangunan Daerah; dan
- g. indikasi program dan kerangka pendanaan.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 5

- (1) RPJMD disusun dengan sistematika terdiri atas:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	: GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
BAB IV	: ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB V	: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII	: KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII	: INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB IX	: INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X	: PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB XI	: PENUTUP

- (2) Uraian mengenai sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 6

- (1) Visi RPJMD adalah “Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan”.
- (2) Misi RPJMD meliputi:
 - a. memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;
 - b. meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;
 - c. meningkatkan pembiayaan pembangunan Daerah;
 - d. meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi Daerah;
 - e. meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing Daerah;
 - f. meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berawawasan lingkungan; dan
 - g. meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi hasil terhadap pelaksanaan RPJMD.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya:
 - a. bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum terbentuk, maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan Daerah untuk masa 1 (satu) tahun kedepan dapat mengacu kepada Program yang tertuang di dalam RPJMD sebagaimana tercantum di dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Agustus 2016

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Agustus 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



Ir. H. MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016
NOMOR 71**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR (9/38/2016)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2021

I. UMUM

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan Daerah.

RPJMD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah, serta memuat prioritas pembangunan Daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah, Masyarakat, swasta serta pemangku kepentingan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Walikota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya, yaitu pada tahun 2021. Namun demikian, Bupati terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan APBD melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Merujuk kepada peraturan di atas, dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran Pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, layanan publik, dan daya saing daerah serta pengembangan kehidupan yang berkesinambungan bagi warganegara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "berkeadilan" adalah perencanaan pembangunan jangka menengah harus memberi dampak kepada segenap lapisan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tata kelola pemerintahan yang baik" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka panjang dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah dilakukan secara berkesinambungan, berkembang, dan meningkat dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan" adalah perencanaan pembangunan jangka menengah yang dilakukan bersamaan dengan pengelolaan sumber daya secara bijaksana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah dimaksudkan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan cermat sesuai tujuan dan permasalahan (tepat guna) serta lebih berdayaguna dan berhasil guna.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah berlandaskan dan harus menciptakan kepercayaan dan kemampuan serta kekuatan sendiri dengan bersendikan kepribadian masyarakat yang luhur.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

RPJMD merupakan kerangka dasar Pengelolaan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tetap memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesinambungan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah merupakan kelanjutan dari kebijakan jangka menengah sebelumnya dan dalam rangka mencapai sasaran pokok RPJPD jangka menengah berikutnya untuk menghasilkan dampak pembangunan yang dapat dirasakan (generasi) masyarakat dalam jangka panjang dengan memerhatikan keseimbangan berbagai aspek pembangunan.

Pasal 3

Angka 1 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah Dokumen Perencanaan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Periode 5 (lima) Tahun.

Angka 3 Rencana Kerja Perangkat Daerah yang Selanjutnya disebut Renja adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA NOMOR 29

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....	2
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	5
1.1.1. Keterkaitan RPJMD dan RPJPD	5
1.1.2. Keterkaitan RPJMD dan RPJM Nasional Tahun 2015-2019.....	6
1.1.3. Keterkaitan RPJMD Kutai Kartanegara dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur	6
1.1.4. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	7
1.1.5. Keterkaitan RPJMD dengan Renstra SKPD	7
1.1.6. Keterkaitan RPJMD dengan RKPD.....	7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	7
1.5. MAKSUD DAN TUJUAN	8
1.1.7. Maksud	8
1.1.8. Tujuan.....	8
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	10
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	10
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	14
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana	16
2.1.4. Demografi	18
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	20
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	20
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	26
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	31
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM	32
2.3.1. Urusan Wajib	33
2.3.2. Urusan Pilihan.....	70
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH	78
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	78
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	82
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi	90
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia.....	92

BAB 3 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1.	KINERJA KEUANGAN MASA LALU	93
3.1.1.	<i>Kinerja Pelaksanaan APBD.....</i>	93
3.1.2.	<i>Neraca Daerah</i>	102
3.2.	KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	105
3.2.1.	<i>Kebijakan Umum Pendapatan Daerah</i>	105
3.2.2.	<i>Kebijakan Umum Belanja Daerah</i>	106
3.2.3.	<i>Proporsi Realisasi Belanja Daerah.....</i>	111
3.3.	KERANGKA PENDANAAN	117
3.3.1.	<i>Proyeksi Pendapatan Daerah.....</i>	117
3.3.2.	<i>Proyeksi Pembiayaan.....</i>	118
3.3.3.	<i>Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat.....</i>	119
3.3.4.	<i>Kebijakan Alokasi Anggaran.....</i>	119

BAB 4 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1.	PENGANTAR	122
4.2.	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	122
4.3.	ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	122
4.3.1.	<i>Isu Strategis Internasional.....</i>	122
4.3.2.	<i>Isu atau Kebijakan Nasional.....</i>	124
4.3.3.	<i>Isu Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.....</i>	125
4.3.4.	<i>Isu Strategis Lima Tahunan Kabupaten Kutai Kartanegara</i>	126

BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1	VISI	132
5.2	MISI	132
5.3.	TUJUAN DAN SASARAN	133
5.3.1.	<i>Tujuan dan Sasaran Pada Misi Pertama.....</i>	134
5.3.2.	<i>Tujuan dan Sasaran Pada Misi Kedua</i>	134
5.3.3.	<i>Tujuan dan Sasaran Pada Misi Ketiga</i>	135
5.3.4.	<i>Tujuan dan Sasaran Pada Misi Keempat</i>	135
5.3.5.	<i>Tujuan dan Sasaran Pada Misi Kelima</i>	136
5.3.6.	<i>Tujuan dan Sasaran Pada Misi Keenam</i>	136
5.3.7.	<i>Tujuan dan Sasaran Pada Misi Ketujuh</i>	137

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1.	Reformasi Birokrasi	142
6.1.1.	<i>Sasaran Meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah</i>	142
6.1.2.	<i>Sasaran Optimalnya Akuntabilitas dan Pengawasan Daerah</i>	144

6.1.3.	Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat	145
6.1.4.	Sasaran Optimalnya Pengendalian Penduduk dan Pelayanan Keluarga Berencana	145
6.1.5.	Sasaran Optimalnya Kerjasama Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha Untuk Menjaga Keamanan, Ketertiban, dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	145
6.2.	Daya Saing Sumberdaya Manusia.....	145
6.2.1.	Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan	145
6.2.2.	Sasaran Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat.....	146
6.2.3.	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	147
6.2.4.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja serta kesempatan dan perluasan kesempatan kerja	150
6.2.5.	Meningkatnya Prestasi dan Kreativitas Pemuda Dan Olahraga.....	151
6.2.6.	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Menuju Desa Berketahanan Sosial.....	152
6.2.7.	Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	153
6.2.8.	Meningkatnya Keterpaduan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Antar Sektor Antar Wilayah.....	154
6.3.	Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah	154
6.3.1.	Sasaran Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	154
6.3.2.	Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.....	155
6.3.3.	Sasaran Meningkatnya Kerjasama Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pembangunan Daerah	155
6.4.	Transformasi Struktur Ekonomi Daerah	155
6.4.1.	Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola, dan Pertumbuhan Sektor Pertanian dalam Arti Luas	156
6.4.2.	Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan:	164
6.4.2.	Meningkatnya Potensi dan Daya Dukung Pariwisata Daerah serta Kunjungan Wisata di Kutai Kartanegara	170
6.4.3.	Meningkatnya Pengembangan Seni dan Budaya Lokal Dalam Rangka Mendukung Destinasi Wisata dan Kelestarian Tradisi Kehidupan Masyarakat	177
6.4.4.	Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan Berbasis Industri Kreatif dan Potensi Daerah	178
6.4.5.	Meningkatnya Akses, Tata Niaga, dan Infrastruktur Perdagangan Antar Wilayah dan Antar Daerah	178
6.4.6.	Meningkatnya Pengembangan Industri Pengolahan Pangan, Peternakan, Perikanan, Pengolahan Pakan, dan Potensi Daerah yang Berdaya Saing	178
6.5.	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik.....	179
6.5.1.	Meningkatnya Interkoneksi Antar Wilayah	179
6.5.2.	Meningkatnya Aksesibilitas Antar Wilayah Serta Kualitas Pelayanan Perhubungan	179
6.5.3.	Terwujudnya koneksi jaringan komunikasi, internet, dan pengembangan kawasan smart city.....	180
6.5.4.	Meningkatnya Layanan Kebutuhan Dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan Dan Perdesaan.....	181
6.6.	Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan	183

6.6.1.	<i>Meningkatnya Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Serta Pengendalian Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan</i>	183
6.6.2.	<i>Meningkatnya Ketersediaan Sumber Energi Baru dan Terbarukan</i>	185
6.7.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	186
6.7.1.	<i>Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Perempuan Membangun, Kualitas Kesetaraan Gender, dan Perlindungan Perempuan Dan Anak</i>	186

BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1.	Reformasi Birokrasi	189
7.2.	Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah	189
7.3.	Transformasi Struktur Ekonomi Daerah	190
7.4.	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik	191
7.5.	Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan	192
7.6.	Daya Saing Sumberdaya Manusia	192
7.7.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	193

BAB 8 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI RENCANA PENDANAAN

BAB 9 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN

10.1.	Pedoman Transisi	365
10.2.	Kaidah Pelaksanaan	365

BAB 11 PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara	10
Tabel 2.2	Topografi Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara	11
Tabel 2.3	Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Kelas Ketinggian dari Permukaan Laut.....	12
Tabel 2.4	Nama Sungai Yang Melintasi Kabupaten Kutai Kartanegara.....	12
Tabel 2.5	Nama Sungai Yang Melintasi Kabupaten Kutai Kartanegara.....	13
Tabel 2.6	Jumlah Curah Hujan Dan Hari Hujan Tahun 2009 – 2015.....	13
Tabel 2.7	Penggunaan Lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011.....	14
Tabel 2.8	Potensi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara	15
Tabel 2.9	Kejadian Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara	17
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2010-2015.....	18
Tabel 2.11	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Jumlah Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk Tahun 2015	19
Tabel 2.12	Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2011-2016	19
Tabel 2.13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015	20
Tabel 2.14	PDRB Per Kapita Tahun 2011-2015 Kabupaten Kutai Kartanegara (Juta Rupiah) .	23
Tabel 2.15	Indeks Gini Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009-2015.....	23
Tabel 2.16	Prosentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan Tahun 2009-2014.....	25
Tabel 2.17	Angka Kriminalitas dari tahun 2010-2015	25
Tabel 2.18	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2014.....	26
Tabel 2.19	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010-2015 (%)	28
Tabel 2.20	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015 (%)	29
Tabel 2.21	Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Kutai Kartanegara 2010-2015.....	29
Tabel 2.22.	Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2010-2015 Kabupaten Kutai Kartanegara ...	31
Tabel 2.23	Jumlah Kelompok Kesenian Berdasarkan Jenis.....	32
Tabel 2.24	Gedung Sarana Olahraga Di Kabupaten Kutai Kartanegara	32
Tabel 2.25	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015.....	33
Tabel 2.26	Rasio Murid Terhadap Guru Tahun 2014 Dibagi Per Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara	34
Tabel 2.27	Persentase Angka Putus Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2011- 2015	35
Tabel 2.28	Angka Kelulusan Tahun 2011 - 2015 Per Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara	36
Tabel 2.29	Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2011-2015	37
Tabel 2.30	Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kutai Kartanegara Tahun 2013-2015	37

Tabel 2.31	Rasio Puskesmas dan Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015.....	38
Tabel 2.32	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Tahun 2011-2014	40
Tabel 2.33	Rasio Tenaga Medis Tahun 2009-2013 Kabupaten Kutai Kartanegara	41
Tabel 2.34	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015.....	41
Tabel 2.31	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015	42
Tabel 2.36	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015	42
Tabel 2.37	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015.....	43
Tabel 2.38	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015	43
Tabel 2.39	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015	44
Tabel 2.40	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015	44
Tabel 2.41	Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015	45
Tabel 2.42	Kondisi Jalan Menurut Status di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010-2015.....	45
Tabel 2.43	Kondisi Jalan Menurut Permukaan Jalan dan Kondisi di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010-2015	46
Tabel 2.44	Kondisi Jembatan Di Kabupaten Kutai Kartanegara	46
Tabel 2.45	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk.....	47
Tabel 2.46	Kondisi Irigasi di Kabupaten Kutai Kartanegara	47
Tabel 2.47	Luas irigasi dalam kondisi baik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015 ...	48
Tabel 2.48	Jumlah Rumah Layak Huni 2010-2015	50
Tabel 2.49	Indikator Kinerja Bidang Perhubungan tahun 2010-2012 di Kabupaten Kutai Kartanegara	52
Tabel 2.50	Jumlah Sertifikat Tanah Menurut Hak Atas Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2009-2015.....	54
Tabel 2.51	Kepemilikan Kartu Tanda penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010-2015	55
Tabel 2.52	Kepemilikan Akta kelahiran Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010-2015..	56
Tabel 2.53	Rasio Akseptor Aktif & Baru KB Per Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kutai Kartanegara	56
Tabel 2.54	Cakupan Peserta KB Aktif Kabupaten Kutai Kartanegara 2015.....	57
Tabel 2.55	Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I tahun 2011- 2013.....	58
Tabel 2.56	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2015	60
Tabel 2.57	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009-2015.	60
Tabel 2.58	Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 2009-2014.....	61
Tabel 2.59	Realisasi Penanaman Modal Asing Tahun 2010-2014	62

Tabel 2.60	Jumlah Organisasi Pemuda Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Dirinci Per Kecamatan.....	63
Tabel 2.61	Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda Kabupaten Kutai Kartanegara	63
Tabel 2.62	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009-2015 (revisi)	64
Tabel 2.63	Banyaknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Menurut Kecamatan di Kutai Kartanegara Tahun 2015	64
Tabel 2.64	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015.....	66
Tabel 2.65	Jumlah Koleksi Buku di Perustakaan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015	67
Tabel 2.66	Produktivitas Padi Per Hektar Kabupaten Kutai Kartanegara, 2009-2015.....	71
Tabel 2.67	Kontribusi Sektor Pertanian Pada PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2000-2011.....	71
Tabel 2.68	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara, 2011-2015 (juta rupiah).....	72
Tabel 2.69	Luas Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Hutan (Ha).....	73
Tabel 2.70	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB, 2011-2015 (Juta Rupiah).....	73
Tabel 2.71	Kontribusi Sektor Energi dan Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara, 2011-2015 (juta rupiah)	74
Tabel 2.72	Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2010-2014 Dirinci Berdasarkan Tempat Wisata	74
Tabel 2.73	Pertumbuhan Sektor Pariwisata Pada PDRB Tahun 2011-2015 Kabupaten Kutai Kartanegara (Dalam Juta Rupiah)	75
Tabel 2.74	Produksi Ikan Menurut Jenis Budidaya di Kabupaten Kutai Kartanegara (ton), 2010-2015.....	76
Tabel 2.75	Nilai Kontribusi Sektor Industri Tahun 2009-2015.....	77
Tabel 2.76	Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan Menurut Daerah Kota dan Pedesaan, 2013-2015.....	78
Tabel 2.77	Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin, Lapangan Usaha, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2009 – 2014.....	79
Tabel 2.78	Persentasi Konsumsi RT Non Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara 2012-2014 ..	79
Tabel 2.79	Produktivitas Per Sektor Kabupaten Kutai Kartanegara	80
Tabel 2.80	Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Kabupaten Kutai Kartanegara 2009-2011.....	82
Tabel 2.81	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2011.....	82
Tabel 2.82	Persentase luas Wilayah Produktif Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 s.d 2012.....	83
Tabel 2.83	Persentase luas Wilayah Produktif Tahun 2008 s.d 2012 Menurut Kecamatan	84
Tabel 2.84	Nama dan Klasifikasi Hotel di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014	85
Tabel 2.85	Rasio Penduduk dan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih.....	87
Tabel 2.86	Data Operasional PLN Wilayah Pengelolaan Rayon Tenggarong	88

Tabel 2.87	Data Rasio Desa Berlistrik Dan Rasio Elektrifikasi Kabupaten Kutai Kartanegara (Revisi)	89
Tabel 2.88	Persentase Rumah Tangga Menurut Akses Terhadap Teknologi Komunikasi dan Informasi, 2012-2014	90
Tabel 2.89	Angka Kriminalitas Selama 1 (satu) Tahun di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2010-2011	90
Tabel 2.90	Rasio lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Kutai Kartanegara	92
Tabel 2.91	Rasio Ketergantungan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2008-2012	92
Tabel 3.1	Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015 (Rp.juta).....	95
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2015	96
Tabel 3.3	Perkembangan Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 -2015 (Rp.juta).....	98
Tabel 3.4	Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2011-2015	99
Tabel 3.5	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015..	101
Tabel 3.6	Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010-2014 (Rp.juta)	102
Tabel 3.7	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010-2014	104
Tabel 3.8	Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015.....	111
Tabel 3.9	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun Anggaran 2011-2015.	112
Tabel 3.10	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	114
Tabel 3.11	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2011-2015.....	114
Tabel 3.12	Analisis Proporsi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	115
Tabel 3.13	Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015	116
Tabel 3.14	Surplus/Defisit Riil APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015	116
Tabel 3.15	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016-2021 (Rp.Juta)	117
Tabel 3.16	Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016-2021 (Rp.Juta).....	118
Tabel 3.17	Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016-2021 (Rp.Juta).....	118
Tabel 3.18	Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016-2021.....	119
Tabel 3.19	Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Tahun Anggaran 2016-2021	120
Tabel 3.20	Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016-2021	120
Tabel 4.1	Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara	127
Tabel 5.1.	Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.....	133

Tabel 5.2.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, beserta Indikator dan Target Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021	137
Tabel 6.1	Arah Kebijakan: Meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah	144
Tabel 6.2	Arah Kebijakan: Optimalnya Akuntabilitas dan Pengawasan Daerah	145
Tabel 6.3	Arah Kebijakan Kewilayahan: Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan	146
Tabel 6.4	Arah Kebijakan Kewilayahan: Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat	147
Tabel 6.5	Arah Kebijakan Kewilayahan: Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan.....	148
Tabel 6.6	Arah Kebijakan Kewilayahan: Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja Serta Kesempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	150
Tabel 6.7	Arah Kebijakan Kewilayahan: Meningkatnya Prestasi dan Kreativitas Pemuda dan Olahraga	151
Tabel 6.8	Arah Kebijakan Kewilayahan: Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Menuju Desa Berketahanan Sosial	152
Tabel 6.9	Arah Kebijakan Kewilayahan: Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	153
Tabel 6.10	Arah Kebijakan Kewilayahan: Meningkatnya Keterpaduan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Antar Sektor Antar Wilayah	154
Tabel 6.11	Arah Kebijakan Kewilayahan: Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola, dan Pertumbuhan Sektor Pertanian	161
Tabel 6.12	Arah Kebijakan Kewilayahan: Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola, dan Pertumbuhan Sektor Kelautan dan Perikanan	165
Tabel 6.13	Arah Kebijakan Kewilayahan : Meningkatnya Potensi dan Daya Dukung Pariwisata Daerah serta Kunjungan Wisata di Kutai Kartanegara.....	170
Tabel 6.14	Arah Kebijakan Kewilayahan: Pengembangan Kebijakan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang Komprehensif	171
Tabel 6.15	Arah Kebijakan Kewilayahan Pengembangan Pasar Baru dan Revitalisasi Pasar Eksisting	172
Tabel 6.16	Arah Kebijakan Kewilayahan: Penyediaan Fasilitas dan Sarana ODTW secara Komprehensif.....	173
Tabel 6.17	Arah Kebijakan Kewilayahan: Penyiapan Pelaku Usaha Pariwisata Lokal dan Masyarakat sebagai Tuan Rumah Destinasi.	175
Tabel 6.18	Arah Kebijakan Kewilayahan: Optimalisasi Peningkatan Nilai Tambah Usaha Jasa dan Produksi Kreatif Pendukung Pariwisata	176
Tabel 6.19	Arah Kebijakan Kewilayahan: Meningkatnya Pengembangan Seni dan Budaya Lokal Dalam Rangka Mendukung Destinasi Wisata dan Kelestarian Tradisi Kehidupan Masyarakat	177
Tabel 6.20	Arah Kebijakan Kewilayahan: Meningkatnya Interkoneksi Antar Wilayah	179
Tabel 6.21	Arah Kebijakan Kewilayahan: Meningkatnya Aksesibilitas Antar Wilayah serta Kualitas Pelayanan Perhubungan.....	180

Tabel 6.22	Arah Kebijakan Kewilayahan: Terwujudnya koneksitas jaringan komunikasi, internet, dan pengembangan kawasan smart city	181
Tabel 6.23	Arah Kebijakan Kewilayahan: Meningkatnya Layanan Kebutuhan Dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan.....	182
Tabel 6.24	Arah Kebijakan Kewilayahan: Meningkatnya Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Serta Pengendalian Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan	184
Tabel 6.25	Arah Kebijakan Kewilayahan: Meningkatnya Ketersediaan Sumber Energi Baru dan Terbarukan.....	185
Tabel 6.26	Arah Kebijakan Kewilayahan: Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Perempuan Membangun, Kualitas Kesenjangan Gender, dan Perlindungan Perempuan Dan Anak.....	186

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah.....	5
Gambar 1.2	Agenda/Tema Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025.....	6
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara	11
Gambar 2.2	Perkembangan Inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara 2010-2015 (YOY) revisi.....	22
Gambar 2.3	Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komoditi Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2010-2015 (YOY) revisi	22
Gambar 2.4	Indeks Williamson Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 - 2013.....	24
Gambar 2.5	Harapan Lama Sekolah	27
Gambar 2.6	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2014.....	28
Gambar 2.7	Penduduk 10+ Tahun Yang Tamat Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015 (%)	29
Gambar 2.8	Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2014	30
Gambar 2.9	Rasio Murid dan Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara 2009-2014.....	34
Gambar 2.10	Pendidikan Usia Dini (PAUD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2009-2015	35
Gambar 2.11	Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 – 2015	38
Gambar 2.12	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2010 – 2015	48
Gambar 2.13	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2010 – 2015	49
Gambar 2.14	Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2010–2015	49
Gambar 2.15	Lingkungan Pemukiman Kumuh Tahun 2010 – 2015	50
Gambar 2.16	Rumah Layak Huni Tahun 2010 – 2015	51
Gambar 2.17	Ruang Terbuka Hijau Tahun 2010 – 2015	51
Gambar 2.18	Persentase Penanganan Sampah Tahun 2012 – 2015	53
Gambar 2.19	Penegakan Hukum Lingkungan Tahun 2010 – 2015.....	53
Gambar 2.20.	Sarana sosial : panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	59
Gambar 2.2	Jumlah Koperasi Tahun 2009-2014.....	61
Gambar 2.22	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	62
Gambar 2.23	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	67
Gambar 2.24	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Ditangani 2011-2015 ..	68
Gambar 2.25	Ketersediaan Pangan Utama Per Tahun (Kg)	69
Gambar 2.26	Pembinaan Politik, LSM, Ormas dan OKP.....	69
Gambar 2.27	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya, Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya dan Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang dilestarikan .	70
Gambar 2.28	Penerapan Arsip Secara Baku di SKPD	70
Gambar 2.29	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010-2015 (ton)	76

Gambar 2.30	Jumlah Transmigrasi Kutai Kartanegara 2010-2015.....	77
Gambar 2.31	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kabupaten Kutai Kartanegara 2014	80
Gambar 2.32	Indeks Diterima Petani (It), Indeks Dibayar Petani (Ib) dan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Kutai Kartanegara, Januari-Desember 2015.....	81
Gambar 2.33	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012	88
Gambar 3.1	Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2015	96
Gambar 3.2	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2011-2015	97
Gambar 3.3	Struktur Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015.....	99
Gambar 3.4	Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2011-2015	100
Gambar 7.1.	Paradigma Gerbang Raja II.....	188

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan RPJMD, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

1.1. LATAR BELAKANG

Dinamika perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang terjadi begitu cepat menuntut perlunya sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif, dan mengarah pada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi dan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber dana pembangunan yang jumlahnya terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menyusun perangkat peraturan perundangan di bidang perencanaan pembangunan, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Dalam tataran operasional, perangkat peraturan perundangan nasional tentang perencanaan pembangunan tersebut mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam horizon waktu jangka panjang, menengah dan tahunan yang meliputi; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) yang merupakan rencana pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Terkait dengan dengan hal tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih dalam satu periode. Hal ini juga sesuai dengan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang " Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang menyatakan bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi, misi, dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu, proses penyusunannya harus komprehensif dengan pendekatan spesifik sebagai berikut;

1. **Pendekatan politik** yang memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah ke dalam rencana pembangunan jangka menengah;
2. **Pendekatan teknokratik** dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu;

3. **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. **Pendekatan atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up)** dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

Sesuai dengan uraian diatas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara Periode tahun 2016-2021, yaitu; **Ibu Hj. Rita Widayarsi, Ph.D dan Bapak Drs Edi Damansyah, M.Si.** Dilantik oleh Gubernur Kalimantan Timur pada tanggal **17 Pebruari 2016**.

Penjabaran visi, misi dan program tersebut juga diselaraskan dengan sasaran prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

Selanjutnya RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 akan menjadi salah satu instrumen yang sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu masa bakti kepala daerah, agar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat di lingkungan regional, nasional maupun global. Dalam tataran teknis, Dokumen RPJMD ini selanjutnya juga dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

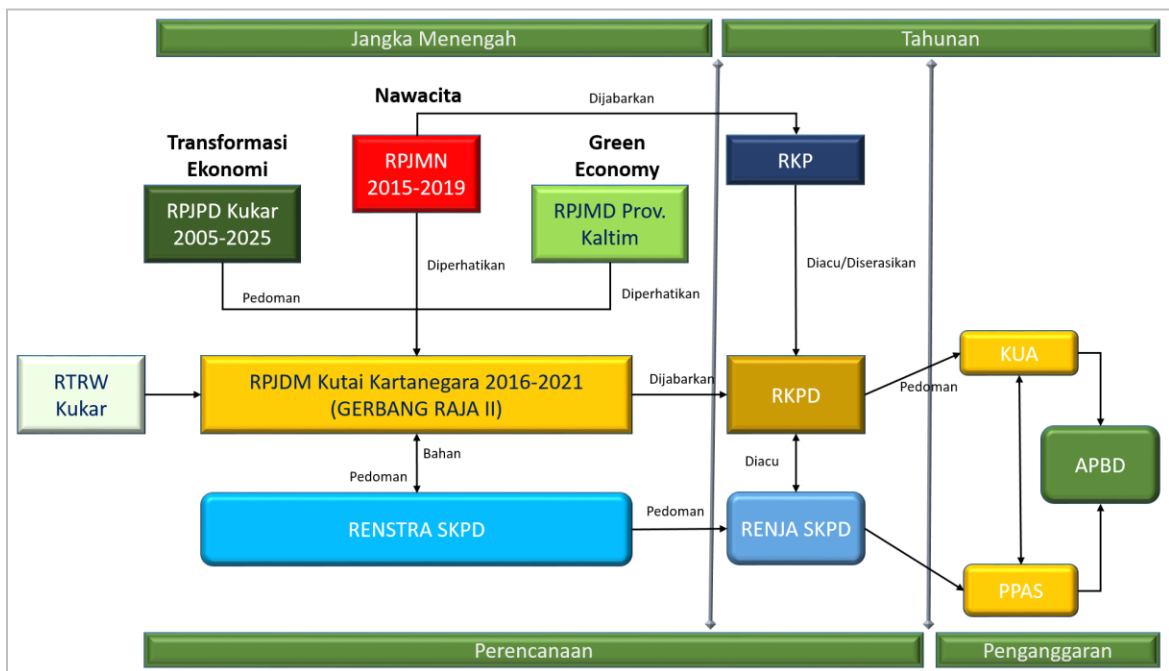
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103).
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang 23 tahun 2014.
23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 07 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2013 -2018;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 14);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 11);

32. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
33. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah



1.1.1. Keterkaitan RPJMD dan RPJPD

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 merupakan RPJMD ketiga dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara masa bakti tahun 2016- 2021, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Tentang RPJPD.

Berikut ini adalah Gambar Pentahapan agenda pembangunan daerah dalam RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2005-2025.

Gambar 1.2 Agenda/Tema Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025

PERIODE I TAHUN 2005-2010	• Menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan terselenggaranya pemerintahan kabupaten yang baik dan bersih berlandaskan asas keadilan, kesetaraan, keseragaman, dan demokrasi
PERIODE II TAHUN 2011-2015	• Menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan tersedianya sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, beradab, demokratis, dan berbudaya tinggi.
PERIODE III TAHUN 2016-2020	• Menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan meningkatnya peranan sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata sebagai leading sector pembangunan daerah yang berbasis kerakyatan dan lestari
PERIODE IV TAHUN 2021-2025	• Menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan terciptanya tata pemerintahan yang baik, berkurangnya kemiskinan, tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat, dan pemeliharaan lingkungan hidup yang lestari

1.1.2. Keterkaitan RPJMD dan RPJM Nasional Tahun 2015-2019

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 memperhatikan 9 prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun 2015-2019. Hal ini untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara dengan kebijakan pembangunan nasional. Prioritas pembangunan nasional 2015-2019 yang dinamai dengan NAWA CITA, antara lain :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

1.1.3. Keterkaitan RPJMD Kutai Kartanegara dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 juga tidak lepas dari visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Kaltim tahun 2013-2018. Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2013-2018 adalah; Mewujudkan Kaltim Sejahtera Yang Merata Dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri Dan Energi Ramah Lingkungan. Sedangkan misi pembangunan jangka menengah daerah, antara lain;

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi;

2. *Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan;*
3. *Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata;*
4. *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik; dan*
5. *Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim*

1.1.4. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 memperhatikan dan mempertimbangkan pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Kaltim dan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara juga memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan.

1.1.5. Keterkaitan RPJMD dengan Renstra SKPD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara. Renstra SKPD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan SKPD disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Rencana Strategis SKPD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

1.1.6. Keterkaitan RPJMD dengan RKPD

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2021 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran; serta bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terdiri dari 11 (sebelas) bab, sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan

- perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah.
- BAB 3 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**
Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.
- BAB 4 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**
Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.
- BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**
Bab ini menjelaskan visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan indikator-indikator terkait.
- BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
- BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**
Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan daerah yang akan direncanakan.
- BAB 8 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**
Dalam Bab ini diuraikan hubungan urusan Pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab SKPD.
- BAB 9 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**
Dalam bab ini ditetapkan dan dijelaskan mengenai indikator kinerja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam 5 (lima) tahun ke depan.
- BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**
Bab terakhir ini memuat pedoman transisi implementasi RPJMD dari periode sebelum dan sesudahnya, serta dan kaidah pelaksanaannya.
- BAB 11 PENUTUP**

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

1.1.7. Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan dari Bupati/Wakil Bupati terpilih masa bakti 2016-2021, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.1.8. Tujuan

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai pedoman bagi seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun Renstra SKPD periode 2016-2021;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun kedepan;

3. *Menterjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPD tahun 2016-2021;*
4. *Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021;*
5. *Menetapkan indikator kinerja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kutai Kartanegara periode 2016-2021.*
6. *Sebagai pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama Tahun 2016-2021;*
7. *Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;*
8. *Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala SKPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah;*
9. *Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara;*
10. *Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran DPRD dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.*

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini memberikan gambaran tentang dinamika kondisi umum Kabupaten Kutai Kartanegara, yang meliputi; aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Gambaran umum daerah ini selanjutnya digunakan sebagai dasar bagi pengembangan rencana target pembangunan dalam berbagai urusan kewenangan pemerintah daerah.

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas, Batas Wilayah, Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Kutai Kartanegara terletak antara 115°26'28" Bujur Timur sampai dengan 117°36'43" Bujur Timur dan 1°28'21" Lintang Utara sampai dengan 1°08'06" Lintang Selatan. Berdasarkan UU nomor 20 Tahun 2012, Kabupaten Kutai Kartanegara adalah salah satu kabupaten di Kalimantan Timur.

Luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 27.263,10 km² dan luas perairan yaitu ± 4.097 km². Wilayah administrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 18 kecamatan dan 237 desa/kelurahan yang terdiri dari 44 kelurahan, 185 desa definitif dan 8 desa persiapan. Berikut ini ditampilkan tabel pembagian luas wilayah per kecamatan dan jumlah desa/kelurahan dan gambar peta Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2.1 Luas wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Desa
		Km ²	Persen	
1.	Samboja	1045,9	3,51	23
2.	Muara Jawa	754,5	2,53	8
3.	Sanga-sanga	233,4	0,78	5
4.	Loa Janan	644,2	2,16	8
5.	Loa Kulu	1405,7	4,71	15
6.	Muara Muntai	928,6	3,11	13
7.	Muara Wis	1108,2	3,71	7
8.	Kota Bangun	1143,7	3,83	21
9.	Tenggarong	398,1	1,33	14
10.	Sebulu	859,5	2,88	14
11.	Tenggarong Seberang	437	1,46	18
12.	Anggana	1798,8	6,03	8
13.	Muara Badak	939,09	3,15	13
14.	Marang Kayu	1165,7	3,91	11
15.	Muara Kaman	3410,1	11,43	20
16.	Kenohan	1302,2	4,36	9
17.	Kembang Janggut	1923,9	6,45	11
18.	Tabang	7764,50	34,64	19
Kabupaten		27.263,10	100,00	237

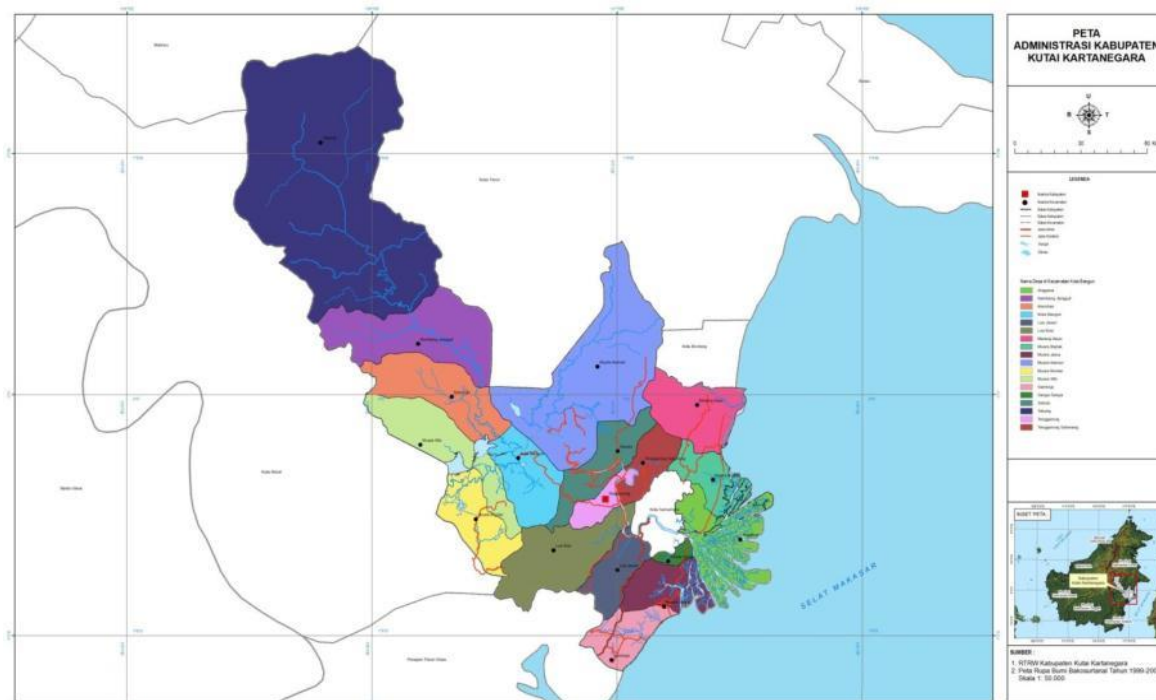
Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2015

Batas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara secara administrasi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Malinau.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur dan Selat Makasar.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara

Sumber: Peta RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara



b. Topografi

Secara topografi, wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar terletak di daerah aliran sungai (DAS), seperti Sungai Mahakam dan Sungai Belayan apabila dibandingkan dengan daerah lereng/punggung bukit dan daerah dataran. Gambaran topografi per wilayah kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Topografi Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara

	Kecamatan	Lembah/ DAS	Lereng/ Punggung Bukit	Dataran	Jumlah
1	Semboja	-	12	1	13
2	Muara Jawa	2	-	-	2
3	Sanga sanga	1	-	2	3
4	Loa Janan	2	1	5	8
5	Loa Kulu	-	-	12	12
6	Muara Muntai	9	-	4	13
7	Muara Wis	7	-	-	7
8	Kota Bangun	9	9	2	20
9	Tenggarong	2	2	9	13
10	Sebulu	4	7	2	13
11	Tenggarong Seberang	10	3	5	18
12	Anggana	4	-	1	5
13	Muara Badak	-	1	7	8
14	Marang Kayu	-	5	2	7
15	Muara Kaman	15	2	2	19
16	Kenohan	7	-	1	8
17	Kembang Janggut	11	-	-	11
18	Tabang	19	-	-	19
	Jumlah	102	42	55	199

Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2016

Berdasarkan karakteristik topografi wilayah kecamatan tersebut, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar bergelombang sampai berbukit dengan kelerengan landai sampai curam.

Daerah dengan kemiringan datar sampai landai terdapat di beberapa bagian, yaitu beberapa kawasan pantai dan di sebagian besar daerah aliran Sungai Mahakam. Pada wilayah pedalaman dan perbatasan umumnya merupakan pegunungan dengan ketinggian 500-2000 meter dari permukaan laut (dpl).

Ketinggian tanah dari permukaan laut berpengaruh terhadap pemanfaatan tanah di suatu wilayah. Semakin tinggi suatu wilayah dari permukaan laut, maka jenis komoditi yang dapat diusahakan dan diproduksi semakin terbatas. Ketinggian tanah dari permukaan laut bervariasi dari kelas 0 hingga lebih dari 1000 meter.

Tabel 2.3 Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Kelas Ketinggian dari Permukaan Laut

No.	Kelas Ketinggian (m)	Luas (Ha)	Persentase
1.	0 - 7	202.281	7.42
2.	7 - 25	837.947	30.74
3.	25 - 100	682.027	25.02
4.	> 1000	1.004.055	36.83
Jumlah		2.726.310	100.00

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010

c. Geologi

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Soil Taxonomi USDA tergolong ke dalam jenis tanah: ultisol, entisol, histosol, inseptisol, dan mollisol, atau menurut Lembaga Penelitian Tanah Bogor terdiri dari jenis tanah: podsolik, alluvial, andosol, dan renzina. Dari hasil analisis data pokok Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2002 diperkirakan luas dan sebaran jenis tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh 4 (empat) jenis tanah yaitu organosol gley humus 3.492,35 hektar (12,81%); alluvial 759.507 hektar (27,86%); kompleks podsolik merah kuning, latosol dan litosol 755.705 hektar (27,72 %) dan podsolik merah kuning 861.863 hektar (31,61 %).

d. Hidrologi

Karakteristik iklim di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah iklim hutan tropika humida yang bercirikan curah hujan cukup tinggi dengan penyebaran yang merata sepanjang tahun, sehingga tidak terdapat pergantian musim yang jelas dengan curah hujan tahunan berkisar antara 2.000 – 4.000 mm.

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 4 (empat) jenis perairan yaitu sungai, danau, rawa dan laut. Sungai Mahakam merupakan sungai induk dan sungai yang terpanjang, dengan panjang sekitar 920 Kilometer. Sungai ini masih sangat berperan sebagai urat nadi transportasi terutama untuk menuju Kecamatan Muara Wis dan Kecamatan Muara Muntai, serta sebagian besar kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Cabang-cabang Sungai Mahakam sangat banyak dan salah satu diantaranya adalah Sungai Belayan yang bermuara di Kecamatan Kota Bangun. Anak Sungai Mahakam ini merupakan sarana transportasi utama menuju Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang. Jumlah sungai yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar 14 sungai.

Tabel 2.4 Nama Sungai Yang Melintasi Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Sungai		Panjang (km)		Lebar (m)	Kedalaman (m)
		Seluruhnya	Yang dapat dilayari		
1.	Sungai Mahakam	573	540	100-800	5-30
2.	Sungai Loa Haur/Loa Janan	120	80	10-30	2-4
3.	Sungai Jembayan/ Loa Kulu	180	112	20-80	2-6
4.	Sungai Sabintulung/Muara Kaman	15	15	6-15	2-4
5.	Sungai Kedang Rantau/ Muara Kaman	132	132	30-100	3-10
6.	Sungai Pela/Kota Bangun	10	10	8-15	3-7
7.	Sungai Kahala/Kenohan	77	59	12-30	3-10
8.	Sungai Batangan Muntai /Muara Muntai	10	10	8-15	3-7
9.	Sungai Bongon	20	17	3-7	2-6
10.	Sungai Belayan/ Tabang	319	266	40-150	3-10

Nama Sungai	Panjang (km)		Lebar (m)	Kedalaman (m)
	Seluruhnya	Yang dapat dilayari		
11. Sungai Muara Kembang	30	21	30-100	5-10
12. Sungai Bambang/Dondang	65	57	30-100	5-10
13. Sungai Kutai Lama/Anggana	50	32	5-15	5-10
14. Sungai Sanga-Sanga	70	55	7-12	3-7

Sumber: BPS 2016

Danau di Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah sekitar 26 buah. Danau-danau tersebut merupakan penghasil ikan yang paling utama, dimana luas keseluruhannya sekitar 29.000 hektar. Dua danau yang cukup terkenal sebagai penghasil ikan adalah Danau Semayang dengan luas 13.000 hektar dan Danau Melintang dengan luas 11.000 hektar. Perairan berupa rawa-rawa terdiri dari rawa pasang surut (tidalswamp) dengan luas 299.795 hektar tesebar di kecamatan wilayah pantai (sekitar delta mahakam) dan rawa (swamp) seluas 269.171 hektar yang tersebar di sekitar Kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai, Kahala, dan Kecamatan Kembang Janggut.

Tabel 2.5 Nama Sungai Yang Melintasi Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Danau		Luas (ha)
1.	Ngayan Tuha	920
2.	Mulupan	24
3.	Siran	39
4.	Man	29
5.	Melintang	11,000
6.	Semayang	13,000
7.	Ubis	38
8.	Karang	39
9.	Merambi	51
10.	Puan Rabuk	319
11.	Loa Kang	23
12.	Perian	198
13.	Tempatung	119
14.	Batu Bumbun	182
15.	Kajo	32
16.	Tanah Liat	49

Sumber: BPS 2016

Perairan laut terdapat di Kecamatan Anggana, Sanga-sanga, Muara Jawa, Samboja, Muara Badak dan Marangkayu. Data mengenai kedalaman laut, luas laut dan kandungan potensinya, serta kecepatan arus laut sampai sekarang belum banyak diketahui.

e. Klimatologi

Iklim wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat dipengaruhi oleh iklim tropis basah yang bercirikan curah hujan cukup tinggi dengan penyebaran merata sepanjang tahun, sehingga tidak terdapat pergantian musim yang jelas.

Iklim di Kabupaten Kutai Kartanegara dipengaruhi oleh letak geografinya yakni iklim hutan tropika dengan suhu udara rata-rata 260 C, dimana perbedaan antara suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai 500 – 700 C. Jumlah curah hujan wilayah ini berkisar 1.652-3.232 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata- rata 122-209 hari/tahun. Curah hujan terendah yaitu dari 0 – 2.000 mm/tahun tersebar di wilayah pantai dan semakin meningkat ke wilayah pedalaman atau ke arah barat.

Tabel 2.6 Jumlah Curah Hujan Dan Hari Hujan Tahun 2009 – 2015

Tahun	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
2015	1.652	140

Tahun	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
2014	2.014	130
2013	2.329	151
2012	3.232	209
2011	2.157	127
2010	2.526	146
2009	2.045	122

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

f. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diklasifikasikan ke dalam kawasan lindung dan budidaya. Untuk kawasan lindung yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, terdiri atas:

- Hutan Lindung*
- Cagar Alam Sedulang di Kecamatan Muara Kaman;*
- Taman Nasional Kutai di Kecamatan Muara Kaman; dan*
- Taman Hutan Raya Bukit Suharto.*

Tabel 2.7 Penggunaan Lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011

NO	PEMANFAATAN RUANG	LUAS (%)	%
A	Kawasan Lindung		
A.1	Hutan Lindung	204,64	7,61
A.2	Cagar Alam	32,038	1,18
A.3	Taman Nasional	50,726	1,86
A.4	Taman Hutan Raya	52,603	1,93
	Total Kawasan Lindung	340,007	12,47
B	Kawasan Budidaya		
B.1	Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK):		
	Hutan Produksi Tetap (termasuk kawasan hutan bakau/fungsi lindung)	787.676	28,89
	Hutan Produksi Terbatas	600	22,01
	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	56.453	2,07
	Total KBK	1.444.128	52,97
B.2	Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK):		
	Pertanian	81.558	2,99
	Perkebunan	397.404	14,58
	Pertambangan	378.655	13,89
	Permukiman	19.591	0,72
	Tubuh Air (perikanan)	64.957	2,38
	Total KBNK	942.165	34,56
	Total Kawasan Budidaya	2.386.293	87,53
	Total (Kawasan Lindung+Kawasan Budidaya)	2.726.300	100

Sumber: RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara 2013-2033

Sedangkan untuk klasifikasi kawasan budidaya, terdiri atas Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK). KBK terbagi lagi menjadi kawasan Hutan Produksi tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi. Sedangkan untuk KBNK meliputi pertanian, perkebunan, pertambangan permukiman, dan tubuh air (termasuk untuk budidaya perikanan).

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033 Potensi Pengembangan Wilayah berdasarkan Jenis Kawasan, tujuan, dan Lokasi dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.8 Potensi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara

Jenis Kawasan	Tujuan Budidaya	Rencana Pengelolaan Ruang	Lokasi
Kawasan Lindung			
Kawasan Hutan Lindung Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan Suaka Alam, pelestarian Alam, dan Cagar Budaya		Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Rehabilitasi kawasan lindung Reboisasi kawasan lindung	Kec. Samboja Kec. Marang Kayu Kec. Kembang Janggut Kec. Tabang
Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK)			
Hutan Produksi Tetap Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi yang dapat dikonversi	Memfaatkan hasil hutan yang eksploitasinya dapat dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam Memfaatkan hasil hutan secara terbatas yang eksploitasinya hanya dapat dilakukan dengan tebang pilih dan tanam	Penataan batas kawasan hutan produksi Pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan hutan Mengusahakan hutan produksi melalui HPH dan penerapan prinsip tebang pilih secara tepat pada kawasan hutan produksi Pengawasan secara ketat pada kewajiban reboisasi dan rehabilitasi tanah pada bekas tebangan HPH Penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lainnya	Kec. Samboja Kec. Muara Jawa Kec. Loa Janan Kec. Loa Kulu Kec. Muara Muntai Kec. Muara Wis Kec. Kota Bangun Kec. Sebulu Kec. Tenggarong Seberang Kec. Muara Badak Kec. Marang Kayu Kec. Muara Kaman Kec. Kenohan Kec. Kembang Janggut Kec. Tabang
Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)			
Kawasan tanaman pangan lahan basah	Pengembangan areal persawahan pada kawasan-kawasan yang sesuai menurut hasil analisis kesesuaian lahan didukung prasarana pengairan/irigasi	Pengembangan prasarana pengairan Pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu kawasan pertanian yang subur Perluasan areal persawahan Pengembangan usaha transmigrasi untuk menunjang pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah	Kec. Samboja Kec. Muara Jawa Kec. Sanga-sanga Kec. Loa Janan Kec. Loa Kulu Kec. Muara Muntai Kec. Muara Wis Kec. Kota Bangun Kec. Tenggarong Seberang Kec. Sebulu Kec. Muara Badak Kec. Marang Kayu Kec. Muara Kaman Kec. Kenohan Kec. Kembang Janggut Kec. Anggana
Kawasan tanaman pangan lahan kering	Mengembangkan areal tanaman lahan kering dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan	Perluasan areal pertanian lahan kering Pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan perladangan berpindah Pengembangan kawasan pertanian lahan kering sesuai dengan kesesuaian lahan secara optimal.	Kec. Muara Badak Kec. Marang Kayu Kec. Muara Kaman Kec. Kenohan Kec. Kembang Janggut Kec. Anggana
Kawasan tanaman tahunan/ perkebunan	Mengembangkan produksi perkebunan terutama untuk komoditas utama dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan	Perluasan dan peremajaan areal perkebunan Pengembangan kawasan perkebunan secara optimal sesuai dengan potensi lahannya. Pengendalian usaha perkebunan agar tetap terjaga kelestarian lingkungannya.	Kec. Muara Badak Kec. Marang Kayu Kec. Muara Kaman Kec. Kenohan Kec. Kembang Janggut Kec. Anggana
Kawasan peternakan	Mengembangkan areal peternakan atau penggembalaan dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan	Pengembangan kawasan peternakan/ penggembalaan secara intensif. Pengendalian upaya pemanfaatan lahan pada kawasan peternakan sehingga tetap terjaga kelestarian sumber makanan bagi ternak hewan besar.	
Kawasan perikanan	Mengembangkan produksi perikanan dengan memanfaatkan potensinya.	Pengembangan produksi perikanan dengan tetap memelihara kelestariannya.	
Permukiman perkotaan	Mengembangkan kawasan permukiman sebagai tempat pemusatan penduduk yang ditunjang oleh penyediaan sarana dan prasarana perkotaan	Penataan ruang kota (RUTRK, RDTRK, RTRK) berupa penyusunan rencana tata ruang kota atau peninjauan kembali rencana tata ruang kota.	

Jenis Kawasan	Tujuan Budidaya	Rencana Pengelolaan Ruang	Lokasi
	sesuai dengan hirarki dan fungsinya.	Pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota sesuai dengan rencana tata ruang kota. Peningkatan sarana dan prasarana permukiman terutama sarana air bersih, drainase, limbah, persampahan, listrik.	
Permukiman pedesaan	Mengembangkan kawasan permukiman pedesaan yang erat kaitannya dengan kegiatan budidaya pertanian yang lokasinya tersebar sesuai dengan potensinya.	Pengembangan desa-desa menjadi pusat pertumbuhan Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan fungsi dan hirarkinya. Peningkatan prasarana perhubungan dan pemasaran antar desa dan kota.	
Kawasan pertambangan	Memfaatkan kawasan dengan potensi bahan galian strategi bagi kegiatan eksplorasi, eksploitasi yang termasuk dalam wilayah kuasa pertambangan	Pemanfaatan dan pengendalian kegiatan penambangan agar tidak mengganggu fungsi lindung. Pengendalian fungsi lindung atau rehabilitasi tanah pada kawasan bekas kuasa pertambangan.	
Kawasan pariwisata	Mengembangkan kawasan pusat layanan wisata melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta atraksi kesenian tradisional dan penjualan kerajinan/ cinderamata lokal.	Penyusunan Rencana Detail Kawasan Wisata Peningkatan aksesibilitas kawasan Pengembangan promosi wisata.	

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kutai Kartanegara 2013-2033

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), disebutkan bahwa kawasan bencana alam dibedakan menjadi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir. Salah satu klasifikasi kawasan rawan bencana alam yang teridentifikasi di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kawasan rawan banjir, dan kawasan gerakan tanah kecil atau tanah longsor.

a. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan banjir yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kawasan yang mempunyai tingkat banjir yang sangat tinggi, meliputi:

1. Kecamatan Anggana;
2. Kecamatan Kenohan;
3. Kecamatan Kota Bangun;
4. Kecamatan Marang Kayu;
5. Kecamatan Muara Badak;
6. Kecamatan Muara Jawa;
7. Kecamatan Muara Kaman;
8. Kecamatan Muara Muntai;
9. Kecamatan Muara Wis;
10. Kecamatan Samboja;
11. Kecamatan Sanga-Sanga;
12. Kecamatan Sebulu;
13. Kecamatan Tenggarong; dan
14. Kecamatan Tenggarong Seberang.

Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan daerah Rawan Banjir, sehingga perlu perhatian khusus dalam perencanaan pembangunannya.

b. Kawasan Rawan Longsor

Tipologi kawasan rawan bencana longsor, diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu:

1. daerah lereng perbukit dan pegunungan,
2. daerah kaki bukit/ gunung,
3. daerah tebing sungai.

Tingkat kerawanan ditetapkan berdasarkan kajian atau evaluasi terhadap:

1. Kondisi alam (dalam hal ini kemiringan lereng, lapisan tanah/batuan, struktur geologi, curah hujan, dan geohidrologi lereng),
2. Pemanfaatan lereng,
3. Kepadatan penduduk dalam suatu kawasan.

Overview dari sebaran wilayah rawan bencana longsor menunjukkan bahwa semua pemukiman padat tidak terletak pada zona dengan tingkat kerawanan tinggi. Namun demikian banyak terdapat kegiatan penambangan yang berada pada zona longsor, sehingga akan mempertinggi potensi terjadinya bencana. Kegiatan penambangan ini dapat memicu terjadinya gerakan tanah pada zona rawan longsor.

Daerah rawan bencana tanah longsor di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat di:

1. Kecamatan Kembang Janggut;
2. Kecamatan Kota Bangun;
3. Kecamatan Loa Kulu;
4. Kecamatan Muara Kaman;
5. Kecamatan Muara Wis;
6. Kecamatan Sanga-Sanga;
7. Kecamatan Sebulu;
8. Kecamatan Tabang; dan
9. Kecamatan Tenggarong.

Berikut Jumlah kejadian bencana periode 2014 terbanyak pada kejadian kebakaran permukiman, sedangkan pada tahun 2015 terbanyak pada kejadian kebakaran lahan.

Tabel 2.9 Kejadian Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara

KECAMATAN	Jenis Bencana					
	Kebakaran Pemukiman	Kebakaran Lahan	Tanah Longsor	Banjir	Angin Topan	Orang Hilang/Tenggelam
1. Samboja	1	8	1	0	2	0
2. Muara Jawa	-	0	0	0	0	0
3. Sanga-sanga	1	0	0	1	0	0
4. Loa Janan	3	18	1	1	0	0
5. Loa Kulu	3	5	2	1	0	3
6. Muara Muntai	2	0	0	1	0	0
7. Muara Wis	0	3	0	1	0	0
8. Kota Bangun	5	1	0	1	1	0
9. Tenggarong	19	22	0	1	0	4
10. Sebulu	-	5	1	1	1	3
11. Tenggarong Seberang	5	5	0	1	0	0
12. Anggana	-	0	0	0	0	1
13. Muara Badak	1	0	0	0	0	0

KECAMATAN	Jenis Bencana					
	Kebakaran Pemukiman	Kebakaran Lahan	Tanah Longsor	Banjir	Angin Topan	Orang Hilang/ Tenggelam
14. Marang Kayu	2	0	0	1	0	0
15. Muara Kaman	2	17	0	0	0	0
16. Kenohan	3	0	0	1	0	0
17. Kembang Janggut	1	0	0	1	0	0
18. Tabang	1	0	0	0	0	0
Jumlah 2015	49	84	5	12	4	11
2014	26	3	4	5	2	1
2013	53	8	3	3	10	0

Sumber Data : Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2016

2.1.4. Demografi

Penduduk Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2015 adalah 717.789 jiwa yang terdiri atas 377,070 laki-laki dan 340,719 perempuan. Selama lima tahun terakhir, jumlah penduduk di Kutai Kartanegara selalu mengalami peningkatan.

Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2010-2015

KECAMATAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Samboja	54.515	56.621	58.171	58.665	61.837	63,467
Muara jawa	33.923	35.236	36.839	37.477	39.932	41,236
Sanga-sanga	17.588	18.269	19.229	19.628	19.965	20,477
Loa janan	56.071	58.244	61.783	63.309	61.647	62,921
Loa kulu	39.938	41.484	43.383	44.139	43.813	44,713
Muara muntai	17.315	17.985	18.668	18.924	17.645	18,336
Muara wis	8.557	8.888	9.250	9.389	8.894	8,999
Kota bangun	31.292	32.503	33.966	34.547	32.978	33,295
Tenggarong	96.209	99.931	104.044	105.626	110.900	114,307
Sebulu	36.420	37.827	38.930	39.294	38.090	38,363
Tenggarong seberang	61.441	63.812	65.014	65.293	69.477	71,467
Anggana	32.688	33.950	34.943	35.271	39.210	40,701
Muara badak	39.834	41.374	42.985	43.592	44.734	45,954
Marang kayu	23.394	24.299	25.256	25.618	23.984	24,047
Muara kaman	33.909	35.219	36.136	36.419	35.876	36,255
Kenohan	9.861	10.242	10.616	10.753	10.038	10,080
Kembang janggut	23.817	24.734	24.834	24.759	31.145	32,821
Tabang	9.908	10.290	10.417	10.428	10.274	10,349
Jumlah	626.680	650.908	676.464	683.131	700.439	717,789

Sumber Data : Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2016

Selama lima tahun terakhir sejak tahun 2010 sampai dengan 2015, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kutai Kartanegara sebesar 2,75 persen. Kecenderungan pertumbuhan penduduk

ini perlu diantisipasi pada tahun-tahun mendatang, baik dari pemenuhan hak-hak dasar maupun terkait dengan kesempatan kerja dan pemenuhan ekonomi keluarga.

Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Jumlah Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk Tahun 2015

KECAMATAN	Penduduk			Rumah Tangga	Kepadatan (Penduduk/km ²)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
Samboja	33,723	29,744	63,467	14,438	61
Muara jawa	21,260	19,976	41,236	13,879	55
Sanga-sanga	10,608	9,869	20,477	4,938	88
Loa janan	32,544	30,377	62,921	11,306	98
Loa kulu	23,093	21,620	44,713	11,820	32
Muara muntai	9,638	8,698	18,336	5,177	20
Muara wis	4,754	4,245	8,999	3,782	8
Kota bangun	17,210	16,085	33,295	9,175	29
Tenggarong	59,549	54,758	114,307	31,715	287
Sebulu	20,243	18,119	38,363	9,220	45
Tenggarong seberang	38,281	33,186	71,467	17,077	164
Anggana	21,555	19,146	40,701	6,233	23
Muara badak	23,763	22,191	45,954	7,369	49
Marang kayu	12,605	11,442	24,047	6,832	21
Muara kaman	19,258	16,997	36,255	8,380	11
Kenohan	5,335	4,745	10,080	3,547	8
Kembang janggut	18,097	14,724	32,821	11,667	17
Tabang	5,554	4,795	10,349	3,848	1
Jumlah	377,070	340,719	717,789	180,402	26

Sumber Data : Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2016

Pada tahun 2015 sebagian besar penduduk Kutai Kartanegara berada di ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Kecamatan Tenggarong (15,92%). Selanjutnya berada di Kecamatan Tenggarong Seberang (9,96%), Kecamatan Kecamatan Loa Janan (8,77%), dan di Samboja (8,84%). Selebihnya tersebar di empat belas kecamatan lainnya. Pola persebaran ini dari beberapa tahun tidak banyak berubah. Sedangkan kecamatan dengan persentase jumlah penduduk terkecil adalah Muara Wis sebesar 1,25 persen.

Persebaran penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara menurut luas wilayah tidak merata. Dengan luas wilayah seluas 398,10 Km², Kecamatan Tenggarong berpenduduk sebanyak 114.307 jiwa. Sehingga kepadatan penduduk di Tenggarong adalah 287 penduduk/Km². Hal ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan Kecamatan Tabang yang merupakan wilayah terluas di Kutai Kartanegara (7.764,50 km²) dihuni oleh 10.349 jiwa sehingga memiliki kepadatan penduduk hanya 1 penduduk/km².

Sementara itu, berdasarkan proyeksi BPS, struktur penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut.

Tabel 2.12 Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2011-2016

Kelompok Umur	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0 – 4	81.820	83.976	86.185	88.345	76.036	77.842
5 – 9	50.671	52.014	53.380	54.721	70.540	72.218
10 – 14	61.064	62.694	64.354	65.982	67.616	69.238
15 – 19	57.302	58.830	60.392	61.923	63.458	64.982
20 – 24	57.390	58.904	60.452	61.966	63.486	64.993
25 – 29	59.419	60.985	62.584	64.156	65.727	67.286

Kelompok Umur	2011	2012	2013	2014	2015	2016
30 – 34	58.721	60.275	61.863	63.420	64.982	66,528
35 – 39	53.889	55.319	56.780	58.214	59.651	61,076
40 – 44	46.200	47.436	48.697	49.934	51.175	52,407
45 – 49	37.416	38.427	39.461	40.476	41.495	42,509
50 – 54	29.189	29.981	30.792	31.589	32.387	33,181
55 – 59	20.849	21.418	22.000	22.573	23.148	23,722
60 +	34.285	35.230	36.191	37.140	38.088	39,034
Kutai Kartanegara	648.215	665.489	683.131	700.439	717.789	735,016

Sumber Data : Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2016

Selama lima tahun berturut-turut penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh usia anak-anak. Hal tersebut terlihat dari data proyeksi penduduk yang disediakan oleh BPS di atas. Sampai dengan 2016, diperkirakan terdapat 77.842 jiwa anak berusia 0-4 tahun dan 72.218 jiwa anak berusia 5-9 tahun.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan Ekonomi adalah dengan melihat kondisi ekonomi makro sebuah wilayah yang diukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, Indeks Gini, persentase penduduk di atas garis kemiskinan dan angka kriminalitas yang tertangani.

a. Pertumbuhan PDRB

Indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro dalam bidang pembangunan ekonomi adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK).

Salah satu indikator utama untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi daerah adalah dari tingkat pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya pendapatan per kapita riil bersumber dari dalam suatu daerah yang berlangsung terus-menerus. Untuk kepentingan analisis ekonomi, dapat digunakan pertumbuhan PDRB riil sebagai indikator pertumbuhan ekonomi dan dilihat melalui laju pertumbuhan ekonomi dengan data series dari tahun ke tahun.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kutai Kartanegara di lihat dari laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dengan memasukan sektor minyak dan gas bumi (migas) pada tahun 2015 sebesar -7,64 persen. Melambatnya pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh menurunnya lifting migas Kutai Kartanegara sehingga nilai tambah atas dasar harga konstan mengalami penurunan sebesar 6,10%. Sedangkan jika minyak bumi dan gas alam (migas) dikeluarkan dari penghitungan PDRB, maka pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar -10,72 persen.

Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
1. Pertanian	7,26	4,56	9.42	4.53	3.10
2. Pertambangan dan Penggalian	0,42	5,17	- 1.67	-3.51	-10.72
2.1. Pertambangan Minyak & Gas Bumi	-11,58	-10,41	-6.72	-9.12	-2.04
2.2. Pertambangan Batubara dan Lignit	28,15	30,16	3.69	1.79	-19.10
2.3. Pertambangan Bijih Logam	2,18	2,18	0.76	-5.84	-3.24
2.4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	2,17	5,01	2.30	2.03	2.13

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
3. Industri Pengolahan	2,52	5,82	6.23	5.45	4.58
4. Pengadaan Listrik Dan Gas	16,68	6,04	3.38	4.94	5.42
5. Pengadaan Air	15,84	-1,01	7.02	6.28	4.85
6. Konstruksi	4,42	8,38	4.70	8.71	-0.65
7. Perdagangan	10,96	7,75	4.91	2.19	3.69
8. Transportasi dan Pergudangan	7,34	9,22	7.63	6.65	4.75
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	11,92	6,15	6.87	6.85	5.99
10. Informasi dan Komunikasi	13,53	12,13	11.04	11.76	10.86
11. Jasa Keuangan	3,75	11,56	16.52	3.40	3.63
12. Real Estate	4,47	5,14	5.69	7.40	4.31
13. Jasa Perusahaan	13,09	6,06	4.22	6.50	-0.11
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	-1,48	4,82	5.08	8.90	7.08
15. Jasa Pendidikan	21,61	15,61	14.81	10.49	6.17
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	16,57	25,95	6.06	9.59	6.26
17. Jasa Lainnya	4,92	3,27	4.54	9.19	9.06
PDRB	1,52	5,49	0.04	-1.53	-7.64
PDRB Tanpa Migas	18,03	20,52	4.79	3.21	-10.72
PDRB Tanpa Migas dan Batubara	6,02	6,67	6.72	5.62	3.02

Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka 2016

Berdasarkan Tabel yang disajikan di atas terdapat fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pertumbuhan yang lebih tinggi terlihat dengan perhitungan tanpa mempertimbangan sektor minyak dan gas bumi. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2012 dengan migas menunjukkan peningkatan sebesar 2,61 persen dibandingkan tahun sebelumnya mencapai angka 5,49 persen, namun kembali turun hingga pada tahun 2015 mengalami kontraksi pada angka -7,64 persen. Sementara laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas juga cenderung mengalami penurunan ke angka 4,79 persen pada tahun 2013, dan terus menurun hingga angka 3,21 persen pada tahun 2014, hingga akhirnya mengalami kontraksi menjadi sebesar -10,72 persen pada tahun 2015.

LPE 2015 dengan mempertimbangkan sektor minyak dan gas bumi menunjukkan bahwa sektor primer pertambangan dan penggalian memiliki nilai yang minus yaitu -10,72 persen. Sedangkan selain sektor pertambangan dan penggalian, sektor lainnya mengalami peningkatan pada tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya.

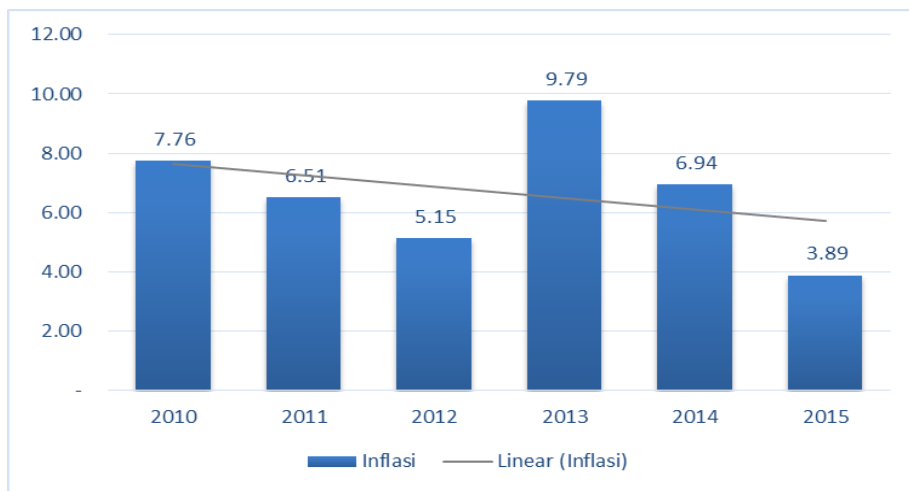
b. Laju Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus. Tingkat keparahan inflasi terbagi atas: Inflasi ringan (<10% setahun); Inflasi sedang (10%-30% setahun); Inflasi berat (30%-100% setahun); dan Hiperinflasi (>100% setahun).

Laju inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara year on year (YOY) semenjak tahun 2010 hingga tahun 2015 dapat terkendali pada angka satu digit, kondisi ini menandakan tingkat kenaikan harga barang dan jasa di Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum tidak memberikan beban berat bagi aktivitas perekonomian daerah. Inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan kecenderungan bergerak positif, yang terlihat dari angka rata-rata pertumbuhan inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara 2010-2015 (end to end) selalu menurun yakni dengan rata-rata penurunan sebesar minus 30 persen. Namun kondisi ini meningkat pada tahun 2013 sebesar 4,64 poin dibandingkan tahun 2012 yang memberikan nilai inflasi sebesar 9,79 poin pada tahun 2013. Yang perlu menjadi perhatian adalah salah satu penyebab terjadinya inflasi adalah karena proses contractional agregat supply yang disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi karena biaya mahal dalam distribusi barang,

hal ini dimungkinkan terjadi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang disebabkan karena sarana infrastruktur jalan yang belum tersedia dengan baik.

Gambar 2.2 Perkembangan Inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara 2010-2015 (YOY) revisi

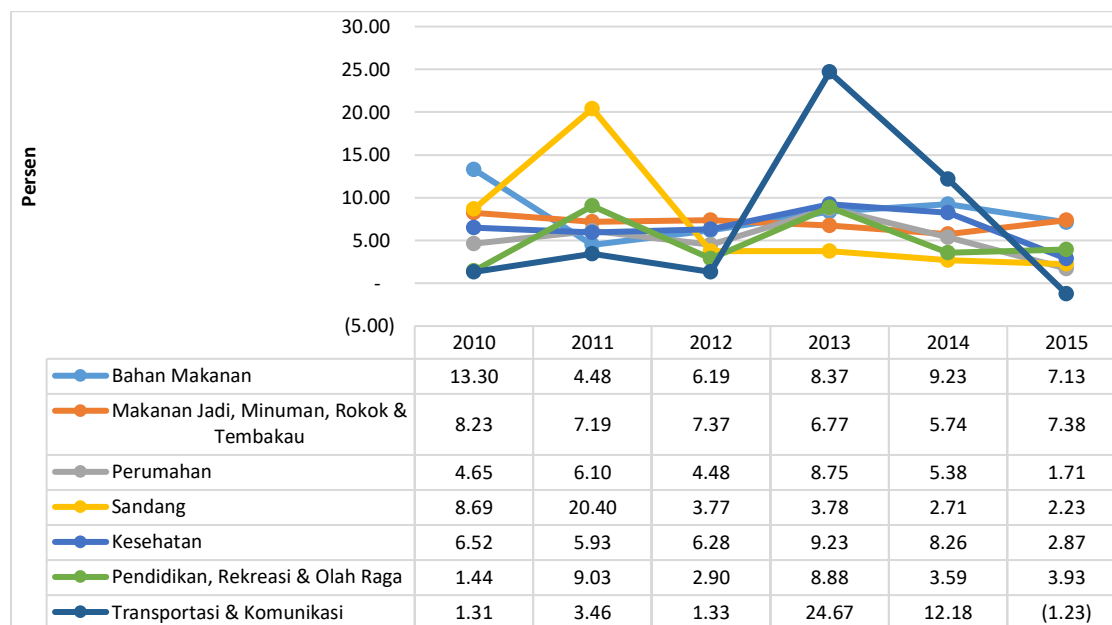


Sumber: Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015

Inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara dihitung menggunakan metode perhitungan indeks harga konsumen (consumer price index –CPI-) yang terdiri dari tujuh kelompok komoditi, yakni bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olah raga; dan transportasi dan komunikasi.

Pada tahun 2015 seluruh kelompok komoditi memberikan andil positif terhadap pembentukan inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara, kecuali pada kelompok komoditi transportasi dan komunikasi yang memberikan andil negatif, dengan nilai -1,23 persen. Inflasi tertinggi terdapat pada kelompok komoditi makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, dengan nilai sebesar 7,38 persen, diikuti oleh kelompok bahan makanan sebesar 7,13 persen.

Gambar 2.3 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komoditi Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2010-2015 (YOY) revisi



Sumber: Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015

Secara umum semua komoditi mengalami peningkatan selama tahun 2010 hingga tahun 2015. Kelompok transportasi mengalami fluktuasi yang tinggi, mencapai nilai tertinggi pada tahun 2013 sebesar 24,67 persen. Namun nilai ini semakin menurun hingga pada tahun 2015 hanya mencapai angka inflasi -1,23 persen. Inflasi pada kelompok komoditi sandang mengalami pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2010 sebesar 8,69 persen, pada tahun 2013 meningkat menjadi 20,40 persen sebelum kembali menurun pada tahun 2015 menjadi sebesar 2,23 persen.

c. PDRB Per Kapita

Perhitungan pada indikator ekonomi juga mempertimbangkan PDRB per kapita yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk suatu wilayah. PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Peningkatan PDRB per kapita ADH berlaku belum menggambarkan peningkatan secara riil, karena masih adanya pengaruh kenaikan harga atau tingkat inflasi yang terjadi di wilayah tersebut. Adapun PDRB per kapita atas dasar harga konstan memberi gambaran pendapatan per kapita penduduk yang riil tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga dan menunjukkan perubahan tingkat kesejahteraan penduduk.

Data PDRB per kapita Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 disajikan pada Tabel dibawah ini. Selama lima tahun nilai PDRB per kapita di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peningkatan dan penurunan yang cukup signifikan.

Tabel 2.14 PDRB Per Kapita Tahun 2011-2015 Kabupaten Kutai Kartanegara (Juta Rupiah)

PDRB Perkapita	2011	2012	2013	2014	2015
Dengan Migas	190.05	195.28	190.36	183.15	162.70
Tanpa Migas	97.73	114.72	117.11	117.88	115.03

Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka 2016

PDRB per kapita pada tabel di atas dihitung berdasarkan PDRB atas harga konstan. PDRB yang mempertimbangkan sektor minyak dan gas bumi memiliki nilai yang tinggi, jauh berbeda dengan PDRB perkapita yang dihitung tanpa mempertimbangkan sektor minyak dan gas. Selama lima tahun dari tahun 2011 hingga tahun 2015,

PDRB per kapita Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mempertimbangkan sektor minyak dan gas bumi mengalami penurunan rata-rata sebesar -3,68 persen per tahun. Tahun 2011 mempunyai nilai sekitar 190,05 Miliar rupiah dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 195,28 miliar rupiah, namun selanjutnya menunjukkan penurunan hingga pada tahun 2015 menjadi sebesar 162,70 Miliar rupiah.

Jika dihitung tanpa mempertimbangkan sektor minyak dan gas bumi, selama lima dari tahun 2011 hingga tahun 2015, PDRB per kapita Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,43 persen per tahun. Tahun 2011 mempunyai nilai PDRB Per kapita sebesar 97,73 miliar rupiah dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 115,03 miliar rupiah.

d. Indeks Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Menghitung koefisien gini dilakukan dengan cara membagi penduduk menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat pendapatannya, kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan. Koefisien gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Berikut merupakan Indeks Gini untuk kabupaten Kutai Kartanegara secara berurutan dari tahun 2010 hingga tahun 2015 yang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.15 Indeks Gini Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009-2015

Distribusi Pembagian Pendapatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
40% Rendah	20,62	29,96	21,29	21,6	21,48	22,11
40% sedang	51,78	39,34	39,27	36,81	36,93	38,98
20% Tinggi	27,59	30,7	39,44	41,59	41,6	38,92

Distribusi Pembagian Pendapatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Pembagian Pendapatan Tinggi Terhadap Pendapatan Rendah	1,34	1,02	1,85	1,93	1,94	1,76
Indeks Gini	0,22	0,30	0,30	0,31	0,31	0,29

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2016

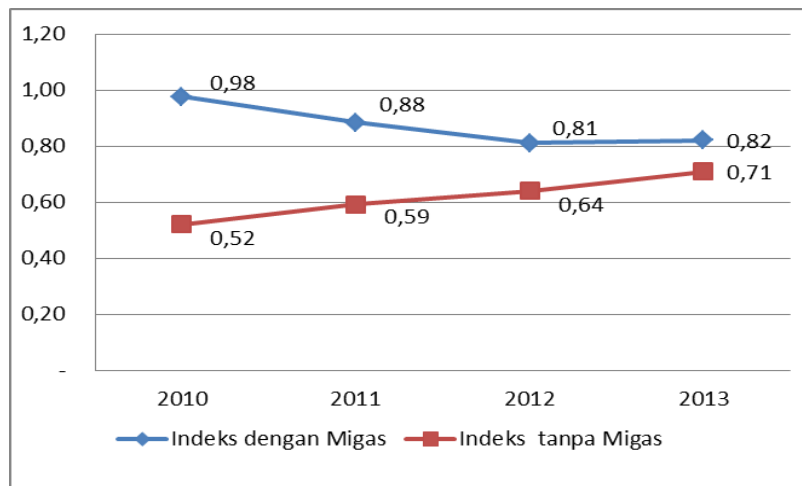
Berdasarkan data tahun 2010-2015 sebagaimana disajikan pada tabel di atas, diketahui bahwa indeks gini Kutai Kartanegara mengalami peningkatan, tetapi kembali menurun pada tahun 2015. Pada tahun 2010 indeks gini Kutai Kartanegara memiliki nilai 0,22 poin. Peningkatan terjadi sebesar 0,08 poin sehingga pada tahun 2011 dan 2012 indeks gini Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi 0,30 poin. Nilai ini pada tahun 2013 meningkat 0,01 poin menjadi pada angka 0,31. Hingga pada tahun 2014, nilai indeks gini Kabupaten Kutai Kartanegara masih bertahan pada angka 0,31, tetapi pada tahun 2015 nilai indeks gini kembali turun 0,02 poin menjadi 0,29. Kondisi menurunnya indeks gini pada tahun terakhir ini mengindikasikan ketimpangan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara juga semakin berkurang.

e. Indeks Ketimpangan Wiliamson (indeks ketimpangan regional)

Ketimpangan pembangunan antar kecamatan yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Indeks Williamson yang diukur dengan mempertimbangkan sektor migas menunjukkan ketimpangan yang lebih tinggi jika indeks yang diukur tanpa mempertimbangkan sektor migas. Jika mempertimbangkan sektor migas, Indeks Ketimpangan Wiliamson Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2010 menunjukkan angka 0,98 dan menunjukkan kecenderungan menurun hingga pada tahun 2013 menjadi 0,82. Kondisi tersebut berbanding terbalik jika sektor migas tidak dipertimbangkan dalam perhitungan Indeks Williamson. Jika tidak mempertimbangkan sektor migas Indeks Williamson Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan angka 0,52 dan menunjukkan kecenderungan meningkat hingga pada tahun 2013 menjadi 0,71.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup lebar, dimana jika angka mendekati nol maka ketimpangan semakin kecil atau merata, sedangkan mendekati angka 1 maka ketimpangan semakin lebar. Namun demikian perlu dipahami bahwa hanya menjelaskan distribusi PDRB per kapita antar kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak otomatis bahwa ketimpangan yang ditunjukkan oleh Indeks Wiliamson bahwa suatu kecamatan dengan PDRB per Kapita yang lebih tinggi akan lebih sejahtera dibanding dengan kecamatan lainnya, terlebih perhitungan yang dilakukan menggunakan PDRB dengan migas.

Gambar 2.4 Indeks Williamson Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 - 2013



Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, diolah

f. Prosentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur darisisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Head Count Index (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Data persentase penduduk Kutai Kartanegara di bawah garis kemiskinan disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.16 Prosentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan Tahun 2009-2014

Tahun	Jumlah Penduduk	Penduduk Miskin	Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	Persentase
2009	605.857	42.480	563.377	92,99
2010	626.680	54.700	571.980	91,27
2011	650.908	47.300	603.608	92,73
2012	674.464	47.100	627.364	93,02
2013	683.131	52.100	631.031	92,38
2014	700.439	52.981	647.458	92,58

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara 2009-2014

Dari Tabel di atas diketahui dari tahun ke tahun persentase penduduk diatas garis kemiskinan menunjukkan angka yang beragam dari tahun 2009 hingga tahun 2014. Sebelum Tahun 2010 mulai tahun 2005 hingga 2009 persentase penduduk diatas garis kemiskinan meningkat rata-rata 1,9 persen. Jumlah penduduk miskin terbanyak pada tahun 2010 yaitu mencapai 54.700 penduduk dan hanya 91,27 persen dari penduduk yang berada di atas garis kemiskinan. Angka ini kemudian mulai turun pada tahun 2011 dan 2012 dengan jumlah penduduk miskin mampu ditekan pada jumlah 47.300 penduduk pada tahun 2011 dan turun menjadi 47.100 pada tahun 2012 sehingga penduduk yang berada di atas garis kemiskinan mencapai angka 93,02 persen. Jumlah penduduk miskin kembali naik pada tahun 2013 menjadi 52.100 penduduk atau sebesar 7,52 persen dan pada tahun 2014 penduduk miskin meningkat menjadi 52.981 jiwa atau sebesar 7,42 persen

Kenaikan persentase jumlah penduduk diatas garis kemiskinan menunjukkan keberhasilan pemerintah menciptakan lingkungan usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja baru. Penyerapan tenaga kerja membuat penduduk yang semula berada pada kategori miskin mampu "naik kelas" ke golongan penduduk diatas garis kemiskinan. Kenaikan persentase juga menggambarkan keberhasilan pemerintah membuat masyarakat berpenghasilan rendah lebih produktif melalui berbagai program yang dijalankan. Kembali naiknya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa pemerintah harus lebih gencar dalam menjalankan program untuk membuat penduduk kembali lebih produktif.

g. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan di daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan).

Angka kriminalitas dilihat dari jumlah kriminalitas dibanding dengan jumlah kasus yang dapat diselesaikan. Terlihat pada Tabel 2.17 dapat dilihat Angka kriminalitas di kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2010 hingga tahun 2015.

Tabel 2.17 Angka Kriminalitas dari tahun 2010-2015

Tahun	Jumlah Kriminalitas	Jumlah Kasus	Angka Kriminalitas (%)
2010	889	564	63,44

Tahun	Jumlah Kriminalitas	Jumlah Kasus	Angka Kriminalitas (%)
2011	1384	754	55,93
2012	695	437	62,88
2013	1.001	556	55,54
2014	1.087	766	70,47
2015	1.102	795	72,14

Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka 2016

Berdasarkan data dari tahun 2010 hingga tahun 2015, tindakan kriminalitas di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami fluktuasi, namun cenderung semakin meningkat. Pada tahun 2010 jumlah kriminalitas sebanyak 889 dan meningkat jumlahnya hingga mencapai 1.102 kriminalitas pada tahun 2015 atau sebanyak 23,96 persen. Jumlah kasus yang mampu ditangani oleh aparat keamanan pun semakin meningkat namun apabila dibandingkan dengan jumlah kriminalitas yang terjadi angka ini masih kecil. Sebanyak 63,44 persen kasus mampu ditangani oleh aparat keamanan pada tahun 2010, angka ini pada tahun 2015 meningkat menjadi 72,14 persen dari seluruh jumlah kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Melihat perkembangan angka kriminilitas yang terjadi, diperlukan peningkatan kinerja aparat kepolisian dalam menangani masalah yang diajukan oleh penduduknya, sehingga keadilan dan penegakan hukum dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Selain itu pemerintah perlu membuat kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk sehingga kasus kejahatan khususnya pencurian tidak banyak terjadi lagi.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berbagai urusan pemerintahan yang terkait. Dari berbagai macam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, urusan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah pendidikan, kesehatan, pertanahan dan ketenagakerjaan.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Selama periode 5 (lima) tahun terakhir, pencapaian angka IPM Kabupaten Kutai Kartanegara relatif terus membaik. IPM Kutai Kartanegara di tahun 2010 sebesar 67,45. Pada tahun 2011, capaian IPM Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar 68,47 dan terus mengalami peningkatan menjadi 69,12 pada tahun 2012. Nilai IPM sebesar 71,71 menempatkan Kutai Kartanegara tetap pada posisi 5 se-Kalimantan Timur pada tahun 2013. Pada tahun 2014 IPM Kutai Kartanegara mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan di angka 71,20 dan mempertahankan peringkat 5 di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.18 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2014

Komponen	2010	2011	2012	2013	2014
Angka Harapan Hidup (tahun)	71,41	71,44	71,46	71,48	71,50
Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,59	11,79	12,11	12,96	13,24
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,68	8,13	8,35	8,41	8,46
Pengeluaran Perkapita Riil yang Disesuaikan (ribuan)	9.063	9.263	9.281	9.866	9.984
IPM	67,45	68,47	69,12	71,71	71,20
Peringkat IPM Dalam Provinsi Kalimantan Timur	5	5	5	5	5

Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka 2015

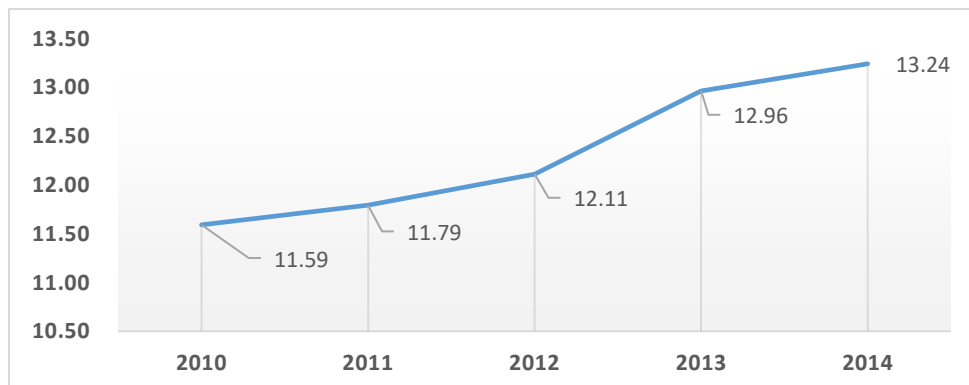
Berdasarkan Tabel di atas, pada tahun 2014 IPM Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai angka 71,20. Angka harapan Hidup juga meningkat dari tahun sebelumnya mencapai rata-rata 71,50 tahun. Harapan Lama Sekolah mencapai 13,24 persen. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2014 menjadi 8,46 tahun yang berarti rata-rata penduduk mengenyam pendidikan hingga kelas 3 SMP/MTs. Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kutai Kartanegara relatif tetap dari tahun 2010 hingga tahun 2014 berada pada peringkat 5. Pencapaian peringkat tersebut kemungkinan disebabkan karena sudah semakin terwujudnya optimalisasi dan sinergitas pola dan sasaran pembangunan manusia yang dikembangkan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama ini.

a. Pendidikan

a.1. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami trend prositif, periode 2010-2014, tahun 2010 sebesar 11,59 tahun dan terus meningkat hingga tahun 2014 sebesar 13,24 tahun.

Gambar 2.5 Harapan Lama Sekolah

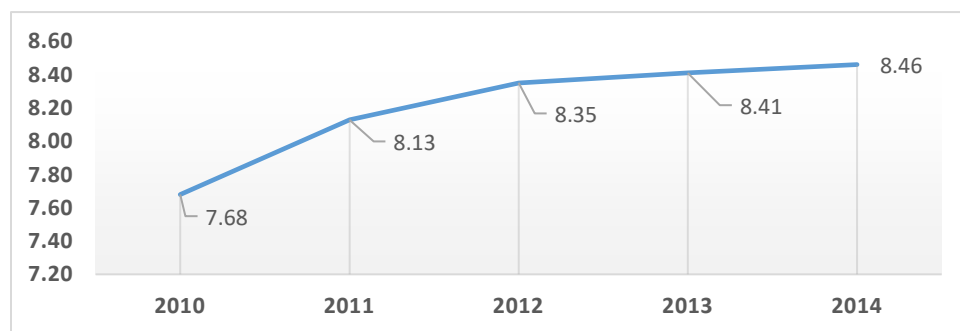


Sumber : BPS, Kabupaten Kutai Kartanegara, 2016

a.2. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan peningkatan, berturut-turut sebagai berikut: 7,68 tahun 2010, 8,13 tahun 2011, 8,35 tahun 2012, 8,41 tahun 2013, dan yang terakhir mencapai angka 8,46 pada tahun 2014. Kondisi tahun 2014 menunjukkan penduduk di Kutai Kartanegara rata-rata memiliki tingkat pendidikan kelas 3 SMP/MTs.

Gambar 2.6 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2014



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2016

a.3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 tahun terakhir untuk tiap jenjang pendidikan disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.19 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010-2015 (%)

Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SD/MI/Paket A	119.94	106.07	110.18	106.77	111.36	100.06
SMP/MTs/Paket B	81.57	98.52	94.71	91.50	92.79	93.07
SMA/SMK/MA/Paket C	83.02	70.32	72.46	90.00	81,223	88.9

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara 2016

Angka partisipasi kasar untuk sekolah dasar (SD) pada tahun 2015 adalah 100,06 persen, artinya bahwa jumlah penduduk yang bersekolah dasar (SD) melebihi jumlah penduduk usia SD (7-12 tahun), sementara partisipasi kasar SMP sebesar 93,07 persen dan SMA sebesar 88,90 persen. Angka ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi usia anak, maka semakin kecil angka partisipasi sekolahnya. Angka Partisipasi Kasar (APK) ini mengalami peningkatan dari tahun 2009 terutama untuk jenjang pendidikan menengah dan atas.

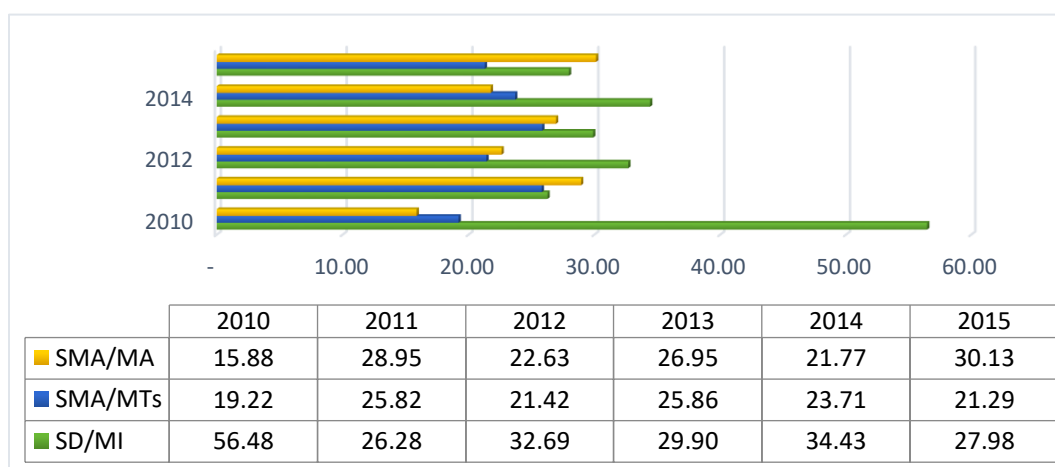
Pada jenjang pendidikan menengah dan atas (SMP atau SMA) angka partisipasi kasar penduduk masih rendah. Hal ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi penduduk pada usia tersebut yang sebagian membantu orang tua untuk berkerja atau bahkan pada usia tersebut sudah berstatus kawin sehingga mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga. Namun nilai yang semakin meningkat dari tahun 2009-2015 menunjukkan bahwa antusiasme anak untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu tingkat SMP maupun SMA semakin meningkat.

a.4. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Penduduk 10 tahun keatas yang menamatkan sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara semakin meningkat dari tahun ke tahun selama tahun 2009 hingga tahun 2015 terutama untuk pendidikan dasar, peningkatan dapat dilihat pada Gambar 2.7 Pada tahun 2015, berdasarkan publikasi Indeks Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara pada tingkat SD dan SMA mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sedangkan tingkat SMP cenderung menurun walaupun tidak signifikan.

Penduduk yang berumur 10 tahun ke yang hanya menamatkan SD tahun 2015 sebesar 27,98 persen, menurun dibandingkan pada tahun 2014 sebesar 34,43 persen. Menamatkan pada tingkat SMA tahun 20135 sebesar 30,13 persen dari pada tahun 2012 sebesar 21,77 persen. Dengan demikian diindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara cenderung tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA. Berikut grafik penduduk 10 tahun ke atas yang tamat sekolah.

Gambar 2.7 Penduduk 10+ Tahun Yang Tamat Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015 (%)



Sumber : BPS Kutai Kartanegara tahun 2011-2016

a.5. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu.

Berdasarkan Tabel di bawah ini, APM di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2009 hingga tahun 2015 cenderung mengalami peningkatan terutama untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA. Diketahui APM SD pada tahun 2010 sebesar 99,78 persen menurun pada tahun 2011 dan berlanjut pada tahun 2012 hingga pada angka 92,54 persen. Meskipun demikian, mulai tahun 2013 APM kembali meningkat hingga pada tahun 2015 menjadi 99,65 persen. Sementara itu pada tahun 2015 nilai APM untuk jenjang pendidikan SMP sebesar 91,19 persen, dan APM SMA 78,53 persen.

Tabel 2.20 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015 (%)

Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SD/MI/Paket A	99.78	98.94	92.54	94.81	98.42	99.65
SMP/MTs/Paket B	95.54	82.13	68.80	87.59	90.65	91.19
SMA/SMK/MA/Paket C	79.85	81.76	56.85	80.50	78.08	78.53

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016

b. Kesehatan

b.1. Angka Kematian Bayi

Besarnya Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2010 sebesar 9 atau ada 9 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Angka tersebut terus mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2015 AKB Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi 16 atau terdapat 16 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.21 Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Kutai Kartanegara 2010-2015

No.	Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Samboja	25	7	11	9	12	10
2	Muara Jawa	5	11	9	15	10	30
3	Sanga Sanga	0	16	27	41	7	13
4	Loa Janan	9	14	6	11	6	13
5	Loa Kulu	4	14	6	6	14	18
6	Muara Muntai	0	12	7	18	0	19

No.	Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
7	Muara Wis	14	71	50	22	31	54
8	Kota Bangun	14	15	16	20	15	16
9	Tenggarong	3	10	7	9	18	7
10	Sebulu	17	14	10	33	29	10
11	Tenggarong Seberang	0	8	2	10	12	12
12	Anggana	8	16	2	1	5	10
13	Muara Badak	12	4	7	16	17	14
14	Marangkayu	4	14	14	33	19	25
15	Muara Kaman	18	40	12	30	12	38
16	Kenohan	8	10	16	14	20	18
17	Kembang Janggut	2	10	17	9	11	23
18	Tabang	5	14	15	28	21	5
	Kutai Kartanegara	9	13	10	15	14	16

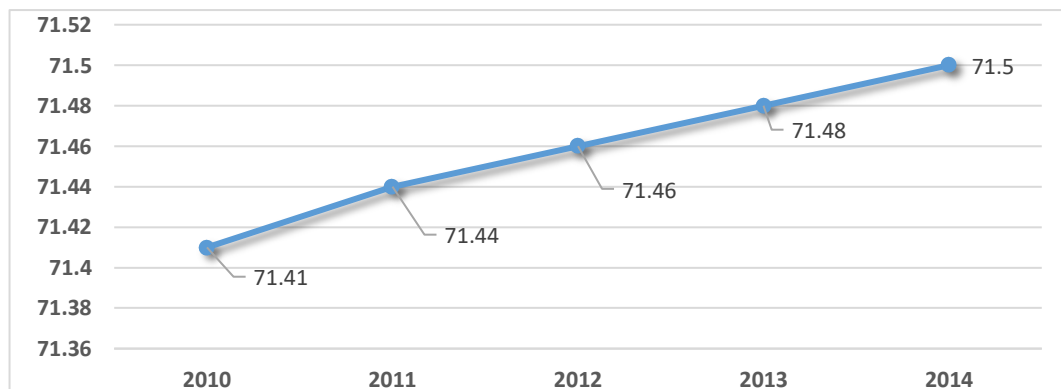
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2016

Peningkatan angka kematian bayi di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu diwaspadai dan semaksimal mungkin dapat ditekan. Penyebab kematian bayi adalah: Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Aspekia, Lahir Prematur, Infeksi Neonatorum, Kelainan bawaan. Angka kematian bayi tertinggi pada tahun 2015 terdapat di Kecamatan Muara Wis sebesar 54, selanjutnya diikuti kecamatan Muara Kaman sebesar 38 dan kecamatan Muara Jawa sebesar 30, sedangkan AKB terendah terdapat di kecamatan Tabang sebesar 5.

b.2. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup merupakan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup dapat diketahui dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Mengetahui angka harapan hidup menggunakan asumsi angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2014 disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.8 Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2014



Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2015

Untuk mengukur angka harapan hidup suatu daerah perlu dibandingkan dengan angka harapan hidup di negaranya. Angka harapan hidup di Indonesia pada tahun 2011 adalah 70,76 tahun, sedangkan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 71,44 tahun. Guna mencapai bahkan mempertahankan nilai yang lebih tinggi dari AHH nasional, maka perlu adanya dukungan dari

pemerintah dan berbagai pihak yang terkait untuk membuat program pembangunan kesehatan, program kesehatan lingkungan, gizi dan kalori serta program pemberantasan kemiskinan.

Angka usia harapan hidup dipengaruhi oleh berbagai faktor penentu seperti lingkungan, sarana dan prasarana umum termasuk kesehatan. Angka harapan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2010 adalah 71,41 tahun, meningkat menjadi 71,44 tahun pada tahun 2011 dan posisi terakhir pada tahun 2014 menunjukkan angka harapan hidup rata-rata 71,50 tahun.

AHH yang terus meningkat ini mengindikasikan tingkat kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara semakin baik dan lingkungan tempat tinggal yang semakin baik pula.

c. Ketenagakerjaan

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara pada setiap tahunnya, berdampak pada perkembangan penduduk usia kerja. Semakin banyak penduduk usia kerja tentu saja berbanding lurus dengan kebutuhan lapangan kerja.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, jumlah angkatan kerja selama beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Perkembangan kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Kartanegara 2009-2015 dapat digambarkan sebagai berikut pada Tabel berikut.

Tabel 2.22. Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2010-2015 Kabupaten Kutai Kartanegara

Indikator Ketenagakerjaan	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Angkatan Kerja (jiwa)	263.668	294.620	306.189	304.015	301.228	318.499	307.146
- Bekerja (jiwa)	233.667	260.640	282.659	280.038	279.013	294.118	275.749
- Mencari pekerjaan (jiwa)	30.001	33.980	23.530	23.977	22.215	24.381	31.397
Rasio Penduduk bekerja	0,89	0,88	0,92	0,92	0,93	0,92	0,90

Sumber: Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka 2016

Seiring dengan perkembangan usia kerja maka angkatan kerja juga mengalami peningkatan. Jumlah penduduk yang masuk angkatan kerja tahun 2009 sebanyak 263.668 jiwa dengan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 233.667 jiwa, sedangkan pada tahun 2015 penduduk angkatan kerja sebanyak 307.146 dan yang bekerja sebanyak 275.749 jiwa. Dari data penduduk yang bekerja dan angkatan kerja dapat dihitung rasio penduduk yang bekerja. Pada tahun 2009 penduduk yang bekerja sebesar 89 persen semakin meningkat hingga pada tahun 2013 dan tahun 2014 berturut-turut lebih tinggi menjadi 93 persen dan 92 persen, tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 90 persen.

Rasio penduduk yang berkerja di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai angka yang relatif tinggi, jumlah yang bekerja telah melebihi 90 persen dari angkatan kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara. Peningkatan penduduk yang telah bekerja harus terus dilaksanakan, dengan tujuan agar pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi sedikit. Program ini perlu didukung oleh pemerintah dan para pihak terkait untuk membuka lapangan kerja baru.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

a. Kebudayaan

Di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat banyak suku-suku yang tersebar dari wilayah pesisir hingga pedalaman dengan aneka ragam seni budaya daerah antara lain:

1. Kesenian Keraton terdiri dari: Tari, Mulawarman, Ganjur Bini, Kenjar Laki, Tari Kanjal, Tari Topeng, Tari Dewa.
2. Kesenian Penduduk asli terdiri dari: Patun, Ngelawai, Ngerangkau, Tari Leleng, Datun, Gong, Kelian Anak, Hudo' dan Pepatai (tari perang), Belian.

3. *Kesenian Kutai Kartanegara Pedalaman terdiri dari: Kesenian Tingkilan, Tarsul, Pantun, Sair Jepen dan Hadrah.*

Kemajuan pembinaan seni dan budaya saat ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah grup kesenian yang eksis di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut jumlah organisasi kesenian di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan Tahun 2011

Tabel 2.23 Jumlah Kelompok Kesenian Berdasarkan Jenis

No	Jenis Kelompok Kesenian	2011
1	Band	2
2	Hadrah & Habsy	2
3	Jepen dan Tingkilan	4
4	Karawitan	1
5	Kuda Lumping	3
6	Mamanda	1
7	Sasak	1
8	Seni Tari dan Musik	3
Jumlah		17

Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kukar 2016

b. Pemuda dan Olahraga

Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa, terus disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan pembangunan dan pembinaan olahraga disamping optimalisasi olahraga prestasi, dilakukan juga upaya membangun budaya olahraga dalam masyarakat. Untuk meningkatkan pembinaan olahraga dimaksud masih diperlukan dukungan sarana dan prasarana olahraga, baik olahraga masyarakat maupun sarana olahraga terpadu dengan standar internasional.

Sarana dan prasarana olahraga dan pemuda di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut:

Tabel 2.24 Gedung Sarana Olahraga Di Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Prasarana	Fasilitas	Lokasi
1	Stadion Olahraga Rondong Demang	Lapangan Sepak bola Lapangan Tenis (outdoor) Gedung Squas Kolam Renang Gedung Beladiri	Jl. Stadion Tenggarong
2	Lapangan Pemuda	Lapangan Sepak bola Lapangan Tenis (outdoor)	Jl. Mawar Tenggarong
3.	Gedung Olahraga DPRD	Lapangan Bulu Tangkis Lapangan Tenis (outdoor & indoor)	Jl. Patin Tenggarong
4	Komplek Olahraga Perjiwa	Lapangan Sepak Bola dan Atletik Lapangan Panahan Gedung Beladiri Velodroom Lapangan berkuda Sirkuit Cros BMX Mess Atlit	Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang
5	Gedung KNPI	Ruang Pertemuan dan Sekretariat	Jl. Mawar Tenggarong
6	Gedung KONI	Sekretariat	Jln. Mulawarman
7	Gedung Bulu Tangkis/BPU	Tersebar di 18 Kecamatan	Di Kecamatan

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kukar, 2014

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek Pelayanan Umum merupakan aspek kedua dari tiga aspek pada indikator kinerja kunci yang tercantum pada Permendagri no 54 Tahun 2010. Aspek pelayanan umum memberikan gambaran kinerja pemerintah dalam melayani penduduknya. Aspek pelayanan umum dibagi menjadi dua yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, keduanya akan dijabarkan dibawah ini.

2.3.1. *Urusan Wajib*

Urusan wajib adalah indikator kinerja yang menilai urusan pelayanan wajib di suatu daerah, penyelenggaraan urusan wajib ditangani oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkaitan dengan pelayanan dasar. Bagian dari urusan wajib seperti: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, dan lain sebagainya.

a. Pendidikan

a.1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur. Berdasarkan Tabel di bawah ini, APS di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2010 hingga tahun 2015 cenderung mengalami peningkatan. Seperti diketahui APS pada jenjang umur 7-12 menurun dari tahun 2010 hingga tahun 2012, tetapi kembali meningkat dari tahun 2013 hingga 2015.

Tabel 2.25 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015

Jenjang umur / pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
7-12 tahun (SD)	99.13	99.06	93.56	95.28	98.79	100.12
13-15 tahun (SMP)	75.75	83.85	70.36	89.00	91.50	93.56
16-18 tahun (SMA)	53.48	72.96	56.24	80.76	78.25	79.96

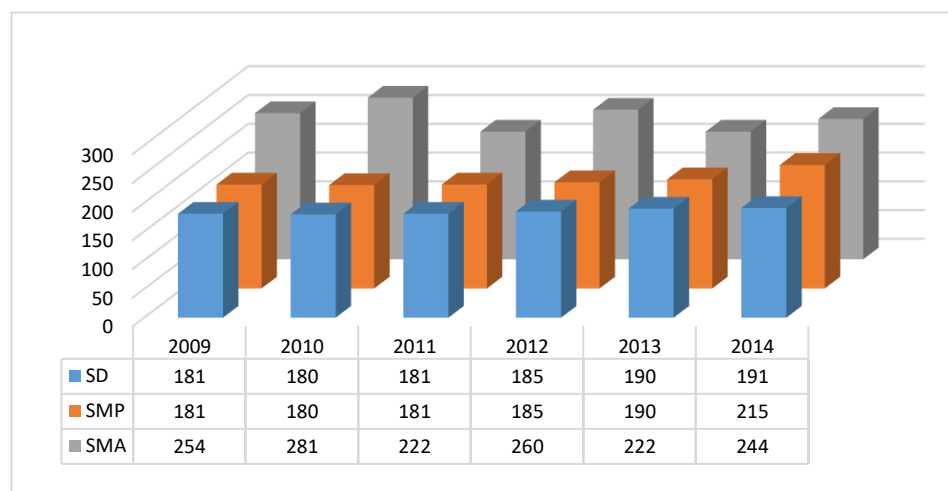
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016

APS pada jenjang umur 13-15 tahun cenderung fluktuatif. Pada tahun 2010 hingga tahun 2011 meningkat, tetapi pada tahun 2012 turun, meskipun pada tahun-tahun selanjutnya mengalami peningkatan hingga tahun 2015 APS jenjang umur 13-15 tahun menunjukkan angka 93,56 persen. APS untuk jenjang umur 16-18 tahun sangat fluktuatif dari tahun 2010 hingga tahun 2015, meskipun menunjukkan kecenderungan meningkat. Hal ini berarti antusiasme umur 16-18 tahun untuk berpartisipasi sekolah pada jenjang pendidikan atas (SMA) semakin meningkat. Pada tahun 2015 ada sebesar 20,04 persen jenjang umur 16-18 yang tidak aktif pada jenjang pendidikan SMA. Hal ini memberikan gambaran bahwa tugas pemerintah untuk menyelesaikan program pendidikan menengah dimasa datang mengalami peningkatan walaupun masih mempunyai tantangan.

a.2. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Murid

Rasio Ketersediaan sekolah dengan murid di Kabupaten kartanegara selama tahun 2009 hingga tahun 2014 ditunjukkan pada Gambar 2.9 di bawah ini. Untuk ketersediaan sekolah terhadap murid pada jenjang pendidikan SD dan SMP relatif mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2014 untuk SD mengalami peningkatan sebanyak 10 poin dan mencapai angka rasio 191. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP mengalami peningkatan rasio menjadi 215 pada tahun 2014. Hal yang berbeda ditunjukkan oleh jenjang pendidikan SMA yang cukup mengalami fluktuasi selama jangka waktu 6 tahun. Pada tahun 2014 rasio murid terhadap sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai rasio 244, lebih tinggi daripada tahun 2013 yang hanya sebesar 222.

Gambar 2.9 Rasio Murid dan Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara 2009-2014



Sumber: Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Angka 2015

a.3. Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru/murid bertujuan untuk menilai ketersediaan pengajar, selain itu juga mengukur jumlah ideal murid untuk setiap guru. Rasio guru/murid dapat dilakukan perhitungan untuk mencapai standar kualitas pendidikan yang baik.

Data yang menggambarkan rasio guru/murid sekolah dasar dan menengah tidak tersedia, untuk menggambarkan data tersebut data disubstitusi dengan data rasio murid terhadap guru sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Data rasio murid terhadap guru bersumber dari Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2015, data disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.26 Rasio Murid Terhadap Guru Tahun 2014 Dibagi Per Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Kecamatan	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Samboja	13	8	13	11	15	6
2	Muara Jawa	14	11	11	6	17	6
3	Sanga-Sanga	10	21	9	-	13	-
4	Loa Janan	13	10	17	7	5	-
5	Loa Kulu	11	9	9	3	15	-
6	Muara Muntai	11	-	10	-	18	-
7	Muara Wis	9	-	5	-	11	-
8	Kota Bangun	9	-	10	6	16	3
9	Tenggarong	13	11	11	8	12	4
10	Sebulu	15	-	12	5	15	14
11	Tenggarong Seberang	13	11	12	17	12	22
12	Anggana	14	-	10	-	14	-
13	Muara Badak	14	9	11	5	14	1
14	Marang Kayu	11	-	7	6	10	11
15	Muara Kaman	13	12	11	9	17	10
16	Kenohan	8	-	10	-	11	-
17	Kembang Janggut	9	22	19	7	15	9
18	Tabang	9	-	16	-	10	4

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2015

Data sekolah dibagi menjadi sekolah negeri dan sekolah swasta dan dibagi per kecamatan. Data rasio guru terhadap murid pada setiap jenjang pendidikan secara keseluruhan mengalami peningkatan.

Jika dilihat per kecamatan, Kecamatan Sebulu memiliki rasio terbesar untuk jenjang SD/MI negeri. Sedangkan untuk SMP/MTs negeri Kecamatan Kembang Janggut memiliki rasio terbesar.

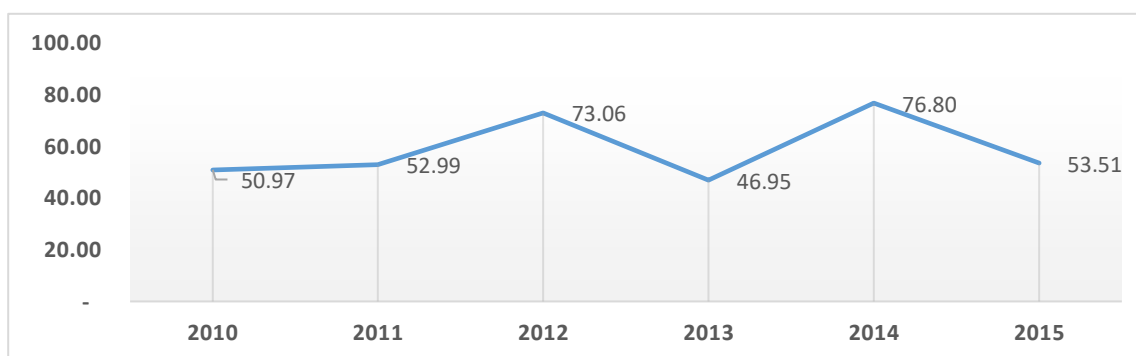
Sementara pada jenjang SMA/MA negeri Kecamatan Muara Muntai adalah kecamatan dengan rasio terbesar.

a.4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Perhitungan untuk memperoleh data pendidikan anak usia dini dapat diperoleh dari publikasi data Bappeda Kutai Kartanegara pada tahun 2016. Capaian PAUD di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2010 sebesar 50,97 persen selanjutnya meningkat menjadi 52,99 persen pada tahun 2011 dan 73,06 persen pada tahun 2012. APK Paud pada tahun 2013 menurun menjadi 46,95 persen pada tahun 2013. Nilai tersebut kembali naik menjadi 76,80 persen pada tahun 2014 dan kembali turun pada tahun 2015 menjadi sebesar 53,51 persen. Gambar di bawah ini terdapat inkonsistensi terhadap capaian PAUD di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk setiap tahunnya yang seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar 2.10 Pendidikan Usia Dini (PAUD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2009-2015



Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2015

Adanya pendidikan anak usia dini bertujuan untuk:

1. **Tujuan utama:** untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa.
2. **Tujuan penunjang:** untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah.

Tujuan yang baik tersebut perlu didukung dengan berbagai fasilitas dan kebijakan yang dibantu oleh pemerintah daerah, untuk menciptakan Kutai Kartanegara yang memiliki sumberdaya yang unggul.

a.5. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu, yang seringkali dikarenakan oleh ketidakmampuan secara ekonomi ataupun kemauan untuk melanjutkan sekolah. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan.

Data angka putus sekolah diperoleh dari Dinas Pendidikan Kutai Kartanegara selama tahun 2011 hingga 2015, yang disajikan pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 2.27 Persentase Angka Putus Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2011- 2015

Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
SD/MI	0,22	0,07	0,01	0,01	0,01
SMP/MTs	2,38	0,23	0,05	0,01	0,01

Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
SMA/SMK/MA	3,61	0,33	0,35	0,2	0,14

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara 2016

Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI memiliki persentase yang paling kecil dan nilainya semakin menurun dari tahun 2011 sebesar 0,22 persen dapat dikurangi hingga hanya 0,01 persen yang putus sekolah pada tahun 2015. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs angka putus sekolah sama dengan jenjang SD/MI yaitu sekitar 0,01 persen pada tahun 2015. Angka ini tentunya juga mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2011 sebesar 2,38 persen.

Semakin tinggi jenjang pendidikan, angka putus sekolah semakin tinggi. Begitu juga di Kabupaten Kutai Kartanegara, pada jenjang SMA/SMK/MA angka putus sekolah meningkat pada tahun 2011 paling tinggi dibandingkan jenjang pendidikan di bawahnya yaitu dengan nilai 3,61 persen. Selama kurun waktu 4 tahun, angka ini mampu diperkecil secara signifikan hingga menjadi 0,14 persen. Secara keseluruhan angka putus sekolah di Kutai Kartanegara termasuk rendah karena kurang dari 1 persen.

Penyebab utama putus sekolah antara lain karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya; kondisi ekonomi orang tua yang miskin; dan keadaan geografis yang kurang menguntungkan. Angka putus sekolah yang rendah di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program di bidang pendidikan. Oleh karena itu keberhasilan ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan.

a.6. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah.

Data angka kelulusan di Kabupaten Kutai Kartanegara diperoleh dari publikasi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam angka 2015. Data disajikan dalam bentuk Tabel sebagai berikut.

Tabel 2.28 Angka Kelulusan Tahun 2011 - 2015 Per Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara

Jenjang Pendidikan	keterangan	2011	2012	2013	2014	2015
SD/MI	persen	98,61	92,77	100	98,20	99,10
SMP/MTs	persen	98,28	88,79	96,27	99,96	99,98
SMA/SMK/MA	persen	95,85	96,88	99,74	99,48	99,54

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015

Persentase kelulusan pada jenjang SD/MI tahun 2015 sebanyak 99,10 persen. Angka persentase kelulusan SD/MI merupakan yang paling rendah dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Pada jenjang SMP/MTs angka kelulusan sebesar 99,98 persen pada tahun 2015. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA angka kelulusannya 99,54 persen pada tahun 2015.

Angka kelulusan untuk SMP/MTs merupakan angka paling tinggi pada tahun ajaran 2015/2016. Hal ini dapat disebabkan karena perubahan kurikulum dan standar kelulusan yang berubah setiap tahunnya. Pemerintah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Daerah perlu melakukan koordinasi untuk melaksanakan program peningkatan angka kelulusan khususnya pada jenjang SD.

a.7. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan sekolah adalah persentase siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Menghitung angka melanjutkan sekolah dilakukan dengan menghitung setiap jenjang pendidikan. Angka melanjutkan sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2011-2015 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.29 Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2011-2015

Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
SD/MI – SMP/MTs	95.400	102.390	100.120	100.040	100.020
SMP/MTs – SMA/SMK/MA	89.160	99.040	99.140	99.390	99.230

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara 2016

Angka melanjutkan sekolah dari SD/MI – SMP/MTS pada tahun 2015 mencapai 100.020, sedangkan dari SMP/MTs – SMK/SMK/MA 99.230. Nilai angka melanjutkan sekolah di Kutai Kartanegara telah melebihi 100 persen, hal ini menunjukkan bahwa semua siswa yang lulus melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Semakin tinggi angka melanjutkan sekolah akan semakin baik, karena sumber daya manusia akan semakin tinggi. Dengan sumberdaya manusia yang berkualitas akan mendukung pembangunan daerah.

a.8. Guru yang Memenuhi Kualifikasi

Standar kualitas pendidik yang tinggi tentu saja akan mempengaruhi murid didiknya. Standar pendidik atau guru saat ini adalah Sarjana atau Diploma IV. Pemerintah pusat saat ini melakukan sertifikasi terhadap guru, program tersebut merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengajar.

Dari jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA. Diketahui Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 89 persen. Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah guru yang memenuhi kualifikasi masih perlu ditingkatkan. Guru yang berkualitas akan mengajarkan pendidikan yang berkualitas kepada siswanya, dengan siswa yang berkualitas nantinya akan menciptakan sumberdaya yang berkualitas juga.

b. Kesehatan

Pada dasarnya pembangunan dibidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata, dan murah. Dengan meningkatnya pelayanan kesehatan, pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang kemudian akan menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif.

b.1. Rasio posyandu per satuan balita

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita. Kegunaannya untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah.

Data jumlah posyandu yang diperoleh pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015 dan data jumlah balita yang diperoleh dari BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga dapat dilakukan perhitungan rasio posyandu per satuan balita. Rasio posyandu per satuan penduduk disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.30 Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kutai Kartanegara Tahun 2013-2015

Tahun	Posyandu	Jumlah Balita	Rasio Posyandu
2013	713	86.185	8,27
2014	732	88.345	8,29
2015	755	76.036	9,93

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015

Rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Kutai Kartanegara dari Tahun 2013-2015 setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 nilai rasio posyandu per satuan balita sebesar 8,27 dan tahun 2014 dan 2015 nilai rasio posyandu per satuan penduduk berturut-turut mengalami peningkatan menjadi 8,29 dan 9,93.

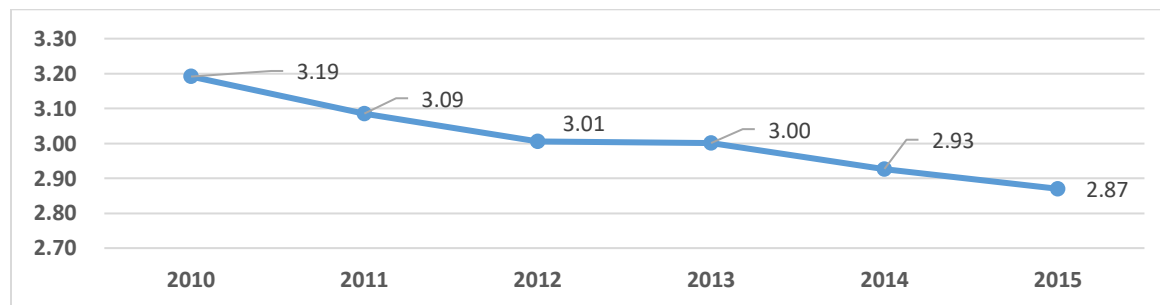
Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu.

b.2. Rasio Puskesmas, Poliklinik Dan Pustu Per Satuan Penduduk

Rasio puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu (pustu) bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan tersebut dalam memenuhi pelayannya kepada penduduk, dengan demikian pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan.

Dilihat dari rasio puskesmas dan puskesmas Pembantu per 10.000 penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan kecenderungan penurunan dari tahun 2010 s.d. 2015. Pada tahun 2010 rasio puskesmas dan puskesmas Pembantu per satuan penduduk menunjukkan angka 3,19 tetapi pada tahun-tahun selanjutnya turun hingga pada tahun 2015 menunjukkan angka 2,87. Kondisi tersebut mengindikasikan terjadinya penurunan pelayanan kesehatan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap masyarakat.

Gambar 2.11 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 - 2015



Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu per satuan penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara ditampilkan pada tabel 2.31. Data yang disajikan merupakan data per kecamatan, dari data per kecamatan dapat dihitung data Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015. Jumlah puskesmas dan pustu di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 206 unit dengan jumlah penduduk di Kutai Kartanegara pada tahun 2015 sebanyak 717.789 jiwa maka diketahui rasio puskesmas dan pustu setiap 10.000 penduduk sebesar 2,87 yang artinya bahwa setiap 10.000 penduduk hanya dilayani oleh + 3 unit puskesmas atau puskesmas pembantu.

Nilai rasio pelayanan puskesmas dan pustu tertinggi pada tahun 2015 berada di Kecamatan Tabang dengan nilai 6,76. Nilai rasio pelayanan puskesmas dan pustu terendah berada di Kecamatan Loa Janan dengan nilai 1,27. Semakin tinggi nilai rasio fasilitas kesehatan maka semakin banyak penduduk yang dilayani oleh puskesmas ataupun pustu. Sedangkan semakin rendah nilai rasio fasilitas kesehatan maka semakin sedikit penduduk yang dilayani oleh puskesmas ataupun pustu. Penambahan jumlah fasilitas kesehatan seperti pustu dan puskesmas perlu ditingkatkan seiring dengan perkembangan jumlah penduduk yang terus terjadi, sehingga penduduk di Kutai Kartanegara memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal.

Tabel 2.31 Rasio Puskesmas dan Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015

No.	Kecamatan	Puskesmas & Pustu	Jumlah Penduduk	Rasio Puskesmas & Pustu
1	Samboja	21	63.467	3,31
2	Muara Jawa	9	41.236	2,18
3	Sanga-Sanga	6	20.477	2,93

No.	Kecamatan	Puskesmas & Pustu	Jumlah Penduduk	Rasio Puskesmas & Pustu
4	Loa Janan	8	62.921	1,27
5	Loa Kulu	17	44.713	3,80
6	Muara Muntai	8	18.336	4,36
7	Muara Wis	6	8.999	6,67
8	Kota Bangun	14	33.295	4,20
9	Tenggarong	15	114.307	1,31
10	Sebulu	12	38.363	3,13
11	Tenggarong Seberang	15	71.467	2,10
12	Anggana	11	40.701	2,70
13	Muara Badak	10	45.954	2,18
14	Marang Kayu	10	24.047	4,16
15	Muara Kaman	19	36.255	5,24
16	Kenohan	7	10.080	6,94
17	Kembang Janggut	11	32.821	3,35
18	Tabang	7	10.349	6,76
Kutai Kartanegara		206	717.789	2,87

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016

b.3. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisasi serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkelanjutan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Rasio rumah sakit di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2014 bernilai 0,044. Hal ini artinya dari 10.000 penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara rumah sakit hanya mampu memfasilitasi sebesar 0,043 persen dari seluruh penduduk. Nilai ini telah meningkat dari pada tahun-tahun sebelumnya yang berada di angka 0,028 selama tahun 2011-2012 karena hanya ada 2 rumah sakit di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu berada di Kecamatan Samboja dan Kecamatan Tenggarong. Pada tahun 2013 terdapat tambahan 1 rumah sakit yang di bangun di Kecamatan Kota Bangun sehingga rasio rumah sakit per satuan penduduk meningkat menjadi 0,043.

Dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara hanya terdapat 3 rumah sakit. Nilai rasio rumah sakit tersebut terlalu kecil, sehingga diperlukan peningkatan jumlah rumah sakit dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kurangnya jumlah rumah sakit ini dapat diimbangi dengan jumlah puskesmas dan jaringannya dalam memberikan pelayanan dasar kesehatan.

Tabel 2.32 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Tahun 2011-2014

No.	Kecamatan	2011			2012			2013			2014		
		Rumah Sakit	Jumlah Penduduk	Rasio Rumah Sakit	Rumah Sakit	Jumlah Penduduk	Rasio Rumah Sakit	Rumah Sakit	Jumlah Penduduk	Rasio Rumah Sakit	Rumah Sakit	Jumlah Penduduk	Rasio Rumah Sakit
1	Samboja	1	56.621	0,018	1	58.171	0,018	1	58.665	0,17	1	61.837	0,162
2	Muara Jawa	-	35.236	-	-	36.839	-	-	37.477	-	-	39.932	-
3	Sanga-Sanga	-	18.269	-	-	19.229	-	-	19.628	-	-	19.965	-
4	Loa Janan	-	58.244	-	-	61.783	-	-	63.309	-	-	61.647	-
5	Loa Kulu	-	41.484	-	-	43.383	-	-	4.139	-	-	43.813	-
6	Muara Muntai	-	17.985	-	-	18.668	-	-	18.924	-	-	17.645	-
7	Muara Wis	-	8.888	-	-	9.250	-	-	9.389	-	-	8.894	-
8	Kota Bangun	-	32.503	-	-	33.966	-	1	34.547	0,029	1	32.978	0,303
9	Tenggarong	1	99.931	0,01	1	104.044	0,01	1	105.626	0,009	1	110.900	0,090
10	Sebulu	-	37.827	-	-	38.930	-	-	39.294	-	-	38.090	-
11	Tenggarong Seberang	-	63.812	-	-	65.014	-	-	65/293	-	-	69.477	-
12	Anggana	-	33.950	-	-	34.943	-	-	35.271	-	-	39.210	-
13	Muara Badak	-	41.374	-	-	42.985	-	-	43.592	-	-	44.734	-
14	Marang Kayu	-	24.299	-	-	25.256	-	-	12.618	-	-	23.984	-
15	Muara Kaman	-	35.219	-	-	36.136	-	-	6.419	-	-	35.876	-
16	Kenohan	-	10.242	-	-	10.616	-	-	10.753	-	-	10.038	-
17	Kembang Janggut	-	24.734	-	-	24.834	-	-	24.759	-	-	31.145	-
18	Tabang	-	10.290	-	-	10.417	-	-	10.428	-	-	10.274	-
Kutai Kartanegara		2	650.908	0,028	2	674.464	0,028	3	683.131	0,043	3	683.131	0,044

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2015

b.4. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Selain ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan seperti tersebut puskesmas, pustu dan rumah sakit, pembangunan kesehatan diperlukan dukungan tenaga kesehatan baik tenaga spesialis, medis dan paramedis dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Dibawah ini disajikan pada Tabel 2.33 yaitu tabel rasio tenaga kesehatan di Kutai Kartanegara, yang bersumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014.

Tabel 2.33 Rasio Tenaga Medis Tahun 2009-2013 Kabupaten Kutai Kartanegara

Tenaga Kesehatan	2009	2010	2011	2012	2013
Dokter Spesialis	0,04	0,04	2,12	2,18	1,41
Tenaga Medis	0,36	0,43	-	-	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014

Angka rasio tenaga medis untuk dokter spesialis pada tahun 2009 di Kutai Kartanegara sebesar 0,04 nilai yang sama pada tahun 2010. Angka rasio ini meningkat untuk tahun 2011 dan 2012 berturut-turut mencapai angka 2,12 dan 2,18 namun kembali turun pada angka rasio 1,41 pada tahun 2013. Jumlah penduduk yang meningkat cukup tinggi hanya diiringi oleh penambahan dokter spesialis yang terbatas.

Tenaga medis rasionya meningkat dari tahun 2009 yang nilainya 0,36 menjadi 0,43 pada tahun 2010. Peningkatan jumlah penduduk yang cukup banyak diiringi dengan meningkatnya jumlah tenaga medis yang cukup banyak pula.

b.5. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Menurut definisi operasional dari petunjuk teknis SPM bidang kesehatan kabupaten/kota cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani berarti ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK).

Data yang menunjukkan nilai cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani tertulis pada laporan LPPD Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyebutkan kasus yang tertangani menurun dari tahun 2010 hingga 2011. Pada tahun 2010 kasus yang tertangani sebanyak 73,37 persen dan turun hingga 13,37 persen pada tahun 2011. Angka ini pada tahun 2012 kembali meningkat menjadi 49 persen dan dari selanjutnya terus meningkat dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2015 angka tersebut menjadi sebesar 98,45 persen yang berarti hanya 1,55% komplikasi kebidanan yang belum bisa ditangani pada tahun 2015.

Tabel 2.34 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan	587	1.921		2.311	2.738	2.858
Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan	800	13.980		2.993	3.294	2.903
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	73,37	13,74	49,00	77,21	83,12	98,45

Sumber : LPPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015

Nilai cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Kutai Kartanegara lebih dari setengah. Dengan rasio ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, nilai ini tetap perlu ada peningkatan terutama dari fasilitas kesehatan agar kasus seperti ini semakin banyak yang tertangani. Semakin tingginya nilai cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani akan memberikan gambaran bahwa kondisi fasilitas kesehatan di Kutai Kartanegara semakin baik.

b.6. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kutai Kartanegara pada bidang kesehatan menyebutkan bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2010 sebesar 81,75 persen dan angka ini menurun pada tahun 2011 dan 2012. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan menurun pada tahun 2012 menjadi 61,99 persen. Angka ini kemudian meningkat lagi menjadi sebesar 88,70 persen pada tahun 2013 hingga menjadi 92,47 persen pada tahun 2015. Hal tersebut berarti pada tahun 2015 sebanyak 92,47 persen ibu bersalin telah ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Cakupan penanganan di bidang kesehatan perlu ditingkatkan, pemerintah daerah harus bekerja lebih keras agar peningkatan pelayanan dan kesehatan khususnya untuk para ibu semakin baik.

Tabel 2.31 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan	10.038	10.100	11.857	12.648	12.994	12.839
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	12.227	13.340	19.127	14.259	15.725	13.885
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	81,75	74,71	61,99	88,70	82,63	92,47

Sumber : LPPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015

b.7. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

UCI (Universal Child Immunization) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), Ibu hamil, WUS dan anak sekolah tingkat dasar. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah desa/kelurahan dimana ≥ 80 persen dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.

Nilai cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) berasal dari Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 yang menyebutkan tingkat pencapaian 69,60 persen pada tahun 2013 atau 165 desa/kelurahan yang telah mencapai UCI dibandingkan dengan 237 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nilai ini mengalami peningkatan positif semenjak tahun 2011 yang hanya 57,27 persen dan tahun 2012 sebanyak 59,47 persen. Dari perkembangan angka-angka tersebut, perlu peningkatan dari fasilitas kesehatan agar kasus seperti ini semakin banyak yang tertangani.

Tabel 2.36 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Desa/ Kelurahan UCI	122	122	135	117	177	175
Jumlah seluruh Desa/ Kelurahan	227	227	227	227	237	237
Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	53,74	53,74	59,47	51,50	77,60	73,84

Sumber : LPPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015

b.8. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita adalah anak usia di bawah 5 tahun (anak usia 0s/d 4 tahun 11 bulan) yang ada di kabupaten/kota. Gizi buruk adalah status gizi menurut badan badan (BB) dan tinggi badan (TB) dengan Z-score ≤ 3 dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor).

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan menurut petunjuk teknis SPM bidang kesehatan kabupaten/kota yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2008 memiliki definisi operasional yaitu balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Kasus balita gizi buruk dari tahun 2010-2015 mengalami pasang surut dan kasus tertinggi terjadi pada tahun 2013, yaitu sebanyak 110 kasus. Kasus balita gizi buruk yang terjadi setiap tahun dapat tertangani secara keseluruhan, sehingga cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di Kutai Kartanegara 100 persen. Nilai yang sangat baik melihat semua kasus gizi buruk dapat tertangani, ke depannya hal semacam ini dapat dipertahankan. Dengan demikian penduduk Kutai Kartanegara memiliki taraf kehidupan dan kesehatan yang baik.

Tabel 2.37 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan Kesehatan	70	69	74	110	64	87
Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	70	69	74	110	64	87
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100

Sumber : LPPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015

b.9. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TB BTA Positif

Penemuan pasien baru TB BTA Positif adalah penemuan pasien TB melalui pemeriksaan dahak sewaktu pagi dan sewaktu (SPS) dan diobati di unit pelayanan kesehatan dalam suatu wilayah kerja pada waktu tertentu.

Definisi operasional menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No 828 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di kabupaten/kota adalah angka penemuan pasien baru TB BTA positif atau Case Detection Rate (CDR) adalah persentase jumlah penderita baru TB BTA positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA pada tahun 2010 sebesar 22,27 persen. Angka ini meningkat menjadi sebesar 30,70 persen atau 288 orang penderita TBC positif ditemukan dan diobati dari 938 penderita baru TBC BTA positif (perkiraan penderita TB Positif) pada tahun 2011.

Penanganan penyakit TB BTA pada tahun 2012 kembali turun menjadi 24,58 persen, tetapi dari tahun 2013-2015 dengan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA berhasil mencapai 100 persen. Pada tahun-tahun berikutnya penanganan penyakit TB BTA dapat ditingkatkan dengan berbagai cara yang dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan Daerah yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Beberapa cara yang dapat ditempuh adalah dengan penambahan alat kesehatan dan tenaga kesehatan khususnya untuk paru-paru.

Tabel 2.38 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati	270	288	295	110	372	446
Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)	1212	938	1.200	110	372	446
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	22,27	30,70	24,58	100	100	100

Sumber : LPPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015

b.10. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Definisi tersebut merupakan definisi operasional menurut Keputusan

Menteri Kesehatan RI No 828 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

Tabel 2.39 *Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015*

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	685	187	375	411	1142	886
Jumlah penderita DBD yang ditemukan	685	296	375	411	1142	886
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	63,18	100	100	100	100

Sumber : LPPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015

Berdasar Laporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kartanegara, jumlah penderita penyakit DBD setiap tahun cenderung meningkat, meskipun indikator cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD mampu menunjukkan kinerja yang sangat baik atau 100 persen. Disamping upaya penanganan penderita penyakit DBD, sebaiknya juga dilakukan upaya pencegahan terhadap penyakit tersebut, sehingga diharapkan di tahun-tahun mendatang kasus berjangkitnya penyakit DBD dapat diminimalisir.

b.11. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Pengertian per substansi yang tertulis pada Keputusan Menteri Kesehatan RI No 828 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- *Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi diagnosa pengobatan rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap di sarana kesehatan strata pertama.*
- *Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi diagnosa pengobatan rehabilitasi medik tinggal di ruang rawat inap di sarana kesehatan strata pertama.*
- *Cakupan rawat jalan adalah jumlah kunjungan kasus (baru dan lama) rawat jalan di sarana kesehatan strata pertama.*
- *Kunjungan pasien baru adalah seseorang yang baru berkunjung ke sarana kesehatan dengan kasus penyakit baru.*
- *Sarana kesehatan strata pertama adalah tempat pelayanan kesehatan meliputi antara lain : puskesmas, balai pengobatan pemerintah dan swasta,praktek bersama dan perorangan.*
- *Masyarakat miskin adalah masyarakat sasaran program pengentasan kemiskinan yang memenuhi kriteria tertentu menggunakan 14 (empat belas) variabel kemiskinan dalam satuan Rumah Tangga Miskin (RTM).*

Data mengenai cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin terdapat pada publikasi Bappeda Kutai Kartanegara. Dari LPPD Bupati Kutai Kartanegara cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin pada tahun 2010 hanya mencapai nilai 5,79 persen. Nilai ini semakin menurun pada tahun 2011 hingga menjadi 3,57 persen dan pada tahun 2012 kembali naik menjadi 9,21 persen dan 20,01 persen pada tahun 2013. Pada tahun 2014 dan 2015, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mencapai 100 persen. Nilai cakupan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara semakin baik.

Tabel 2.40 *Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015*

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1	6.947	6.899	17.785	24.764	50.085	49.841
Jumlah seluruh masyarakat miskin	120.035	193.049	193.049	123.789	50.085	49.841

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	5,79	3,57	9,21	20,01	100,00	100,00

Sumber : LPPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015

b.12. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Definisi tersebut menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No 828 Tahun 2008.

Capaian yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang ditulis pada LKPJ Bupati Kutai Kartanegara. Pada tahun 2011 cakupan kunjungan bayi mencapai 82,14 persen. Nilai ini menurun pada tahun 2012 yaitu cakupan kunjungan bayi sebesar 71,06 persen atau 12.945 bayi kunjung bayi yang memperoleh pelayanan, dari 18.213 bayi lahir hidup. Nilai tersebut kembali turun pada tahun 2013 menjadi 57,61 persen dari seluruh cakupan kunjungan bayi baru lahir. Pada tahun-tahun selanjutnya mengalami peningkatan hingga pada tahun 2015 cakupan kunjungan bayi mencapai 82,90 persen. Pelayanan kesehatan terhadap bayi perlu ditingkatkan, bayi yang terlahir nantinya merupakan aset yang dimiliki daerah untuk mengembangkan daerahnya.

Tabel 2.41 Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan	10.331	10.437	12.945	7.794	11.293	11.129
Jumlah seluruh bayi lahir hidup	11.692	12.707	18.213	13.529	14.977	13.424
Cakupan kunjungan bayi	88,36	82,14	71,08	57,61	75,40	82,90

Sumber : LPPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015

c. Pekerjaan Umum

c.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Berdasarkan statusnya proporsi panjang jalan secara keseluruhan dibagi menjadi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten. Kinerja pembangunan jalan dan jembatan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2010-2015 mengalami kenaikan, hal ini ditunjukkan oleh bertambah jalan kabupaten sepanjang 1.381, 12 km selama tahun 2010-2015, dimana pada tahun 2010 jalan kabupaten sepanjang 1.511,54 km dan pada tahun 2015 menjadi 2.892,57 km.

Tabel 2.42 Kondisi Jalan Menurut Status di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010-2015

No.	Status Jalan	Panjang Jalan (Km)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jalan Negara	367.55	367.55	367.55	367.55	367.55	367.55
2	Jalan Provinsi	353.90	353.90	353.90	353.90	353.90	353.90
3	Jalan Kabupaten	1,511.45	1,543.93	1,564.39	1,978.01	2,604.17	2,892.57

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016

Berdasarkan Data Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016, diketahui bahwa jumlah panjang total jalan adalah 2.892,57 km, terdiri dari jenis jalan permukaan aspal sepanjang 452,69 km, jenis jalan permukaan kerikil sepanjang 551,94 km, jenis jalan permukaan batu sepanjang 260,57 km, Jenis jalan permukaan tanah sepanjang 735,17 km dan jenis jalan permukaan beton sepanjang 892,20 km. dari keempat jenis permukaan jalan, jenis permukaan jalan beton merupakan jenis permukaan jalan yang mengalami pertambahan paling signifikan. Hal ini berarti terjadi banyak pembukaan jalan untuk daerah-daerah baru dan terpencil. Dengan terbukanya akses jalan baru walaupun hanya berupa jalan dengan jenis permukaan jalan tanah namun hal ini mengindikasikan bahwa aksesibilitas di Kabupaten Kutai Kartanegara semakin bertambah.

Tabel 2.43 Kondisi Jalan Menurut Permukaan Jalan dan Kondisi di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010-2015

No.	Kecamatan	Kondisi Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan (Km)					Jumlah
		Aspal	Kerikil	Batu	Tanah	Beton	
1	Baik	326.95	398.64	188.19	530.97	644.39	2,089.14
2	Sedang	51.26	62.50	29.50	83.24	101.02	327.52
3	Rusak	21.97	26.78	12.64	35.68	43.30	140.37
4	Rusak Berat	52.51	64.03	30.23	85.28	103.50	335.54
Jumlah	2015	452.69	551.94	260.57	735.17	892.20	2,892.57
	2014	444.62	483.18	258.84	727.00	690.54	2,604.17
	2013	412.75	279.52	247.74	681.04	356.96	1,978.01
	2012	410.45	287.89	-	449.97	416.08	1,564.39
	2011	406.21	248.82	149.41	510.39	229.10	1,543.93
	2010	336.33	314.43	141.83	449.46	269.40	1,511.45

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016

Kondisi jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara beragam dari kondisi jalan baik hingga rusak berat. Panjang jalan dengan kondisi baik pada tahun 2015 meningkat menjadi sepanjang 2.089,14 km atau sebesar 72,22 persen dan sangat meningkat jauh dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Proporsi jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Kutai Kartanegara dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain: kualitas material jalan, kondisi tanah, perawatan jalan dan lain sebagainya. Sebaiknya dengan pertambahan jumlah penduduk yang terus terjadi diiringi dengan penambahan ruas jalan sehingga mobilitas masyarakat akan semakin mudah. Semakin tinggi nilai proporsi panjang jaringan jalan akan memberikan dampak yang baik bagi penduduknya ataupun bagi daerah itu sendiri.

Pembangunan wilayah akan terhambat karena tidak didukung oleh infrastruktur jaringan jalan yang memadai/dipengaruhi oleh akses jaringan jalan yang rusak. Pada periode pemerintahan 5 tahun mendatang, isu peningkatan kualitas jaringan jalan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

Selain jalan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilewati oleh berbagai macam sungai dari sungai kecil hingga sungai besar membutuhkan infrastruktur jembatan. Jembatan yang ada di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sejumlah 263 buah, dengan panjang jembatan mencapai 3,695 Km. Kondisi jembatan beragam; Jembatan Baik sepanjang 2,530 km, Jembatan rusak sedang sepanjang 0,830 km, Jembatan Rusak sepanjang 0,155 km, Jembatan Rusak Berat sepanjang 0,180 km. Kondisi Jembatan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.44 Kondisi Jembatan Di Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Keadaan	2009	2010
1	Jumlah jembatan:		
	Panjang (km)	3,42	3,695
	Jumlah (buah)	239	263
2	Kondisi jembatan:		
	Baik (km)		2,530
	Sedang (km)		0,830
	Rusak (km)		0,155
	Rusak Berat (km)		0,180
	Jumlah		3,695

Sumber: Dinas Bina Marga Kabupaten Kutai Kartanegara

c.2. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Pada perhitungan rasio tempat ibadah per satuan penduduk tidak dihitung berdasarkan agamanya, akan tetapi dihitung berdasarkan jumlah seluruh tempat ibadah yang ada. Perhitungan ini masih sangat umum untuk memperhitungkan rasio tempat ibadah per satuan penduduk, akan lebih detail apabila perhitungan dilakukan berdasarkan jenis agama yang menganut, jumlah penganut dan tempat ibadahnya. Dengan demikian akan menggambarkan rasio tempat ibadah per satuan penduduk secara lebih detail. Berikut rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2010-2014 disajikan pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah tempat ibadah	Rasio tempat ibadah
2010	626.680	736	1,17
2011	650.908	735	1,13
2012	665.489	752	1,13
2013	683.131	740	1,01
2014	700.439	772	1,10
2015	717.789		

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015

Rasio tempat ibadah menggambarkan ketersediaan tempat ibadah setiap 1.000 penduduk. Di Kabupaten Kutai Kartanegara setiap 1.000 penduduk terdapat 1,17 tempat ibadah pada tahun 2010, sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 1,13. Nilai yang sama didapatkan pada tahun 2012 dan kembali turun pada tahun 2013 sebelum kembali naik pada tahun 2014. Berturut-turut rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2012, 2013, dan 2014 adalah 1,13, 1,01, dan 1,10.

Nilai rasio menurun pada tahun 2013 dikarenakan jumlah penduduk yang meningkat tidak diikuti oleh penambahan tempat ibadah. Meskipun rasio tempat ibadah cukup kecil akan tetapi mampu melayani penduduk yang menjalankan ibadah. Hal ini dikarenakan kurang kesadaran penduduk dalam melaksanakan ibadah, atau penduduk memilih untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing.

c.3. Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Irigasi ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air. Kondisi irigasi di Kutai Kartanegara berdasarkan data tahun 2010 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.46 Kondisi Irigasi di Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Kecamatan	Nama Bangunan	Kondisi			Jumlah
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Marangkayu	Bendungan Besar	-	-	-	1 Unit (Tahap Pembangunan)
		Cek Dam	2	3	1	6 Unit
		Pintu Air	7	8	8	23 Unit
		Pompanisasi	1			1 unit
		Saluran Primer	3	17		20 Unit
		Saluran Sekunder		35		35 Unit
2.	Muara Wis	Cek Dam		1		1 Unit
		Saluran Primer		6		6 Unit
		Saluran sekunder		7		7 Unit
3.	Samboja	Bendungan	1	1	1	3 Unit
		Cek Dam	10	4	1	15 unit
		Pintu Air	5	1	7	13 Unit
		Pompanisasi	4			4 Unit
		Saluran Primer	5	6		11 Unit
		Saluran Sekunder	3	15		18 Unit
4.	Tenggarong Seberang	Bendungan	1		1	2 Unit
		Cek Dam	4	2	2	8 Unit
		Pintu Air	13	7	6	26 Unit
		Pompanisasi	2	2		4 Unit
		Saluran Primer	4	24		28 Unit
		Saluran Sekunder	15	19	9	43 Unit
		Anak Sungai		1	1	2 Buah
5.	Kota Bangun	Bendungan	1			1 Unit
		Cek Dam	3	10	1	14 Unit
		Pintu Air	6	2	3	11 Unit
		Pompanisasi	1	3	2	6 Unit
		Saluran Primer	2	13		15 Unit
		Saluran Sekunder	1	37		38 Unit
		Anak Sungai		2		2 Buah
6.	Muara Jawa	Saluran Primer		4		4 Unit
		Saluran Sekunder		5		5 Unit

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum 2010

Luas irigasi Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode tahun 2010-2015 mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, pada tahun 2010 luas irigasi baru mencapai 11.456 ha dan pada tahun 2015 luas irigasi telah meningkat menjadi 20.287,99 ha. Peningkatan luas irigasi ini ternyata mampu diikuti oleh kemampuan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyediakan luas irigasi dalam kondisi baik, khususnya sampai dengan tahun 2013 luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik mencapai 91,01 persen. Pada tahun 2014 dan 2015 luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik turun menjadi 70,57 persen.

Tabel 2.47 Luas irigasi dalam kondisi baik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (ha)	7.946	9.259	8.925	18.463,36	14.318	14.318
Luas irigasi kabupaten (ha)	11.456	12.529	32.254	20.287,99	20.287,99	20.287,99
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (persen)	69,36	73,90	27,67	91,01	70,57	70,57

Sumber: Dinas Bina Marga Kabupaten Kutai Kartanegara

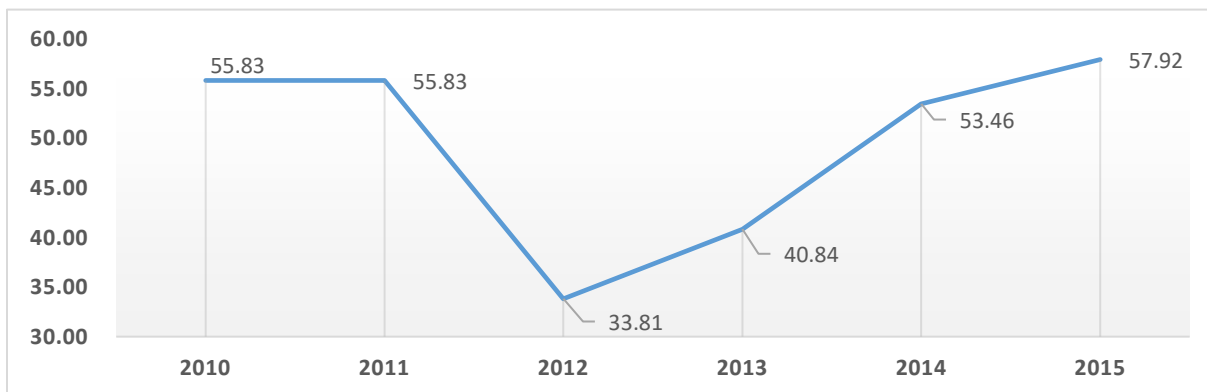
d. Perumahan

d.1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Rumah tangga pengguna air bersih merupakan indikator yang menghitung persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota rumah tangga. Rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2011 hanya sebesar 38,86 persen. Data tersebut diperoleh dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2012. Angka ini meningkat pada tahun 2012 mencapai 43,70 persen dan terus meningkat hingga mencapai 61,69 persen rumah tangga yang menggunakan air bersih dari seluruh rumah tangga di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rumah tangga pengguna air bersih menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu semakin menyadari pentingnya air bersih bagi kesehatan. Peningkatan pengguna air bersih di Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan terus meningkat, semakin banyaknya warga yang menggunakan air bersih akan memberikan dampak baik bagi peningkatan kualitas hidup penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar 2.12 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2010 - 2015



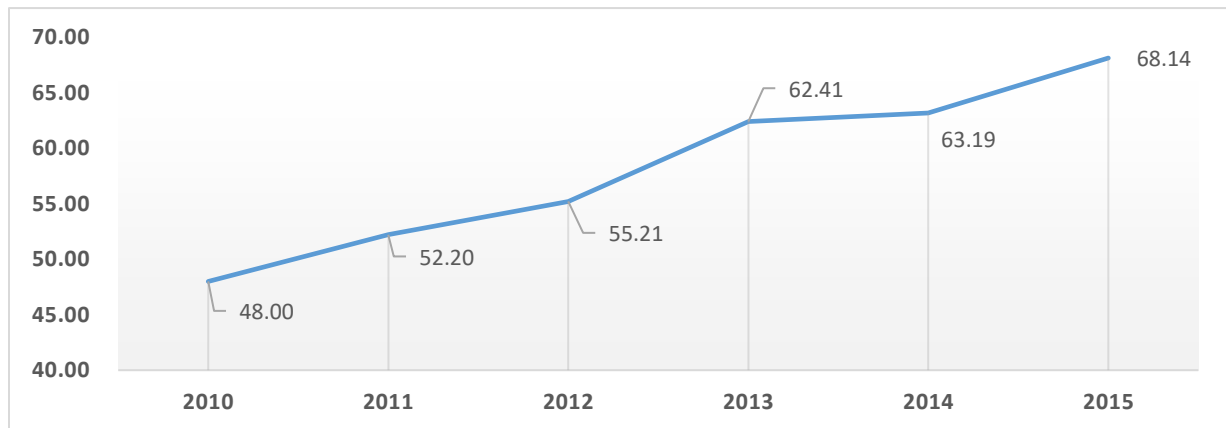
Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, tersedia hanya Perpipaan

d.2. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Rumah tangga pengguna listrik menghitung persentase rumah tangga yang memanfaatkan listrik sebagai penerangannya. Kondisi perumahan di Kutai Kartanegara terlihat semakin membaik dari waktu ke waktu, yang salah satunya diukur dari perkembangan tingkat persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas penerangan listrik. Kondisi yang semakin membaik ini dapat dilihat pada grafik yang mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga tahun 2015 (Gambar 2.13). Pada tahun 2010 rumah tangga pengguna listrik hanya 48 persen dan semakin meningkat hingga

pada tahun 2015 mencapai 68,14 persen dari seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar 2.13 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2010 – 2015



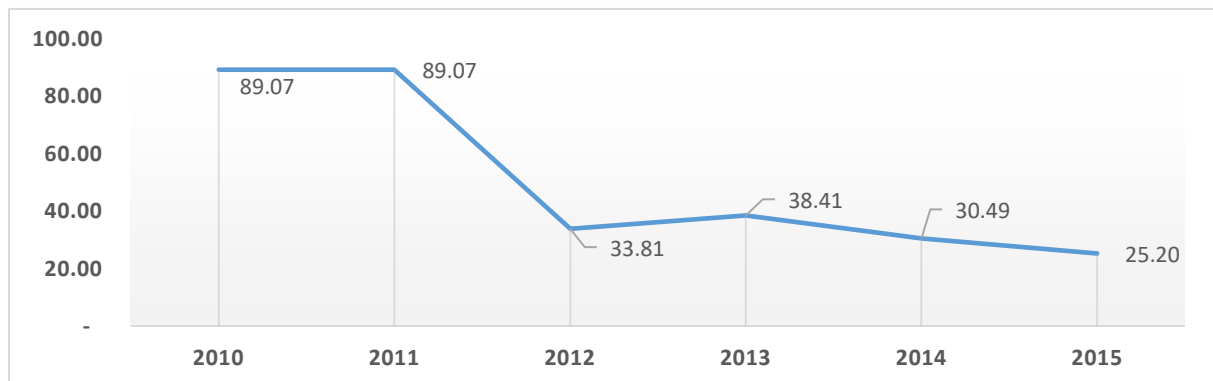
Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016

d.3. Rumah Tangga Ber-Sanitasi

Rumah tangga ber-sanitasi merupakan indikator yang menganalisis kondisi perumahan. Rumah Tangga Ber-Sanitasi adalah persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi/jamban sendiri di setiap rumah atau dengan kata lain tidak menggunakan jamban bersama serta memiliki tangki septik sendiri.

Indikator Rumah Tangga Ber-Sanitasi erat hubungannya dengan kesehatan dan kondisi permukiman penduduk. Pada tahun 2010 dan 2011, rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah mencapai 89,07 persen, tetapi pada tahun 2012 rumah tangga bersanitasi turun menjadi 33,81 persen. Pada tahun 2013 jumlah rumah tangga yang menggunakan sanitasi baik sedikit meningkat pada angka 38,41 persen, tetapi Angka ini semakin menurun hingga pada tahun 2015 mencapai angka 25,20 persen. Penurunan ini perlu diwaspadai dikarenakan kemungkinan akan mempengaruhi kesehatan penduduk terhadap penyakit yang berkaitan dengan kebersihan sanitasi dan perumahan.

Gambar 2.14 Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2010–2015



Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016

d.4. Lingkungan Pemukiman Kumuh

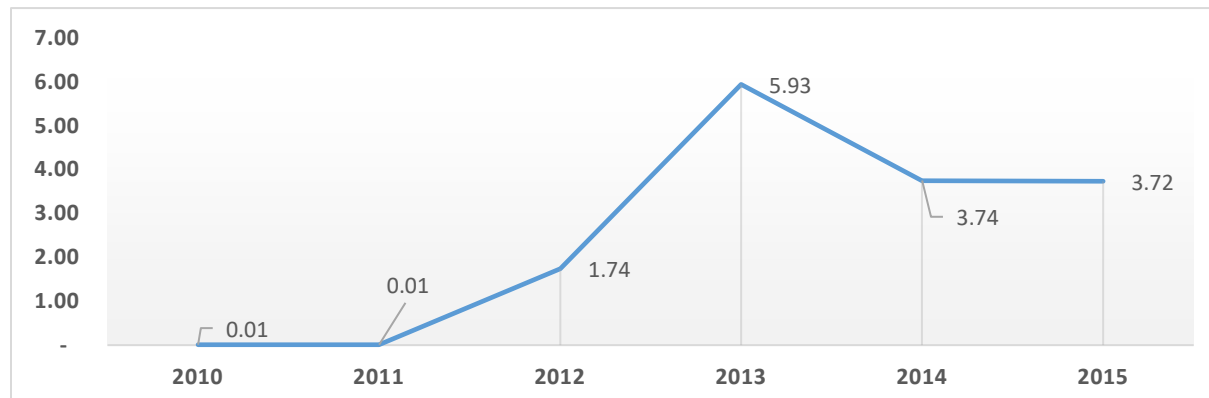
Kumuh merupakan lingkungan pemukiman yang telah mengalami penurunan kualitas secara fisik, ekonomi dan budaya serta lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Ciri permukiman kumuh adalah:

- *Kepadatan penduduk 250-400 jiwa/ha.*

- Jalan-jalan sempit tidak dapat dilalui kendaraan roda empat, cenderung berupa jalan tanah dan belum pengerasan.
- Fasilitas drainase sangat tidak memadai sehingga ketika hujan sangat mudah tergenang air.
- Fasilitas pembuangan air kotor/tinja sangat minim.
- Fasilitas penyediaan air bersih sangat minim, memanfaatkan sumur dangkal, air hujan atau membeli secara kalengan.
- Tata bangunan sangat tidak teratur, bangunan umumnya tidak permanen.
- Rawan terhadap penularan penyakit akibat kepadatan yang tinggi.
- Pemilikan hak terhadap lahan sering tidak legal.

Luas permukiman kumuh di Kutai Kartanegara pada tahun 2010 dan 2011 sebesar 0,01 persen, tetapi pada selanjutnya meningkat menjadi sebesar 5,93 persen tahun 2012 dan tahun 2013. Luas pemukiman kumuh pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan, hingga pada tahun 2015 menjadi 3,72 persen. Luas permukiman kumuh di Kutai Kartanegara cukup kecil. Hal tersebut merupakan kondisi yang baik bagi Kutai Kartanegara akan tetapi pembangunan kota akan semakin mudah dilakukan apabila permukiman kumuh tidak ada. Pemerintah daerah perlu merelokasi masyarakat yang tinggal dipemukiman kumuh sehingga pembangunan daerah berjalan selaras sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Gambar 2.15 Lingkungan Pemukiman Kumuh Tahun 2010 – 2015



Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016

d.5. Rumah Layak Huni

Rumah layak huni menjadi salah satu indikator yang mengukur kondisi perumahan pada fokus urusan wajib. Rumah layak huni adalah rumah yang dapat menyediakan ruang yang cukup bagi penghuninya dan dapat melindungi mereka dari cuaca dingin, lembab, panas, hujan, angin, atau ancaman-ancaman bagi kesehatan, bahaya fisik bangunan, dan vektor penyakit.

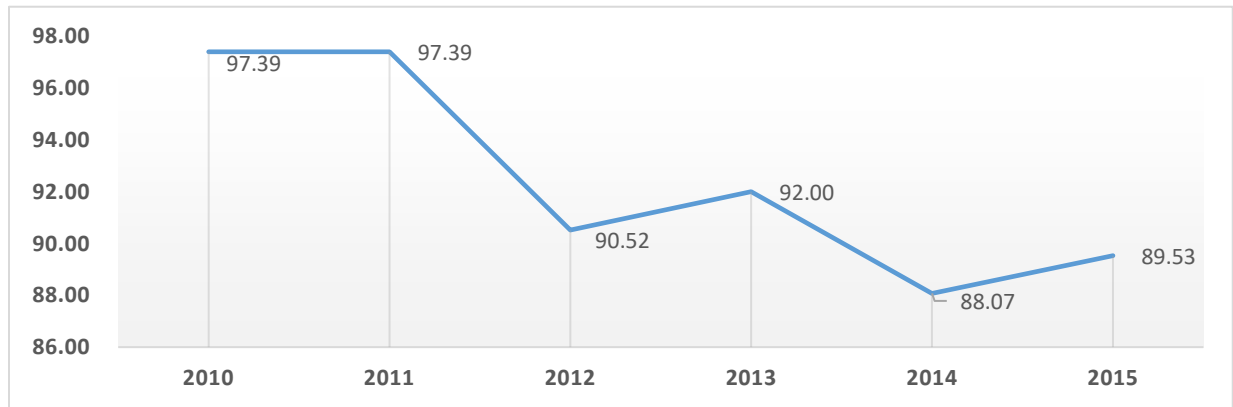
Rumah layak huni di Kutai Kartanegara cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2010 rumah layak huni sebesar 97,39 persen dan pada tahun-tahun berikutnya menurun hingga tahun 2015 menjadi sebesar 89,53 persen. Selain kesehatan yang menjadi faktor utama, rumah layak huni juga menunjukkan kondisi kesejahteraan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penduduk Kutai Kartanegara memiliki kondisi yang cukup baik. Pemerintah daerah kedepannya perlu memperhatikan kondisi rumah layak huni penduduknya agar jumlah rumah layak huni semakin meningkat sehingga mengurangi beban pembangunan daerah apabila hal ini tidak diperhatikan.

Tabel 2.48 Jumlah Rumah Layak Huni 2010-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumah rumah Layak Huni	140,518	140,518.00	158,828	161,000	162,707	163,973
Jumlah Seluruh rumah	144,280	144,280	175,471	175,000	184,746	183,156
Rumah Layak Huni (%)	97.39	97.39	90.52	92.00	88.07	89.53

Sumber Data : Dinas Cipta Kaya dan Tata Ruang

Gambar 2.16 Rumah Layak Huni Tahun 2010 – 2015



Sumber Data : Dinas Cipta Kaya dan Tata Ruang

e. Penataan Ruang

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

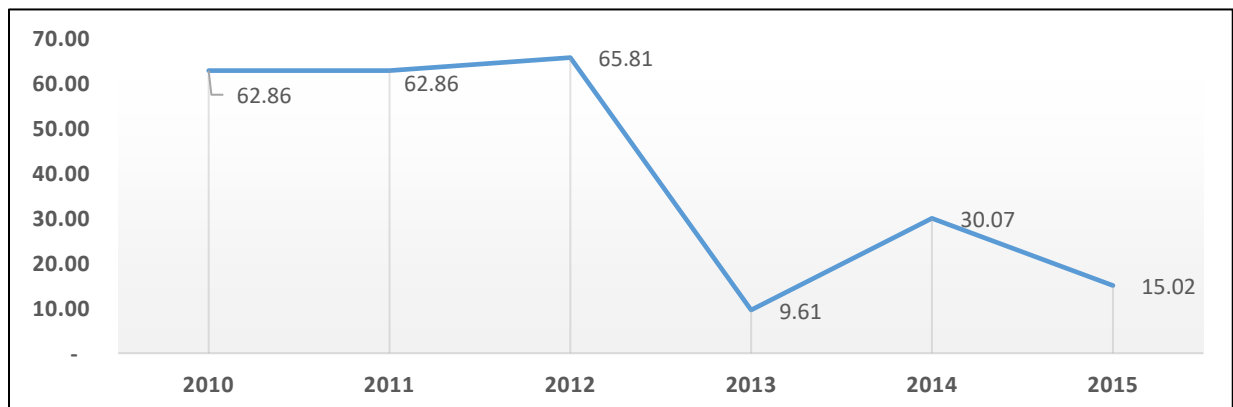
Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria:

- Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi
- Berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur
- Didominasi komunitas tumbuhan.

Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30 persen.

Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kutai Kartanegara menuliskan ruang terbuka hijau di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar pada tahun 2010 dan 2011 sebesar 62,86 persen, selanjutnya pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 65,81 persen. Sesusai dengan peraturan yang ada bahwa minimal RTH adalah 30 persen, maka Kabupaten Kutai Kartanegara telah sesuai dengan peraturan yang ada. Namun angka RTH yang besar ini menurun drastis pada tahun 2013 hanya sebesar 9,61 persen, sebesar 30,7 persen pada tahun 2014 dan sebesar 15,02 pada tahun 2015. Kondisi tersebut perlu diwaspadai dan kedepannya pemerintah daerah perlu memelihara dan meningkatkan kinerja ruang terbuka hijau agar ketersediaan paru-paru kota tetap terjaga.

Gambar 2.17 Ruang Terbuka Hijau Tahun 2010 – 2015



Sumber Data : Dinas Cipta Kaya dan Tata Ruang

f. Perhubungan

Untuk melayani angkutan barang dan penumpang antar pulau maupun untuk ekspor dan impor masih melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 2 (dua) pelabuhan laut yaitu di Kecamatan Samboja dan Kecamatan Muara Badak (Tanjung santan). Pelabuhan tersebut hanya digunakan khusus kapal untuk minyak bumi dan gas disamping terdapat pelabuhan berskala kecil untuk persinggahan para nelayan.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 3 (tiga) buah sungai besar, sungai mahakam adalah yang terbesar dengan panjang sekitar 920 Km yang membentang dari wilayah pantai hingga pedalaman dan terbelah menjadi beberapa anak sungai besar seperti, sungai Kedang Kepala dan belayan yang hanya dapat dilalui kapal motor yang berukuran kecil sampai sedang. Beberapa Kecamatan dapat dijangkau melalui sungai tersebut dan terdapat pelabuhan disetiap kecamatan hanya berukuran kecil, juga terdapat 11 (sebelas) pelabuhan khusus untuk Batu Bara. Dalam menghubungkan antara Kota Tenggarong sebagai Ibukota Kabupaten menuju Kecamatan dapat ditempuh melalui jalur transportasi sungai dengan beberapa jenis kapal, speed boat, Perahu panjang (long boat) dan perahu motor berukuran kecil (ces). Untuk penumpang pengguna jasa transportasi sungai dapat menggunakan kapal setiap hari dari Ibukota Kecamatan melalui Tenggarong menuju Kota Samarinda dan sebaliknya. Beberapa indikator kinerja bidang perhubungan disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.49 Indikator Kinerja Bidang Perhubungan tahun 2010-2012 di Kabupaten Kutai Kartanegara

Indikator	2010	2011	2012
Jumlah arus penumpang angkutan umum	35.402	79.528	95.213
Rasio ijin trayek	0,0016	0,0019	0,0021
Jumlah uji KIR angkutan umum	3765	4001	4242
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	5	5	11
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	+25Menit	+25Menit	+25Menit
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Rp.26.000 s/d Rp.45.000	Rp.26.000 s/d Rp.45.000	Rp.26.000 s/d Rp.45.000
Pemasangan Rambu-rambu	8,6	11,9	10,3

Sumber: Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara tahun 2012

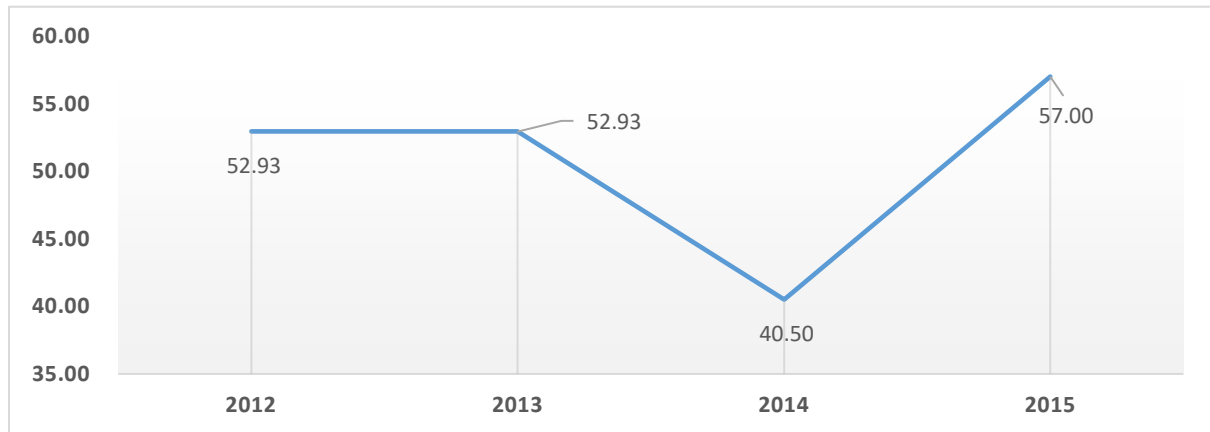
Berdasarkan tabel di atas terdapat peningkatan terhadap jumlah arus penumpang angkutan umum di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2010 hingga tahun 2012 yang semula berjumlah 35.402 meningkat 268,95 persen menjadi 95.213. Peningkatan juga terjadi pada indikator rasio izin trayek yang semula hanya 0,0016 pada tahun 2010 meningkat menjadi 0,0021 pada tahun 2012. Peningkatan jumlah arus penumpang angkutan umum di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun ini menunjukkan mobilitas penduduk yang semakin tinggi pula. Dengan aksesibilitas yang memadai, moda transportasi yang tersedia maka arus mobilitas penduduk ke seluruh wilayah akan terakomodasi. Peningkatan arus penumpang ini bisa menjadi indikator perhubungan dalam Kabupaten Kutai Kartanegara yang semakin membaik, akan berdampak bagi pembangunan wilayah secara positif.

g. Lingkungan Hidup

g.1. Persentase Penanganan Sampah

Pertumbuhan penduduk yang meningkat drastis dan semakin banyaknya masyarakat yang konsumtif menjadi salah satu faktor pendukung semakin meningkatnya jumlah sampah. Di Kota-kota besar sampah menjadi masalah besar dan mengakibatkan bencana.

Gambar 2.18 Persentase Penanganan Sampah Tahun 2012 – 2015

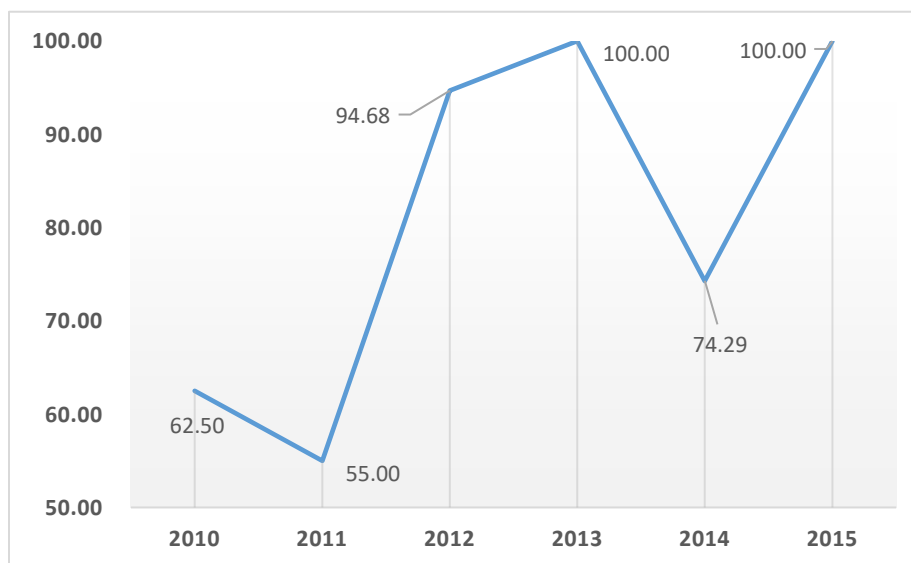


Jumlah sampah yang ditangani di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 52,39 persen pada tahun 2012 dan 2013, tetapi selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 40,50% dan kembali meningkat kembali pada tahun 2015 sebesar 57,00 %. Penurunan penanganan sampah di Kabupaten Kutai Kartanegara disebabkan pertumbuhan penduduk sebagai produsen sampah yang tidak diimbangi dengan peningkatan kemampuan sampah. Penanganan sampah selama ini hanya terfokus di kecamatan Tenggarong, sedangkan penanganan sampah di kecamatan-kecamatan lain relatif belum mendapatkan perhatian yang serius.

Semakin tinggi nilai persentase penanganan sampah, maka kondisi lingkungan semakin terjaga. Peningkatan persentase penanganan sampah dengan berbagai progam dan didukung oleh penduduknya dapat menghindarkan Kabupaten Kutai Kartanegara dari berbagai musibah yang disebabkan oleh sampah. Diharapkan program-program yang berkaitan dengan sampah terus ditingkatkan agar tercipta Kabupaten Kutai Kartanegara yang bersih, aman dan nyaman.

g.2. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal dan Penegakan Hukum Lingkungan

Gambar 2.19 Penegakan Hukum Lingkungan Tahun 2010 – 2015



Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal dan penegakan hukum lingkungan menjadi satu bagian penanganan yang dilaksanakan oleh badan lingkungan hidup. Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pe-

lengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal pada realisasi program Badan Lingkungan Hidup capaiannya berturut-turut selama tahun 2011 hingga tahun 2015 adalah 41,10 persen, 96,61 persen, 100 persen, 100 persen, dan 100 persen. Selain amdal juga terdapat penegakan hukum lingkungan lain yang juga mengalami nilai peningkatan yang baik. Pada tahun 2010 penegakan hukum lingkungan berada pada angka 62,50 persen, pada tahun 2011 penegakan hukum lingkungan turun menjadi 55,00 persen. Pada tahun-tahun berikutnya penegakan hukum lingkungan meningkat hingga pada tahun 2013 mencapai angka 100 persen, tetapi pada tahun 2014 turun menjadi 74,29 persen dan pada tahun 2015 penegakan hukum lingkungan berhasil mencapai angka 100 persen kembali.

Persentase dari kedua indikator memiliki nilai yang tinggi, akan tetapi apabila pemerintah tidak fokus dalam kedua indikator maka persentasenya akan menurun dan terjadi masalah lingkungan. Saran yang dapat diberikan untuk kedua indikator adalah membentuk kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup secara tepat akan dapat mendorong perilaku masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam 25 tahun mendatang agar daerah tidak mengalami krisis SDA, khususnya krisis air, pangan, dan energi.

h. Pertanian

Persentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL) terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanian ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan. Hak Milik (HM) merupakan hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Sifat-sifat hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya adalah hak atas tanah yang dimiliki orang, hak miliklah yang paling kuat dan penuh.

Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. Hak Guna Usaha merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan, pertanian, perikanan dan peternakan. Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Tidak mengenai tanah pertanian, oleh karena itu dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maupun tanah milik seseorang. Hak Pengelolaan Lahan (HPL) adalah hak untuk mengelola lahan yang hanya diberikan atas tanah negara yang dikuasai oleh Badan Pemerintah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Jumlah sertifikat tanah menurut hak atas tanah sejak tahun 2009 sampai dengan 2014 disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.50 Jumlah Sertifikat Tanah Menurut Hak Atas Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2009-2015

Hak Atas Tanah	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Hak Milik	2.779	1.806	3.758	932	2.050	2.174	2.174
Hak Guna Bangunan	2	11	68	5	134	278	278
Hak Guna Usaha	5	22	-	-	-	-	-
Hak Pakai	-	86	17	-	1	29	29
Hak Penggunaan lahan	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	2.786	1.925	3.843	937	2.185	2.481	2.481

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016

Peningkatan sertifikat hak oleh penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menunjukkan kondisi ekonomi masyarakatnya. Dalam jangka waktu satu tahun dari tahun 2013 sebanyak 2.050 hak milik meningkat menjadi 2.174 pada tahun 2014. Selain hak milik, peningkatan juga terjadi pada hak guna bangunan yang semula pada tahun 2013 sebanyak 134 hak guna meningkat drastis menjadi 278 hak guna bangunan pada tahun 2014. Kepemilikan sertifikat hak atas tanah meningkat drastis dapat disebabkan karena peningkatan kesejahteraan penduduk.

Persentase luas lahan keseluruhan dibandingkan luas lahan yang bersertifikat pada tahun 2013 sebanyak 11,50 persen. Berkaitan dengan pertanian terdapat beberapa kasus tanah negara. Sepanjang tahun 2011 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan dalam penyelesaian

kasus tanah negara. Tahun 2013 sebanyak 57,89 kasus yang dapat diselesaikan. Peningkatan terhadap penyelesaian kasus ini mengindikasikan penegakan peraturan dalam tata ruang dan tata guna lahan. Semakin banyak kasus yang mampu ditangani maka peraturan tata guna lahan dan tata ruang semakin ditegakkan. Penyelesaian izin lokasi juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 sebanyak 51,82 persen dari seluruh izin lokasi yang dapat diselesaikan. Lokasi yang berizin dapat dipantau perkembangan dan dievaluasi bagi perkembangan tata ruang dan perkembangan wilayah itu sendiri.

i. Kependudukan dan Catatan Sipil

i.1. Kepemilikan KTP

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan UUNomor 23 Tahun 2006, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang berumur di bawah 17 tahun tetapi sudah menikah/kawin atau sudah pernah menikah/kawin, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP.

Kepemilikan KTP oleh penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara diketahui dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010 sebesar 75,00 persen, hingga tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 94,47 persen. Tahun 2014 kepemilikan KTP kembali meningkat menjadi 95 persen dan pada tahun 2015 turun menjadi 82,37 persen. Pada tahun 2015 kepemilikan KTP sebesar 82,37 persen, dikarenakan pertambahan jumlah penduduk yang berpengaruh terhadap kepemilikan KTP bagi penduduk yang baru berumur 17 tahun. Secara keseluruhan dengan nilai 82,37 persen penduduk dibandingkan dengan penduduk wajib KTP sudah cukup tinggi, akan tetapi nilai ini perlu semakin ditingkatkan agar mencapai 100 persen. Apabila kepemilikan KTP mencapai 100 persen akan memudahkan petugas pencatatan sipil dalam melakukan pendataan serta memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai urusan seperti; misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya.

Tabel 2.51 *Kepemilikan Kartu Tanda penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010-2015*

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Penduduk yang memiliki KTP	361.817	358.800	366.061	416.733	422.353	333.313
Jumlah penduduk wajib KTP	482.423	466.084	387.473	510.853	444.582	404.673
Kepemilikan KTP	75,00	76,98	94,47	81,58	95,00	82,37

i.2. Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk

Akta kelahiran adalah akta/catatan otentik yang dibuat oleh pegawai catatan sipil berupa catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak secara lengkap dan jelas, serta status kewarganegaraan anak. Akta kelahiran dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 hari kerja bagi WNI dan 10 hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi.

Kepemilikan akta kelahiran penduduk di Kutai Kartanegara pada tahun 2010 diperoleh datanya dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010 sebesar 668,41 artinya bahwa setiap 1000 penduduk Kabupaten Kuta Kartanegara terdapat 668 penduduk yang memiliki akta kelahiran. Pada tahun-tahun selanjutnya angka ini cenderung naik hingga tahun 2015 mencapai angka 887,29. Fakta dari data di atas penduduk yang memiliki akta kelahiran mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dinas Catatan Sipil telah melakukan berbagai program peningkatan kepemilikan akta kelahiran. Salah satu program yang memudahkan penduduk dalam pembuatan akta kelahiran dengan pembuatan akta kelahiran kolektif yang dibagi menjadi dua cara yaitu:

1. *Akta Kolektif Swadaya, dimana suatu daerah menunjuk seseorang atau tim kepanitiaan untuk mengurus permohonan pembuatan akta kelahiran secara bersama-sama. Tim atau orang tersebut datang ke KCS di Ibukota Kabupaten.*

2. *Akta Kolektif Jemput Bola*, artinya pembuatan akta kelahiran di suatu daerah secara bersama-sama, dengan cara para pemohon akta kelahiran cukup datang ke kantor kelurahan setempat dimana para petugas dari KCS datang ke kantor kelurahan tersebut dan membuka pelayanan permohonan akta kelahiran.

Pembuatan akta kelahiran secara kolektif ini dilakukan untuk mengatasi masalah jauhnya tempat pengurusan akta kelahiran dari tempat tinggal pemohon.

Tabel 2.52 Kepemilikan Akta kelahiran Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran	418.619	418.619	550.267	558.429	571.002	581.313
Jumah Penduduk	626.286	628.680	845.058	850.821	645.817	655.167
Kepemilikan akta kelahiran	668,41	665,87	651,16	656,34	884,15	887,29

j. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

j.1. Rasio Akseptor KB

Keluarga Berencana merupakan salah satu program dari pemerintah pusat dalam rangka mengendalikan populasi penduduk yang terus meningkat. Keluarga berencana itu sendiri memiliki arti gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Program keluarga berencana yang membatasi jumlah kelahiran dilakukan dengan cara penggunaan alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD dan sebagainya. Akseptor KB itu sendiri berarti Pasangan Usia Subur (PUS) yang salah seorang dari padanya menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi dengan tujuan untuk pencegahan kehamilan baik melalui program maupun non program. Rasio akseptor KB menghitung jumlah akseptor KB dalam periode 1 tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama.

Tabel 2.53 Rasio Akseptor Aktif & Baru KB Per Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	KECAMATAN	PUS	AKSEPTOR	RASIO AKSEPTOR KB
1	Samboja	11.012	8.022	0,73
2	Muara Jawa	7.779	5.811	0,75
3	Sanga-Sanga	2.891	2.323	0,80
4	Loa Janan	12.534	10.440	0,83
5	Loa Kulu	8.236	6.411	0,78
6	Muara Muntai	3.701	2.713	0,73
7	Muara Wis	1.751	1.336	0,76
8	Kota Bangun	6.364	4.971	0,78
9	Tenggarong	21.345	18.161	0,85
10	Sebulu	2.411	1.706	0,71
11	Tenggarong Seberang	13.803	13.398	0,97
12	Anggana	5.845	4.519	0,77
13	Muara Badak	12.595	9.813	0,78
14	Marang Kayu	4.930	3.620	0,73
15	Muara Kaman	6.778	5.107	0,75
16	Kenohan	1.516	1.291	0,85
17	Kembang Janggut	6.478	4.793	0,74
18	Tabang	1.984	1.348	0,68
TOTAL		131.953	105.783	0,80

Sumber : Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kutai Kartanegara 2015

Dari jumlah pasangan usia subur di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi akseptor KB, didapatkan angka rasio akseptor KB sebesar 0,80. Nilai akseptor KB yang cukup banyak di Kabupaten Kutai Kartanegara terletak di Kecamatan Tenggarong Seberang, Tenggarong, dan Kenohan. Jumlah akseptor KB paling sedikit berada di Kecamatan Tabang dengan nilai 0,68.

Semakin rendahnya rasio akseptor KB dapat menunjukkan semakin rendahnya jumlah penduduk pengguna KB dibandingkan dengan pasangan usia subur. Saat ini pemerintah pusat banyak melakukan promosi tentang KB melalui iklan di televisi, akan lebih baik apabila program ini di

teruskan ke daerah. Pemerintah dalam hal ini Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu mempromosikan KB melalui berbagai media seperti workshop atau seminar dengan tujuan dapat bertemu langsung dengan calon akseptor KB.

j.2. Cakupan Peserta KB Aktif

Pelayanan KB berkualitas adalah pelayanan KB sesuai standar dengan menghormati hak individu dalam merencanakan kehamilan sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka kematian Ibu dan menurunkan tingkat fertilitas (kesuburan) bagi pasangan yang telah cukup memiliki anak (2 anak lebih baik) serta meningkatkan fertilitas bagi pasangan yang ingin mempunyai anak. Keluarga berencana (KB) dapat meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terdapatnya pertumbuhan penduduk.

Tabel 2.54 Cakupan Peserta KB Aktif Kabupaten Kutai Kartanegara 2015

NO	KECAMATAN	PUS	Peserta KB Aktif	Cakupan Peserta KB Aktif
1	Samboja	11.012	7.742	70,31
2	Muara Jawa	7.779	5.470	70,32
3	Sanga-Sanga	2.891	1.970	68,14
4	Loa Janan	12.534	8.862	70,70
5	Loa Kulu	8.236	5.774	70,11
6	Muara Muntai	3.701	2.544	68,74
7	Muara Wis	1.751	1.205	68,82
8	Kota Bangun	6.364	4.470	70,24
9	Tenggarong	21.345	15.165	71,05
10	Sebulu	2.411	1.701	70,55
11	Tenggarong Seberang	13.803	9.668	70,04
12	Anggana	5.845	4.034	69,02
13	Muara Badak	12.595	8.918	70,81
14	Marang Kayu	4.930	3.357	68,09
15	Muara Kaman	6.778	4.726	69,73
16	Kenohan	1.516	1.019	67,22
17	Kembang Janggut	6.478	4.418	68,20
18	Tabang	1.984	1.348	67,94
TOTAL		131.953	92.391	70,02

Sumber : Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kutai Kartanegara 2015

Tahun 2015 nilai cakupan peserta KB aktif di Kutai Kartanegara sebesar 70,02 persen. Nilai cakupan yang paling tinggi pada tahun 2015 berada di Kecamatan Tenggarong dengan nilai cakupan sebesar 71,05 persen dan cakupan terendah di Kecamatan Marang Kayu dengan nilai cakupan peserta KB aktif sebesar 68,09 persen. Semakin rendahnya cakupan peserta KB dapat menunjukkan semakin rendahnya jumlah penduduk pengguna KB dibandingkan dengan pasangan usia subur. Dengan nilai cakupan peserta KB pada tahun 2015 sebesar 70,02 persen, pemerintah sebaiknya mulai mempromosikan KB dengan cara memberitahukan kepada penduduk khususnya pasangan usia subur mengenai manfaat program KB.

j.3. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 indikator yang meliputi:

1. Indikator Ekonomi

- Makan dua kali atau lebih dalam sehari
- Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya di rumah, bekerja, sekolah dan berpergian)
- Bagian terluas lantai bukan dari tanah.

2. Indikator Non-Ekonomi

- Melaksanakan ibadah
- Bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan.

Keluarga sejahtera I adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi:

1. Indikator Ekonomi

- Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging, ikan atau telur
- Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru
- Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni

2. Indikator Non-Ekonomi

- Ibadah teratur
- Sehat tiga bulan terakhir
- Punya penghasilan tetap
- Usia 10-60 tahun mampu membaca dan menulis
- Usia 6-15 tahun bersekolah
- Anak lebih dari dua orang, ber-KB.

Data yang disajikan pada Tabel 2.55 berikut ini merupakan hasil perhitungan menggunakan rumus di atas.

Tabel 2.55 Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I tahun 2011- 2013

Tahun	2011	2012	2013
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I (%)	29,95	100	45

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014

Keluarga pra sejahtera dan Sejahtera I di Kutai Kartanegara pada tahun 2011 sebesar 29,95%. Pada tahun 2012 meningkat hingga mencapai 100% dan kembali menurun pada tahun 2013 dengan nilai sebesar 45%. Pada tahun 2013 jumlah tersebut baik jika dilihat dari segi pembangunan, karena nilainya yang kecil sehingga kedepannya mungkin tidak akan menjadi beban pembangunan. Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I yang kecil menunjukkan bahwa pada tahun 2011 keluarga di Kutai Kartanegara sebagian besar telah sejahtera. Namun pada tahun 2013 jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I meningkat. Diharapkan pada tahun-tahun kedepannya pemerintah daerah dapat lebih memperkecil persentase Keluarga pra sejahtera dan Sejahtera I dengan program peningkatan kesejahteraan.

k. Sosial

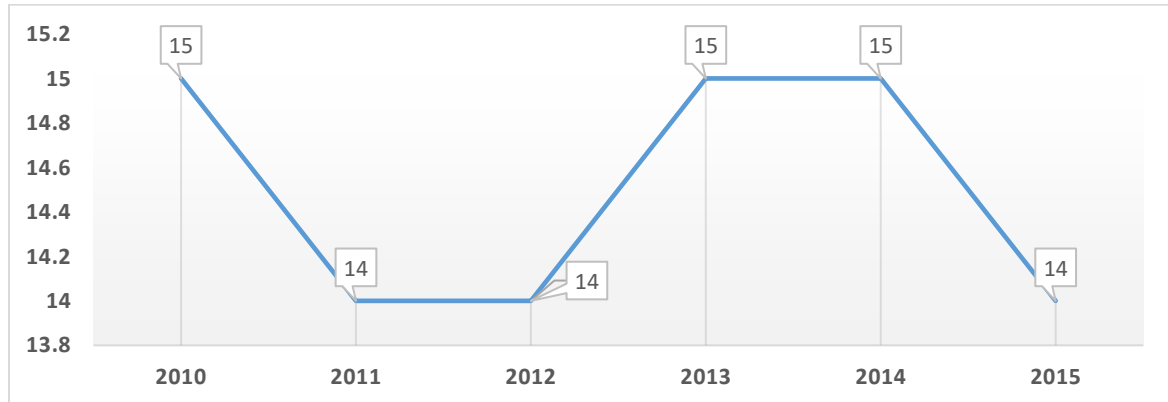
k.1. Sarana Sosial

Sarana sosial adalah sarana yang disediakan baik oleh pemerintah ataupun swasta/pribadi dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial. Sarana sosial saat ini banyak disediakan oleh pribadi yang dilatar belakangi oleh alasan kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sarana sosial ada berbagai macam jenisnya seperti seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi.

Hasil laporan yang ditulis pada LLPD dan LKPJ Bupati mengenai capaian kinerja Dinas Sosial yang berkaitan dengan IKK adalah ketersediaan sarana sosial. Dari kedua laporan diatas diketahui pada Tahun 2010 ada 15 sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi. Jumlah ini menurun pada tahun 2011 hanya terdapat 14 sarana sosial dan tahun 2013 kembali meningkat menjadi sebanyak 15 dan kembali berkurang pada tahun 2015 menjadi 14 sarana sosial.

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dinilai berhasil, dengan berbagai program kegiatannya. Akan lebih baik apabila pada tahun-tahun kedepannya hal ini menjadi acuan agar lebih baik dari sekarang, dengan menangani berbagai masalah sosial yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar 2.20. Sarana sosial : panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi



k.2. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Masalah kesejahteraan sosial merupakan permasalahan yang cukup kompleks, banyak faktor yang dapat memunculkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), diantaranya adalah kemiskinan. Hal tersebut bukan sekedar disebabkan masalah keterampilan dan lapangan kerja, tetapi yang faktor utama seseorang menjadi PMKS adalah masalah sikap mental. Esensi dari permasalahan gelandangan adalah ketiadaan tempat tinggal bagi mereka yang terpaksa harus tinggal di kawasan itu sehubungan dengan pekerjaan yang harus mereka lakukan disekitar tempat tersebut. Penanganan kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan masyarakat dan dunia usaha juga mempunyai andil dan tanggung jawab dalam penanganan PMKS.

Data yang bersumber dari LPPD menyebutkan bahwa pada Tahun 2011 penanganan PMKS sebesar 41,58 persen. Hampir setengah dari masalah PMKS yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat ditangani oleh Dinas Sosial. Pada tahun-tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2012 mengalami sedikit penurunan yaitu sebanyak 41,16 persen. PMKS yang memperoleh bantuan sosial semakin meningkat pada tahun 2013 menjadi sebesar 48,55 persen.

Kedepannya Pemerintah dan Dinas Sosial dapat meningkatkan kinerjanya dengan mengurangi lebih banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Salah satu yang dapat dijadikan solusi dalam melakukan penanganan PMKS adalah dengan memberikan rehabilitasi sosial dengan sistem balai, rehabilitasi ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan keterampilan.

I. Ketenagakerjaan

I.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio ini menggambarkan partisipasi angkatan kerja pada tiap kelompok umur dan jenis kelamin. TPAK menurut kelompok umur biasanya memiliki pola huruf "U" terbalik. Pada kelompok umur muda (15-24) tahun, TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Begitu juga pada kelompok umur tua (diatas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun).

Berikut disajikan tabel data mengenai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara pada usia diatas 15 Tahun selama tahun 2010 hingga tahun 2014 pada Tabel 2.56

Tabel 2.56 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2015

Jenis Kelamin	2011		2012		2013		2014		2015	
	AK	TPAK	AK	TPAK	AK	TPAK	AK	TPAK	AK	TPAK
Laki-laki	215.239	90,65	221.902	88,68	218.037	84,4	221.830	83	231.836	85,41
Perempuan	90.950	42,78	82.113	37,17	83.191	36,67	96.669	41	75.310	31,40
Jumlah	306.189	60,04	304.015	64,53	301.228	62,08	318.499	64	307.146	60,07

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara 2016

AK = Angkatan Kerja

TPAK= Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Nilai TPAK secara keseluruhan pada tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi. Penurunan TPAK terjadi pada tahun 2011 sebesar 7,61 poin dari tahun 2010. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah usia kerja. Peningkatan partisipasi angkatan kerja mulai dilihat pada tahun 2012 menjadi 64,53 persen dan kembali turun pada tahun 2013 menjadi 62,08 persen, sebelum mengalami kenaikan pada tahun 2014 menjadi 64 persen. Dilihat lebih detail berdasarkan jenis kelamin, nilai TPAK di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2014 jenis kelamin laki-laki mengalami penurunan sebesar 1,4 persen dari tahun 2013 ke 2014, sedangkan pada jenis kelamin perempuan mengalami peningkatan sebesar 4,33 persen.

Jika kita lihat perbandingan antar jenis kelamin, maka TPAK perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini dikarenakan budaya yang berkembang di Indonesia laki-laki sebagai pencari nafkah utama sehingga perempuan lebih sedikit masuk ke dalam angkatan kerja.

I.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerap. Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah berkerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Data tingkat pengangguran terbuka diperoleh dari buku Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2015, sehingga data yang disajikan data Tahun 2009-2014 pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009-2015

Tahun	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	TPT Laki-laki dan Perempuan (%)
2009	11,48	11,13	11,38
2010	7,99	19,20	11,53
2011	7,01	9,29	7,68
2012	6,95	10,42	7,89
2013	6,80	8,89	7,73
2014	7,82	7,27	7,65
2015	8,74	14,77	10,22

Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2015

Tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2009-2014 nilainya mengalami fluktuasi namun cenderung menurun, dengan nilai 11,53 persen pada tahun 2009 sedangkan pada tahun 2014 menjadi 7,82 persen, tetapi pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kutai Kartanegara kembali meningkat menjadi 10,22 persen. Kondisi TPT terakhir ini perlu diwaspadai oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, karena pengangguran menjadi masalah dalam perekonomian, dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan

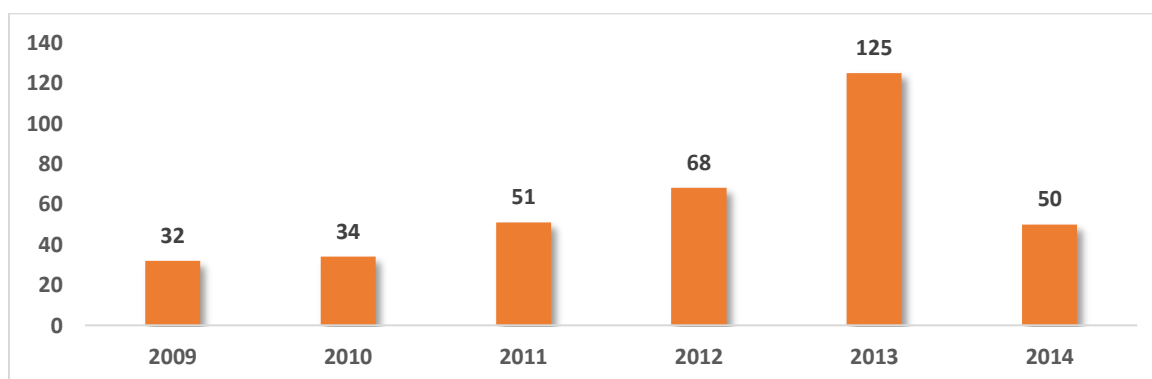
berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Mengukur tingkat pengangguran terbuka dapat digunakan sebagai acuan pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun, dengan demikian setiap tahunnya akan ada program-program yang dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka.

m. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah koperasi di Kutai Kartanegara selama tahun 2009 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan yang signifikan. Gambar di bawah menunjukkan perkembangan jumlah koperasi pada tahun 2009 hingga tahun 2014. Pada tahun 2009 di Kabupaten Kutai Kartanegara hanya terdapat koperasi sebanyak 32 buah koperasi. Jumlah ini semakin meningkat menjadi 51 pada tahun 2011 dan meningkat pada tahun 2012 hingga peningkatan drastis pada tahun 2013 menjadi sebanyak 125 buah koperasi. Namun, pada tahun 2014, jumlah koperasi menurun menjadi sebanyak 50 koperasi.

Gambar 2.2 Jumlah Koperasi Tahun 2009-2014



Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2015

n. Penanaman Modal

n.1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) dan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman Modal dalam bentuk modal asing maupun modal dalam negeri menunjukkan daya saing suatu wilayah sebagai bentuk persaingan investasi. Pada tahun 2009 hingga tahun 2014, penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing mengalami fluktuasi yang beragam. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2009 hingga tahun 2015, serta Realisasi Penanaman Modal Asing (PMDA) disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.58 Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 2009-2014

Tahun	Jumlah Proyek	Modal (Rp)	Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
2009	1	14.500.000.000	40	-
2010	8	1.978.668.350.306	5.197	9
2011	11	3.749.457.566.843	5.197	-
2012	3	1.053.870.934.137	1.496	1
2013	11	7.097.275.234.827	3.013	7
2014	9	6.493.558.100.000	-	-
2015	-	5.454.084.324.136	-	-

Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka 2015

Tabel 2.59 Realisasi Penanaman Modal Asing Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah Proyek	Investasi	Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
2010	12	1.181.330.858.965	8.385	28
2011	9	1.975.292.550.933	324	5
2012	12	4.465.706.885.822	-	-
2013	25	3.949.819.270.454	-	-
2014	38	4.878.657.118.848	19.203	139
2015	-	2.178.807.395.054	-	-

Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka 2015

Pada tahun 2014 penanaman modal dalam negeri terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan menjadi 9 proyek dari tahun 2013 sebanyak 11 proyek. Modal yang ditanamkan sebesar Rp 6.493.558.100.000,00 terinci ke dalam sektor pertambangan batu bara, perkebunan kelapa sawit, industri minyak makan nabati, tenaga listrik, dan jasa penunjang pertambangan umum, data terakhir tahun 2015 realisasi investasi sebesar Rp.5.454.084.324.136

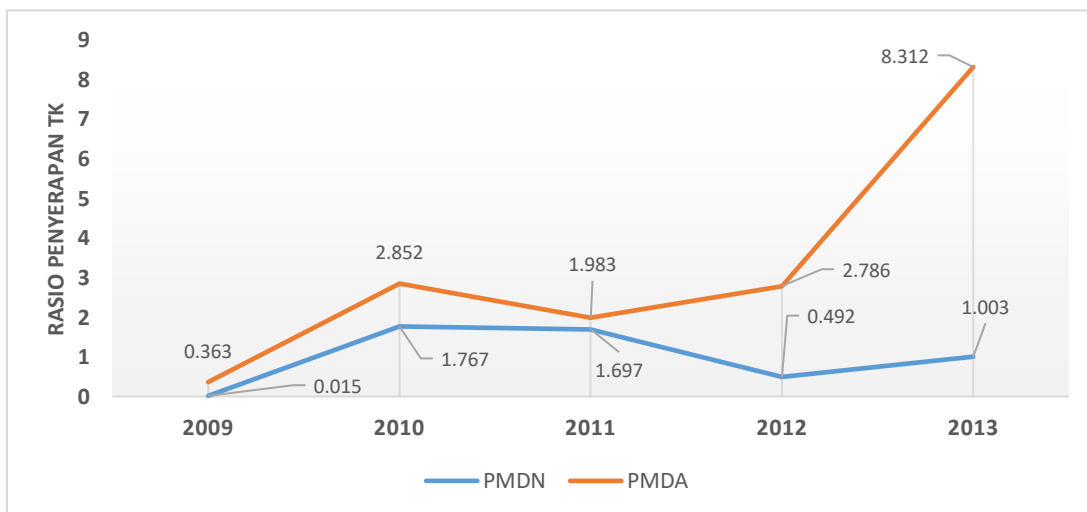
Sementara penanaman modal asing mengalami peningkatan yang cukup tajam yaitu dari 25 proyek pada tahun 2013 menjadi 38 proyek pada tahun 2014. Sehingga modal yang ditanamkan juga mengalami kenaikan Rp 3.949.819.270.454,00 menjadi Rp 4.878.657.118.848,00 di tahun 2014, sedangkan pada tahun 2015 realisasi investasi PMA sebesar Rp.2.178.807.395.054.

n.2. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja tahun 2009 sampai dengan 2013 yang disajikan berdasarkan PMA dan PMDN pada Gambar 2.22 Rasio daya serap tenaga kerja berdasarkan PMDN dan PMDA mengalami peningkatan yang tidak teratur. PMDN sempat mengalami peningkatan pada tahun 2010 namun kembali menurun pada tahun 2011 hingga 2012. Peningkatan mulai terjadi pada tahun 2013. Begitu juga pada rasio daya serap tenaga kerja pada PMDA yang sempat mengalami peningkatan tahun 2011 lalu mengalami penurunan hingga tahun 2012 dan kembali meningkat tajam pada tahun 2013.

Peningkatan rasio daya serap tenaga kerja baik dari PMDN maupun PMDA dapat dijadikan indikator yang baik dalam penyerapan tenaga kerja dari dalam negeri yang berbanding lurus dengan semakin besarnya investasi.

Gambar 2.22 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja



Sumber: data dari berbagai sumber diolah, 2014-2015

o. Kepemudaan dan Olahraga

o.1. Jumlah Organisasi Pemuda

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang berkerjasama dengan suatu perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran.

Tabel 2.60 Jumlah Organisasi Pemuda Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Dirinci Per Kecamatan

No	Kecamatan	Tumbuh	Berkembang	Maju	Percontohan	Jumlah
1	Samboja	1	1	-	-	2
2	Muara Jawa	1	-	-	-	1
3	Sanga-Sanga	1	-	-	-	1
4	Loa Janan	1	2	-	-	3
5	Loa Kulu	1	6	-	-	7
6	Muara Muntai	1	-	-	-	1
7	Muara Wis	1	-	-	-	1
8	Kota Bangun	1	-	-	-	1
9	Tenggarong	1	3	-	-	4
10	Sebulu	1	2	-	-	3
11	Tenggarong Seberang	1	1	-	-	2
12	Anggana	1	-	-	-	1
13	Muara Badak	1	1	-	-	2
14	Marang Kayu	1	2	-	-	3
15	Muara Kaman	1	-	-	-	1
16	Kenohan	1	-	-	-	1
17	Kembang Janggut	1	-	-	-	1
18	Tabang	1	1	-	-	2
	2011	18	19	-	-	37
	2010	204	33	2	-	239

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2012

Jumlah organisasi pemuda pada tahun 2010 ke 2011 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2010 jumlah organisasi di Kutai Kartanegara hanya berjumlah 239 dan menurun menjadi 37 organisasi pada tahun 2011. Sampai dengan tahun 2014, jumlah organisasi pemuda hanya sebanyak 39. Penurunan jumlah organisasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah.

o.2. Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta) dan Lapangan Olah Raga

Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa, terus disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan. Pembangunan dan pembinaan olahraga disamping optimalisasi olahraga prestasi, dilakukan juga upaya membangun budaya olahraga dalam masyarakat. Untuk meningkatkan pembinaan olahraga dimaksud masih diperlukan dukungan sarana dan prasarana olahraga, baik olahraga masyarakat maupun sarana olahraga terpadu dengan standar internasional.

Sarana dan prasarana olahraga dan pemuda di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut :

Tabel 2.61 Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Prasarana	Fasilitas	Lokasi
1	Stadion Olahraga Rondong Demang	Lapangan Sepak bola Lapangan Tenis (outdoor) Gedung Squas Kolam Renang Gedung Beladiri	Jl. Stadion Tenggarong

No	Prasarana	Fasilitas	Lokasi
2	Lapangan Pemuda	Lapangan Sepak bola	Jl. Mawar Tenggarong
		Lapangan Tenis (outdoor)	
3.	Gedung Olahraga DPRD	Lapangan Bulu Tangkis	Jl. Patin Tenggarong
		Lapangan Tenis (outdoor & indoor)	
4	Komplek Olahraga Perjiwa	Lapangan Sepak Bola dan Atletik	Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang
		Lapangan Panahan	
		Gedung Beladiri	
		Velodroom	
		Lapangan berkuda	
		Sirkuit Cros BMX	
		Mess Atlit	
5	Gedung KNPI	Ruang Pertemuan dan Sekretariat	Jl. Mawar Tenggarong
6	Gedung KONI	Sekretariat	Jln. Mulawarman
7	Gedung Bulu Tangkis/BPU	Tersebar di 18 Kecamatan	Di Kecamatan

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kukar, 2010

p. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

p.1. Kemiskinan

Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara masih menjadi suatu permasalahan pembangunan dan sekaligus tantangan yang harus diselesaikan kedepan. Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan pendekatan yang bersifat sektoral maupun kewilayahan serta melibatkan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Upaya penanggulan kemiskinan selama periode 2009-2013 telah dilakukan melalui kebijakan pro poor maupun pro job. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 2.62 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009-2015 (revisi)

Tahun	Jumlah Penduduk	Penduduk Miskin	Prosentase
2009	605.857	42.480	8,69
2010	626.680	54.700	8,73
2011	648.215	47.300	7,21
2012	665.489	47.100	6,94
2013	683.131	52.100	7,52
2014	700.439	52.981	7,42

Sumber: BPS Kutai Kartanegara, 2009-2015

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara 2009–2013 terjadi penurunan dari 8,97 persen pada tahun 2009 menjadi 6,98 persen pada tahun 2012. Namun pada tahun 2013 kembali mengalami peningkatan sebanyak 1,24 poin menjadi 7,62 persen. Secara rinci berdasarkan persentase dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2013 sebanyak 52.000 jiwa dari seluruh penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 683.313 jiwa.

q. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

q.1. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM adalah banyaknya kelompok binaan LPM dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah LPM.

Kelompok binaan LPM adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Selanjutnya hasilnya sajikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.63 Banyaknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Menurut Kecamatan di Kutai Kartanegara Tahun 2015

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	LPM
1	Samboja	19	19
2	Muara Jawa	11	11
3	Sanga-Sanga	9	9
4	Loa Janan	13	13
5	Loa Kulu	7	7
6	Muara Muntai	21	21
7	Muara Wis	20	20
8	Kota Bangun	14	14
9	Tenggarong	18	18
10	Sebulu	14	14
11	Tenggarong Seberang	15	15
12	Anggana	8	8
13	Muara Badak	5	5
14	Marang Kayu	8	8
15	Muara Kaman	13	13
16	Kenohan	11	11
17	Kembang Janggut	8	8
18	Tabang	23	23
Jumlah		237	237

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016

Data untuk menghitung Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tidak lengkap, data jumlah LPM binaan tidak tersedia, sehingga tidak dapat dilakukan perhitungan. Data yang tersedia adalah data jumlah LPM. Jumlah LPM di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2015 sebanyak 237 buah LPM yang sesuai dengan banyak jumlah desa yang ada. LPM terbanyak terletak di Kecamatan Muara Muntai dengan 21 LPM, sedangkan terendah ada di Kecamatan Muara Badak (5 buah LPM). Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan LPM maka menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPM. Besarnya rata-rata jumlah kelompok binaan LPM juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan LPM.

r. Statistik

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan urusan statistik berdasarkan lampiran Permendagri No 45 tahun 2010 adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti :

1. Buku "Kabupaten Dalam Angka"
2. Buku "PDRB Kabupaten"
3. Buku "Indikator Kesejahteraan rakyat"

Kedua dokumen diatas ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, disusun oleh Badan Pusat Statistik. Penyusunan kedua buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

s. Komunikasi dan Informatika

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Daerah, ketersediaan akses informasi terutama infrastruktur telekomunikasi sangat esensial untuk membuka keterisolasian suatu daerah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi Daerah tersebut.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 22 Tower milik Pemerintah Daerah yang tersebar di 18 Kecamatan (2 tower di Kecamatan Tabang, 3 tower di Kecamatan Loa Janan, 2 tower di Kecamatan Tenggarong, dan masing-masing 1 tower di Kecamatan lainnya), 209 Tower milik swasta.

t. Perpustakaan

t.1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat dimana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu

kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung.

Jumlah kunjungan terbanyak pada tahun 2015 di perpustakaan ada pada bulan Oktober dengan jumlah kunjungan 2.000 pengunjung, sedangkan bulan yang sepi pengunjung adalah bulan Juli dengan jumlah 597 pengunjung. Dilihat secara keseluruhan jumlah pengunjung perpustakaan meningkat pada tahun 2011 ke 2012. Jumlah pengunjung Tahun 2011 sebanyak 17.522 pengunjung menjadi 19.608 peningkatan jumlah pengunjung ini sebesar 10,7 persen dari tahun 2011. Pengunjung perpustakaan berfluktuasi pada tahun 2013 menjadi sebanyak 18.264 orang, kembali naik pada tahun 2014 menjadi 19.523 orang, sebelum kembali menurun pada tahun 2015 menjadi 17.875 orang.

Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan menggambarkan tingginya budaya baca di daerah. Dengan jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator efektivitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah. Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai peluang untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

Data jumlah pengunjung perpustakaan di Kutai Kartanegara dirinci per kunjungan setiap bulannya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.64 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015

Bulan		Anggota	Peminjam	Pengunjung
1	Januari	152	1.529	2.000
2	Februari	143	1.488	1.763
3	Maret	249	1.802	2.466
4	April	105	1.328	1.653
5	Mei	122	1.121	1.528
6	Juni	90	879	1.166
7	Juli	70	419	597
8	Agustus	90	868	1.266
9	September	132	1.008	1.722
10	Oktober	121	899	1.430
11	Nopember	88	784	1.148
12	Desember	103	758	1.136
Jumlah	2015	1.465	12.883	17.875
	2014	1.652	12.262	19.523
	2013	1.213	12.016	18.264
	2012	1.196	12.045	19.608
	2011	572	10.433	17.522

Sumber : Badan Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tahun 2016

t.2. Koleksi Buku yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah

Koleksi buku adalah jumlah kumpulan judul buku yang dimiliki oleh perpustakaan daerah, koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan daerah seharusnya bervariasi, dari buku, majalah, laporan dan sebagainya. Jumlah koleksi buku yang dimiliki perpustakaan daerah tahun 2011-2014 mengalami peningkatan dari 17.176 menjadi 30.528 judul buku. Jumlah buku yang tersedia juga turut meningkat menjadi 81.298 buku pada tahun 2014 yang sebelumnya pada tahun 2011 sebanyak 37.900 buku. Namun angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2015 dengan jumlah judul buku hanya 22.594 dan jumlah buku yang tersedia sebanyak 54.379 buku. Meskipun demikian, jumlah buku yang dipinjam pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 24.132 buku.

Semakin banyak koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan daerah akan menarik pengunjung semakin banyak untuk datang ke perpustakaan. Dengan banyak pengunjung yang datang untuk membaca maka pengetahuan penduduk daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara akan meningkat dan wawasan menjadi luas.

Data koleksi buku di Kutai Kartanegara dirinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.65 Jumlah Koleksi Buku di Perustakaan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015

Jenis Buku		Judul Buku	Buku Yang Tersedia	Buku Yang Dipinjam
1	Karya Umum	2.254	4.794	836
2	Filsafat	829	1.970	821
3	Agama	2.911	6.892	2.055
4	Ilmu Sosial	3.930	9.609	4.493
5	Bahasa	1.261	3.119	659
6	Ilmu Murni	2.043	4.737	1.347
7	Ilmu Terapan	4.223	9.358	2.245
8	Kesenian	885	2.641	2.620
9	Kesusasteraan	1.013	2.654	6.928
10	Geografi & Sejarah	939	2.534	793
11	Fiksi dan Ilmu Anak-anak	791	2.162	1.335
12	Koleksi Referensi	1.335	2.362	0
13	Majalah & Buletin	32	1.035	0
14	Surat Kabar	5	276	0
15	Buku Bacaan Anak-anak	143	236	0
Jumlah	2015	22.594	54.379	24.132
	2014	30.528	81.298	-
	2013	18.327	41.352	22.896
	2012	*	38.145	23.110
	2011	17.176	37.900	20.737

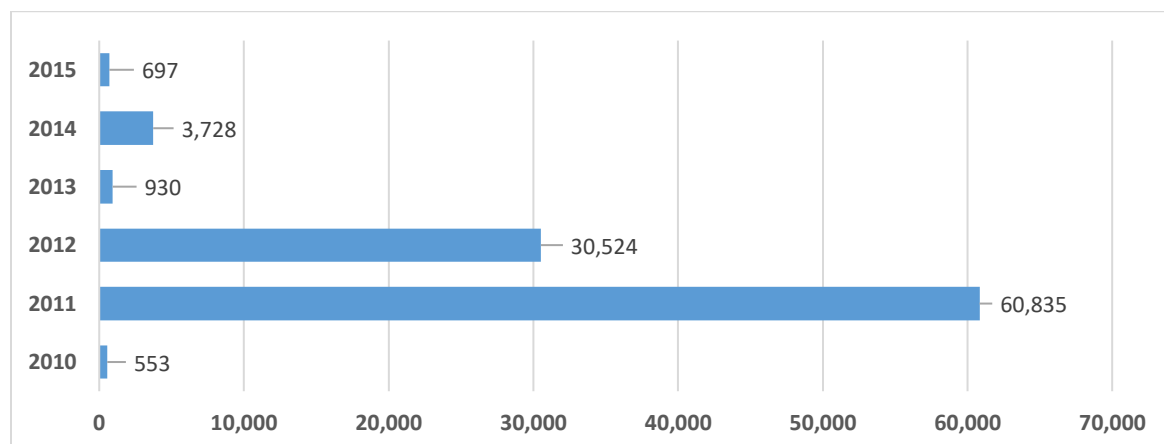
Sumber : Sumber : Badan Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tahun 2016

u. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

u.1. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan, merupakan gambaran proporsi angkatan kerja yang berjenis kelamin perempuan yang dapat dijadikan gambaran peran aktif perempuan dalam persaingan tenaga kerja, berdasarkan data LPPD Kabupaten Kutai Kartanegara partisipasi angkata kerja perempuan setiap tahun mengalami pasang surut, tertinggi tahun 2011 mencapai 60.835 orang dan terakhir di tahun 2015 hanya berjumlah 697 orang.

Gambar 2.23 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan



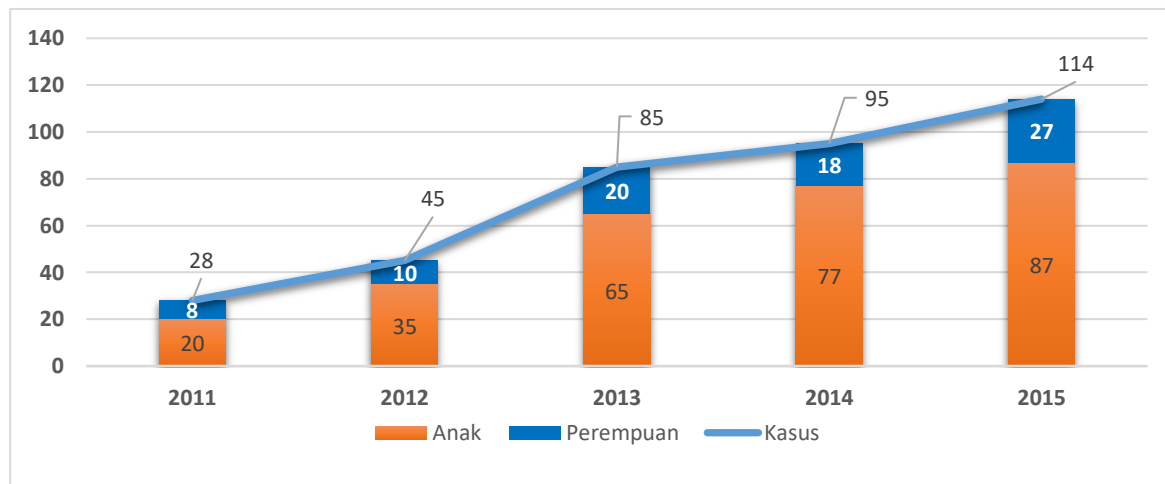
u.2. Anak Perempuan Usia >15 Yang Melek Huruf

Angka melek huruf, merupakan gambaran tingkat kemajuan pendidikan suatu daerah, dalam konteks pembangunan perempuan kemampuan baca tulis sangat penting untuk diperhatikan, mengingat kebutuhan lapangan kerja dan sekaligus sebagai agen pendidikan di dalam keluarga maka perempuan harus memiliki kemampuan membaca dan menulis dengan baik. Data LPPD Kutai Kartanegara 2010-2015, menunjukkan anak perempuan diatas 15 tahun yang melek huruf tahun 2015 sebesar 99,31%, sehingga masih ada 0,69% yang tidak melek huruf, namun demikian data menunjukkan anak perempuan Kutai kartanegara yang melek huruf telah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

u.3. Tingkat Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, merupakan salah satu gambaran terhadap upaya perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan kasus yang dilaporkan pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa kasus kekerasan cenderung meningkat, total kasus tertangani pada periode 2011-2015 sebanyak 367 kasus. Berikut data jumlah kasus tertangani periode 2011-20015

Gambar 2.24 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Ditangani 2011-2015



Sumber : BKP3A Kukar

v. Perencanaan Pembangunan

Urusan wajib perencanaan pembangunan, secara umum telah berkembang dengan baik, hal ini dibuktikan dengan predikat perencanaan terbaik tingkat Kalimantan Timur, yakni; Juara 1 Pangripta Nusantara tahun 2014, Juara 2 Pangripta Nusantara tahun 2015, dan kembali meraih Juara 1 Pangripta Nusantara tahun 2016.

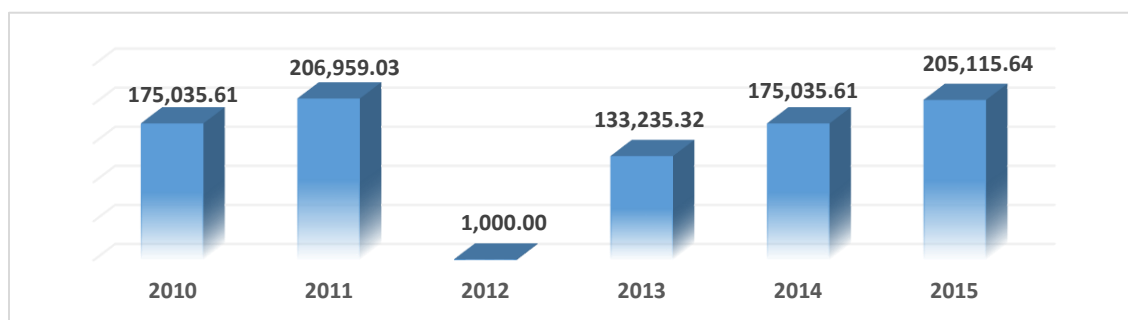
Data LPPD tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, menunjukkan bahwa kebutuhan dasar dalam perencanaan telah tersedia dengan baik, muali dari Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahun.

w. Ketahanan Pangan

w.1. Ketersediaan Pangan Utama per Tahun

Ketersediaan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup memadai hal ini terlihat dari jumlah ketersediaan pangan utama (beras) setiap penduduk pertahun cukup besar, pada tahun 2010 sebesar 173.035,61 kilogram, kemudian mengalami naik turun setiap tahunnya, hingga pada tahun 2015 meningkat mencapai 200.115,64 kilogram pertahun per penduduk.

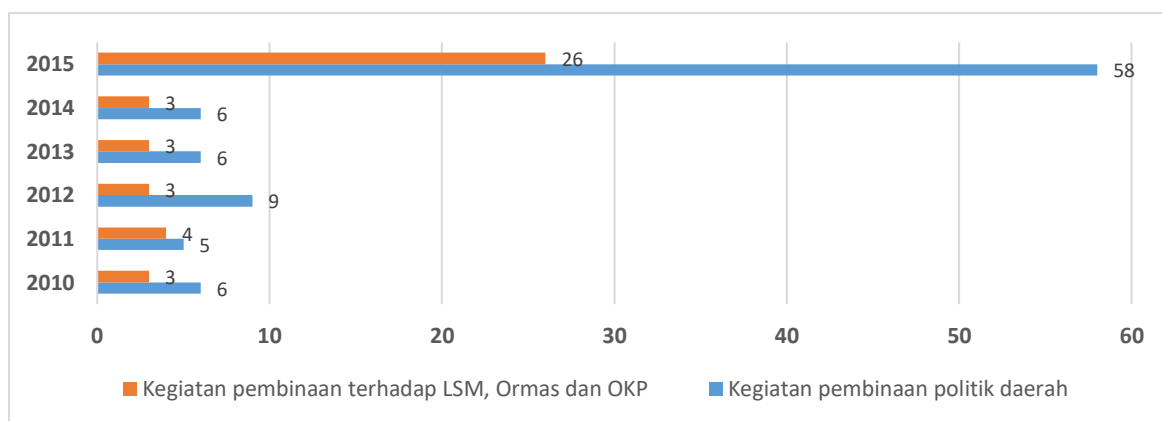
Gambar 2.25 Ketersediaan Pangan Utama Per Tahun (Kg)



x. Kesatuan Bangsa dan Politik

Periode pembangunan 2010 sampai dengan 2015, penyelenggaraan pembangunan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik, data yang dapat disajikan adalah data LPPD Kutai Kartanegara 2010-2015. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kutai Kartanegara telah melakukan upaya-upaya konkrit berupa pembinaan politik di daerah dan pembinaan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. Pembinaan terbanyak dilakukan adalah pada tahun 2015, pembinaan politik di daerah paling besar pada tahun 2015 yakni sebesar 58 kegiatan, hal ini dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Kepala Daerah serentak pada tahun 2015, kegiatan ini telah membawa hasil yakni penyelenggaraan Pemilu yang aman dan damai.

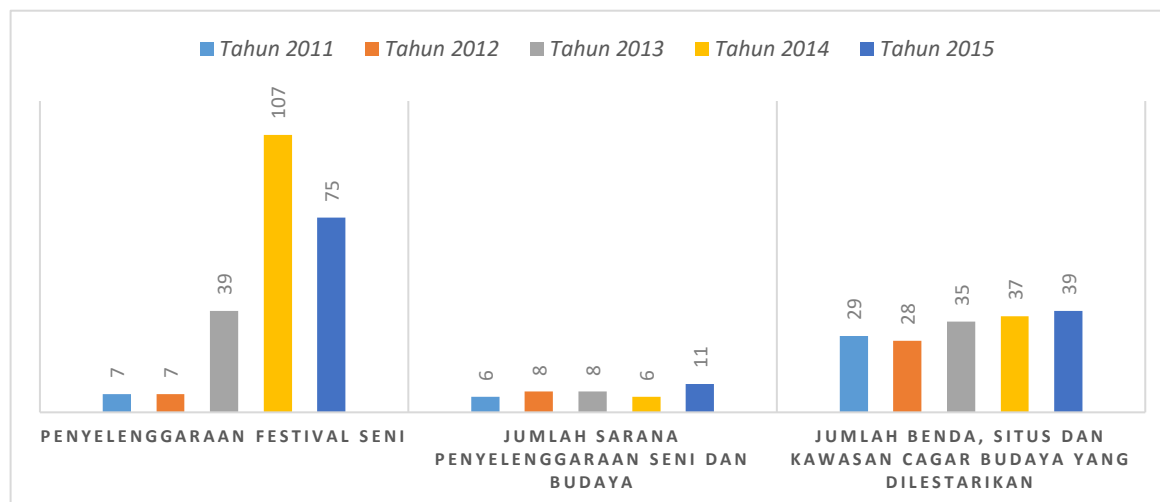
Gambar 2.26 Pembinaan Politik, LSM, Ormas dan OKP



y. Budaya

Perkembangan seni dan budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum, terus mengalami peningkatan, mulai dari penyelenggaraan festival seni dan budaya, penyediaan sarana penyelenggaraan seni dan budaya hingga cagar budaya yang dilestarikan, tahun 2015 data menunjukkan terus membaik dibandingkan tahun awal perencanaan yakni tahun 2010. Event budaya terbesar yang dilaksanakan setiap tahunnya adalah pesta adat erau, event ini mulai pada tahun 2015 telah menjadi kelender nasional sebagai event budaya yang dilaksanakan di Indonesia.

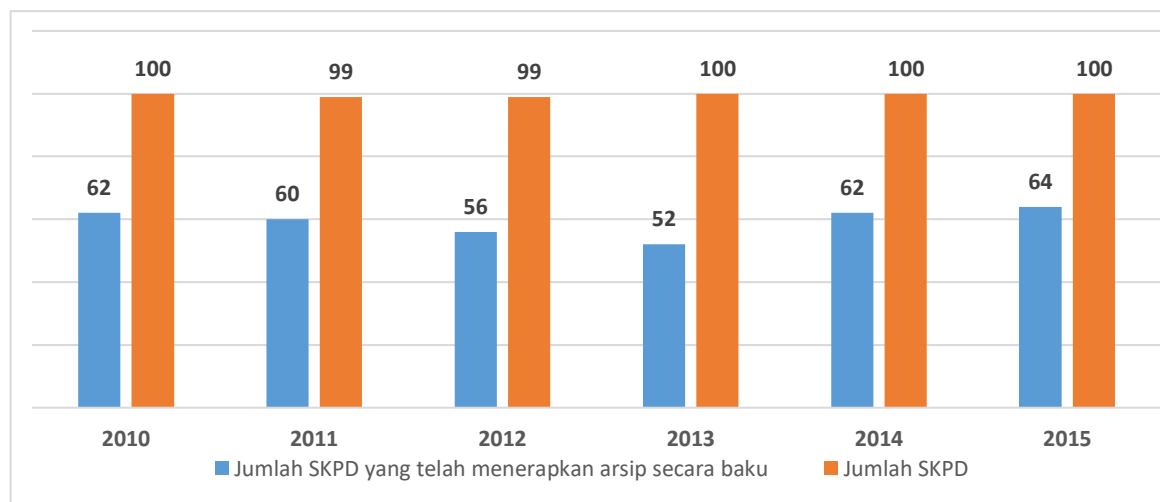
Gambar 2.27 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya, Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya dan Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang dilestarikan



z. Kearsipan

Kearsipan merupakan bagian penting dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, secara umum perkembangan penerapan standard arsip di setiap SKPD telah mengalami peningkatan, dari jumlah 100 SKPD yang telah menerapkan sistem kearsipan pada tahun 2015, 64% diantaranya telah menerapkan arsip secara baku, sehingga selama periode 2010-2015 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menambah 2 (dua) SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku. Untuk menjamin terpeliharanya dan terjaganya dokumen-dokumen pembangunan, maka setiap SKPD harus dapat menerapkan arsip secara baku di setiap instansinya.

Gambar 2.28 Penerapan Arsip Secara Baku di SKPD



2.3.2. Urusan Pilihan

Urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Urusan pilihan membahas mengenai pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan dan perindustrian.

a. Pertanian

a.1. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Produktivitas adalah istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara luaran (output) dengan masukan (input). Menurut Herjanto, produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya adalah hasil produksi pertanian yang ditanam pada luas tertentu. produktifitas padi di Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.66 Produktivitas Padi Per Hektar Kabupaten Kutai Kartanegara, 2009-2015

Tahun	Produksi Tanaman Padi(Ton)	Luas Areal tanaman Padi	Produktivitas Padi
		(Ha)	(Kuintal/Ha)
2009	188.835,01	37.446	50
2010	194.580,58	45.940	51
2011	198.023,49	38.300	51,01
2012	188.802,63	37.013	51,01
2013	189.392,77	37.113	51,03
2014	180.811,00	35.433	51,03
2015	186.829,00	38.002	49,16

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara 2016

Produksi padi dari tahun 2009 mengalami peningkatan pada tahun 2010 dan 2011 sebanyak 10.813 Ton pada tahun 2011 menjadi 198.023 Ton dari yang awalnya pada tahun 2009 188.835 Ton. Padahal luas areal tanaman padi justru menurun 1.146 Ha. Dengan demikian produktifitas padi di Kabupaten Kutai Kartanegara meningkat yang pada tahun 2010 sebesar 50 kuintal/Ha menjadi 51,01 kuintal/Ha. Nilai produksi dan produktivitas padi kembali mengalami fluktuasi hingga pada tahun 2015 nilai produksi tanaman padi hanya sebesar 186.829 Ton pada luas areal tanaman padi 38.002 ha. Pada tahun yang sama, produktifitas padi menurun pada angka 49,16 kuintal/Ha.

Produksi dan produktifitas padi di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peningkatan dapat disebabkan karena banyaknya inovasi-inovasi yang diciptakan untuk ketahanan pangan daerah. Salah satu inovasi yang ada seperti bibit unggul dan sistem pertanian yang digunakan.

a.2. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Indikator yang digunakan untuk mengetahui urusan pilihan bagian pertanian salah satunya dengan melihat Kontribusi sektor pertanian dari PDRB. PDRB adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan dalam waktu 1 tahun. Dalam hal ini yang termasuk dengan sektor pertanian adalah Pertanian tanaman pangan, pertanian buah, palwija dan peternakan.

Tabel 2.67 Kontribusi Sektor Pertanian Pada PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2000-2011

Kategori/Sub Kategori	2011	2012	2013 r)	2014 *)	2015 **)
Tanaman Pangan	474.969,41	423.756,81	428.840,82	463.487,51	459.852,50
Tanaman Holtikultura Semusim	173.520,25	167.133,82	181.227,59	188.883,93	191.463,13
Tanaman Holtikultura Tahunan dan Lainnya	371.920,99	357.879,84	355.759,31	365.116,09	366.415,64
Peternakan	430.347,40	450.118,05	468.454,54	485.738,46	499.101,03
Jasa Pertanian dan Perburuan	47.307,98	50.830,94	57.065,99	61.152,52	60.174,00
Jumlah	1.498.066,03	1.449.719,46	1.491.348,24	1.564.378,51	1.577.006,30

Kategori/Sub Kategori	2011	2012	2013 r)	2014 *)	2015 **)
PDRB dengan Migas	123.191.976,29	129.958.164,66	130.010.300,67	128.015.342,96	118.239.889,76
Kontribusi sektor pertanian	1,22%	1,12%	1,15%	1,22%	1,33%

Sumber : PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Lapangan Usaha 2010-2015

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara diperoleh dari data PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Lapangan Usaha 2015. Dari data yang ada dapat dilakukan perhitungan untuk melihat kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari tahun 2010 hingga 2015. Kontribusi sektor pertanian dihitung menggunakan PDRB dengan Migas relatif berfluktuasi. Kontribusi sektor pertanian paling tinggi pada tahun 2015 dengan persentase sebesar 1,33 persen. Peningkatan sektor pertanian perlu dijaga agar ketahanan pangan serta kestabilan wilayah terjaga.

a.3. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

Perkebunan adalah usaha pertanian intensif yang menggunakan lahan luas untuk menghasilkan komoditas perdagangan berbasis pertanian dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, bukan untuk konsumsi lokal. Perkebunan dibedakan dari agroforestri dan silvikultur (budidaya hutan) karena sifat intensifnya. Dalam perkebunan pemeliharaan memegang peranan penting; sementara dalam agroforestry dan silvikultur, tanaman cenderung dibiarkan untuk tumbuh sesuai kondisi alam. Karena sifatnya intensif, perkebunan hampir selalu menerapkan cara budidaya monokultur, kecuali untuk komoditas tertentu, seperti lada dan vanili. Penciri sekunder, yang tidak selalu berlaku, adalah adanya instalasi pengolahan atau pengemasan terhadap hasil panen dari lahan perkebunan itu, sebelum produknya dipasarkan. Perkebunan dibedakan dari usaha tani pekarangan terutama karena skala usaha dan pasar produknya.

Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara diperoleh dari data PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Lapangan Usaha 2015. Berikut ini disajikan datanya:

Tabel 2.68 Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara, 2011-2015 (juta rupiah)

Kategori/Sub Kategori	2011	2012	2013 r)	2014 *)	2015 **)
Perkebunan Semusim	2.668,82	3.136,80	3.295,17	3.472,96	3.416,88
Perkebunan Tahunan	2.946.172,45	3.252.107,56	3.885.735,22	4.128.648,07	4.370.874,14
Jumlah	2.948.841,27	3.255.244,36	3.889.030,38	4.132.121,03	4.374.291,02
PDRB dengan Migas	123.191.976,29	129.958.164,66	130.010.300,67	128.015.342,96	118.239.889,76
Kontribusi sektor perkebunan	2,39%	2,50%	2,99%	3,23%	3,70%

Sumber : PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Lapangan Usaha 2009-2013

Kontribusi sektor perkebunan mengalami kondisi yang sama dengan sektor pertanian yaitu mengalami fluktuasi. Kondisi di Kutai Kartanegara yang memiliki lahan yang masih luas banyak dimanfaatkan untuk perkebunan tanaman keras. Karena hasil kayu dari Kalimantan masih menjadi salah satu unggulan jenis kayu di Indonesia.

b. Kehutanan

Hutan adalah Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (carbon dioxide sink), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer Bumi yang paling penting. Menurut UU No 41 Tahun 1999 definisi dari kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

b.1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Lahan kritis didefinisikan sebagai lahan yang mengalami proses kerusakan fisik, kimia dan biologi karena tidak sesuai penggunaan dan kemampuannya, yang akhirnya membahayakan fungsi hidrologis, orologis, produksi pertanian, pemukiman dan kehidupan sosial ekonomi dan lingkungan.

Data yang digunakan untuk melakukan perhitungan tidak tersedia, maka tidak dapat dilakukan perhitungan menggunakan rumus diatas. Akan tetapi dari buku Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2014 disajikan data Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Hutan. Kerusakan hutan di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan dari tahun 2011 ke tahun 2013 secara berturut-turut nilainya yaitu 38,28 persen pada tahun 2011, menurun hingga nilai 7,59 persen pada tahun 2012 dan mencapai nilai 0,87 persen pada tahun 2013. Penurunan nilai kerusakan hutan memberi kabar baik dalam pelestarian lingkungan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan data kerusakan hutan pemerintah melakukan reboisasi dan rehabilitasi hutan yang disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.69 Luas Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Hutan (Ha)

No.	Tahun	Luas (%)
1	2011	2,11
2	2012	22,59
3	2013	16,80

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2014

Teknik rehabilitasi lahan di kawasan lindung yang terdiri dari kawasan hutan dan kawasan non hutan dilakukan melalui penghijauan untuk memperbaiki, memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal, sedangkan aspek sosial ekonomi dilakukan melalui kegiatan pengelolaan hutan bersama masyarakat dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dilakukan melalui pengembangan wanafarma, ekowisata, agroforestry di kawasan hutan. Kawasan budidaya terdiri dari hutan produksi, hutan rakyat dan pertanian lahan basah, dimana rehabilitasi pada hutan produksi yang dibebani hak merupakan tanggungjawab pemegang hak atas tanah dan pada hutan produksi yang tidak dibebani hak merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada hutan rakyat dapat dilakukan dengan pola insentif untuk memberikan rangsangan terhadap kegiatan pengelolaan kawasan budidaya dan pola disinsentif membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan pengelolaan kawasan budidaya. Pemilihan teknik budidaya dan jenis tanaman diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat sesuai dengan lokasi dan jenis yang dinilai ekonomi tinggi.

b.2. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara diperoleh dari data PDRB menurut Lapangan Usaha 2011-2015. Data tersebut menyediakan nilai kontribusi setiap sektor terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara seperti ditunjukkan oleh tabel dibawah ini.

Tabel 2.70 Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB, 2011-2015 (Juta Rupiah)

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Kehutanan dan Penebangan Kayu	1.566.847,74	1.554.051,99	1.471.940,91	1.446.993,21	1.463.430,68
PDRB dengan Migas	123.191.976,29	129.958.164,66	130.010.300,67	128.015.342,96	118.239.889,76
Kontribusi Kehutanan Terhadap PDRB	1,27%	1,20%	1,13%	1,13%	1,24%

Sumber : PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Lapangan Usaha 2015

Dari tahun 2011-2015 nilai perolehan dari sektor kehutanan setiap tahunnya hampir selalu mengalami fluktuasi. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2011, pada tahun 2015 nilai yang diperoleh dari sektor kehutanan mengalami penurunan baik jika dilihat dari perolehan nilai kehutanan dan penebangan kayu maupun kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB dengan migas.

Pada tahun 2015, perolehan subsektor kehutanan dan penebangan kayu sebesar Rp 1.463.430,68 juta, menurun dibanding dengan tahun 2011 yang mencapai Rp 1.566.847,74 juta.

Perolehan tersebut membuat nilai kontribusi kehutanan terhadap PDRB menurun dari 1,27 persen pada tahun 2011 menjadi 1,24 persen pada tahun 2015.

c. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian seperti mineral, batubara, panas bumi, migas. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu (satu tahun). Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara diperoleh dari data PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Lapangan Usaha 2009-2013. Buku tersebut menyediakan data kontribusi setiap sektor terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara seperti ditunjukkan oleh Tabel dibawah ini.

Tabel 2.71 Kontribusi Sektor Energi dan Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara, 2011-2015 (juta rupiah)

Kategori/Sub Kategori	2011	2012	2013 r)	2014 *)	2015 **)
Pertambangan dan Penggalian	99.769.619,88	104.924.329,56	103.170.969,50	99.552.122,88	88.880.613,87
Pengadaan Listrik dan Gas	27.003,62	28.635,58	29.602,60	31.066,44	32.749,51
Jumlah	99.796.623,50	104.952.965,14	103.200.572,10	99.583.189,32	88.913.363,38
PDRB dengan Migas	123.191.976,29	129.958.164,66	130.010.300,67	128.015.342,96	118.239.889,76
Kontribusi Per-tambangan dan Energi	81,01%	80,76%	79,38%	77,79%	75,20%

Sumber : PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara 2015

Perolehan sektor energi dan sumber daya mineral mengalami kondisi yang menurun setiap tahunnya. Dampak dari penurunan tersebut membuat nilai kontribusi terhadap PDRB dengan migas mengalami mengalami penurunan.

Pada tahun 2011, kontribusi sektor energi dan sumber daya mineral terhadap PDRB sebesar 81,01 persen. Nilai tersebut terus menurun hingga pada tahun 2015 hanya sebesar 75,20 persen. Walaupun mengalami penurunan, namun sektor energi dan pertambangan tetap mendominasi kontribusi ke PDRB dibandingkan sektor lainnya.

d. Pariwisata

d.1. Kunjungan Wisata

Menurut Organisasi Pariwisata Dunia arti dari Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seorang wisatawan adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km dari rumahnya dengan tujuan rekreasi. Definisi yang lebih lengkap, Pariwisata adalah industri jasa. Pariwisata menangani jasa mulai dari transportasi, jasa keramahan, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa bersangkutan lainnya seperti bank, asuransi, keamanan, dll. Serta menawarkan tempat istirahat, budaya, petualangan, dan pengalaman baru dan berbeda lainnya. Data jumlah kunjungan wisata disajikan berdasarkan destinasi wisata pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.72 Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2010-2014 Dirinci Berdasarkan Tempat Wisata

No	Nama Tempat Rekreasi	2010	2011	2012	2013	2014
1	Museum Mulawarman	101.375	121.266	88.867	107.386	116.929
2	Taman Rekreasi Pulau Kumala (Parai)	54.683	52.489	0	0	0
3	Museum Kayu Tuah Himba	8.501	11.437	6.339	6.312	10.614
4	Waduk Panji Sukarame	27.200	19.850	8.000	22.850	58.128
5	Kawasan Bukit Bangkirai Samboja	14.020	8.901	21.090	18.844	24.632
6	BOS (Borneo Orangutan Survivor) Samboja	3.430	1.477	0	855	4.400

No	Nama Tempat Rekreasi	2010	2011	2012	2013	2014
7	Pantai Tanah Merah	36.310	43.070	48.800	55.300	54.700
8	Planetarium Jagad Raya	8.988	10.208	0	400	22.725
9	Makam Raja-Raja Kutai Kartanegara	127.424	142.607	122.206	127.000	149.256
10	Situs Lesong Batu Muara Kaman	494	980	1.314	1.586	607
11	Situs Sanga-Sanga	0	0	180	119	515
12	Makan Raja Aji Mahkota dan Aji Dilanggar di Anggara	14.602	31.752	21.631	27.796	31.238
13	Makan P. Notoigomo Tenggarong	0	0	5.559	8.751	765
14	Makam A. P. Sinum Panji Mendapa Jembayan	203	163	117	172	348
15	Tugu Pembantaian Loa Kulu	0	0	237	145	279
16	Situs Makam Senopati Awang Long	0	0	179	16	50
Jumlah / Total		397.230	444.200	324.519	377.532	475.186

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2015

Wisata yang banyak diminati oleh wisatawan apabila berkunjung di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah makam Raja-Raja Kutai Kartanegara dan Museum Mulawarman, namun tempat wisata lain tidak kalah menarik untuk dikunjungi. Kunjungan wisata meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya menjadi 475.186 wisatawan pada tahun 2015. Dinas Pariwisata saat ini harus aktif dalam mempromosikan tempat wisata yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, karena pada saat ini sektor pariwisata sedang mengalami perkembangan.

d.2. Pertumbuhan Sektor Pariwisata dalam PDRB

Pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara diperoleh melalui pendekatan pada data PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Lapangan Usaha 2011-2015, adapun kategori yang diasumsikan terkait dengan pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kehutanan dan pennebangan kayu, perikanan, penyediaan akomodasi, penyediaan makan minum, jasa penunjang keuangan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa-jasa lainnya. Hasil analisis disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.73 *Pertumbuhan Sektor Pariwisata Pada PDRB Tahun 2011-2015 Kabupaten Kutai Kartanegara (Dalam Juta Rupiah)*

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Kategori PDRB Terkait sektor Pariwisata	5,410,081.42	5,605,150.66	5,835,528.72	6,095,668.44	6,278,814.79
Pertumbuhan Sektor Pariwisata	0.59%	3.61%	4.11%	4.46%	3.00%

Sumber : PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Lapangan Usaha 2010-2015, diolah

Nilai sektor pariwisata setiap tahun mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga 2015, dengan pertumbuhan selalu positif. Nilai pertumbuhan pariwisata pada PDRB dapat terus meningkat apabila dilakukan promosi pariwisata, peningkatan sarana dan prasarana menuju tempat wisata dan memperbaiki kondisi pariwisata agar menjadi lebih baik.

e. Kelautan dan Perikanan

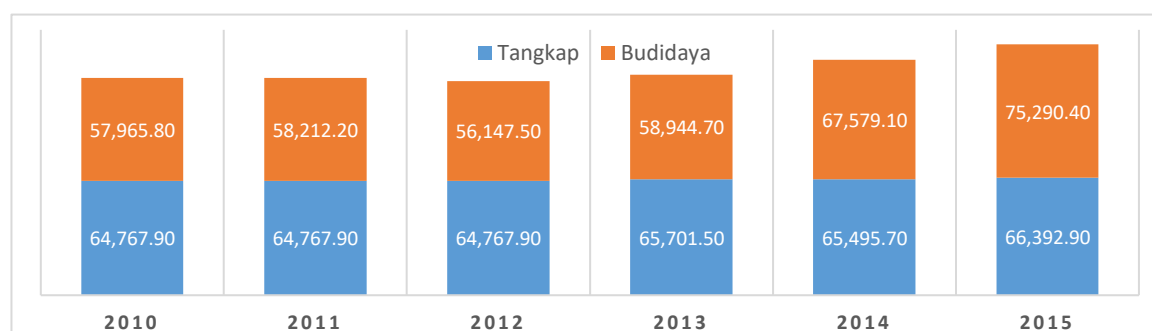
Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Sumberdaya hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup ikan, amfibi dan berbagai avertebrata penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan, serta lingkungannya. Menurut UU RI no. 45 Tahun 2009, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran hasil perikanan, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki wilayah perairan yang lengkap yang dapat berfungsi sebagai basis pemanfaatan sumberdaya perikanan yaitu: (1) perairan tawar (rawa, danau dan

sungai), (2) perairan payau, dan (3) perairan laut. Kegiatan perikanan yang dikembangkan meliputi perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan usaha-usaha perikanan lainnya (pasca panen dan pemasaran hasil perikanan).

Produksi ikan, baik dari kegiatan penangkapan maupun budidaya masih terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Total produksi ikan mencapai 141.683,30 ton pada tahun 2015, dimana 53 persen diantaranya disumbang oleh kegiatan perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap meningkat dari 64.767,90 ton pada tahun 2010 menjadi 66.392,90 ton pada tahun 2015, atau secara rata-rata tumbuh 0,5 persen per tahun. Namun demikian, pertumbuhan produksi perikanan tangkap lebih rendah dibanding dengan perikanan budidaya. Rata-rata kenaikan produksi perikanan budidaya mencapai 5,58 persen per tahun pada periode pada tahun 2010-2015, atau dalam jumlah produksi meningkat dari 57.965,80 ton pada tahun 2007 menjadi 75.290,40 ton pada tahun 2015. Data produksi perikanan berdasarkan jenis ikan di Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan pada gambar berikut:

Gambar 2.29 Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010-2015 (ton)



Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka, beberapa tahun (diolah)

Budidaya perikanan dikelola pada empat jenis budidaya yaitu budidaya kolam, tambak, keramba, dan sawah. Selama tahun 2010-2015 hampir semua jenis budidaya perikanan mengalami peningkatan. Jenis budidaya tambak pada tahun 2010 hanya menghasilkan 22.771,50 ton menjadi 32.636,20 ton pada tahun 2015. Sedangkan jenis budidaya kolam meningkat dari 413,7 ton pada tahun 2010 menjadi 808,6 ton pada tahun 2015. Sementara pada jenis budidaya keramba meningkat dari 33.619,80 ton pada tahun 2010 menjadi 40.683,10 ton pada tahun 2015. Di sisi lain, jenis budidaya sawah mengalami fluktuasi, meskipun jika dibandingkan pada tahun 2010 menghasilkan 1,5 ton dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 3,2 ton.

Tabel 2.74 Produksi Ikan Menurut Jenis Budidaya di Kabupaten Kutai Kartanegara (ton), 2010-2015

Tahun	Tambak	Kolam	Keramba	Sawah
2015	32.636,20	808,6	40.683,10	3,2
2014	27.518,20	808,6	38.077,00	16
2013	25.354,00	551,9	31.868,46	11
2012	23.335,90	530,4	31.115,80	6,1
2011	22.560,60	412,9	34.073,00	6,4
2010	22.771,50	413,7	33.619,80	1,5

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara 2016

f. Perdagangan

Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya. Nilai Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor pada tahun 2010 menyumbang sebesar 2,08 persen. Nilai ini mengalami peningkatan yang stabil hingga pada tahun 2015 mencapai angka 2,84 persen.

Kontribusi sektor perdagangan yang meningkat dari tahun ke tahun tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan sektor perdagangan dapat menjadi prospek pengembangan

perekonomian wilayah. Kontribusi perdagangan dapat lebih meningkat dengan perbaikan infrastruktur perdagangan sehingga warga dan wisatawan yang datang semakin banyak dan sektor perdagangan dan pariwisata menyumbang PDRB lebih besar.

g. Perindustrian

Industri adalah bidang ekonomi yang menggunakan ketrampilan dan ketekunan kerja serta penggunaan alat-alat dibidang pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusinya sebagai dasarnya.

Tabel 2.75 Nilai Kontribusi Sektor Industri Tahun 2009-2015

Kategori/Sub Kategori	2011	2012	2013 r)	2014 *)	2015 **)
Industri	2.780.636,78	2.942.570,03	3.125.924,24	3.296.209,31	3.447.050,80
PDRB dengan Migas	123.191.976,29	129.958.164,66	130.010.300,67	128.015.342,96	118.239.889,76
Kontribusi Sektor Industri	2,26%	2,26%	2,40%	2,57%	2,92%

Sumber : PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara 2015

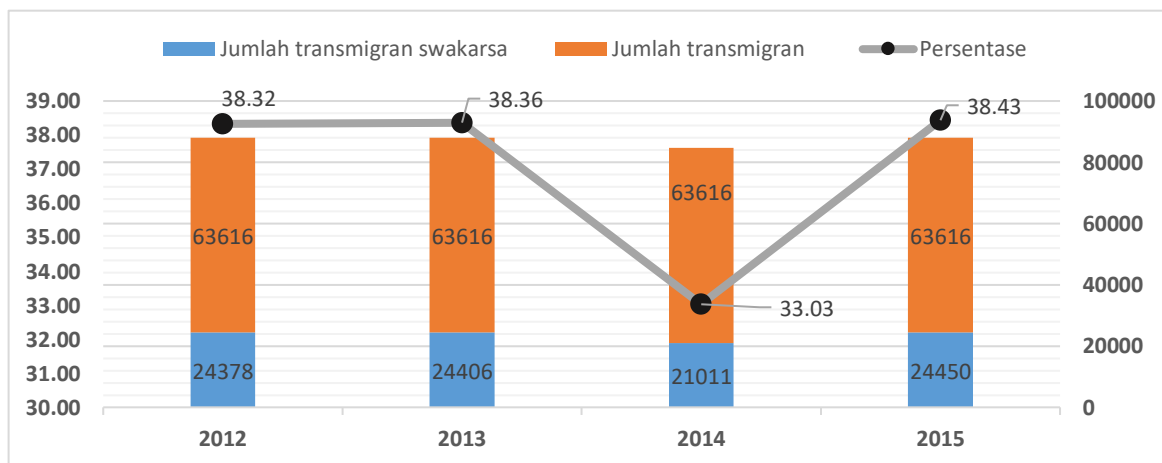
Industri yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan menyumbang ke PDRB sebanyak 16 sub sector meliputi industri batubara dan pengilangan migas, makanan, minuman, tembakau, hingga industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan. Nilai total sektor indutri di Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahun mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2011 kontribusi sektor industri sebesar 2,26 persen, pada tahun 2015 nilai kontribusi tersebut meningkat menjadi 2,92 persen.

Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki sumber daya alam perlu mengembangkan kegiatan di sektor industri. Pengembangan sektor industri turut serta menambah nilai jual dari hasil sumberdaya yang tersedia di Kabupaten Kutai Kartanegara. Peningkatan kegiatan industri dapat ditingkatkan dengan bekerjasama dengan pihak asing akan tetapi juga penting memperhatikan kondisi lingkungan.

h. Transmigrasi

Transmigrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan data LPPD 2010-2015, berjumlah sebesar 63.616 orang, sedangkan untuk transmigrasi swakarsa setiap tahunnya sekitar 24 ribu orang. Transmigrasi swakarsa merupakan transmigrasi yang dilakukan karena keinginan sendiri, tanpa adanya paksaan. Hal ini menggambarkan bahwa Kutai Kartanegara dianggap cukup baik dalam melakukan pelayanan bagi seluruh transmigran.

Gambar 2.30 Jumlah Transmigrasi Kutai Kartanegara 2010-2015



2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Aspek daya saing daerah terdiri dari empat fokus penilaian yakni fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi dan fokus sumber daya manusia. Aspek daya saing daerah menjelaskan mengenai kesiapan suatu daerah untuk maju dan berkembang. Data yang tersedia untuk menjelaskan sub bab ini tidak cukup banyak, serta data untuk mengetahui capaian sumber daya manusia tidak tersedia sehingga tidak dapat diketahui capaiannya. Capaian dari aspek daya saing daerah dapat diketahui dari ketiga fokus yang tersedia datanya.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Angka Konsumsi RT Per Kapita)

Merupakan fokus pertama yang dinilai untuk melihat capaian daya saing daerah. Fokus kemampuan ekonomi daerah melihat kesiapan suatu daerah dari sisi ekonomi dalam rangka mendukung investasi yang masuk ke daerah tersebut. Dari data yang tersedia fokus kemampuan ekonomi daerah dapat diketahui dari sub fokus otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang didetailkan pada pembahasan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita.

Konsumsi rumah tangga perKapita adalah pengeluaran rumah tangga yang digunakan untuk keperluan makan dan bukan makan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat menggambarkan pendapatan suatu rumah tangga, sehingga dengan kata lain pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat digunakan untuk mengetahui kesejahteraan suatu rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga di negara berkembang seperti Indonesia banyak digunakan untuk kategori makanan, berbeda dengan di negara maju yang pengeluaran untuk makanan lebih sedikit.

Seperti dipublikasikan oleh BPS, pada tahun 2014 sebagian besar pengeluaran penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan (perumahan, sandang, aneka barang dan jasa, dan lain-lain) daripada makanan. Hal ini berbeda dengan kondisi tahun 2013 yaitu pengeluaran untuk kebutuhan makanan lebih besar daripada non makanan. Hal ini dapat dilihat dari persentase pengeluaran penduduk bulanan. Mereka menghabiskan 47,58 persen dari pengeluarannya untuk makanan, dan 52,42 persen untuk non makanan. Sedangkan pada tahun 2013, pengeluaran untuk kebutuhan makanan sebesar 48,3 persen dan pengeluaran non makanan sebesar 51,67 persen.

Berdasarkan tipe daerah, secara umum tingkat pengeluaran penduduk perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk pedesaan. Di perkotaan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan sebesar Rp.980.664,- sedangkan di pedesaan sekitar Rp. 837.073,-. Sementara rata-rata total pengeluaran secara total di perkotaan dan pedesaan per kapita sebulan mencapai Rp. 884.205,-.

Tabel 2.76 Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan Menurut Daerah Kota dan Pedesaan, 2013-2015

Uraian			2013		2014		2015	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%
1.	Kota/Urban							
	a.	Makanan/Food	465,527	46.08	431,195	43.97	484,618	47.18
	b.	Bukan Makanan/Non Food	544,625	53.92	549,468	56.03	542,454	52.82
	c.	Jumlah/Total	1,010,151	100.00	980,664	100.00	1,027,072	100.00
2.	Pedesaan/Rural							
	a.	Makanan/Food	385,582	48.77	415,629	49.65	484,287	49.92
	b.	Bukan Makanan/Non Food	405,068	51.23	421,444	50.35	485,915	50.08
	c.	Jumlah/Total	790,650	100.00	837,073	100.00	970,202	100.00
3.	Kota + Pedesaan/Urban + Rural							
	a.	Makanan/Food	411,682	47.74	420,739	47.58	484,397	48.98

Uraian			2013		2014		2015	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%
b.	Bukan Makanan/Non Food		450,630	52.26	463,466	52.42	504,600	51.02
c.	Jumlah/Total		862,312	100.00	884,205	100.00	988,996	100.00

Sumber : Kabupaten Kutai Kartanegara dalam angka, 2016

Pengeluaran perkapita rumah tangga tersebut masih didominasi pendapatan dari sektor pertanian yang masih menjadi tumpuan pendapatan sebagian besar penduduk Kutai Kartanegara yaitu 38%. Sektor perdagangan dan jasa masing-masing menempati urutan kedua dan ketiga (dengan kontribusi masing-masing sebesar 17% dan 16%). Sementara sektor listrik, gas dan air minum merupakan sektor penampung pekerja terendah yaitu kurang dari 1 % (persen) pekerja.

Tabel 2.77 Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin, Lapangan Usaha, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2009 – 2014

Jenis Kelamin	Kelompok Lapangan Usaha		Tidak/ belum pernah sekolah & Tidak/ belum tamat SD	SD	SMP	SMA keatas	Total
Laki-Laki	Primer (1,2)		10,811	38,310	20,315	50,045	119,481
	Sekunder (3,4,5)		1,479	4,740	4,811	9,012	20,042
	Tersier (6,7,8,9)		2,645	11,156	16,482	41,760	72,043
	Total	2015	14,935	54,206	41,608	100,817	211,566
		2014	23,119	65,684	45,840	69,830	204,473
		2013	22,925	59,894	40,070	80,330	203,219
		2012	28,651	63,580	38,694	75,553	206,478
Perempuan	Primer (1,2)		2,880	8,194	1,715	3,390	16,179
	Sekunder (3,4,5)		708	2,408	3,179	772	7,067
	Tersier (6,7,8,9)		2,123	6,219	4,711	27,884	40,937
	Total	2015	5,711	16,821	9,605	32,046	64,183
		2014	11,919	29,513	15,235	32,978	89,645
		2013	11,626	19,349	14,612	30,207	75,794
		2012	12,104	28,890	10,590	21,976	73,560
	2011		14,193	24,515	13,514	30,278	82,500

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

a.2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan)

Secara umum dapat dikatakan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin berkurang pengeluaran yang dibelanjakan untuk makanan dan semakin meningkat pengeluaran untuk bukan makanan. Menurut data Kabupaten Kutai Kartanegara dalam angka tahun 2015, di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peningkatan untuk konsumsi non makanan sehingga menjadi sedikit lebih besar daripada konsumsi untuk makanan, yaitu sebesar 52 persen untuk pengeluaran non makanan dan untuk pengeluaran makanan sebesar 48 persen.

Di tahun 2012 sebagian besar pengeluaran penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dari pada non makanan (perumahan, sandang, aneka barang dan jasa, dan lain-lain). Hal ini dapat dilihat dari persentase pengeluaran penduduk bulanan. Mereka menghabiskan 51,16 persen dari pengeluarannya untuk makanan, dan 48,84 persen untuk non makanan. Sedangkan pada tahun 2013, pengeluaran untuk kebutuhan makanan sebesar 47,74 persen dan pengeluaran non makanan sebesar 52,26 persen.

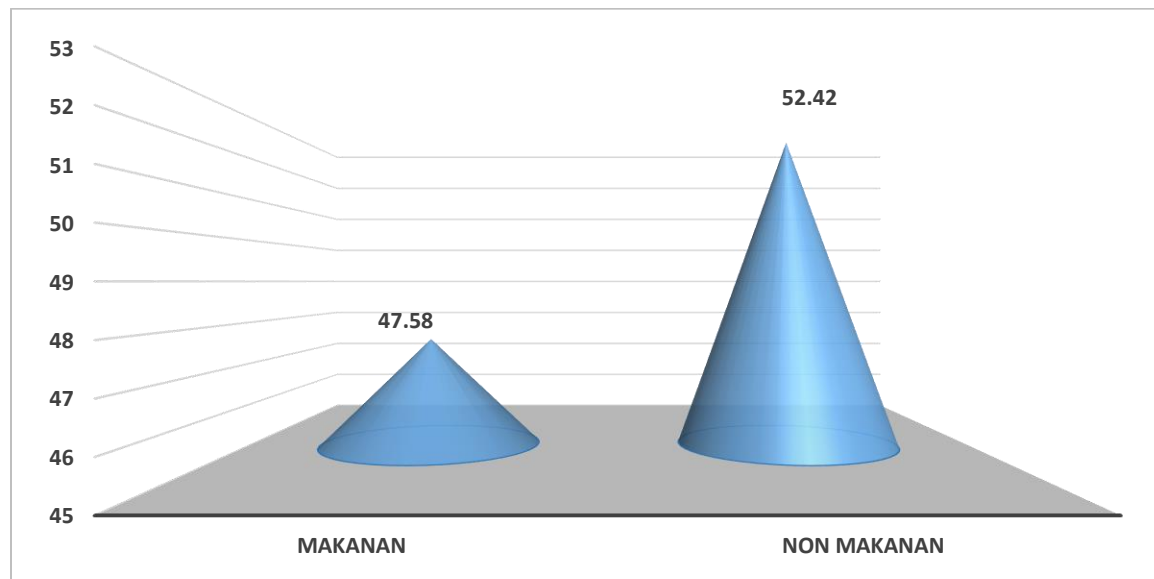
Tabel 2.78 Persentasi Konsumsi RT Non Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara 2012-2014

Uraian	2012	2013	2014
Total Pengeluaran Non Makanan	370.622	45.030	463.466
Total Pengeluaran	758.864	862.312	884.205
Rasio	0,49	0,05	0,52

Sumber: Kabupaten Kutai Kartanegara dalam angka 2015

Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran.

Gambar 2.31 *Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kabupaten Kutai Kartanegara 2014*



Sumber: Kabupaten Kutai Kartanegara dalam angka 2015

a.3. Produktivitas Total Daerah

Jika sektor-sektor yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dikelompokkan menjadi 3 sektor primer, sekunder, dan tersier, maka kelompok sektor primer sangat mendominasi dalam penciptaan nilai tambah di Kabupaten Kutai Kartanegara seperti ditampilkan dalam PDRB berdasarkan lapangan usaha yang sudah dibahas pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Total nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dari kelompok sektor primer di tahun 2011 mencapai Rp. 112,25 trilyun, atau meningkat 23,93% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.90,58 trilyun. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam (SDA) yang tersedia dan salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral. Hal yang perlu dicermati adalah bahwa sektor pertambangan memberi sumbangan terbesar dalam PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara, akan tetapi jika dilihat dari prosentase pekerja menurut lapangan usaha maka sektor pertanianlah yang menjadi tumpuan bekerja bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu harus diupayakan agar hasil yang diperoleh dari sektor pertambangan dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dengan intervensi program yang berbasis kerakyatan.

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. Tabel produktivitas Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.79 *Produktivitas Per Sektor Kabupaten Kutai Kartanegara*

Kategori/Sub Kategori	2011		2012		2013		2014		2015	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
A. Pertanian	8.361.757,39	6,79	8.742.681,10	6,73	9.566.433,35	7,36	9.999.391,86	7,81	10.309.406,68	8,72

Kategori/Sub Kategori	2011		2012		2013		2014		2015	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
B. Pertambangan & Penggalian	99.769.619,88	80,99	104.924.329,56	80,74	103.170.969,50	79,36	99.552.122,88	77,77	88.880.613,87	75,17
C. Industri Pengolahan	2.780.636,78	2,26	2.942.570,03	2,26	3.125.924,24	2,40	3.296.209,31	2,57	3.447.050,80	2,92
D. Pengadaan Listrik, Gas	27.003,62	0,02	28.635,58	0,02	29.602,60	0,02	31.066,44	0,02	32.749,51	0,03
E. Pengadaan Air	27.955,71	0,02	27.673,46	0,02	29.615,85	0,02	31.476,28	0,02	33.004,13	0,03
F. Kontruksi	5.211.265,25	4,23	5.647.848,37	4,35	5.913.565,52	4,55	6.428.820,94	5,02	6.387.133,51	5,40
G. Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	2.802.119,62	2,27	3.019.269,65	2,32	3.167.377,85	2,44	3.236.655,51	2,53	3.356.189,08	2,84
H. Transportasi & Pergudangan	693.673,47	0,56	757.638,39	0,58	815.433,52	0,63	869.634,42	0,68	910.932,72	0,77
I. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	167.489,10	0,14	177.794,74	0,14	190.008,76	0,15	203.027,59	0,16	215.179,44	0,18
J. Informasi & Komunikasi	488.045,82	0,40	547.253,21	0,42	607.696,06	0,47	679.161,11	0,53	752.887,45	0,64
K. Jasa Keuangan Dan Asuransi	204.399,30	0,17	228.021,87	0,18	265.701,04	0,20	274.731,50	0,21	284.708,36	0,24
L. Real Estate	433.970,90	0,35	456.273,51	0,35	482.215,66	0,37	517.899,62	0,40	540.223,06	0,46
M,N. Jasa Perusahaan	28.104,72	0,02	29.806,71	0,02	31.065,09	0,02	33.084,32	0,03	33.048,34	0,03
O. Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	1.192.377,98	0,97	1.249.849,93	0,96	1.313.335,74	1,01	1.430.192,42	1,12	1.531.513,60	1,30
P. Jasa Pendidikan	529.567,99	0,43	612.236,51	0,47	702.883,60	0,54	776.590,17	0,61	824.479,60	0,70
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	338.624,51	0,27	426.493,31	0,33	452.342,79	0,35	495.722,47	0,39	526.757,21	0,45
R,S,T,U. Jasa Lainnya	135.364,26	0,11	139.788,70	0,11	146.129,50	0,11	159.556,12	0,12	174.012,39	0,15
Produk Domestik Regional Bruto	123.191.976,30	100,00	129.958.164,63	100,00	130.010.300,67	100,00	128.015.342,96	100,00	118.239.889,75	100,00
Angkatan Kerja	306.189		304.015		301.228		318.499			

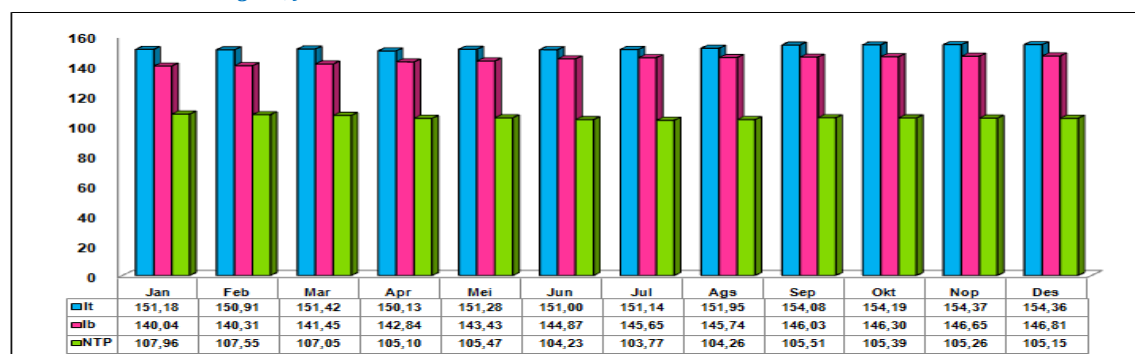
Catatan: R) Angka Revisi, *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

a.4. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP), yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persen), merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani atau untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (termoftrade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Gambar 2.32 Indeks Diterima Petani (It), Indeks Dibayar Petani (Ib) dan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Kutai Kartanegara, Januari-Desember 2015



Sumber : BAPPEDA dan BPS Kabupaten Kutai Kartanegara 2016

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fokus kedua yang dibahas dari aspek daya saing daerah adalah fokus fasilitas wilayah/infrastruktur. Fokus ini menganalisa upaya penyediaan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah dalam rangka menarik investor usaha agar berinvestasi dan membuka usahanya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari data yang tersedia untuk menganalisa fokus fasilitas wilayah/infrastruktur diukur dari sub fokus otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang didetailkan lagi pada Jenis, kelas dan jumlah kamar hotel.

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu fasilitas yang sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing daerah. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan.

a. Perhubungan

a.1. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Status jalan yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari Jalan Kabupaten sepanjang 1.584,82 km, Jalan Provinsi sepanjang 353,90 km, dan Jalan Nasional sepanjang 367,55 km. Sehingga jumlah total panjang jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2011 adalah sepanjang 2.306,27 km. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin menurun, artinya bahwa dengan panjang jalan tetap, jumlah kendaraan semakin bertambah, kepadatan kendaraan semakin bertambah. Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kenaikan yang sangat cepat yaitu sebesar 235.163 di Tahun 2011 atau hampir 7 kali dari jumlah semulayang hanya 30.809 pada tahun 2010.

Tabel 2.80 Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Kabupaten Kutai Kartanegara 2009-2011

No	Uraian	2009	2010	2011
1	Panjang jalan	2.246,84	2.269,36	2.306,27
2	Jumlah kendaraan	27.086,00	30.809,00	235.163,00
3	Rasio	0,08	0,07	0,01

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

a.2. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga Per Tahun

Transportasi air di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui 10 buah dermaga yang tersebar di beberapa kecamatan. Data tahun 2011 menunjukkan terjadi peningkatan jumlah orang dan barang yang tiba dan berangkat melalui dermaga dengan angkutan sungai dibandingkan tahun 2010. Pada tahun 2010 terangkut sebanyak 112.246 orang dan 16.887 barang, sedangkan tahun 2011 terangkut sebanyak 217.883 orang dan 290.717 barang. Data tahun 2012 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 2.81 Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2011

No	Uraian	2010		2011		2012	
		Orang	Barang	Orang	Barang	Orang	Barang
1	Dermaga Hamdil II Muara Jawa	11.329	259	16.860	75.112	16.108	71.631
2	Demaga Sukmawira	19.558	14.463	62.761	190.290		
3	Dermaga Sungai Meriam	21.118	27	19.985	18.034	16.108	74.121
4	Demaga Kota Bangun	4.996	367	13.219	3.815	20.823	31.000
5	Dermaga Muara Muntai	2.358	1.508	3.290	3.161		
6	Dermaga Muara Kaman	148	15	232	4	17.624	1.194
7	Dermaga Pulau Kumala	48.850	-	97.776	-	5.030	2.795
8	Dermaga Tepian Pandan	3.511	-	3.447	3		
9	Dermaga Muara Wis	347	233	280	254	344	
10	Dermaga Sebulu	31	15	33	44		
	Jumlah	112.246	16.887	217.883	290.717	76.037	180.741

Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2012 dan 2013

a.3. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara baru saja diperdakan dikarenakan adanya verifikasi dokumen Padu serasi dengan RTRW Propinsi, sehingga belum dilaksanakan evaluasi untuk menganalisa presentase ketaatan pelaksanaan pembangunan terhadap dokumen RTRW tersebut.

a.4. Luas Lahan Produktif

Luas lahan produktif di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2008 – 2012 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.82 *Persentase luas Wilayah Produktif Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 s.d 2012*

NO	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	Luas wilayah produktif	780.246	799.208	810.211	792.622	811.963
2	Luas seluruh wilayah	2.726.310	2.726.310	2.726.310	2.726.310	2.726.31
3	Rasio	0,29	0,29	0,30	0,29	0,30

Sumber: Dinas Bina Marga Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 2.83 Persentase luas Wilayah Produktif Tahun 2008 s.d 2012 Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	2008			2009			2010			2011			2012		
		Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah (B)	Rasio A/B	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah (B)	Rasio A/B	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah (B)	Rasio A/B	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah (B)	Rasio A/B	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah (B)	Rasio A/B
1	Samboja	26.718	2.59	0.26	26.607	104.59	0.25	26.577	104.59	0.25	26.577	104.59	0.25	26.615	104.59	0.25
2	Muara Jawa	23.143	75.45	0.31	23.569	75.45	0.31	36.673	75.45	0.49	23.569	75.45	0.31	24.513	75.45	0.32
3	Sanga-sanga	9.042	23.34	0.39	9.042	23.34	0.39	9.042	23.34	0.39	9.042	23.34	0.39	9.042	23.34	0.39
4	Lua Janan	15.792	64.42	0.25	15.792	64.42	0.25	15.792	64.42	0.25	15.792	64.42	0.25	15.792	64.42	0.25
5	Loa Kulu	44.547	140.57	0.32	44.547	140.57	0.32	44.574	40.57	0.32	44.547	40.57	0.32	44.547	40.57	0.32
6	Muara Muntai	4.488	92.86	0.05	3.149	92.86	0.03	3.155	92.86	0.03	3.155	92.86	0.03	3.155	92.86	0.03
7	Muara Wis	17.925	110.816	0.16	17.8	110.816	0.16	17.81	110.816	0.16	16.858	110.816	0.15	16.858	110.816	0.15
8	Kota Bangun	17.849	114.374	0.16	17.849	114.374	0.16	20.207	114.374	0.18	20.207	114.374	0.18	20.207	114.374	0.18
9	Tenggarong	15.582	39.81	0.39	15.582	39.81	0.39	15.58	39.81	0.39	15.58	39.81	0.39	15.58	39.81	0.39
10	Sebulu	69.304	85.95	0.81	70.789	85.95	0.82	70.789	85.95	0.82	70.789	85.95	0.82	72.267	85.95	0.84
11	Tenggarong Seberang	24.742	43.7	0.56	24.472	43.7	0.56	24.472	43.7	0.56	18.985	43.7	0.43	16.229	43.7	0.37
12	Anggana	103.349	179.88	0.57	109.969	179.88	0.61	105.152	179.88	0.58	105.194	179.88	0.58	105.306	179.88	0.59
13	Muara Badak	88.809	93.909	0.95	89.259	93.909	0.95	88.939	93.909	0.95	89.068	93.909	0.95	87.7	93.909	0.93
14	Marang Kayu	52.593	116.571	0.45	52.776	116.571	0.45	52.726	116.571	0.45	52.996	116.571	0.45	52.996	116.571	0.45
15	Muara Kaman	147.448	341.01	0.43	147.448	341.01	0.43	148.498	341.01	0.44	148.498	341.01	0.44	148.498	341.01	0.44
16	Kenohan	33.717	130.22	0.26	33.717	130.22	0.26	33.717	130.22	0.26	33.717	130.22	0.26	56.206	130.22	0.43
17	Kembang Janggut	57.45	192.39	0.3	57.756	192.39	0.3	57.45	192.39	0.3	59.046	192.39	0.31	57.45	192.39	0.3
18	Tabang	34.445	776.45	0.04	39.085	776.45	0.05	39.085	776.45	0.05	39.002	776.45	0.05	39.002	776.45	0.05

Sumber: Dinas Bina Marga Kabupaten Kutai Kartanegara

b. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

b.1. Jenis dan jumlah bank

Data tahun 2012 mencatat sebanyak 14 bank beroperasi di Kutai Kartanegara, yang meliputi:

1. *Bank Pembangunan Daerah (BPD)*
2. *Bank Nasional Indonesia (BNI 46)*
3. *Bank Rakyat Indonesi (BRI)*
4. *Bank Mandiri*
5. *Bank Syariah Mandiri (BSM)*
6. *Bank Perserikatan*
7. *Bank Danamon*
8. *Bank Lippo*
9. *Bank CIMB Niaga*
10. *Bank Perkreditan Rakyat (BPR)*
11. *Bank Central Asia (BCA)*
12. *Bank Mega*
13. *Bank Mega Syariah*
14. *Bank BTPN*

Posisi kredit bank di Kutai Kartanegara yang disalurkan pada Tahun 2012 yang terbesar adalah sektor pertanian sebesar Rp.44.437 milyar, kemudian sektor pertambangan Rp.22.595 milyar, sektor lainnya sebesar Rp.11.811 milyar, dan selebihnya adalah perdagangan, konstruksi, listrik, gas dan air, jasa dunia usaha, perindustrian, jasa sosial masyarakat dan pengangkutan.

b.2. Jenis dan Jumlah Restoran dan Usaha Perjalanan Wisata

Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat sekitar 70 usaha restoran, 22 usaha bar/rumah minum, serta 9 usaha jasa boga/catering. Pada periode yang sama, terdapat sekitar 61 usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi. Adapun jenis usaha perjalanan wisata yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara hingga Juni 2011 ada 13 unit usaha yang tersebar di Kecamatan Tenggarong sebanyak 12 unit dan di Kecamatan Loa Janan sebanyak 1 unit. Jenis usaha perjalanan ini terbagi menjadi 5 unit usaha biro perjalanan wisata dan 8 agen perjalanan wisata.

b.3. Jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel

Penginapan/hotel dibagi menjadi dua kategori yaitu hotel berbintang dan hotel melati (non bintang). Hotel berbintang adalah suatu usaha jasa yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dimana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan, dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan. Ciri khusus dari hotel berbintang adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut. Hotel Melati adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dimana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang. Berikut tabel menyajikan kelas dan jumlah kamar.

Tabel 2.84 Nama dan Klasifikasi Hotel di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014

No	Nama Hotel	Klasifikasi
1	Grand Elty Singgasana	Setara Bintang 3
2	Elty Suite Lesong Batu	Setara Bintang 4
3	Pulau Kumala resort	Setara Bintang 5
4	Grand Fatma	Setara Bintang 6

No	Nama Hotel	Klasifikasi
5	Andira	Non Bintang
6	Grand Yuda	Non Bintang
7	Fatma	Non Bintang
8	Batara	Non Bintang
9	Tangga Arung	Non Bintang
10	Amanah	Non Bintang
11	Payung Asri	Non Bintang
12	Karya Tapin I	Non Bintang
13	Karya Tapin II	Non Bintang
14	Kendilo	Non Bintang
15	Herlang	Non Bintang
16	Viladina	Non Bintang
17	Lizha	Non Bintang
18	Syarifah	Non Bintang
19	Pelangi Harapan	Non Bintang
20	Wisma PKK	Non Bintang
21	Simpang Handayani	Non Bintang
22	Hotel Handayani	Non Bintang
23	Hotel Indonesia	Non Bintang
24	Karmila	Non Bintang
25	Cottage Samboja Lodge	Non Bintang
26	Cottage Bukit Bengkirai	Non Bintang
27	Senipah Resort	Non Bintang
28	Harapan Samboja	Non Bintang
29	Gilang Samboja	Non Bintang
30	Pelangi Samboja	Non Bintang
31	Darmawati Samboja	Non Bintang
32	Musafir Samboja	Non Bintang
33	Dianalis Samboja	Non Bintang
34	Gosyen Samboja	Non Bintang
35	Home stay Cempaka Putih Muara Badak	Non Bintang
36	Leo Patra Muara Badak	Non Bintang
37	Kojo Muara Badak	Non Bintang
38	Rahmad Muara Badak	Non Bintang
39	Sekarini Muara Badak	Non Bintang
40	Mawar Muara Jawa	Non Bintang
41	Handayani Muara Jawa	Non Bintang
42	Losmen Primer Muara Jawa	Non Bintang
43	Putri Tunjung Muara Jawa	Non Bintang
44	Wisma Surya Indah Muara Jawa	Non Bintang
45	Telaga Indah Muara Jawa	Non Bintang
46	Sri Kandi Muara Jawa	Non Bintang
47	Seroja Muara Jawa	Non Bintang
48	Hidayat Muara Jawa	Non Bintang
49	Bintang Muara Jawa	Non Bintang

No	Nama Hotel	Klasifikasi
50	Al Barru Muara Jawa	Non Bintang
51	Putra Soppeng Marangkayu	Non Bintang
52	Penginapan Pammasa Marangkayu	Non Bintang

Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka 2015

Jumlah penginapan/hotel di Kabupaten Kutai Kartanegara diketahui dari Dinas Pariwisata berjumlah 52 hotel/penginapan, 4 hotel di Kabupaten Kutai Kartanegara dan 48 hotel melati atau non bintang. Perbedaan antara hotel berbintang dan melati (non bintang) adalah dilihat dari persyaratan dasar dan penilaian teknis operasional. Persyaratan Dasar : Perijinan (persetujuan Prinsip, Ijin Usaha). Persyaratan Teknis : Unsur Fisik, Unsur Pengelolaan, Unsur Pelayanan. Penetapan penilaian golongan kelas hotel bintang dilakukan dengan penggabungan dari nilai persyaratan dasar dan persyaratan teknis. Penilaian penggolongan Hotel Bintang dilaksanakan oleh PHRI.

Penginapan yang memadai disuatu daerah akan memudahkan dalam pengembangan pembangunan daerah khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara. Sarana fasilitas penginapan dan hotel menjadi salah satu fasilitas para investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, selain itu fasilitas penginapan akan memudahkan pengembangan pariwisata daerah. Peningkatan pembangunan penginapan diperlukan akan tetapi diiringi dengan perizinan dan amdal yang jelas.

c. Lingkungan Hidup

c.1. Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

Kebutuhan akan air bersih merupakan hal penting yang harus diperhatikan ketersediannya, mengingat sumber air baku di Kabupaten Kutai Kartanegara bersumber dari Sungai Mahakam yang di dalamnya juga mengalir air limbah baik dari perusahaan maupun dari limbah rumah tangga. Besarnya persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih akan dapat menunjukkan gambaran tentang kondisi kesehatan suatu daerah. Sumber air bersih diantaranya adalah air dalam kemasan, air isi ulang, air leding, pompa, mata air terlindung dan sumur terlindung. Dengan melihat sumber air minum ini akan dapat menggambarkan tingkat kesehatan rumah tangga/masyarakat suatu daerah.

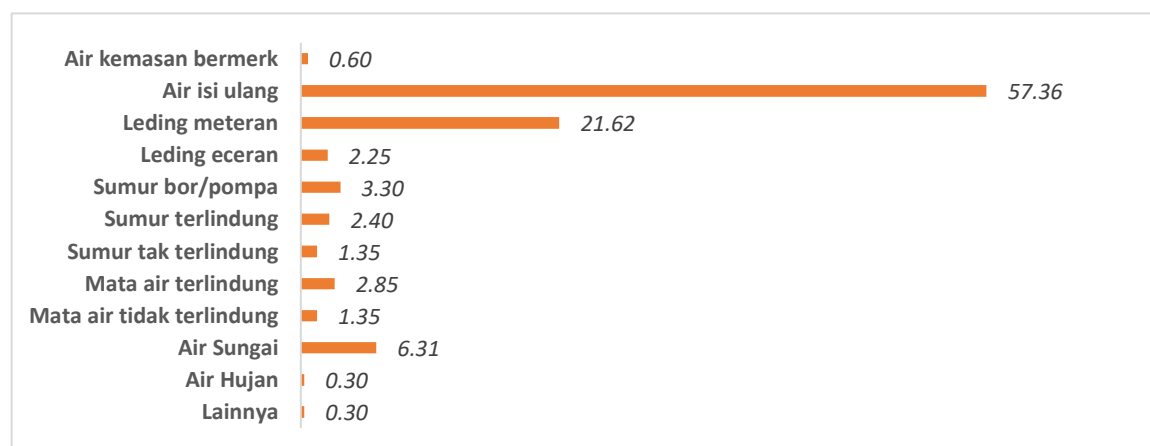
Sesuai data terbaru, jumlah rumah tangga pengguna air bersih meningkat seiring dengan peningkatan jumlah total rumah tangga yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Peningkatan tersebut menyebabkan rasio rumah tangga pengguna air bersih juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, rasio rumah tangga pengguna air bersih sebesar 55,83 persen. Rasio tersebut mengalami fluktuasi, pada tahun 2012 hanya sebesar 33,81 persen dan kembali meningkat menjadi 57,92 persen pada tahun 2015.

Tabel 2.85 Rasio Penduduk dan Rumah Tangga Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	80.552	80.552	55.434	55.434	98.759	111.508
Jumlah Total Rumah Tangga	144.280	144.280	163.964	135.747	184.746	192.511
Rasio (%)	55,83	55,83	33,81	40,84	53,46	57,92
Penduduk Berakses Air Minum	296.708	313.734	215.138	419.888	367.482	-
Jumlah Penduduk	626.680	648.215	665.489	683.131	700.439	-
Rasio	47,35	48,40	32,33	61,47	52,46	-

Sumber: BPS Kutai Kartanegara

Gambar 2.33 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012



Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, Suseda 2012

d. Komunikasi dan Informatika

d.1. Rasio ketersediaan daya listrik

Jaringan listrik sutet eksisting 150 KV menghubungkan Tenggarong-Tenggarong Seberang-Samarinda sepanjang 30 Km dan eksisting 150 KV menghubungkan Samarinda–Loa Janan–Samboja–Balikpapan sepanjang 90 Km, yang berasal dari PLTGU Tanjung Batu.

Sehubungan dengan bertambahnya penduduk dan pengembangan wilayah untuk peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan merencanakan pembangunan Power Plant di Senipah Kecamatan Samboja dan PLTA di Kecamatan Tabang yang berkapasitas 360 MW yang masuk dalam jaringan transmisi Mahakam.

Secara lebih lengkap data operasional PLN wilayah pengelolaan rayon Tenggarong meliputi 5 kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.86 Data Operasional PLN Wilayah Pengelolaan Rayon Tenggarong

No	Kecamatan	Kwh	Lokasi Pembangkit	Panjang Jaringan	Jumlah Pelanggan	Jumlah Gardu
1	Tenggarong	6.623.944	Tj. Batu / Embalut	246 Km	19.607 sambungan	221 Unit
2.	Tenggarong Seberang	2.512.837	Tj. Batu / Embalut	143 Km	8.628 sambungan	88 Unit
3.	Loa Kulu	1.462.253	Tj. Batu / Embalut	68 Km	3.025 sambungan	55 Unit
4.	Sebulu	760.863	Senoni	84 Km	5.796 sambungan	48 Unit
5.	Muara Kaman	236.140	Senoni	56 Km	1.870 sambungan	22 Unit

Sumber: PT. PLN Rayon Tenggarong, 2010

Tabel 2.87 Data Rasio Desa Berlistrik Dan Rasio Elektrifikasi Kabupaten Kutai Kartanegara (Revisi)

No	Kecamatan	Jumlah			Desa Berlistrik			Desa Belum Berlistrik	RT / KK Berlistrik			Rasio Desa Berlistrik (%)	Rasio Elektrifikasi / Rasio KK Berlistrik (%)
		Desa / Kel	KK	Penduduk	PLN	Non PLN	Jumlah		PLN	Non PLN	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 + 7	9 = 3 - 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = (8:3)x100	14 = (12:4)100
1	Tabang	19	2,993	10,978	13	6	19	0	1,287	348	1,635	100%	54.63%
2	Kembang Janggut	11	9,090	27,897	11	0	11	0	7,782	0	7,782	100%	85.61%
3	Kenohan	9	3,287	11,494	5	4	9	0	779	893	1,672	100%	50.87%
4	Muara Wis	7	2,614	9,378	4	3	7	0	773	877	1,650	100%	63.12%
5	Kota Bangun	21	9,768	35,353	16	5	21	0	7,678	682	8,360	100%	85.59%
6	Muara Muntai	13	5,861	20,450	9	4	13	0	2,403	591	2,994	100%	51.08%
7	Muara Kaman	20	9,850	37,469	12	8	20	0	4,241	1,182	5,423	100%	55.06%
8	Loa Kulu	15	13,128	46,249	15	0	15	0	9,704	0	9,704	100%	73.92%
9	Sebulu	14	11,587	44,688	14	0	14	0	8,144	0	8,144	100%	70.29%
10	Marang Kayu	11	9,921	35,736	11	0	11	0	4,534	0	4,534	100%	45.70%
11	Tenggarong Seberang	18	16,862	62,589	18	0	18	0	12,479	0	12,479	100%	74.01%
12	Muara Badak	13	12,875	43,708	12	1	13	0	6,817	0	6,817	100%	52.95%
13	Anggana	8	13,994	44,667	8	0	8	0	11,349	0	11,349	100%	81.10%
14	Tenggarong	14	29,180	71,770	14	0	14	0	23,877	0	23,877	100%	81.83%
15	Sanga Sanga	5	5,702	14,916	5	0	5	0	4,386	0	4,386	100%	76.92%
16	Muara Jawa	8	10,620	29,863	8	0	8	0	7,081	0	7,081	100%	66.68%
17	Loa Janan	8	19,945	57,937	8	0	8	0	10,104	0	10,104	100%	50.66%
18	Samboja	23	18,273	61,692	23	0	23	0	12,075	0	12,075	100%	66.08%
TOTAL		237	205,550	666,834	206	31	237	0	135,493	4,573	140,066	100%	68.14%

d.2. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP, Telepon dan Komputer

Berdasarkan data BPS Kutai Kartanegara terkait dengan hal teknologi dan informasi, diketahui data akses teknologi komunikasi dilakukan melalui telepon rumah, telepon seluler, komputer desktop, dan laptop. Rumah tangga yang memiliki akses telepon rumah di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2014 sebesar 4,02 persen. Sementara itu rumah tangga yang menggunakan telepon seluler sebesar 96,37 persen. Sedangkan rumah tangga yang menggunakan komputer desktop dan laptop sebesar 5,46 persen dan 25,25 persen pada tahun yang sama.

Tabel 2.88 Persentase Rumah Tangga Menurut Akses Terhadap Teknologi Komunikasi dan Informasi, 2012-2014

Akses Terhadap Teknologi dan Informasi	2012	2013	2014
Telepon Rumah	4,42	5,18	4,02
Telepon Seluler	96,37	97,14	96,37
PC/Desktop	8,96	6,90	5,46
Laptop/Notebook	20,12	24,46	25,25

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Fokus terakhir yang dibahas pada aspek daya saing daerah adalah iklim berinvestasi. Fokus iklim berinvestasi melihat kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara apakah kondusif dalam mendukung investasi riil yang masuk atau tidak. Penilaian fokus berinvestasi didukung oleh data angka kriminalitas yang dijabarkan dibawah ini.

Peluang investasi di Kutai Kartanegara masih sangat terbuka, khususnya potensi investasi pangan (pertanian dalam arti luas) dan potensi investasi sektor energi (batubara dan migas). Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya minat para investor untuk menanamkan modalnya di Kutai Kartanegara.

a. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a.1. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun. Angka kriminalitas juga dapat diartikan rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Kegiatan yang termasuk tindak kriminal adalah curanmor (pencurian motor), pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan lain sebagainya. Angka kriminalitas bermanfaat untuk menilai tingkat keamanan di Kabupaten Kutai Kartanegara, karena semakin tinggi angka kriminalitas maka Kabupaten Kutai Kartanegara semakin tidak aman, dan semakin rendah angka kriminalitas maka Kabupaten Kutai Kartanegara semakin aman.

Dalam masyarakat semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi rasa aman yang dimiliki masyarakat, hal ini sangat diperlukan dalam menjamin iklim berinvestasi. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk daerah yang aman mengingat angka kriminalitasnya rendah, sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.89 Angka Kriminalitas Selama 1 (satu) Tahun di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2010-2011

NO	JENIS KRIMINAL	2010	2011
1	Jumlah kasus narkoba		74
2	Jumlah kasus pembunuhan		2
3	Jumlah kejahatan seksual	8	20
4	Jumlah kasus penganiayaan	20	53
5	Jumlah kasus pencurian	121	61
6	Jumlah kasus penipuan		23
7	Pemalsuan surat	19	13
8	Pemalsuan uang	3	22

NO	JENIS KRIMINAL	2010	2011
9	Pemerasan	38	3
10	Penggelapan		31
11	Senjata tajam		11
12	Lain-lain		6
13	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	209	319
14	Jumlah penduduk	626.680	650.908
15	Angka Kriminalitas	0,00033	0,000490

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2012

a.2. Jumlah Demonstrasi

Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun. Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Jumlah demonstrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2012 adalah 198 kali.

a.3. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Data tahun 2011 dan 2012 menunjukkan terdapat 10 macam pajak dan 31 macam retribusi yang diberlakukan di Kutai Kartanegara. Data tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2010 yaitu 8 macam pajak dan 23 macam retribusi. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah pada tahun 2012 sebagai berikut:

A. Pajak

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

B. Retribusi Jasa Umum

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Penyediaan dan/Penyedotan Kakus
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan
14. Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi

C. Retribusi Jasa Usaha

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
7. Retribusi Rumah Potong Hewan
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

10. Retribusi Penyeberangan Di Atas Air
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
12. Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan dan Kelautan

D. Retribusi Perizinan Tertentu

1. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Ijin Gangguan
4. Retribusi Ijin Trayek
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Indikator kualitas sumber daya manusia ditunjukkan dengan Angkatan kerja, karena di dalam kelompok angkatan kerja terdapat kelompok penduduk yang bertindak sebagai pelaku ekonomi. Semakin besar jumlah tenaga kerja di dalam suatu daerah, semakin besar penawaran tenaga kerjanya. Apabila hal ini tidak diikuti dengan peningkatan permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja) maka akan jadi pengangguran. Disamping itu, semakin besar jumlah tenaga kerja maka semakin besar kapasitas penduduk usia kerja untuk menopang penduduk usia tidak produktif, sehingga nilai rasio ketergantungan akan cenderung menurun, namun ini memerlukan jumlah kesempatan kerja yang mencukupi.

a. Ketenagakerjaan

a.1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga kerja dianalisa dari rasio tingkat pendidikan terhadap jumlah penduduk. Rasio tingkat kelulusan di Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.90 Rasio lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	URAIAN	2010	2011
1	Jumlah lulusan S1	411	16.479
2	Jumlah lulusan S2	332	196
3	Jumlah lulusan S3	-	-
4	Jumlah lulusan S1/S2/S3	743	16.675
5	Jumlah Penduduk	626,68	650.908
6	Rasio lulusan S1/S2/S3	0,01	0,026

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

a.2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan atau angka beban tanggungan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2008 mencapai angka 0.615 atau sekitar 61 persen, ini berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 61 orang usia tidak produktif baik itu usia 0-14 tahun dan usia 60 keatas dan selama kurun waktu 4 tahun tidak terjadi perubahan dan cenderung tetap yaitu sebesar 0.58 atau 58 persen terjadi peberada di angka 0.58 yang berarti setiap 100 orang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 58 usia tidak produktif.

Tabel 2.91 Rasio Ketergantungan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah penduduk usia <15 tahun	188.728	193.829	198.631	205.949	214.688
2	Jumlah penduduk usia <15 tahun	26.861	28.936	30.937	31.983	35.610
3	Jumlah penduduk usia <15 tahun	215.589	222.765	229.568	237.932	250.298
4	Jumlah penduduk usia <15 tahun	350.676	382.910	397.112	412.976	425.775
5	Rasio ketergantungan	0,615	0,582	0,578	0,576	0,588

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

BAB 3 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Bagian ini mengemukakan gambaran pengelolaan keuangan daerah yang memuat tentang pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 - 2021

Kondisi kesehatan keuangan daerah menjadi satu faktor yang sangat penting dalam mendorong terciptanya suatu pemerintahan yang efisien dan efektif. Jika pemerintah daerah diibaratkan sebagai satu organ tubuh maka fungsi keuangan daerah dalam hal ini dapat diibaratkan sebagai jantung yang senantiasa memompakan darah segar bagi fungsi/sektor pemerintahan dan pembangunan daerah lainnya guna aktualisasi produktivitas daerah secara keseluruhan.

Sejauh manakah kesehatan keuangan suatu daerah, sebenarnya dapat ditelusuri dari kondisi anggarannya, "The budget should be a financial mirror of society's and social choices". Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi refleksi keputusan politik antara eksekutif dan legislatif yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan sudah selayaknya memberikan jaminan bagi peningkatan pelayanan serta peningkatan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.

Berbagai literatur dan best practice mengemukakan bahwa manajemen pembelanjaan pemerintah daerah adalah "a key instrument" dari kebijakan pemerintah daerah, karena itu disarankan kepada otoritas penganggaran untuk mencermati adanya hubungan integral dan keseimbangan antara "revenue dan expenditure". Hal ini penting untuk menjaga terciptanya keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) daerah serta perspektif pembangunan yang berorientasi jangka menengah dan panjang.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Sesuai dengan ketentuan Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Secara umum komponen APBD terdiri dari:

Komponen Pendapatan:

- 1) *Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;*
- 2) *Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta*
- 3) *Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.*

Komponen Belanja:

- 1) *Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan*

- 2) *Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal*

Komponen Pembiayaan:

- 1) *Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;*
- 2) *Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta*
- 3) *Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan*

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi APBD, perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah, permasalahan yang muncul serta potensi tantangan kedepan. Secara umum gambaran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Tabel 3.1 menunjukkan perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Selama periode tersebut, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami pasang surut seiring dengan dinamika perekonomian yang berpengaruh terhadap penerimaan daerah terutama yang bersumber dari bagi hasil sumber daya alam. Pada tahun 2011, total realisasi pendapatan daerah mencapai sebesar Rp.5,62 trilyun yang kemudian meningkat menjadi sebesar Rp. 6,12 trilyun pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013, total realisasi pendapatan daerah mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar Rp.5,95 trilyun dan meningkat lagi menjadi sebesar Rp.6,45 trilyun pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015, total penerimaan daerah kembali mengalami penurunan cukup drastis menjadi sebesar Rp.5,03 trilyun.

Selama periode tersebut juga terlihat bahwa pendapatan daerah masih bertumpu pada sumber dana perimbangan berupa dana bagi hasil pajak /non pajak, walaupun selama periode tersebut dana bagi hasil pajak dan bukan pajak rata-rata mengalami penurunan sebesar 4 persen pertahun, sedangkan porsi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhitung tidak signifikan perannya terhadap total pendapatan daerah. Kemudian Pendapatan asli daerah sebagai satu sumber pembiayaan daerah lainnya, selama periode tahun 2011-2015 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan mencapai rata-rata sebesar 15 persen pertahunnya.

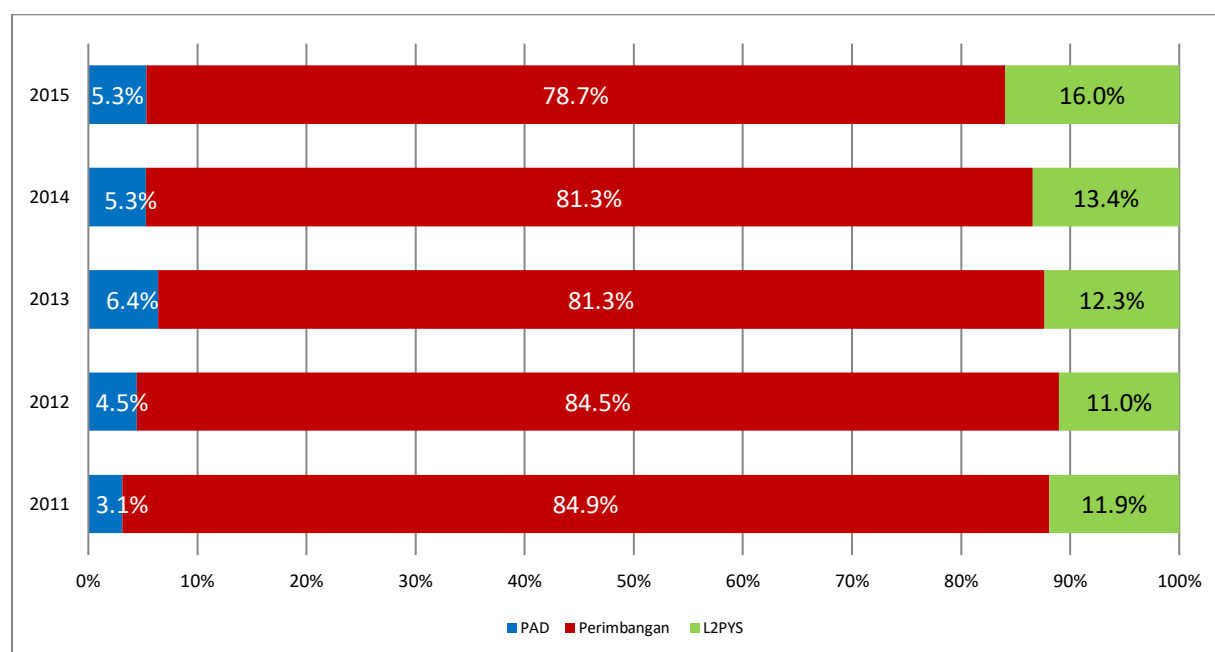
Tabel 3.1 Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015 (Rp.juta)

Uraian	2011			2012			2013			2014			2015		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
PENDAPATAN	4,753,256	5,626,910	118	4,485,209	6,120,410	136	5,999,799	5,950,644	99	5,686,197	6,459,383	114	6,468,594	5,031,361	78
Pendapatan Asli Daerah	138,414	175,811	127	231,162	273,181	118	317,525	379,706	120	344,999	339,177	98	407,799	268,764	66
Pendapatan Pajak Daerah	9,789	13,971	143	30,650	36,822	120	42,681	73,443	172	49,750	55,718	112	60,350	61,812	102
Hasil Retribusi Daerah	10,111	11,610	115	8,479	8,948	106	10,297	6,459	63	5,546	10,326	186	6,923	8,863	128
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13,309	26,718	201	39,250	21,417	55	22,000	37,370	170	55,379	53,554	97	43,893	41,893	95
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	105,205	123,512	117	152,783	205,994	135	242,547	262,434	108	234,324	219,579	94	296,633	156,195	53
Dana Perimbangan	3,911,731	4,779,905	122	3,533,844	5,172,122	146	4,887,924	4,836,035	99	4,470,983	5,253,424	118	5,124,611	3,959,746	77
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	3,860,099	4,740,840	123	3,424,574	5,097,977	149	4,667,417	4,633,093	99	4,271,611	5,072,142	119	5,124,611	3,959,746	77
Dana Alokasi Umum	1,366	1,366	100	59,092	59,092	100	150,246	150,246	100	127,011	127,011	100	-	-	
Dana Alokasi Khusus	50,266	37,699	75	50,178	15,053	30	70,261	52,696	75	72,361	54,271	75	-	-	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	703,111	671,194	95	720,203	675,107	94	794,350	734,903	93	870,215	866,782	100	936,183	802,852	86
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	287,604	313,590	109	353,261	353,261	100	450,142	417,762	93	398,555	395,122	99	446,334	341,523	77
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	103,206	106,434	103	136,738	136,738	100	175,169	174,494	100	164,600	164,600	100	328,981	328,981	100
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	312,301	251,170	80	230,204	185,108	80	169,039	142,647	84	307,060	307,060	100	155,868	132,348	85
Pendapatan Lainnya	0	0		0	0		0	0		0	0		5,000	-	0

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2010– 2014

Dalam perspektif distribusi, struktur pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dikatakan hampir mirip dengan daerah lain di Indonesia yang umumnya didominasi oleh besarnya kontribusi dana perimbangan dan belum signifikannya kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Grafik berikut menunjukkan perkembangan struktur pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sepanjang tahun 2011-2015. Pada periode tersebut, terlihat adanya perkembangan yang cukup menggembirakan, Pendapatan asli daerah yang merupakan indikator kemandirian daerah, secara pasti mengalami peningkatan kontribusi, dari sebesar 3.1 persen pada tahun 2011 menjadi 4,5 persen pada tahun 2012, kemudian meningkat menjadi sebesar 6,4 persen pada tahun 2013 dan menjadi sebesar 5,3 persen pada tahun 2014 dan 2015. Kemudian dana perimbangan mengalami penurunan kontribusi terhadap pendapatan daerah, dari sebesar 84,9 persen pada tahun 2011 menjadi sebesar 78,7 persen pada tahun 2015.

Gambar 3.1 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2015



Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2011– 2015

b. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

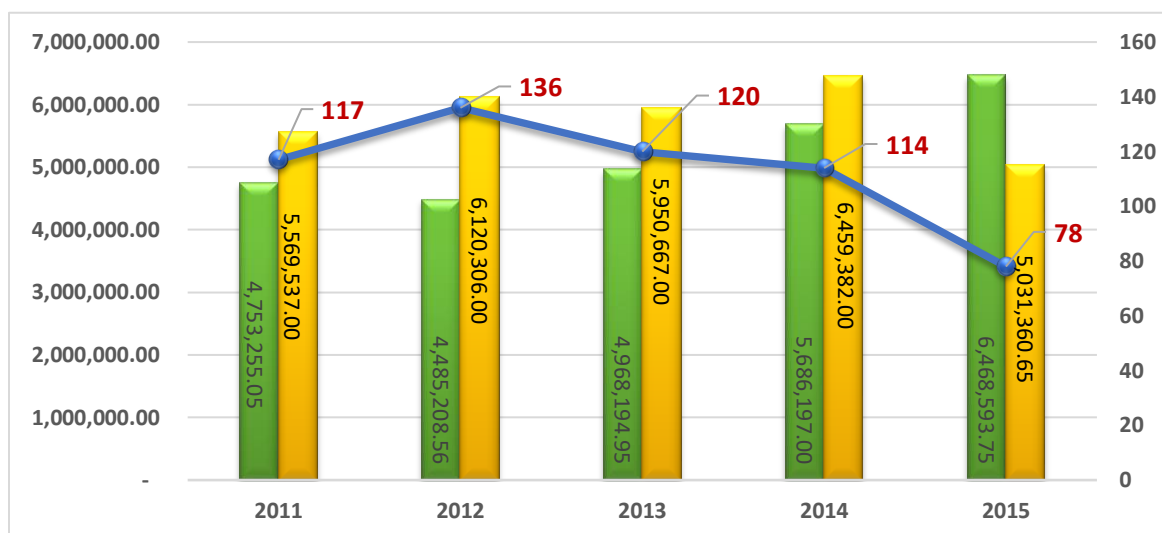
Selama periode tahun 2011-2014, Target pendapatan daerah yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD umumnya terlampaui pada akhir periode, hal ini dapat dilihat dari data realisasi pendapatan yang dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang selalu berada diatas 100 persen. Namun demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nampaknya harus waspada dengan tingkat realisasi pendapatan daerah pada tahun 2015 yang hanya mencapai sebesar 78 persen dari target yang ditetapkan.

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2015

Tahun Anggaran	Target Pendapatan (Rp.juta)	Realisasi Pendapatan (Rp.juta)	Tingkat Capaian (%)
2011	4.753.255,05	5,569,537.00	117
2012	4,485,208,56	6,120,306.00	136
2013	4,968,194,95	5,950,667.00	120
2014	5,686,197,00	6,459,382.00	114
2015	6,468,593,75	5,031,360,65	78

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2011– 2015 (*2015 Unaudited)

Gambar 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2011-2015



Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2011– 2015

c. Realisasi Belanja Daerah

Sesuai dengan definisi yang dikembangkan dalam Permendagri No 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, kelompok belanja ini dibagi menjadi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, kelompok belanja langsung dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Seiring dengan peningkatan pendapatan juga terjadi peningkatan jumlah belanja daerah. Pada tahun 2011, jumlah realisasi belanja daerah hanya mencapai angka sebesar Rp. 3,92 Trilyun yang kemudian meningkat menjadi sebesar Rp. 4,94 trilyun pada tahun 2012 dan meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 7,38 trilyun pada tahun 2013. Pada tahun 2014 belanja daerah mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 6,44 trilyun yang kemudian kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar sebesar Rp. 6,73 trilyun pada tahun 2015.

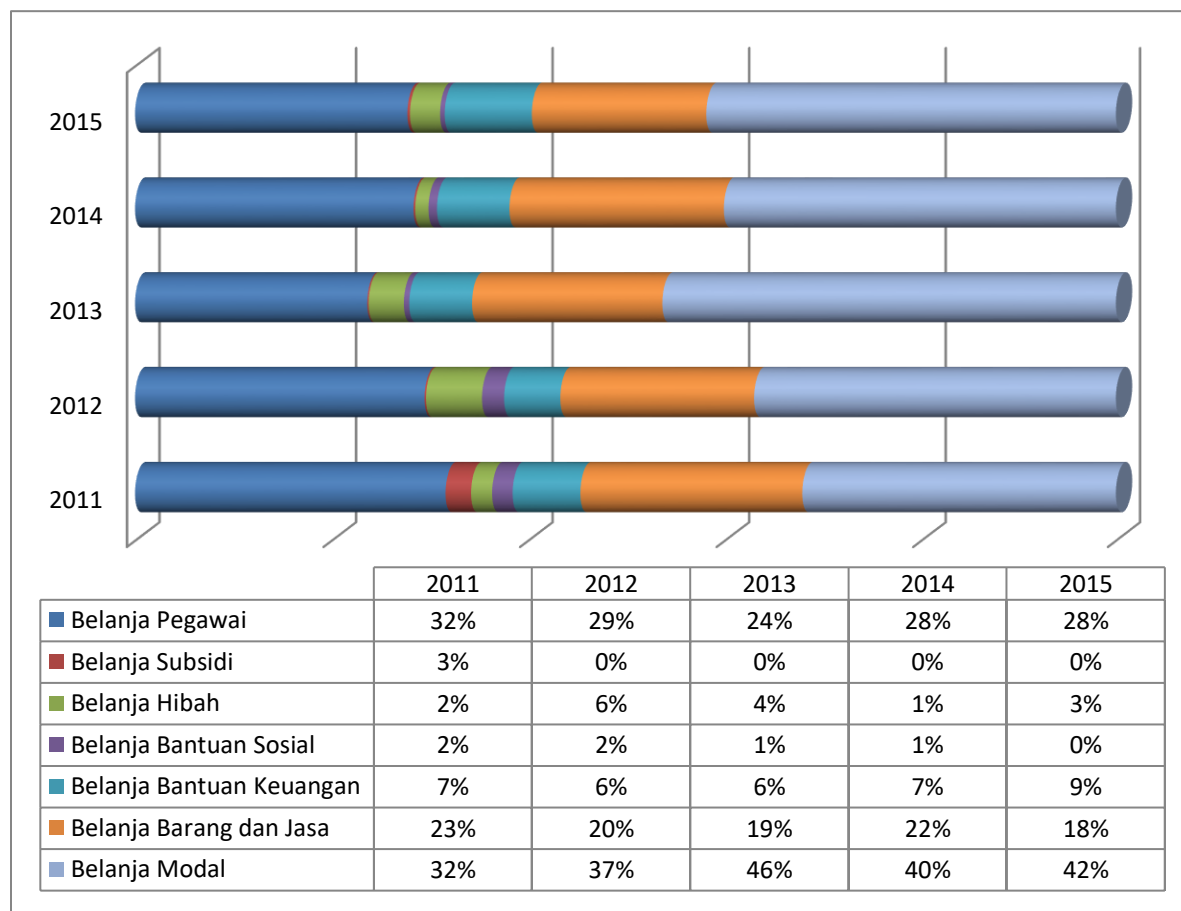
Tabel 3.3 Perkembangan Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 -2015 (Rp.juta)

Uraian	2011			2012			2013			2014			2015		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Belanja	5,203,779	3,923,617	75	6,684,273	4,942,248	74	9,242,955	7,382,595	80	7,600,900	6,443,126	85	8,381,631	6,736,051	80
Belanja Tidak Lang- sung	1,734,650	1,520,102	88	2,162,409	1,854,395	86	2,715,651	2,156,136	79	2,782,806	2,304,137	83	2,986,524	2,600,383	87
Belanja Pegawai	1,096,213	976,640	89	1,375,562	1,143,838	83	1,790,108	1,359,226	76	2,019,395	1,675,200	83	2,037,049	1,744,776	86
Belanja Subsidi	117,725	101,800	86	12,000	7,738	64	10,384	10,373	100	48,834	11,475	23	24,196	17,787	74
Belanja Hibah	109,838	83,817	76	327,238	279,563	85	306,466	264,198	86	140,976	86,727	62	231,190	206,431	89
Belanja Bantuan Sosial	114,967	81,872	71	124,384	110,460	89	89,610	40,562	45	73,180	55,843	76	36,471	31,571	87
Belanja Bantuan Keu- angan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	285,907	270,005	94	283,763	280,682	99	494,083	470,959	95	485,421	474,892	98	642,618	596,755	93
Belanja Tidak Terduga	10,000	5,968	60	39,462	32,114	81	25,000	10,818	43	15,000	-	0	15,000	3,064	20
Belanja Langsung	3,469,129	2,403,515	69	4,521,864	3,087,853	68	6,527,304	5,226,459	80	4,818,094	4,138,989	86	5,395,107	4,135,668	77
Belanja Pegawai	343,519	261,239	76	375,277	302,518	81	452,611	382,832	85	184,525	150,586	82	156,603	121,198	77
Belanja Barang dan Jasa	1,090,977	884,643	81	1,266,193	968,268	76	1,803,345	1,427,585	79	1,595,803	1,405,982	88	1,453,655	1,195,116	82
Belanja Modal	2,034,633	1,257,633	62	2,880,394	1,817,067	63	4,271,348	3,416,042	80	3,037,766	2,582,421	85	3,784,848	2,819,353	74

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2011– 2015

Selanjutnya jika dilihat dari struktur belanja daerah selama periode tahun 2011-2015 terlihat cukup besarnya alokasi anggaran daerah yang terserap pada pos belanja langsung yang menyerap sebesar 64 persen dari total belanja daerah, sedangkan belanja tidak langsung menyerap sebesar 36 persen dari total belanja daerah. Kemudian pengamatan terhadap struktur belanja daerah berdasarkan jenis belanja daerah, terlihat cukup besarnya alokasi belanja pada pos belanja modal yang sepanjang tahun 2011-2015 rata-rata menyerap alokasi anggaran sebesar 39,4 persen dari total belanja daerah, kemudian belanja pegawai menyerap anggaran mencapai rata-rata sebesar 28,1 persen dari total belanja daerah dan belanja barang dan jasa menyerap anggaran sebesar 20,2 persen dari total belanja daerah. .

Gambar 3.3 Struktur Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015



Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2011– 2015

d. Realisasi Belanja Daerah

Selama periode tahun 2011-2015, realisasi belanja yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD belum dapat terpenuhi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari data realisasi belanja yang dapat diwujudkan oleh daerah yang hanya mencapai kisaran angka sebesar 74 Persen sampai dengan 85 persen.

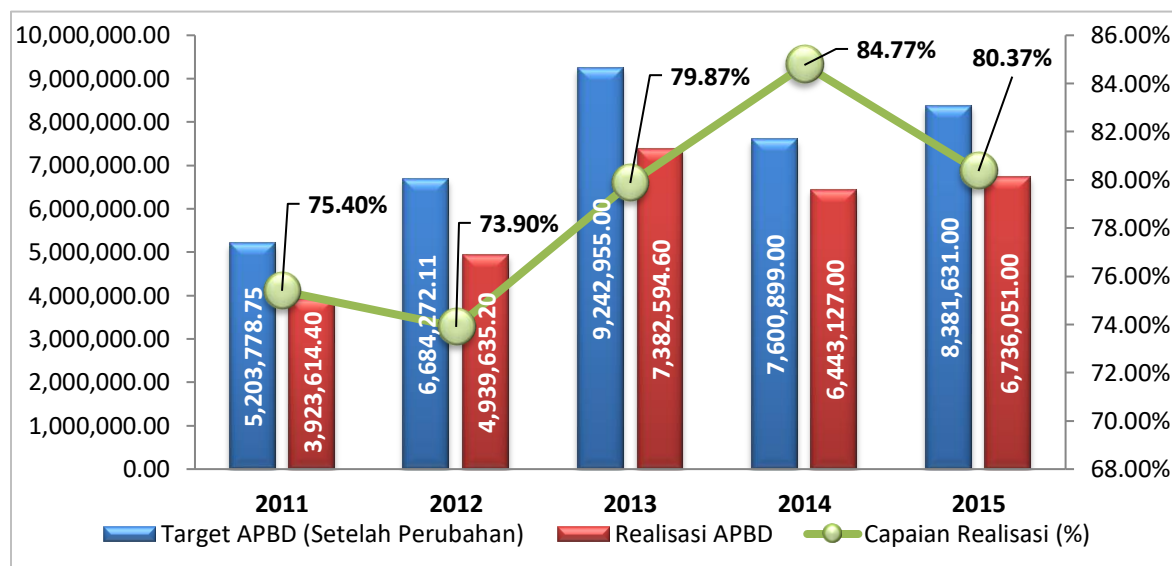
Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2011-2015

Tahun Anggaran	Rencana	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2011	5.203.778.75	3,923,614.40	75	(1,280,164.35)

Tahun Anggaran	Rencana	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2012	6,684,272.11	4,939,635.20	74	(1,744,636.91)
2013	9.242.955.00	7,382,594.60	80	(1,860,360.40)
2014	7,600,899.00	6,443,127.00	85	(1,157,772.00)
2015	8,381,631.00	6,736,051.00	80	(1,645,580.00)

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2011– 2015

Gambar 3.4 Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2011-2015



Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2011– 2015

e. Realisasi Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sedangkan ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial

Tabel 3.5 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015

URAIAN	2011		2012		2013		2014		2015	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	905,129	885,397	2,441,490	2,442,490	3,447,899	3,449,352	1,914,702	1,915,202	1,931,075	1,931,075
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	905,129	882,913	2,441,490	2,441,490	3,447,899	3,447,899	1,914,702	1,914,702	1,931,075	1,931,075
Penerimaan Pinjaman Daerah	0	2,484	0	0	0	0	0	500	0	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	1,000	3,447,899	3,446,539	0	0	0	0
Penerimaan Investasi Non Permanen	0	0	0	0	0	453	0	0	0	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	168,839	147,200	242,427	172,753	204,744	102,723	0	0	18,038	18,038
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	125,000	125,000	118,726	118,726	200,000	100,000	0	0	5,000	5,000
Pembayaran Pokok Utang	43,839	22,200	123,700	54,027	4,744	2,723	0	0	13,038	13,038
PEMBIAYAAN NETTO	736,290	738,197	2,199,064	2,269,737	3,243,155	3,346,630	1,914,702	1,915,202	1,913,037	1,913,037
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	-	2,441,490	-	3,447,899	-	1,914,702	-	1,931,457	-	208,346

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2011– 2015

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dikemukakan bahwa sepanjang tahun 2011-2015, pembiayaan netto memberikan kontribusi cukup besar untuk menutupi defisit anggaran daerah yang memang didisain untuk mengakomodasi adanya sisa lebih perhitungan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya. Namun demikian patut diwaspadai bahwa terjadi trend penurunan pada tahun 2014 dan 2015, akibat adanya defisit anggaran yang cukup besar.

3.1.2. Neraca Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Gambaran umum perkembangan neraca daerah Kabupaten Kutai kartanegara pada periode tahun 2010-2014 menunjukkan bahwa Aset dan Ekuitas Daerah mengalami perkembangan yang sangat signifikan yang mencapai sebesar 18 persen pertahun, dari sebesar Rp.12,072 Trilyun pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp.23.353 trilyun pada tahun 2014. Selanjutnya gambaran perkembangan masing-masing pos neraca daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu tahun 2010-2014, disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.6 Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010-2014 (Rp.juta)

URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-rata Pertumbuhan
ASET	12.072.272	15.325.562	18.484.359	21.050.162	23.353.539	18%
ASET LANCAR	942.200	2.791.016	3.612.448	2.203.581	2.133.420	46%
Kas	905.488	2.467.015	3.502.083	2.087.553	1.931.584	42%
Investasi Jangka Pendek	0	0	-	-	-	-
Piutang	30.891	313.342	88.615	84.698	176.697	237%
Persediaan	5.820	10.658	21.750	25.139	31.330	57%
INVESTASI JANGKA PANJANG	493.193	477.324	592.569	686.360	659.891	8%
Investasi Non Permanen	187.930	52.955	45.612	46.208	23.514	-33%
Investasi Permanen	305.262	424.369	546.957	640.151	636.376	21%
ASET TETAP	10.519.990	11.088.319	12.834.785	17.727.317	20.140.980	18%
Tanah	1.186.673	915.832	1.150.217	1.890.919	1.903.402	17%
Peralatan dan Mesin	1.217.894	1.290.354	1.393.052	1.766.148	1.967.356	13%
Gedung dan Bangunan	3.047.503	3.072.674	3.330.952	4.635.688	4.949.73	14%
Jalan Jaringan dan Instalasi	4.980.977	5.285.220	5.485.777	7.285.434	7.795.63	12%
Aset Tetap Lainnya	86.943	109.069	54.686	57.372	90.814	10%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	415.170	1.420.102	2.091.753	3.434.038	118%
Akumulasi Penyusutan						
DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
ASET LAINNYA	116.889	968.902	1.444.557	432.903	419.246	176%

URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-rata Pertumbuhan
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	15.384	15.305	15.268	15.254	15.245	0%
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	801.945	801.945	61.975	61.975	-31%
Aset Tak Berwujud			1.040	24.683	35.819	1159%
Aset Lain-lain	101.505	151.653	626.304	330.989	306.206	
JUMLAH ASET	12.072.272	15.325.562	18.484.359	21.050.162	23.353.539	18%
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	72.005	61.789	198.850	233.033	84.740	40%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	25.352	25.303	53.960	172.789	489	58%
Utang Jangka Pendek Lainnya	46.654	36.486	144.890	60.243	84.250	64%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	80.861	123.117	141.144	-	-	
Utang Dalam Negeri	80.861	123.117	141.144	-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN	152.866	184.906	339.994	233.033	84.740	2%
EKUITAS DANA						
EKUITAS DANA LANCAR	870.194	2.729.227	3.413.598	1.970.548	2.048.680	50%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	879.837	2.441.490	3.447.899	1.914.702	1.931.074	44%
Cadangan Untuk Piutang	30.891	313.342	88.615	91.312	177.842	235%
Cadangan Untuk Persediaan	5.820	10.658	21.750	24.716	23.994	49%
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-46.654	-36.486	-144.890	(60.243)	(84.251)	64%
Pendapatan yang Ditangguhkan	299	222	225	61	19	-42%
EKUITAS DANA INVESTASI	11.049.211	12.411.429	14.730.767	18.846.580	21.220.118	18%
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	493.193	477.324	592.569	686.360	659.891	8%
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	10.519.990	11.088.319	12.834.785	17.727.317	20.140.980	18%
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)	116.889	968.902	1.444.557	432.903	419.246	176%
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-80.861	-123.117	-141.144	-	-	-

URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-rata Pertumbuhan
EKUITAS DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	-
Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
JUMLAH EKUITAS DANA	11.919.405	15.140.656	18.144.365	20.817.129	23.268.798	18%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	12.072.272	15.325.562	18.484.359	21.050.162	23.353.539	18%

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2010– 2014

Berdasarkan data perkembangan neraca daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2010-2014, selanjutnya dapat dianalisa perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Tahun 2010-2014 , sebagai berikut:

Tabel 3.7 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010-2014

RASIO	RUMUS	2010	2011	2012	2013	2014
Rasio Likuiditas	Aset Lancar	942.200	2.791.016	3.612.448	2.203.581	2.133.420
	Kewajiban Jangka Pendek	72.005	61.789	198.850	233.033	84.740
	Rasio Lancar	13	45	18	9	25
	Aset Lancar – Persediaan	936,380	2,780,358	3,590,698	2,178,442	2,102,090
	Kewajiban Jangka Pendek	72.005	61.789	198.850	233.033	84.740
	Quick Ratio	13	45	18	9	25
Rasio Solvabilitas	Total Hutang	152.866	184.906	339.994	233.033	84.740
	Total Aset	12.072.272	15.325.562	18.484.359	21.050.162	23.353.539
	Rasio Total Hutang (%)	0.01266257	0.012065202	0.018393605	0.01107	0.00362857
	Total Hutang	152.866	184.906	339.994	233.033	84.740
	Total Ekuitas	11.919.405	15.140.656	18.144.365	20.817.129	23.268.798
	Rasio Hutang/ Modal (%)	0.01282496	0.012212549	0.018738269	0.011194	0.00364179

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2010– 2014

Berdasarkan data neraca Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tersaji pada Tabel 3.6 dan hasil perhitungan rasio keuangan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.7 menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas yang positif.

- *Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Berdasarkan tabel di atas, Rasio lancar dari tahun 2010 s/d 2014 berkisar antara 9 sampai dengan 45. Hal ini berarti kemampuan membayar hutang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat tinggi;*

- *Quick ratio yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel diatas, Rasio Quick selama periode tahun 2010-2014 berkisar antara 9 sampai dengan 45. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.*
- *Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Selama periode tahun 2010-2014, rasio total hutang terhadap aset menunjukan tren menurun yaitu dari angka 0.012 persen pada tahun 2010 menjadi 0,0036 persen pada tahun 2014 sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh hutang terhadap asset yang dimiliki sangat kecil.*
- *Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Selama periode tahun 2010-2014, Rasio Hutang Terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkisar antara 0.00036 persen sampai dengan 0.01 persen. Hal ini menunjukkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara.*

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.2.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang disepakati setiap tahunnya, maka secara umum kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun-tahun anggaran sebelumnya sebagai berikut:

- Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.*
- Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.*
- Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagai komitmen taat azas dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan kebijakan terkait pendapatan daerah sebagai berikut:*

1) Pendapatan Asli Daerah

- Dalam upaya merencanakan target pendapatan asli daerah dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah serta optimalisasi pencapaiannya.*
- Dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, law enforcement dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.*

- c) Dalam rangka pemungutan pajak daerah, dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d) Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya yang dapat ditempuh melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah). Jumlah rencana penerimaan yang dianggarkan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hendaknya mencerminkan rasionalitas dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan kembali ditetapkan sebagai penyertaan modal (telah diinvestasikan). Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan. Penyertaan modal pada pihak ketiga ditetapkan dengan peraturan daerah.
- e) Penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah merupakan pendapatan daerah.

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Kutai Kartanegara Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta diupayakan untuk memperoleh Dana Penyesuaian Bidang Infrastruktur yang termasuk dalam Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Secara keseluruhan, terus diupayakan peningkatan Dana Perimbangan terutama melalui DAK dan dana bagi hasil.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a) Dana darurat yang diterima dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana korban/kerusakan akibat bencana.
- b) Hibah yang diterima berupa uang harus dianggarkan dalam APBD dan didasarkan atas naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah dan pemberi hibah. Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan daerah.
- c) Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- d) Dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima pemerintah kabupaten merupakan lain-lain penerimaan yang sah.

3.2.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Secara umum, kebijakan umum keuangan daerah menyangkut tentang belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015, sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial

- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- e. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut:
 - 1) *Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman diperkotaan dan diperdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan;*
 - 2) *Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;*
 - 3) *Dana alokasi umum diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat;*
 - 4) *Dana alokasi khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.*
- f. Belanja Pegawai
 - 1) *Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.*
 - 2) *Penganggaran gaji tunjangan ketiga belas PNS dan tunjangan jabatan struktural/fungsional dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - 3) *Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas Pegawai Negeri Sipil Daerah, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, diberikan Tunjangan Umum setiap bulan. Besarnya Tunjangan Umum dimaksud berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;*
 - 4) *Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;*
 - 5) *Belanja pegawai sambil menunggu penetapan pagu anggaran indikatif dana perimbangan, maka pengalokasian angaran masih menggunakan pagu anggaran belanja pegawai tahun sebelumnya. Setelah dana perimbangan telah ditetapkan pemerintah, maka belanja pegawai dianggarkan dengan memperhitungkan kebijakan pemerintah menaikkan gaji pokok sebesar 20% dan "accres" gaji sebesar 2,5% untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai terutama akibat adanya penerimaan pegawai baru;*
 - 6) *Berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,*

kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja, dengan Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- 7) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD, atau unit usaha lainnya, pembayaran gaji dan penghasilan lainnya menjadi beban BUMD, atau unit usaha yang bersangkutan;
- 8) Pemberian honorarium bagi PNS supaya dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- 9) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

g. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Penyediaan anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan. Oleh karena itu, perencanaan pengadaan barang agar didahului dengan evaluasi persediaan barang serta barang dalam pemakaian;
- 2) Penganggaran pengadaan software untuk sistem informasi manajemen keuangan daerah dicantumkan dalam belanja barang dan jasa. Jika software tersebut dapat dioperasikan sesuai dengan fungsinya, harus dikapitalisasi menjadi aset daerah;
- 3) Dalam upaya meningkatkan dan memberdayakan kegiatan perekonomian daerah, perencanaan pengadaan barang dan jasa agar mengutamakan hasil produksi dalam negeri dan melibatkan pengusaha kecil, menengah dan koperasi;
- 4) Dalam merencanakan kebutuhan barang, pemerintah daerah supaya menggunakan daftar inventarisasi barang milik pemerintah daerah dan standar penggunaan barang sebagai dasar perencanaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
- 5) Penganggaran belanja untuk penggunaan energi dan air agar mempedomani Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air yang diubah menjadi Instruksi Presiden Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penghematan Energi dan Air;
- 6) Penyusunan rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa agar mempedomani ketentuan tentang standar satuan harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam keputusan kepala daerah;
- 7) Belanja perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa;
- 8) Penyediaan belanja perjalanan dinas dalam rangka studi banding agar dibatasi baik jumlah orang, jumlah hari maupun frekuensinya dan dilakukan secara selektif agar tidak terlalu lama meninggalkan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan studi banding dapat dilakukan sepanjang memiliki

nilai manfaat guna kemajuan daerah yang hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat; dan

- 9) Penugasan untuk mengikuti undangan dalam rangka workshop, seminar, dan lokakarya atas undangan atau tawaran dari organisasi/lembaga tertentu diluar instansi pemerintah dilakukan secara selektif agar tidak membebani belanja perjalanan dinas.
- 10) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja.
- 11) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah dan bantuan sosial.
Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

h. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang memiliki kriteria:

- 1) masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) merupakan objek pemeliharaan;
- 3) jumlah nilai rupiahnya material sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
- 4) pengadaan software dalam rangka pengembangan sistem Informasi manajemen dianggarkan pada belanja modal.

i. Belanja DPRD

- 1) Penganggaran belanja DPRD berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pada tahun 2008 menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai perubahan terakhir atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004. Disamping itu mempedomani pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- 2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan khusus PPh Pasal 21, tunjangan perumahan, uang duka tewas dan wafat serta pengurusan jenazah dan uang jasa pengabdian serta tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam Belanja DPRD. Sedangkan belanja tunjangan kesejahteraan dan belanja penunjang kegiatan DPRD dianggarkan dalam Belanja Sekretariat DPRD;
- 3) Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 636/KMK.04/1994 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang

dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibebankan pada APBD dianggarkan pada objek belanja tunjangan khusus PPh Pasal 21; dan

j. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- 1) *Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
- 2) *Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja tidak langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
- 3) *Belanja rumah tangga, beserta pembelian inventaris/perlengkapan rumah jabatan dan kendaraan dinas serta biaya pemeliharannya, biaya pemeliharaan kesehatan, belanja perjalanan dinas dan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja langsung Sekretariat Daerah; dan*
- 4) *Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan satu kesatuan dalam belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau tidak dianggarkan secara terpisah dan pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.*

k. Penyediaan dana untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau memberikan bantuan kepada daerah lain dalam penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang dapat ditunda.

l. Belanja Subsidi

- 1) *Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.*
- 2) *Belanja Subsidi ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.*

m. Belanja Hibdah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

n. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

o. Belanja Bantuan Keuangan

- 1) *Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada Kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.*

- 2) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan;
- 3) Penganggaran untuk Alokasi Dana Desa agar mempedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 4) Bantuan keuangan kepada partai politik yang dialokasikan dalam APBD sesuai rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

p. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya

3.2.3. Proporsi Realisasi Belanja Daerah

a. Proporsi Penggunaan Anggaran

Gambaran realisasi dari kebijakan belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode tahun anggaran sebelumnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, adalah sebagai berikut:

1. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Berdasarkan data realisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2011-2015, dapat diketahui bahwa realisasi belanja daerah berkisar antara 74 persen sampai dengan 85 persen atau rata-rata realisasi tahunan mencapai sebesar 79.4 persen.

- Sepanjang tahun 2010-2014, rata-rata realisasi belanja tidak langsung mencapai sebesar 84,6 persen dari total anggaran yang ditetapkan;
- Kemudian pada kelompok belanja langsung, serapan anggaran selama periode tahun 2010-2014 mencapai sebesar 76,8 persen dari total anggaran yang ditetapkan.

Tabel 3.8 Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rerata
2	Belanja	75	74	80	85	80	79
2.1.	Belanja Tidak langsung	88	86	79	83	87	85
	Belanja Pegawai	89	83	76	83	86	83
	Belanja Subsidi	86	64	100	23	74	70
	Belanja Hibah	76	85	86	62	89	80
	Belanja Bantuan Sosial	71	89	45	76	87	74
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	94	99	95	98	93	96

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rerata
	Belanja Tidak Terduga	60	81	43	0	20	41
2.2.	Belanja Langsung	69	68	80	86	77	76
	Belanja Pegawai	76	81	85	82	77	80
	Belanja Barang dan Jasa	81	76	79	88	82	81
	Belanja Modal	62	63	80	85	74	73

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2010– 2014

2. Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur

Dalam kerangka untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah membutuhkan sumber pembiayaan *overhead cost* bagi sumber daya pegawai maupun barang jasa serta kebutuhan lainnya. Dalam konteks penganggaran daerah, overhead cost pemerintah ini diletakkan pada berbagai pos pembelanjaan belanja tidak langsung dan belanja langsung seperti pada tabel berikut ini;

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Kutai Kartanegara tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun Anggaran 2011-2015

URAIAN	Tahun 2011 (Rp.juta)	Tahun 2012 (Rp.juta)	Tahun 2013 (Rp.juta)	Tahun 2014 (Rp.juta)	Tahun 2015 (Rp.juta)
BELANJA	2,237,656	2,473,831	3,107,408	2,898,657	2,899,841
BELANJA TIDAK LANGSUNG	976,640	1,143,838	1,359,226	1,675,200	1,744,776
Belanja Pegawai	976,640	1,143,838	1,359,226	1,675,200	1,744,776
Gaji Dan Tunjangan	657,619	728,075	768,762	813,365	874,559
Tambahan Penghasilan PNS	315,650	412,945	587,357	858,149	866,397
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	3,370	2,818	3,107	3,687	3,819
BELANJA LANGSUNG	1,261,016	1,329,993	1,748,182	1,223,457	1,155,066
Belanja Pegawai	261,239	301,691	378,305	120,149	102,435
Honorarium PNS	108,715	119,541	160,090	109,227	87,593
Honorarium Non PNS	141,930	167,518	200,723	3	12,928
Uang Lembur	10,594	14,632	17,491	10,918	1,914
Belanja Barang dan Jasa	803,870	872,084	1,051,094	899,592	890,378
Belanja Bahan Pakai Habis	67,832	52,514	67,298	62,996	51,106
Belanja Bahan/Material	86,117	78,026	59,149	121,033	39,320
Belanja Jasa Kantor	192,906	246,226	303,951	291,955	482,414
Belanja Premi Asuransi	5,383	6,736	8,202	1,426	-
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28,605	29,281	25,253	27,561	24,006
Belanja Cetak Dan Penggandaan	24,170	27,528	37,289	28,901	23,447
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	4,016	2,066	3,161	2,550	2,674
Belanja Makanan Dan Minuman	44,688	46,962	64,812	53,326	45,568
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	4,700	6,272	6,024	2,440	568
Belanja Pakaian Kerja	1,618	2,290	2,513	2,563	1,800
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	12,378	14,536	20,822	4,401	3,000

URAIAN	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
	(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)
Belanja Perjalanan Dinas	298,429	322,571	407,948	279,083	201,561
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2,599	2,075	1,368	1,529	479
Belanja kursus. pelatihan. sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	24,291	24,884	32,286	12,851	9,999
Belanja Jasa Konsultansi	208	5,307	8,484	2,808	4,437
Belanja kursus. pelatihan. sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	5,930	4,809	2,534	4,170	-
Belanja Modal	195,908	156,218	318,784	203,716	162,252
Belanja Modal Pengadaan Tanah	22,286	6,985	39,419	5,601	5,086
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	-	5	18,344	15,419	174
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	12,157	28,879	75,476	17,652	25,019
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	-	172	170	299	913
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor	695	1,036	703	797	27
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Tidak Bermotor	311	129	182	294	-
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	1,011	268	337	516	248
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	354	535	294	54	234
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2,558	4,340	10,239	9,246	24,965
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5,524	9,048	11,586	8,663	13,789
Belanja Modal Pengadaan Komputer	102,608	16,844	53,506	23,667	14,208
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	17,454	27,072	41,894	32,686	6,230
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1,861	1,616	5,809	1,337	-
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2,030	2,555	3,631	5,165	-
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	5,340	7,151	15,685	6,203	3,634
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	882	1,685	978	766	498
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	1,578	1,447	1,070	205	133
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	12,846	41,287	28,937	54,358	44,468
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	5,950	4,520	8,955	7,304	6,414

URAIAN	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
	(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian. Kebudayaan	464	257	529	13,196	16,172
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	-	387	1,039	290	41

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2011– 2015

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur cenderung mengalami penurunan selama periode tahun 2011-2015. Pada tahun 2011, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur mencapai sebesar 54,97 persen yang kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar 48,38 persen pada tahun 2012 dan sebesar 41,51 persen pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 44,0 persen dan sebesar 42,93 persen pada tahun 2015.

Tabel 3.10 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

NO	URAIAN	BELANJA (Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur)	TOTAL PENGELUARAN (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	PROSENTASE
		(a)	(b)	(a) / (b) X 100%
1	Tahun Anggaran 2011	2,237,656	4,070,816	54,97%
2	Tahun Anggaran 2012	2,473,831	5,113,838	48,38%
3	Tahun Anggaran 2013	3,107,408	7,485,317	41,51%
4	Tahun Anggaran 2014	2,898,657	6,443,127	44,99%
5	Tahun Anggaran 2015	2,899,841	6,754,089	42,93%

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2011– 2015

3) Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Gambaran tentang realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kutai Kartanegara pada 5 (lima) tahun terakhir, tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2011-2015

NO	URAIAN	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
		(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)
I.	BELANJA	1,550,149	1,687,296	2,154,079	2,456,477	2,842,211
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,349,262	1,432,258	1,840,558	2,161,568	2,359,317
1	Gaji Dan Tunjangan	657,619	728,075	768,762	813,365	874,559
2	Tambahan Penghasilan PNS	315,650	412,945	587,357	858,149	866,397
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	3,370	2,818	3,107	3,687	3,819
4	Belanja Subsidi Kepada Perusahaan/Lembaga	101.799	7.738	10,373	11,475	17,787
5	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	817,46	856,70	796	897	413
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya	270.004	279.825	470,163	473,995	596,342

NO	URAIAN	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
		(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)	(Rp.juta)
B.	BELANJA LANGSUNG	200,888	255,037	313,521	294,910	482,894
1	Belanja Jasa Kantor	192.905,79	246.226,43	303,951	291,955	482,414
2	Belanja Premi Asuransi	5.383,35	6.735,57	8,202	1,426	-
4	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.598,55	2.075,38	1,368	1,529	479
II.	PENGELUARAN PEM-BIAYAAN DAERAH	147,200	172,753	102,723	-	18,038
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	125.000,00	118.726,48	100,000	-	5,000
2	Pembayaran Pokok Hutang Kepada Pihak Ketiga	22.199,74	54.026,64	2,723	-	13,038
JUMLAH (I + II)		1,697,349	1,860,049	2,256,802	2,456,477	2,860,249

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2011– 2015

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa Proporsi Belanja wajib dan mengikat cenderung mengalami fluktuasi selama periode tahun 2011-2015. Pada tahun 2011, proporsi belanja wajib dan mengikat mencapai sebesar 41,3 persen yang kemudian turun menjadi sebesar 36,4 persen pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 30,1 persen dan pada tahun 2014 dan 2015 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 38,1 persen dan 42,3 persen.

Tabel 3.12 Analisis Proporsi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

NO	URAIAN	BELANJA Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Daerah	TOTAL PENGELUARAN (BELANJA + PEMBIAYAAN PENGELUARAN)	PROSENTASE
		(a)	(b)	(a) / (b) X 100%
1	Tahun Anggaran 2011	1,697,349	4,070,816	41.7%
2	Tahun Anggaran 2012	1,860,049	5,113,838	36.4%
3	Tahun Anggaran 2013	2,256,802	7,485,317	30.1%
4	Tahun Anggaran 2014	2,456,477	6,443,127	38.1%
5	Tahun Anggaran 2015	2,860,249	6,754,089	42.3%

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2011– 2015

b. Analisis Pembiayaan

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pem-

biayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sedangkan ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Surplus/Defisit Riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus/Defisit riil APBD Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurun waktu tahun 2010 s.d 2014 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.13 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015

URAIAN		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pendapatan Daerah	5,569,537	6,120,306	5,950,667	6,459,382	5,031,360
2	Belanja Daerah	3,923,614	4,939,635	7,382,595	6,443,127	6,736,051
	Surplus/Defisit	1,645,923	1,180,671	(1,431,928)	16,255	(1,704,691)
3	Pembiayaan daerah					
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	885,397	2,442,490	3,449,352	1,915,202	1,931,075
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	147,200	172,753	102,723	0	18,038
	Pembiayaan Netto	738,197	2,269,737	3,346,630	1,915,202	1,913,037
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	2,441,490	3,447,899	1,914,702	1,931,457	208,346

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2010– 2014

Dari tabel terlihat bahwa dari kurun waktu tahun 2011 s.d 2015 terjadi kecenderungan peningkatan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) pada setiap tahunnya, walaupun ada kecenderungan penurunan pada tiga tahun terakhir. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain berasal dari pelampauan pendapatan, penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan dan sisa dana lanjutan.

Tabel 3.14 Surplus/Defisit Riil APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015

Uraian		2011	2012	2013	2014	2015
1	Realisasi Pendapatan Daerah	5,569,537	6,120,306	5,950,667	6,459,382	5,031,360
	Dikurangi					
2	Realisasi Belanja Daerah	3,923,614	4,939,635	7,382,595	6,443,127	6,736,051
3	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan daerah	147,200	172,753	102,723	0	18,038
	Surplus/Defisit Riil	1,498,723	1,007,918	(1,534,651)	16,255	(1,704,691)

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2011– 2015

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami surplus pada tahun 2011, 2012 dan 2013 dan hanya mengalami defisit pada tahun 2013 dan 2015. Hal ini berakibat semakin besarnya silpa yang bisa digunakan menjadi sumber pembiayaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan pembiayaan daerah antara lain:

- Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah.
- Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Setelah mengetengahkan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sampai tahun 2015, maka selanjutnya dapat digambarkan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah dari tahun 2016 hingga tahun 2021 mendatang.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan menganalisa pola pertumbuhan pos pendapatan daerah selama tahun 2011-2015 dan perkiraan pertumbuhan ekonomi Kutai Kartanegara dalam lima tahun yang akan datang dengan basis data awal APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016. Berdasarkan hasil analisis tersebut diperkirakan total pendapatan daerah akan mengalami penurunan yang cukup signifikan yang terutama disebabkan oleh menurunnya harga komoditas sumber daya alam dan pertambangan di pasar internasional yang berakibat pada menurunnya pendapatan negara dari sektor migas dan pertambangan yang pada akhirnya akan berdampak pada penurunan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam.

Sesuai dengan hasil analisis dan perhitungan yang dilakukan maka pada tahun 2017 total pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara diperkirakan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.4,975 Trilyun, walaupun kemudian mulai meningkat menjadi Rp. 5,152 trilyun pada tahun 2018. Diproyeksikan pada akhir periode RPJMD 2016-2021, pendapatan daerah akan kembali pulih menjadi sebesar Rp5,77 trilyun. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan masih tetap berasal dari bagi hasil sumber daya alam, namun demikian pendapatan asli daerah diperkirakan akan mengalami akselerasi seiring dengan berkembangnya sektor perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara.

Proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan.

Tabel 3.15 *Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016-2021 (Rp.Juta)*

No	URAIAN	APBD TA 2016	PROYEKSI				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	PENDAPATAN	5,795,371	4,975,411	5,152,799	5,350,896	5,557,923	5,774,444
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	291,768	312,192	334,045	357,428	382,447	409,219
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	45,840	49,049	52,482	56,156	60,087	64,293
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	7,116	7,614	8,147	8,717	9,327	9,980

No	URAIAN	APBD TA 2016	PROYEKSI				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	42,000	44,940	48,086	51,452	55,053	58,907
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	196,812	210,589	225,330	241,103	257,980	276,039
2.1	Dana Perimbangan	4,846,923	3,960,571	4,066,921	4,189,006	4,314,701	4,444,197
2.1.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	4,385,925	3,960,571	4,066,921	4,189,006	4,314,701	4,444,197
2.1.2.	Dana Alokasi Umum	111,882	-	-	-	-	-
2.1.3.	Dana Alokasi Khusus	349,116	-	-	-	-	-
3.1	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	656,681	702,648	751,833	804,462	860,775	921,028
3.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Pro.insi dan Pemerintah Daerah Lainnya	359,726	384,906	411,850	440,679	471,527	504,534
3.1.2.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	127,195	136,099	145,625	155,819	166,727	178,397
3.1.3.	Bantuan Keuangan dari Pro.insi atau Pemerintah Daerah Lainnya	169,760	181,643	194,358	207,964	222,521	238,097

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2011– 2015

3.3.2. Proyeksi Pembiayaan

Proyeksi SiLPA tahun 2016-2021 menggunakan data SiLPA kurun waktu 2011-2015 ditunjukkan melalui tabel diatas, dimana diketahui nilai dan tingkat pertumbuhan SiLPA yang cukup besar yaitu 109,4% namun demikian dengan mempertimbangkan bahwa tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6% dari total APBD maka diperoleh proyeksi SiLPA berikut ini:

Tabel 3.16 *Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016-2021 (Rp.Juta)*

No	URAIAN	PROYEKSI					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	SILPA	1,200,000	297,730	309,098	320,977	333,395	346,380

Berdasarkan data historis sebagaimana disajikan pada tabel sebelumnya, maka perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jangka waktu lima tahun 2016-2020, disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.17 *Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016-2021 (Rp.Juta)*

NO	URAIAN	PROYEKSI					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	PENDAPATAN	5,795,371	4,962,172	5,151,631	5,349,615	5,556,579	5,773,005
2	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	1,200,000	297,730	309,098	320,977	333,395	346,380
KAPASITAS KEMAMPUAN KEUDA		6,995,371	5,259,902	5,460,728	5,670,592	5,889,973	6,119,385

3.3.3. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi kebutuhan belanja wajib dan mengikat dihitung berdasarkan rata-rata tingkat realisasi pengeluaran wajib dan mengikat tahun 2011-2015 sebagaimana ditunjukkan melalui Tabel 3.11. Adapun hasil proyeksi dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 3.18 Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016-2021

NO	URAIAN	PROYEKSI					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Belanja	3,299,386	2,963,197	2,952,715	2,986,177	3,011,847	3,034,916
	Belanja Tidak Langsung	2,813,721	2,453,249	2,417,270	2,423,960	2,421,519	2,415,071
	Gaji Dan Tunjangan	1,146,955	1,043,260	1,001,103	1,000,693	990,277	975,018
	Tambahan Penghasilan PNS	1,059,417	953,475	953,475	953,475	953,475	953,475
	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	4,002	4,002	4,002	4,002	4,002	4,002
	Belanja Subsidi Kepada Perusahaan/Lembaga	36,424	56,642	50,978	45,880	41,292	37,163
	Belanja Bantuan Keuangan Pada Desa	565,786	394,733	406,575	418,773	431,336	444,276
	Belanja Bantuan Pada Parpol	1,137	1,137	1,137	1,137	1,137	1,137
	Belanja Langsung	485,665	509,948	535,445	562,217	590,328	619,845
	Belanja Jasa Kantor	482,414	506,535	531,861	558,455	586,377	615,696
	Belanja Premi Asuransi	1,569	1,647	1,729	1,816	1,907	2,002
	Belanja Beasiswa PNS	1,682	1,766	1,854	1,947	2,044	2,147
II	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	I+II	3,314,386	2,978,197	2,967,715	3,001,177	3,026,847	3,049,916

3.3.4. Kebijakan Alokasi Anggaran

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai kelompok prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran seperti yang diamanatkan dalam Permendagri No 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, adalah sebagai berikut:

- **Prioritas I**, dialokasikan untuk mendanai Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama.
- **Prioritas II**, dialokasikan untuk pendanaan:
 1. *program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan bidang kesehatan 10% (sepuluh persen). Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas II juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

2. program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD.
- **Prioritas III**, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: dana pendamping DAK, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi ke-masyarakatan serta belanja tidak terduga.

Secara keseluruhan kerangka pendanaan pembangunan Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016-2021 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.19 Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Tahun Anggaran 2016-2021

JENIS DANA	ALOKASI											
	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
PRIORITAS I	3,314,386	47%	2,978,197	57%	2,967,715	54%	3,001,177	53%	3,026,847	51%	3,049,915	50%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,813,721	40%	2,453,249	47%	2,417,270	44%	2,423,960	43%	2,421,519	41%	2,415,071	40%
BELANJA LANGSUNG	485,665	7%	509,948	10%	535,445	10%	562,217	10%	590,328	10%	619,845	12%
PENGE-LUARAN PEM-BIAYAAN DAE-RAH	15,000	0.21%	15,000	0.29%	15,000	0.29%	15,000	0.29%	15,000	0.29%	15,000	0.29%
PRIORITAS II	3,551,883	51%	2,202,507	42%	2,409,688	46%	2,593,220	49%	2,793,188	53%	3,005,085	57%
PRIORITAS III	129,104	2%	92,436	2%	84,494	2%	77,476	1%	71,282	1%	65,825	1%
JUMLAH	6,995,373		5,273,140		5,461,896		5,671,874		5,891,317		6,120,826	

Tabel 3.20 Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016-2021

NO	URAIAN	PROYEKSI					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	6,995,371	5,273,141	5,461,897	5,671,873	5,891,318	6,120,824
1	PENDAPATAN	5,795,371	4,975,411	5,152,799	5,350,896	5,557,923	5,774,444
2	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	1,200,000	297,730	309,098	320,977	333,395	346,380
B	BELANJA	6,980,371	5,244,902	5,445,728	5,655,592	5,874,973	6,104,385
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,942,824	2,545,686	2,501,764	2,501,436	2,492,801	2,480,896
	PRIORITAS I	2,813,721	2,453,249	2,417,270	2,423,960	2,421,519	2,415,071
	Gaji Dan Tunjangan	1,146,955	1,043,260	1,001,103	1,000,693	990,277	975,018
	Tambahan Penghasilan PNS	1,059,417	953,475	953,475	953,475	953,475	953,475
	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	4,002	4,002	4,002	4,002	4,002	4,002
	Belanja Subsidi Kepada Perusahaan/Lembaga	36,424	56,642	50,978	45,880	41,292	37,163
	Belanja Bantuan Keuangan Pada Desa	565,786	394,733	406,575	418,773	431,336	444,276
	Belanja Bantuan Pada Parpol	1,137	1,137	1,137	1,137	1,137	1,137
	PRIORITAS III	129,103	92,437	84,494	77,476	71,282	65,825
	Belanja Hibah	108,128	56,642	50,978	45,880	41,292	37,163
	Belanja Bantuan Sosial	5,976	20,794	18,516	16,596	14,990	13,662
	Belanja Tidak Terduga	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000

NO	URAIAN	PROYEKSI					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	BELANJA LANGSUNG	4,037,547	2,699,216	2,943,964	3,154,157	3,382,172	3,623,489
	PRIORITAS I	485,665	509,948	535,445	562,217	590,328	619,845
	Belanja Jasa Kantor	482,414	506,535	531,861	558,455	586,377	615,696
	Belanja Premi Asuransi	1,569	1,647	1,729	1,816	1,907	2,002
	Belanja Beasiswa PNS	1,682	1,766	1,854	1,947	2,044	2,147
	PRIORITAS II	3,551,883	2,202,507	2,409,688	2,593,220	2,793,188	3,005,085
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	PRIORITAS I	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	SURPLUS (DEFISIT) = A-B +C	0	0	0	0	0	0

BAB 4 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Memberikan gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara dalam berbagai urusan pemerintahan serta isu-isu strategis yang menjadi basis pengembangan perencanaan daerah dalam jangka menengah.

4.1. PENGANTAR

Pengertian isu strategis menurut Permendagri 54 Tahun 2010 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, jangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Dengan demikian isu strategis merupakan permasalahan pokok yang bersifat sangat strategis dan signifikan yang dihadapi Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2016-2021.

4.2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan memberikan gambaran mengenai tingkat capaian pembangunan pada periode lalu yang masih belum mencapai target atau standar yang diinginkan atau direncanakan. Beberapa hal yang menjadi permasalahan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu:

1. Rendahnya pelayanan aparat pemerintahan akibat belum efisien dan efektifnya manajemen pemerintahan dan belum terselenggaranya pemerintahan yang didukung birokrasi profesional yang berbasis kompetensi dan kinerja.
2. Angka kemiskinan tahun 2014 sebesar 7,42%. Masih tingginya angka kemiskinan tersebut diperkirakan oleh pengaruh inflasi yang tinggi, infrastruktur jalan yang rusak dan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi. Selain daripada itu terbatasnya kualitas sumber daya manusia pencari kerja, sehingga kalah bersaing di sektor formal, faktor ini penyebab meningkatnya angka pengangguran.
3. Tingginya ketergantungan fiskal Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap sumber pembiayaan pemerintah pusat.
4. Adanya disparitas pertumbuhan dan pembangunan antar wilayah terutama wilayah hulu, pesisir dan tengah. Untuk wilayah pedesaan terjadi karena masih terbatasnya sarana dan prasarana dasar masyarakat seperti fasilitas pendidikan, pemukiman, air bersih sanitasi dan transportasi serta irigasi pertanian. Sedangkan untuk wilayah perkotaan masih kurangnya jaringan jalan perkotaan, drainase dan sanitasi, air bersih, sampah, penyediaan ruang publik dan pertamanan.
5. Rendahnya kontribusi sektor pertanian dan pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kutai Kartanegara.
6. Turunnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Alam karena kurang optimalnya pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
7. Partisipasi perempuan dalam pembangunan dan pengarusutamaan bagi perlindungan anak.

4.3. ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

4.3.1. Isu Strategis Internasional

a. Development Goals (SDGs)

Seiring dengan berakhirnya MDGs, yaitu 2015, diskusi mengenai kerangka kerja pembangunan internasional pasca 2015 dimulai. Pada pertemuan Rio +20 Summit, 192 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memulai proses perancangan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs (*sustainable development goals*) yang berorientasi pada aksi, ringkas dan mudah dikomunikasikan, jumlah terbatas, aspiratif, bersifat global secara alamiah dan dapat diterapkan

pada semua negara dengan memperhatikan perbedaan kenyataan, kapasitas dan tingkat pembangunan sebuah negara dan menghargai kebijakan dan prioritas nasional.

Setelah lebih dari satu tahun perundingan konsultatif yang inklusif dan intensif, Kelompok Kerja Terbuka Majelis Umum untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mengajukan 17 tujuan spesifik dengan 169 target yang saling berkaitan. Negara-negara Anggota PBB telah menyepakati bahwa agenda yang disusun oleh Kelompok Kerja Terbuka akan menjadi basis utama untuk proses antar pemerintah pasca 2015.

1. *Menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya dimanapun ;*
2. *Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan gizi, dan memajukan pertanian berkelanjutan*
3. *Memastikan hidup yang sehat dan memajukan kesejahteraan bagi semua orang di semua usia*
4. *Memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua*
5. *Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan*
6. *Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi bagi yang berkelanjutan bagi semua*
7. *Memastikan akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua*
8. *Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan inklusif, kesempatan kerja yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua*
9. *Membangun infrastruktur yang tangguh, menggalakkan industrialisasi yang berkelanjutan dan inklusif dan mengembangkan inovasi*
10. *Mengurangi ketimpangan didalam dan diantara Negara-negara*
11. *Membuat kota dan permukiman manusia menjadi inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan*
12. *Memastikan pola konsumsi dan produksi yang keberlanjutan*
13. *Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampak-dampaknya*
14. *Menghemat dan menjaga kesinambungan dalam menggunakan samudera, laut dan sumber daya untuk pembangunan yang berkelanjutan*
15. *Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan degradasi tanah cadangan serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayat*
16. *Mendorong kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif disemua tingkatan*
17. *Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.*

b. ASEAN Economic Community (AEC)

Komunitas ekonomi asean (AEC) akan menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional pada 2015. Adapun berikut karakteristik kunci dari perwujudan Komunitas Ekonomi ASEAN 2015:

- a) *Pasar tunggal dan produksi dasar,*
- b) *Sebuah ekonomi yang sangat kompetitif*
- c) *Sebuah wilayah ekonomi yang adil pengembangan, dan*
- d) *Sebuah wilayah sepenuhnya terintegrasi ke dalam perekonomian global.*

Bidang kerjasama AEC meliputi pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas; pengakuan kualifikasi profesional; konsultasi mengenai kebijakan makro ekonomi dan keuangan; langkah-langkah pembiayaan dalam perdagangan; peningkatan infrastruktur dan konektivitas komunikasi; perkembangan elektronik transaksi melalui e-ASEAN; mengintegrasikan industri diseluruh wilayah untuk mempromosikan sumber di daerah; dan meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk bangunan AEC. Singkatnya, AEC akan mengubah ASEAN ke wilayah dengan perdagangan bebas dari barang, Jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan lebih bebas aliran modal.

Pemberlakuan AEC akan mengakibatkan Barang, jasa, dan tenaga kerja semakin mudah untuk lalu lintas di negara anggota ASEAN. Bagi Indonesia, kesepakatan itu bisa menjadi pedang bermata dua. Jika diolah dan dikelola dengan baik, produk dan tenaga kerja Indonesia berpotensi merajai pasar Asia Tenggara. Sebaliknya, jika tak siap berkompetisi, Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi negara anggota ASEAN lain.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Association Of South-east Asian Nations, terdapat 11 sektor dan subsektor ekonomi nasional dan daerah yang harus dikembangkan secara intensif.

Demikian juga bagi Kabupaten Kutai Kartanegara, Asean economy community ini menjadi sebuah prospek baru untuk Kabupaten Kutai Kartanegara membuka arus investasi seiring dengan keterbukaan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ramah terhadap investor. Penguatan pasar lokal dan regional menjadi perhatian utama guna mempersiapkan pasar bebas yang berimplikasi pada eksistensi pengusaha lokal untuk dapat berdaya saing dengan pengusaha asing.

4.3.2. Isu atau Kebijakan Nasional

Selain memerhatikan isu skala internasional dan regional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan adalah isu strategis nasional yang dalam hal ini telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpilih pada periode ini, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJP Nasional tahun 2005-2025, maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJM Nasional tahun 2015-2019 sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

- a) **Gotong royong** merupakan intisari dari ideologi Pancasila. Tanggung jawab untuk membangun bangsa harus dilakukan dengan cara musyawarah dalam memutuskan dan gotong royong dalam kerja. Kekuatan rakyat adalah Gotong Royong, dimana rakyat selalu bahu-membahu dan bekerjasama menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangannya ke depan.
- b) **Berdaulat** adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi bangsanya sendiri. Oleh karena itu, pembangunan sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, merupakan upaya membangun kemandirian. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian diperlukan kekuatan dan kemampuan nasional di segala lini baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
- c) **Kemandirian** suatu bangsa tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; dan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.
- d) **Kemandirian dalam kebudayaan** harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata, namun kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian

sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berlandaskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; serta
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

4.3.3. Isu Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013–2018 merupakan salah satu dokumen yang harus diperhatikan dalam menyusun RPJMD kabupaten/kota yang ada di wilayah Kalimantan Timur.

Isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kalimantan Timur periode 2009-2013, yang menjadi salah satu input bagi perumusan visi, misi dan sasaran pembangunan Kalimantan Timur pada periode berkenaan, yaitu:

1. Pemekaran Kalimantan Utara
2. Perubahan Iklim Akibat Emisi Gas Rumah Kaca
3. Mainstreaming Ekonomi Hijau Dalam Perencanaan Pembangunan
4. Pentingnya Pengembangan Agro-Industri di Masa Depan
5. Kelangkaan BBM dan Daya Listrik yang Tak Kunjung Terpecahkan
6. Komitmen Atas Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi

7. Koordinasi Yang Lemah Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Pengendalian Ijin
8. Eksploitasi
9. Peningkatan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan
10. Pencapaian MDG's
11. Pencapaian MP3EI

Sedangkan Visi pembangunan Kalimantan Timur sebagaimana termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018, yaitu:

“MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN”

Untuk mencapai apa yang diinginkan oleh visi, maka misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi;
2. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan;
3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik; dan
5. Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim

4.3.4. Isu Strategis Lima Tahunan Kabupaten Kutai Kartanegara

Penggalan isu strategis daerah tidak bisa lepas dari kerangka acuan perencanaan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025, tahun 2015-2019 merupakan periode RPJMD ketiga dimana mengusung tema visi Menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan meningkatnya peranan sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata sebagai leading sector pembangunan daerah yang berbasis kerakyatan dan lestari. Sasaran utama yang hendak dicapai pada periode RPJMD ketiga tersebut adalah: *Pertama*, meningkatnya kinerja sektor pertanian yang ditunjukkan oleh: a) sektor pertanian sebagai *leading sector* pertumbuhan ekonomi daerah yang memiliki daya saing tinggi, b) meningkatnya produksi dan kualitas produk hasil pertanian, c) semakin beranekaragamnya produk pertanian dengan memanfaatkan bahan baku pangan lokal, d) meningkatnya daya saing produk hasil pertanian dipasar lokal, nasional, dan internasional; e) semakin berkembangnya industri berbasis pertanian; f) semakin berkembangnya komoditi pertanian yang memiliki nilai tambah tinggi (*high value crops*); dan g) semakin meningkatnya produktivitas dan pendapatan petani dan pekerja di sektor pertanian. *Kedua*, meningkatnya kinerja sektor pariwisata yang berbasis wisata alam dan budaya ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah dan lama kunjungan wisatawan asing dan domestik, serta terpeliharanya kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Dan *Ketiga*, meningkatnya APS, meningkatnya kelulusan dalam UAN, dan meningkatnya masyarakat melek aksara.

Arah pembangunan periode RPJMD ketiga tersebut memiliki tiga frase utama yang menjadi titik berat yaitu:

1. Menuju masyarakat Kutai Kartanegara yang MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA
2. Dengan meningkatnya sektor PERTANIAN, PERKEBUNAN dan PARIWISATA sebagai leading sector pembangunan daerah
3. Yang berbasis KERAKYATAN dan LESTARI.

Tiga frase utama arah pembangunan periode RPJMD ketiga tersebut kemudian dirumuskan menjadi lima tema pembangunan. Tema-tema tersebut digunakan untuk lebih memudahkan dalam rangka penggalan permasalahan pembangunan dan isu strategis dalam rangka penyusunan bahan

kebijakan perencanaan bagi kepala daerah terpilih melalui visi dan misinya. Adapun kelima tema tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menuju tata kelola yang lebih baik;*
2. *Pendayagunaan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka menuju daya saing daerah;*
3. *Perwujudan pemerintah yang bersih, tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusifitas daerah;*
4. *Peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat;*
5. *Peningkatan ekonomi dan pertanian dalam arti luas (ketahanan pangan).*

Selanjutnya uraian isu strategis pada masing-masing tema tersebut ditampilkan pada tabel 4.1. berikut ini;

Tabel 4.1 Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Isu Strategis	Isu Strategis di Daerah	Permasalahan Pembangunan terkait Isu Strategis di Daerah
Tema: Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menuju tata kelola yang lebih baik			
1	Sumber daya Alam	Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan	Lahan bekas tambang masih banyak yang belum termanfaatkan
		Pemanfaatan potensi sumberdaya alam terbaharukan belum optimal	Optimalisasi CSR secara terpadu untuk pembangunan berkelanjutan
2	Lingkungan Hidup	Pembangunan kawasan di kawasan konservasi perlu ditata lebih baik	potensi unggulan di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan yang banyak yang belum tergarap dengan baik
			Pembangunan di kawasan bantaran sungai, kawasan sekitar hutan, dan kawasan yang berdampak lingkungan
			perubahan tutupan lahan untuk kehutanan yang tiap tahun mengalami kehilangan dengan prosentase sangat tinggi
			Erosi dan sedimentase cukup tinggi
Tema Pendayagunaan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka menuju daya saing daerah			
1	Disparitas pembangunan antar wilayah	Disparitas pembangunan antar wilayah masih tinggi (perdesaan dan perkotaan)	Energi Listrik belum menjangkau seluruh desa
			Kondisi Jalan di wilayah terpencil masih kurang
			Pembangunan sarana prasarana publik baik di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dll belum merata di semua wilayah potensi
			Kelangkaan Air bersih pada wilayah terpencil
2	Daya dukung pembangunan Infrastruktur mendorong daya saing dan perkonomian daerah	Keterpaduan pembangunan infrastruktur dalam mendorong daya saing dan perekonomian daerah masih belum optimal	Pembangunan infrastruktur yang mengarah pada optimalisasi potensi daerah masih kurang
			Daya dukung Infrastruktur sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kelautan, pariwisata, dll yang masih kurang
3	Penataan Ruang	Optimalisasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang	Kawasan kumuh yang berada pada pinggiran sungai dan pinggiran laut
			Penetapan Kawasan khusus (zona pengelolaan) yang menjadi embrio kawasan terpadu sesuai potensi daerah
4	Infrastruktur Pelayanan Publik Daerah		Pengelolaan Persampahan masih kurang

No.	Isu Strategis	Isu Strategis di Daerah	Permasalahan Pembangunan terkait Isu Strategis di Daerah
		Belum terbangun dan tersedianya beberapa fasilitas infrastruktur layanan public	Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan Pengembangan transportasi kabupaten Pengembangan Penerangan Jalan Umum Pemerataan infrastruktur pendidikan dan kesehatan Infrastruktur pariwisata, kesenian, dan potensi event lokal masih kurang
Tema Perwujudan pemerintah yang bersih, tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusifitas daerah			
1	Reformasi Birokrasi	Aparatur pemerintahan yang profesional dan berdaya saing Daya dukung sumberdaya aparatur yang belum merata Akuntabilitas kinerja pemerintah yang belum optimal	Penataan aparatur berdasar merit system peningkatan kualitas aparatur berdasar standar kompetensi yang dibutuhkan Kuantitas pegawai yang ada belum berbanding lurus dengan kualitas dan etos kerja yang dihasilkan Kurangnya keterpaduan dan kesinambungan proses pembangunan Keterbatasan ketersediaan baseline data untuk perencanaan, penganggaran, monitoring evaluasi dan pelaporan
2	Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum	Permasalahan hukum terkait tindak pidana korupsi aparatur pemerintahan	tertib aturan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah adanya tumpang tindih aturan yang membuka celah terjadinya kesalahan pemahaman pengawasan internal instansi pemerintah yang masih kurang
3	Kebijakan Pusat bagi Desa	Alokasi dana desa yang relatif besar	kesiapan pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan alokasi dana desa agar terarah dan terpadu dengan prioritas pembangunan daerah kesiapan aparat desa dalam pelaksanaannya agar kelak tidak terjadi penyalahgunaan
4	Pelayanan Publik	Belum optimalnya pelayanan publik	Pola penataan dan distribusi aparatur belum berjalan optimal Manajemen Organisasi/SKPD belum ditata dengan baik Dukungan sarana dan prasarana pelayanan publik yang belum merata
Tema Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat			
1	Masih belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan kebutuhan dasar (<i>basic needs</i>)	Bentuk kegiatan karitatif yang cenderung menimbulkan ketergantungan masyarakat	Peningkatan kualitas kebijakan yang bersifat pemberdayaan masyarakat pada pokmas-pokmas di tingkat desa Kompetensi (Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikap) angkatan kerja
2	Dinamika perkembangan perekonomian perdesaan yang masih blm optimal	Aksesibilitas Pasar Aksesibilitas Permodalan	Pasar Desa Infrastruktur pendukung perekonomian perdesaan Rendahnya kemitraan usaha di Kabupaten Kukar Rendahnya permodalan UMKM
3	Ancaman meningkatnya potensi ketergantungan masyarakat miskin	Rendahnya kualitas pelayanan dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pangan, Perumahan)	Kualitas pelayanan pendidikan dan aksesibilitasnya Kualitas pelayanan kesehatan dan aksesibilitasnya

No.	Isu Strategis	Isu Strategis di Daerah	Permasalahan Pembangunan terkait Isu Strategis di Daerah
		Pelayanan Sosial	Pelayanan di Dinas Sosial, yaitu: Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial.
		Kemitraan dalam pelayanan sosial	Rendahnya kemitraan dalam pelayanan sosial
4	Rendahnya peran perusahaan dan masyarakat dalam pelayanan sosial	Pilihan bentuk kegiatan CSR harus lebih bersifat Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan koordinasi dan sinergitas kebijakan CSR
Tema Peningkatan Ekonomi dan Pertanian Dalam Arti Luas (Ketahanan Pangan dan Kelautan Perikanan)			
1	Perubahan iklim global (<i>Global Climate Change</i>)	Bergesernya/terlambatnya masa tanam	Irigasi pertanian tidak berjalan optimal atau banyak luasan lahan produktif yang belum mempunyai irigasi
2	Menurunnya produksi pertanian tanaman pangan	Alih fungsi lahan pertanian produktif ke non pertanian tanaman pangan (tambang batu bara dan kelapa sawit)	Perencanaan pengembangan wilayah belum berjalan terpadu
			Aturan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di tingkat kabupaten belum ada
		Alih fungsi tenaga kerja pertanian ke non pertanian	Pengoptimalan sumber daya pertanian
		Kurangnya pembukaan lahan/usaha pertanian tanaman pangan yang baru	Aturan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di tingkat kabupaten belum ada
		Rendahnya efisiensi peralatan pasca panen hasil pertanian tanaman pangan	Standardisasi peralatan pasca panen (perontok gabah, penggilingan padi) belum dilakukan
			Pendampingan standardisasi peralatan pasca panen dan pengolahan belum ada
		Distribusi pupuk bersubsidi untuk tanaman pangan bermasalah	Informasi kebutuhan pupuk dan pengawalannya
3	Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan dan berbasis SDA terbarukan	Hilangnya komoditas pertanian unggulan (kakao, lada, pisang kepok)	Perlunya penetapan komoditas pertanian unggulan dan adanya satuan tugas yang mengawal perkembangannya
		Saat ini, kecuali kelapa sawit, produk pertanian (termasuk perikanan) unggulan lain belum berkembang	Perlunya penetapan komoditas pertanian unggulan baru dan mengawal pengembangannya
			Perlu dikembangkan pertanian secara holistik, hulu ke hilir (ketersediaan bahan baku, pasca panen, dan pengolahan)
			Tidak terdeteksinya produk pertanian potensial untuk ditetapkan sebagai produk unggulan karena distribusi pasar yang tidak jelas
			Belum terpenuhinya infrastruktur rantai pendingin untuk produk perikanan nelayan/petambak
		Belum optimalnya industri pasca panen tanaman pangan (<i>Rice Processing Unit</i> , RPU)	Optimalisasi RPU dengan memproduksi beras premium
			Menjalin kerjasama penyediaan bahan baku untuk beras premium, serta pemasarannya
		Problem dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya di sektor pertanian	Terkendala dengan tumpang tindih ketersediaan lahan dengan luasan minimal untuk skala industri
		Pelaku lokal (UMKM) untuk industri pengolahan hasil pertanian lambat berkembang	Infrastruktur daya dukung industri pengolahan masih kurang

No.	Isu Strategis	Isu Strategis di Daerah	Permasalahan Pembangunan terkait Isu Strategis di Daerah
4	Pencapaian ketahanan pangan melalui pemenuhan swasembada dan diversifikasi pangan	Pengembangan sumber karbohidrat selain beras belum digiatkan	Belum dikembangkannya kebijakan pengoptimalan lahan-lahan marjinal untuk produksi pangan, misalnya untuk pengembangan sagu, singkong, shorgum, dan jelai
			Produksi pangan masih berorientasi untuk pangan lokal (dalam negeri), belum berorientasi ekspor
			Belum tersosialisasinya bahwa sumber karbohidrat merupakan bahan baku untuk bioenergi (penunjang ketahanan pangan)
			Belum dkembangkannya pasca panen produk sumber karbohidrat non beras
			Belum terbentuknya pasar produk pasca panen sumber karbohidrat non beras
5	Adaptasi perubahan lingkungan global dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu	Perubahan dan dinamika lingkungan seperti angin dan gelombang laut yang kurang dapat diprediksi.	Penyediaan dan pengembangan sistem dan jaringan informasi perikanan, termasuk informasi cuaca serta penyediaan alat bantu penangkapan ikan, seperti GPS.
		Ekosistem perairan dan pesisir yang semakin rapuh karena ancaman perubahan lingkungan.	Penetapan kawasan konservasi untuk ekosistem pesisir, danau dan sungai
			Rehabilitasi ekosistem mangrove dan penghijauan sepadan pantai dan sungai
			Pengembangan silvofishery
		Peningkatan mitigasi bencana alam laut	Pengembangan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan laut
6	Produktivitas perikanan tangkap yang mulai stagnan	Struktur armada perikanan tangkap yang timpang didominasi oleh perikanan skala kecil/tradisional, menuju perikanan yang modern	Perubahan struktur armada perikanan tangkap dengan modernisasi perikanan
			Perluasan areal penangkapan ikan dari memanfaatkan potensi perikanan di pantai ke arah lepas pantai ,
		Belum adanya pelabuhan perikanan yang memadai untuk tempat berlabuhnya kapal-kapal perikanan berukuran besar	Pengembangan pangkalan pendaratn ikan atau pelabuhan perikanan yang memadai untuk tempat berlabuhnya kapal-kapal perikanan berukuran besar (>30 GT)
		Kelangkaan dan harga bahan bakar minyak bagi nelayan	Pengembangan SPBN
		Pemanfaatan teknologi dan alat bantu penangkapan ikan	Fasilitasi dan pengadaan alat bantu perikanan (GPS, Fish finder, dan data fishing ground berbasis citra satelit)
		Persaingan pemanfaatan sumberdaya ikan dengan nelayan dari daerah lain semakin meningkat.	Pengembangan kerjasama pemerintah daerah dan nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya ikan.
		Sumberdaya manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki untuk perikanan laut belum memadai untuk melaksanakan operasi penangkapan di perairan lepas pantai.	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki untuk perikanan laut belum memadai untuk melaksanakan operasi penangkapan di perairan lepas pantai.
7	Pengembangan perikanan berbasis kawasan masih terbatas	Kawasan unggulan pengembangan perikanan belum ditentukan	Penetapan kawasan pengembangan untuk perikanan, baik tawar, laut maupun payau.

No.	Isu Strategis	Isu Strategis di Daerah	Permasalahan Pembangunan terkait Isu Strategis di Daerah
8	Pengembangan industri pasca panen dan pengolahan hasil perikanan berdaya saing	Jumlah pelaku usaha budidaya masih terbatas jumlah dan kemampuannya dalam mengelola usaha	Penetapan dan pengembangan komoditas unggulan yang akan dikembangkan.
			Penguatan kelembagaan dan dukungan kebijakan pengembang SDM
			Pengembangan perikanan secara terpadu dalam sistem bisnis perikanan
			Pengembangan model usaha kelompok agar memiliki daya saing
		Sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya yang terbatas (saluran irigasi perikanan, pakan, dll).	Terkendala dengan tumpang tindih ketersediaan lahan dengan luasan minimal untuk skala industri
			Pengembangan sistem produksi untuk menjamin ketersediaan, kualitas, dan kontinuitas bahan baku
			Kepastian alokasi ruang untuk menghindari tumpang tindihnya penggunaan lahan
			Pengembangan Pasar dan pemasaran produk melalui promosi, sehingga tidak hanya mengandalkan pasar lokal dan pasar regional, tetapi juga antar pulau dan ekspor.
			Belum ada dukungan serius (kebijakan pemerintah) tentang pengembangan industri pengolahan pertanian di daerah
			Pendampingan dan fasilitasi permodalan, teknis dan manajerial usaha
			Pengembangan program inovasi produk
		Pelaku usaha didominasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan kemampuan pengelolaan usaha yang terbatas	

BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini akan menjelaskan tentang keadaan yang ingin dicapai oleh daerah dalam periode tahun 2016-2021 sesuai dengan isu strategis yang mengemuka serta janji yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2016-2021

5.1 VISI

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2016–2021 adalah:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN”

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:

- MAJU** : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan menuju pada semakin efektifnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang responsif, merata, berkualitas, dan berbasis kemajuan teknologi.
- MANDIRI** : Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kemampuan dalam mendayagunakan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki (ekonomi, sosial, budaya, sumberdaya alam dan energi) berbasis kearifan lokal dan menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.
- SEJAHTERA** : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat didukung pemenuhan hak pelayanan dasar masyarakat yang meliputi tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang tinggi, pemenuhan derajat kesehatan masyarakat, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran rendah. Selain itu sejahtera juga diarahkan untuk kondisi masyarakat yang bermartabat, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, serta memiliki kehidupan dalam suasana yang aman dan damai.
- BERKEADILAN** : Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang adil dan merata, tanpa diskriminasi baik antar individu maupun golongan yang berdasarkan keadilan gender serta perlindungan anak.

5.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016- 2021, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. *Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;*
2. *Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;*
3. *Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah;*
4. *Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah;*
5. *Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah;*
6. *Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;*
7. *Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.*

Keterkaitan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1. Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

VISI	POKOK-POKOK VISI	MISI
Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan	Maju	Misi 1: Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat
	Mandiri	Misi 3: Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah
		Misi 4: Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah
		Misi 5: Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah
		Misi 6: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
	Sejahtera	Misi 2: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten
	Berkeadilan	Misi 7: Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra SKPD untuk periode 5 tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Pelaksanaan Visi dan Misi pembangunan diarahkan untuk mencapai sasaran makro sebagai *impact* makro jangka menengah daerah, meliputi:

1. *Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi setiap tahun*
2. *Menurunnya Laju Inflasi setiap tahun*
3. *Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*
4. *Menurunnya Gini Rasio*
5. *Menurunnya Persentase tingkat Kemiskinan*
6. *Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka*
7. *Menurunnya Indeks Kesenjangan Wilayah/Indeks Williamson*

Selanjutnya Visi dan misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran, sebagai berikut:

5.3.1. Tujuan dan Sasaran Pada Misi Pertama

Tujuan: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah: Meningkatkan

- a. Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah; dengan indikator:
 - Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - Indeks Kepuasan Masyarakat
 - Indeks Partisipasi Masyarakat
- b. Optimalnya akuntabilitas dan pengawasan daerah, dengan indikator:
 - Opini BPK
 - Indeks Persepsi Korupsi
 - Predikat Akuntabilitas Kinerja
- c. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat, dengan indikator:
 - Cakupan e-KTP
- d. Optimalnya pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana, dengan indikator:
 - Persentase Peserta KB Aktif
- e. Optimalnya kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dengan indikator:
 - Rasio Penduduk Terkena Tindak Pidana (Crime Rate) per 100.000 penduduk
 - Indeks Risiko Bencana

5.3.2. Tujuan dan Sasaran Pada Misi Kedua

Tujuan 1: Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, sehat, berpendidikan, terampil, berakhlak dan berperilaku mulia

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah:

- a. Meningkatkan Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan; dengan indikator:
 - Angka Harapan Lama Sekolah
 - Rata-Rata Lama Sekolah
- b. Meningkatkan budaya baca masyarakat, dengan indikator:
- c. Pertumbuhan Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan
- d. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dengan indikator:
 - Angka Harapan Hidup

- Angka Kematian Ibu Melahirkan
- Angka Kematian Bayi
- e. Meningkatnya daya saing tenaga kerja serta kesempatan dan perluasan kesempatan kerja, dengan indikator:
 - Rasio Kesempatan Kerja
- f. Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga, dengan indikator:
 - Persentase Pemuda yang menjadi Wirausaha Mandiri.
 - Indeks Pembangunan Olahraga (*Sport Development Index*)
- g. Meningkatnya kapasitas masyarakat menuju desa berketahanan sosial; dengan indikator:
 - Indeks Kemandirian Desa
 - Jumlah Desa Berketahanan Sosial
 - Persentase Pusat Kesejahteraan Sosial yang Berfungsi Optimal
- h. Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial, dengan indikator:
 - Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- i. Meningkatnya keterpaduan pengentasan kemiskinan antar sektor antar wilayah, dengan indikator:
 - Tingkat Kemiskinan (Tingkat Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan)
 - Cakupan Rumah Layak Huni

5.3.3. Tujuan dan Sasaran Pada Misi Ketiga

Tujuan: Meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan kerjasama pembangunan daerah

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah:

- a. Meningkatnya daya saing investasi daerah; dengan indikator:
 - Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi
- b. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, dengan indikator:
 - Pertumbuhan PAD
- c. Meningkatnya Kerjasama Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pembangunan Daerah, dengan indikator:
 - Cakupan Fasilitas CSR

5.3.4. Tujuan dan Sasaran Pada Misi Keempat

Tujuan 1: Mewujudkan percepatan kedaulatan pangan dan revolusi pembangunan pertanian dalam arti luas sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi daerah

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah:

- a. Meningkatnya produktivitas, tata kelola, dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas; dengan indikator:
 - Pertumbuhan Sektor Pertanian

Tujuan 2: Mewujudkan Kutai Kartanegara sebagai *branding* pariwisata unggulan di Kalimantan Timur

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah:

- a. Meningkatnya potensi dan daya dukung pariwisata daerah serta kunjungan wisata di Kutai Kartanegara; dengan indikator:
 - Pertumbuhan Sektor Pariwisata
- b. Meningkatnya pengembangan seni dan budaya lokal dalam rangka mendukung destinasi

wisata dan kelestarian tradisi kehidupan masyarakat; dengan indikator:

- Pertumbuhan Grup Seni dan Budaya

Tujuan 3: Mewujudkan ekonomi perdesaan berbasis kelompok dan kewirausahaan yang didukung industri dan perdagangan potensial daerah berbasis keterkaitan dan keterpaduan potensi antar wilayah (*Integrated Territorial Development*)

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah:

- Meningkatnya ekonomi kerakyatan berbasis industri kreatif dan potensi daerah; dengan indikator:
 - Persentase Koperasi Aktif
 - Pertumbuhan Tingkat Kelas UMKM
- Meningkatnya akses, tata niaga, dan infrastruktur perdagangan antar wilayah dan antar daerah, dengan indikator:
 - Pertumbuhan Ekspor Bersih Non Migas dan Batu Bara
- Meningkatnya pengembangan industri pengolahan pangan, peternakan, perikanan, pengolahan pakan, dan potensi daerah yang berdaya saing; dengan indikator:
 - Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan.

5.3.5. Tujuan dan Sasaran Pada Misi Kelima

Tujuan: Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah:

- Meningkatnya interkoneksi antar wilayah; dengan indikator:
 - Persentase Jalan dengan Kondisi Baik
- Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan; dengan indikator:
 - Cakupan aksesibilitas antar wilayah
- Terwujudnya koneksi jaringan komunikasi, internet, dan pengembangan kawasan smart city; dengan indikator:
 - Cakupan Koneksi Internet Kecamatan/Desa/Kelurahan
 - Jumlah Kawasan Berbasis IT
- Meningkatnya layanan kebutuhan dasar perumahan dan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan; dengan indikator:
 - Cakupan Lingkungan Permukiman Kumuh
 - Persentase cakupan layanan air minum Rumah Tangga

5.3.6. Tujuan dan Sasaran Pada Misi Keenam

Tujuan: Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah:

- Meningkatnya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta pengendalian pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan; dengan indikator:
 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- Meningkatnya ketersediaan sumber energi baru dan terbarukan, dengan indikator:
 - Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan.

5.3.7. Tujuan dan Sasaran Pada Misi Ketujuh

Tujuan: Meningkatnya peran serta perempuan segala bidang pembangunan dan perlindungan anak

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah:

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, kualitas kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan dan anak; dengan indikator:

- *IPG (Indeks Pembangunan Gender)*
- *IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)*
- *Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)*
- *Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.*

Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara 2016- 2021 disajikan pada tabel berikut ini;

Tabel 5.2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, beserta Indikator dan Target Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

SASARAN MAKRO	TARGET					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Laju Pertumbuhan Ekonomi *)	2,77	3,34	4,28	4,62	5,15	4,27
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas *)	4,33	5,13	5,08	4,70	5,40	5,65
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas & Batubara *)	5,17	5,76	6,03	6,15	6,48	7,04
Laju Inflasi*)	7,63	7,22	7,06	6,99	6,96	6,94
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) :	72,93	73,78	74,64	75,36	76,31	77,21
1. Angka Harapan Hidup (AHH)	71,62	71,64	71,68	71,72	71,76	71,79
2. Angka Harapan Lama Sekolah (EYS)	13,84	14,27	14,62	14,89	15,30	15,74
3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (MYS)	8,89	8,97	9,10	9,27	9,43	9,56
4. Nilai Pengeluaran Perkapita	10,485.89	10,768.92	11,062.57	11,260.40	11,545.70	11,805.07
Gini Rasio	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27
Persentase tingkat Kemiskinan	7,19	7,01	6,22	5,92	4,83	4,23
Tingkat Pengangguran Terbuka	9,23	9,02	8,93	8,89	8,87	8,86
Indeks Kesenjangan Wilayah/Indeks Williamson (Non Migas)	0,6	0,53	0,51	0,50	0,48	0,45

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam	Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sangat Tinggi (3,22)	Sangat Tinggi (3,27)	Sangat Tinggi (3,33)	Sangat Tinggi (3,38)	Sangat Tinggi (3,43)	Sangat Tinggi (3,48)
			Indeks Kepuasan Masyarakat	70 (Baik)	75 (Baik)	80 (Sangat Baik)	83 (Sangat Baik)	85 (Sangat Baik)	87 (Sangat Baik)
			Indeks Partisipasi	70 (Baik)	75 (Baik)	80 (Sangat Baik)	83 (Sangat Baik)	85 (Sangat Baik)	87 (Sangat Baik)

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
		rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah	Masyarakat			Baik)			
		Optimalnya akuntabilitas dan pengawasan daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indek Persepsi Korupsi	5,7	5,8	6,0	6,3	6,6	6,9
			Predikat Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB	A	A	AA
		Meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat	Cakupan e-KTP	80%	90%	93%	96%	98%	100%
		Optimalnya pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana	Peserta KB Aktif	73,88%	73,89%	73,90%	73,91%	73,92%	73,93%
		Optimalnya kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Rasio Penduduk Terkena Tindak Pidana (Crime Rate) per 100.000 penduduk	153	151	149	148	146	145
			Indeks Risiko Bencana	151	132	123	114	108	102
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten	Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, sehat, berpendidikan terampil, berakhlak dan berperilaku mulia	Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,84	14,27	14,62	14,89	15,30	15,74
			Rata-Rata Lama Sekolah	8,89	8,97	9,10	9,27	9,43	9,56
		Meningkatnya budaya baca masyarakat	Pertumbuhan Kunjungan masyarakat ke perpustakaan	3,44%	3,64%	3,89%	3,93%	4,16%	4,35%
		Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	71,62	71,64	71,68	71,72	71,76	71,79
			Angka Kematian Ibu Melahirkan	28	27	26	25	24	23
			Angka Kematian Bayi	201	190	179	168	157	146
		Meningkatnya daya saing tenaga kerja serta kesempatan dan perluasan kesempatan kerja	Rasio Kesempatan Kerja	0,9	0,93	0,95	0,98	0,98	0,99
		Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga	Persentase Pemuda yang menjadi Wirausaha Mandiri.	-	3%	4%	4%	5%	5,5%

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Meningkatnya kapasitas masyarakat menuju desa berketahanan sosial	Indeks Pembangunan Olah Raga (<i>Sport Development Index</i>)	34%	50%	55%	60%	70%	75%
			Jumlah Desa Berketahanan Sosial	2 Desa/kel	50 Desa/kel	100 Desa/kel	150 Desa/kel	200 Desa/kel	237 Desa/kel
			Persentase Pusat Kesejahteraan Sosial yang berfungsi optimal	-	21%	41%	60%	80%	100%
			Indeks Kemandirian Desa	0.54	0.59	0.65	0.72	0.79	0.87
		Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	10%	25%	40%	55%	70%	85%
		Meningkatnya keterpaduan pengentasan kemiskinan antar sektor antar wilayah	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,48	0,45	0,42	0,41	0,38	0,35
			Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	0,07	0,05	0,04	0,03	0,03	0,01
			Cakupan Rumah Layak Huni	90.17	90.82	91.47	92.12	92.78	93.53
	Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	4,29%	4,96%	5,05%	5,6%	6,43%	6,46%
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan PAD (tahun dasar 2015)	5.49%	6.65%	7.81%	8.97%	10.13%	11.29%
		Meningkatnya Kerjasama Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pembangunan daerah	Cakupan Fasilitas CSR (Perusahaan Wajib CSR Bermitra Dengan Pemkab)	1%	3%	7%	10%	13%	17%
Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah	Mewujudkan percepatan kedaulatan pangan dan revolusi pembangunan pertanian dalam arti luas sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya produktivitas, tata kelola, dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan sektor pertanian	6,36%	7,63%	8,72%	9,24%	10,12%	11,12%
	Mewujudkan Kutai Kartanegara sebagai branding pariwisata unggulan di Kalimantan Timur	Meningkatnya potensi dan daya dukung pariwisata daerah serta kunjungan wisata di Kutai	Pertumbuhan sektor pariwisata	6,06%	6,34%	7,61%	7,89%	8,16%	9,44%

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Kartanegara							
		Meningkatnya pengembangan seni dan budaya lokal dalam rangka mendukung destinasi wisata dan kelestarian tradisi kehidupan masyarakat	Pertumbuhan Grup Seni dan Budaya	0%	8%	6%	3%	2%	5%
	Mewujudkan ekonomi perdesaan berbasis kelompok dan kewirausahaan yang didukung industri dan perdagangan potensial daerah berbasis keterkaitan dan keterpaduan potensi antar wilayah (<i>Integrated Territorial Development</i>)	Meningkatnya ekonomi kerakyatan berbasis industri kreatif dan potensi daerah	Persentase koperasi aktif	80.93%	81.03%	81.13%	81.23%	81.33%	81.43%
			Pertumbuhan Tingkat Kelas UMKM	2.35%	2.58%	2.84%	3.13%	3.44%	3.78%
		Meningkatnya akses, tata niaga, dan infrastruktur perdagangan antar wilayah dan antar daerah	Pertumbuhan Ekspor Bersih Non Migas dan Batu Bara	4%	12%	12%	9%	9%	7%
	Meningkatnya pengembangan industri pengolahan pangan, peternakan, perikanan, pengolahan pakan, dan potensi daerah yang berdaya saing	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	5,39%	5,94%	6,48%	7,03%	7,58%	8,13%	
Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah	Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah	Meningkatnya interkoneksi antar wilayah	Persentase jalan dengan kondisi baik	67,1%	73,6%	80,2%	86,8%	93,4%	100%
		Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	75%	75%	75%	75%	87.5%	87.5%
		Terwujudnya koneksi jaringan komunikasi, internet, dan pengembangan kawasan smart city.	Cakupan koneksi internet Kecamatan/Desa/Kel	31%	50%	65%	80%	90%	100%
			Jumlah Kawasan Berbasis Teknologi Informasi	-	-	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	2 Kawasan
		Meningkatnya layanan kebutuhan dasar perumahan dan kawasan	Cakupan Lingkungan Permukiman Kumuh	n.a	64.75%	32.37%	0%	0%	0%
			Persentase	70.60%	80.40%	90.20%	100.00%	100.00%	100.00%

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
		permukiman perkotaan dan perdesaan	cakupan layanan air minum Rumah Tangga						
Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Meningkatnya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta pengendalian pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70.50	71.00	71.50	72.00	72.50	73.00
		Meningkatnya ketersediaan sumber energi baru dan terbarukan	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan.	2.40%	2.78%	3.33%	3.89%	4.44%	5.00%
Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak	Meningkatnya peran serta perempuan segala bidang pembangunan dan perlindungan anak	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, kualitas kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan dan anak	IPG	80.00%	82.00%	84.00%	86.00%	88.00%	90.00%
			IDG	53.11%	53.99%	54.21%	56.29%	57.33%	59.17%
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.	180	175 (-3%)	160 (-19%)	130 (-15%)	110 (-18%)	90 (-3%)

**) diukur menggunakan tahun dasar tahun 2010.*

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mengemukakan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan daerah kabupaten Kutai Kartanegara Periode Tahun 2016-2021 sesuai dengan isu-isu strategis yang mengemuka

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang terencana dan terukur yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun mulai 2016 sampai dengan 2021. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di RKPD. Penetapan arah kebijakan pembangunan mengindikasikan bahwa pembangunan di tahun berkenaan diprioritaskan pada isu atau aspek tertentu untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan.

Strategi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2016–2021 diarahkan pada 7 (tujuh) Misi dari Visi GERBANG RAJA (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera), yang menjadi pedoman dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan Visi Gerbang Raja, agenda prioritas pembangunan menitikberatkan pada: 1) Reformasi Birokrasi; 2) Daya Saing Sumberdaya Manusia; 3) Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah; 4) Transformasi Struktur Ekonomi Daerah; 5) Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik; 6) Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan; dan 7) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

6.1. REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi, difokuskan dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah.

6.1.1. Sasaran Meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1) Revitalisasi Pelaksanaan Fungsi Manajemen Pemerintahan

Reformasi birokrasi diarahkan untuk mengatasi kondisi sebagai berikut: *Pertama*, kendala dalam bidang kelembagaan, meliputi: 1) Sistem kelembagaan yang belum optimal; 2) Penataan organisasi dan kewenangan belum tepat fungsi dan kewenangan sehingga terjadi overlapping; dan 3) SKPD memiliki keterbatasan dalam menyediakan data sesuai dengan kebutuhan penjabaran akan tupoksinya. *Kedua*, bidang tata laksana, yaitu: belum adanya keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, sampai dengan pelaporan yang didasarkan pada pemahaman yang sama terkait banyaknya regulasi yang ada (SOP belum optimal). *Ketiga*, bidang SDM aparatur terdiri atas: 1) jumlah pegawai yang banyak; 2) Ketidakesesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang diduduki; 3) sistem kompensasi yang kurang mendukung pencapaian kinerja; 4) pola pikir dan budaya kerja yang belum mendukung birokrasi yang efektif, efisien, produktif dan profesional; 5) Manajemen data di internal SKPD yang belum optimal; dan 6) Pemanfaatan hasil diklat yang belum optimal.

Berbagai permasalahan birokrasi yang dihadapi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

tersebut, mengindikasikan perlunya *grand strategy* dalam penataan birokrasi secara sistemik, agar lebih efisien dan profesional. Pemerintah daerah dalam hal ini perlu melakukan “revitalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan” melalui pembangunan profesionalisme birokrasi.

Arah Kebijakan:

- a) *Mapping distribusi pegawai;*
- b) *Penerapan Analisis Jabatan dan Penghitungan kebutuhan ideal pegawai*
- c) *Penerapan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Penyusunan Kelas Jabatan (Evaluasi Jabatan), dan Penyusunan Pola Karier Pegawai*
- d) *Penerapan Standar Kompetensi Jabatan Administrator, Penerapan SOP, dan Updating SOTK*
- e) *Peningkatan kinerja SDM jabatan fungsional, dan Analisis kebutuhan diklat berdasarkan Grand Design pengembangan aparatur.*
- f) *Pemantapan tunjangan kinerja, implementasi standar pelayanan minimal; dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh pegawai*
- g) *Penguatan koordinasi kebijakan antar SKPD*
- h) *Penguatan kewenangan kecamatan dalam pelayanan dan peran pembangunan kewilayahan*
- i) *Penguatan kapasitas eksekutif dan legislatif*
- j) *Penguatan penelitian dan pengembangan bagi proses pembangunan terpadu antar sektor antar wilayah*
- k) *Pemanfaatan data dan informasi, serta analisis statistik daerah dalam memperkuat perencanaan, prioritas penganggaran, dan evaluasi pembangunan*
- l) *Pengembangan sistem perencanaan terpadu berbasis IT*
- m) *Peningkatan kapasitas SDM perencana di tiap perangkat daerah*
- n) *Peningkatan partisipasi dan peran masyarakat dalam pembangunan daerah*
- o) *Penerapan standarisasi keamanan informasi daerah yang bersifat rahasia negara*
- p) *Penerapan pengelolaan arsip secara baik di seluruh perangkat daerah*
- q) *Pengembangan pemerataan penduduk di semua wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara*
- r) *Penerapan tertib administrasi pertanahan*
- s) *Pengembangan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat RT*
- t) *Penguatan peran kelompok masyarakat di tingkat desa dalam menyukseskan pengendalian penduduk dan program KB*
- u) *Pengembangan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan daerah*
- v) *Pembangunan baseline data dari tingkat kecamatan sampai kabupaten untuk perencanaan, penganggaran, monitoring evaluasi dan pelaporan, dan LKJiP.*
- w) *Pengukuran IKM di semua SKPD Pelayanan*

2) Fasilitasi dan Pendampingan Pelaksanaan Dana Desa, dengan arah kebijakan:

- a) *Peningkatan kompetensi aparat pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa serta penyusunan dokumen pengelolaan dana desa sejak perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban*
- b) *Pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban melalui buku panduan pengelolaan dana desa serta peningkatan keterampilan aparat desa dalam penyusunan dokumen perencanaan desa, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, serta memberikan pemahaman dan keterampilan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa agar pelaksanaan alokasi dana desa terarah dan terpadu dengan prioritas pembangunan daerah.*

Secara detail mengenai Arah Kebijakan pembangunan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1 *Arah Kebijakan: Meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah*

ARAH KEBIJAKAN				
TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
Mapping distribusi pegawai; Penerapan Anjab; dan Penghitungan kebutuhan ideal pegawai.	Penerapan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; Penyusunan Kelas Jabatan (Evakuasi Jabatan); dan Penyusunan Pola Karier Pegawai	Penerapan Standar Kompetensi Jabatan Administrator; Penyusunan SOP; dan Updating SOTK	Peningkatan kinerja SDM jabatan fungsional dan Analisis kebutuhan diklat berdasarkan grand design Pengembangan aparatur;	Pemantapan tunjangan kinerja; implemantasi standar pelayanan minimal; dan Strategi meningkatkan indeks kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh pegawai.
Penguatan koordinasi kebijakan antar SKPD				
Penguatan kewenangan kecamatan dalam pelayanan dan peran pembangunan kewilayahan				
Penguatan kapasitas eksekutif dan legislatif				
Penguatan penelitian dan pengembangan bagi proses pembangunan terpadu antar sektor antar wilayah				
Pemanfaatan data dan informasi, serta analisis statistik daerah dalam memperkuat perencanaan, prioritas penganggaran, dan evaluasi pembangunan				
Pengembangan sistem perencanaan terpadu berbasis IT				
Peningkatan kapasitas SDM perencana di tiap perangkat daerah				
Peningkatan partisipasi dan peran masyarakat dalam pembangunan daerah				
Penerapan standarisasi keamanan informasi daerah yang bersifat rahasia negara				
Penerapan pengelolaan arsip secara baik di seluruh perangkat daerah				
Pengembangan pemerataan penduduk di semua wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara				
Penerapan tertib administrasi pertanahan				
Pengembangan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat RT				
Penguatan peran kelompok masyarakat di tingkat desa dalam menyukseskan pengendalian penduduk dan program KB				
Pengembangan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan daerah				
Pembangunan baseline data dari tingkat kecamatan sampai kabupaten untuk perencanaan, penganggaran, monitoring evaluasi dan pelaporan, dan LKJiP dengan predikat CC dan B		LKJiP dengan predikat B/A	LKJiP dengan predikat A	LKJiP dengan predikat AA
Pengukuran IKM di Semua SKPD Pelayanan	Pengukuran IKM di Semua SKPD Pelayanan	Pengukuran IKM di Semua SKPD Pelayanan	Pengukuran IKM di Semua SKPD Pelayanan	Pengukuran IKM di Semua SKPD Pelayanan
Peningkatan kompetensi aparat pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa serta penyusunan dokumen pengelolaan dana desa sejak perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban	Pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban melalui buku panduan pengelolaan dana desa serta peningkatan keterampilan aparat desa dalam penyusunan dokumen perencanaan desa, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, serta memberikan pemahaman dan keterampilan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa agar pelaksanaan alokasi dana desa terarah dan terpadu dengan prioritas pembangunan daerah.			

6.1.2. Sasaran Optimalnya Akuntabilitas dan Pengawasan Daerah

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum, dengan arah kebijakan:

- Peningkatan kualitas SDM aparatur agar tertib aturan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah serta penambahan tenaga personil pengawas internal pemerintah daerah*
- Peningkatan dan penerapan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah, dan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan*

- c) Penerapan SAP berbasis Akrua di seluruh perangkat daerah secara online
- d) Penguatan SDM pengelola keuangan daerah
- e) Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah melalui pendampingan terarah di setiap perangkat daerah

Secara detail mengenai Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.2 Arah Kebijakan: Optimalnya Akuntabilitas dan Pengawasan Daerah

ARAH KEBIJAKAN				
TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
Peningkatan kualitas SDM aparatur agar tertib aturan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah serta penambahan tenaga personil pengawas internal pemerintah daerah	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah, dan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan			
Penerapan SAP berbasis Akrua di seluruh perangkat daerah secara online				
Penguatan SDM pengelola keuangan daerah				
Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah melalui pendampingan terarah di setiap perangkat daerah				

6.1.3. Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah Penguatan Pelayanan Kependudukan di Tingkat Kewilayahan, dengan arah kebijakan:

- a) Pelayanan “jemput bola” e-KTP secara periodik untuk wilayah terpencil
- b) Sosialisasi dan pendataan berkala
- c) Pemberdayaan pemerintah desa terkait tertib administrasi kependudukan masyarakat

6.1.4. Sasaran Optimalnya Pengendalian Penduduk dan Pelayanan Keluarga Berencana

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah Peningkatan KB Keluarga, dengan arah kebijakan:

- a) Pengembangan KB Keluarga melalui jejaring asektor KB sampai dengan desa
- b) Pendataan Pasangan Usia Subur (PUS)
- c) Membangun pemahaman masyarakat akan arti penting program KB bagi kesejahteraan keluarga

6.1.5. Sasaran Optimalnya Kerjasama Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha Untuk Menjaga Keamanan, Ketertiban, dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah Peningkatan Sinergitas Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha, dengan arah kebijakan:

- a) Peningkatan koordinasi antar stakeholder sampai dengan tingkat desa
- b) Pengadaan sarana prasana komunikasi terpadu
- c) Penguatan kapasitas keamanan lingkungan berbasis masyarakat
- d) Penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana di tiap kecamatan

6.2. DAYA SAING SUMBERDAYA MANUSIA

Daya Saing Sumberdaya Manusia, difokuskan dalam rangka mencapai tujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, sehat, berpendidikan, terampil, berakhlak dan berperilaku mulia; serta menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

6.2.1. Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, dengan arah kebijakan:
 - a) Pembangunan Sekolah baru
 - b) Pemenuhan target rehabilitasi sekolah, pengadaan mebeluair, penataan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
- 2) Peningkatan Kualitas dan Manajemen Sekolah, dengan arah kebijakan:
 - a) Pemantapan kurikulum sesuai dengan tingkat satuan pendidikan, penguatan Tim pengembang kurikulum, penguatan KKG, MGMP berbasis teknologi informasi
 - b) Peningkatan kualitas guru kepala sekolah, pengawas sekolah, PTK PAUDNI
 - c) Pemantapan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal lintas SKPD
 - d) Penguatan manajemen berbasis sekolah (MBS) menggunakan Balanced Scorecard

Secara detail mengenai Arah Kebijakan pembangunan sektor pendidikan berdasarkan kewilayahan seperti pada tabel berikut:

Tabel 6.3 Arah Kebijakan Kewilayahan: Meningkatkan Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan

TAHUN 1	KECAMATAN	TAHUN 2	KECAMATAN	TAHUN 3	KECAMATAN	TAHUN 4	KECAMATAN	TAHUN 5	KECAMATAN
Pendirian sekolah baru	SMKN 1 Muara Jawa	Pendirian sekolah baru	SMKN 1 Muara Kaman	Pendirian sekolah baru	SMKN 1 Kembang janggut	Pendirian sekolah baru	SMAN 4 Tenggarong	Pendirian sekolah baru	SMKN Sebulu
Melakukan pemenuhan target rehabilitasi sekolah, pengadaan mebeluair, penataan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Semua Tingkat Satuan Pendidikan sesuai kewenangan Kabupaten	Melakukan pemenuhan target rehabilitasi sekolah, pengadaan mebeluair, penataan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Semua Tingkat Satuan Pendidikan sesuai kewenangan Kabupaten	Melakukan pemenuhan target rehabilitasi sekolah, pengadaan mebeluair, penataan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Semua Tingkat Satuan Pendidikan sesuai kewenangan Kabupaten	Melakukan pemenuhan target rehabilitasi sekolah, pengadaan mebeluair, penataan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Semua Tingkat Satuan Pendidikan sesuai kewenangan Kabupaten	Melakukan pemenuhan target rehabilitasi sekolah, pengadaan mebeluair, penataan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Semua Tingkat Satuan Pendidikan sesuai kewenangan Kabupaten
Pemantapan kurikulum sesuai dengan tingkat satuan pendidikan, penguatan Tim pengembang kurikulum, penguatan KKG, MGMP berbasis teknologi informasi	Semua Tingkat Satuan Pendidikan sesuai kewenangan Kabupaten	Pemantapan kurikulum sesuai dengan tingkat satuan pendidikan, penguatan Tim pengembang kurikulum, penguatan KKG, MGMP berbasis teknologi informasi	Semua Tingkat Satuan Pendidikan sesuai kewenangan Kabupaten	Pemantapan kurikulum sesuai dengan tingkat satuan pendidikan, penguatan Tim pengembang kurikulum, penguatan KKG dan MGMP berbasis teknologi informasi	Semua Tingkat Satuan Pendidikan sesuai kewenangan Kabupaten	Pemantapan kurikulum sesuai dengan tingkat satuan pendidikan, penguatan Tim pengembang kurikulum, penguatan KKG dan MGMP berbasis teknologi informasi	Semua Tingkat Satuan Pendidikan sesuai kewenangan Kabupaten	Pemantapan kurikulum sesuai dengan tingkat satuan pendidikan, penguatan Tim pengembang kurikulum, penguatan KKG dan MGMP berbasis teknologi informasi	Semua Tingkat Satuan Pendidikan sesuai kewenangan Kabupaten
Peningkatan kualitas guru kepala sekolah, pengawas sekolah, PTK PAUDNI	Semua Tingkat Satuan Pendidikan sesuai kewenangan Kabupaten	Peningkatan kualitas guru kepala sekolah, pengawas sekolah dan PTK PAUDNI	Semua Tingkat Satuan Pendidikan sesuai kewenangan Kabupaten	Peningkatan kualitas guru kepala sekolah, pengawas sekolah dan PTK PUDNI	Semua Tingkat Satuan Pendidikan sesuai kewenangan Kabupaten	Peningkatan kualitas guru kepala sekolah, pengawas sekolah dan PTK PAUDNI	Semua Tingkat Satuan Pendidikan sesuai kewenangan Kabupaten	Peningkatan kualitas guru kepala sekolah, pengawas sekolah dan PTK PAUDNI	Semua Tingkat Satuan Pendidikan sesuai kewenangan Kabupaten
Pemantapan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal lintas SKPD	Seluruh Kec.	Pemantapan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal lintas SKPD	Seluruh Kec.	Pemantapan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal lintas SKPD	Semua Tingkat Satuan Pendidikan sesuai kewenangan Kabupaten	Pemantapan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal lintas SKPD	Seluruh Kec.	Pemantapan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal lintas SKPD	Seluruh Kec.
Penguatan manajemen berbasis sekolah (MBS) menggunakan Balanced score-card	Semua Tingkat Satuan Pendidikan sesuai kewenangan Kabupaten	Penguatan manajemen berbasis sekolah (MBS) menggunakan BSC menggunakan baland score-card	Semua Tingkat Satuan Pendidikan sesuai kewenangan Kabupaten	Penguatan manajemen berbasis sekolah (MBS) menggunakan Balanced score-card	Semua Tingkat Satuan Pendidikan sesuai kewenangan Kabupaten	Penguatan manajemen berbasis sekolah (MBS) menggunakan Balanced score-card	Semua Tingkat Satuan Pendidikan sesuai kewenangan Kabupaten	Penguatan manajemen berbasis sekolah (MBS) menggunakan Balanced score card	Semua Tingkat Satuan Pendidikan sesuai kewenangan Kabupaten

6.2.2. Sasaran Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah Inovasi Pelayanan Perpustakaan, dengan arah kebijakan:

- a) Pengembangan Rumah Baca tiap Desa/Kelurahan sesuai dengan potensi wilayah.
- b) Pembangunan Taman Bacaan (Taman Pintar)
- c) Optimalisasi pelayanan Perpustakaan Keliling
- d) Pengembangan Perpustakaan Digital

Tabel 6.4 Arah Kebijakan Kewilayahan: Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat

TAHUN 1	KECAMATAN	TAHUN 2	KECAMATAN	TAHUN 3	KECAMATAN	TAHUN 4	KECAMATAN	TAHUN 5	KECAMATAN
Pengembangan Rumah Baca tiap Desa/Kelurahan sesuai dengan potensi wilayah.	Seluruh Kecamatan	Pengembangan Rumah Baca tiap Desa/Kelurahan sesuai dengan potensi wilayah.	Seluruh Kecamatan	Pengembangan Rumah Baca tiap Desa/Kelurahan sesuai dengan potensi wilayah.	Seluruh Kecamatan	Pengembangan Rumah Baca tiap Desa/Kelurahan sesuai dengan potensi wilayah.	Seluruh Kecamatan	Pengembangan Rumah Baca tiap Desa/Kelurahan sesuai dengan potensi wilayah.	Seluruh Kecamatan
Pembangunan Taman Bacaan (Taman Pintar)	Seluruh Kecamatan	Pembangunan Taman Bacaan (Taman Pintar)	Seluruh Kecamatan	Pembangunan Taman Bacaan (Taman Pintar)	Seluruh Kecamatan	Pembangunan Taman Bacaan (Taman Pintar)	Seluruh Kecamatan	Pembangunan Taman Bacaan (Taman Pintar)	Seluruh Kecamatan
Optimalisasi pelayanan Perpustakaan Keliling	Seluruh Kecamatan	Optimalisasi pelayanan Perpustakaan Keliling	Seluruh Kecamatan	Optimalisasi pelayanan Perpustakaan Keliling	Seluruh Kecamatan	Optimalisasi pelayanan Perpustakaan Keliling	Seluruh Kecamatan	Optimalisasi pelayanan Perpustakaan Keliling	Seluruh Kecamatan
Pengembangan Perpustakaan Digital	Seluruh Kecamatan	Pengembangan Perpustakaan Digital	Seluruh Kecamatan	Pengembangan Perpustakaan Digital	Seluruh Kecamatan	Pengembangan Perpustakaan Digital	Seluruh Kecamatan	Pengembangan Perpustakaan Digital	Seluruh Kecamatan

6.2.3. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Perluasan cakupan promosi dan pelibatan masyarakat dalam perluasan layanan kesehatan dan pencegahan penyakit; dengan arah kebijakan:
 - a) Optimalisasi peran desa siaga untuk melakukan percepatan layanan kesehatan terutama untuk mengupayakan tercapainya wilayah-wilayah yang selama ini kurang terjangkau layanan kesehatan yang diberikan baik oleh Puskesmas maupun Pustu.
 - b) Penerapan program promosi kesehatan melalui keterlibatan masyarakat guna meningkatkan upaya preventif agar menjadikan hidup lebih sehat dan bersih.
- 2) Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dengan memperhatikan keterjangkauan kawasan permukiman dan perkembangan kesehatan masyarakat; dengan arah kebijakan:
 - a) Pengembangan sistem transportasi desa untuk memudahkan akses menuju pusat layanan kesehatan
 - b) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan pada rumah sakit, puskesmas, pustu, dan posyandu. Peralatan standar minimum harus disediakan sampai di tingkat puskesmas guna melayani ibu, bayi dan balita.
 - c) Peningkatan ketersediaan obat-obatan agar dapat mengantisipasi kebutuhan kuratif maupun preventif masyarakat.
 - d) Peningkatan ketersediaan peralatan kesehatan pada RSUD kecamatan Kota Bangun yang masih minim fasilitasnya.
- 3) Peningkatan kualitas dan kompetensi nakes guna memenuhi kebutuhan lapangan; dengan arah kebijakan:
 - a) Peningkatan kebutuhan nakes dan pendistribusian secara proporsional sesuai dengan kebutuhan wilayah dan distribusi permukiman..
 - b) Peningkatan kompetensi dukun sebagai mitra bidan, terutama bagi dukungan dalam proses

persalinan serta paska melahirkan. Peningkatan kompetensi ini disinergikan dengan program kemitraan bidan dan dukun guna mengurangi resiko kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir.

- 4) Optimalisasi penerapan SPM kesehatan dengan arah kebijakan:
 - a) *Meningkatkan akses ibu hamil kepada layanan puskesmas.*
 - b) *Pengembangan basis data dan informasi ibu hamil berbasis desa.*
 - c) *Peningkatan layanan Puskesmas pada daerah permukiman terpencil atau jauh dari pusat pengembangan.*
 - d) *Peningkatan peran Posyandu sebagai bagian dari penerapan sistem peringatan dini kesehatan serta mensinergikan berbagai layanan program kesehatan lainnya dalam bentuk **rumah sehat desa**.*
- 5) Peningkatan tata kelola layanan kesehatan melalui penerapan standar pelayanan dan keterlibatan masyarakat; dengan arah kebijakan:
 - a) *Penerapan standar norma dan standar pelayanan. Penerapan standar agar tata kelola layanan kesehatan memenuhi harapan penerima manfaat.*
 - b) *Penerapan mekanisme penanganan keluhan masyarakat agar terbangunnya kualitas layanan kesehatan yang lebih baik. Mekanisme penanganan keluhan merupakan satu hal penting yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai kualitas layanan sekaligus. Penerapan mekanisme penanganan keluhan perlu dilakukan pada semua unit layanan kesehatan, baik itu rumah sakit, puskesmas maupun puskesmas pembantu.*
 - c) *Penerapan standar pelayanan publik guna mewujudkan tekad sebagai pelayan publik dalam memberi layanan terbaik yang secara terus menerus diperbaiki (continuous improvement).*
 - d) *Mengembangkan mekanisme kontrol masyarakat dalam manajemen Puskesmas.*

Secara detail mengenai Arah Kebijakan pembangunan berdasarkan kewilayahan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.5 Arah Kebijakan Kewilayahan: Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

TAHUN 1	KEC.	TAHUN 2	KEC.	TAHUN 3	KEC.	TAHUN 4	KEC.	TAHUN 5	KEC.
Optimalisasi peran desa siaga untuk mendorong percepatan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak	seluruh kecamatan	Optimalisasi peran desa siaga untuk mendorong percepatan pelayanan kesehatan terutama ibu hamil	seluruh kecamatan	Optimalisasi peran desa siaga untuk mendorong percepatan pelayanan kesehatan terutama ibu hamil	seluruh kecamatan	Optimalisasi peran desa siaga untuk mendorong percepatan pelayanan kesehatan terutama ibu hamil	seluruh kecamatan	Optimalisasi peran desa siaga untuk mendorong percepatan pelayanan kesehatan terutama ibu hamil	Seluruh kecamatan
Penerapan program promosi kesehatan menuju perilaku hidup bersih dan sehat melalui media promosi elektronik dan tradisional	Kabupaten	Penerapan program Promosi kesehatan menuju perilaku hidup bersih dan sehat melalui media promosi elektronik dan tradisional	Wilayah Tengah	Penerapan program promosi kesehatan menuju perilaku hidup bersih dan sehat melalui media promosi elektronik dan tradisional	Wilayah hilir	Penerapan program promosi kesehatan menuju perilaku hidup bersih dan sehat melalui media promosi elektronik dan tradisional	Wilayah Hulu	Penerapan program promosi kesehatan menuju perilaku hidup bersih dan sehat melalui media promosi elektronik dan tradisional	Seluruh kecamatan

TAHUN 1	KEC.	TAHUN 2	KEC.	TAHUN 3	KEC.	TAHUN 4	KEC.	TAHUN 5	KEC.
Pengembangan sistem transportasi desa untuk mempermudah akses terhadap layanan kesehatan	wilayah hulu dan Muara Kaman, Sebulu	Pengembangan sistem transportasi setempat untuk mempermudah akses terhadap layanan kesehatan	wilayah hulu dan Muara Kaman, Sebulu	Pengembangan sistem transportasi setempat untuk mempercepat akses layanan kesehatan	wilayah hulu dan Muara Kaman, Sebulu	Pengembangan sistem transportasi setempat untuk mempercepat akses layanan kesehatan	wilayah hulu dan Muara Kaman, Sebulu	Pengembangan sistem transportasi setempat untuk mempercepat akses layanan kesehatan	wilayah hulu dan Muara Kaman, Sebulu
Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	Wilayah hulu	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	Wilayah hulu	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	Wilayah hilir	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	Wilayah hilir	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	Wilayah tengah
Peningkatan ketersediaan obat-obatan	Wilayah hulu	Peningkatan ketersediaan obat-obatan	Wilayah hulu	Peningkatan ketersediaan obat-obatan	Wilayah hilir	Peningkatan ketersediaan obat-obatan	Wilayah hilir	Peningkatan ketersediaan obat-obatan	Wilayah tengah
Peningkatan ketersediaan peralatan kesehatan pada RSUD	Kec Kota Bangun	Peningkatan ketersediaan peralatan kesehatan	Kec Kota Bangun	Peningkatan ketersediaan peralatan kesehatan	Kec Tenggara-rong	Peningkatan ketersediaan peralatan kesehatan	Kec Tenggara-rong	Peningkatan ketersediaan peralatan kesehatan	Kec Tenggara-rong
Peningkatan kebutuhan nakes dan pendistribusian secara proporsional sesuai kebutuhan wilayah	Wilayah hulu	Peningkatan kebutuhan nakes dan pendistribusian secara proporsional sesuai kebutuhan wilayah	Wilayah hulu	Peningkatan kebutuhan nakes dan pendistribusian secara proporsional sesuai kebutuhan wilayah	Wilayah hilir	Peningkatan kebutuhan nakes dan pendistribusian secara proporsional sesuai kebutuhan wilayah	Wilayah hilir	Peningkatan kebutuhan nakes dan pendistribusian secara proporsional sesuai kebutuhan wilayah	Wilayah tengah
Peningkatan kompetensi dukun sebagai mitra bidan	Wilayah tengah	Peningkatan kompetensi dukun sebagai mitra bidan	Wilayah tengah	Peningkatan kompetensi dukun sebagai mitra bidan	Wilayah hilir	Peningkatan kompetensi dukun sebagai mitra bidan	Wilayah hilir	Peningkatan kompetensi dukun sebagai mitra bidan	Wilayah tengah
Meningkatkan akses ibu hamil pada layanan puskesmas	Wilayah tengah	Meningkatkan akses ibu hamil pada layanan puskesmas	Wilayah tengah	Meningkatkan akses ibu hamil pada layanan puskesmas	Wilayah hilir	Meningkatkan akses ibu hamil pada layanan puskesmas	Wilayah hilir	Meningkatkan akses ibu hamil pada layanan puskesmas	Wilayah hulu
Pengembangan basis data dan informasi ibu hamil berbasis desa		Pengembangan basis data dan informasi ibu hamil berbasis desa		Pengembangan basis data dan informasi ibu hamil berbasis desa		Pengembangan basis data dan informasi ibu hamil berbasis desa		Pengembangan basis data dan informasi ibu hamil berbasis desa	
Peningkatan layanan puskesmas pada daerah permukiman terpencil	Wilayah hulu	Peningkatan layanan puskesmas pada daerah permukiman terpencil	Wilayah hulu	Peningkatan layanan puskesmas pada daerah permukiman terpencil	Wilayah hulu, kec Muara kaman	Peningkatan layanan puskesmas pada daerah permukiman terpencil	Wilayah hilir	Peningkatan layanan puskesmas pada daerah permukiman terpencil	Wilayah hilir

TAHUN 1	KEC.	TAHUN 2	KEC.	TAHUN 3	KEC.	TAHUN 4	KEC.	TAHUN 5	KEC.
Peningkatan peran posyandu menjadi RUMAH SEHAT DESA	Wilayah tengah	Peningkatan peran posyandu menjadi RUMAH SEHAT DESA	Wilayah tengah	Peningkatan peran posyandu menjadi RUMAH SEHAT DESA	Wilayah hilir	Peningkatan peran posyandu menjadi RUMAH SEHAT DESA	Wilayah hilir	Peningkatan peran posyandu menjadi RUMAH SEHAT DESA	Wilayah hulu
Penerapan standar norma dan standar pelayanan unit layanan kesehatan	Wilayah tengah	Penerapan standar norma dan standar pelayanan unit layanan kesehatan	Wilayah tengah	Penerapan standar norma dan standar pelayanan unit layanan kesehatan	Wilayah hilir	Penerapan standar norma dan standar pelayanan unit layanan kesehatan	Wilayah hilir	Penerapan standar norma dan standar pelayanan unit layanan kesehatan	Wilayah hulu
Penerapan mekanisme penanganan keluhan pada unit layanan kesehatan	Wilayah tengah	Penerapan mekanisme penanganan keluhan pada unit layanan kesehatan	Wilayah Tengah	Penerapan mekanisme penanganan keluhan pada unit layanan kesehatan	Wilayah Hilir	Penerapan mekanisme penanganan keluhan pada unit layanan kesehatan	Wilayah Hilir	Penerapan mekanisme penanganan keluhan pada unit layanan kesehatan	Wilayah Hulu
Penerapan standar pelayanan publik	Wilayah tengah	Penerapan standar pelayanan publik	Wilayah tengah	Penerapan standar pelayanan publik	Wilayah hilir	Penerapan standar pelayanan publik	Wilayah hilir	Penerapan standar pelayanan publik	Wilayah hulu
Pengembangan mekanisme kontrol masyarakat terhadap manajemen puskesmas	Wilayah tengah	Pengembangan mekanisme kontrol masyarakat terhadap manajemen puskesmas	Wilayah tengah	Pengembangan mekanisme kontrol masyarakat terhadap manajemen puskesmas	Wilayah hilir	Pengembangan mekanisme kontrol masyarakat terhadap manajemen puskesmas	Wilayah hilir	Pengembangan mekanisme kontrol masyarakat terhadap manajemen puskesmas	Wilayah hulu

6.2.4. Meningkatkan daya saing tenaga kerja serta kesempatan dan perluasan kesempatan kerja

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Fasilitasi ketrampilan dan penempatan kerja, dengan arah kebijakan:

- Peningkatan kompetensi angkatan kerja potensial;*
- Penempatan Angkatan Kerja;*
- Penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang berbasis potensi kecamatan;*
- Fasilitasi Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan.*

Secara detail mengenai Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan berdasarkan kewilayahan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.6 Arah Kebijakan Kewilayahan: Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja Serta Kesempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Tahun 1	Kecamatan	Tahun 2	Kecamatan	Tahun 3	Kecamatan	Tahun 4	Kecamatan	Tahun 5	Kecamatan
Peningkatan kompetensi angkatan kerja potensial	Se-luruh Kecamatan	Peningkatan kompetensi angkatan kerja potensial	Se-luruh Kecamatan	Peningkatan kompetensi angkatan kerja potensial	Se-luruh Kecamatan	Peningkatan kompetensi angkatan kerja potensial	Se-luruh Kecamatan	Peningkatan kompetensi angkatan kerja potensial	Se-luruh Kecamatan
Penempatan Angkatan Kerja	Se-luruh Kecamatan	Penempatan Angkatan Kerja	Se-luruh Kecamatan	Penempatan Angkatan Kerja	Se-luruh Kecamatan	Penempatan Angkatan Kerja	Se-luruh Kecamatan	Penempatan Angkatan Kerja	Se-luruh Kecamatan

Tahun 1	Kecamatan	Tahun 2	Kecamatan	Tahun 3	Kecamatan	Tahun 4	Kecamatan	Tahun 5	Kecamatan
Penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang berbasis potensi kecamatan	Se-luruh Kecamatan	Penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang berbasis potensi kecamatan	Se-luruh Kecamatan	Penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang berbasis potensi kecamatan	Se-luruh Kecamatan	Penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang berbasis potensi kecamatan	Se-luruh Kecamatan	Penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang berbasis potensi kecamatan	Se-luruh Kecamatan
Fasilitasi Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan	Se-luruh Kecamatan	Fasilitasi Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan	Se-luruh Kecamatan	Fasilitasi Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan	Se-luruh Kecamatan	Fasilitasi Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan	Se-luruh Kecamatan	Fasilitasi Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan	Se-luruh Kecamatan

6.2.5. Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Pemuda Dan Olahraga

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pembinaan kepemudaan, dengan arah kebijakan:
 - a) *Pembinaan kepemudaan melalui sekolah dan kelompok masyarakat*
 - b) *Pemberdayaan karang taruna di tiap desa*
- 2) Meningkatkan dukungan kegiatan pemuda dan olahraga, dengan arah kebijakan:
 - a) *Pemberian bantuan sarana dan prasarana olahraga*
 - b) *Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan olahraga di masing-masing wilayah kecamatan*
 - c) *Optimalisasi Insentif Berbasis Prestasi bagi atlet*
 - d) *Fasilitasi kegiatan olahraga melalui even-even lokal, regional, nasional, dan bahkan internasional*

Secara detail mengenai Arah Kebijakan pembangunan berdasarkan kewilayahan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.7 Arah Kebijakan Kewilayahan: Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Pemuda dan Olahraga

Tahun 1	Kecamatan	Tahun 2	Kecamatan	Tahun 3	Kecamatan	Tahun 4	Kecamatan	Tahun 5	Kecamatan
Pembinaan kepemudaan melalui sekolah dan kelompok masyarakat	Se-luruh Kecamatan	Pembinaan kepemudaan melalui sekolah dan kelompok masyarakat	Se-luruh Kecamatan	Pembinaan kepemudaan melalui sekolah dan kelompok masyarakat	Se-luruh Kecamatan	Pembinaan kepemudaan melalui sekolah dan kelompok masyarakat	Se-luruh Kecamatan	Pembinaan kepemudaan melalui sekolah dan kelompok masyarakat	Se-luruh Kecamatan
Pemberdayaan karang taruna di tiap desa	Se-luruh Kecamatan	Pemberdayaan karang taruna di tiap desa	Se-luruh Kecamatan	Pemberdayaan karang taruna di tiap desa	Se-luruh Kecamatan	Pemberdayaan karang taruna di tiap desa	Se-luruh Kecamatan	Pemberdayaan karang taruna di tiap desa	Se-luruh Kecamatan
Pemberian bantuan sarana dan prasarana olahraga	Se-luruh Kecamatan	Pemberian bantuan sarana dan prasarana olahraga	Se-luruh Kecamatan	Pemberian bantuan sarana dan prasarana olahraga	Se-luruh Kecamatan	Pemberian bantuan sarana dan prasarana olahraga	Se-luruh Kecamatan	Pemberian bantuan sarana dan prasarana olahraga	Se-luruh Kecamatan
Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan olahraga di masing-masing wilayah kecamatan	Se-luruh Kecamatan	Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan olahraga di masing-masing wilayah kecamatan	Se-luruh Kecamatan	Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan olahraga di masing-masing wilayah kecamatan	Se-luruh Kecamatan	Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan olahraga di masing-masing wilayah kecamatan	Se-luruh Kecamatan	Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan olahraga di masing-masing wilayah kecamatan	Se-luruh Kecamatan
Optimalisasi Insentif Berbasis Prestasi bagi	Se-luruh Kecamatan	Optimalisasi Insentif Berbasis Prestasi bagi	Se-luruh Kecamatan	Optimalisasi Insentif Berbasis Prestasi bagi	Se-luruh Kecamatan	Optimalisasi Insentif Berbasis Prestasi bagi	Se-luruh Kecamatan	Optimalisasi Insentif Berbasis Prestasi bagi	Se-luruh Kecamatan

Tahun 1	Kecamatan	Tahun 2	Kecamatan	Tahun 3	Kecamatan	Tahun 4	Kecamatan	Tahun 5	Kecamatan
atlet	mata n	Prestasi atlet bagi	mata n	Prestasi atlet bagi	mata n	Prestasi atlet bagi	mata n	Prestasi atlet bagi	mata n
Fasilitasi kegiatan olahraga melalui even-even lokal, regional, nasional, dan bahkan internasional	Se-luruh Kecamatan	Fasilitasi kegiatan olahraga melalui even-even lokal, regional, nasional, dan bahkan internasional	Se-luruh Kecamatan	Fasilitasi kegiatan olahraga melalui even-even lokal, regional, nasional, dan bahkan internasional	Se-luruh Kecamatan	Fasilitasi kegiatan olahraga melalui even-even lokal, regional, nasional, dan bahkan internasional	Se-luruh Kecamatan	Fasilitasi kegiatan olahraga melalui even-even lokal, regional, nasional, dan bahkan internasional	Se-luruh Kecamatan

6.2.6. Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Menuju Desa Berketahanan Sosial

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Desa Berketahanan Sosial, dengan arah kebijakan:
 - a) *Pengembangan Desain dan Pelaksanaan Pilot Proyek Desa Berketahanan Sosial*
 - b) *Replikasi Pembangunan Desa Berketahanan Sosial*
- 2) Gerakan Desa Membangun, dengan arah kebijakan:
 - a) *Pemantapan pembinaan keluarga miskin*
 - c) *Pemantapan validitas pendataan kemiskinan*
 - d) *Pemantapan sinergitas kebijakan pengentasan kemiskinan yang ada di tiap SKPD terkait*
 - e) *Pemantapan partisipasi masyarakat dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan di desa*

Secara detail mengenai Arah Kebijakan pembangunan berdasarkan kewilayahan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.8 Arah Kebijakan Kewilayahan: Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Menuju Desa Berketahanan Sosial

TAHUN 1	KECAMATAN	TAHUN 2	KECAMATAN	TAHUN 3	KECAMATAN	TAHUN 4	KECAMATAN	TAHUN 5	KECAMATAN
Pengembangan Desain dan Pelaksanaan Pilot Proyek Desa Berketahanan Sosial	Seluruh Kec.	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Replikasi Pembangunan Desa Berketahanan Sosial	Seluruh Kecamatan	Replikasi Pembangunan Desa Berketahanan Sosial	Seluruh Kecamatan	Replikasi Pembangunan Desa Berketahanan Sosial	Seluruh Kecamatan	Replikasi Pembangunan Desa Berketahanan Sosial	Seluruh Kecamatan
Pemantapan pembinaan keluarga miskin	Seluruh Kecamatan	Pemantapan pembinaan keluarga miskin	Seluruh Kecamatan	Pemantapan pembinaan keluarga miskin	Seluruh Kecamatan	Pemantapan pembinaan keluarga miskin	Seluruh Kecamatan	Pemantapan pembinaan keluarga miskin	Seluruh Kecamatan
Pemantapan validitas pendataan kemiskinan	Seluruh Kecamatan	Pemantapan validitas pendataan kemiskinan	Seluruh Kecamatan	Pemantapan validitas pendataan kemiskinan	Seluruh Kecamatan	Pemantapan validitas pendataan kemiskinan	Seluruh Kecamatan	Pemantapan validitas pendataan kemiskinan	Seluruh Kecamatan

TAHUN 1	KECA-MATAN	TAHUN 2	KECA-MATAN	TAHUN 3	KECA-MATAN	TAHUN 4	KECA-MATAN	TAHUN 5	KECA-MATAN
Peman-tapan sinergitas kebijakan TASKIN yang ada di tiap SKPD terkait	Seluruh Kecama-tan	Peman-tapan sinergitas kebijakan TASKIN yang ada di tiap SKPD terkait	Seluruh Kecama-tan	Pemantapan sinergitas kebijakan TASKIN yang ada di tiap SKPD terkait	Seluruh Kecama-tan	Peman-tapan sinergitas kebijakan TASKIN yang ada di tiap SKPD terkait	Seluruh Kecama-tan	Peman-tapan sinergitas kebijakan TASKIN yang ada di tiap SKPD terkait	Seluruh Kecama-tan
Peman-tapan partisipasi masyarakat dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan di desa	Seluruh Kecama-tan		Seluruh Kecama-tan		Seluruh Kecama-tan		Seluruh Kecama-tan		Seluruh Kecama-tan

6.2.7. Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Desa Berketahanan Sosial, dengan arah kebijakan:
 - a) *Pemantapan peran perusahaan dan masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial*
 - b) *Pemantapan sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial*
 - c) *Pemantapan penyelenggaraan standar pelayanan kesejahteraan sosial*

Secara detail mengenai Arah Kebijakan pembangunan berdasarkan kewilayahan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.9 Arah Kebijakan Kewilayahan: Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Tahun 1	Kecamatan	Tahun 2	Kecamatan	Tahun 3	Kecamatan	Tahun 4	Kecamatan	Tahun 5	Kecamatan
Peman-tapan peran perusahaan dan masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial	Seluruh Kecamatan	Peman-tapan peran perusahaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial	Seluruh Kecamatan	Pemantapan peran perusahaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial	Seluruh Kecamatan	Peman-tapan peran perusahaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial	Seluruh Kecamatan	Peman-tapan peran perusahaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial	Seluruh Kecamatan
Peman-tapan sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial	Seluruh Kecamatan	Peman-tapan sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial	Seluruh Kecamatan	Pemantapan sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial	Seluruh Kecamatan	Peman-tapan sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial	Seluruh Kecamatan	Peman-tapan sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial	Seluruh Kecamatan
Peman-tapan penyelenggaraan standar pelayanan kesejahteraan sosial	Seluruh Kecamatan	Peman-tapan penyelenggaraan standar pelayanan kesejahteraan sosial	Seluruh Kecamatan	Pemantapan penyelenggaraan standar pelayanan kesejahteraan sosial	Seluruh Kecamatan	Peman-tapan penyelenggaraan standar pelayanan kesejahteraan sosial	Seluruh Kecamatan	Peman-tapan penyelenggaraan standar pelayanan kesejahteraan sosial	Seluruh Kecamatan

6.2.8. Meningkatnya Keterpaduan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Antar Sektor Antar Wilayah

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan arah kebijakan:
 - a) *Sinkronisasi program lintas SKPD di daerah dengan fungsionalisasi TKPKD*
 - b) *Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah*
 - c) *Optimalisasi APBD yang Pro Job, Pro Poor, Pro Growth, dan Pro Environment*

Secara detail mengenai Arah Kebijakan pembangunan berdasarkan kewilayahan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.10 Arah Kebijakan Kewilayahan: Meningkatnya Keterpaduan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Antar Sektor Antar Wilayah

TAHUN 1	KECA-MATAN	TAHUN 2	KECA-MATAN	TAHUN 3	KECA-MATAN	TAHUN 4	KECA-MATAN	TAHUN 5	KECA-MATAN
Sinkronisasi program lintas SKPD di daerah dengan fungsionalisasi TKPKD	Seluruh Kecamatan	Sinkronisasi program lintas SKPD di daerah dengan fungsionalisasi TKPKD	Seluruh Kecamatan	Sinkronisasi program lintas SKPD di daerah dengan fungsionalisasi TKPKD	Seluruh Kecamatan	Sinkronisasi program lintas SKPD di daerah dengan fungsionalisasi TKPKD	Seluruh Kecamatan	Sinkronisasi program lintas SKPD di daerah dengan fungsionalisasi TKPKD	Seluruh Kecamatan
Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Seluruh Kecamatan	Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Seluruh Kecamatan	Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Seluruh Kecamatan	Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Seluruh Kecamatan	Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Seluruh Kecamatan
Optimalisasi APBD yang Pro Job, Pro Poor, Pro Growth, dan Pro Environment	Seluruh Kecamatan	Optimalisasi APBD yang Pro Job, Pro Poor, Pro Growth, dan Pro Environment	Seluruh Kecamatan	Optimalisasi APBD yang Pro Job, Pro Poor, Pro Growth, dan Pro Environment	Seluruh Kecamatan	Optimalisasi APBD yang Pro Job, Pro Poor, Pro Growth, dan Pro Environment	Seluruh Kecamatan	Optimalisasi APBD yang Pro Job, Pro Poor, Pro Growth, dan Pro Environment	Seluruh Kecamatan

6.3. PENGUATAN KAPASITAS FISKAL DAERAH

Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah, difokuskan dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan kerjasama pembangunan daerah.

6.3.1. Sasaran Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Insentif dan Disinsentif bagi Investasi, dengan arah kebijakan:
 - a) *Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan mempercepat peningkatan penanaman modal*
 - b) *Penerapan regulasi terkait kebijakan membuka kemudahan investasi daerah*
- 2) Meningkatkan Kerjasama dengan Pihak Ketiga, dengan arah kebijakan:
 - a) *Pengembangan potensi unggulan yang layak dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui*

- metode *Public Private Partnerships (PPP)*
- b) *Pengembangan kawasan potensial seperti pariwisata terpadu, sentra pertanian, industri, dan perdagangan*
- c) *Promosi potensi unggulan daerah secara periodik baik skala lokal, regional, nasional, dan bahkan internasional*

6.3.2. Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas perencanaan pendapatan daerah (PAD), dengan arah kebijakan:
 - a) *Penyediaan data dan informasi potensi pendapatan daerah*
 - b) *Penerapan/implementasi Grand Strategi/Roadmap Pendapatan Asli Daerah*
- 2) Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah berbasis IT, dengan arah kebijakan:
 - a) *Pengembangan sistem PAD online untuk semua layanan PAD*
 - b) *Penyediaan sarana prasarana pendukung pungutan PAD yang merata di Seluruh Kecamatan*
 - c) *Peningkatan SDM aparatur pemungut PAD*
 - d) *Pemberian insentif bagi aparatur khususnya pemungut PAD di daerah terpencil*
- 3) Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, dengan arah kebijakan:
 - a) *Pemetaan potensi baru bagi Pendapatan Asli Daerah*
 - b) *Kerjasama antar daerah yang berkaitan dengan upaya peningkatan sumber PAD*

6.3.3. Sasaran Meningkatnya Kerjasama Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pembangunan Daerah.

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Membuka Ruang Komunikasi antara Pemerintah dengan Dunia Usaha, dengan arah kebijakan:
 - a) *Pembentukan Forum CSR*
 - b) *Pelaksanaan komunikasi melalui "Gala Dinner" atau Silaturahmi berkala dengan pelaku usaha*
- 2) Memfasilitasi Pelaku Usaha dalam Gerakan Pembangunan Kutai Kartanegara, dengan arah kebijakan:
 - a) *Pembangunan sistem aplikasi CSR*
 - b) *Pelibatan pelaku usaha dalam usulan pembangunan melalui musrenbang*
 - c) *Pendataan program kegiatan CSR dari pelaku usaha*
 - d) *Memfasilitasi data informasi kondisi daerah untuk dipergunakan oleh pelaku usaha melalui CSR*

6.4. TRANSFORMASI STRUKTUR EKONOMI DAERAH

Transformasi Struktur Ekonomi Daerah, difokuskan dalam rangka mencapai tujuan untuk mewujudkan percepatan kedaulatan pangan dan revolusi pembangunan pertanian dalam arti luas sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi daerah; mewujudkan Kutai Kartanegara sebagai branding pariwisata unggulan di Kalimantan Timur; serta mewujudkan ekonomi perdesaan berbasis kelompok dan kewirausahaan yang didukung industri dan perdagangan potensial daerah berbasis keterkaitan dan keterpaduan potensi antar wilayah (*Integrated Territorial Development*).

6.4.1. Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola, dan Pertumbuhan Sektor Pertanian dalam Arti Luas

Dalam rangka mencapai sasaran peningkatan produktivitas, tata kelola dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas, strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1) Optimalisasi pengembangan irigasi pertanian dan peningkatan luasan lahan produktif yang beririgasi.

Perubahan iklim global secara nyata telah berdampak negatif pada eksistensi dan keberlanjutan produksi bidang agro. Beberapa indikasi perubahan iklim global yang sangat terkait dengan aktivitas sektor agro yaitu: pergeseran awal musim hujan, pergeseran musim kemarau dan perubahan durasi musim kemarau, fluktuasi curah hujan, perubahan suhu yang drastis, dll. Berbagai dampak negatif atas perubahan iklim global tersebut sangat berpengaruh pada bergesernya atau terlambatnya masa tanam berbagai komoditas pertanian yang berpotensi menurunkan produksi dan produktivitas pertanian. Keberhasilan dan keberlanjutan produksi pertanian juga sangat tergantung pada kondisi infrastruktur dan sistem irigasi pertanian. Secara umum, kondisi irigasi di kawasan pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara belum memadai dimana irigasi pertanian tidak berjalan optimal atau banyak luasan lahan produktif yang belum mempunyai dukungan infrastruktur dan sistem irigasi yang memadai.

Sebagai solusi untuk mengatasi persoalan dampak negatif atas terjadinya perubahan iklim global dan kondisi atau eksistensi sistem irigasi yang belum optimal, maka diperlukan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air untuk pengembangan irigasi pertanian yang dapat melayani kebutuhan air pada lahan-lahan pertanian sepanjang tahun. Pembangunan infrastruktur dan sistem irigasi untuk lahan-lahan pertanian pengembangan baru dan perawatan sistem irigasi yang telah ada perlu dilakukan secara kontinyu.

Selain itu, dalam rangka mempertahankan dan upaya peningkatan produksi pertanian adalah penetapan rasio pembukaan lahan pertanian terhadap penggunaan lain untuk kawasan pertambangan dengan luasan hutan di suatu wilayah untuk menjaga keseimbangan ciri khas Kalimantan Timur sebagai daerah hutan hujan tropis basah.

Arah Kebijakan yang akan dicapai:

- a) *Pengelolaan sumber daya air untuk irigasi pertanian yang dapat melayani lahan sepanjang tahun melalui pembangunan waduk, jaringan irigasi, jalan usahatani*
- b) *Pembangunan sistem irigasi untuk lahan-lahan baru dan perawatan sistem irigasi yang telah ada secara kontinyu.*
- c) *Penetapan rasio pembukaan lahan pertanian/tambang dengan luasan hutan di suatu wilayah untuk menjaga keseimbangan ciri khas Kalimantan Timur sebagai daerah hutan hujan tropis basah.*

2) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif ke non-pertanian tanaman pangan.

Kondisi umum tata ruang di wilayah Kutai Kartanegara diindikasikan dengan perencanaan pengembangan wilayah yang belum berjalan terpadu. Sebagai solusi atas kondisi tersebut, maka perlu dikembangkan database status lahan pertanian produktif yang dapat diakses oleh berbagai instansi teknis terkait atau publik serta stakeholders yang berkepentingan.

Sampai dengan saat ini, regulasi dan aturan rinci dan teknis terkait alih fungsi lahan untuk penggunaan pertanian ke penggunaan non-pertanian di tingkat kabupaten belum ada. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengembangan database status lahan pertanian produktif yang dapat diakses oleh instansi terkait atau publik.

Arah Kebijakan yang akan dicapai:

- a) *Pengembangan database status lahan pertanian produktif yang dapat diakses oleh instansi terkait atau publik.*

- b) *Penyusunan dan pengawalan aturan (Peraturan Daerah di tingkat kabupaten) tentang mitigasi alih fungsi lahan pertanian pangan produktif ke non-pertanian.*
- c) *Pemanfaatan lahan eks areal pertambangan dan perkebunan yang tidak produktif untuk lahan pengembangan agro (pertanian pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan).*

3) *Perbaikan image infrastruktur pertanian (ketersediaan sarana prasarana pertanian hulu, tengah dan hilir), utamanya pasar.*

Salah satu isu strategis yang perlu mendapat solusi adalah upaya untuk optimalisasi sumber daya pertanian. Selama ini ada indikasi sektor pertanian kurang menjanjikan sehingga sebagian tenaga kerja produktif yang beraktivitas di sektor pertanian berpindah usaha dari usaha tani ke kegiatan non-pertanian terutama pertambangan dan perkebunan.

Arah Kebijakan yang akan dicapai:

- a) *Mendukung perbaikan dan revitalisasi infrastruktur pertanian (ketersediaan sarana prasarana pertanian hulu, tengah dan hilir) seperti alat mesin pertanian (traktor, thresher, transplanter, reaper), pergudangan, sarana transportasi dan logistik produk pertanian, pasar tani/terminal agribisnis, dll*
- b) *Mengembangkan sistem pemasaran sehingga dapat mendorong peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan bagi tenaga kerja di sektor pertanian*

4) *Pembukaan lahan/usaha pertanian tanaman pangan yang baru dan peningkatan produktivitas pertanian.*

Penguatan nilai tukar petani menuju perbaikan kualitas hidup pelaku usaha pertanian harus didukung dengan peningkatan produksi dan produktivitas. Salah satu aspek penting dalam mendorong peningkatan produksi adalah upaya mempertahankan lahan-lahan pertanian produktif. Selain itu juga berbagai upaya untuk mendorong program (1) intensifikasi, (2) ekstensifikasi dan (3) diversifikasi usaha pertanian.

Arah Kebijakan yang akan dicapai:

- a) *Membuka lahan pertanian baru (untuk usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dengan target 10.000 ha dalam kurun waktu 5 tahun*
- b) *Membangun demplot-demplot sebagai model pengembangan usaha pertanian produktif*
- c) *Meningkatkan akses layanan permodalan usaha bagi pelaku usaha pertanian*
- d) *Meningkatkan SDM penyuluh dan revitalisasi kelembagaan penyuluhan (Balai Penyuluhan Pertanian)*
- e) *Menguatkan kapasitas dan manajemen kelembagaan usaha petani (koperasi pertanian)*
- f) *Menguatkan kapasitas kelembagaan usaha ekonomi desa (BUMDES) untuk mendukung usaha pertanian*
- g) *Menguatkan kapasitas kelembagaan usaha ekonomi daerah (BUMD) untuk mendukung usaha pertanian dalam skala regional*

5) *Peningkatan efisiensi peralatan pasca panen hasil pertanian tanaman pangan.*

Standarisasi peralatan dan pemanfaatan alat pasca panen (perontok gabah, pengering gabah dan penggilingan padi) belum dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Mempertimbangkan potensi kehilangan hasil pertanian karena lemahnya penanganan pasca panen cukup tinggi, maka sangat diperlukan dukungan pengadaan fasilitas perawatan mesin-mesin pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.

Kegiatan pendampingan standarisasi peralatan pasca panen dan pengolahan produk pertanian belum dikembangkan di Kutai Kartanegara. Sebagai solusi atas hal tersebut maka diperlukan pendampingan untuk sub-usaha pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.

Arah Kebijakan yang akan dicapai:

- a) Mengadakan mesin pasca panen untuk meningkatkan efisiensi panen dan peningkatan nilai tambah produk (huller/rice milling unit dan peralatan pendukung)
- b) Menyediakan fasilitas perawatan mesin-mesin pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.
- c) Mendampingi usaha pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.

6) Peningkatan efektivitas distribusi pupuk bersubsidi untuk tanaman pangan.

Persoalan sarana produksi terutama pupuk menjadi isu yang sangat penting bagi petani. Ketidaktepatan jadwal distribusi pupuk senantiasa terulang dari waktu ke waktu di berbagai tempat yang berakibat penurunan produksi pertanian. Solusi mendasar yang diperlukan adalah penyediaan informasi kebutuhan pupuk dan pengawalannya. Sangat diperlukan informasi akurat tentang kebutuhan pupuk bersubsidi sebagai bahan pertimbangan untuk PT Pupuk Indonesia dalam merencanakan pengaturan pupuk bersubsidi yang akan didistribusikan kepada petani produsen pertanian. Selain itu juga perlu pengawalan yang ketat dalam distribusi pupuk bersubsidi sehingga tepat sasaran dan menjadi lebih efisien.

Arah Kebijakan yang akan dicapai:

- a) *Menyediakan informasi akurat tentang kebutuhan pupuk bersubsidi sebagai bahan pertimbangan untuk PT Pupuk Indonesia dalam merencanakan pengaturan pupuk bersubsidi.*
- b) *Menyediakan alat transportasi yang memadai dan pergudangan pupuk pada beberapa titik strategis yang berdekatan dengan kawasan sentra produksi pertanian*

7) Pengembangan dan promosi komoditas unggulan daerah dan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur (penyuluh lapangan).

Persoalan Melemahnya daya saing beberapa produk unggulan pertanian di wilayah Kutai Kartanegara perlu menjadi perhatian yang serius. Salah satu upaya yang perlu didukung adalah revitalisasi daya saing komoditas dengan penetapan komoditas pertanian unggulan dan adanya satuan tugas yang mengawal perkembangannya. Diperlukan satuan tugas untuk mengawal penanganan dan penanggulangan hama dan penyakit yang cepat dan terintegrasi. Satuan tugas juga diperlukan untuk mengawal kestabilan perkembangan produksi dan kualitas produk untuk komoditas yang sudah masuk kategori komoditas lokal unggulan. Secara umum diperlukan adanya program peningkatan dan pengawalan tingkat produksi dan kualitas produk pertanian agar sesuai dengan kebutuhan minimal industri pengolahannya.

Dalam rangka mendorong munculnya produk-produk pertanian unggulan maka perlu dilakukan penetapan komoditas pertanian unggulan baru dan mengawal pengembangannya. Penetapan komoditas pertanian unggulan dapat menjadi dasar kebijakan SKPD teknis terkait dalam menyusun program-program pengembangan pertanian yang memiliki nilai tambah (value added) dan memiliki daya kompetisi tinggi.

Perlu dikembangkan model pembangunan pertanian secara holistik yang mencakup seluruh aspek dari hulu hingga hilir sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan baku, penanganan pasca panen, dan pengolahan. Untuk menarik investor di bidang pasca panen atau pengolahan hasil pertanian perlu diyakinkan akan terjaminnya suplai bahan baku dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia secara kontinyu dan stabil dari waktu ke waktu.

Selama ini problem yang muncul antara lain tidak terdeteksinya produk pertanian potensial untuk ditetapkan sebagai produk unggulan daerah karena stabilitas produksi yang kurang baik dan distribusi produk serta pasar yang tidak jelas. Oleh karenanya perlu dikembangkan sistem pool komoditas pertanian untuk tingkat kabupaten sehingga bahan baku tersedia secara stabil dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan industri pengolahan.

Problematika yang lain adalah belum terpenuhinya infrastruktur ruang pendingin untuk produk perikanan nelayan atau petambak. Hal mendasar yang perlu dilakukan adalah pembangunan pabrik es dan pengoptimalan yang sudah ada dengan menerapkan prinsip produksi yang aman dan sehat.

Dukungan SDM aparatur dan petani serta kelembagaan penyuluhan menjadi strategi penting yang perlu mendapat perhatian.

Arah Kebijakan yang akan dicapai:

- a) *Membentuk satgas penanganan produksi, kualitas dan pengolahan produk*
- b) *Menetapkan komoditas unggulan dapat menjadi dasar kebijakan dalam menyusun program-program pengembangan pertanian*
- c) *Mengembangkan model komoditas unggulan strategis yang dirancang dari hulu sampai hilir sesuai dengan potensi wilayah, melibatkan banyak petani, memanfaatkan lahan marginal dan komoditas yang mempunyai multifungsi yaitu jagung yang dapat dijadikan bahan makanan, pakan ternak dan perikanan, komoditas ekspor serta potensial untuk bahan bioenergi), model dapat dikembangkan oleh BUMD atau kemitraan dengan korporasi swasta.*
- d) *Meningkatkan kapasitas suplai bahan baku dalam jumlah yang sesuai dengan kapasitas produksi untuk menarik investor dibidang pasca panen atau pengolahan hasil pertanian akan terjaminnya*
- e) *Mengembangkan sistem pool komoditas pertanian untuk tingkat kabupaten*
- f) *Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM aparatur (penyuluh lapangan)*
- g) *Merevitalisasi kelembagaan penyuluhan pertanian*
- h) *Meningkatkan kualitas dan kuantitas poktan dan gapoktan*

8) Peningkatan optimalisasi industri pasca panen tanaman pangan (Rice Processing Unit/RPU)

Persoalan Nilai tambah ekonomi atas produk pertanian dapat diciptakan dengan memproduksi atau mengolah produk menjadi output yang berkualitas. Salah satu strategi yang dapat dikembangkan adalah prosesing beras. Perlu dilakukan optimalisasi RPU dengan memproduksi beras premium yang memiliki kualitas tinggi. Oleh karenanya untuk mendukung upaya tersebut diperlukan peningkatan kinerja manajemen RPU melalui perencanaan yang berorientasi pada kebutuhan dan atau permintaan pasar.

Strategi selanjutnya yang dapat dikembangkan adalah menjalin kerjasama penyediaan bahan baku untuk beras premium, serta membangun jaringan pemasarannya. Diperlukan usaha-usaha yang efektif untuk pemenuhan bahan baku jenis premium sesuai kapasitas minimal baik dari sekitar RPU maupun dari luar daerah.

Arah Kebijakan yang akan dicapai:

- a) *Merevitalisasi RMU yang lebih modern dan efisien*
- b) *Meningkatkan kinerja manajemen melalui perencanaan berorientasi pasar.*
- c) *Memenuhi bahan baku jenis premium sesuai kapasitas minimal baik dari sekitar RPU maupun dari luar daerah.*
- d) *Mengembangkan jaringan usaha kemitraan dan pemasaran produk*

9) Jaminan ketersediaan lahan produksi pertanian dan bahan baku untuk menarik investor

Upaya untuk menarik investasi di bidang pertanian umumnya terkendala dengan tumpang tindih ketersediaan lahan dengan luasan minimal untuk skala industri. Untuk menarik investor potensial di bidang pasca panen atau pengolahan hasil pertanian perlu dilakukan berbagai upaya untuk meyakinkan para calon investor potensial akan terjaminnya suplai bahan baku dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan kapasitas produksi yang direncanakan.

Ketersediaan infrastruktur daya dukung industri pengolahan pada tingkat UMKM masih kurang. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan prioritas pengembangan infrastruktur industri pendukung, baik sebagai program jangka pendek adalah menjalin kerjasama dengan daerah lain yang telah lengkap infrastrukturnya, atau program jangka panjang dengan membangun infrastruktur industri pendukung tersebut di kabupaten sendiri. Diperlukan satuan tugas untuk melakukan pendampingan pada pelaku UMKM dengan program-program yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Arah Kebijakan yang akan dicapai:

- a) *Mengembangkan infrastruktur industri pendukung, baik sebagai program jangka pendek adalah menjalin kerjasama dengan daerah lain.*
- b) *Meningkatkan keterampilan pelaku UMKM berbasis pertanian/agro, penyediaan inovasi dan teknik produksi*
- c) *Meningkatkan akses modal pada pelaku UMKM*
- d) *Membentuk satuan tugas untuk melakukan pendampingan pada pelaku UMKM dengan program-program yang sesuai dengan yang diperlukan*

10) Pengembangan bahan pangan sumber karbohidrat

Persoalan ketergantungan bahan pangan pokok pada beras masih menjadi problematika umum. Untuk mengatasi hal tersebut dan dalam rangka mengurangi beban tuntutan peningkatan produksi beras secara terus menerus maka diperlukan beberapa upaya strategis. Sampai dengan saat ini, belum dikembangkan kebijakan pengoptimalan lahan-lahan marjinal untuk produksi bahan pangan alternatif yaitu komoditas sagu, singkong, shorgum, dan umbi-umbian. Perlu dikembangkan program pengembangan komoditas pangan non-beras yang cocok untuk kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selama ini prioritas produksi pangan masih berorientasi untuk pemenuhan pangan bagi kebutuhan lokal (dalam negeri), belum berorientasi pada ekspor. Dengan dukungan berbagai program terkait, produksi bahan pangan non-beras dapat ditingkatkan sehingga selain untuk memenuhi kebutuhan lokal maka diperlukan upaya pengembangan pasar untuk bahan baku pangan non beras.

Persepsi publik selama ini produk pertanian sumber karbohidrat selalu berasosiasi dengan bahan pangan. Kondisi yang ada menunjukkan belum tersosialisasinya bahwa sumber karbohidrat merupakan bahan baku untuk bioenergi (penunjang ketahanan pangan). Diperlukan perubahan pandangan publik dan SKPD teknis terkait bahwa produksi sumber karbohidrat bukan hanya sebagai sumber pangan lokal tetapi dapat dikembangkan dengan berorientasi ekspor baik untuk keperluan pangan maupun non pangan (bioenergi).

Arah Kebijakan yang akan dicapai:

- a) *Mengembangkan program pengembangan pangan alternatif non-beras yang sesuai/cocok bagi masyarakat Kabupaten Kukar*
- b) *Mengembangkan lahan pekarangan dan lahan marjinal untuk produksi bahan pangan alternatif yaitu sagu, singkong, umbi-umbian, shorgum, ubi jalar, dan umbi-umbian.*
- c) *Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM aparatur (penyuluh lapangan)*
- d) *Mengembangkan usaha ekonomi keluarga dan industri rumah tangga berbasis pertanian*
- e) *Mengembangkan pasar untuk bahan baku pangan non-beras*
- f) *Mengembangkan edukasi untuk merubah pandangan bahwa produksi sumber karbohidrat bukan hanya sebagai sumber pangan lokal tetapi berorientasi ekspor baik untuk keperluan dalam propinsi maupun antar propinsi*

11) Pengembangan ketersediaan sumber pangan non-beras dan edukasi pola konsumsi masyarakat

Ketergantungan yang tinggi pada beras sebagai bahan pangan utama masyarakat karena belum ada bahan pangan alternatif yang prospektif dan kompetitif. Salah satu penyebabnya adalah belum dikembangkannya penanganan pasca panen produk pertanian sumber karbohidrat non-beras. Oleh karenanya, diperlukan pengembangan industri pasca panen produk pangan non-beras sehingga dapat menghasilkan bahan baku sumber pangan non-beras yang tahan lama seperti layaknya beras.

Selain produksi bahan baku belum dikembangkan dengan baik, penanganan produk bahan pangan non-beras juga masih belum dikembangkan. Salah satu faktor yang menghambat pengembangan bahan pangan non-beras karena belum terbentuknya pasar produk dan penanganan pasca panen sumber karbohidrat non-beras yang masih terbatas. Oleh karenanya diperlukan

pengembangan pasar untuk bahan baku pangan non-beras.

Arah Kebijakan yang akan dicapai:

- Mengembangkan industri pasca panen produk pangan non-beras sehingga dapat menghasilkan bahan baku sumber pangan non-beras yang tahan lama seperti layaknya beras*
- Mengembangkan pasar untuk bahan baku pangan non-beras*
- Menyusun regulasi pengembangan produk sumber karbohidrat non-beras dan edukasi pola konsumsi pada masyarakat*
- Mengembangkan model edukasi pada masyarakat tentang pola konsumsi alternatif bahan pangan non-beras.*
- Mengembangkan model edukasi pola makan berbasis pangan lokal pada anak-anak sekolah melalui program makanan tambahan anak sekolah*

12) Optimalisasi pengembangan bahan pangan berbasis sumberdaya peternakan (ternak besar dan ternak kecil);

Arah kebijakan:

- Mengembangkan breeding center ternak (sapi, kerbau dan unggas unggulan);*
- Menintroduksi teknologi budidaya ternak;*
- Mengintensifkan pelayanan kesehatan ternak*
- Meningkatkan populasi ternak unggulan (sapi, kerbau dan unggas) dengan pendanaan pemerintah dan CSR,*
- Mengembangkan SDM peternakan (penyuluhan, pendampingan, magang, dll)*
- Memfasilitasi pengelolaan kandang kelompok, kelompok pengolahan pupuk organik (rumah kompos dan peralatan).*

Secara detail mengenai Arah Kebijakan pembangunan pertanian berdasarkan kewilayahan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.11 Arah Kebijakan Kewilayahan: Meningkatkan Produktivitas, Tata Kelola, dan Pertumbuhan Sektor Pertanian

TAHUN 1	KEC.	TAHUN 2	KEC.	TAHUN 3	KEC.	TAHUN 4	KEC.	TAHUN 5	KEC.
Pembangunan infrastruktur baru dan perbaikan infrastruktur irigasi (bendungan, dam, saluran irigasi)	18 kec.	Pembangunan infrastruktur baru dan perbaikan infrastruktur irigasi (bendungan, dam, saluran irigasi)	Seluruh Kecamatan	Pembangunan infrastruktur baru dan perbaikan infrastruktur irigasi (bendungan, dam, saluran irigasi)	Seluruh Kecamatan	Peningkatan panjang jaringan dan luasan aliran irigasi teknis dan semi teknis	Seluruh Kecamatan	Introduksi benih-benih pertanian yang tahan pada goncangan iklim	Seluruh Kecamatan
Sosialisasi PERDA perlindungan lahan pertanian berkelanjutan	Kabupaten	Pemberian insentif untuk pemanfaatan lahan pertanian produktif (insentif pembayaran pajak, subsidi sarana produksi, subsidi harga produk, bantuan permodalan, dll)	Seluruh Kecamatan	Pemberian insentif untuk pemanfaatan lahan pertanian produktif (insentif pembayaran pajak, subsidi sarana produksi, subsidi harga produk, bantuan permodalan, dll)	Seluruh Kecamatan	Pemberian insentif untuk pemanfaatan lahan pertanian produktif (insentif pembayaran pajak, subsidi sarana produksi, subsidi harga produk, bantuan permodalan, dll)	Seluruh Kecamatan	Pemberian insentif untuk pemanfaatan lahan pertanian produktif (insentif pembayaran pajak, subsidi sarana produksi, subsidi harga produk, bantuan permodalan, dll)	Seluruh Kecamatan

TAHUN 1	KEC.	TAHUN 2	KEC.	TAHUN 3	KEC.	TAHUN 4	KEC.	TAHUN 5	KEC.
Peningkatan kapasitas dan produktivitas SDM pertanian (pelatihan, fasilitasi, penyuluhan, pendampingan, asistensi manajerial usaha, dll)	Kabupaten	Peningkatan kapasitas dan produktivitas SDM pertanian (pelatihan, fasilitasi, penyuluhan, pendampingan, asistensi manajerial usaha, dll)	Seluruh Kecamatan	Peningkatan kapasitas dan produktivitas SDM pertanian (pelatihan, fasilitasi, penyuluhan, pendampingan, asistensi manajerial usaha, dll)	Seluruh Kecamatan	Peningkatan kapasitas dan produktivitas SDM pertanian (pelatihan, fasilitasi, penyuluhan, pendampingan, asistensi manajerial usaha, dll)	Seluruh Kecamatan	Peningkatan kapasitas dan produktivitas SDM pertanian (pelatihan, fasilitasi, penyuluhan, pendampingan, asistensi manajerial usaha, dll)	Seluruh Kecamatan
Studi kelayakan pemanfaatan lahan pasca tambang untuk pengembangan pertanian	Kabupaten	Penetapan PERDA pemanfaatan lahan bekas tambang untuk produksi agro dan PERDA kawasan Pertanian/Perkebunan yang masuk dalam KBK	Seluruh Kecamatan	Pencetakan lahan pertanian baru dan pemanfaatan bekas tambang	Seluruh Kecamatan	Pencetakan lahan pertanian baru dan pemanfaatan bekas tambang	Seluruh Kecamatan	Pencetakan lahan pertanian baru dan pemanfaatan bekas tambang	Seluruh Kecamatan
Mengintroduksi alat mesin pertanian modern dan Penyusunan regulasi dan SOP standarisasi peralatan pengolahan lahan dan pasca panen (traktor, perontok gabah, penggilingan padi)	Seluruh Kecamatan	Mengintroduksi alat mesin pertanian modern dan Menyusun regulasi dan SOP standarisasi peralatan pengolahan lahan dan pasca panen (traktor, perontok gabah, penggilingan padi)	Seluruh Kecamatan	Pendampingan standardisasi dan operasionalisasi peralatan pengolahan lahan dan pasca panen dan pengolahan produk pertanian	Seluruh Kecamatan	Pendampingan standardisasi dan operasionalisasi peralatan pengolahan lahan dan pasca panen dan pengolahan produk pertanian	Seluruh Kecamatan	Pendampingan standardisasi dan operasionalisasi peralatan pengolahan lahan dan pasca panen dan pengolahan produk pertanian	Seluruh Kecamatan
Penyusunan database informasi kebutuhan pupuk berbasis wilayah dan komoditas	Seluruh Kecamatan	Distribusi pupuk tepat waktu bekerjasama dengan mitra strategis (koperasi petani, kios dan agen saprodi lokal, kelompok usaha bersama, Gapoktan)	Seluruh Kecamatan	Distribusi pupuk tepat waktu bekerjasama dengan mitra strategis (koperasi petani, kios dan agen saprodi lokal, kelompok usaha bersama, Gapoktan)	Seluruh Kecamatan	Distribusi pupuk tepat waktu bekerjasama dengan mitra strategis (koperasi petani, kios dan agen saprodi lokal, kelompok usaha bersama, Gapoktan)	Seluruh Kecamatan	Distribusi pupuk tepat waktu bekerjasama dengan mitra strategis (koperasi petani, kios dan agen saprodi lokal, kelompok usaha bersama, Gapoktan)	Seluruh Kecamatan

TAHUN 1	KEC.	TAHUN 2	KEC.	TAHUN 3	KEC.	TAHUN 4	KEC.	TAHUN 5	KEC.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi komoditas pertanian unggulan yang pernah eksis yaitu kakao, Lada, pisang kepok	Seluruh Kecamatan	Perbaikan infrastruktur produksi (pengadaan dan perbaikan jalan usaha tani, pasar, lantai jemur dan gudang pertanian) untuk unggulan yang pernah eksis yaitu kakao, lada, pisang kepok	Seluruh Kecamatan	Perbaikan teknologi produksi (bibit, budidaya, pemeliharaan, panen) untuk unggulan yang pernah eksis yaitu kakao, lada, pisang kepok	Seluruh Kecamatan	Perbaikan teknologi produksi (bibit, budidaya, pemeliharaan, panen) untuk unggulan yang pernah eksis yaitu kakao, lada, pisang kepok	Seluruh Kecamatan	Pengembangan teknologi pasca panen dan penguatan kelembagaan pemasaran untuk unggulan yang pernah eksis yaitu kakao, lada, pisang kepok	Seluruh Kecamatan
Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur penyuluh pertanian lapangan	Seluruh Kecamatan	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur penyuluh pertanian lapangan	Seluruh Kecamatan	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur penyuluh pertanian lapangan	Seluruh Kecamatan	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur penyuluh pertanian lapangan	Seluruh Kecamatan	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur penyuluh pertanian lapangan	Seluruh Kecamatan
Kajian dan penetapan pengembangan komoditas pertanian unggulan baru (jagung)	Seluruh Kecamatan	Perbaikan infrastruktur produksi (pengadaan dan perbaikan infrastruktur pertanian (jalan usaha tani, pasar, lantai jemur dan gudang pertanian) untuk jagung	Seluruh Kecamatan	Perbaikan teknologi produksi (bibit, budidaya, pemeliharaan, panen) untuk jagung	Seluruh Kecamatan	Perbaikan teknologi produksi (bibit, budidaya, pemeliharaan, panen) untuk jagung	Seluruh Kecamatan	Pengembangan kelembagaan pelaku usaha pertanian (BUMD, Koperasi, BUMDES)	Seluruh Kecamatan
Optimalisasi RPU dengan perbaikan manajemen dan SDM serta kemitraan pengadaan bahan baku dan prioritas produksi beras premium	Seluruh Kecamatan	Optimalisasi RPU dengan perbaikan manajemen dan SDM	Seluruh Kecamatan	Pengembangan kemitraan pengadaan bahan baku dan prioritas produksi beras premium	Seluruh Kecamatan	Memperluas jaringan distribusi, pasar dan kemitraan usaha dengan SKPD, BULOG, distributor dan agen beras skala regional, dll	Seluruh Kecamatan	Memperluas jaringan distribusi, pasar dan kemitraan usaha dengan SKPD, BULOG, distributor dan agen beras skala regional, dll	Seluruh Kecamatan
Penyusunan Kajian atau rancangan umum penanaman modal dan promosi investasi untuk sektor agro	Seluruh Kecamatan	Promosi penanaman modal pada pengusaha lokal, regional dan nasional untuk sektor agro	Seluruh Kecamatan	Promosi penanaman modal pada pengusaha lokal, regional dan nasional untuk sektor agro	Seluruh Kecamatan	Pemberian insentif bagi investor (perijinan usaha, pajak, infrastruktur) untuk sektor agro	Seluruh Kecamatan	Pemberian insentif bagi investor (perijinan usaha, pajak, infrastruktur) untuk sektor agro	Seluruh Kecamatan
Penyediaan Infrastruktur industri pengolahan (alat mesin, transportasi, listrik, dll)	Seluruh Kecamatan	Pelatihan teknis produksi dan manajerial bagi UMKM terkait agro	Seluruh Kecamatan	Fasilitasi permodalan bagi UMKM terkait agro	Seluruh Kecamatan	Dukungan promosi bagi UMKM (pameran, studi banding, pembangunan UMKM	Seluruh Kecamatan	Penguatan kapasitas kelembagaan usaha UMKM terkait agro (Koperasi, BUMD,	Seluruh Kecamatan

TAHUN 1	KEC.	TAHUN 2	KEC.	TAHUN 3	KEC.	TAHUN 4	KEC.	TAHUN 5	KEC.
untuk UMKM agro						center, dll) terkait agro		BUMDES, dll)	
Pengembangan usahatani lahan pekarangan dan lahan marginal untuk produksi pangan untuk komoditas sagu, singkong, sorgum dan umbi-umbian	Seluruh Kecamatan	Pengembangan usahatani lahan pekarangan dan lahan marginal untuk produksi pangan untuk komoditas sagu, singkong, sorgum dan umbi-umbian	Seluruh Kecamatan	Mengintroduksi berbagai inovasi pengolahan produk produk sagu, singkong, sorgum dan umbi-umbian	Seluruh Kecamatan	Mengadakan peralatan, dan memfasilitasi pembiayaan penanganan/ pengolahan pasca panen produk pangan alternatif	Seluruh Kecamatan	Mempromosikan produk dan sosialisasi pangan lokal pada publik dan memperluas jaringan kemitraan usaha serta distribusi produk olahan pangan pangan alternatif	Seluruh Kecamatan
Penyusunan regulasi pengembangan produk sumber karbohidrat non-beras dan edukasi pola konsumsi pada masyarakat	Kabupaten	Mempromosikan dan sosialisasi produk olahan pangan non-beras pada kalangan pemerintah, sekolah, dll	Kabupaten	Mempromosikan dan sosialisasi produk olahan pangan non-beras pada kalangan pemerintah, sekolah, dll	Seluruh Kecamatan	Mempromosikan dan fasilitasi komersialisasi produk olahan pangan non beras (pengemasan, penjualan di pasar/toko modern)	Seluruh Kecamatan	Mempromosikan dan fasilitasi komersialisasi produk olahan pangan non beras (pengemasan, penjualan di pasar/toko modern)	Seluruh Kecamatan
Mengoptimalkan pengembangan bahan pangan berbasis sumberdaya peternakan (ternak besar dan ternak kecil)	Sentra produksi di Kabupaten	Pengembangan breeding center ternak (sapi, kerbau dan unggas unggulan)	Pengembangan breeding center minimum ada di 1 lokasi di setiap KSP	Peningkatan populasi ternak unggulan (sapi, kerbau dan unggas) dengan pendanaan pemerintah dan CSR,	Seluruh Kecamatan	Peningkatan populasi ternak unggulan (sapi, kerbau dan unggas) dengan pendanaan pemerintah dan CSR,	Seluruh Kecamatan	Pengelolaan kadang ternak kelompok dan pengembangan kelompok peternak	Seluruh Kecamatan
Mengintroduksi teknologi budidaya ternak dan mengintensifkan pelayanan kesehatan ternak	Sentra produksi di Kabupaten	Mengintroduksi teknologi baru budidaya ternak dan mengintensifkan pelayanan kesehatan ternak	Seluruh Kecamatan	Meningkatkan kapasitas SDM peternakan (penyuluhan, pendampingan, magang)	Seluruh Kecamatan	Meningkatkan kapasitas SDM peternakan (penyuluhan, pendampingan, magang)	Seluruh Kecamatan	Memfasilitasi kelompok pengolahan pupuk organik (rumah kompos dan pengadaan peralatan)	Seluruh Kecamatan

6.4.2. Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan:

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Adaptasi perubahan lingkungan global dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu; dengan arah kebijakan:
 - a) Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat terhadap ancaman perubahan iklim dan bencana.
 - b) Rehabilitasi, Revitalisasi Sarana Prasarana Perikanan.

- c) *Identifikasi areal pengembangan kawasan konservasi.*
- 2) Inovasi terhadap Peningkatan Produktivitas perikanan tangkap; dengan arah kebijakan:
 - a) *Penambahan secara gradual jumlah armada kapal ikan yang lebih besar (terutama 5 s/d >10 GT).*
 - b) *Penetapan sentra pengembangan perikanan tangkap.*
 - c) *Pendidikan dan pelatihan teknologi, dan penggunaan alat-alat bantu penangkapan ikan.*
 - d) *Identifikasi potensi daerah penangkapan.*
 - e) *Penyiapan SDM dengan pendidikan dan pelatihan untuk menjadi nelayan lepas pantai.*
 - f) *Identifikasi areal pengembangan kawasan minapolitan perikanan perairan umum dan laut.*
- 3) Pengembangan perikanan berbasis kawasan; dengan arah kebijakan:
 - a) *Penetapan kawasan pengembangan untuk perikanan, baik tawar, payau maupun laut.*
 - b) *Penetapan dan pengembangan komoditas unggulan yang akan dikembangkan.*
 - c) *Pendidikan, pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan usaha, teknis, dan permodalan.*
 - d) *Fasilitasi sarana prasarana perikanan (BBI, Irigasi perikanan, saprokan).*
 - e) *Peningkatan jumlah dan kapasitas penyuluh lapang pada kawasan pengembangan secara bertahap*
- 4) Pengembangan industri pasca panen dan pengolahan hasil perikanan berdaya saing; dengan arah kebijakan:
 - a) *Penetapan kawasan pengembangan pengolahan ikan baik untuk perikanan tawar, laut maupun payau, yang sinergi dengan kawasan produksi (minapolitan).*
 - b) *Pengembangan Pasar dan pemasaran produk melalui promosi, sehingga tidak hanya mengandalkan pasar lokal dan pasar regional, tetapi juga antar pulau dan ekspor.*
 - c) *Pendampingan dan fasilitasi permodalan, teknis dan manajerial usaha dan Pengembangan program inovasi produk*
- 5) Budidaya Ikan Spesifik Lokal yang terancam punah; dengan arah kebijakan melalui penetapan kawasan penangkaran jenis ikan lokal yang terancam punah.
- 6) Pengendalian Alih Fungsi Sumberdaya Perikanan (Area Rawa); dengan arah kebijakan melakukan identifikasi kawasan sumberdaya perikanan yang terkena dampak aktivitas perusahaan/ industri.

Secara detail mengenai Arah Kebijakan pembangunan pertanian/agro berdasarkan kewilayahan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.12 Arah Kebijakan Kewilayahan: Meningkatkan Produktivitas, Tata Kelola, dan Pertumbuhan Sektor Kelautan dan Perikanan

TAHUN 1	KEC.	TAHUN 2	KEC.	TAHUN 3	KEC.	TAHUN 4	KEC.	TAHUN 5	KEC.
Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat terhadap ancaman perubahan iklim dan bencana	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah	Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat terhadap ancaman perubahan iklim dan bencana	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah	Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat terhadap ancaman perubahan iklim dan bencana	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah	Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat terhadap ancaman perubahan iklim dan bencana	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah	Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat terhadap ancaman perubahan iklim dan bencana	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah

TAHUN 1	KEC.	TAHUN 2	KEC.	TAHUN 3	KEC.	TAHUN 4	KEC.	TAHUN 5	KEC.
Rehabilitasi, Revitalisasi Sarana Prasarana Perikanan	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah	Penyediaan dan pengembangan sistem dan jaringan informasi perikanan, termasuk informasi cuaca	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah	Penyediaan dan pengembangan sistem dan jaringan informasi perikanan, termasuk informasi cuaca	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah	Penyediaan dan pengembangan sistem dan jaringan informasi perikanan, termasuk informasi cuaca	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah	Penyediaan dan pengembangan sistem dan jaringan informasi perikanan, termasuk informasi cuaca	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah
				Penyediaan dan penguatan fasilitas penangkapan, budidaya, pengolahan dan lainnya.	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah. Prioritas pada wilayah hilir dan hulu	Penyediaan dan penguatan fasilitas penangkapan, budidaya, pengolahan dan lainnya.	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah. Prioritas pada wilayah hilir dan hulu	Penyediaan dan penguatan fasilitas penangkapan, budidaya, pengolahan dan lainnya.	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah. Prioritas pada wilayah hilir dan hulu
Identifikasi areal pengembangan kawasan konservasi	Prioritas utama pada wilayah hulu untuk menyela matkan ikan-ikan lokal dan wilayah hilir untuk konservasi Wilayah Pesisir	Penetapan dan pengembangan program konservasi	Prioritas utama pada wilayah hulu untuk menyela matkan ikan-ikan lokal dan wilayah hilir untuk konservasi Wilayah Pesisir	Pengelolaan dan pengembangan konservasi	Prioritas utama pada wilayah hulu untuk menyela matkan ikan-ikan lokal dan wilayah hilir untuk konservasi Wilayah Pesisir	Pengelolaan dan pengembangan konservasi dan introduksi kegiatan ekonomi berbasis areal konservasi daerah	Prioritas utama pada wilayah hulu untuk menyela matkan ikan-ikan lokal dan wilayah hilir untuk konservasi Wilayah Pesisir	Pengelolaan dan pengembangan konservasi dan kegiatan ekonomi berbasis areal konservasi daerah	Prioritas utama pada wilayah hulu untuk menyela matkan ikan-ikan lokal dan wilayah hilir untuk konservasi Wilayah Pesisir
Penambahan secara gradual jumlah armada kapal ikan yang lebih besar (terutama 5 s/d >10 GT)	Prioritas wilayah hulu dan hilir	Penambahan secara gradual jumlah armada kapal ikan yang lebih besar (terutama 5 s/d >10 GT)	Prioritas wilayah hulu dan hilir	Penambahan secara gradual jumlah armada kapal ikan yang lebih besar (terutama 5 s/d >10 GT) dan pembatasan program bantuan perahu motor tempel atau kapal <5GT.	Prioritas wilayah hulu dan hilir	Penambahan secara gradual jumlah armada kapal ikan yang lebih besar (terutama 5 s/d >10 GT) dan pembatasan program bantuan perahu motor tempel atau kapal <5GT.	Prioritas wilayah hulu dan hilir	Penambahan secara gradual jumlah armada kapal ikan yang lebih besar (terutama 5 s/d >10 GT) dan pembatasan program bantuan perahu motor tempel atau kapal <5GT.	Prioritas wilayah hilir
Penetapan sentra pengembangan perikanan tangkap	Prioritas wilayah hulu dan hilir	Penetapan sentra pengembangan perikanan tangkap	Prioritas wilayah hulu dan hilir	Kajian pengembangan pangkalan pendaratan ikan	Prioritas wilayah hulu dan hilir	Kajian pengembangan pangkalan pendaratan ikan atau	Prioritas wilayah hulu dan hilir	Pembangunan dan Pengelolaan pangkalan	Prioritas wilayah hulu, tengah dan hilir

TAHUN 1	KEC.	TAHUN 2	KEC.	TAHUN 3	KEC.	TAHUN 4	KEC.	TAHUN 5	KEC.
				atau pelabuhan perikanan perairan umum.		pelabuhan perikanan pantai.		pendaratan ikan atau pelabuhan perikanan perairan umum dan pantai.	
								Pembangunan SPBN, TPI, Pabrik Es	Prioritas wilayah hulu, tengah dan hilir
Pendidikan dan pelatihan teknologi, dan penggunaan alat-alat bantu penangkapan ikan	Prioritas wilayah hulu dan hilir	Pengadaan alat bantu penangkapan ikan seperti GPS, ecosounder, fishfinder.	Prioritas wilayah hilir	Pendampingan pemanfaatan alat bantu penangkapan ikan	Prioritas wilayah hilir	Pendampingan pemanfaatan alat bantu penangkapan ikan	Prioritas wilayah hilir	Pendampingan pemanfaatan alat bantu penangkapan ikan	Prioritas wilayah hilir
Identifikasi potensi daerah penangkapan	Wilayah hilir	Penetapan potensi daerah tangkapan bagi nelayan	Wilayah hilir	Pengembangan kerjasama dengan daerah asal dalam pengelolaan sumberdaya ikan	Wilayah hilir	Pengembangan kerjasama dengan daerah asal dalam pengelolaan sumberdaya ikan	Wilayah hilir	Pengembangan kerjasama dengan daerah asal dalam pengelolaan sumberdaya ikan	Wilayah hulu, tengah dan hilir
Penyiapan SDM dengan pendidikan dan pelatihan untuk menjadi nelayan lepas pantai	Prioritas wilayah hilir	Penyiapan SDM dengan pendidikan dan pelatihan untuk menjadi nelayan lepas pantai	Prioritas wilayah hilir	Penyiapan SDM dengan pendidikan dan pelatihan untuk menjadi nelayan lepas pantai	Prioritas wilayah hilir	Penyiapan SDM dengan pendidikan dan pelatihan untuk menjadi nelayan lepas pantai	Prioritas wilayah hilir	Penyiapan SDM dengan pendidikan dan pelatihan untuk menjadi nelayan lepas pantai	Prioritas wilayah hilir
Identifikasi areal pengembangan kawasan minapolitan perikanan perairan umum dan laut	Prioritas utama pada wilayah hulu untuk sentra pengelolaan dan pemanfaatan secara berkelanjutan perairan danau. Pengembangan kawasan juga dilakukan disentra pendaratan ikan di wilayah pesisir. Perlu	Penetapan dan pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di perairan umum dan laut	Prioritas utama pada wilayah hulu untuk sentra pengelolaan dan pemanfaatan secara berkelanjutan perairan danau. Pengembangan kawasan juga dilakukan disentra pendaratan ikan di wilayah	pelaksanaan, pemantauan dan pengembangan minapolitan perikanan tangkap	Prioritas utama pada wilayah hulu untuk sentra pengelolaan dan pemanfaatan secara berkelanjutan perairan danau. Pengembangan kawasan juga dilakukan disentra pendaratan ikan di wilayah	pelaksanaan, pemantauan dan pengembangan minapolitan perikanan tangkap	Prioritas utama pada wilayah hulu untuk sentra pengelolaan dan pemanfaatan secara berkelanjutan perairan danau. Pengembangan kawasan juga dilakukan disentra pendaratan ikan di wilayah	pelaksanaan, pemantauan dan pengembangan minapolitan perikanan tangkap	Prioritas utama pada wilayah hulu untuk sentra pengelolaan dan pemanfaatan secara berkelanjutan perairan danau. Pengembangan kawasan juga dilakukan disentra pendaratan ikan di wilayah pesisir. Perlu

TAHUN 1	KEC.	TAHUN 2	KEC.	TAHUN 3	KEC.	TAHUN 4	KEC.	TAHUN 5	KEC.
	ditetapk n satu lokasi		pesisir. Perlu ditetapk n satu lokasi		pesisir. Perlu ditetapk n satu lokasi		a pendar atan ikan di wilayah pesisir. Perlu ditetapk an satu lokasi		ditetapk n satu lokasi
Penetapan kawasan pengemban gan untuk perikanan, baik tawar, payau maupun laut.	Kawasan ditetapk n di areal potensial di wilayah hulu, tengah, dan hilir	Penetapan kawasan pengemba ngan untuk perikanan, baik tawar, payau maupun laut.	Kawasa n ditetapk n di areal potensial di wilayah hulu, tengah, dan hilir	Pengemba ngan komoditas dan kawasan secara berkelanju tan dalam sistem bisnis perikanan (agribisnis)	Kawasan ditetapk n di areal potensial di wilayah hulu, tengah, dan hilir	Pengemban gan komoditas dan kawasan secara berkelanjuta n dalam sistem bisnis perikanan (agribisnis)	Kawas an ditetapk an di areal potensi al di wilayah hulu, tengah, dan hilir	Pengemb angan komodita s dan kawasan secara berkelanj utan dalam sistem bisnis perikanan (agribisni s)	Kawasan ditetapk n di areal potensial di wilayah hulu, tengah, dan hilir
Penetapan dan pengemban gan komoditas unggulan yang akan dikembangk an.	Kawasan ditetapk n di areal potensial di wilayah hulu, tengah, dan hilir	Penetapan dan pengemba ngan komoditas unggulan yang akan dikembang kan .	Kawasa n ditetapk n di areal potensial di wilayah hulu, tengah, dan hilir						
Pendidikan, pelatihan dan pendamping an dalam pengelolaan usaha, teknis, dan permodalan	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah	Pendidikan , pelatihan dan pendampin gan dalam pengelolaa n usaha, teknis, dan permodala n	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah	Pendidika n, pelatihan dan pendampi ngan dalam pengelola an usaha, teknis, dan permodala n	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah	Pendidikan, pelatihan dan pendamping an dalam pengelolaan usaha, teknis, dan permodalan	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah	Pendidika n, pelatihan dan pendampi ngan dalam pengelola an usaha, teknis, dan permodal an	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah
Fasilitasi sarana prasarana perikanan (BBI, Irigasi perikanan, saprokan)	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah	Fasilitasi sarana prasarana perikanan (BBI, Irigasi perikanan, saprokan)	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah	Fasilitasi sarana prasarana perikanan (BBI, Irigasi perikanan, saprokan)	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah	Memperluas jaringan distribusi, pasar dan kemitraan usaha	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah	Memperlu as jaringan distribusi, pasar dan kemitraan usaha	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah
Peningkapa n jumlah dan kapasitas penyuluh lapang pada kawasan pengemban gan secara bertahap	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah	Peningkap an jumlah dan kapasitas penyuluh lapang pada kawasan pengemba ngan secara bertahap	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah	Peningkap an jumlah dan kapasitas penyuluh lapang pada kawasan pengemba ngan secara bertahap	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah	Peningkapa n jumlah dan kapasitas penyuluh lapang pada kawasan pengemban gan secara bertahap	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah	Peningka pan jumlah dan kapasitas penyuluh lapang pada kawasan pengemb angan secara bertahap	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah
Penetapan kawasan pengemban gan pengolahan	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah	Penyusuna n rencana detail dan pembangu nan	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah	Pengemba ngan sistem produksi untuk	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah	Pengemban gan sistem produksi untuk menjamin	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah	Pengemb angan sistem produksi untuk	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah

TAHUN 1	KEC.	TAHUN 2	KEC.	TAHUN 3	KEC.	TAHUN 4	KEC.	TAHUN 5	KEC.
ikan baik untuk perikanan tawar, laut maupun payau, yang sinergi dengan kawasan produksi (minapolitan)		kawasan pengembangan pengolahan ikan baik untuk perikanan tawar, laut maupun payau, yang sinergi dengan kawasan produksi (minapolitan)		menjamin ketersediaan, kualitas, dan kontinuitas bahan baku		ketersediaan, kualitas, dan kontinuitas bahan baku	dan tengah	menjamin ketersediaan, kualitas, dan kontinuitas bahan baku	
Pengembangan Pasar dan pemasaran produk melalui promosi, sehingga tidak hanya mengandalkan pasar lokal dan pasar regional, tetapi juga antar pulau dan ekspor.	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah	Pengembangan Pasar dan pemasaran produk melalui promosi, sehingga tidak hanya mengandalkan pasar lokal dan pasar regional, tetapi juga antar pulau dan ekspor.	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah	Pengembangan Pasar dan pemasaran produk melalui promosi, sehingga tidak hanya mengandalkan pasar lokal dan pasar regional, tetapi juga antar pulau dan ekspor.	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah	Pengembangan Pasar dan pemasaran produk melalui promosi, sehingga tidak hanya mengandalkan pasar lokal dan pasar regional, tetapi juga antar pulau dan ekspor.	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah	Pengembangan Pasar dan pemasaran produk melalui promosi, sehingga tidak hanya mengandalkan pasar lokal dan pasar regional, tetapi juga antar pulau dan ekspor.	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah
Pendampingan dan fasilitasi permodalan, teknis dan manajerial usaha dan Pengembangan program inovasi produk	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah	Pendampingan dan fasilitasi permodalan, teknis dan manajerial usaha dan Pengembangan program inovasi produk	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah	Pendampingan dan fasilitasi permodalan, teknis dan manajerial usaha dan Pengembangan program inovasi produk	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah	Pendampingan dan fasilitasi permodalan, teknis dan manajerial usaha dan Pengembangan program inovasi produk	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah	Pendampingan dan fasilitasi permodalan, teknis dan manajerial usaha dan Pengembangan program inovasi produk	Untuk wilayah hulu, hilir, dan tengah
Penetapan kawasan penangkaran jenis ikan lokal yang terancam punah	Wilayah Hulu dan Tengah	Mengkoleksi calon indukan spesifikasi lokal	Wilayah Hulu dan Tengah	Pengembangan teknologi pembenihan ikan spesifikasi lokal	Wilayah Hulu dan Tengah	Pengembangan pembenihan untuk restocking ikan spesifik lokal dan budidaya ikan lokal	Wilayah Hulu dan Tengah	Pengembangan pembenihan untuk restocking ikan spesifik lokal dan budidaya ikan lokal	Wilayah Hulu dan Tengah
Identifikasi kawasan sumberdaya perikanan yang terkena dampak aktivitas perusahaan/industri	Wilayah hulu, tengah dan hilir	Monitoring rutin kawasan sumberdaya perikanan yang terkena dampak aktivitas perusahaan	Wilayah hulu, tengah dan hilir	Penetapan kawasan konservasi sumberdaya perikanan	Wilayah hulu, tengah dan hilir	Optimalisasi kawasan konservasi sumberdaya perikanan	Wilayah hulu, tengah dan hilir	Pengelolaan dan kerjasama dengan pihak Instansi Lembaga terkait dalam pengembangan kawasan	Wilayah hulu, tengah dan hilir

TAHUN 1	KEC.	TAHUN 2	KEC.	TAHUN 3	KEC.	TAHUN 4	KEC.	TAHUN 5	KEC.
								konserva si	

6.4.2. *Meningkatnya Potensi dan Daya Dukung Pariwisata Daerah serta Kunjungan Wisata di Kutai Kartanegara*

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1) *Pengembangan Branding untuk memperkuat Kutai Kartanegara sebagai Daerah Tujuan Wisata*

Branding dibidang pariwisata bertujuan untuk membangun relasi yang mengikat secara emosional antara suatu destinasi (*supply*) dengan wisatawan (*demand*). Relasi tersebut dikembangkan sedemikian rupa untuk menentukan seberapa besar *demand* akan terpengaruh dan kemudian datang berkunjung (lagi) ke destinasi tersebut. Arah Kebijakan:

- Menyelenggarakan festival Erau melalui branding yang secara komprehensif mempromosikan Pariwisata Kutai Kartanegara yang berbasis sejarah dan budaya secara keseluruhan.*
- Penyusunan perencanaan pembangunan pariwisata secara komprehensif*
- Pengembangan branding kuliner utama pendukung pariwisata Kutai Kartanegara*

Secara detail mengenai Arah Kebijakan pembangunan berdasarkan kewilayahan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.13 *Arah Kebijakan Kewilayahan : Meningkatkan Potensi dan Daya Dukung Pariwisata Daerah serta Kunjungan Wisata di Kutai Kartanegara*

TAHUN 1	KEC	TAHUN 2	KEC	TAHUN 3	KEC	TAHUN 4	KEC	TAHUN 5	KEC
Pelaksanaan festival Erau Penyusunan Branding Pariwisata Kutai Kartanegara	Tenggara-rong	Promosi Festival Erau sbg branding pariwisata KUKAR secara komprehensif	Skala Kabupaten, Regional dan Nasional	Promosi Festival Erau sbg branding pariwisata KUKAR secara komprehensif	Skala Kabupaten, Regional dan Nasional	Promosi Festival Erau sbg branding pariwisata KUKAR secara komprehensif	Skala Kabupaten, Regional dan Nasional	Promosi Festival Erau sbg branding pariwisata KUKAR secara komprehensif	Skala Kabupaten, Regional dan Nasional
Perencanaan festival Erau secara komprehensif untuk pariwisata KUKAR	Skala Kabupaten	Pelaksanaan Festival Erau dan kegiatan festival terkait lainnya di ODTW lain	Tenggara-rong, Muara Kaman, Sebulu, Kota Bangun, Samboja, Sanga-Sanga	Pelaksanaan Festival Erau dan kegiatan festival terkait lainnya di ODTW lain	Tenggara-rong, Muara Kaman, Sebulu, Kota Bangun, Samboja, Sanga-Sanga	Pelaksanaan Festival Erau dan kegiatan festival terkait lainnya di ODTW lain	Tenggara-rong, Muara Kaman, Sebulu, Kota Bangun, Samboja, Sanga-Sanga	Pelaksanaan Festival Erau dan kegiatan festival terkait lainnya di ODTW lain	Tenggara-rong, Muara Kaman, Sebulu, Kota Bangun, Samboja, Sanga-Sanga
Perumusan branding wisata sejarah dan budaya	Skala Kabupaten	Menyusun rencana induk pariwisata berbasis budaya dan sejarah	Skala Kabupaten	Promosi kawasan budaya dan sejarah pada event skala nasional & internasional	Skala Nasional dan Internasional	Promosi kawasan budaya dan sejarah pada event skala nasional & internasional	Skala Nasional dan Internasional	Promosi kawasan budaya dan sejarah pada event skala nasional & internasional	Skala Nasional dan Internasional
Pelaksanaan kajian dan	Seluruh	Pengembangan kluster	Seluruh	Diseminasi hasil	Wilayah Tengah	Diseminasi hasil	Wilayah Hilir	Diseminasi hasil	Wilayah Hulu

TAHUN 1	KEC	TAHUN 2	KEC	TAHUN 3	KEC	TAHUN 4	KEC	TAHUN 5	KEC
penyusunan rencana pengembangan pariwisata kabupaten (RIPPDA)	kecamatan	wisata/perwilayah/antar Kabupaten berbasis potensi	Kecamatan	kajian pengembangan kluster wisata		kajian pengembangan kluster wisata		kajian pengembangan kluster wisata	
Melakukan Kajian penentuan kuliner untuk branding sebagai kuliner khas daerah	Seluruh kecamatan	Menetapkan kuliner jenis tertentu sebagai kuliner khas daerah	Seluruh kecamatan	Promosi kuliner khas daerah	Wilayah tengah	Promosi kuliner khas daerah	Wilayah tengah dan juga Balikpapan, Samarinda dan Jakarta	Promosi kuliner khas daerah	Wilayah tengah dan juga Balikpapan, Samarinda dan Jakarta

2) Pengembangan Kebijakan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang komprehensif

Sektor pariwisata harus dibangun berdasarkan dukungan dari sektor-sektor lain, baik oleh sektor publik lainnya maupun sektor swasta. Sektor pariwisata selain didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan share di PDRB Kabupaten juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar destinasi.

Arah Kebijakan dengan membuat perencanaan yang disusun secara komprehensif dan dapat diimplementasikan. Dukungan kebijakan haruslah pada kebijakan tertinggi pada skala Kabupaten yakni Peraturan Daerah.

Secara detail mengenai Arah Kebijakan pembangunan berdasarkan kewilayahan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.14 Arah Kebijakan Kewilayahan: Pengembangan Kebijakan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang Komprehensif

TAHUN 1	KEC	TAHUN 2	KEC	TAHUN 3	KEC	TAHUN 4	KEC	TAHUN 5	KEC
Melaksanakan kajian dan penyusunan rencana pengembangan pariwisata kabupaten (RIPPDA)	Skala Kabupaten	Menetapkan peraturan daerah perencanaan pariwisata Kukar	Skala Kabupaten	Diseminasi Peraturan Daerah Tentang Pengembangan Pariwisata Kukar	Wil Tengah	Diseminasi Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pariwisata Kukar	Wil Hulu	Diseminasi Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pariwisata Kukar	Wil Hilir
		Kajian potensi eks lokasi tambang sebagai destinasi wisata	Skala Kabupaten	Diseminasi hasil kajian potensi eks tambang pada SKPD terkait	Skala Kabupaten	Kerjasama pemenuhan sarana dan manajemen pengelolaan ODTW kepada stakeholder lokal maupun SKPD terkait	Wil Tengah	Kerjasama pemenuhan sarana dan manajemen pengelolaan ODTW kepada stakeholder lokal maupun SKPD terkait	Wilayah Hilir
				Perumusan Rencana Pengelolaan Eks Tambang sebagai Pengembangan ODTW Baru	Skala Kabupaten	Bimbingan Teknis pengelolaan ODTW eks Tambang	Wil tengah	Bimbingan Teknis pengelolaan ODTW eks Tambang	Wil Hulu
		Pelaksanaan studi multipler effect pariwisata Kukar	Skala Kabupaten	Diseminasi hasil studi dan Bimtek kepada sektor-sektor terkait agar dapat	Wil Tengah	Diseminasi hasil studi dan Bimtek kepada sektor-sektor terkait agar dapat	Wil Hulu	Diseminasi hasil studi dan Bimtek kepada sektor-sektor terkait agar dapat	Wil Hilir

TAHUN 1	KEC	TAHUN 2	KEC	TAHUN 3	KEC	TAHUN 4	KEC	TAHUN 5	KEC
				diimplemen- tasikan		diimplemen- tasikan		diimplemen- tasikan	

3) Pengembangan Pasar Baru dan Revitalisasi Pasar Eksisting

Kunjungan wisatawan ke obyek wisata (ODTW) ataupun ke destinasi wisata belum dikelola dengan baik. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara yang kecenderungan kunjungannya terlihat dalam tabel sebelumnya membuktikan adanya potensi besar untuk menghadirkan lebih besar lagi. Meskipun harus diakui kunjungan wisatawan yang paling besar adalah yang berasal dari penduduk setempat yang bisa jadi telah mengalami kejenuhan. Oleh karenanya perlu dipertimbangkan pengelolaan pasar wisatawan nusantara dari segmen lain yang belum optimal dilakukan, misalnya berbagai segmen lain yang masih dapat dikelola baik wisatawan mancanegara maupun nusantara.

- Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara
- Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara

Secara detail mengenai Arah Kebijakan pembangunan berdasarkan kewilayahan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.15 Arah Kebijakan Kewilayahan Pengembangan Pasar Baru dan Revitalisasi Pasar Eksisting

TAHUN 1	KEC	TAHUN 2	KEC	TAHUN 3	KEC	TAHUN 4	KEC	TAHUN 5	KEC
Melaksanakan kajian dan penyusunan rencana pengembangan pariwisata kabupaten (RIPPDA)	Skala Kabupaten	melaksanakan kajian pemasaran dan kerjasama antar daerah bagi pengembangan kluster pariwisata	Skala Kabupaten	Membangun aliansi pemasaran kluster pariwisata/ODTW bersama antar kabupaten/ wila-yah	Skala Kabupaten	Melakukan promosi bersama pada tingkat Provinsi dan nasional	Skala Kabupaten	Melakukan promosi bersama pada tingkat Provinsi dan nasional	Skala Kabupaten
Melaksanakan kajian dan penyusunan rencana pengembangan pariwisata kabupaten (RIPPDA)	Kabupaten	Pengembangan paket wisata MICE dengan memanfaatkan sarana pada OTDW terpilih	Muarakaman, Tenggarong, Sebulu, Tenggarong Seberang	Mempromosikan fasilitas di OTDW terpilih untuk pengembangan Pariwisata MICE di Kabupaten/Kota sekitar KUKAR dan seluruh stakeholder/ SKPD Kukar	Muarakaman, Tenggarong, Sebulu, Tenggarong Seberang	Mempromosikan fasilitas di OTDW terpilih untuk pengembangan Pariwisata MICE di Kabupaten/Kota sekitar KUKAR dan seluruh stakeholder/SKPD Kukar	Muarakaman, Tenggarong, Sebulu, Tenggarong Seberang	Mempromosikan fasilitas di OTDW terpilih untuk pengembangan Pariwisata MICE di Kabupaten/Kota sekitar KUKAR dan seluruh stakeholder/ SKPD Kukar	Beberapa Kabupaten/kota sekitar Kukar
		Bekerjasama dengan SKPD Pendidikan mengembangkan kurikulum muatan lokal bagi pendidikan dasar untuk pengenalan budaya dan sejarah	Kabupaten	Pengembangan paket buku dan audio video seri budaya dan sejarah destinasi wisata budaya dan promosinya	Kabupaten	Pengembangan paket buku dan audio video seri budaya dan sejarah destinasi wisata budaya dan promosinya	Kabupaten	Pengembangan paket buku dan audio video seri budaya dan sejarah destinasi wisata budaya dan promosinya	Kabupaten
		Bekerjasama dengan SKPD Pendidikan mengembangkan paket wisata pendidikan	Kabupaten	Dukungan bagi SKPD Pendidikan dalam implementasi paket wisata pendidikan bagi	Kabupaten	Dukungan bagi SKPD Pendidikan dalam implementasi paket wisata pendidikan	Kabupaten	Dukungan bagi SKPD Pendidikan dalam implementasi paket wisata	Kabupaten

TAHUN 1	KEC	TAHUN 2	KEC	TAHUN 3	KEC	TAHUN 4	KEC	TAHUN 5	KEC
		bagi murid SD dan SMP se Kabupaten Kukar		murid SD dan SMP se Kabupaten Kukar		bagi murid SD dan SMP se Kabupaten Kukar		pendidikan bagi murid SD dan SMP se Kabupaten Kukar	

4) *Penyediaan Fasilitas dan Sarana ODTW secara Komprehensif*

Penyediaan fasilitas dan sarana ODTW merupakan hal penting untuk mendukung peningkatan kualitas ODTW sekaligus untuk meningkatkan minat dan daya tarik wisatawan berkunjung ke destinasi dimaksud. Penyediaan tersebut dapat dilakukan oleh berbagai pihak, tidak hanya Pemerintah Kabupaten saja, namun juga pihak lain seperti sektor swasta baik melalui kegiatan yang berorientasi pada profit maupun melalui dukungan CSR. Oleh karenanya dalam perencanaan komprehensif yang dituangkan dalam RIPPDA perlu dimasukkan bagaimana sektor swasta dapat berperan.

Untuk fasilitas dan sarana yang secara langsung didukung oleh Pemerintah Kabupaten perlu disusun prioritasnya, terutama yang kurang diminati oleh sektor swasta. Misalnya pengembangan fasilitas dan sarana terkait seni budaya atau penyediaan sarana terkait kepentingan publik didalam destinasi pariwisata.

Sementara untuk mendorong dan meningkatkan minat sektor swasta didalam pengembangan fasilitas dan sarana pendukung ODTW perlu diperjelas atas apa yang dapat dikembangkan oleh sektor swasta. Upaya untuk memperjelas tersebut dapat dilakukan melalui pemberian insentif seperti kebijakan, regulasi maupun yang bersifat fiscal policy seperti tax holiday dan sebagainya. Oleh karenanya kebijakan yang bersifat insentif untuk mendorong peningkatan peran sektor swasta merupakan hal penting yang menjadi prioritas. Arah Kebijakan:

- Pengembangan prasarana bagi dukungan ODTW terpilih*
- Memberi insentif bagi sektor swasta untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata*

Secara detail mengenai Arah Kebijakan pembangunan berdasarkan kewilayahan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.16 Arah Kebijakan Kewilayahan: *Penyediaan Fasilitas dan Sarana ODTW secara Komprehensif*

TAHUN 1	KEC.	TAHUN 2	KEC.	TAHUN 3	KEC.	TAHUN 4	KEC.	TAHUN 5	KEC.
Melaksanakan kajian dan penyusunan rencana pengembangan pariwisata kabupaten (RIPPDA)	Kabupaten	koordinasi pembangunan sarana dan prasarana ODTW kepada SKPD terkait	Tengah: Tenggara, Tenggara Seberang, Sebulu, Muara Kaman	Koordinasi pembangunan prasarana bersama SKPD bidang Pekerjaan Umum (Bina Marga, Cipta Karya, Air Bersih dan Jaringan Listrik) untuk ODTW terpilih di wilayah hilir	Hilir: Samboja, Angana, Sangasanga	Koordinasi pembangunan prasarana bersama SKPD Bidang Pekerjaan Umum (Bina Marga, Cipta Karya, Air bersih dan jaringan listrik) untuk ODTW terpilih di wilayah hulu	Hulu: Kota Bangun, Muara Wis, Keno-han,		
		Menetapkan program pembangunan prasarana dengan SKPD bi-	Tengah: Muara Kaman, Tenggara Seberang,	Menetapkan program pembangunan prasarana dengan SKPD bi-	Hilir: Samboja, Angana, Sangasanga	Menetapkan program pembangunan prasarana dengan SKPD bi-	Hulu: Kota Bangun, Muara Wis, Keno-han,	Melanjutkan program pembangunan prasarana dengan SKPD bi-	Hulu: Kota Bangun, Muara Wis, Keno-han,

TAHUN 1	KEC.	TAHUN 2	KEC.	TAHUN 3	KEC.	TAHUN 4	KEC.	TAHUN 5	KEC.
		dang Pekerjaan Umum (bina marga, cipta karya, air bersih dan jaringan listrik) pada ODTW terpilih di wilayah tengah	Tenggarong, Sebulu,	Pekerjaan Umum (bina marga, cipta karya, air bersih dan jaringan listrik) pada ODTW terpilih di wilayah hilir		dang Pekerjaan Umum (bina marga, cipta karya, air bersih dan jaringan listrik) pada ODTW terpilih di wilayah hulu		Pekerjaan Umum (bina marga, cipta karya, air bersih dan jaringan listrik) pada ODTW terpilih di wilayah hulu	
Penyusunan kebijakan & Rencana Pengembangan Pusat Rekreasi Alam, Budaya dan Sejarah Kabupaten Kukar		Pengembangan Pusat-Pusat Kebudayaan (Waduk Panji Sukarame dan Museum Kayu, Museum Mula-warman)	Tenggarong	Pengembangan fasilitas dan sarana Desa Budaya	Sebulu, Muara Kaman, Kota Bangun, Tenggarong Seberang	Pengembangan Fasilitas dan Sarana Eko Wisata (Arung Jeram, atraksi Pesut - Mahakam, Danau Semayang dll)	Muara Wis, Muara Muntai, Kota Bangun, Muara Kaman		
Menyusun dan menetapkan kebijakan insentif guna meningkatkan ketertarikan sektor swasta dalam pengembangan fasilitas dan sarana pariwisata		Merumuskan paket investasi dan kerjasama dengan sektor swasta dalam pengembangan sarana wisata MICE pada ODTW terpilih di wilayah tengah	Muara Kaman, Tenggarong Seberang, Tenggarong	Merumuskan paket investasi dan kerjasama dengan sektor swasta dalam pengembangan sarana wisata MICE pada ODTW terpilih di wilayah hilir	Samboja, Anggana, Sanga-Sanga	Mengembangkan paket investasi dan kerjasama dengan sektor swasta pengembangan sarana wisata MICE bagi ODTW terpilih di wilayah Hilir	Samboja, Anggana, Sanga-Sanga	Merumuskan paket investasi dan kerjasama dengan sektor swasta dalam pengembangan sarana wisata pada ODTW terpilih di wilayah Hulu	Kota Bangun, Muara Wis, Keno-han,
		Mengembangkan paket investasi dan kerjasama dengan sektor swasta pengembangan sarana wisata MICE bagi ODTW terpilih di wilayah tengah	Muara Kaman, Tenggarong Seberang, Sebulu	melakukan kerjasama operasional dengan pihak swasta pengelolaan sarana pendukung MICE dalam ODTW terpilih di wilayah tengah	Muara Kaman, Tenggarong dan Tenggarong Seberang, Sebulu	melakukan kerjasama operasional dengan pihak swasta pengelolaan sarana pendukung MICE dalam ODTW Hilir	Samboja, Anggana, Sanga-Sanga	melakukan kerjasama operasional dengan pihak swasta pengelolaan sarana pendukung dalam ODTW terpilih di Wilayah Hulu	Kota Bangun, Muara Wis, Keno-han,

5) *Penyiapan Pelaku Usaha Pariwisata Lokal dan Masyarakat sebagai Tuan Rumah Destinasi*

Salah satu keberhasilan pariwisata disatu daerah jika kunjungan wisatawannya meningkat secara terus menerus dan terjadinya multiplier effect secara langsung kepada masyarakat sekitar ODTW. Oleh karenanya posisi masyarakat sebagai tuan rumah merupakan hal penting bagi keberhasilan pembangunan pariwisata Kutai Kartanegara. Arah Kebijakan:

- Peningkatan kompetensi usaha bagi pelaku usaha kepariwisataan*
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata .*
- Peningkatan kapasitas penyedia jasa pariwisata*

Secara detail mengenai dan Arah Kebijakan pembangunan berdasarkan kewilayahan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.17 Arah Kebijakan Kewilayahan: Penyiapan Pelaku Usaha Pariwisata Lokal dan Masyarakat sebagai Tuan Rumah Destinasi.

TAHUN 1	KEC.	TAHUN 2	KEC.	TAHUN 3	KEC.	TAHUN 4	KEC.	TAHUN 5	KEC.
Penyusunan indikator kompetensi bagi SKPD terkait untuk melaksanakan penilaian bagi pelaku usaha kepariwisataan	Kabupaten	Pelaksanaan sertifikasi kompetensi pelaku usaha kepariwisataan	Kabupaten	Pelaksanaan sertifikasi kompetensi pelaku usaha kepariwisataan	Kabupaten	Pelaksanaan sertifikasi kompetensi pelaku usaha kepariwisataan	Kabupaten	Pelaksanaan sertifikasi kompetensi pelaku usaha kepariwisataan	Kabupaten
Melaksanakan kajian dan penyusunan rencana pengembangan pariwisata kabupaten (RIPPDA)	Kabupaten	kampanye Sapta Pesona dan Pendidikan kritis peran warga dalam pariwisata	Wilayah tengah	kampanye Sapta Pesona dan Pendidikan kritis peran warga dalam pariwisata	Wilayah tengah	kampanye Sapta Pesona dan Pendidikan kritis peran warga dalam pariwisata	Wilayah tengah dan hilir	kampanye Sapta Pesona dan Pendidikan kritis peran warga dalam pariwisata	wilayah tengah, hilir dan hulu
		Pengembangan kelompok sadar wisata sebagai basis bagi pengembangan pariwisata berbasis komunitas	Wilayah Tengah	Pengembangan kelompok sadar wisata sebagai basis bagi pengembangan pariwisata berbasis komunitas	Wilayah tengah	Pengembangan kelompok sadar wisata sebagai basis bagi pengembangan pariwisata berbasis komunitas	Wilayah tengah dan hilir	Pengembangan kelompok sadar wisata sebagai basis bagi pengembangan pariwisata berbasis komunitas	wilayah tengah, hilir dan hulu
Melaksanakan kajian dan penyusunan rencana pengembangan pariwisata kabupaten (RIPPDA)	Kabupaten	Pengembangan paket pelatihan bagi front line pelaku pariwisata level elementary	Kabupaten	Pengembangan paket pelatihan bagi front line pelaku pariwisata level intermediate	Kabupaten	Pengembangan paket pelatihan bagi front line pelaku pariwisata level advance	Kabupaten		
Perumusan regulasi daerah bagi peningkatan kapasitas penyedia layanan wisata	Kabupaten	Kerjasama dengan sektor swasta pelaku pariwisata (Hotel, restoran, Travel agent, asosiasi guide, dsbnya) untuk mengadakan pelatihan front line pelaku pariwisata level elementary	Wilayah tengah	Kerjasama dengan sektor swasta pelaku pariwisata (Hotel, restoran, Travel agent, asosiasi guide, dsbnya) untuk mengadakan pelatihan front line pelaku pariwisata level elementary dan intermediate	Wilayah tengah	Kerjasama dengan sektor swasta pelaku pariwisata (Hotel, restoran, Travel agent, asosiasi guide, dsbnya) untuk mengadakan pelatihan front line pelaku pariwisata level elementary, intermediate dan advance	Wilayah tengah dan hilir	Kerjasama dengan sektor swasta pelaku pariwisata (Hotel, restoran, Travel agent, asosiasi guide, dsbnya) untuk mengadakan pelatihan front line pelaku pariwisata level elementary, intermediate dan advance	wilayah tengah, hilir dan hulu

6) Optimalisasi Peningkatan Nilai Tambah Usaha Jasa dan Produksi Kreatif Pendukung Pariwisata

Usaha ekonomi kreatif didorong untuk menjadi bagian dari pengembangan usaha kepariwisataan dengan investasi rendah yang akan memberikan nilai tambah lebih baik, karena melalui proses kreatif. Pemerintah Daerah perlu mendukung berbagai proses kreatif yang akan memberikan nilai tambah tinggi. Oleh karenanya diperlukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan

peran usaha ekonomi kreatif di Kutai Kartanegara. Arah Kebijakan:

- Peningkatan kapasitas dan peran pusat komunitas kreatif*
- Pengembangan pasar dan pemasaran usaha ekonomi kreatif*
- Promosi melalui event-event di daerah secara reguler untuk mempromosikan ekonomi kreatif*

Secara detail mengenai Arah Kebijakan pembangunan berdasarkan kewilayahan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.18 Arah Kebijakan Kewilayahan: Optimalisasi Peningkatan Nilai Tambah Usaha Jasa dan Produksi Kreatif Pendukung Pariwisata

Tahun 1	Kec.	Tahun 2	Kec.	Tahun 3	Kec.	Tahun 4	Kec.	Tahun 5	Kec.
Optimalisasi fungsi pusat komunitas kreatif	Sanga-Sanga	Pengadaan berbagai peralatan pendukung pusat komunitas kreatif	Sanga-Sanga	Pengiriman peserta terpilih untuk ikut kegiatan peningkatan kapasitas kegiatan ekonomi kreatif tingkat Provinsi dan Nasional	Wil teng-gah	Pengiriman peserta terpilih untuk ikut kegiatan peningkatan kapasitas kegiatan ekonomi kreatif tingkat Provinsi dan Nasional	Wil Hilir	Pengiriman peserta terpilih untuk ikut kegiatan peningkatan kapasitas kegiatan ekonomi kreatif tingkat Provinsi dan Nasional	Wil hulu
Pengembangan paket pelatihan dan pendidikan usaha ekonomi kreatif	Sanga-Sanga	Pengembangan paket pelatihan dan pendidikan usaha ekonomi kreatif	Sanga-Sanga	Pengembangan paket pelatihan dan pendidikan usaha ekonomi kreatif	Tenggara dan Kota bangun	Pengembangan paket pelatihan dan pendidikan usaha ekonomi kreatif	Tenggara, Kota bangun dan Sanga-anga	Pengembangan paket pelatihan dan pendidikan usaha ekonomi kreatif	Tenggara, Kota bangun dan Sanga-anga
Kajian peluang pengembangan dan profil usaha ekonomi kreatif Kabupaten Kutai Kartanegara dan sekitarnya	Skala Kabupaten dan sekitarnya	Bimbingan teknis bagi pelaku usaha ekonomi kreatif untuk pengembangan pasar dan pemasaran ekonomi kreatif	Wilayah tengah	Bimbingan teknis bagi pelaku usaha ekonomi kreatif untuk pengembangan pasar dan pemasaran ekonomi kreatif	Wilayah hilir	Bimbingan teknis bagi pelaku usaha ekonomi kreatif untuk pengembangan pasar dan pemasaran ekonomi kreatif	Wilayah hulu	Bimbingan teknis bagi pelaku usaha ekonomi kreatif untuk pengembangan pasar dan pemasaran ekonomi kreatif	Wilayah tengah
Penyusunan marketing kits kegiatan ekonomi kreatif potensial di Kutai Kartanegara	Kabupaten	pengembangan market place untuk pilot project kegiatan ekonomi kreatif digitalization, Communication and Visualization Development, art design and creativity product	Wilayah tengah	pengembangan market place untuk pilot project kegiatan ekonomi kreatif digitalization, Communication and Visualization Development, art design and creativity product	Wilayah hilir	pengembangan market place untuk pilot project kegiatan ekonomi kreatif digitalization, Communication and Visualization Development, art design and creativity product	Wilayah tengah dan hilir	pengembangan market place untuk pilot project kegiatan ekonomi kreatif digitalization, Communication and Visualization Development, art design and creativity product	wilayah hulu

Tahun 1	Kec.	Tahun 2	Kec.	Tahun 3	Kec.	Tahun 4	Kec.	Tahun 5	Kec.
Promosi kegiatan ekonomi kreatif pada berbagai event-event daerah maupun regional	-	Promosi kegiatan ekonomi kreatif pada berbagai event-event daerah maupun regional	-	Promosi kegiatan ekonomi kreatif pada berbagai event-event daerah maupun regional	-	Promosi kegiatan ekonomi kreatif pada berbagai event-event daerah maupun regional	-	Promosi kegiatan ekonomi kreatif pada berbagai event-event daerah maupun regional	-

6.4.3. Meningkatkan Pengembangan Seni dan Budaya Lokal Dalam Rangka Mendukung Destinasi Wisata dan Kelestarian Tradisi Kehidupan Masyarakat

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1) Revitalisasi Seni Budaya Guna Mendukung Sektor Pariwisata

Seni budaya yang sekarang berkembang perlu ditingkatkan kualitas ekspresinya dan disesuaikan dengan keadaan masa kini. Revitalisasi seni budaya agar dapat lebih dipahami sebagai bagian dari ekspresi seni budaya masyarakat dan sekaligus meningkatkan kualitasnya sebagai bagian dari daya tarik daerah. Arah Kebijakan:

- Pengembangan fasilitas pertunjukan seni budaya sebagai wadah apresiasi masyarakat.
- Peningkatan kapasitas dan performa pelaku seni budaya di daerah.
- Peningkatan performa Pusat-Pusat Kebudayaan untuk mendorong revitalisasi seni budaya Kutai Kartanegara.

Secara detail mengenai Arah Kebijakan pembangunan berdasarkan kewilayahan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.19 Arah Kebijakan Kewilayahan: Meningkatkan Pengembangan Seni dan Budaya Lokal Dalam Rangka Mendukung Destinasi Wisata dan Kelestarian Tradisi Kehidupan Masyarakat

TAHUN 1	KEC	TAHUN 2	KEC	TAHUN 3	KEC	TAHUN 4	KEC	TAHUN 5	KEC
Penyusunan DED Gedung Pertunjukan dan Seni	Tenggarong	Pembangunan Gedung Pertunjukan dan Seni tahap 1	Tenggarong	Pembangunan Gedung Pertunjukan dan Seni Tahap 2	Tenggarong	-	-	-	-
Pelatihan dan dukungan peralatan dan kelengkapan seni dan budaya secara regular bagi remaja dan pemuda	Wilayah Tengah	Pelatihan dan dukungan peralatan dan kelengkapan seni dan budaya secara regular bagi remaja dan pemuda	Wilayah Hulu	Pelatihan dan dukungan peralatan dan kelengkapan seni dan budaya secara regular bagi remaja dan pemuda	Wilayah Hilir	Pelatihan dan dukungan peralatan dan kelengkapan seni dan budaya secara regular bagi remaja dan pemuda	Wilayah Tengah	Pelatihan dan dukungan peralatan dan kelengkapan seni dan budaya secara regular bagi remaja dan pemuda	Wilayah Hulu
Pelatihan dan dukungan peralatan dan kelengkapan seni dan budaya secara	Wilayah Tengah	Pelatihan dan dukungan peralatan dan kelengkapan seni dan budaya secara	Wilayah Hulu	Pelatihan dan dukungan peralatan dan kelengkapan seni dan budaya secara	Wilayah Hilir	Pelatihan dan dukungan peralatan dan kelengkapan seni dan budaya secara	Wilayah Tengah	Pelatihan dan dukungan peralatan dan kelengkapan seni dan budaya secara	Wilayah Hulu

TAHUN 1	KEC	TAHUN 2	KEC	TAHUN 3	KEC	TAHUN 4	KEC	TAHUN 5	KEC
regular bagi remaja dan pemuda		regular bagi remaja dan pemuda		regular bagi remaja dan pemuda		regular bagi remaja dan pemuda		regular bagi remaja dan pemuda	
Pemberian dukungan hardware dan software bagi pusat kebudayaan	Pulau Kumala, Tenggaring	Pemberian dukungan hardware dan software bagi pusat kebudayaan	Waduk Panji, Tenggaring	Pemberian dukungan hardware dan software bagi pusat kebudayaan	Kedaton, Tenggaring	Pelatihan manajemen pusat kebudayaan	Tenggaring	Pelatihan manajemen pusat kebudayaan	Tenggaring

6.4.4. Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Industri Kreatif dan Potensi Daerah

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan Kelembagaan Koperasi dan UKM, dengan arah kebijakan:
 - a) *Pendataan, pembinaan, dan fasilitasi kegiatan Koperasi dan UKM setiap tahun*
 - b) *Peningkatan SDM pengurus koperasi dan UKM aktif*
- 2) Fasilitasi Ekspansi Pasar, dengan arah kebijakan:
 - a) *Promosi produk unggulan UKM*
 - b) *Pengembangan kerjasama dengan pihak bank dan dunia usaha sebagai market partnership*
 - c) *Pengembangan core business baru dan potensial yang terpadu dengan sektor pertanian dan pariwisata*
 - d) *Pengembangan pusat informasi produk unggulan daerah berbasis IT*
 - e) *Penyediaan sarana dan prasarana bagi UKM di kawasan potensial seperti kawasan pariwisata, pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya.*

6.4.5. Meningkatkan Akses, Tata Niaga, dan Infrastruktur Perdagangan Antar Wilayah dan Antar Daerah

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Revitalisasi Pasar Daerah, dengan arah kebijakan:
 - a) *Pembangunan dan rehabilitasi pasar daerah*
 - b) *Penyediaan sarana dan prasarana outlet perdagangan*
 - c) *Penguatan sisten pengelolaan pasar yang terintegrasi dengan pusat atau sentra produk unggulan*
- 2) Pengembangan Kerjasama Perdagangan Antar Daerah, dengan arah kebijakan:
 - a) *Penyusunan kajian, kebijakan, dan regulasi kerjasama perdagangan antar daerah*
 - b) *Mapping potensi produk unggulan daerah untuk kegiatan perdagangan lintas daerah*
 - c) *Pengendalian, pengawasan, dan monitoring kegiatan keluar masuk produk di sektor perdagangan*

6.4.6. Meningkatkan Pengembangan Industri Pengolahan Pangan, Peternakan, Perikanan, Pengolahan Pakan, dan Potensi Daerah yang Berdaya Saing

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Agroindustri, dengan arah kebijakan:

- a) Pengembangan industri pengolah sebagai support system di sektor pertanian dalam arti luas
 - b) Pengembangan industri pasca panen produksi pertanian
- 2) Fasilitas Pengembangan Industri Dalam dan Luar Negeri, dengan arah kebijakan:
- a) Dukungan kebijakan bagi pengembangan industri potensial yang akan menyerap tenaga kerja skala besar
 - b) Fasilitasi kegiatan industri dengan informasi ketersediaan bahan baku dan pelaku usaha masyarakat

6.5. PEMBANGUNAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK

Pembangunan dan Pemerataan infrastruktur Pelayanan Publik, difokuskan dalam rangka mencapai tujuan untuk Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah.

6.5.1. Meningkatnya Interkoneksi Antar Wilayah

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1) Penguatan dan Penambahan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, konektivitas antar wilayah harus ditingkatkan. Masih banyak wilayah yang terpencil dan susah diakses karena kondisi jaringan jalan dan jembatan yang kurang memadai. Oleh karena itu pembangunan dan peningkatan jaringan jalan harus dilakukan untuk meningkatkan aktivitas masyarakat dan memudahkan mereka dalam menjangkau fasilitas dasar dan umum. Tidak hanya fokus dalam pembangunan jalan dan jembatan, namun interkoneksi jalan tembus desa menjadi fokus pembangunan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Interkoneksi jalan tembus desa ini adalah melaksanakan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan jalan tembus desa dan antar desa. Arah Kebijakan:

- a) Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan;
- b) Interkoneksi jalan tembus desa

Secara detail mengenai Arah Kebijakan pembangunan berdasarkan kewilayahan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.20 Arah Kebijakan Kewilayahan: Meningkatnya Interkoneksi Antar Wilayah

TAHUN 1	KEC.	TAHUN 2	KEC.	TAHUN 3	KEC.	TAHUN 4	KEC.	TAHUN 5	KEC.
Mem- bangun dan mening- katkan in- fra- struktur jalan dan jembatan	Keno- han,Kem- bang janggut, Tabang,Mua ra muntai dan Muara wis	Membangun dan mening- katkan in- fra- struktur jalan dan jem- batan	Ang- gana	Mem- bangun dan mening- katkan in- fra- struktur jalan dan jembatan	Sam- boja	Mem- bangun dan mening- katkan in- frastruktur jalan dan jembatan	Loa Janan	Mem- bangun dan mening- katkan in- frastruktur jalan dan jembatan	Sanga- sanga
Inter- koneksi jalan tem- bus desa	Kabupaten Kukar	Interkoneksi- tas jalan tembus desa	Kabu- paten Kukar	Inter- koneksi jalan tem- bus desa	Kabu- paten Kukar	Inter- koneksi- tas jalan tembus desa	Kabu- paten Kukar	Inter- koneksi jalan tem- bus desa	Kabu- paten Kukar

6.5.2. Meningkatnya Aksesibilitas Antar Wilayah Serta Kualitas Pelayanan Perhubungan

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Revitalisasi Layanan Transportasi Publik; dengan arah kebijakan:

- Pengembangan jasa layanan transportasi kota yang menghubungkan ke sentra pertanian, kawasan khusus, destinasi pariwisata, dan outlet perdagangan.*
- Pengembangan layanan transportasi yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara*
- Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan khususnya yang berkaitan dengan transportasi publik*

Secara detail mengenai Arah Kebijakan pembangunan berdasarkan kewilayahan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.21 Arah Kebijakan Kewilayahan: Meningkatnya Aksesibilitas Antar Wilayah serta Kualitas Pelayanan Perhubungan

TAHUN 1	KEC.	TAHUN 2	KEC.	TAHUN 3	KEC.	TAHUN 4	KEC.	TAHUN 5	KEC.
Pengembangan jasa layanan transportasi kota (dermaga)	Kelurahan Tuana Tuha Kecamatan Keno-han	Pengembangan jasa layanan transportasi kota (dermaga)	Kelurahan Pendingin Kecamatan Sanga Sanga	Pengembangan jasa layanan transportasi kota (dermaga)	Kelurahan Dondang Kecamatan Muara Jawa	Pengembangan jasa layanan transportasi kota ke sentra pertanian	Kecamatan Kota Bangun (lumbung padi), Muara Badak (ren. Dermaga), Loa Kulu dan Loa Janan (pengembangan bibit)	Pengembangan jasa layanan transportasi kota ke sentra pertanian	Kota Bangun (lumbung padi)
Pengembangan layanan transportasi kota	Wilayah Tengah	Pengembangan layanan transportasi kota	Wilayah Tengah	Pengembangan layanan transportasi kota	Wilayah Tengah dan Hilir	Pengembangan layanan transportasi kota	Wilayah Hilir dan Hulu	Pengembangan layanan transportasi kota	Wilayah Hulu
Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berhubungan dengan transportasi publik	Wilayah Tengah	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berhubungan dengan transportasi publik	Wilayah Tengah	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berhubungan dengan transportasi publik	Wilayah Tengah dan Hilir	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berhubungan dengan transportasi publik	Wilayah Hilir dan Hulu	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berhubungan dengan transportasi publik	Wilayah Hulu

6.5.3. Terwujudnya koneksitas jaringan komunikasi, internet, dan pengembangan kawasan smart city

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Konektivitas Jaringan Telekomunikasi

Di era teknologi ini, pengembangan *smart city* dianggap mampu membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Pengembangan *smart city* tidak hanya akan fokus dalam penyediaan akses internet bagi masyarakat tetapi juga pengembangan aplikasi yang mampu membantu pemerintah setempat untuk mengetahui berbagai potensi dan permasalahan pembangunan yang ada secara cepat. Sehingga apabila terjadi permasalahan pembangunan

dapat segera diatasi. Arah kebijakan:

- a) *Memperluas jaringan internet yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara*
- b) *Pengembangan dan pembangunan tower pintar*

2) Pengembangan sistem informasi terintegrasi; dengan arah kebijakan:

- a) *Pembangunan aplikasi informasi terintegrasi*
- b) *Pengembangan layanan berbasis online*

Secara detail mengenai Arah Kebijakan pembangunan berdasarkan kewilayahan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.22 Arah Kebijakan Kewilayahan: Terwujudnya koneksitas jaringan komunikasi, internet, dan pengembangan kawasan smart city

TAHUN 1	KEC.	TAHUN 2	KEC.	TAHUN 3	KEC.	TAHUN 4	KEC.	TAHUN 5	KEC.
Memperluas jaringan internet untuk publik	Wilayah Tengah	Memperluas jaringan internet untuk publik	Wilayah Tengah	Memperluas jaringan internet untuk publik	Wilayah Tengah	Memperluas jaringan internet untuk publik	Wilayah Tengah, Hilir, dan Hulu	Memperluas jaringan internet untuk publik	Wilayah Tengah, Hilir, dan Hulu
Pengembangan Rencana Tower Pintar	Tenggarong	Pembangunan Tower Pintar	Wilayah Tengah	Pembangunan Tower Pintar	Wilayah Tengah dan Hilir	Pembangunan Tower Pintar	Wilayah Tengah, Hilir, dan Hulu	Pembangunan Tower Pintar	Wilayah Tengah, Hilir, dan Hulu
Penyusunan Grand Design Smart City	Kabupaten Kukar	Penyediaan kebijakan dan payung hukum pembangunan smart city	Kabupaten Kukar	Pengembangan aplikasi sistem informasi terpadu	Kabupaten Kukar	Pengembangan aplikasi sistem informasi terpadu	Kabupaten Kukar	Pengembangan aplikasi sistem informasi terpadu	Kabupaten Kukar
-	-	-	-	Pengembangan pelayanan online	Kabupaten Kukar	Pengembangan pelayanan online	Kabupaten Kukar	Pengembangan pelayanan online	Kabupaten Kukar

6.5.4. Meningkatkan Layanan Kebutuhan Dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan Dan Perdesaan

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Permukiman.

Penyediaan sarana dan prasarana permukiman akan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang bertempat tinggal disekitarnya. Air bersih menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, masyarakat berhak mendapatkan akses terhadap air bersih. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya agar masyarakatnya dapat memperoleh akses terhadap air bersih. Dibeberapa wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara, air bersih disediakan melalui PDAM. Kedepan, pemerintah berupaya agar penyediaan air bersih dapat diinisiasi oleh masyarakat setempat khususnya bagi mereka yang bertempat tinggal di wilayah terpencil melalui pengelolaan air bersih yang berbasis masyarakat. Dengan demikian pelayanan air minum dapat terpenuhi sehingga kebutuhan air bersih masyarakat dapat terakses dengan baik.

Seiring dengan meningkatkan jumlah penduduk, pengelolaan persampahan menjadi sangat penting untuk segera dilaksanakan. Sampah apabila tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan permasalahan, mengganggu kesehatan dan berpotensi menurunkan kualitas lingkungan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menyusun perencanaan pengelolaan persampahan yang dapat melayani seluruh penduduk. Sampah ini tidak hanya dikelola oleh pemerintah, namun kedepan masyarakat harus terlibat dalam pengelolaannya.

Untuk mendapatkan akses terhadap sanitasi yang baik, tidak hanya pengelolaan persampahan yang harus diperhatikan, pengelolaan limbah rumah tangga dan drainase juga perlu diperhatikan karena merupakan bagian dari pengelolaan sanitasi. Limbah rumah tangga apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan pencemaran lingkungan dan berpotensi menimbulkan kawasan kumuh. Di wilayah bantaran sungai dan laut, pengelolaan air limbah perlu diperhatikan. Sistem pengelolaan air limbah harus memperhatikan karakteristik wilayahnya dan sebaiknya melibatkan masyarakat setempat.

Kondisi saluran drainase di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu di Kecamatan Tenggarong dan Tenggarong Seberang saat ini pada umumnya kurang berfungsi dengan baik. Hal ini disebabkan karena adanya penyumbatan pada saluran oleh sampah dan endapan lumpur. Kondisi ini pada saat musim penghujan menyebabkan air dalam selokan meluap dan menimbulkan genangan air dan banjir setempat yang tentu saja akan berdampak pada kesehatan masyarakat sendiri. Arah Kebijakan:

- Pembangunan dan peningkatan ketersediaan air bersih;*
- Peningkatan pengelolaan persampahan yang dapat melayani seluruh penduduk;*
- Pembangunan dan peningkatan pengelolaan limbah rumah tangga;*
- Peningkatan pengelolaan drainase*

Secara detail mengenai Arah Kebijakan pembangunan berdasarkan kewilayahan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.23 Arah Kebijakan Kewilayahan: *Meningkatnya Layanan Kebutuhan Dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan*

TAHUN 1	KEC.	TAHUN 2	KEC.	TAHUN 3	KEC.	TAHUN 4	KEC.	TAHUN 5	KEC.
Peningkatan ketersediaan air bersih	Kecamatan Tenggarong Seberang, Tenggarong, Loa Kulu	Pembangunan dan peningkatan ketersediaan air bersih	Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Marangkayu, Muara Wis, Marangkayu, Kembang Janggut	Pembangunan dan peningkatan ketersediaan air bersih	Kecamatan Sebulu, Anggana, Muara Badak	Pembangunan dan peningkatan ketersediaan air bersih	Kota Bangun, Loa Janan, Samboja, Sangasanga	Pembangunan dan peningkatan ketersediaan air bersih	Kecamatan Kembang Janggut, Muara Wis, Muara Jawa
Peningkatan pengelolaan persampahan yang dapat melayani seluruh penduduk	Kecamatan Tenggarong	Peningkatan pengelolaan persampahan yang dapat melayani seluruh penduduk	Kecamatan Tenggarong	Pembangunan sarana dan prasarana persampahan	Kecamatan Muara Badak, Loa Janan	Peningkatan infrastruktur pengelolaan persampahan	Kecamatan Muara Badak, Loa Janan	Peningkatan infrastruktur pengelolaan persampahan	seluruh kecamatan
Pembangunan dan peningkatan pengelolaan limbah rumah tangga	Kecamatan Samboja	Pembangunan dan peningkatan pengelolaan limbah rumah tangga	Kecamatan Muara Jawa	Pembangunan dan peningkatan pengelolaan limbah rumah tangga	Kecamatan Sangasanga	Pembangunan dan peningkatan pengelolaan limbah rumah tangga	Kecamatan Anggana	Pembangunan dan peningkatan pengelolaan limbah rumah tangga	Muara Badak

TAHUN 1	KEC.	TAHUN 2	KEC.	TAHUN 3	KEC.	TAHUN 4	KEC.	TAHUN 5	KEC.
Peningkatan pengelolaan drainase	Kecamatan Tenggarong Seberang, Sebulu, Muara Kaman, Muara Badak, Kota Bangun	Peningkatan pengelolaan drainase	Kecamatan Tenggarong dan Tenggarong Seberang	Peningkatan pengelolaan drainase	Kecamatan Tenggarong dan Tenggarong Seberang	Peningkatan pengelolaan drainase	Kecamatan Tenggarong dan Tenggarong Seberang	Peningkatan pengelolaan drainase	Kecamatan Tenggarong dan Tenggarong Seberang

6.6. PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN

Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan, difokuskan dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

6.6.1. Meningkatkan Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Serta Pengendalian Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan Penataan Ruang yang Berkelanjutan dan Berdampak pada Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam; dengan arah kebijakan:

- Penetapan kawasan khusus
- Penetapan kawasan strategis kabupaten
- Penataan kawasan kumuh

2) Revitalisasi Sungai; dengan arah kebijakan:

- Pengendalian dan konservasi sungai
- Pemanfaatan DAS
- Konservasi flora dan fauna

3) Pemulihan Lingkungan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam termasuk Kegiatan Pertambangan dan Penggalian yang berdampak pada Pencemaran Lingkungan

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, banyak lahan-lahan bekas tambang setelah selesai dieksploitasi ditinggalkan dan dibiarkan. Lahan-lahan ini memang membutuhkan waktu yang lama untuk dapat subur kembali. Untuk mencegah dan mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan maka kedepan perlu ada regulasi yang mengatur hal tersebut serta program-program yang mewajibkan setiap perusahaan untuk lebih arif terhadap lingkungan dengan tidak membuang limbah yang berpotensi merusak dan mencemari lingkungan. Arah Kebijakan:

- Konservasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang;
- Pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup
- Pengembangan Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam
- Pengembangan dan Peningkatan Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

4) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup; dengan arah kebijakan:

- Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok sadar lingkungan
- Membangun kerjasama antara masyarakat dengan dunia usaha

5) Pengembangan Nilai Tambah Sumber Daya Alam sebagai potensi Unggulan Baru

Kegiatan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara yang lebih banyak bertumpu pada sektor pertambangan, menjadikan sektor-sektor yang lain belum dapat dikembangkan secara optimal.

Potensi sumber daya alam lainnya masih banyak yang belum tergarap dengan baik. Pengembangan sumberdaya alam lainnya dapat dilakukan dengan meningkatkan nilai tambahnya. Oleh karenanya, optimalisasi sumber daya alam pada berbagai sektor perlu dikerjakan untuk pembangunan lima tahun mendatang sehingga dapat menghasilkan produk unggulan baru dan menyumbang perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara. Arah Kebijakan:

- Pengembangan nilai tambah sumber daya alam;*
- Pengembangan produk unggulan baru*

Secara detail mengenai Arah Kebijakan pembangunan berdasarkan kewilayahan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.24 Arah Kebijakan Kewilayahan: Meningkatnya Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Serta Pengendalian Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan

TAHUN 1	KEC.	TAHUN 2	KEC.	TAHUN 3	KEC.	TAHUN 4	KEC.	TAHUN 5	KEC.
Penetapan kawasan khusus	Kabupaten Kukar	Penetapan kawasan khusus	Kabupaten Kukar	Penetapan kawasan khusus	Kabupaten Kukar	Terse-dianya regulasi dan payung hukum kawasan khusus	Kabupaten Kukar	Terse-dianya regulasi dan payung hukum kawasan khusus	Kabupaten Kukar
Penetapan kawasan strategis kabupaten	Tenggarong dan Tenggarong Seberang	Penetapan kawasan strategis kabupaten	Tenggarong dan Tenggarong Seberang	Penetapan kawasan Segitiga Kekembangan	Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang	Penetapan produk unggulan kawasan strategis	Tenggarong dan Tenggarong Seberang	Penetapan produk unggulan kawasan strategis	Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang
Penataan Kawasan Kumuh	Tenggarong dan Tenggarong Seberang	Penataan Kawasan Kumuh	Tenggarong dan Tenggarong Seberang	Penataan Kawasan Kumuh	Kabupaten Kukar	Penataan Kawasan Kumuh	Kabupaten Kukar	Penataan Kawasan Kumuh	Kabupaten Kukar
Pengendalian Pencemaran	Kabupaten Kukar	Pengendalian Pencemaran	Kabupaten Kukar	Pengendalian dan konservasi sungai	Kabupaten Kukar	Pengendalian dan konservasi sungai	Kabupaten Kukar	Pengendalian dan konservasi sungai	Kabupaten Kukar
Konservasi kawasan tangkapan air hujan	Kabupaten Kukar	Konservasi kawasan tangkapan air hujan	Kabupaten Kukar	Pemanfaatan DAS	Kabupaten Kukar	Pemanfaatan DAS	Kabupaten Kukar	Pemanfaatan DAS	Kabupaten Kukar
Konservasi flora dan fauna	Sungai Mahakam	Konservasi flora dan fauna	Sungai Mahakam	Konservasi flora dan fauna	Sungai Mahakam	Konservasi flora dan fauna	Sungai Mahakam	Konservasi flora dan fauna	Sungai Mahakam
Konservasi lahan bekas tambang	Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Sebulu	Konservasi lahan bekas tambang	Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Sebulu	Rehabilitasi lahan bekas tambang	Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Sebulu	Rehabilitasi lahan bekas tambang	Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Sebulu	Rehabilitasi lahan bekas tambang	Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Sebulu
Pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup	Kabupaten Kukar	Pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup	Kabupaten Kukar	Pengedalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup	Kabupaten Kukar	Pengedalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup	Kabupaten Kukar	Pengedalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup	Kabupaten Kukar

TAHUN 1	KEC.	TAHUN 2	KEC.	TAHUN 3	KEC.	TAHUN 4	KEC.	TAHUN 5	KEC.
Pengembangan sistem pengelolaan sumber daya alam	Kabupaten Kukar	Pengembangan sistem pengelolaan sumber daya alam	Kabupaten Kukar	Pengembangan sistem pengelolaan sumber daya alam	Kabupaten Kukar	Pengembangan sistem pengelolaan sumber daya alam	Kabupaten Kukar	Pengembangan sistem pengelolaan sumber daya alam	Kabupaten Kukar
Pengembangan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Kabupaten Kukar	Pengembangan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Kabupaten Kukar	Peningkatan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Kabupaten Kukar	Peningkatan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Kabupaten Kukar	Peningkatan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Kabupaten Kukar
Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok sadar wisata	Kabupaten Kukar	Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok sadar wisata	Kabupaten Kukar	Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok sadar wisata	Kabupaten Kukar	Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok sadar wisata	Kabupaten Kukar	Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok sadar wisata	Kabupaten Kukar
Mem bangun kerjasama antara masyarakat dengan dunia usaha	Kabupaten Kukar	Mem bangun kerjasama antara masyarakat dengan dunia usaha	Kabupaten Kukar	Pengembangan kerjasama antara masyarakat dan dengan dunia usaha	Kabupaten Kukar	Pengembangan kerjasama antara masyarakat dan dengan dunia usaha	Kabupaten Kukar	Peningkatan kerjasama antara masyarakat dan dengan dunia usaha	Kabupaten Kukar
Pengembangan produk unggulan baru	Loa Janan (ternak sapi dan industri turunannya)	Pengembangan produk unggulan baru	Loa Janan (ternak sapi dan industri turunannya)	Pengembangan produk unggulan baru	Loa Janan (ternak sapi dan industri turunannya)	Peningkatan nilai tambah produk unggulan baru	Loa Janan (ternak sapi dan industri turunannya)	Peningkatan nilai tambah produk unggulan baru	Loa Janan (ternak sapi dan industri turunannya)
Pengembangan nilai tambah sumber daya alam	Kabupaten Kukar	Pengembangan nilai tambah sumber daya alam	Kabupaten Kukar	Pengembangan nilai tambah sumber daya alam	Kabupaten Kukar	Pengembangan nilai tambah sumber daya alam	Kabupaten Kukar	Pengembangan nilai tambah sumber daya alam	Kabupaten Kukar

6.6.2. Meningkatnya Ketersediaan Sumber Energi Baru dan Terbarukan

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan jaringan listrik ke seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara; dengan arah kebijakan:

- Pembangunan jaringan listrik baru bagi wilayah yang belum terjangkau listrik.
- Pembangunan sarana dan prasarana kelistrikan.
- Pengembangan sumber energi alternatif berbasis potensi lokal

Secara detail mengenai Arah Kebijakan pembangunan berdasarkan kewilayahan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.25 Arah Kebijakan Kewilayahan: Meningkatnya Ketersediaan Sumber Energi Baru dan Terbarukan

TAHUN 1	KEC.	TAHUN 2	KEC.	TAHUN 3	KEC.	TAHUN 4	KEC.	TAHUN 5	KEC.
Pengembangan Energi bagi wilayah yang	Kabupaten Kukar.	-	-	-	-	-	-	-	-

TAHUN 1	KEC.	TAHUN 2	KEC.	TAHUN 3	KEC.	TAHUN 4	KEC.	TAHUN 5	KEC.
belum terjangkau listrik									
Pembangunan sarana dan prasarana kelistrikan	Kabupaten Kukar	Pembangunan sarana dan prasarana kelistrikan	Kabupaten Kukar	Pembangunan sarana dan prasarana kelistrikan	Kabupaten Kukar	Pembangunan sarana dan prasarana kelistrikan	Kabupaten Kukar	Pembangunan sarana dan prasarana kelistrikan	Kabupaten Kukar
Pengembangan sumber energi alternatif berbasis potensi lokal.	Kec. Muara Kaman (Mena-mang Kanan, Mena-mang Kiri, Kupang Baru).	Pengembangan sumber energi alternatif berbasis potensi lokal.	Kec. Muara Wis, Kec. Anggana (Sepatin), Kec. Kenohan (Lamin Teliha).	Pengembangan sumber energi alternatif berbasis potensi lokal.	Kecamatan Loa Kulu dan Kec Lain	Pengembangan sumber energi alternatif berbasis potensi lokal.	Kecamatan Ma-rangkayu dan Kec Lain	Pengembangan sumber energi alternatif berbasis potensi lokal.	Kecamatan Muara Badak dan Kec Lain

6.7. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, difokuskan dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatnya peran serta perempuan di segala bidang pembangunan dan perlindungan anak.

6.7.1. Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Perempuan Membangun, Kualitas Kesenjangan Gender, dan Perlindungan Perempuan Dan Anak

Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, maka Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesempatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, dengan arah kebijakan:
 - a) *Pembinaan kelompok-kelompok perempuan*
 - b) *Optimalisasi kesempatan usaha produktif bagi perempuan berbasis kelompok*
 - c) *Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dan pelecehan*
 - d) *Peningkatan arus komunikasi kelompok perempuan melalui forum kelompok perempuan*
 - e) *Dukungan kebijakan terkait gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah*
- 2) Meningkatkan perlindungan anak, dengan arah kebijakan:
 - a) *Optimalisasi tim terpadu terkait perlindungan anak*
 - b) *Pemantauan dan pengawasan kegiatan dimasyarakat yang berpotensi terjadi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak*

Secara detail mengenai Arah Kebijakan pembangunan berdasarkan kewilayahan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.26 Arah Kebijakan Kewilayahan: Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Perempuan Membangun, Kualitas Kesenjangan Gender, dan Perlindungan Perempuan Dan Anak

TAHUN 1	KECAMATAN	TAHUN 2	KECAMATAN	TAHUN 3	KECAMATAN	TAHUN 4	KECAMATAN	TAHUN 5	KECAMATAN
Pembinaan kelompok-kelompok perempuan	Seluruh Kecamatan	Pembinaan kelompok-kelompok perempuan	Seluruh Kecamatan	Pembinaan kelompok-kelompok perempuan	Seluruh Kecamatan	Pembinaan kelompok-kelompok perempuan	Seluruh Kecamatan	Pembinaan kelompok-kelompok perempuan	Seluruh Kecamatan

TAHUN 1	KECA-MATAN	TAHUN 2	KECA-MATAN	TAHUN 3	KECA-MATAN	TAHUN 4	KECA-MATAN	TAHUN 5	KECA-MATAN
Optimalisasi kesempatan usaha produktif bagi perempuan berbasis kelompok	Seluruh Kecamatan	Optimalisasi kesempatan usaha produktif bagi perempuan berbasis kelompok	Seluruh Kecamatan	Optimalisasi kesempatan usaha produktif bagi perempuan berbasis kelompok	Seluruh Kecamatan	Optimalisasi kesempatan usaha produktif bagi perempuan berbasis kelompok	Seluruh Kecamatan	Optimalisasi kesempatan usaha produktif bagi perempuan berbasis kelompok	Seluruh Kecamatan
Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dan pelecehan	Seluruh Kecamatan	Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dan pelecehan	Seluruh Kecamatan	Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dan pelecehan	Seluruh Kecamatan	Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dan pelecehan	Seluruh Kecamatan	Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dan pelecehan	Seluruh Kecamatan
Peningkatan arus komunikasi kelompok perempuan melalui forum kelompok perempuan	Seluruh Kecamatan	Peningkatan arus komunikasi kelompok perempuan melalui forum kelompok perempuan	Seluruh Kecamatan	Peningkatan arus komunikasi kelompok perempuan melalui forum kelompok perempuan	Seluruh Kecamatan	Peningkatan arus komunikasi kelompok perempuan melalui forum kelompok perempuan	Seluruh Kecamatan	Peningkatan arus komunikasi kelompok perempuan melalui forum kelompok perempuan	Seluruh Kecamatan
Dukungan kebijakan terkait gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Seluruh Kecamatan	Dukungan kebijakan terkait gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Seluruh Kecamatan	Dukungan kebijakan terkait gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Seluruh Kecamatan	Dukungan kebijakan terkait gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Seluruh Kecamatan	Dukungan kebijakan terkait gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Seluruh Kecamatan
Optimalisasi Kinerja tim terpadu terkait perlindungan anak	Seluruh Kecamatan	Optimalisasi Kinerja tim terpadu terkait perlindungan anak	Seluruh Kecamatan	Optimalisasi Kinerja tim terpadu terkait perlindungan anak	Seluruh Kecamatan	Optimalisasi Kinerja tim terpadu terkait perlindungan anak	Seluruh Kecamatan	Optimalisasi Kinerja tim terpadu terkait perlindungan anak	Seluruh Kecamatan
Pemantauan dan pengawasan kegiatan di masyarakat yang berpotensi terjadi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak	Seluruh Kecamatan	Pemantauan dan pengawasan kegiatan di masyarakat yang berpotensi terjadi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak	Seluruh Kecamatan	Pemantauan dan pengawasan kegiatan di masyarakat yang berpotensi terjadi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak	Seluruh Kecamatan	Pemantauan dan pengawasan kegiatan di masyarakat yang berpotensi terjadi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak	Seluruh Kecamatan	Pemantauan dan pengawasan kegiatan di masyarakat yang berpotensi terjadi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak	Seluruh Kecamatan

BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Di samping itu, disajikan pula penjelasan tentang hubungan antara kebijakan umum dan program pembangunan daerah beserta indikator kinerja yang dipilih.

Kebijakan pembangunan merupakan penjabaran dari strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan, maka kebijakan umum yang menjadi pedoman bagi penetapan program pembangunan daerah. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Kebijakan umum memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah.

Program pembangunan daerah merupakan program-program yang secara langsung menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah, sesuai dengan strategi dan kebijakan umum. Program yang dimaksud merupakan penerjemahan program unggulan Gerbang Raja II yang merupakan janji kampanye kepala daerah.

Gambar 7.1. Paradigma Gerbang Raja II



Sumber : Buku Gerbang Raja II

Di dalam semangat Gerbang Raja II, diuraikan serangkaian agenda prioritas dan program unggulan yang disebut dengan HARUS (Hak Rakyat Untuk Sejahtera). Agenda prioritas pembangunan Gerbang Raja II menitikberatkan pada: 1) Reformasi Birokrasi; 2) Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah; 3) Transformasi Struktur Ekonomi Daerah; 4) Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik; 5) Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan; 6)

Daya Saing Sumberdaya Manusia; dan 7) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dengan uraian sebagai berikut:

7.1. REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi merupakan prioritas Gerbang Raja 2015-2021 yang ditandai dengan perolehan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK untuk pengelolaan keuangan daerah, panji-panji keberhasilan pembangunan dan penilaian LPPD dengan target peringkat 10 besar nasional. Percepatan pembangunan melalui agenda prioritas dilakukan dengan:

1. *Bebaya Etam Kuatkan Kinerja Aparatur Sipil, perubahan mindset dan culturset aparatur dengan konsep “KERJA ADALAH IBADAH” yang diawali dengan niat, sikap dan perilaku yang baik dengan “Memanusiakan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja” sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan pegawai. Dengan Spirit “Kantor adalah Sajjaddah, Kerja adalah Ibadah”;*
2. *Desentralisasi Kecamatan dengan memperkuat fungsi Pemerintah Kecamatan melalui pengalokasian dana per kecamatan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas wilayah sesuai dengan prioritas pembangunan (seiring dengan Nawa Cita “Membangun Indonesia dari Pinggiran”);*
3. *Satu RT Satu Laptop, memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada seluruh Rukun Tetangga (RT) untuk mempercepat proses pelayanan kepada warga mendukung fungsi desa/kelurahan kecamatan;*
4. *M’PeKAT Keroan Kampong, gerakan yang mengembalikan semangat Musyawarah dan Gotong Royong, dalam menentukan arah pembangunan desa/kelurahan serta kecamatan dengan menekankan pada peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan dengan spirit “Datanglah Kepada Rakyat dan Rencanakan Bersama Rakyat”;*
5. *Integrasi Sistem e-Government. Memperkuat akuntabilitas dan transparansi dengan meningkatkan pelayanan berbasis teknologi informasi melalui keterpaduan sistem pendataan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan berbasis On-Line;*
6. *Reformasi Belanja Daerah. Melaksanakan reformasi belanja daerah untuk mencegah kebocoran dan pemborosan anggaran serta melakukan pengurangan overhead cost (biaya rutin) dan mengalokasikan lebih banyak untuk pelayanan publik;*
7. *Audit Kinerja atas program-program yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD.*

7.2. PENGUATAN KAPASITAS FISKAL DAERAH

Pembiayaan Pembangunan Daerah merupakan input dalam proses pembangunan, yang bersumber dari pemerintah dan non pemerintah. Saat ini struktur penerimaan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan. Atas dasar kondisi tersebut, dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal daerah, maka perlu peningkatan sumber pembiayaan dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta yang dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Skema pembiayaan pembangunan yang dirancang kedepan adalah memperkuat potensi PAD dan meningkatkan peran serta dunia usaha dalam penyediaan sarana dan prasarana sektor publik yang dilakukan melalui prinsip win-win-win, yakni menguntungkan bagi Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat.

Percepatan pembangunan melalui agenda prioritas dilakukan dengan:

1. *Pengembangan sistem PAD Cerdas, yakni sebuah terobosan dalam mengoptimalkan potensi PAD dengan pelayanan yang mudah, transparan dan terintegrasi berdasarkan kewenangan pada jenjang pemerintahan (Kabupaten, Kecamatan hingga Desa/Kelurahan) berbasis Teknologi Informasi.*
2. *Kerjasama Investasi dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur daerah terutama untuk pelayanan dasar, transportasi, pengelolaan lingkungan, telekomunikasi dan informatika,*

olah raga dan kesenian, fasilitas perkotaan serta pariwisata;

3. *Kerjasama Pengelolaan Aset Daerah dengan menyediakan ruang kepada swasta untuk mengelola aset daerah secara sinergi.*
4. *Penguatan CSR (Corporate Social Responsibility) dalam proses pembangunan daerah.*

7.3. TRANSFORMASI STRUKTUR EKONOMI DAERAH

Melalui semangat transformasi dari *unrenewable resources* menjadi *renewable resources*, Kutai Kartanegara dihadapkan pada kondisi struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor ekstraktif (Pertambangan dan Penggalian). Dalam konteks perwujudan pembangunan berkelanjutan potensi pertanian dan pariwisata memiliki potensi yang kuat sebagai *leading sector* perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara.

Seiring dengan hal tersebut, pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif membangun daerah untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi, dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah dan koperasi.

Produktivitas sektor pertanian dalam arti luas, dengan indikator sasaran Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB cukup tinggi. Kedepan penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi daerah berdasarkan pada kekhasan daerah (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah) termasuk pariwisata menjadi pijakan pembangunan di Kutai Kartanegara.

Percepatan pembangunan melalui agenda prioritas dilakukan dengan:

1. Politik Anggaran Sektor Pertanian; dialokasikan dana minimal 10% dalam mendukung “5 PILAR PEMBANGUNAN PERTANIAN” yaitu : (1) Optimalisasi sumber daya lahan dan air; (2) Pemandirian proses produksi dan infrastruktur, (3) Jaringan dan Kelembagaan Petani; (4) Pembudayaan pola konsumsi pangan lokal; (5) Inovasi teknologi, alat dan mesin pertanian.
2. Revolusi Jagung; merupakan upaya konkrit untuk menempatkan kembali pembangunan pertanian (Tanaman Pangan). Revolusi Jagung menggambarkan proses pembangunan dari hulu (produksi) sampai hilir (konsumsi), meliputi:
 - a. *Revolusi Sistem Produksi; melalui mekanisasi pertanian mulai dari pengolahan tanah, panen Jagung dengan mekanisasi, dipipil langsung dimasukan ke Alat Angkut Agropolitan. Penyediaan Benih/Bibit Unggul, dan Pupuk; benih merupakan sarana utama melalui penyediaan benih bersertifikasi. Pengendalian Penyakit. untuk mempertahankan potensi produksi yang ingin dicapai dari gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT) serta meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam pengendalian OPT, tanpa pestisida sehingga munculnya OPT dapat diatasi dengan cepat.*
 - b. *Revolusi Sistem Distribusi; melalui memperlancar pemasaran dengan jaminan harga dasar melalui BUMDes atau kemitraan dengan lembaga lain (melakukan pembinaan dan koordinasi dengan pengusaha pedagang pengumpul, pedagang besar dalam mempertahankan tingkat harga yang layak untuk petani).*
 - c. *Menyediakan permodalan para petani melalui kelompok tani dapat memanfaatkan dana permodalan petani dengan mengajukan rencana kebutuhan biaya usaha tani melalui rencana kebutuhan kelompok.*
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur irigasi (termasuk waduk dan embung bekas tambang), jalan usaha tani, dan pelabuhan perikanan, melalui:
 - a. *Membangun jaringan irigasi untuk mengairi lahan sawah seluas 30.000 ha.*
 - b. *Pembukaan lahan pertanian baru seluas 10.000 ha.*
 - c. *Jumlah pelabuhan perikanan tahun 2021 ditargetkan sebanyak 3 pelabuhan perikanan untuk wilayah hulu, tengah dan pesisir.*
 - d. *Membangun Balai Benih Ikan di wilayah hulu dan pesisir.*
 - e. *Mengoptimalkan Balai Penyuluh Pertanian.*

4. Mekanisasi dan modernisasi teknologi pertanian dalam swasembada pangan;
5. Mendorong pembangunan industri pengolahan pangan, peternakan, perikanan dan industri pengolahan pakan yang berdaya saing;
6. Mendorong peningkatan produksi dan konsumsi protein berasal dari telur, ikan dan daging;
7. Membangun demplot peningkatan produksi pertanian rakyat disetiap kecamatan dan budidaya tanaman lokal;
8. Gerakan Penanaman 70.000 tanaman lokal dalam rangka pelestarian dengan memanfaatkan lahan desa dan sepanjang bahu jalan atau lahan lainnya;
9. Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
10. Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); penguatan seluruh BUMD secara bersama-sama agar dapat saling menunjang untuk mencetak laba dan dapat berkinerja lebih tinggi;
11. Mengembangkan usaha ekonomi keluarga dan industri rumah tangga;
12. Penguatan kelembagaan koperasi untuk kesejahteraan rakyat (pengembangan ekonomi perdesaan berbasis kelompok dan kewirausahaan);
13. *Jonok N'gan KUKAR*; adalah program pengembangan pariwisata yang berbasis potensi alam, sejarah dan budaya yang melekat dihati serta didukung oleh semangat pengembangan ekonomi kreatif menuju industri pariwisata, melalui:
 - a. *Membangun Pusat Rekreasi Alam, Sejarah dan Budaya dalam satu kawasan (Pengembangan Waduk Panji Sukarama dan Museum Kayu);*
 - b. *Memperkuat destinasi Wisata Pulau Kumala;*
 - c. *Revitalisasi Museum Mulawarman;*
 - d. *Penguatan Desa Budaya;*
 - e. *Membangun dan mengembangkan destinasi wisata berbasis Ekowisata;*
 - f. *Menghidupkan kembali Lembaga Seni dan Budaya Kutai Kartanegara.*
14. Pengembangan industri potensial daerah berbasis keterkaitan dan keterpaduan potensi antar wilayah (*Integrated Territorial Development*);
15. Mendukung agenda Nawa Cita prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri yang mendukung pengembangan agribisnis dan agroindustri;

7.4. PEMBANGUNAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK

Infrastruktur dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, juga mengatasi kesenjangan antar wilayah. Kondisi jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara beragam dari kondisi jalan baik hingga rusak berat. Dalam kondisi baik 61,95% (1.575,94 km), dalam kondisi sedang 13,67% (347,89 km), dalam kondisi rusak 5,86% (149,09 km) dan sisanya jalan dalam kondisi rusak berat 18,52% (471,1 km). Selain itu, infrastruktur irigasi dan jalan usaha tani untuk menunjang ekonomi pertanian sebagian mengalami kerusakan. Percepatan pembangunan melalui agenda prioritas dilakukan dengan:

1. *Menuntaskan interkoneksi infrastruktur jalan wilayah hulu (Tabang, Kota Bangun, Muara Wis dan Muara Muntai);*
2. *Pembangunan dan peningkatan jalan kolektor di seluruh wilayah Kutai Kartanegara sepanjang 1.000 Km;*
3. *Pemeliharaan jalan dan jembatan;*
4. *Pembangunan bandar udara dan smart city;*
5. *Pengembangan "PAM-SiMAS" (Pengelolaan Air Minum Inisiasi Masyarakat) untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas air minum pada warga masyarakat yang kurang terlayani di wilayah pedesaan dan daerah terpencil (pengelolaan air minum yang berbasis pada masyarakat) sehingga diharapkan pelayanan air minum dapat terpenuhi untuk mencapai pemenuhan kebutuhan dasar penyediaan air minum;*
6. *Interkoneksi Jalan Tembus Desa adalah pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan jalan tembus desa dan antar desa.*
7. *Pengembangan "Tower Pintar" merupakan alternatif interkoneksi jaringan telekomunikasi off- line dan on-line keseluruhan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan teknologi murah*

dan hemat energi, dengan target Kutai Kartanegara tanpa blank spot;

7.5. PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN

Sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan salah satu modal utama untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah. Telah dipahami bersama bahwa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik merupakan pendukung kesinambungan pembangunan saat ini dan pembangunan di masa yang akan datang.

Kedepan Pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah mendayagunakan sumber daya alam bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta keserasian penataan ruang dalam upaya terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Percepatan pembangunan melalui agenda prioritas dilakukan dengan:

1. *Pengembangan "Bank Sampah" di setiap Desa/Kelurahan, dalam rangka pengelolaan sampah (organik/non organik) dan daur ulang sampah di wilayah desa/kelurahan hingga kecamatan;*
2. *Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (tersedia dan teraksesnya informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berupa data spasial, nilai, dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas);*
3. *Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam (pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan sumber daya alam dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan);*
4. *Penyediaan energi listrik baru terbarukan (mikro hidro, solar sel, bio massa dan bio gas, pemanfaatan limbah sawit) pada wilayah- wilayah yang belum terjangkau aliran listrik;*
5. *Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup (meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan);*
6. *Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup (meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup);*
7. *Membangun sistem pengelolaan sumber daya alam termasuk pertanian secara efisien dengan menekankan sistem siklikal dalam proses produksi (limbah suatu produksi akan menjadi bahan baku atau sumber energi untuk produksi lainnya);*
8. *Mendukung Nawa Cita Membangun tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan.*

7.6. DAYA SAING SUMBERDAYA MANUSIA

Sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten yakni SDM yang sehat, berpendidikan, berketerampilan, berakhlak dan berperilaku mulia.

Pendidikan adalah investasi jangka panjang dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hanya dengan pendidikan yang baik akan menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Pararel dengan pembangunan kesehatan, secara integral pembangunan bidang kesehatan merupakan syarat utama setiap orang dalam beraktifitas. Pembangunan kesehatan tidak saja diarahkan pada perbaikan mutu kesehatan saja, tetapi juga kesehatan dalam arti luas yang juga meliputi kesehatan lingkungan. Percepatan pembangunan melalui agenda prioritas dilakukan dengan:

1. *Penyediaan satu guru satu rumah;*
2. *Mengalokasikan dana perbaikan kualitas fasilitas pendidikan (SD, SMP dan Pesantren) Rp. 100 juta per sekolah;*

3. Memberikan tambahan tunjangan profesi guru di daerah terpencil minimal Rp. 2 juta per bulan;
4. Pengembangan KUKAR CERDAS berupa pemberian beasiswa bagi siswa yang berprestasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi;
5. Penyediaan komputer dan peralatan bantu pengajaran bagi sekolah dasar dan menengah serta pesantren;
6. Perintisan dan pengembangan mobilisasi sarjana pendidikan yang baru lulus untuk mengabdikan di daerah miskin dan terpencil;
7. Mendukung program Indonesia pintar melalui wajib belajar 12 tahun bebas pungutan;
8. Pengembangan “Kampung Pintar”, yakni desa yang terbebas dari warganya yang tidak bersekolah di usia sekolah, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan yang representatif bagi perkembangan anak (penyediaan buku dengan menyediakan “Perpustakaan Kampung”, layanan akses internet, lembaga bimbingan belajar dan keterampilan);
9. “Gerakan Etam Mengaji” (GEMA), dengan mengedepankan Pendidikan Keagamaan yang bukan hanya menjadi tanggung jawab Orang Tua dan Pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat;
10. Mengembangkan puskesmas dan puskesmas pembantu yang modern disetiap kecamatan;
11. Pembangunan klinik dan rumah sehat desa (revitalisasi posyandu);
12. Mengalokasikan anggaran 3% untuk penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi dan Balita (AKB) serta penyakit menular dan kronis;
13. Upaya perbaikan cakupan kelahiran yang ditangani tenaga medis serta perbaikan asupan gizi;
14. Peningkatan status gizi dan promosi kesehatan;
15. Meningkatkan peran PKK, Puskesmas pembantu, dan Posyandu;
16. Memberikan tambahan tunjangan penghasilan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil dan pedalaman;
17. Mendukung program Kartu Indonesia Sehat melalui pelayanan kesehatan;
18. Gerakan hidup sehat, melarang merokok di tempat kantor dan tempat tertentu;
19. Gerakan makan makanan sehat dan bergizi;
20. Melanjutkan Program “KUKAR SEHAT”
21. “Nebas Tapak Kemiskinan”, yaitu langkah penanggulangan kemiskinan di dalam Album Kemiskinan yang akan memuat jumlah penduduk miskin, profil kemiskinan dan penyebab kemiskinan, melalui:
 - a. *Bedah Rumah;*
 - b. *Gratis biaya pemeriksaan kesehatan bagi ibu dalam masa kehamilan sampai dengan persalinan bagi warga miskin Kutai Kartanegara di Rumah Sakit dan Puskesmas;*
 - c. *Bantuan Modal Usaha Kemandirian bagi fakir miskin;*
 - d. *Pemberian Santunan Warga Tidak Mampu yang termasuk dalam kategori usia tidak produktif;*
 - e. *Pemberian modal bagi Petani dan Nelayan sebesar Rp. 100 juta per kelompok tani/nelayan (sarana untuk membantu masyarakat tani dan nelayan miskin yang membutuhkan modal usaha);*
22. “Bena Kampung Etam” atau Program Desa Berketahanan Sosial merupakan model pengembangan pemberdayaan kelembagaan dan pranata sosial ekonomi pedesaan dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap kepedulian sosial dan pembangunan wilayah pedesaan;
23. Pembentukan Lembaga Keuangan Tani dan Nelayan di 18 kecamatan.
24. Pengembangan Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri (Klik- WPM), bertujuan menumbuhkan jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) bagi generasi muda menjadi generasi mandiri sehingga bukan menjadi generasi pencari kerja tetapi merupakan generasi pencipta lapangan kerja, sehingga menjadi pilihan hidup pemuda dan mempunyai *multiplier effects* bagi masyarakat;
25. Memberikan dukungan pada agenda strategis Nawa Cita, yaitu pemenuhan hak dasar rakyat.

7.7. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Di era modern saat ini perempuan telah banyak memberikan kontribusi dan inspirasi

dalam proses kemajuan peradaban dunia, hal ini tentunya menjadi bagian penting dari proses pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana keberadaan perempuan menjadi aset yang harus dilindungi, dikembangkan dan dioptimalkan sebagai bagian dari pemangku kepentingan dari proses pembangunan daerah yang lebih membumi, yang dapat dimulai dari partisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembangunan baik dibidang politik, ekonomi dan sosial.

Disamping itu, Perlindungan Anak juga memiliki peran strategis dalam rangka pembentukan karakter manusia di masa akan datang. Untuk itu perlu upaya menjamin dan melindungi serta pemenuhan hak-hak agar dapat hidup layak, tumbuh, berkembang, berprestasi dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Percepatan pembangunan melalui agenda prioritas dilakukan dengan:

1. *Gerakan “Perempuan Membangun”, merupakan gerakan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah, seperti penguatan Kelompok Usaha Bersama Perempuan (KUBP) di setiap desa/kelurahan, yang dimotori oleh perempuan-perempuan aktif dan kreatif;*
2. *Membangun pusat rehabilitasi narkoba dan traumatik untuk perempuan dan anak;*
3. *Pengarustamaan Anak Untuk Sejahtera (PUAS) yang mengutamakan perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak kedalam setiap kegiatan pembangunan dalam rangka melanjutkan program “Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA)” dan program “Kabupaten Layak Anak”;*
4. *Menempatkan posisi perempuan pada jabatan strategis di pemerintahan sesuai dengan kompetensinya;*
5. *Meningkatkan kualitas kesetaraan gender dan partisipasi politik perempuan;*
6. *Menyediakan fasilitas pendukung dalam menjamin perlindungan perempuan dan anak serta bagi masyarakat berkebutuhan khusus di area publik.*

Berdasarkan uraian kebijakan agenda prioritas dalam Gerbang Raja II tersebut di atas, merupakan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang perlu diimplementasikan dalam periode lima tahun ke depan. Adapun Tahapan dan Prioritas Pembangunan tiap tahun dirumuskan sebagai berikut:

1. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2016

Tahap pembangunan Tahun 2016 diarahkan untuk “Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Terpadu Antar Sektor Antar Wilayah”. Tahap ini menyiapkan landasan bagi percepatan (akselerasi) dan pembaharuan (transformasi) pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan prioritas sebagai berikut:

1. *Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, SDM aparatur, manajemen, dan budaya kerja birokrasi;*
2. *Penataan perangkat daerah yang berorientasi pelayanan publik;*
3. *Optimalisasi pelayanan publik;*
4. *Memperkuat peran kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;*
5. *Sinkronisasi kebijakan pembangunan kewilayahan secara terpadu lintas sektor;*
6. *Meningkatkan pembangunan pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata sebagai sumber utama peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan pendapatan masyarakat.*

2. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2017

Tahap pembangunan Tahun 2017 diarahkan untuk “Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Terpadu Antar Sektor Antar Wilayah”. Tahap ini menyiapkan landasan bagi percepatan (akselerasi) dan pembaharuan (transformasi) pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan prioritas sebagai berikut:

1. *Pemantapan dan penguatan kapasitas kelembagaan, SDM aparatur, manajemen, dan budaya kerja birokrasi;*
2. *Optimalisasi pelayanan publik;*

3. *Memperkuat peran kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;*
4. *Sinkronisasi kebijakan pembangunan kewilayahan secara terpadu lintas sektor;*
5. *Meningkatkan pembangunan pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata sebagai sumber utama peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan pendapatan masyarakat.*

3. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2018:

Tahap pembangunan Tahun 2018 diarahkan untuk “Pengembangan Ekonomi Produktif dan Ekonomi Kreatif dengan Daya Dukung Pemerataan Infrastruktur dan Pemanfaatan Potensi Daerah secara Terpadu”. Tahap ini memperkuat landasan bagi percepatan (akselerasi) dan pembaharuan (transformasi) pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan prioritas sebagai berikut.

1. *Pengembangan potensi unggulan daerah lintas sektor dan dari hulu-hilir;*
2. *Penguatan peran usaha kecil dalam mendukung perekonomian daerah;*
3. *Penguatan pembangunan pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata sebagai sumber utama peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan pendapatan masyarakat.*
4. *Pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya yang mendukung sentra produksi, daerah potensi unggulan daerah, dan infrastruktur pendukung perekonomian daerah;*
5. *Mengembangkan interkoneksi antar wilayah khususnya antar desa antar kecamatan.*

4. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2019:

Tahap pembangunan Tahun 2019 merupakan tahapan untuk “Peningkatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah menuju Transformasi Ekonomi Masyarakat yang Lebih Sejahtera”. Tahap ini memperkuat dan memantapkan percepatan (akselerasi) dan pembaharuan (transformasi) pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan prioritas sebagai berikut.

1. *Hilirisasi pemanfaatan potensi unggulan daerah;*
2. *Pengembangan pola investasi daerah berbasis masyarakat;*
3. *Penguatan pembangunan pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata sebagai sumber utama peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan pendapatan masyarakat secara mandiri dan berkontribusi maksimal untuk perekonomian daerah;*
4. *Pemantapan pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya yang mendukung sentra produksi, daerah potensi unggulan daerah, dan infrastruktur pendukung perekonomian daerah;*
5. *Pemantapan interkoneksi antar wilayah khususnya antar desa antar kecamatan;*
6. *Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan menuju masyarakat lebih sejahtera.*

5. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2020:

Tahap pembangunan Tahun 2020 merupakan tahapan untuk “Transformasi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”. Tahap ini merupakan percepatan (akselerasi) dan perubahan (transformasi) pembangunan berbasis industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan dan pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara; serta peningkatan mutu pariwisata. Tahap pembangunan ini mengutamakan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, serta pariwisata berstandar nasional dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Pemantapan proses hilirisasi pemanfaatan potensi unggulan daerah melalui industri berbasis masyarakat;*
2. *Pengembangan pola investasi daerah berbasis masyarakat;*
3. *Pengembangan pembangunan berbasis IT;*
4. *Penguatan pembangunan pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata sebagai sumber utama peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan pendapatan masyarakat secara mandiri dan berkontribusi maksimal untuk perekonomian daerah;*
5. *Pemantapan pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya yang mendukung sentra produksi, daerah potensi unggulan daerah, dan infrastruktur pendukung perekonomian daerah;*
6. *Pemantapan interkoneksi antar wilayah khususnya antar desa antar kecamatan;*
7. *Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan menuju masyarakat lebih*

sejahtera skala desa.

6. Tahapan dan Prioritas Pembangunan tahun 2021:

Tahap pembangunan Tahun 2021 merupakan tahapan terakhir dan juga merupakan tahun dimana proses susksesi hasil Pemilihan Kepala Daerah terjadi. Jika tidak ada perubahan, pada bulan Februari 2021 merupakan waktu terakhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara periode 2016-2021.

Dikarenakan waktu yang tidak panjang di tahun 2021, maka tahap ini diarahkan untuk “Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”, dengan prioritas sebagai berikut:

1. Pemantapan proses hilirisasi pemanfaatan potensi unggulan daerah melalui industri berbasis masyarakat;
2. Pemantapan pola investasi daerah berbasis masyarakat;
3. Pemantapan pembangunan berbasis IT;
4. Pemantapan pembangunan pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata sebagai sumber utama peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan pendapatan masyarakat secara mandiri, mengarah pada kedaulatan pangan, dan berkontribusi maksimal untuk perekonomian daerah;
5. Pemantapan pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya yang mendukung sentra produksi, daerah potensi unggulan daerah, dan infrastruktur pendukung perekonomian daerah;
6. Pemantapan interkoneksi antar wilayah khususnya antar desa antar kecamatan;
7. Pemantapan peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan menuju masyarakat lebih sejahtera skala desa.

Tahapan dan Prioritas Pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut:



Adapun dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun tersebut dilakukan dengan mempedomani Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 sebagaimana tabel berikut:

TABEL 7.1 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PADA MISI PERTAMA

MISI 1 : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah	1. Revitalisasi Pelaksanaan dan Fungsi Manajemen Pemerintahan 2. Fasilitasi dan Pendampingan Pelaksanaan Dana Desa	1.1. Mapping distribusi pegawai 1.2. Penerapan Analisis Jabatan dan Penghitungan Kebutuhan Ideal Pegawai 1.3. Penerapan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Penyusunan Kelas Jabatan (Evaluasi Jabatan), dan Penyusunan Pola Karier Pegawai 1.4. Penerapan Standar Kompetensi Jabatan Administrator, Penerapan SOP, dan Updeting SOTK 1.5. Peningkatan kinerja SDM jabatan fungsional, dan Analisis Kebutuhan diklat Berdasarkan Grand Desain Pengembangan Aparatur 1.6. Penetapan tumpangan kinerja, implementasi standar pelayanan minimal, dan Peningkatan indeks kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh pegawai 1.7. Penguatan koordinasi kebijakan antar SKPD 1.8. Penguatan kewenangan kecamatan dalam pelayanan dan peran pembangunan kemilahan 1.9. Penguatan kapasitas eksekutif dan legislatif 1.10. Penguatan penelitian dan pengembangan bagi proses pembangunan terpadu antar sektor antar wilayah 1.11. Pemantapan data dan informasi, serta analisis statistik daerah dalam memperkuat perencanaan, prioritas pengembangan, dan evaluasi pembangunan 1.12. Pengembangan sistem perencanaan terpadu berbasis IT 1.13. Peningkatan kapasitas SDM perencana di tiap perangkat daerah 1.14. Peningkatan partisipasi peran masyarakat dalam pembangunan daerah 1.15. Penerapan standarisasi keamanan informasi daerah yang bersifat rahasia negara 1.16. Penerapan pengelolaan asip secara baik di seluruh perangkat daerah 1.17. Pengembangan pemetaan penduduk di semua wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	Pendukung Urusan Pemerintahan: Sekretariat Daerah	Program Pemantapan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara	n.a	100%	Sekretariat Daerah
					Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah	n.a	100%	Sekretariat Daerah
					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	n.a	100%	Sekretariat Daerah
					Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah	n.a	100%	Sekretariat Daerah
					Bekas	n.a	100%	Sekretariat Daerah
					Persentase jumlah penyelesaian tata batas antar kabupaten, antar kecamatan dan antar Desa/kelurahan	100%	100%	Sekretariat Daerah
					Persentase Regulasi Daerah yang disosialisasikan	100%	100%	Sekretariat Daerah
					Persentase Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	Sekretariat Daerah
					Persentase peraturan daerah yang disosialisasikan	-	100%	Sekretariat Daerah
					Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan	-	100%	Sekretariat Daerah
					Penylesaian pengadaan pelayanan pemerintah	100%	100%	Sekretariat Daerah
					Pengadaan Masyarakat	100%	100%	Sekretariat Daerah
					Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	100%	100%	Sekretariat Daerah
					Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	100%	100%	Sekretariat Daerah
					Program Keprotokolan Daerah	100%	100%	Sekretariat Daerah
					Program Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	100%	100%	Sekretariat Daerah
					Program Peningkatan Pelayanan Publik	100%	100%	Sekretariat Daerah
					Program Optimalisasi Pemantapan Teknologi Informasi	100%	100%	Sekretariat Daerah
					Program Pengembangan Sistem Pendaftaran Tanah	100%	100%	Sekretariat Daerah
					Program Pemantapan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	100%	100%	Sekretariat Daerah
Pendukung Urusan Pemerintahan: Sekretariat DPRD		Program Penyelesaian Konflik-Konflik	Pendukung Urusan Pemerintahan: Sekretariat DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Penyelesaian kasus pertanahan	100%	100%	Sekretariat Daerah
					Tingkat Kinerja Pelayanan pada Alat Kelengkapan dan Angguta DPRD	100%	100%	Sekretariat DPRD
					Tingkat kesiapan obat dan perbekalan kesehatan	100%	100%	Sekretariat DP KORPRI
					Jumlah event kompetisi	100%	100%	Sekretariat DP KORPRI
					Jumlah Informasi Asip Daerah	20 dok	50.680 dok	Badan Keasipan dan Perpustakaan

MISI 1 : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
		1.10. Peningkatan kemampuan administrasi pemerintahan			Jumlah asip yang dilestarkan			SKPD PENANGGUNG JAWAB
		1.19. Pengembangan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat RT		Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase SKPD yang menerapkan pengelolaan asip secara baku	74,716 dok	97,628	Badan Kearsipan dan Perpustakaan
		1.20. Penguatan peran kelompok masyarakat di tingkat desa dalam menyelesaikan pengendalian penduduk dan program KB		Program Meningkatkan Koordinasi Sistem Kearsipan	Rasio Kecukupan SDM Pengelola Kearsipan SKPD Kabupaten	60%	100%	Badan Kearsipan dan Perpustakaan
		1.21. Pengembangan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan daerah		Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Cakupan SKPD yang terkoneksi dengan Sistem Informasi Kearsipan	2.16	2 : 1	Badan Kearsipan dan Perpustakaan
		1.22. Pembangunan baseline data dari tingkat kecamatan sampai kabupaten untuk perencanaan, penganggaran, monitoring evaluasi dan pelaporan, dan LAKIP		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kabupaten)	Jumlah Pemeliharaan dan Pengamanan Sarana dan Prasarana Kearsipan	80%	100%	Badan Kearsipan dan Perpustakaan
		1.23. Pengukuran IKM di semua SKPD Pelayanan			Persentase peningkatan kemampuan manajerial, keahlian dan ketrampilan pegawai	100%	100%	Badan Kepegawaian Daerah
		2.1. Peningkatan kompetensi aparat pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa serta penyusunan dokumen pengelolaan dana desa sejak perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban	Pendukung Urusan Pemerintahan Kepegawaian		Cakupan pembinaan agen bekas (bebhaya etam kuatkan kinerja aparat sipil negara)	n.a	100%	Badan Kepegawaian Daerah
		2.2. Pengelolaan dana desa		Program Layanan Administrasi Kepegawaian	Cakupan layanan administrasi kepegawaian ASN	90%	100%	Badan Kepegawaian Daerah
		mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban melalui buku panduan pengelolaan dana desa serta peningkatan keterampilan aparat desa dalam penyusunan dokumen perencanaan desa, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Desa, serta memberikan pemahaman dan keterampilan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa agar pelaksanaan alokasi dana desa terarah dan terpadu dengan prioritas pembangunan daerah		Program Penyediaan Informasi Kepegawaian	Cakupan Ketersediaan Data/Informasi Kepegawaian	50%	100%	Badan Kepegawaian Daerah
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pegawai yang ditempatkan dalam jabatan berdasarkan merit system	48%	100%	Badan Kepegawaian Daerah
					Persentase Batas Pelanggaran Disiplin Pegawai	<2%	<2%	Badan Kepegawaian Daerah
			Urusan Wajib Perencanaan Model	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengembangan Sistem Pelayanan	Indek Kepuasan Masyarakat	7,6	Sangat Baik	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
				Program Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pelayanan perizinan	Persentase layanan perizinan dan non perizinan	100%	100%	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
			Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan Fasilitas Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Aparatur pemerintahan Desa	1109	509	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
				Program Sistem Inovasi Daerah	Cakupan sistem Inovasi Daerah	n.a	100%	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
			Pendukung Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan		Persentase Kajian Penguatan Kecamatan	n.a	Dokumen	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
					Jumlah kawasan pertanian yg menerapkan siklus terpadu	n.a	Dokumen	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
					Cakupan Paket Teknologi Budidaya Tanaman Jagung	n.a	Dokumen	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
					Cakupan Paket Teknologi Pasca Panen Dan Agribudisti Komoditas Jagung	n.a	11 Dokumen	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
				Program Penelitian Umum	Ketersediaan rekomendasi kebijakan daerah	24 Dokumen	51 Dokumen	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
					Cakupan Penelitian di bidang Pemerintahan dan Hukum	-	37 Dokumen	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
					Cakupan Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan	-	18 Dokumen	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
					Cakupan Penelitian di bidang SDA dan Teknologi	-	27 Dokumen	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
					Cakupan Penelitian di bidang Sosial budaya dan Kemasayarakatan	-	21 Dokumen	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
			Pendukung Urusan	Program pengembangan data/informasi	Tingkat keterisian Data Pembangunan	34%	85%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

MISI 1 : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PEMANGGUNG JAWAB				
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR					
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	Kecamatan Muara Badak				
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	Kecamatan Tabang				
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	Kecamatan Muara Jawa				
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	Kecamatan Tenggara				
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	Kecamatan Anggana				
				Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	Kecamatan Muara Wis				
				Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	Kecamatan Sanga-Sanga				
				Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Perijinan dan Non Perijinan	100%	100%	Kecamatan Loa Kulu				
				Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	n.a	100%	Kecamatan Kota Bangun				
				Program Peningkatan pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	Kecamatan Tenggara				
				Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	Kecamatan Kembang Jangut				
				Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	Kecamatan Muara Kaman				
				Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	Kecamatan Samboja				
				Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	Kecamatan Muara Muntai				
				Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	Kecamatan Marang Kayu				
				Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	Kecamatan Sebulu				
				Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	Kecamatan Loa Janan				
				Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	Kecamatan Muara Badak				
				Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	Kecamatan Tabang				
				Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	Kecamatan Muara Jawa				
				Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	Kecamatan Tenggara Seberang				
				Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	Kecamatan Anggana				
				Pendukung Urusan Pemerintahan:				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	Kelurahan Jawa
								Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	Kelurahan Pendangin

MISI 1 : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	42%	5%	Kelurahan Sariaya
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	Kelurahan Sanga-Sanga Muara
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	37%	4%	Kelurahan Sanga-Sanga Dalam
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	Kelurahan Muara Kembang
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	37%	4%	Kelurahan Tamapole
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	35%	20%	Kelurahan Muara Jawa Pesisir
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	Kelurahan Muara Jawa Tengah
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	Kelurahan Muara Jawa Ilir
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	37%	4%	Kelurahan Dondang
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	42%	5%	Kelurahan Teluk Dalam
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	35%	20%	Kelurahan Mahulu
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	Kelurahan Loa Ipuh Darat
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	37%	4%	Kelurahan Bukit Biru
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	42%	5%	Kelurahan Jahab
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	37%	4%	Kelurahan Baru
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	42%	5%	Kelurahan Mangkurawang
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	Kelurahan Timbau
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	35%	20%	Kelurahan Loa Ipuh
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	42%	5%	Kelurahan Melayu

MISI 1 : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
			Pendukung Urusan Pemerintahan: Kelurahan	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	kelurahan Loa Tebu
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	37%	4%	kelurahan Panji
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	37%	4%	kelurahan Sukarame
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	kelurahan Sanipah
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	kelurahan Sungai Merdeka
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	35%	20%	kelurahan Karya Merdeka
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	kelurahan Margomulyo
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	35%	20%	kelurahan Handil Baru
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	kelurahan Handil Baru Darat
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	kelurahan Amborawang Darat
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	kelurahan Salak Api Laut
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	kelurahan Amborawang Laut
				Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di Kelurahan	35%	20%	kelurahan Sanga-Sanga Muara
				Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di Kelurahan	37%	4%	kelurahan Muara Jawa Tengah
				Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di Kelurahan	37%	4%	kelurahan Muara Jawa Ulu
				Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di Kelurahan	100%	100%	kelurahan Mahulu
				Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di Kelurahan	35%	20%	kelurahan Loa Ipuh Darat
				Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di Kelurahan	42%	5%	kelurahan Timbau
				Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di Kelurahan	100%	100%	kelurahan Loa Ipuh
							Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di Kelurahan
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di Kelurahan	42%					5%	kelurahan Panji
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di Kelurahan	37%					4%	kelurahan Sukarame
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di Kelurahan	37%					4%	kelurahan Sukarame

MISSION STATEMENT: IMPROVING BUREAUCRACY FOR THE PEOPLE

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
			Semua Urusan Pemerintahan /Fungsi Pendukung	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di Kelurahan	37%	4%	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di Kelurahan	100%	100%	Kelurahan Karya Merdeka
				Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di Kelurahan	37%	4%	Kelurahan Salok Api Darat
				Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di Kelurahan	35%	20%	Kelurahan Handil Baru
				Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di Kelurahan	100%	100%	Kelurahan Handil Baru Darat
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Sekretariat Daerah
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Sekretariat DPRD
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Sekretariat DP KORPRI
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Badan Keasipan dan Perpustakaan
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Badan Kelurga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	80%	100%	Badan Kepegawaian Daerah
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	12 Bulan	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Badan Lingkungan Hidup Daerah
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

MISI 1 : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Dinas Pendapatan Daerah
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Dinas Pendidikan
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Dinas Perhubungan
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 Bulan	72 bulan	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	100%	Dinas Pertambangan dan Energi
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	72 bulan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	60	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Dinas Sosial
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Inspektorat
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	RSUD Abadi Samboja
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	40%	80%	RSUD AM. Parkesit
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	75%	100%	RSUD Dayaku Raja
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Dinas Kesehatan
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kecamatan Muara Wis
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	n.a	100%	Kecamatan Kota Bangun
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kecamatan Tenggaraong
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kecamatan Kenohan
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kecamatan Kembang Jangut
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kecamatan Muara Kaman
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kecamatan Samboja
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kecamatan Sanga-Sanga
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kecamatan Muara Muntai
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kecamatan Marang Kayu
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kecamatan Sebulu

MISI 1 : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kecamatan Loa Janan
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kecamatan Loa Kulu
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kecamatan Muara Badak
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kecamatan Tabang
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kecamatan Muara Jawa
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kecamatan Tenggaraong Seberang
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kecamatan Anggana
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Jawa
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Pendingin
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Sarilaya
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Sanga-Sanga Muara
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Sanga-Sanga Dalam
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Muara Kembang
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Tamaple
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Muara Jawa Pesisir
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Muara Jawa Tengah
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Muara Jawa Ilir
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Muara Jawa Ulu
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Dondang
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Teluk Dalam
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Mahulu
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Loa Ipuh Darat
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Bukit Biru
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Jahab
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Baru
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Mangkurawang
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Timbau
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Loa Ipuh

MISI 1 : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
			Semua Urusan Pemerintahan /Fungsi/ Pendukung	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Melayu
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Loa Tebu
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Panji
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Sukarame
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Argosari
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Samboga Kuala
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Teluk Pemedas
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Sampah
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Sungai Selang
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Sungai Merdeka
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Tanjung Harapan
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Kara Merdeka
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Salok Api Darat
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Margomulyo
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Handi Baru
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Muara Sembilang
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Handi Baru Darat
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Kampung Lama
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Wonotirto
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Amboawang Darat
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Bukit Merdeka
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Salok Api Laut
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	Kelurahan Amboawang Laut
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	Sekretariat Daerah
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	Sekretariat DPRD
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	Sekretariat DP KORPRI
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	Badan Keaspian dan Perusikakan
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur		214	Badan Kelurga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	Badan Kepegawain Daerah
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat

MISI 1 : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBUJUKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PEMANGUNG JAWAB	
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	85% (303 org)	100%	Badan Kelembagaan Pangan dan Penyuluhan	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur		100%	Badan Lingkungan Hidup Daerah	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur		100%	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur		100	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur		100%	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur		100%	Badan Pengulangan Bencana Daerah	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur		100%	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	75%	54%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur		100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	90% 207 Orang	100% (228 Aparatur)	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	543 Pasang/Stell	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	Dinas Pemuda dan Olahraga	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	Dinas Pendidikan	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	Dinas Perhubungan	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	90% (288 Pegawai)	100% (320 Pegawai)	Dinas Perkebunan dan Kehutanan	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	90%	90%	Dinas Pertambangan dan Energi	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	90% (203 Org)	100%	Dinas Pertanian /tamanan Pangan dan Hortikultura	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur		90%,247 Aparatur	100%,274 Aparatur	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur		-	100%	Dinas Sosial
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur		50%	100%	RSUD AMI, Parkesit
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur		100%	100%	RSUD Dayaku Rata
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur		100%	100%	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur		100%	100%	Kecamatan Muara Wis
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur		n a	100%	Kecamatan Kota Bangun
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur		100%	100%	Kecamatan Tenggara
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur		100%	100%	Kecamatan Kemohan
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur		100%	100%	Kecamatan Kelang Janggut
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur		100%	100%	Kecamatan Muara Kaman				
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur		100%	100%	Kecamatan Sambota				
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur		100%	100%	Kecamatan Sanga-Sanga				
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur		100%	100%	Kecamatan Muara Mumai				
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur		100%	100%	Kecamatan Marang Kayu				
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur		100%	100%	Kecamatan Sebulu				
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur		100%	100%	Kecamatan Loa Janan				
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur		100%	100%	Kecamatan Loa Kulu				
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur		100%	100%	Kecamatan Muara Badak				
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur		100%	100%	Kecamatan Tabang				
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur		100%	100%	Kecamatan Muara Jawa				

MISI 1 : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBUJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
			Semua Urusan Pemerintahan /Fungsi Pendukung	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	SKPD Penangguang Jawab
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	Kecamatan Tenggaraing Seberang
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	Kecamatan Ampoaga
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	Sekretariat Daerah
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	Sekretariat DPRD
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	Sekretariat DP KORPRI
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	Badan Keasrian dan Perpusakaan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	225%	Badan Kelurga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	92%	100%	Badan Kepegawalan Daerah
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80 % (285 org)		Badan Ketelahaan Pangan dan Penyuluhan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	Badan Lingkungan Hidup Daerah
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	Badan Pelayanan Perzinian Terpadu
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	Badan Pengulangan Bencana Daerah
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	58%	90%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	100 %	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80% (184 Aparatur)	95%(219 Aparatur)	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	Dinas Pendidikan Daerah
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	Dinas Pendidikan

MISI 1 : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBUJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	67%	100%		Dinas Perhubungan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur mengisi Jabatan Fungsional sesuai dengan bidangnya	43% (137 Pegawai)	100% (320 Pegawai)		Dinas Perkebunan dan Kehutanan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%		Dinas Pertambangan dan Energi
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	55% (124 ORG)	100%		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan aparatur Disnakeswan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	500	400		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0%	100%		Dinas Sosial
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%			Inspektorat
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60%	100%		RSUD Alabi Samboja
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50%	90%		RSUD AM. Parikesit
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40	450		RSUD Dayaku Raja
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35%	100		Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		Kecamatan Muara Wis
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	n.a	100%		Kecamatan Kota Bangun
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		Kecamatan Kotla Bangun
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		Kecamatan Kenohan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		Kecamatan Kembang Jangut
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		Kecamatan Muara Kaman
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		Kecamatan Samboja
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		Kecamatan Sanga-Sanga
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		Kecamatan Muara Mumai
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		Kecamatan Marang Kayu
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		Kecamatan Loa Janan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		Kecamatan Loa Kulu
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	100%		Kecamatan Muara Badak
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		Kecamatan Tabang
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		Kecamatan Muara Jawa

MISI 1 : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
			Semua Urusan Pemerintahan /fungsi Pendukung	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	Kecamatan Tenggaraong Seberang
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	Kecamatan Anggana
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Sekretariat Daerah
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Sekretariat DPRD
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Sekretariat DP KORPRI
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Badan Kearsipan dan Perpustakaan
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Badan Kelangka Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	82%	100%	Badan Kepegawaian Daerah
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	213	100%	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	1.00	Badan Lingkungan Hidup Daerah
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Badan Perencanaan Modal dan Promosi Daerah
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	93%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	99.40 %	100 %	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	220 Aparatur	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Dinas Pendidikan Daerah
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Dinas Pendidikan

MISI 1 : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBUJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Dinas Perhubungan
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 Aparatur	220 Aparatur	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Dinas Pertambangan dan Energi
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	150	225	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	60 bulan	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Dinas Sosial
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Inspektorat
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	RSUD Abadi Samboja
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	RSUD Dayaku Raja
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	90%	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kecamatan Muara Wis
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	n.a	100%	Kecamatan Kota Bangun
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kecamatan Tenggaraong
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kecamatan Kenohan
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kecamatan Kembang Jangut
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kecamatan Muara Kaman
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kecamatan Samboja
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kecamatan Sanga-Sanga
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kecamatan Muara Mumai
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kecamatan Marang Kayu
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kecamatan Seblu
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kecamatan Loa Janan
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kecamatan Loa Kulu
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kecamatan Muara Badak
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kecamatan Tabang

MISI 1 : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kecamatan Muara Jawa
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kecamatan Tenggarong Seberang
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kecamatan Anggana
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Jawa
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Pendingin
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Sarifaya
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Sanga-Sanga Muara
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Sanga-Sanga Dalam
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Muara Kembang
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Tamapole
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Muara Jawa Pesisir
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Muara Jawa Tengah
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Muara Jawa Ilir
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Muara Jawa Ulu
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Teluk Dalam
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Mahulu
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Loa Ipuh Darat
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Bukit Biru
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Jahab
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Baru
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Mangkurawang
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Timbau
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Loa Ipuh
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Melayu
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Loa Tebu
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Panji
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Sukarame
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Argosari

MISI 1 : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
Optimalnya akuntabilitas dan pengawasan daerah			Pendukung Urusan Pemerintahan Keuangan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Sambaja Kuala
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Teluk Pemedas
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Sampani
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Sungai Seluang
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Sungai Merdeka
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Tanjung Harapan
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Karya Merdeka
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Salak Api Darat
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Margomulyo
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Muara Sembilang
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Handli Baru Darat
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Kampung Lama
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Wonotirto
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Amborawang Darat
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Bukit Merdeka
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Salak Api Laut
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Kelurahan Amborawang Laut
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyampaian LKPD Tepat Waktu	100%	100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
					Tertib Administrasi BMD			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
					Cakupan Pemanfaatan BMD yang potensial			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala Daerah	cakupan layanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala Daerah	100%	100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	cakupan penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	Sekretariat Daerah
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Cakupan Peningkatan Pelayanan Kedinasan kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	100%	100%	Sekretariat Daerah

MISI 1 : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
		daerah serta penambahan tenaga personil pengawas internal pemerintah daerah 5.2. Peningkatan dan penerapan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah, dan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 5.3. Penerapan SAP berbasis Aktual di seluruh perangkat daerah secara online 5.4. Penguatan SDM pengelola keuangan daerah 5.5. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah melalui pendampingan terarah di setiap perangkat daerah	Pendukung Urusan Pemerintahan: Sekretaris DP KORPRI Pendukung Urusan Pemerintahan: Sekretaris DP KORPRI Pendukung Urusan Pemerintahan: Sekretaris DP KORPRI	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Cakupan obyek kegiatan dan anggaran yang diawasi	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	Sekretariat Daerah
				Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Cakupan Peningkatan Sistem pengawasan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	100%	100%	Sekretariat Daerah
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Cakupan Peningkatan Sistem pengawasan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	100%	100%	Sekretariat DPRD
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Cakupan Peningkatan Sistem pengawasan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	100%	100%	Sekretariat DP KORPRI
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Cakupan Peningkatan Sistem pengawasan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Desa	100%	100%	Inspektoriat
				Cakupan Peningkatan terhadap pegeblaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian dan peyenggaraan urusan pemerintah daerah.		100%	100%	Inspektoriat
				Cakupan implementasi SPKD		n.a	100%	Inspektoriat
				Cakupan review dokumen Anggaran SKPD dan reviu LKPD.		100%	100%	Inspektoriat
				Cakupan Evaluasi SAKIP SKPD		100%	100%	Inspektoriat
				Cakupan Monitoring LPD SKPD		100%	100%	Inspektoriat
				Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI		52%	80%	Inspektoriat
				Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APUP		90%	100%	Inspektoriat
				Cakupan implementasi SPIP		100%	100%	Inspektoriat
				Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Cakupan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Pengawas	100%	100%	Inspektoriat
				Program Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	100%	100%	Inspektoriat
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Sekretariat Daerah
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Sekretariat DPRD
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Sekretariat DP KORPRI
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Badan Keasrian dan Perpustakaan
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Badan Keluaga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Badan Kepegawaian Daerah

MISI 1 : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	SKPD Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan		144 dok/obje; 45 objek	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	1.00	Badan Lingkungan Hidup Daerah
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Badan Pelayanatan Perizinan Terpadu
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan		77%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95.60 %	100 %	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95.60 %	100 %	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	28 Dokumen	35 Dokumen	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Dinas Pemuda dan Olahraga

MISI 1 : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	SKPD PEMANGUNG JAWAB
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%		100%	Dinas Pendapatan Daerah
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%		100%	Dinas Pendidikan
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%		100%	Dinas Perhubungan
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP : C		Nilai LAKIP : A	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6 dok/lap.		13 dok/lap	Dinas Pertambangan dan Energi
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	29 lap/dok.		136 dok/lap	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	280		800	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	CC		A	Dinas Sosial
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%		100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%		100%	Inspekturat
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%		100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%		100%	RSUD Abadi Samboja
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%		100%	RSUD AM. Parikesit
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%		100%	RSUD Dayaku Raja
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%		100%	Dinas Kesehatan
			Pendukung Urusan Pemerintahan: Kecamatan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%		100%	kecamatan Muara Wis
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	n.a		100%	kecamatan Kota Bangun
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%		100%	kecamatan Tenggatong

MISI 1 : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kecamatan Samboja
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kecamatan Muara Muntai
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kecamatan Marang Kayu
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kecamatan Sebulu
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kecamatan Loa Janan
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kecamatan Loa Kulu
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kecamatan Muara Badak
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kecamatan Tabang
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kecamatan Muara Jawa
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kecamatan Tenggaraong Seberang
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kecamatan Anggana
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kecamatan Kenohian
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kecamatan Kembang Jangut
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kecamatan Muara Kaman
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kecamatan Sanga-Sanga
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kecamatan Jawa
Pendukung Urusan Pemerintahan: Kelurahan				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Pendingin
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Saritaya
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Sanga-Sanga Muara
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Sanga-Sanga Muara

MISI 1 : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Sanga-Sanga Dalam
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Muara Kembang
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Tamapole
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Muara Jawa Pesisir
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Muara Jawa Tengah
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Muara Jawa Ilir
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Muara Jawa Ulu
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Dondang
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Teluk Dalam
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Mahulu
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Loa Ipuh Darat
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Bukit Bru
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	35%	20%	Kelurahan Jahab
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Baru
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Mangkurawang
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	35%	20%	Kelurahan Timbau
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Loa Ipuh
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Melayu
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Loa Tebu

MSI 1 : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
Meningkatnya terleb administrasi kependudukan masyarakat	Kewilayahan	6.1. Pelayanan "jemput bola" e-KTP secara periodik untuk wilayah terpencil dan pendataan 6.2. Sosialisasi dan pendataan berka 6.3. Pemberdayaan pemerintah desa	Urusan Wajib Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Panji
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Sukarame
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Argosari
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Teluk Pemedas
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Sanipah
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Sungai Selang
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Tanjung Harapan
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Karya Merdeka
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Saik Api Darat
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Margomulyo
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Handil Baru
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	35%	20%	Kelurahan Handil Baru Darat
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Kampung Lama
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Amborawang Darat
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Saik Api Laut
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Kelurahan Amborawang Laut
				Program Keresahan Kebijakan Kependudukan	Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio Penduduk ber KTP elektronik persatuan penduduk	71%	100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
					Rasio Pasangan Non Muslim berka Nikah	63%	88%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

MISI 1 : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
		terkait tertib administrasi kependudukan masyarakat			Persentase Kepemilikan Akta Kematian	0,26%	100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
					Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	89%	100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
					Cakupan RT memiliki laptop	N/A	3.058 RT	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
					Cakupan RT yang menguasai Aplikasi Teknis Kependudukan	N/A	3.058 RT	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
					Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan tingkat RT berbasis SI/IAK	N/A	3.058 RT	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
					Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	100%	100%	Kecamatan Loa Janan
				Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3,12	2	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	Persentase Peserta KB Aktif	73,87%	73,93%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Cakupan Pasangan Usia subur yg isterinya dibawah 20 thn	6,22	2.50%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program pengendalian Penduduk	Jumlah Informasi Kependudukan yang dipublikasikan	-	6	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/ K/R yang Mandiri	Cakupan Petugas Lapangan KB/ Penyuluh KB (PLKB/ PKB) 1 petugas 2 Desa	36,97	50,00	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) per desa	80	97%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Pembinaan Kesetaraan ber-KB Jalur Pemerintah	Cakupan Pelayanan KB Keluarga Miskin	29,5	26,99%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	5%	30	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Peningkatan Kesetaraan KB Gaditis, Wilayah Khusus dan sasaran Khusus	Tingkat Ketersediaan kampung KB	0	18	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Advokasi, Pergerakan, dan Informasi	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/kelurahan 100% setiap tahun	90%	100%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yg Ber-KB	80	91%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	70%	96%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Cakupan Keluarga Anggota BKB, BKR, BKL yang ber KB	30,25	100	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MSI 1 : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBUJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
Optimalnya kerjasama Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesiapsiagaan penanganan bencana	8. Peningkatan Sinergitas Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha	8.1. Peningkatan koordinasi antar stakeholder sampai dengan tingkat desa 8.2. Pengadaan sarana prasana komunikasi terpadu 8.3. Penguatan kapasitas keamanan lingkungan berbasis masyarakat 8.4. Penyediaan sarana prasarana penanganan bencana di tiap kecamatan	Urusan Wajib Ketenetraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Program Peningkatan Kemandirian dan pembinaan kesetiaan jalur swasta	Cakupan Pelayanan KB jalur Swasta	38,85%	42,49%	SKPD Keluaga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan penanganan konflik	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat
				Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekai)	Cakupan penanganan gejolok masyarakat	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat
				Program Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah kasus penyakit masyarakat	224 kasus	190 kasus	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat
					Partisipasi masyarakat dalam pemilu	58,75%	75%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat
					Persentase omas yang terbit administrasi	50%	100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat
					Persentase paprol yang terbit administrasi	50%	100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat
				Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat
					Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan penanganan kamtibmas	100%	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
					Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100%	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
					Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	100%	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekai)	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten	100%	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
					Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten	100%	90%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
				Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan pengamanan lingkungan	100%	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
					Cakupan rasio pengas limas di Kabupaten	n.a	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Cakupan Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Bencana	50%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			
					Cakupan Deteksi Dini bencana alam	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Cakupan pelayanan penanganan korban bencana alam	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan bencana	89%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Hunian yang mendapat bantuan	50	350	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	100%	100%	Kecamatan Loa Janan

TABEL 7.2 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PADA MISI KEDUA

MISI 2 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKOMPETEN

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan	1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 2. Peningkatan Kualitas dan Manajemen Sekolah	1.1. Pembangunan Sekolah baru 1.2. Pemenuhan target reabilitasi sekolah, pengadaan mebeluar, penataan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan 2.1. Pemanapan kurikulum sesuai dengan tingkat satuan pendidikan, penguatan Tin pengembang kurikulum, penguatan KKG,MGMP berbasis teknologi informasi 2.2. Peningkatan kualitas guru kepala sekolah, pengawas sekolah, PTK PAUDNI 2.3. Pemanapan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal lintas SKPD 2.4. Penguatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menggunakan Balance Scorecard	Urusan Wajib Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	77.39	95	Dinas Pendidikan
				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan Dasar Sembilan Tahun APK SD/MI APK SMP/MTs APM SD/MI APM SMP/MTs Angka Putus Sekolah SD/MI Angka Putus Sekolah SMP/MTs Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs Rasio guru/murid SD/MI Rasio guru/murid SMP/MTs Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik Satu guru satu rumah Persentase sekolah yang memiliki Komputer dan Peralatan Bantu mengajar Modern dan Layak	100.06 93 99.65 91.19 0.005 0.011 100.02 1 : 202 1 : 273 1 : 15 1 : 16 28.67 65 0 17%	100 96.50 92.75 0.001 0.05 100 1 : 320 1 : 320 1 : 22 1 : 23 80 95 500 60%	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
				Program Pendidikan Menengah	Pendidikan Menengah APK SMA/MA/SMK APM SMA/MA/SMK Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK Angka Melanjutkan dari SMP/MTs SMA/MA/SMK Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK Sekolah pendidikan SMA/MA/SMK kondisi bangunan baik	88.98 78.53 0.14 99.23 1 : 266 1 : 18 75%	90.30 78.85 0.08 99.40 1 : 362 1 : 24 92	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
				Program Pendidikan Luar Biasa	Pendidikan Luar Biasa Persentase anak membutuhkan khusus layanan pendidikan	25	55	Dinas Pendidikan
				Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan Non Formal dan Informal Angka Melek Huruf Jumlah Desa Pintar dan Perpustakaan Kampung	99.89 0	99.86 18	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
				Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Angka Lulusan SD/MI Angka Lulusan SMP/MTs Angka Lulusan SMA/MA/SMK Rata-rata Nilai UN SD/MI Rata-rata Nilai UN SMP/MTs Rata-rata Nilai UN SMA/MA/SMK Guru Berkualifikasi SI / D 4 Guru bersertifikasi Pendidik	99.10 99.98 99.54 66.17 50.90 60.90 89 55	99.16 99.99 99.60 66.35 65 70 96 85	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

MISI 2 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKOMPETEN

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBUJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
Meningkatnya budaya baca masyarakat	3. Inovasi Pelayanan Perpustakaan	3.1. Pengembangan Rumah Baca tiap Desa/keurahan sesuai dengan potensi wilayah. 3.2. Pembangunan Taman Bacaan (Taman Pintar) 3.3. Optimalisasi pelayanan Perpustakaan Keliling 3.4. Pengembangan Perpustakaan Digital	Urusan Wajib Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Kepala Sekolah memiliki nomor unik kepala sekolah (NUKS)	62	90	Dinas Pendidikan
					Guru penerima tambahan penghasian pada sekolah terpencil	2,87	8	Dinas Pendidikan
					Persentase sekolah di daerah miskin dan terpencil yang memiliki Guru berkualifikasi STD4	2	8	Dinas Pendidikan
					Persentase Anak Disa bisa membaca Al-Qur'an	85	91	Dinas Pendidikan
					Manajemen Layanan Pendidikan			Dinas Pendidikan
					Sekolah Terakreditasi	92	98	Dinas Pendidikan
					Sistem informasi manajemen pendidikan terpadu (SIMPEDU)	7	18	Dinas Pendidikan
					Persentase Siswa penerima beasiswa KUKAR CERDAS	10	16	Dinas Pendidikan
					Pertumbuhan pengunjung perpustakaan per tahun	28.010 orang	218.000 orang	Badan Keasripan dan Perpustakaan
					Jumlah perpustakaan/taman baca	73 Unit	265 unit	Badan Keasripan dan Perpustakaan
					Tingkat Ketersediaan Sarpas Perpustakaan Desa/keurahan (Kampung Pintar)	30%	100%	Badan Keasripan dan Perpustakaan
					Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	66.504 Expl	78.504 Expl	Badan Keasripan dan Perpustakaan
					Indeks kepuasan masyarakat	-	> 90	Dinas Kesehatan
					Persentase perawatan gizi balita	100%	100%	Dinas Kesehatan
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	4. Perluasan cakupan promosi dan pelayanan kesehatan dalam perluasan layanan kesehatan dan pencegahan penyakit 5. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dengan memperhatikan keterjangkauan kawasan permukiman dan perkembangan kesehatan masyarakat 6. Peningkatan kualitas dan kompetensi nakes untuk dapat memenuhi kebutuhan layanan kesehatan 7. Optimalisasi penerapan SPM kesehatan 8. Peningkatan tata kelola layanan kesehatan melalui penerapan standar pelayanan dan keterlibatan masyarakat	4.1. Optimalisasi peran desa sraga untuk melakukan percepatan layanan kesehatan dilakukan terutama untuk mengupayakan terakupnya wilayah-wilayah yang selama ini kurang terjangkau layanan kesehatan yang diberikan baik oleh Puskesmas maupun Pustu. 4.2. Penerapan program promosi kesehatan melalui keterlibatan masyarakat guna meningkatkan upaya preventif agar menjadikan hidup lebih sehat dan bersih 5.1. Pengembangan sistem transportasi desa untuk memudahkan akses menuju pusat layanan kesehatan 5.2. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan pada rumah sakit, puskesmas, pustu, dan posyandu. Peralatan standar minimum harus disediakan sampai di tingkat puskesmas guna melayani ibu, bayi dan balita. 5.3. Peningkatan ketersediaan obat-obatan agar dapat mengantisipasi kebutuhan kuratif maupun preventif masyarakat. 5.4. Peningkatan ketersediaan peralatan kesehatan pada RSU kecamatan Kota Bangun yang masih	Urusan Wajib Kesehatan	Program Ujaya Kesehatan Masyarakat	Persentase penggunaan obat dan pertekalan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	100%	100%	Dinas Kesehatan
				Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Jaminan Kesehatan Penduduk Kategori Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	100%	100%	Dinas Kesehatan
				Program Pengendalian Penyakit dan Surveilans	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan jaringannya yang terakreditasi	0%	100	Dinas Kesehatan
				Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	RSUD baru yang dibangun	3	5	Dinas Kesehatan
				Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase penggunaan obat dan pertekalan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	100%	100%	Dinas Kesehatan
				Program obat dan pertekalan Kesehatan	Jaminan Kesehatan Penduduk Kategori Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	100%	100%	Dinas Kesehatan
				Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang melakukan pengembangan obat	100%	100%	Dinas Kesehatan
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Sraga Aktif (Desa Sehat Mandiri)	65%	80%	Dinas Kesehatan
				Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase desa/keurahan yang melakukan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	9.70%	> 80	Dinas Kesehatan
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase tatatan kawasan sehat	0%	100%	Dinas Kesehatan
					Persentase penemuan kasus penyakit menular (parameter yang diukur adalah penderita baru TB Paru BTA (+)	52%	65%	Dinas Kesehatan
					Persentase desa/keurahan Universal Child Immunization (UCI)	74%	95%	Dinas Kesehatan

MISI 2 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKOMPETEN

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
		6.1. Peningkatan kebutuhan nakes dan pendistribusian secara proporsional sesuai dengan kebutuhan wilayah dan distribusi permukiman.		Program pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang melaksanakan pelayanan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	74%	95%	Dinas Kesehatan
		6.2. Peningkatan kompetensi dukun sebagai mitra bidang, terutama bagi dukungan dalam proses persalinan serta paska melahirkan.		Program Perangulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana Wabah	Persentase Cakupan Penanganan KLB	100%	100%	Dinas Kesehatan
		6.2. Peningkatan kompetensi dukun sebagai mitra bidang, terutama bagi dukungan dalam proses persalinan serta paska melahirkan.		Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	Persentase Kunjungan Ibu Hamil (K4)	85%	97%	Dinas Kesehatan
					Persentase pelayanan ibu Nifas	87%	95%	Dinas Kesehatan
					Persentase pelayanan bayi	80%	90%	Dinas Kesehatan
					Persentase Peserta KB Aktif	56%	70%	Dinas Kesehatan
				Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	Persentase Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDIDTK)	0%	90%	Dinas Kesehatan
		7.1. Meningkatkan akses ibu hamil kepada layanan puskesmas.		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan jaringannya yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	30%	80%	Dinas Kesehatan
		7.2. Pengembangan basis data dan informasi ibu hamil berbasis desa.						
		7.3. Peningkatan layanan Puskesmas pada daerah permukiman terpencil atau jauh dari pusat pengembangan.		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Cakupan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang melaksanakan pelayanan yang terstandarisasi.	100%	100%	Dinas Kesehatan
		7.4. Peningkatan peran Posyandu sebagai bagian dari penerapan sistem peringatan dini kesehatan serta mensinergikan berbagai layanan program kesehatan lainnya dalam bentuk rumah sehat desa.						
		8.1. Penerapan standar norma dan standar pelayanan. Penerapan standar agar tata kelola layanan kesehatan memenuhi harapan penerima manfaat.		Program kejelasan dan Manajemen Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan UPTD yang menerapkan sistem manajemen mutu	44%	100%	Dinas Kesehatan
					Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)	0%	100%	Dinas Kesehatan
					Persentase pemberian tunjangan penghasilan tenaga kesehatan di daerah terpencil dan pedalaman	0%	100%	Dinas Kesehatan
		8.2. Penerapan mekanisme penanganan keluhan masyarakat agar terbangunnya kualitas layanan kesehatan yang lebih baik.		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan unit yang telah menerapkan Standar Pelayanan	50	100	RSUD AM. Parkesit
					Cakupan unit yang telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	≤ 8 Menit	≤ 8 Menit	RSUD AM. Parkesit
		Mekanisme penanganan keluhan merupakan satu hal penting yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai kualitas layanan sekaligus.			Cakupan Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk setiap proses bisnis	10	100	RSUD AM. Parkesit
		Penerapan mekanisme penanganan keluhan perlu dilakukan pada semua unit layanan kesehatan, baik itu rumah sakit, puskesmas maupun puskesmas pembantu.			Cakupan Manajemen dan Penggunaan Obat (MPO) 80%	25	80	RSUD AM. Parkesit
					Cakupan Peningkatan Mutu dan keselamatan Pasien (PMKP) 80%	25	80	RSUD AM. Parkesit
					Cakupan Manajemen Fasilitas dan keselamatan (MFK) 80%	25	80	RSUD AM. Parkesit
					Cakupan Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI) 80%	25	80	RSUD AM. Parkesit
		8.3. Penerapan standar pelayanan publik guna mewujudkan tekad sebagai pelayanan publik dalam memberi layanan terpadu yang secara terus menerus diperbaiki (continuous improvement).			Cakupan Akses ke Pelayanan dan kontinuitas Pelayanan (APK) 80%	25	80	RSUD AM. Parkesit
					Cakupan Asesmen Pasien (AP) 80%	25	80	RSUD AM. Parkesit
					Cakupan Pelayanan Pasien (PP) 80%	25	80	RSUD AM. Parkesit
					Cakupan Pelayanan Anastesi dan Bedah (PAB) 80%	25	80	RSUD AM. Parkesit
		8.4. Mengembangkan mekanisme kontrol masyarakat dalam manajemen Puskesmas.			Cakupan Hak Pasien dan keluarga (HPK) 80%	25	80	RSUD AM. Parkesit
					Cakupan Pendidikan pasien dan keluarga (PKP) 80%	25	80	RSUD AM. Parkesit

MISI 2 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKOMPETEN

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
				Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Cakupan Pencegahan dan pengendalian Infeksi (PPI) 80%	25	80	RSUD AM, Parkesit
					Cakupan Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) 80%	25	80	RSUD AM, Parkesit
					Cakupan Sasaran Program MDGs 80%	25	80	RSUD AM, Parkesit
					Dokumen Renstra, RSB dan RBA/Renja yang SMART (Specific-Measurable-Achievable-Relevant-Timely), definitif dan tepat waktu	-	Renstra, RSB dan RBA/Renja	RSUD AM, Parkesit
					Rasio Kas (Cash Ratio) sebesar 241% s/d 300%	180%	241% s/d 300%	RSUD AM, Parkesit
					Rasio Lancar (Current Ratio) sebesar 481% s/d 600%	360%	481% s/d 600%	RSUD AM, Parkesit
					Periode Penagihan Piutang (Collection Period) kurang dari 30 hari	59 Hari	< 30 hari	RSUD AM, Parkesit
					Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) sebanyak 30 s/d 35 kali	15 kali	30 s/d 35 kali	RSUD AM, Parkesit
					Imbalan Ekuitas (Return on Equity) sebesar ≥ 8%	3%	≥ 8%	RSUD AM, Parkesit
					Rasio Subsidi Biaya Pasien sebesar 11% s/d 15%	0%	11% s/d 15%	RSUD AM, Parkesit
					Opini laporan keuangan BLUD	WTP	WTP	RSUD AM, Parkesit
					Kinerja BLUD Baik	A	AAA	RSUD AM, Parkesit
					Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK	100%	100%	RSUD AM, Parkesit
					Cakupan Pengelolaan Aset	50%	95%	RSUD AM, Parkesit
					Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset TurnOver) sebesar > 20%	10%	> 20%	RSUD AM, Parkesit
					Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset) sebesar > 6%	2.5%	> 6%	RSUD AM, Parkesit
					Capaian Akuntabilitas Baik	CUKUP BAIK	BAIK	RSUD AM, Parkesit
					Cakupan uraian tugas yang telah dimutakhirkan	30	100	RSUD AM, Parkesit
					Sinkronnya kebijakan antar unit	50%	100%	RSUD AM, Parkesit
					Cakupan modul SIM-RS yang diimplementasi	40	100	RSUD AM, Parkesit
Program Upaya Kesehatan Masyarakat					Rasio Pendapatan BLUD terhadap Biaya Operasional sebesar > 65%	35	>65	RSUD AM, Parkesit
					Persentase Tingkat kemandirian Anggaran rumah sakit diluar biaya investasi dan belanja pegawai	0	0	RSUD AM, Parkesit
					Kesiapan menuju rumah sakit kelas B pendidikan	50	100	RSUD AM, Parkesit
					Penanganan pengaduan/komplain > 70%	50	70	RSUD AM, Parkesit
					Persentase Kenuasan Pasien	79	82	RSUD AM, Parkesit
					Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat jalan sebesar ≥ 1,1	0	60	RSUD AM, Parkesit
					Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat darurat sebesar ≥ 1,1	0	60	RSUD AM, Parkesit
					Pertumbuhan hari perawatan rawat inap sebesar ≥ 1,1	0	60	RSUD AM, Parkesit
					Pertumbuhan pemeriksaan radiologi sebesar ≥ 1,1	0	60	RSUD AM, Parkesit
					pertumbuhan pemeriksaan laboratorium sebesar ≥ 1,1	0	60	RSUD AM, Parkesit
					pertumbuhan operasi sebesar ≥ 1,1	0	60	RSUD AM, Parkesit

MISI 2 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKOMPETEN

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
					Pertumbuhan rehab medik sebesar $\geq 1,1$	0	60	RSUD AM, Parikesit
					Cakupan penanggulangan masalah kesehatan pada masyarakat tanpa jaminan	-	85%	RSUD AM, Parikesit
				Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan kunjungan pasien dengan COB	0%	10%	RSUD AM, Parikesit
					Cakupan sarana pelayanan kesehatan yang dibiina	-	8 FKTP	RSUD AM, Parikesit
				Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit	10	100	RSUD AM, Parikesit
				Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit	80	100	RSUD AM, Parikesit
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan bayi baru lahir sehat yang mendapat ASI Eksklusif	-	100	RSUD AM, Parikesit
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Kayawan RS risiko tinggi yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	<2% 100	<1% 100	RSUD AM, Parikesit RSUD AM, Parikesit
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Pelayanan General Check Up pada Pemangku Kepentingan (Bupati dan Wakil, Anggota DPRD dan Keluarga)	100%	100%	RSUD AM, Parikesit
				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS)	100%	100%	RSUD Abadi Samboja
					Tingkat Kepatuhan terhadap SOP Rumah Sakit Umum Daerah yang melaksanakan Sistem Manajemen Mutu (ISO : 9000 : 2008)	60 100	100 100	RSUD Abadi Samboja RSUD Abadi Samboja
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan Pasien Keladkan Mal Praktek	40%	100%	RSUD Abadi Samboja
					Pencapaian Keselamatan Pasien (Patient Safety)	- 50	- 100	RSUD Abadi Samboja
					Cakupan Penanganan Pengaduan Rumah Sakit	90	100	RSUD Abadi Samboja
				Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase peralatan sesuai standar rumah sakit kelas C	60%	3,7	RSUD Abadi Samboja
				Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang sesuai standar dan dipelihara	71,52	87,5	RSUD Abadi Samboja
					prosenasi sarana dan prasarana yang sesuai standar dan dipelihara	85	100	RSUD Abadi Samboja
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Pelayanan (Penemuan dan penanganan) HIV AIDS, TB Paru, dan Malaria	60%	100%	RSUD Abadi Samboja
					Persentase kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung	1,2	0	RSUD Abadi Samboja
					prosenass pencegahan dan pemulihan penyakit bersumber bhatang	70	100	RSUD Abadi Samboja

MISI 2 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKOMPETEN

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
Perluasan Kesempatan Kerja		9.1. Peningkatan kompetensi angkatan kerja potensial 9.2. Penempatan Angkatan Kerja 9.3. Penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang berbasis potensi kecamatan 9.4. Fasilitas Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Kelembagaan	Urusan Wajib Ketenagakerjaan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	RSUD Dayaku Raja
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan Pasien	0	100%	RSUD Dayaku Raja
					Kepuasan Mal Praktek	0%	100%	RSUD Dayaku Raja
					Pencapaian Keselamatan Pasien (Patient Safety)	-	100%	RSUD Dayaku Raja
					Cakupan Penanganan Pengaduan Rumah Sakit	-	100%	RSUD Dayaku Raja
				Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase peralatan sesuai standar rumah sakit kelas C	40%	100%	RSUD Dayaku Raja
				Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang sesuai standar dan dipelihara	30%	100%	RSUD Dayaku Raja
				Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	Persentase pelayanan ibu	0	100%	RSUD Dayaku Raja
				Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya logistik RS tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu	70%	100%	RSUD Dayaku Raja
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Kayawan RS yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan penanganan penyakit menular	-	-	RSUD Dayaku Raja
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Cakupan customer yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan penanganan Penyakit Tidak Menular (PTM)	-	-	RSUD Dayaku Raja
				Program Peningkatan Pelayanan Medis dan Non Medis	Tersedianya pelayanan sesuai RS kelas C	50%	100%	RSUD Dayaku Raja
				Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktifitas	Cakupan Pelayanan Pencari kerja yang dilatih berbasis kompetensi di 9 Kelompok Lapangan Usaha (KLU)	0.15%	3%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Cakupan Pencari Kerja yang ditingkat produktivitasnya dengan berbasis kewirausahaan di 9 Kelompok Lapangan Usaha (KLU)	0.30%	3%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Penempatan Pemberdayaan Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapat fasilitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	n.a	57.411.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga		10.1. Pembinaan kepemudaan melalui sekolah dan kelompok masyarakat 10.2. Pemberdayaan karang taruna di tiap desa 11.1. Pemberian bantuan sarana dan prasarana olahraga 11.2. Fasilitas penyelenggaraan kegiatan olahraga di masing-masing wilayah kecamatan 11.3. Optimalisasi Insentif Berbasis Prestasi bagi atlet	Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Cakupan Organisasi Kepremudaan Aktif	14.69%	28%	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepremudaan	Cakupan Organisasi Kepremudaan Aktif	n.a	100%	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Fasilitas Penumbuhan Wirausaha Pemuda mandiri	1.200	5.150	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Fasilitas Pengembangan Wirausaha Pemuda, mandiri usaha yang mandiri	n.a	105	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Fasilitas Pemuda Dalam Pembangunan Karakter dan Peningkatan Kualitas Jasmani	0.91	18%	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Program Pembinaan dan Pemasyarakatan	Cakupan bina atlet lokal	17.51	50	Dinas Pemuda dan Olahraga

MISI 2 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKOMPETEN

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
Meningkatnya kapasitas masyarakat menuju desa berkehidupan sosial	12. Pengembangan Desa Berkehidupan Sosial 13. Gerakan Desa Membangun	11.4. Fasilitas kegiatan olahraga melalui even-even lokal, regional, nasional, dan bahkan internasional	Urusan Wajib Pekerjaan umum dan penataan ruang	Olah Raga	Alif Pelajar yang di Bina	310	436	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Alif Olahraga Tradisional yang berprestasi	20	215	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Persentase penduduk yang melakukan kegiatan olahraga	74,76	82	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Tenaga keolahragaan yang bersertifikasi	422	430	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase ketersediaan Sarana dan prasarana olahraga	94,37	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemanduan	Kecamatan yang memiliki Sarana dan prasarana kependudukan	1	17	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase Sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	100	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Lapangan olah raga	n.a	1 Lapangan	Dinas Cipta Kaya dan Tata Ruang
				Program Bina Kampung Etam (Desa Berkehidupan Sosial)	Persentase Desa Berkehidupan Sosial	-	100	Dinas Sosial
				Program Pengembangan Lembaga-Lembaga Desa	Cakupan Fasilitas dan partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT, LPM, PKK, Karang Taruna, Lembaga Adat) dalam Musyawarah Pembangunan Desa	40	100	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
				Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Cakupan Fasilitas dan Pembinaan Pemberdayaan Peran Perempuan dan anak dalam kesejahteraan keluarga	480	480	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Cakupan Fasilitas Pembinaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100	100	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan Fasilitas dan Jumlah, Partisipasi Swa	50	80	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
				Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Pemeliharaan dan Fasilitas Pasca Program pemberdayaan masyarakat (Usaha kelompok Masyarakat)	450	450	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
				Program Penghematan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Cakupan Fasilitas Laporan Pengelolaan keuangan, Aset, Pendapatan, dan Transper Dana Desa	193	193	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

MISI 2 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKOMPETEN

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	14. Meningkatkan Sinergitas antar Stakeholder	14.1. Pemantapan peran perusahaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial 14.2. Pemantapan sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial 14.3. Pemantapan penyelenggaraan standar pelayanan kesejahteraan sosial	Urusan Wajib Sosial	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Cakupan pembinaan panti asuhan / panti jompo	100%	100%	Dinas Sosial
				Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang menerima bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial	68	100	Dinas Sosial
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase rehabilitasi sosial bagi korban bencana, korban tindak kekerasan dan perkakuan salah	70	75	Dinas Sosial
				Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase pemberdayaan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	58,2	85	Dinas Sosial
				Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase pembinaan sosial bagi anak terlantar	45	79	Dinas Sosial
				Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase pembinaan sosial bagi Penyandang cacat dan eks trauma	42,6	77	Dinas Sosial
				Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang Tuna Sosial	38,32	85	Dinas Sosial
				Program Pemberdayaan Kemandirian Kesejahteraan Sosial	Persentase partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	40,82%	84%	Dinas Sosial
				Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Sosial	Cakupan penyuluhan sosial	2 kali	125 Kali	Dinas Sosial
				Program Pelestarian Nilai-nilai Kejuangan, Kepertinisan dan Kesetia kawan Sosial	Persentase pelestarian nilai-nilai kepertinisan dan kesetia kawan sosial	85,7	100	Dinas Sosial
				Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengembangan Sistem pelayanan	Jumlah dokumen sistem pelayanan SKPD	10 dokumen	30 dokumen	Dinas Sosial
				Program Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Miskin Produktif	Usaha Mikro dan Kecil	39,456	50,256	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
				Program Pengembangan Usaha Kecil, dan menengah	Pertumbuhan UMKW Wirausaha Baru	1,753	12,553	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
				Program Pengembangan Kemiskinan Bidang Pertanian	Persentase petani miskin yang mendapat bantuan modal usaha (org)	14,21 % (3.500 petani TPH miskin dibagi 24,68 orang petani TPH)	30,98 % (7.600 orang petani TPH)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Meningkatnya kepedulian pengentasan kemiskinan antar sektor antar wilayah (lintas urusan)	15. Meningkatkan koordinasi pemerintah baik pusat maupun daerah	15.1. Sinkronisasi program lintas SKPD di daerah dengan fungsionalisasi TKPKD 15.2. Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 15.3. Optimalisasi APBD yang Pro Job, Pro Poor, Pro Growth, dan Pro Environment	Urusan Wajib Koperasi, usaha kecil, dan menengah	Program Pengembangan Kemiskinan Bidang Pertanian	Cakupan Pektehun Miskin Yang Mendapat Bantuan Modal Usaha (Org pekebun)	0	540 Pektehun	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
				Program Perangulangan Kemiskinan Bidang Perkebunan	Cakupan Pektehun Miskin Yang Mendapat Bantuan Modal Usaha (Org pekebun)	0	540 Pektehun	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
				Program Perangulangan Kemiskinan Bidang Perikanan	Cakupan Penurunan Kemiskinan masyarakat Peternakan (org)	0	840 Orang Hewan	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
				Program Perangulangan Kemiskinan Bidang Kelautan dan Perikanan	Cakupan Nelayan Kecil yang Mendapat Bantuan Modal Usaha	551 Nelayan Miskin)	500 Nelayan Miskin)	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Bedah Rumah	Cakupan Perbudidaya Kecil yang Mendapat Bantuan Modal Usaha	62 Pembudidaya Miskin)	500 Pembudidaya Miskin)	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Bedah Rumah	Cakupan Rumah Tidak Layak Huni yang di Renovasi	2.480 unit	4.660	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
				Program Bedah Rumah	Cakupan Rumah Tidak Layak Huni yang di Renovasi	0,8952	0,9353	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
				Program Bedah Rumah	Cakupan Rumah Tidak Layak Huni yang di Renovasi	2.480 unit	2.345 Unit	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
				Program Bedah Rumah	Cakupan Rumah Tidak Layak Huni yang di Renovasi	2.480 unit	2.345 Unit	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
				Program Bedah Rumah	Cakupan Rumah Tidak Layak Huni yang di Renovasi	2.480 unit	2.345 Unit	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

TABEL 7.3 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PADA MISI KETIGA

MISI 3 : MENINGKATKAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
Meningkatnya daya saing investasi daerah	1. Kebijakan insentif dan Disinsentif bagi investasi 2. Meningkatkan Kejasama dengan Pihak Ketiga	1.1. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan mempercepat peningkatan penanaman modal 1.2. Penerapan regulasi terkait kebijakan membuka kemudahan investasi daerah 2.1. Pengembangan potensi unggulan yang layak dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui metode Public Private Partnerships (PPP) 2.2. Pengembangan kawasan potensial seperti pariwisata terpadu, sentra pertanian, industri, dan perdagangan 2.3. Promosi potensi unggulan daerah secara periodik baik skala lokal, regional, nasional, dan bahkan internasional	Urusan Wajib Penanaman Modal	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Ratio daya serap tenaga kerja			Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah
					Pertumbuhan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	5.454	15.360	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah
					Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMMA)	47	48	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah
					Persentase Realisasi Investasi		100%	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah
					Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMMA)	6.252	53.780	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	3. Peningkatan kualitas perencanaan pendapatan daerah (PAD) 4. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah berbasis IT 5. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	3.1. Penyediaan data dan informasi potensi pendapatan daerah 3.2. Penerapan/implementasi Grand Strategi/Roadmap Pendapatan Asli Daerah 4.1. Pengembangan sistem PAD online untuk semua layanan PAD 4.2. Penyediaan sarana prasarana pendukung pungutan PAD yang merata di semua kecamatan 4.3. Peningkatan SDM aparatur pemungut PAD 4.4. Pemberian insentif bagi aparatur khususnya pemungut PAD di daerah terpencil 5.1. Pemetaan potensi baru bagi Pendapatan Asli Daerah 5.2. Kejasama antar daerah yang berkaitan dengan upaya peningkatan sumber PAD	Pendukung Urusan Pemerintahan Keuangan	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan PAD	Pertumbuhan PAD (pajak, retribusi daerah, laba BUMD/Perusda, dan Lain-lain PAD yang sah)	-	-	Dinas Pendapatan Daerah
					Pertumbuhan Kontribusi PAD Terhadap APBD	-	11.29%	Dinas Pendapatan Daerah
					Persentase Pertumbuhan Pajak	-	3.33%	Dinas Pendapatan Daerah
					Persentase Pertumbuhan Retribusi	-	7.69%	Dinas Pendapatan Daerah
					Persentase Pertumbuhan Bagi Hasil	-	5.35%	Dinas Pendapatan Daerah
Meningkatnya Kejasama CSR (Corporate Social Responsibility) dalam pembangunan daerah	6. Membuka Ruang Komunikasi antara Pemerintah dengan Dunia Usaha 7. Memfasilitasi Pelaku Usaha dalam Gerakan Pembangunan Kutai Kartanegara	6.1. Pembentukan Tim Fasilitasi CSR 7.1. Pelaksanaan komunikasi melalui "Gala Dinner" atau Silaturahmi berkala dengan pelaku usaha	Pendukung Urusan Pemerintahan Perencanaan	Program Kejasama Pembiayaan Pembangunan Daerah	Persentase penerapan Modu Kejasama Pembiayaan pembangunan daerah melalui Swasta	n.a	80	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

TABEL 7.4 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PADA MISI KEEMPAT
MISI 4 : MENINGKATKAN PENGELOLAAN PERTANIAN DAN PARIWISATA UNTUK PERCEPATAN TRANSFORMASI STRUKTUR EKONOMI DAERAH

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
Meningkatnya produktivitas, tata kelola dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas	1. Optimalisasi pengembangan irigasi pertanian dan peningkatan luasan lahan produktif yang beririgasi 2. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif ke non-pertanian tanaman pangan 3. Perbaikan image infrastruktur pertanian (ketersediaan sarana prasarana pertanian hulu, tengah dan hilir), utamanya pasar 4. Pembukaan lahan/usaha pertanian tanaman pangan yang baru dan peningkatan produktivitas pertanian 5. Peningkatan efisiensi peralatan pasca panen hasil pertanian tanaman pangan 6. Peningkatan efektivitas distribusi pupuk bersubsidi untuk tanaman pangan 7. Pengembangan dan promosi komoditas unggulan daerah dan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparaturnya (penyuluh lapangan). 8. Peningkatan optimalisasi industri pasca panen tanaman pangan (Rice Processing Unit/RPU) 9. Jaminan ketersediaan lahan produksi pertanian dan bahan baku untuk menarik investor 10. Pengembangan bahan pangan sumber karbohidrat 11. Pengembangan ketersediaan sumber pangan non beras dan edukasi pola konsumsi 12. Optimalisasi pengembangan bahan pangan berbasis sumberdaya peternakan (temak besar dan temak kecil) 13. Adaptasi perubahan lingkungan global dan	1.1. Pengelolaan sumber daya air untuk irigasi pertanian yang dapat melibatkan lahan sepanjang tahun melalui pembangunan waduk, jaringan irigasi, jalan usahatani 1.2. Pembangunan sistem irigasi untuk lahan-lahan baru dan perawatan sistem irigasi yang telah ada secara komitlyu. 1.3. Penetapan rasio pembukaan lahan pertanian/lembang dengan luasan hutan di suatu wilayah untuk menjaga keseimbangan ciri khas Kalimantan Timur sebagai daerah hutan hujan tropis basah. 2.1. Pengembangan database status lahan pertanian produktif yang dapat diakses oleh instansi terkait atau publik. 2.2. Penyusunan dan pengawalan aturan (Peraturan Daerah di tingkat kabupaten) tentang mitigasi alih fungsi lahan pertanian pangan produktif ke non-pertanian. 2.3. Pemantapan lahan eks areal pertambangan dan perkebunan yang tidak produktif untuk lahan pengembangan agro (pertanian pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) 3.1. Mendukung perbaikan dan revitalisasi infrastruktur pertanian (ketersediaan sarana prasarana pertanian hulu, tengah dan hilir) seperti alat mesin pertanian (traktor, thresher, transplanter, reaper), perundangan, sarana transportasi dan logistik produk pertanian, pasar tan/terminal agribisnis, dll 3.2. Mengembangkan sistem pemasaran sehingga dapat mendorong peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan bagi tenaga kerja di sektor pertanian 4.1. Membuka lahan pertanian baru (untuk usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dengan target 10.000 ha dalam kurun waktu 5 tahun 4.2. Membangun demplot-deplot sebagai model pengembangan usaha pertanian produktif 4.3. Meningkatkan akses layanan pemodalan usaha bagi pelaku	Urusan Wajib Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	Cakupan Regulasi Ketahanan Pangan Persentase Ketersediaan pangan utama Beras (%) Ketersediaan (ton) Jumlah Penduduk (jwa) Kebutuhan (jnh pendd x 113 kg/kp/th) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Persentase desa berstatus swasembada pangan utama (beras) (%) Cakupan Desa mandiri pangan (DESA) (%) Cakupan nilai (score) Pola Pangan Harapan Konsumsi. Cakupan Keamanan Pangan segar (%) Cakupan Bina Kelompok Tani (Madya dan Ulama) kelas Madya kelas Ulama Cakupan Pelayanan Penyuluhan Pertanian Satu Desa Satu Penyuluhan	 128,73% 105.041,60 722,100 81.597,30 87,28 19,83% 18,56% 59 		

MISI 4 : MENINGKATKAN PENGELOLAAN PERTANIAN DAN PARIWISATA UNTUK PERCEPATAN TRANSFORMASI STRUKTUR EKONOMI DAERAH

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBUJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
pengembangan wilayah pesisir dan laut secara terpadu 14. Inovasi terhadap Peningkatan Produktivitas perikanan tangkap 15. Pengembangan perikanan berbasis kawasan 16. Pengembangan industri pasca panen dan pengolahan hasil perikanan berdaya saing 17. Budidaya ikan Spesifik Lokal yang terancam punah 18. Pengendalian Alih Fungsi Sumberdaya Perikanan (Area Rawa)	4.3. Meningkatkan usaha perikanan 4.4. Meningkatkan SDM penyuluh dan revitalisasi kelembagaan penyuluhan (Balai Penyuluhan Pertanian) 4.5. Meningkatkan kapasitas dan manajemen kelembagaan usaha petani (koperasi pertanian) 4.6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan usaha ekonomi desa (BUMDES) untuk mendukung usaha pertanian 4.7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan usaha ekonomi daerah (BUMD) untuk mendukung usaha pertanian skala regional 5.1. Mengadakan mesin pasca panen untuk meningkatkan efisiensi panen dan peningkatan nilai tambah produk (miller/rice milling unit dan peralatan pendukung) 5.2. Menyediakan fasilitas perawatan mesin-mesin pasca panen dan pengolahan hasil pertanian. 5.3. Mendampingi usaha pasca panen dan pengolahan hasil pertanian. 6.1. Menyediakan informasi akurat tentang kebutuhan pupuk bersubsidi sebagai bahan pertimbangan untuk PT Pupuk Indonesia dalam merencanakan pengaturan pupuk bersubsidi. 6.2. Menyediakan alat transportasi yang memadai dan pergudangan pupuk pada beberapa titik strategis yang berdekatan dengan kawasan sentra produksi pertanian 7.1. Membentuk Satgas penanganan produksi, kualitas dan pengolahan produk 7.2. Menerapkan komoditas unggulan dapat menjadi dasar kebijakan dalam menyusun program-program pengembangan pertanian 7.3. Mengembangkan model komoditas unggulan strategis yang dirancang dari hulu sampai hilir sesuai dengan potensi wilayah, melibatkan banyak petani, memanfaatkan lahan marginal dan komoditas yang mempunyai mutifungsi yaitu jagung yang dapat dijadikan bahan makanan, pakan ternak dan perikanan, komoditas ekspor serta potensial untuk bahan bioenergi. model dapat	4.3. Meningkatkan usaha perikanan 4.4. Meningkatkan SDM penyuluh dan revitalisasi kelembagaan penyuluhan (Balai Penyuluhan Pertanian) 4.5. Meningkatkan kapasitas dan manajemen kelembagaan usaha petani (koperasi pertanian) 4.6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan usaha ekonomi desa (BUMDES) untuk mendukung usaha pertanian 4.7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan usaha ekonomi daerah (BUMD) untuk mendukung usaha pertanian skala regional 5.1. Mengadakan mesin pasca panen untuk meningkatkan efisiensi panen dan peningkatan nilai tambah produk (miller/rice milling unit dan peralatan pendukung) 5.2. Menyediakan fasilitas perawatan mesin-mesin pasca panen dan pengolahan hasil pertanian. 5.3. Mendampingi usaha pasca panen dan pengolahan hasil pertanian. 6.1. Menyediakan informasi akurat tentang kebutuhan pupuk bersubsidi sebagai bahan pertimbangan untuk PT Pupuk Indonesia dalam merencanakan pengaturan pupuk bersubsidi. 6.2. Menyediakan alat transportasi yang memadai dan pergudangan pupuk pada beberapa titik strategis yang berdekatan dengan kawasan sentra produksi pertanian 7.1. Membentuk Satgas penanganan produksi, kualitas dan pengolahan produk 7.2. Menerapkan komoditas unggulan dapat menjadi dasar kebijakan dalam menyusun program-program pengembangan pertanian 7.3. Mengembangkan model komoditas unggulan strategis yang dirancang dari hulu sampai hilir sesuai dengan potensi wilayah, melibatkan banyak petani, memanfaatkan lahan marginal dan komoditas yang mempunyai mutifungsi yaitu jagung yang dapat dijadikan bahan makanan, pakan ternak dan perikanan, komoditas ekspor serta potensial untuk bahan bioenergi. model dapat	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Perikanan Spesifik Lokasi/Tanaman Lokal Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Ubi Kayu	226,52	349,49	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura:	306.550 Ton	2.393.328 (47,54 %)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Padi Sawah (Ton)	173.848	1.359.683	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Padi Ladang(Ton)	12.982	102.380	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Kedelai (Ton)	154	2.972	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Kacang tanah (Ton)	463	3.981	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Ubi Kayu (Ton)	21.701	275.489	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Ubi Jalar (Kw/Ha)	5.214	36.255	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Tanaman Buah (Ton)	62.156	397.591	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Tanaman Sayuran Dataran Rendah (Ton)	30.032	214.977	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Program Peningkatan Penerapan Teknologi Penyuluhan	Cakupan Demplot Budidaya Tanaman Jagung	40% dari rekomendasi	90% dari rekomendasi	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
					Cakupan Paket Teknologi Budidaya Tanaman Jagung	-	95 % dari rekomendasi	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
					Cakupan Paket Teknologi Pasca Panen Dan Agribisnis Komoditas Jagung	-	90% dari rekomendasi	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
					Cakupan Teknologi Budidaya Yang Diterapkan (Padi, Kedelai)	-	95 % dari rekomendasi	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
					Cakupan Paket Teknologi Budidaya dan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan & Hortikultura	-	90% dari rekomendasi	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
					Cakupan Teknologi Budidaya Yang Diterapkan (Aren)	-	90% dari rekomendasi	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
					Cakupan Paket Teknologi Integrasi Budidaya Tanaman Sawit dengan Sapi Potong	-	90% dari rekomendasi	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
					Cakupan Paket Teknologi Budidaya dan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan & Hortikultura	-	90% dari rekomendasi	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
					Cakupan luas tanam komoditas tanaman Buah lokal/spesifik lokasi (ha)	2 Ha.	375	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Penambahan luas areal pertanian yang terlayani jaringan irigasi dan jalan pertanian	0,7 % (Penambahan luas areal terlayani = 119 Ha. dari 16.000 Ha lahan)	20%	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap :	1,4%	30%	(538.899 Ton)	6,7%	6,7%	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap :	0,9%	6,7%	(239.726 Ton)	1,8%	18,4%	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap :	1,1%	7%	(105. Unit Kapal)	93%	93%	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap :	7,3% (75.290,4 Ton)	93%	(697.818 Ton)	93%	93%	Dinas Kelautan dan Perikanan

MISI 4 : MENINGKATKAN PENGELOLAAN PERTANIAN DAN PARIWISATA UNTUK PERCEPATAN TRANSFORMASI STRUKTUR EKONOMI DAERAH

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
		dikembangkan oleh BUMD da atau kemitraan dengan korporasi swasta.			Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya Keramba (Ton/Tahun)	5,1% (40.683,1 Ton)	62% (389.280 Ton)	Dinas Kelautan dan Perikanan
		7.4. Meningkatkan kapasitas suplai bahan baku dalam jumlah yang sesuai dengan kapasitas produksi			Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya Tambak (Ton/Tahun)	3,8% (32.636,2 Ton)	26% (254.252 Ton)	Dinas Kelautan dan Perikanan
		unik menarik investor dibidang pasca panen atau pengolahan hasil pertanian akan terjaminnya			Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya kolam (Ton/Tahun)	10% (511,8 Ton)	149% (6.097 Ton)	Dinas Kelautan dan Perikanan
		7.5. Mengembangkan sistem pool komoditas pertanian untuk tingkat kabupaten			Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya kolam Terpal (Ton/Tahun)	20% (300 Ton)	167% (4.275 Ton)	Dinas Kelautan dan Perikanan
		7.6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDW aparatur (penyuluhan lapangan)			Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya Laut (Ton/Tahun)	25% (1.159,3 Ton)	396% (43.554 Ton)	Dinas Kelautan dan Perikanan
		7.7. Merevitalisasi kelenbagaan penyuluhan pertanian			Pertumbuhan Produk Benih (Ekor/Tahun)	5,2% (289.698.539 Ekor Benih)	61% (2.458.720 Ekor Benih)	Dinas Kelautan dan Perikanan
		7.8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas poktan dan gapoktan			Pertumbuhan Produk Budidaya Ikan Spesifik Lokal	20% (500 Kg)	4.700% (24.000 Kg)	Dinas Kelautan dan Perikanan
		8.1. Merevitalisasi RPU yang lebih modern dan efisien.			Pertumbuhan Nilai Produk Kelautan dan Perikanan	1,5% (6.496 Ton)	18% (43.279 Ton)	Dinas Kelautan dan Perikanan
		8.2. Meningkatkan kinerja manajemen melalui perencanaan berorientasi pasar.			Pertumbuhan Nilai Produk Kelautan dan Perikanan	Rp. 348.975.620.000	24% (Rp. 2.407.336.593.413)	Dinas Kelautan dan Perikanan
		8.3. Memenuhi bahan baku jenis premium sesuai kapasitas minimal baik dari sekitar RPU maupun dari luar daerah.			Persentase Penurunan Disparitas Harga Tingkat Produsen dan Konsumen	100% (Rp.15.000/Kg)	455% (Rp.6.8250/Kg)	Dinas Kelautan dan Perikanan
		8.4. Mengembangkan jaringan usaha kemitraan dan pemasaran produk industri pendukung, baik sebagai program jangka pendek adalah menjalin kerjasama dengan daerah lain yang telah lengkap			Persentase UPI yang Memenuhi Peryyaratan dan Keamanan Pangan	32% (48 UPI)	82% (84 UPI)	Dinas Kelautan dan Perikanan
		9.1. Mengembangkan infrastruktur program jangka pendek adalah mengalin kerjasama dengan daerah lain yang telah lengkap			Cakupan Kenakatan Tingkat Kelas POKLAHSAR	0	9	Dinas Kelautan dan Perikanan
		9.2. Meningkatkan keterampilan petani/UMKM berbasis pertanian/agro, penyediaan inovasi dan teknik produksi			Persentase Kelompok Masyarakat Kelautan Perikanan yang Terbina	20% (100 Kelompok)	70% (350 Kelompok)	Dinas Kelautan dan Perikanan
		9.3. Meningkatkan akses modal pada pelaku UMKM			Cakupan Penunuran Kasus ilegal Fishing	34 Kelompok	85 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
		9.4. Membentuk satuan tugas untuk melakukan pendampingan pada pelaku UMKM dengan program-program yang sesuai dengan yang dipeleikan			Persentase Kelompok Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	80 Kasus	10 Kasus	Dinas Kelautan dan Perikanan
		10.1. Mengembangkan program pengembangan pangan alternatif non beras yang sesuai/cocok bagi masyarakat Kabupaten Kukar			Persentase Kelompok Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	40% (20 POKMASWAS)	90% (45 POKMASWAS)	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Persentase Kelompok Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	3 Kawasan	8 Kawasan	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Persentase Kelompok Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	0	2 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Persentase Kelompok Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	96 (2%)	120,4	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Persentase Kelompok Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	31.657 KK, 14.770 KK, Total : 46.427 KK (3%)	35.943 KK, 32.676 KK, Total : 68.620 KK	Dinas Kelautan dan Perikanan

BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
Pertanian	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Pertumbuhan Produk Komoditi Perkebunan	Sawit: - Rakyat: 225.943 -PBS: 1.285.260, Karet: 9.084, Lada: 4.763, Kopi: 100, Kelapa: 6.486, Kakao: 70, Aren: 70 Total: 1.531.775 (6%)	Sawit: - Rakyat: 2.415.000 ton -PBS: 10.316.879 ton, Karet: 80.500 ton, Lada: 31.100 ton, Kopi: 794 ton, Kelapa: 50.250 ton, Kakao: 1.005, Aren: 2.900 Total: 12.898.428 ton	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Perkebunan	Cakupan Teknologi Budidaya Yang Diterapkan (Aren)	-	85% dari rekomendasi	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
	Cakupan Paket Teknologi Integrasi Budidaya Tanaman Sawit dengan Sapi Potong	-	90% dari rekomendasi	Dinas Perkebunan dan Kehutanan	
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Perkebunan	Pertumbuhan Nilai Produk Komoditi Perkebunan	2.390.421.916.321 (5%)	23.850.000.000.000	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan	Pertumbuhan Produktivitas Komoditi Perkebunan	Sawit : 17.565 Karet : 1.386, Lada : 1.201, Kopi : 344, Kelapa : 963, Kakao : 1.190, Aren: 464 (3%)	Sawit : 21.500, Karet : 1.750, Lada : 1.150, Kopi : 500, Kelapa : 1.480, Kakao : 1.310, Aren: 2.000 (11%)	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
	Program Perluasan Komoditas Perkebunan	Pertumbuhan Luas Areal Komoditi Perkebunan	Kebun Rakyat: 59.435 Ha, PBS: 170.404 Ha, Total: 229.839 Ha (4%)	Kebun Rakyat: 67.377 Ha, PBS: 349.470 Ha, Total: 416.847 Ha	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkebunan	0	194 Km Jln Produksi & 46 Unit sarana pertanian	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
	Program Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan	Persentase Penurunan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan	689.65 Ha (439%)	674,8 Ha	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
	Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	Persentase Penurunan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	17 Kasus (189%)	108 Kasus	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Cakupan Rumah Tangga Peternakan yang menerapkan Teknologi (RT/Ptahuan)	354	360	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pertanian	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase derajat kesehatan Ternak Sapi potong pada Masyarakat 35%tahun	9.628	81.714 Ekor (210%)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertumbuhan populasi ternak sapi Potong (ekor)	27508 (4%)	59908 Ekor (83%)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Peningkatan Sumber Daya Lokal Komoditas Peternakan	Pertumbuhan Produk daging ternak 15% per tahun(ton)	14165 (3.7%)	142.577 Ton (90 %)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Peningkatan Kesejahteraan Peternak	Pertumbuhan Produksi telur 15% per tahun (ton)	3522 (2.83%)	354.55 Ton (90 %)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pertanian	Program Peningkatan Sumber Daya Lokal Komoditas Peternakan	Pertumbuhan populasi ternak Kerbau dan sapi Kelang (10%/Tahun)	1257	10.668 Ekor (70%)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Peningkatan Kesejahteraan Peternak	Indeks Nilai Tukar Peternak	107	122 (10%)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produk Peternakan	Cakupan Usaha Pengolahan Hasil Produk Peternakan 15%/tahun (klp)	25	57	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Peningkatan Sistem Jaringan Irigasi Pertanian	Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	n.a	100%	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

MISI 4 : MENINGKATKAN PENGELOLAAN PERTANIAN DAN PARIWISATA UNTUK PERCEPATAN TRANSFORMASI STRUKTUR EKONOMI DAERAH

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
		12.1. Mengembangkan breeding center ternak (sapi, kerbau dan unggas unggulan) 12.2. Memproduksi teknologi budidaya ternak. 12.3. Mengintensifkan pelayanan kesehatan ternak 12.4. Meningkatkan populasi ternak unggulan (sapi, kerbau dan unggas) dengan pendanaan pemerintah dan CSR. 12.5. Mengembangkan SDM peternakan (penyuluhan, pendampingan, magang, dll) 12.6. Memfasilitasi pengelolaan kandang kelompok, kelompok pengolahan pupuk organik (rumah kompos dan peralatan). 13.1. Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat terhadap ancaman perubahan iklim dan bencana. 13.2. Rehabilitasi, Revitalisasi Sarana Prasarana Peternakan. 13.3. Identifikasi areal pengembangan kawasan konservasi 14.1. Penambahan secara gradual jumlah armada kapal ikan yang lebih besar (terutama 5 s/d >10 GT). 14.2. Penetapan sentra pengembangan perikanan tangkap. 14.4. Pendidikan dan pelatihan teknologi, dan penggunaan alat-alat bantu penangkapan ikan. 14.5. Identifikasi potensi daerah penangkapan. 14.5. Penyajian SDM dengan pendidikan dan pelatihan untuk menjadi nelayan lepas pantai. 14.6. Identifikasi areal pengembangan kawasan minapolitan perikanan perairan umum dan laut.	Urusan Pilihan Kertransmigrasi	Program Pengembangan Kawasan/ Desa/ Kintans	Jumlah Kawasan/Desa/Kintans yang ditiata/dibangun	47	52	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

MISI 4 : MENINGKATKAN PENGELOLAAN PERTANIAN DAN PARIWISATA UNTUK PERCEPATAN TRANSFORMASI STRUKTUR EKONOMI DAERAH

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
		15.1. Penetapan kawasan pengembangan untuk perikanan, baik tawar, payau maupun laut. 15.2. Penetapan dan pengembangan komoditas unggulan yang akan dikembangkan. 15.3. Pendidikan, pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan usaha, teknis, dan pemodalan. 15.4. Fasilitas sarana prasarana perikanan (BBI, lngasi perikanan, saprokan). 15.5. Peningkatan jumlah dan kapasitas penyuluh lapang pada kawasan pengembangan secara bertahap 16.1. Penetapan kawasan pengembangan pengolahan ikan baik untuk perikanan tawar, laut maupun payau, yang sinergi dengan kawasan produksi (minapolitan). 16.2. Pengembangan Pasar dan pemasaran produk melalui promosi, sehingga tidak hanya mengandalkan pasar lokal dan pasar regional, tetapi juga antar pulau dan ekspor. 16.3. Pendampingan dan fasilitasi pemodalan, teknis dan managerial usaha dan Pengembangan program inovasi produk 17.1. penetapan kawasan penangkaran jenis ikan lokal yang terancam punah 18.1. identifikasi kawasan sumberdaya perikanan yang terkena dampak aktivitas perusahaan/ industri						
Meningkatnya potensi dan daya dukung pariwisata daerah serta kunjungan wisata di Kutai Kartanegara	19. Pengembangan Branding untuk memperkuat Kutai Kartanegara sebagai Daerah Tujuan Wisata. 20. Pengembangan Kebijakan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang	19.1. Menyelenggarakan festival Etrau melalui Branding yang secara komprehensif mempromosikan Pariwisata Kutai Kartanegara yang berbasis sejarah dan budaya secara keseluruhan. 19.2. Penyusunan perencanaan pembangunan pariwisata secara komprehensif.	Urusan Pilihan Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata	1,5%	7%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Jumlah penyedia jasa pariwisata	n.a	100	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Jumlah asosiasi kepariwisataan	n.a	80	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan	5 Obyek wisata	28	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	1.367.542 orang	27%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Pengembangan Kemiraan	Pertumbuhan usaha ekonomi kreatif	n.a	5%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah mitra kelompok	6 kelompok	12 kelompok	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

MISI 4 : MENINGKATKAN PENGELOLAAN PERTANIAN DAN PARIWISATA UNTUK PERCEPATAN TRANSFORMASI STRUKTUR EKONOMI DAERAH

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
				Program Pembangunan Sarana Prasarana Kepariwisata	Cakupan bangunan kepariwisataan dalam kondisi baik	n.a	17,99	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	komprehensif: 21. Pengembangan Pasar Baru dan Revitalisasi Pasar Eksisting. 22. Penyediaan Fasilitas secara komprehensif dan Sarana ODTW secara komprehensif. 23. Penyajian Pelaku Usaha Pariwisata Lokal dan Masyarakat sebagai Tuan Rumah Destinasi. 24. Optimalisasi Peningkatan Nilai Tambah Usaha Jasa dan Produksi Kreatif Pendukung Pariwisata.	19.3. Pengembangan branding kuliner utama pendukung pariwisata Kutai Kartanegara. 20.1. perencanaan yang disusun secara komprehensif dan dapat diimplementasikan 21.1. Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. 21.2. Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara. 22.1. Pengembangan prasarana bagi dukungan ODTW terpilih. 22.2. Memberi insentif bagi sektor swasta untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata. 23.1. Peningkatan kompetensi usaha bagi pelaku usaha kepariwisataan. 23.2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata. 23.3. Peningkatan kapasitas penyedia jasa pariwisata. 24.1. Peningkatan kapasitas dan peran pusat komunitas kreatif. 24.2. Pengembangan pasar dan pemasaran usaha ekonomi kreatif. 24.3. Promosi melalui event-event di daerah secara reguler untuk						
Meningkatnya pengembangan seni dan budaya lokal dalam rangka mendukung destinasi wisata dan kelestarian tradisi kehidupan masyarakat	25. Revitalisasi Seni Budaya Guna Mendukung Sektor Pariwisata.	25.1. Pengembangan fasilitas pertunjukan seni budaya sebagai wadah apresiasi masyarakat. 25.2. Peningkatan kapasitas dan performa pelaku seni budaya di daerah. 25.3. Peningkatan performa Pusat-Pusat Kebudayaan untuk mendorong revitalisasi seni budaya Kutai Kartanegara.	Urusan Wajib Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan pembinaan seni budaya	0	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Cakupan Kalian Seni Budaya	100%	93%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Cakupan misi kesenian	-	6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan fasilitas seni budaya	100%	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Cakupan Gelar Seni	1	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Pengembangan Kerjasama	Jumlah kerjasama pengelolaan budaya	0	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Jumlah Grup Kesenian	83	571	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah benda, situs, cagar budaya, yang dikelola	39 cagar budaya	72	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Jumlah museum yang dikelola	2		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Peningkatan Kualitas Kelayakan Koperasi	Pertumbuhan koperasi	603	720	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Meningkatnya ekonomi kerakyatan berbasis industri kreatif dan potensi daerah	26. Penguatan Kelayakan Koperasi dan UKM. 26.1. Peningkatan SDM pengurus koperasi dan UKM aktif.	26.1. Pendataan, pembinaan, dan fasilitasi kegiatan Koperasi dan UKM setiap tahun. 26.2. Peningkatan SDM pengurus koperasi dan UKM aktif.	Urusan Wajib Koperasi, usaha kecil, dan menengah		Jumlah koperasi aktif	488	587	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
					Jumlah koperasi berprestasi	18	53	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
					Cakupan Bina Koperasi	302	360	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
					Jumlah Kemitraan Koperasi dengan Bank	20	50	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
				Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Cakupan Bina UMKM	9,864	19,728	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
					Cakupan Lembaga Keuangan non LKM / LKM terbentuk	10	81	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
					Jumlah LKM	-	21	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
				Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan UMKM Tani dan Nelayan	-	1,700	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

MISI 4 : MENINGKATKAN PENGELOLAAN PERTANIAN DAN PARIWISATA UNTUK PERCEPATAN TRANSFORMASI STRUKTUR EKONOMI DAERAH

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
Meningkatnya akses, tata niaga, dan infrastruktur perdagangan antar wilayah dan antar daerah	27. Fasilitas Ekspansi Pasar. 28. Revitalisasi Pasar Daerah. 29. Pengembangan Kerjasama Perdagangan Antar Daerah.	27.1. Promosi produk unggulan UKM. 27.2. Pengembangan kerjasama dengan pihak bank dan dunia usaha sebagai market partnership. 27.3. Pengembangan core business baru dan potensial yang terpadu dengan sektor pertanian dan pariwisata. 27.4. Pengembangan pusat informasi produk unggulan daerah berbasis IT. 27.5. Penyediaan sarana dan prasarana bagi UKM di kawasan potensial seperti kawasan pariwisata, pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya.	Urusan Pilihan Perdagangan	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah pasar yang dibangun di Kecamatan, Kelurahan dan Desa Persentase kontribusi PAD sektor perdagangan Cakupan jamngan pemasaran/kemitraan produk pertanian dalam arti luas Ekspor bersih perdagangan Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Informasi harga, komoditas dan jenis produk Stabilitas harga jagung Cakupan penyelesaian masalah pengaduan konsumen Jumlah Pasar yang dibangun	14 301.000.000 - 2.370.994.591 - - - -	90 5.292.434.539 4 Daerah (Regional) 2.617.758.571 100% 18 Kecamatan 18 Kecamatan 18 Kecamatan 3 Pasar	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Meningkatnya pengembangan industri pengolahan pangan, peternakan, perikanan, pengolahan paku, dan potensi daerah yang berdaya saing	30. Pengembangan Agroindustri. 31. Fasilitas Pengembangan Industri Dalam dan Luar Negeri.	30.1. Pengembangan industri pengolahan sebagai support system di sektor pertanian dalam arti luas 30.2. Pengembangan industri pasca panen produksi pertanian 31.1. Dukungan kebijakan bagi pengembangan industri potensial yang akan menyerap tenaga kerja skala besar 31.2. Fasilitas kegiatan industri dengan informasi ketersediaan bahan baku dan pelaku usaha masyarakat	Urusan Pilihan Perindustrian	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Persentase kontribusi PAD sektor perindustrian Rasio sentra IKM terhadap ODTW (1 ODTW : 1 Sentra IKM) Pertumbuhan IKM berbasis komoditas pertanian Pertumbuhan omzet IKM berbasis komoditas pertanian Pertumbuhan omzet Industri Kecil Rumah Tangga berbasis komoditas pertanian Jumlah Kemitraan IKM dengan Bank	3.71 - 5.163 137.558.000.000 5.162 121.423.000.000	6.94 8.8 6.594 197.123.000.000 6.593 180.988.000.000 100	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

MISI 4 : MENINGKATKAN PENGELOLAAN PERTANIAN DAN PARIWISATA UNTUK PERCEPATAN TRANSFORMASI STRUKTUR EKONOMI DAERAH

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
					Jumlah unit usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM)	8.656	10.327	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
					Jumlah jenis usaha Industri kecil dan menengah (IKM)	17.312	20.654	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
					Jumlah IKM yang berkembang	1	20	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
					Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pada IKM	22.279	26.848	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
				Program Penataan Struktur Industri	Jumlah Kawasan Industri	-	4	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
					Pertumbuhan Industri	8.656	10.426	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
					Cakupan bina kelompok pengrajin	34.624	41.308	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
				Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan Bina Industri/Perusahaan	-	100%	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

TABEL 7.5 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PADA MISI KELIMA
MISI 5 : MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENUJU DAYA SAING DAERAH

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
Meningkatnya interkoneksi antar wilayah	1. Penguatan dan Pemabtan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.1. Membangun dan meningkatkan Infrastruktur jalan dan jembatan 1.2. Interkoneksi jalan tembus desa	Urusan Wajib pekerjaan umum dan penataan ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Cakupan sumber daya air yang di kelola		100%	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase terhubungnya antar wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara Panjang Jalan Kolektor yang dibangun (KM) Panjang Jalan menuju Pelabuhan Perikanan (KM)	82% 1.792,60 0	100% 2.193 2	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
				Program peningkatan Jalan dan Jembatan	Cakupan jalan dan jembatan dalam kondisi baik	67,1%	100 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
					Cakupan jalan dan jembatan kepariwisataan dalam kondisi baik	na	100 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
					Cakupan jalan dan jembatan pendidikan dalam kondisi baik	na	100 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
					Cakupan jalan dan jembatan kesehatan dalam kondisi baik	0	100 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
					Cakupan jalan dan jembatan industri dalam kondisi baik	0	100 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan yang diperlhora	84%	100 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
					Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kebinatangan	0	100 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
				Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran lainnya	Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	62,49%	66,93%	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
					Cakupan sumber daya air yang di kelola	40%	0	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
				Program Pengendalian Banjir	Cakupan penanganan banjir	15,00%	56,00%	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
				Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Cakupan drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik		100 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
				Program pembangunan turap/talud/bronjong	Cakupan Turap/Talud/Bronjong dalam kondisi baik	40,00%	100 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
				Program penataan penguasaan, penilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase ketersediaan lahan untuk jalan dan jembatan	n.a	100 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
				Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Cakupan Jalan dan jembatan yang di inspeksi		100 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
				Program Pengembangan Data / Informasi keciptakayaan	Cakupan bahan kebijakan perencanaan keciptakayaan	0%	100%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
				Program peningkatan Jalan dan Jembatan	Cakupan jalan lingkungan dan jembatan dalam kondisi baik	52,91%	93,91%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang diperlhora	47,10%	5,09%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	27%	100%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
				Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Kecamatan yang memiliki RDTR	0%	18 Kecamatan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
				Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah Kecamatan yang memanfaatkan RDTR	0%	18 Kecamatan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
				Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ruang publik yang berubah peruntukannya	2 kawasan		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
				Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Cakupan drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik	52,91%	93,91%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
				Program Waljo Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	n.a		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

MISI 5 : MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENUJU DAYA SAING DAERAH

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
				Program Pendidikan Menengah	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	n.a		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
				Program pembangunan turap/latud/brongjong	Cakupan Turap/latud/brongjong dalam kondisi baik	0,471	5,09%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
				Program pengelolaan areal pemukiman	Rasio tempat pemukiman umum per satuan penduduk	100		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
				Program pengelolaan ruang hijau	Prosentase pemenuhan Ruang Terbuka Hijau terhadap luas perkotaan	87,17	100%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
				Program Pembangunan / Peningkatan Bangunan Negara	Kecukupan sarana perkamoran Pemerintah Daerah Kulkar	-	2,70%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	20,87%	38,82%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	40%	100%	Kecamatan Muara Wis
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	n.a	95%	Kecamatan Kota Bangun
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun		100%	Kecamatan Tenggaraong
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	45%	100%	Kecamatan Kenohian
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	50%	100%	Kecamatan Kembarang Jangcut
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	70%	100%	Kecamatan Muara Kaman
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	50%	100%	Kecamatan Samboja
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	48%	100%	Kecamatan Sanga-Sanga
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	50%	100%	Kecamatan Muara Muntai
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	40%	100%	Kecamatan Muara Badak
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	50%	100%	Kecamatan Loa Janan
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	46%	100%	Kecamatan Loa Kulu
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	60%	100%	Kecamatan Muara Badak
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	40%	100%	Kecamatan Tabang
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	55%	100%	Kecamatan Muara Jawa
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	40%	100%	Kecamatan Muara Jawa

MISI 5 : MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENUJU DAYA SAING DAERAH

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	100%	100%	Kecamatan Tenggarong Seberang
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	50%	100%	Kecamatan Anggana
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	50%	100%	Kecamatan Marang Kayu
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	50%	100%	Kecamatan Muara Wis
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	n.a	95%	Kecamatan Kota Bangun
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	45%	100%	Kecamatan Tenggarong
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	50%	100%	Kecamatan Kenohan
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	35%	65%	Kecamatan Muara Kaman
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	50%	100%	Kecamatan Samboja
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	55%	100%	Kecamatan Sanga-Sanga
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	50%	100%	Kecamatan Muara Muntai
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	35%	100%	Kecamatan Marang Kayu
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	70%	100%	Kecamatan Sebulu
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	40%	100%	Kecamatan Loa Janan
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	50%	100%	Kecamatan Loa Kulu
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	40%	100%	Kecamatan Muara Badak
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	50%	100%	Kecamatan Tabang
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	100%	100%	Kecamatan Muara Jawa
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	100%	100%	Kecamatan Tenggarong Seberang
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	60%	100%	Kecamatan Anggana
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	60%	100%	Kecamatan Kembang Janggut
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	n.a	95%	Kecamatan Kota Bangun
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	50%	100%	Kecamatan Tenggarong
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	50%	100%	Kecamatan Kenohan
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	80%	100%	Kecamatan Kembang Janggut
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	50%	100%	Kecamatan Muara Kaman

MISI 5 : MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENUJU DAYA SAING DAERAH

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	60%	100%	Kecamatan Samboja
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	40%	100%	Kecamatan Sanga-Sanga
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	50%	100%	Kecamatan Muara Muntai
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	40%	100%	Kecamatan Marang Kayu
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	60%	100%	Kecamatan Sebulu
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	45%	100%	Kecamatan Loa Kulu
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	60%	100%	Kecamatan Muara Badak
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	40%	100%	Kecamatan Tabang
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	40%	100%	Kecamatan Muara Jawa
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	100%	100%	Kecamatan Tenggarong Seberang
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	40%	100%	Kecamatan Anggana
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	60%	100%	Kecamatan Muara Wis
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	n.a	95%	Kecamatan Kota Bangun
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	50%	100%	Kecamatan Tenggarong
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	50%	100%	Kecamatan Kenohan
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	80%	100%	Kecamatan Kembang Jangut
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	80%	100%	Kecamatan Muara Kaman
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	45%	100%	Kecamatan Samboja
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	45%	100%	Kecamatan Sanga-Sanga
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	20%	100%	Kecamatan Muara Muntai
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	45%	100%	Kecamatan Marang Kayu
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	50%	100%	Kecamatan Sebulu

MISI 5 : MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENUJU DAYA SAING DAERAH

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	46%	100%	Kecamatan Loa Janan
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	60%	100%	Kecamatan Loa Kulu
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	40%	100%	Kecamatan Muara Badak
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	40%	100%	Kecamatan Tabang
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	45%	100%	Kecamatan Anggana
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	10%	100%	Kecamatan Muara Wis
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	60%	100%	Kecamatan Tenggaraong
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	50%	100%	Kecamatan Kenohan
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	100%	Kecamatan Muara Kaman
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	30%	100%	Kecamatan Samboja
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	100%	Kecamatan Sanga-Sanga
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	50%	100%	Kecamatan Muara Muntai
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	50%	100%	Kecamatan Marang Kayu
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	55%	100%	Kecamatan Loa Janan
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	50%	100%	Kecamatan Loa Kulu
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	50%	100%	Kecamatan Muara Badak
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	50%	100%	Kecamatan Tabang
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	45%	100%	Kecamatan Muara Jawa
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	100%	100%	Kecamatan Tenggaraong Seberang
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	100%	100%	Kecamatan Tenggaraong Seberang

MISI 5 : MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENUJU DAYA SAING DAERAH

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	40%	100%	Kecamatan Anggana
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	37%	4%	Kelurahan Sarijaya
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	42%	5%	Kelurahan Tanapole
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	37%	4%	Kelurahan Muara Jawa Ulu
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	42%	5%	Kelurahan Dondang
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	35%	20%	Kelurahan Bukit Baru
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	37%	4%	Kelurahan Baru
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	37%	4%	Kelurahan Sambog Kuala
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	37%	4%	Kelurahan Teluk Pemedas
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	37%	4%	Kelurahan Sanpiah
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	37%	4%	Kelurahan Karya Merdeka
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	37%	4%	Kelurahan Saik Api Darat
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	37%	4%	Kelurahan Margomulyo
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	35%	20%	Kelurahan Handi Baru
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	37%	4%	Kelurahan Muara Sembilang
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	35%	20%	Kelurahan Wonotito
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	35%	20%	Kelurahan Amborawang Darat
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	35%	20%	Kelurahan Saik Api Laut
				Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	37%	4%	Kelurahan Amborawang Laut
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	35%	20%	Kelurahan Pendingin
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	35%	20%	Kelurahan Sanga-Sanga Dalam
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	42%	5%	Kelurahan Muara Kembang
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	35%	20%	Kelurahan Tanapole
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	42%	5%	Kelurahan Muara Jawa Ilir
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	100%	100%	Kelurahan Muara Jawa Ulu
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	37%	4%	Kelurahan Dondang
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	100%	100%	Kelurahan Manulu

MISI 5 : MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENUJU DAYA SAING DAERAH

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	42%	5%	Kelurahan Bukit Biru
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	35%	20%	Kelurahan Mangkurawang
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	100%	100%	Kelurahan Samboga Kuala
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	37%	4%	Kelurahan Teluk Pemedas
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	37%	4%	Kelurahan Sanjipah
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	35%	20%	Kelurahan Sungai Merdeka
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	100%	100%	Kelurahan Tanjung Harapan
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	100%	100%	Kelurahan Karya Merdeka
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	35%	20%	Kelurahan Margomulyo
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	100%	100%	Kelurahan Muara Sembilang
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	35%	20%	Kelurahan Kampung Lama
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	35%	20%	Kelurahan Amborawang Darat
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	35%	20%	Kelurahan Amborawang Laut
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	37%	4%	Kelurahan Jawa
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	100%	100%	Kelurahan Sarifaya
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	42%	5%	Kelurahan Sanga-Sanga Muara
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	100%	100%	Kelurahan Muara Jawa Tengah
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	37%	4%	Kelurahan Muara Jawa Ilir
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	35%	20%	Kelurahan Muara Jawa Ulu
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	100%	100%	Kelurahan Dondang
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	42%	5%	Kelurahan Manulu
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	35%	20%	Kelurahan Baru
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	37%	4%	Kelurahan Timbau

MISI 5 : MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENUJU DAYA SAING DAERAH

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	42%	5%	Kelurahan Loa Tebu
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	100%	100%	Kelurahan Sukarame
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	35%	20%	Kelurahan Argosari
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	37%	4%	Kelurahan Samboja Kuala
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	100%	100%	Kelurahan Teluk Pemedas
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	35%	20%	Kelurahan Sanipah
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	37%	4%	Kelurahan Tanjung Harapan
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	35%	20%	Kelurahan Karya Merdeka
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	100%	100%	Kelurahan Margomulyo
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	37%	4%	Kelurahan Handli Baru
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	35%	20%	Kelurahan Kampung Lama
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	100%	100%	Kelurahan Wonotirto
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	100%	100%	Kelurahan Bukit Merdeka
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	35%	20%	Kelurahan Salak Api Laut
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	35%	20%	Kelurahan Amborawang Laut
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	35%	20%	Kelurahan Jawa
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	37%	4%	Kelurahan Pendingin
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	35%	20%	Kelurahan Sarijaya
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	37%	4%	Kelurahan Sanga-Sanga Muara

MISI 5 : MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENUJU DAYA SAING DAERAH

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PEMANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	42%	5%	kelurahan Sanga-Sanga Dalam
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	20%	kelurahan Muara Kembang
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	20%	kelurahan Muara Jawa Tengah
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	37%	4%	kelurahan Muara Jawa Ilir
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	100%	100%	kelurahan Mahulu
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	37%	4%	kelurahan Loa Ipuh Darat
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	37%	4%	kelurahan Bukit Biru
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	37%	4%	kelurahan Baru
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	37%	4%	kelurahan Loa Tebu
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	20%	kelurahan Panji
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	20%	kelurahan Sukarame
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	20%	kelurahan Sungai Seluang
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	20%	kelurahan Tanjung Harapan
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	20%	kelurahan Karya Merdeka
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	100%	100%	kelurahan Salok Api Darat
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	20%	kelurahan Margomulyo
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	100%	100%	kelurahan Handil Baru
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	100%	100%	kelurahan Muara Sembilang
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	37%	4%	kelurahan Kampung Lama

MISI 5 : MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENUJU DAYA SAING DAERAH

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	20%	Kelurahan Amborawang Darat
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	20%	Kelurahan Amiborawang Laut
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	42%	5%	Kelurahan Jawa
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	42%	5%	Kelurahan Pendingin
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	42%	5%	Kelurahan Sanga-Sanga Muara
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	Kelurahan Sanga-Sanga Dalam
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	37%	4%	Kelurahan Muara Kembang
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	Kelurahan Tamapole
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	Kelurahan Muara Jawa Pesisir
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	42%	5%	Kelurahan Muara Jawa Tengah
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	35%	20%	Kelurahan Muara Jawa Ilir
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	42%	5%	Kelurahan Muara Jawa Ulu
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	35%	20%	Kelurahan Dondang
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	Kelurahan Teluk Dalam
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	Kelurahan Mahulu
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	42%	5%	Kelurahan Loa Ipuh Darat
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	35%	20%	Kelurahan Bukit Biru
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	Kelurahan Jahab
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	37%	4%	Kelurahan Jahab
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik			

MISI 5 : MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENUJU DAYA SAING DAERAH

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Keurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	42%	5%	SKPD PENANGGUNG JAWAB Kelurahan Baru
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Keurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	Kelurahan Mangkurawang
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Keurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	37%	4%	Kelurahan Timbau
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Keurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	42%	5%	Kelurahan Loa Ipuh
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Keurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	35%	20%	Kelurahan Loa Tebu
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Keurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	37%	4%	Kelurahan Panji
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Keurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	37%	4%	Kelurahan Sukarame
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Keurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	Kelurahan Argosari
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Keurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	Kelurahan Samboja Kuala
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Keurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	35%	20%	Kelurahan Teluk Pemedas
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Keurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	37%	4%	Kelurahan Sanipah
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Keurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	Kelurahan Sungai Seluang
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Keurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	37%	4%	Kelurahan Sungai Merdeka
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Keurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	Kelurahan Tanjung Harapan
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Keurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	37%	4%	Kelurahan Karya Merdeka
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Keurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	35%	20%	Kelurahan Salak Api Darat
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Keurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	35%	20%	Kelurahan Margomulyo
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Keurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	Kelurahan Handil Baru
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Keurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	35%	20%	Kelurahan Muara Sembilang

MISI 5 : MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENUJU DAYA SAING DAERAH

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta kualitas pelayanan perhubungan	2. Revitalisasi Layanan Transportasi Publik	2.1. Pengembangan jasa layanan transportasi kota yang menghubungkan ke sentra pertanian, kawasan khusus, destinasi pariwisata, dan outlet perdagangan 2.2. Pengembangan layanan transportasi yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 2.3. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan khususnya yang berkaitan dengan transportasi publik	Urusan Wajib Perhubungan	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Keurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	Kelurahan Kampung Lama
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Keurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	Kelurahan Wonotito
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Keurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	37%	4%	Kelurahan Amborawang Darat
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Keurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	Kelurahan Bukit Merdeka
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Keurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	37%	4%	Kelurahan Salak Api Laut
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Keurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	Kelurahan Amborawang Laut
				Program peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah arus penumpang angkutan umum	994,892	999,157	Dinas Perhubungan
				Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ	Persentase Jumlah Terminal yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	0%	100%	Dinas Perhubungan
					Persentase Jumlah Pelembutan/ Dermaga yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	33%	100%	Dinas Perhubungan
					Persentase Jumlah Fasilitas Darat yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	20%	100%	Dinas Perhubungan
					Persentase Jumlah Rambu Laut/ Sungai yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	0%	100%	Dinas Perhubungan
					Persentase Jumlah Alat Uji yang di kalibrasi	100%	100%	Dinas Perhubungan
				Program pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan	Jumlah Pelembutan Laut/ Udarat Terminal Bis	38	46	Dinas Perhubungan
					Persentase Cakupan Sarana dan Prasarana Perhubungan antar Kecamatan (Pelembutan/ Dermaga)	70%	98%	Dinas Perhubungan
					Persentase Cakupan Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Perhubungan	100%	100%	Dinas Perhubungan
				Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Kelengkapan rambu-rambu lalu lintas menuju obyek wisata (sesuai RUPDA)	29%	100%	Dinas Perhubungan
					Persentase Cakupan Ketersediaan Rambu Laut/ Rambu Sungai, Danau dan Penyebrangan	53%	100%	Dinas Perhubungan
					Persentase Cakupan Kegiatan Manajemen Pengamanan lalu lintas	100%	100%	Dinas Perhubungan
				Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase cakupan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	100%	100%	Dinas Perhubungan
					Persentase kontribusi PAD sektor perhubungan	100%	100%	Dinas Perhubungan
Terwujudnya konektivitas jaringan komunikasi, internet dan pengembangan kawasan smart city	3. Peningkatan Konektivitas Jaringan Telekomunikasi 4. Pengembangan sistem informasi terintegrasi	3.1. Memperluas jaringan internet yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten Kutai Kartanegara 3.2. Pengembangan dan pembangunan tower pintar	Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Disemasi dan Pendistribusian Informasi Nasional	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan Layanan E-Government	46%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Cakupan wilayah yang terlayani Jaringan Telekomunikasi Seluler	31%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika

TABEL 7.6 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PADA MISI KEENAM
MISI 6 : MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKTOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
Meningkatnya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengendalian pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan	1. Pengembangan Penataan Ruang yang Berkelanjutan dan Berdampak pada Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam 2. Revitalisasi Sungai 3. Pemulihan Lingkungan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam termasuk Kegiatan Pertambangan dan Pengaliran yang berdampak pada Pencemaran Lingkungan 4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup 5. Pengembangan Nilai Tambah Sumber Daya Alam sebagai potensi Unggulan Baru	1.1. Penetapan kawasan khusus 1.2. Penetapan kawasan strategis kabupaten 1.3. Penataan kawasan kumuh 2.1. Pengendalian dan konservasi sungai 2.2. Pemanfaatan DAS 2.3. Konservasi flora dan fauna 3.1. Konservasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang 3.2. Pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup 3.3. Pengembangan Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam 3.4. Pengembangan dan Peningkatan Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Urusan Wajib Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Bank Sampah yang terbentuk disetiap desa/keurahan	0,39 % (9)	1	Badan Lingkungan Hidup Daerah
				Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Pengawasan Terhadapp Pelaksanaan AMDAL	210 Kegiatan Usaha (42%)	1	Badan Lingkungan Hidup Daerah
				Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Pemenuhan Status Mutu Air	12 anak sungai (40 %)	30 anak sungai	Badan Lingkungan Hidup Daerah
				Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah dilepaskan dan diformasikan status kesusakannya	2.139,814 ha (50,80%)	1	Badan Lingkungan Hidup Daerah
				Program Perencanaan Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Cakupan Penetapan Status Lingkungan Hidup Daerah	100% (18 Kecamatan)	100% (18 Kecamatan)	Badan Lingkungan Hidup Daerah
				Program Pencegahan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Persentase Jumlah Usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	0,67	1	Badan Lingkungan Hidup Daerah
				Program Perindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Luasan Wilayah Pesisir yang di konservasi	64 ha	63 ha	Badan Lingkungan Hidup Daerah
				Program Perindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (CO2)	0,44	0,19	Badan Lingkungan Hidup Daerah
			Urusan Pilihan Kehutanan	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pertumbuhan Luas Penghijauan	230 Ha (63%)	210 Ha	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
				Program Rehabilitasi Lahan Kritis	Pertumbuhan Luas Penghijauan	70 Milyar (64%)	488 Ha	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
				Program Peminaan dan Pembinaan Industri Hasil Hutan	Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Sektor Kehutanan	154 Milyar		Dinas Perkebunan dan Kehutanan
				Program Optimalisasi Penerimaan Daerah Darf Sektor Kehutanan	Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Sektor Kehutanan			Dinas Perkebunan dan Kehutanan
				Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pertumbuhan Produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Gaharu : 460 Ptn, Madu : 200 Ltr, Jamur : 10 Ton (2%)	Gaharu : 510 Ptn, Madu : 205 Ltr, Jamur : 11 Ton (8%)	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
				Program Pemanfaatan Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu	Pertumbuhan Produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Gaharu : 8.160 Ptn, Madu : 1.480 Ltr, Jamur : 81 Ton	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
				Program Perindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Penurunan Kebakaran Hutan di Wilayah Tahura	n.a	75 Titik Hotspot (100%)	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
				Program Perindungan Wilayah Tahura	Penurunan Kebakaran Hutan di Wilayah Tahura	n.a	70 Titik Hotspot	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
				Program Peminaan dan Pengembangan Bidang Kelagalistrikan	Persentase Rumah Tangga Berlistrik	68% (140.066 KK /Rumah Tangga Berlistrik PLN dan Non PLN dibandingkan Total KK Tahun 2015 sebanyak 205.550 KK)	90,00%	Dinas Pertambangan dan Energi
				Program Peminaan dan Pengembangan Bidang Kelagalistrikan	Persentase Rumah Tangga Yang menggunakan EBT	2,2 % (4.573 Rumah Tangga yang menggunakan EBT dari Total KK Tahun 2015 = 205.550 KK)	5 % (9.573 Rumah Tangga yang menggunakan EBT dari Total KK Tahun 2015)	Dinas Pertambangan dan Energi
			Urusan Pilihan Energi dan sumber daya mineral	Program Pemanfaatan Sumber Air Bawah Tanah	Cakupan Penyediaan Air Bersih Melalui Pengeboran Air Tanah	n.a	100% (52 Titik Sumur Bor)	Dinas Pertambangan dan Energi
				Program Pengembangan Data/Informasi Pertambangan	Cakupan Jenis Data hasil Tambang (Data Produksi, Penjualan dan kewajiban royalti hasil tambang)	n.a	18 Jenis data	Dinas Pertambangan dan Energi

MISI 6 : MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBUJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
				Program Pembinaan dan Pengembangan Panas Bumi	Cakupan Perusahaan berizin yang meningkat secara kualitas maupun kuantitas	n.a	15 Berizin	Dinas Pertambangan dan Energi
				Program Penyediaan Data & Informasi BBM Tertentu & LPG	Cakupan Jenis Data Informasi	n.a	18 Jenis data	Dinas Pertambangan dan Energi
				Program Pemeliharaan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan	Cakupan Pemeliharaan dan Pengembangan LPJU	n.a	4 Kecamatan	Dinas Pertambangan dan Energi
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	100%	100%	Dinas Pertambangan dan Energi

TABEL 7.7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PADA MISI KETUJUH
MISI 7 : MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN SERTA PENGUATAN PERLINDUNGAN ANAK

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, kualitas kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan dan anak	1. Meningkatkan kesempatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan 2. Meningkatkan perlindungan anak	1. 1. Pembinaan kelompok-kelompok perempuan 1.2. Optimalisasi kesempatan usaha produktif bagi perempuan berbasis kelompok 1.3. Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dan pelecehan 1.4. Peningkatan arus komunikasi kelompok perempuan melalui forum kelompok 1.5. Dukungan kebijakan terkait gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah 2. 1. Optimalisasi tim terpadu terkait perlindungan anak 2.2. Pemantauan dan pengawasan kegiatan di masyarakat yang berpotensi terjadi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak	Urusan Wajib Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Program Penguatan Kembangkan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase SKPD yang melaksanakan ARG dan PPRG	69,77	100,00	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Partisipasi anak dalam pembangunan (musrenbang)	5,16	100,00	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Cakupan Perempuan Korban Kekerasan/KDRT yang Ditangani		76,31	51,22	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Cakupan Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan Sektor Formal		-	100,00	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Cakupan Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan Sektor Non Formal		-	100,00	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Tingkat Organisasi Perempuan yang di Bina		2	30	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Kabupaten Layak Anak (KLA)		5,6	100,0	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase calon Legislatif dan Legislatif perempuan		8,8	30%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Jumlah Kader Perempuan Jabatan Publik dan Politik		7	250	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase anak korban kekerasan yang di layani		76,31	51,22	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase Ruang Publik Ramah Anak (RPRRA) tingkat kecamatan		5,56	100	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase fasilitas layanan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)		5	100	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase Kelompok Usaha Bersama Perempuan (KUBP) Aktif		35	100	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB 8 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI RENCANA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan indikasi program-program prioritas yang akan dilaksanakan beserta indikator kinerja serta kerangka kebutuhan pendanaannya.

Indikasi rencana program dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis SKPD.

Selanjutnya guna memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan atau program, maka dalam proses penyusunan RPJMD telah dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

Indikasi program prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaan disajikan pada Tabel sebagai berikut:

TABEL 8.1 INDIKASI PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

(Dalam Rp. Juta)

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	KONDISI AKHIR 2021								
BADAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN																	
URUSAN WAIB KEARSIPAN	Program Penyiapan dan Pelesterian Dokumen/ Arsip Daerah	Jumlah informasi Arsip Daerah	20 dok	520 dok	320.00	10.020 dok	300.00	10.030 dok	322.60	10.030 dok	345.79	10.040 dok	370.81	10.040 dok	397.33	50.680 dok	2.056.54
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Jumlah arsip yang disediakan	74.716 dok	74.716 dok	-	79.286.00	300.00	83.888.00	322.60	88.448	345.79	93.038	370.81	97.628	397.33	97.628	1.736.54
		Persentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	60%	60%	-	70%	100.00	80%	107.53	90%	115.26	95%	123.60	100%	132.44	100%	578.85
		Rasio kecukupan SDMI	2.16	3.12	1.066.85	4.10	250.00	8.10	288.83	1.2 : 1	288.16	1.6:1	309.01	2 : 1	331.11	2 : 1	2.513.97
		Pengelola Kearsipan SKPD Kabupaten															
	Program Meningkatkan Koordinasi Sistem Kearsipan	Cakupan SKPD yang terkoneksi dengan Sistem Informasi Kearsipan	n.a	-	-	25%	200.00	25%	215.07	20%	230.53	20%	247.21	10%	264.89	100%	1.157.69
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Jumlah Pemeliharaan dan Pengamanan Sarana dan Prasarata Kearsipan	80%	100%	303.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	303.14
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.954.06	100%	1.700.00	100%	1.828.08	100%	1.959.47	100%	2.101.28	100%	2.251.56	100%	12.794.45
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	150.00	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	150.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	250.00	100%	50.00	100%	53.77	100%	57.63	100%	61.80	100%	66.22	100%	539.42
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.621.48	100%	400.00	100%	430.14	100%	461.05	100%	494.42	100%	529.78	100%	3.936.87	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kecapaian waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	458.14	100%	150.00	100%	161.30	100%	172.89	100%	185.41	100%	198.67	100%	1.326.41
BADAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN																	
URUSAN WAIB PERPUSTAKAAN																	
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Penumbuhan pengunjung perpustakaan per tahun	28.010 orang	3.44	750.00	3.64	1.000.00	3.89	1.100.00	3.93	1.100.00	4.16	1.200.00	4.35	1.300.00	218.000 orang	6.450.00	
	Jumlah perpustakaan/wilayah baca	73 unit	32 unit	289.89	32 unit	678.17	32 unit	711.87	32 unit	798.41	32 unit	809.26	32 unit	888.25	265 unit	4.175.65	
	Tingkat ketersediaan Sargas Perpustakaan Desa/keurahan (Kampung Pinar)	30%	45%	750.00	55%	1.500.00	65%	1.500.00	75%	1.600.00	85%	1.700.00	100%	1.800.00	100%	8.850.00	
	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	66.504 Expl	2.000 Expl	413.78	2.000 Expl	500.00	2.000 Expl	700.00	2.000 Expl	800.00	2.000 Expl	900.00	2.000 expl	950.00	78.504 Expl	4.263.78	
BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK																	
URUSAN WAIB PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.596.42	100%	2.400.00	100%	2.580.81	100%	2.766.31	100%	2.966.52	100%	3.178.68	100%	16.488.73	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur		-	-	97	-	-	117	-	-	-	-	-	214	-	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	115.00	100%	100.00	100%	107.53	100%	115.26	100%	123.60	100%	132.44	100%	693.85	
	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	398.14	100	200.00	100	215.07	100	230.53	100	247.21	100	264.89	100	1.555.83	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kecapaian waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	450.00	100%	150.00	100%	161.30	100%	172.89	100%	185.41	100%	198.67	100%	1.318.27	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3.2	3.1	523.50	3	500.00	2.62	537.67	2.5	576.31	2.25	618.02	2	662.22	2	3.417.73	
Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	Persentase Peserta KB Aktif	73.87%	73.88%	250.00	73.89%	500.00	73.90%	537.67	73.91%	576.31	73.92%	618.02	73.93%	662.22	73.93%	3.144.23	
	Cakupan Pasangan Usia subur yg istemnya dibawah 20 thn	6.22	6%	375.00	5%	500.00	4%	537.67	3.5%	576.31	3%	618.02	2.50%	662.22	2.50%	3.269.23	

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Pendidikan Penduduk	Jumlah informasi Kependudukan yang dipublikasikan	-	1	966,39	1	1.000,00	1	1.075,34	1	1.152,63	1	1.236,05	1	1.324,45	6	6.754,85
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/ K/R yang Mandiri	Cakupan Petugas Lapangan KB/ Penyuluh KB (PLK/ PKB) 1 Petugas 2 Desa	36,97	39,08	265,00	41,18	1.000,00	43,28	1.075,34	45,38	1.152,63	47,48	1.236,05	50,00	1.324,45	50,00	6.053,46
	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKB) per desa	80	83%	150,00	85%	800,00	87%	860,27	90%	922,10	92%	988,84	95%	1.059,56	97%	4.780,77
Program Pembinaan Kesetaraan ber-KB Jalur Pemerintah	Cakupan Pelayanan KB keluarga miskin	29,5	29,49%	390,00	28,99%	1.500,00	28,49%	1.613,01	27,99%	1.728,94	27,49%	1.854,07	26,99%	1.986,67	26,99%	9.072,70
	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	5%	30	100,00	30	2.000,00	30	2.150,68	30	2.305,25	30	2.472,10	30	2.648,90	30	11.676,93
Program Peningkatan Kesetaraan KB Galatias, Wilayah Khusus dan sasaran Khusus	Tingkat ketersediaan kampung KB	0	1	185,00	2	1.400,00	3	1.505,47	4	1.613,68	4	1.730,47	4	1.854,23	18	8.288,85
Program Advokasi, Penggerakan, dan Informasi	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/ Kelurahan 100% setiap tahun	90%	100%	460,00	100%	1.000,00	100%	1.075,34	100%	1.152,63	100%	1.236,05	100%	1.324,45	100%	6.248,46
Program Ketelahaan dan Pemberdayaan Keluarga	Cakupan Pns Peserta KB Anggota Peningkatan Pendataan keluarga Sejahtera (UPPKS) yg Ber-KB	80	87%	-	87%	500,00	87%	537,67	87%	576,31	87%	618,02	91%	662,22	91%	2.894,23
	Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I	70%	75%	-	79%	500,00	83%	537,67	87%	576,31	91%	618,02	96%	662,22	96%	2.894,23
	Cakupan keluarga Anggata BKB, BKR, BKL yang ber KB	30,25	47,48	440,00	47,48	500,00	60,50	537,67	73,67	576,31	86,83	618,02	100	662,22	100	3.334,23
Program Peningkatan Kemudahan dan Pembinaan kesetaraan jalur swasta	Cakupan Pelayanan KB Jalur Swasta	38,85%	39,99%	50,00	40,49	500,00	40,99%	537,67	41,49%	576,31	41,99%	618,02	42,49%	662,22	42,49%	2.944,23
BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
Program Penguatan Kelembagaan Pengrusutamaan Gender dan Anak	Persentase SKPD yang Melaksanakan ARG dan PRPG	69,77	74,42	750,00	79,07	1.000,00	83,72	1.000,00	88,37	1.100,00	93,02	1.200,00	100,00	1.400,00	100,00	6.450,00
	Partisipasi anak dalam pembangunan (monev/abn)	5,16	9,48	75,00	26,07	400,00	42,65	483,55	59,24	483,55	78,67	550,00	100,00	550,00	100,00	2.542,10
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan(KDRT yang Diangani)	76,31	72,50	-	69,23	400,00	68,31	500,00	60,13	500,00	55,63	500,00	51,22	600,00	51,22	2.500,00
	Cakupan Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan Sektor Formal	-	16,67	-	33,33	450,00	50,00	450,00	66,67	450,00	83,33	450,00	100,00	500,00	100,00	2.300,00
	Cakupan Partisipa Tenaga Kerja Perempuan Sektor Non Formal	-	8,33	-	25,00	300,00	41,67	300,00	58,33	388,08	75,00	450,00	100,00	500,00	100,00	1.938,08
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Tingkat Organisasi Perempuan yang di Bina	2	1	235,00	5	1.000,00	5	1.000,00	5	1.000,00	6	1.000,00	6	1.000,00	30	5.235,00
Program kesetaraan kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Kabupaten Layak Anak (KLA)	5,6	16,7	175,00	33,3	1.000,00	50,0	1.000,00	66,7	1.100,00	83,3	1.201,11	100,0	1.201,11	100,0	5.677,22
	Persentase calon Legislatif dan Legislatif perempuan	8,8	-	-	25%	350,00	26%	500,00	27%	600,00	28%	600,00	30%	600,00	30%	2.650,00
Program Pemenuhan hak - hak anak	Jumlah Kader Perempuan Jabatan Publik dan Politik	7	-	-	50	300,00	50	400,00	50	500,00	50	600,00	50	600,00	250	2.400,00
	Persentase anak korban kekerasan yang di layati	76,31	72,50	200,00	69,23	1.100,00	68,31	1.100,00	60,13	1.100,00	55,63	1.100,00	51,22	1.210,37	51,22	5.810,37
	Persentase Ruang Publik Ramah Anak (RPRRA) tingkat kecamatan	5,56	16,67	-	33,33	450,00	50,00	450,00	66,67	450,00	83,33	550,00	100,00	600,00	100	2.500,00
	Persentase fasilitas layanan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	5	14,45	-	28,90	900,00	43,35	900,00	57,80	900,00	72,25	900,00	100,00	900,00	100	4.500,00

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Persentase kelompok Usaha Bersama Perempuan (KUBP) Aktif	35	38,6	-	53,6	615,15	63,6	750,00	73,6	750,00	85,6	750,00	100	750,00	100	3.615,15
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN																
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (kabupaten)	Persentase peningkatan kemampuan manajerial, keahlian dan keterampilan pegawai	100%	100%	5.190.32	100%	5.000,00	100%	5.376.69	100%	5.763.14	100%	6.180.25	100%	6.622.24	100%	34.132.64
	Cakupan pembinaan aqad berbasis (beberapa etar kualikan kinerja aparatur sipil negara)	n.a	-	-	100%	500.00	100%	537.67	100%	576.31	100%	618.02	100%	662.22	100%	2.894.23
Program Layanan Administrasi Kepegawaian	Cakupan layanan administrasi kepegawaian ASN	90%	100%	3.054.15	100%	1.500.00	100%	1.613.01	100%	1.728.94	100%	1.854.07	100%	1.986.67	100%	11.736.85
Program Penyediaan Informasi Kepegawaian	Cakupan ketersediaan Data/Informasi Kepegawaian	50%	66%	1.200.02	73%	750.00	81%	806.50	88%	864.47	100%	927.04	100%	993.34	100%	5.541.36
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pegawai yang ditempatkan dalam jabatan berdasarkan merit system	48%	55%	2.994.98	64%	1.000.00	73%	1.075.34	82%	1.152.63	91%	1.236.05	100%	1.324.45	100%	8.783.44
	Persentase Batas Pelanggaran Disiplin Pegawai	<2%	<2%	-	200.00	200.00	<2%	215.07	<2%	230.53	<2%	247.21	<2%	264.89	<2%	1.157.69
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	80%	100%	3.442.09	100%	2.400.00	100%	2.580.81	100%	2.766.31	100%	2.966.52	100%	3.178.68	100%	17.334.41
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	-	-	100%	1.000.00	100%	1.075.34	100%	1.152.63	100%	1.236.05	100%	1.324.45	100%	5.788.46
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	92%	100%	558.29	100%	500.00	100%	537.67	100%	576.31	100%	618.02	100%	662.22	100%	3.452.52
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	82%	100%	2.015.70	100%	2.000.00	100%	2.150.68	100%	2.305.25	100%	2.472.10	100%	2.648.90	100%	13.592.63
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kecapaian waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	345.16	100%	150.00	100%	161.30	100%	172.89	100%	186.41	100%	196.67	100%	1.213.43
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT																
URUSAN WAJIB KETETERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.431.52	100%	1.400.00	100%	1.500.00	100%	1.550.00	100%	1.600.00	100%	1.650.00	100%	9.131.52
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	236.25	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	236.25
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	150.00	100%	100.00	100%	109.18	100%	117.03	100%	125.50	100%	134.46	100%	736.17
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	527.90	100%	275.90	100%	350.00	100%	375.00	100%	400.00	100%	450.00	100%	2.376.70
Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kecapaian waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	285.00	100%	150.00	100%	163.77	100%	175.54	100%	188.24	100%	201.70	100%	1.164.25
Program Peningkatan Keamtanan dan Keamanan Lingkungan	Cakupan penanganan konflik Cakupan penanganan gejala masyarakat	100%	100%	990.00	100%	674.10	100%	700.00	100%	700.00	100%	700.00	100%	750.00	100%	4.514.10
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekai)	Jumlah kasus penyakit masyarakat	224 kasus	220 kasus	1.309.37	220 kasus	300.00	210 kasus	320.00	205 kasus	350.00	200 kasus	868.83	190 kasus	400.00	190 kasus	3.548.20
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam pemilu	58.75%	65%	850.00	65%	500.00	67%	678.77	70%	831.97	71%	400.00	75%	1.039.83	75%	4.300.57
	Persentase omras yang terlibt administrasi	50%	70%	410.00	70%	200.00	75%	218.36	80%	234.05	90%	250.99	100%	268.94	100%	1.582.34
	Persentase parpol yang terlibt administrasi	50%	100%	405.00	100%	200.00	100%	218.36	100%	234.05	100%	250.99	100%	268.94	100%	1.677.34
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	100%	20%	4.355.00	20%	500.00	40%	400.00	60%	420.00	80%	500.00	100%	500.00	100%	6.675.00

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		
	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%	20%	98.00	20%	250.00	40%	272.95	60%	292.56	80%	313.74	100%	336.17	100%	1.563.42

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

URUSAN WAIB PANGAN																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		12 Bulan	2.810.59	12 Bulan	1.700.00	12 Bulan	1.828.08	12 Bulan	1.959.47	12 Bulan	2.101.28	12 Bulan	2.251.56	12 Bulan	12.650.98
	Tingkat kepaluhan aparatur	85% (303 org)	87% (310 org)	699.33	90% (320 org)	-	90% (320 org)	-	95%(338 org)	-	90% (320 org)	-	100% (366 org)	-	100%	699.93
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80 % (285 org)	80 % (285 org)	350.00	85% (303 org)	100.00	87% (310 org)	107.53	90% (320 org)	115.26	90% (320 org)	123.60	90% (320 org)	132.44		928.85
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	213	231	6.876.07	267	2.517.61	267	2.707.50	285	2.902.10	300	3.112.14	300	3.334.71	100%	21.450.33
	Tingkat kecepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24 dok/lap ; 19 objek	24 dok/lap ; 19 objek	645.39	24 dok/lap ; 45 objek	150.00	24 dok/lap ; 45 objek	161.30	24 dok/lap ; 45 objek	172.89	24 dok/lap ; 45 objek	185.41	24 dok/lap ; 45 objek	196.67	144 dok/objek ; 45 objek	1.513.66
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Regulasi Ketahanan Pangan	1 regulasi	-	6.550.00	1 regulasi	4.175.00	1 regulasi	4.525.00	2 regulasi	5.000.00	1 regulasi	5.200.00	1 regulasi	7.500.00	6 regulasi	32.950.00
	Persentase ketersediaan pangan utama beras (%)	128.73%	129.71%	-	130.71%	-	131.35%	-	132.21%	-	133.29%	-	135.04%	-	135.04%	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan (ton)	105.041.60	108.317.93	-	116.633.40	-	114.643.96	-	117.844.59	-	121.282.31	-	125.311.18	-	125.311.18	-
	Jumlah penduduk (jawa)	722.100	739.000	-	755.800	-	772.400	-	789.800	-	805.100	-	821.200	-	821.200	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kebunhan (gmh pend x 113 kg/kg/td)	81.597.30	83.507.00	-	85.405.40	-	87.281.20	-	89.134.40	-	90.976.50	-	92.795.60	-	92.795.60	-
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	87.28	89.72	-	92.04	-	94.27	-	95.32	-	96.32	-	97.15	-	97.15	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase desa berstatus swasembada pangan utama (beras) (%)	19.83% (47 desa)	20.67% (49 desa)	-	21.94% (Desa)	-	22.78% (Desa)	-	23.62% (Desa)	-	24.47% (Desa)	-	25.52% (Desa)	-	25.52% (Desa)	-
	Cakupan Desa mandiri pangan (DESA) (%)	18.56% (44 desa)	18.98% (45 desa)	-	19.41% (46 desa)	-	20.25% (Desa)	-	21.10% (Desa)	-	21.94% (Desa)	-	22.78% (Desa)	-	22.78% (Desa)	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan nilai (score) Pola Pangan Harapan Konsumsi.	91.30	91.60	-	91.90	-	92.20	-	92.50	-	92.80	-	93.00	-	93.00	-
	Cakupan Keamanan Pangan segar (%)	82	83	-	84	-	85%	-	86%	-	87%	-	88%	-	88%	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Bina Kelompok Tani (Madya dan Utama)	59	65	11.007.00	71	11.305.00	93	7.760.00	120	8.000.00	147	8.000.00	184	12.000.00	217	58.072.00
	Kelas Utama			-	67	-	83	-	100	-	117	-	144	-	167	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Penyuluhan Pertanian Satu Desa Satu Penyuluh			-	70% (165 desa berpenyuluh)	-	75% (177 desa berpenyuluh)	-	80% (190 desa berpenyuluh)	-	90% (213 desa)	-	95% (225 desa berpenyuluh)	-	95% (225 desa berpenyuluh)	-
				-	4	-	10	-	20	-	30	-	40	-	50	-

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

URUSAN PILIHAN PERTANIAN																
Program Peningkatan Penerimaan Teknologi Penyuluhan	Cakupan Demplot Budidaya Tanaman Jagung	40% dari rekomendasi		933.00	50% dari rekomendasi	1.900.00	65% dari rekomendasi	2.060.00	75% dari rekomendasi	2.350.00	85% dari rekomendasi	2.625.00	90% dari rekomendasi	5.000.00	90% dari rekomendasi	14.868.00
	Cakupan Paket Teknologi Budidaya Tanaman Jagung	-	-	-	60 % dari rekomendasi	-	70 % dari rekomendasi	-	80 % dari rekomendasi	-	90 % dari rekomendasi	-	95 % dari rekomendasi	-	95 % dari rekomendasi	-
Program Peningkatan Penerimaan Teknologi Penyuluhan	Cakupan Paket Teknologi Budidaya Tanaman Jagung	-	-	-	50% dari rekomendasi	-	65% dari rekomendasi	-	75% dari rekomendasi	-	85% dari rekomendasi	-	90% dari rekomendasi	-	90% dari rekomendasi	-
	Paran Dan Agropirasi Komoditas Jagung															
Program Peningkatan Penerimaan Teknologi Penyuluhan	Cakupan Teknologi Budidaya Yang Diperapkan (Paoli, Kedelai)	-	-	-	60 % dari rekomendasi	-	70 % dari rekomendasi	-	80 % dari rekomendasi	-	90 % dari rekomendasi	-	95 % dari rekomendasi	-	95 % dari rekomendasi	-
	Cakupan Paket Teknologi Budidaya dan Peranganan Pasca Panen Tanaman Pangan & Hortikultura	-	-	-	50% dari rekomendasi	-	65% dari rekomendasi	-	75% dari rekomendasi	-	85% dari rekomendasi	-	90% dari rekomendasi	-	90% dari rekomendasi	-
Program Peningkatan Penerimaan Teknologi Penyuluhan	Cakupan Teknologi Budidaya Yang Diperapkan (Aren)	-	-	-	50% dari rekomendasi	-	65% dari rekomendasi	-	75% dari rekomendasi	-	85% dari rekomendasi	-	90% dari rekomendasi	-	90% dari rekomendasi	-
	Cakupan Paket Teknologi Integrasi Budidaya Tanaman Sawit dengan Sagu Proton	-	-	-	50% dari rekomendasi	-	65% dari rekomendasi	-	75% dari rekomendasi	-	85% dari rekomendasi	-	90% dari rekomendasi	-	90% dari rekomendasi	-

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
	Cakupan Paket Teknologi Budidaya dan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan & Hortikultura	-	-	-	50% dari rekomendasi	-	65% dari rekomendasi	-	75% dari rekomendasi	-	85% dari rekomendasi	-	90% dari rekomendasi	-	90% dari rekomendasi	-

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

URUSAN WAIB LINGKUNGAN HIDUP

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.404.53	100%	1.500.00	100%	1.613.01	100%	1.728.94	100%	1.854.07	100%	1.986.67	100%	11.087.23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	125.00	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	125.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	400.00	100%	100.00	100%	107.53	100%	115.26	100%	123.60	100%	132.44	100%	978.85
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	425.00	100%	214.49	100%	230.65	100%	247.22	100%	265.12	100%	284.08	100%	1.666.55
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kepatuhan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	640.00	100%	150.00	100%	161.30	100%	172.89	100%	185.41	100%	196.67	100%	1.506.27
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Bank Sampah yang terbentuk disetiap desa/kelurahan	0,39 % (9)	0,42% (10)	735.00	0,63% (15)	800.00	12,77%(30)	950.00	15% (35)	1.050.00	29%(68)	1.175.00	29%(68)	1.275.00	1	5.985.00
Program Peningkatan Pencemaran dan Penukasan Lingkungan Hidup	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL	210 Kegiatan Usaha (42%)	95 Kegiatan Usaha (19%)	5.446.80	190 Kegiatan Usaha (38%)	1.124.89	285 Kegiatan Usaha (57%)	3.078.77	380 Kegiatan Usaha (76%)	3.608.11	475 Kegiatan Usaha (95%)	3.646.98	500 Kegiatan Usaha (100%)	4.509.89	1	21.418.45
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cagarang Sumber Daya Alam	Pemenuhan Status Mutu Air	12 anak sungai (40 %)	12 anak sungai (40 %)	720.00	12 anak sungai (40 %)	720.00	18 anak sungai (60 %)	1.300.00	20 anak sungai (67 %)	1.500.00	25 anak sungai (83 %)	1.700.00	30 anak sungai (100 %)	1.900.00	30 anak sungai	7.940.00
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase lahan lahan daerah atau lahan untuk produksi biomass yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kesesuaiannya	2.139.814 ha (90,80%)	3.238.874 ha (76%)	1.742.00	3.238.874 ha (84%)	1.555.11	3.238.874 ha (96,24%)	1.742.00	3.238.874 (100%)	1.742.00	3.238.874 (100%)	1.742.00	3.238.874 (100%)	1.742.00	1	10.265.11
Program Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Cakupan Penelepan Status Lingkungan Hidup Daerah	100% (18 Kecamatan)	100% (18 Kecamatan)	267.00	300.00	300.00	100% (18 Kecamatan)	350.00	100% (18 Kecamatan)	400.00	100% (18 Kecamatan)	450.00	100% (18 Kecamatan)	500.00	100% (18 Kecamatan)	2.267.00
	Persentase Jumlah Usaha daerah/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	0,67	0,69	1.090.00	1.000.00	1.000.00	0,73	1.000.00	0,75	1.050.00	0,77	1.100.00	0,79	1.151.00	1	6.391.00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Luasan Wilayah Pesisir yang di konservasi	64 ha	20 ha	300.00	20 ha	300.00	18 ha	300.00	15 ha	300.00	15 ha	300.00	15 ha	300.00	63 ha	1.880.00
	Pemutaran Emisi Gas Rumah Kaca (CO2)	0,44	0,4	1.150.00	0,36	1.200.00	0,3	3.000.00	0,25	2.550.00	0,19	1.950.00	0,19	1.550.00	0,19	11.400.00

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

URUSAN WAIB PENANAMAN MODAL

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengembangan Sistem Pelayanan	Indek Kepuasan Masyarakat	7,6	7,8 (Baik)	455.00	8,1 (Baik)	400.00	(8,5) Baik	430.14	(8,7) Baik	461.05	(9,1) Sangat Baik	494.42	(9,4) Sangat Baik	529.78	Sangat Baik	2.770.39
Program Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian Pelayanan Perizinan	Persentase layanan perizinan dan non perizinan	100%	100%	640.00	100%	500.00	100%	537.67	100%	576.31	100%	618.02	100%	662.22	100%	3.534.23
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	686.86	100%	1.000.00	100%	1.075.34	100%	1.152.63	100%	1.236.05	100%	1.324.45	100%	6.475.32
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	25.00	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	25.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	-	100%	100.00	100%	107.53	100%	115.26	100%	123.60	100%	132.44	100%	578.85
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	460.48	100%	200.00	100%	215.07	100%	230.53	100%	247.21	100%	264.89	100%	1.616.17
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kepatuhan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	225.00	100%	150.00	100%	161.30	100%	172.89	100%	185.41	100%	196.67	100%	1.093.27

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		
BADAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA																
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan Fasilitas Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Aparatur pemerintahan Desa	1109	500	12.128.81	100	5.000.00	100	5.376.69	100	5.763.14	100	6.180.25	109	6.622.24	509	41.071.14
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	3.613.76	100%	2.400.00	100%	2.580.81	100%	2.766.31	100%	2.966.52	100%	3.178.68	100%	17.506.08
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100	100	852.99	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	852.99
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	941.92	100%	100.00	100%	107.53	100%	115.26	100%	123.60	100%	132.44	100%	1.520.76
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	873.67	100	300.00	100	322.60	100	345.79	100	370.81	100	397.33	100	2.610.21
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kecapaian waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	153.97	100%	150.00	100%	161.30	100%	172.89	100%	185.41	100%	198.67	100%	1.022.24
Program Pengembangan Lembaga-Lembaga Desa	Cakupan Fasilitas dan partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT LPM PKK Karang Taruna Lembaga Adat) dalam Musyawarah Pembangunan Desa	40	50	2.857.00	60	3.000.00	70	4.334.81	80	3.500.00	90	4.743.39	100	4.059.34	100	22.494.54
Program Peningkatan Peran Pemupuan di Pedesaan	Cakupan Fasilitas dan Pembiayaan Pembangunan Peran Pemupuan dan anak dalam kesejahteraan keluarga	480	80	750.00	80	400.00	80	400.00	80	700.00	80	700.00	80	1.300.00	480	4.250.00
Program Peningkatan Keadayaan Masyarakat Pedesaan	Cakupan Fasilitas Pembiayaan Pembangunan Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100	100	1.738.36	100	3.000.00	100	3.000.00	100	3.200.00	100	3.200.00	100	3.500.00	100	17.638.36
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan Fasilitas dan Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	50	55	6.725.00	60	3.100.00	65	3.100.00	70	3.400.00	75	3.400.00	80	3.500.00	80	23.225.00
Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa	Cakupan Fasilitas Laporan Pengelolaan Keuangan, Aset, Pendapatan, dan Transper Dana Desa	193	30	1.738.36	30	3.000.00	30	3.000.00	40	3.200.00	40	3.200.00	23	3.400.00	193	17.538.36
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Cakupan Fasilitas Pembiayaan, Pelembagaan, Pengembangan, dan Pemasaan Hasil Usaha serta Kewirausahaan			1.168.93		1.200.00		1.200.00		1.600.00		1.600.00		2.000.00		8.768.93
Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) yang aktif	97	20	-	20	-	20	-	20	-	10	-	7	-	97	-
	Jumlah Kelompok Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pedesaan yang aktif	36	0	-	10	-	10	-	10	-	6	-	0	-	-	-
	Cakupan Fasilitas dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)	148	163	1.299.76		691.82		691.82		1.000.00		1.000.00		1.200.00	259	5.883.40
Program Desa Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Fasilitas Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Desa dan pemberdayaan Desa/kei (Desa Mandiri)	14	0	-	5	320.85	6	320.85	7	593.66	8	593.66	9	793.66	30	2.622.68
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH																
URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL																

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	3.312.53	100%	4.500.00	100%	4.839.02	100%	5.186.82	100%	5.562.22	100%	5.960.02	100%	29.360.62
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	709.97	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	709.97
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	975.00	100%	100.00	100%	107.53	100%	115.26	100%	123.60	100%	132.44	100%	1.553.85
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	3.587.50	100%	1.000.00	100%	1.075.34	100%	1.152.63	100%	1.236.05	100%	1.324.45	100%	9.375.96
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kepatuhan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	474.82	100%	150.00	100%	161.30	100%	172.89	100%	188.41	100%	198.67	100%	1.342.89
Program Peningkatan Klim Investasi dan Realisasi Investasi	Rasio daya serap tenaga kerja			5.305.88		2.662.79		2.940.43		3.103.89		4.929.75		3.011.01		21.953.69
	Pertumbuhan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	5.454	8.618	-	9.999	-	111.380	-	12.996	-	14.236	-	15.360	-	15.360	-
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMNA)	47	36	4.379.00	38	3.807.24	40	4.116.60	42	4.457.18	44	3.178.11	48	5.675.55	48	25.613.68
	Persentase Realisasi Investasi		80%	-	85%	-	87%	-	90%	-	95%	-	100%	-	100%	-
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMNA)	6.252	7.985	-	8.353	-	8.738	-	9.140	-	9.562	-	10.002	-	53.780	-

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
URUSAN WAJIB KETERANGAN, KETERIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	5.257.05	100%	5.500.00	100%	5.914.36	100%	6.339.45	100%	6.798.27	100%	7.284.47	100%	37.093.61
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	2.683.64	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	2.693.64
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	480.00	100%	200.00	100%	215.07	100%	230.53	100%	247.21	100%	264.89	100%	1.647.69
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	7.507.71	100%	1.000.00	100%	1.075.34	100%	1.152.63	100%	1.236.05	100%	1.324.45	100%	13.296.17
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kepatuhan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	1.373.50	100%	150.00	100%	161.30	100%	172.89	100%	188.41	100%	198.67	100%	2.241.77
Program Peningkatan Keselamatan dan Pencegahan Bencana	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	100%	100%	14.289.10	100%	8.000.00	100%	8.602.71	100%	9.221.02	100%	9.888.40	100%	10.695.59	100%	60.598.81
Program Peningkatan dan Keselamatan Peningulangan Bencana	Cakupan Pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana	50%	100%	2.538.08	100%	1.500.00	100%	1.613.01	100%	1.728.94	100%	1.854.07	100%	1.986.67	100%	11.220.77
Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Cakupan Deteksi Dini bencana alam	100%	100%	2.120.50	100%	1.500.00	100%	1.613.01	100%	1.728.94	100%	1.854.07	100%	1.986.67	100%	10.803.20
	Cakupan pelayanan penanganan korban bencana alam	100%	100%	-	100%	500.00	100%	537.67	100%	576.31	100%	618.02	100%	662.22	100%	2.894.23
Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan bencana	89%	100%	2.600.00	100%	2.000.00	100%	2.150.68	100%	2.305.25	100%	2.472.10	100%	2.648.90	100%	14.176.93
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	100%	100%	-	100%	500.00	100%	537.67	100%	576.31	100%	618.02	100%	662.22	100%	2.894.23
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Hunan yang mendapat bantuan	50	50	400.00	60	1.000.00	60	1.075.34	60	1.152.63	60	1.236.05	60	1.324.45	350	6.188.46

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
Program Sistem Inovasi Daerah	Cakupan sistem inovasi Daerah	n.a	100%	318.08	100%	500.00	100%	537.67	100%	576.31	100%	618.02	100%	662.22	100%	3.212.31
	Persentase Kajian Penelitian Kecamatan	n.a	-	-	2 Dokumen	300.00	Dokumen	322.60	Dokumen	345.79	Dokumen	370.81	Dokumen	397.33	Dokumen	1.736.54
	Jumlah kawasan pertanian yg menerapkan siltikal terpadu	n.a	-	-	3 Dokumen	350.00	Dokumen	376.37	Dokumen	403.42	Dokumen	432.62	Dokumen	463.56	Dokumen	2.025.96
	Cakupan Paket Teknologi Budaya/ Taman Jagung	n.a	-	-	2 Dokumen	300.00	Dokumen	322.60	Dokumen	345.79	Dokumen	370.81	Dokumen	397.33	Dokumen	1.736.54

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
	Cakupan Paket Teknologi Pasca Panen Dan Agribudiseri Komoditas Jagung	n.a	-	-	7 Dokumen	900.00	1 Dokumen	967.80	1 Dokumen	1.037.36	1 Dokumen	1.112.44	1 Dokumen	1.192.00	11 Dokumen	5.209.62
Program Penelitian Umum	Ketersediaan rekomendasi kebijakan daerah	24 Dokumen	26 Dokumen	4.297.17	5 Dokumen	500.00	5 Dokumen	537.67	5 Dokumen	576.31	5 Dokumen	618.02	5 Dokumen	662.22	51 Dokumen	7.191.40
	Cakupan Penelitian di bidang Pemerintahan dan Hukum	-	-	-	9 Dokumen	1.000.00	7 Dokumen	1.075.34	6 Dokumen	1.152.63	7 Dokumen	1.236.05	8 Dokumen	1.324.45	37 Dokumen	5.788.46
	Cakupan Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan	-	-	-	9 Dokumen	1.000.00	4 Dokumen	1.075.34	2 Dokumen	1.152.63	2 Dokumen	1.236.05	1 Dokumen	1.324.45	18 Dokumen	5.788.46
	Cakupan Penelitian di bidang SDA dan Teknologi	-	-	-	12 Dokumen	1.100.00	5 Dokumen	1.182.67	3 Dokumen	1.267.89	4 Dokumen	1.359.65	3 Dokumen	1.456.89	27 Dokumen	6.367.31
	Cakupan Penelitian di bidang Sosial Budaya dan Keresayarakatan	-	-	-	5 Dokumen	500.00	4 Dokumen	537.67	5 Dokumen	576.31	3 Dokumen	618.02	4 Dokumen	662.22	21 Dokumen	2.694.23
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.838.16	100%	1.700.00	100%	1.828.08	100%	1.959.47	100%	2.101.28	100%	2.251.56	100%	11.678.55
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	209.09	100%	100.00	100%	107.53	100%	115.26	100%	123.60	100%	132.44	100%	787.94
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	650.00	100%	500.00	100%	537.67	100%	576.31	100%	618.02	100%	662.22	100%	3.544.23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kecapaian waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	214.98	100%	150.00	100%	161.30	100%	172.89	100%	186.41	100%	198.67	100%	1.083.25

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	3.861.23	100%	3.800.00	100%	4.086.29	100%	4.379.98	100%	4.696.99	100%	5.032.91	100%	25.657.40
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	8.470.72	100%	700.00	100%	752.74	100%	806.94	100%	865.23	100%	927.11	100%	12.522.65
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	200.00	100%	50.00	100%	53.77	100%	57.63	100%	61.80	100%	66.22	100%	489.42
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	1.857.15	100%	500.00	100%	537.67	100%	576.31	100%	618.02	100%	662.22	100%	4.751.39
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	585.00	100%	3.000.00	100%	3.226.02	100%	3.457.88	100%	3.708.15	100%	3.973.35	100%	17.950.39
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	5.465.41	100%	5.000.00	100%	5.376.69	100%	5.763.14	100%	6.180.25	100%	6.622.24	100%	34.397.74
Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	Penyampaian LKPD Tepat Waktu	100%	100%	10.835.28	100%	10.000.00	100%	10.753.39	100%	11.526.27	100%	12.360.50	100%	13.244.49	100%	68.719.93
	Terbti Administrasi BMD	-	-	-	3.000.00	-	3.226.02	3.457.88	-	3.708.15	-	3.973.35	-	4.272.10	-	17.965.39
	Cakupan Pemantauan BMD Yang potensial	-	-	-	2.000.00	-	2.150.68	2.305.25	-	2.472.10	-	2.648.90	-	2.894.23	-	11.576.93
	Tingkat standarisasi belanja SKPD	-	-	-	500.00	-	537.67	576.31	-	618.02	-	662.22	-	719.39	-	2.894.23
Program peningkatan pelayanan kesehatan kepala daerah/wakil kepala Daerah	Cakupan layanan kesehatan kepala daerah/wakil kepala Daerah	100%	100%	810.94	100%	800.00	100%	860.27	100%	922.10	100%	988.84	100%	1.059.56	100%	5.441.71
Program penataan dan penyempurnaan kehlilan sistem dan prosedur pengarsan pengarsan	Cakupan penataan dan penyempurnaan kehlilan sistem dan prosedur pengarsan	85%	85%	545.00	100%	500.00	100%	537.67	100%	576.31	100%	618.02	100%	662.22	100%	3.439.23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kecapaian waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	1.584.75	100%	3.225.00	100%	3.467.97	100%	3.717.22	100%	3.986.26	100%	4.271.35	100%	20.252.55
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kecapaian waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	2.614.16	100%	2.614.16	100%	2.811.11	100%	3.013.15	100%	3.231.23	100%	3.462.32	100%	17.746.12

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program pengembangan daefiniformasi	Tingkat Kelembutan Data	34%	40%	400.00	45%	1.272.58	60%	1.368.45	75%	1.466.81	80%	1.572.97	85%	1.686.46	85%	1.766.27
Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat kesesuaian antara RPJMD-RKPD	50%	70%	7.330.09	75%	7.000.00	75%	7.527.37	85%	8.068.39	85%	8.652.35	90%	9.271.14	90%	9.784.34
	Tingkat Capaian Kinerja Fiskal	60%	70%	1.900.00	75%	3.000.00	75%	3.226.02	85%	3.457.88	85%	3.708.15	90%	3.973.35	90%	4.265.39
Program Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah	Cekupan Fasilitas Kelengkapan Pembangunan Daerah	0	5	350.00	5	350.00	5	376.37	5	403.42	5	432.62	5	463.56	30	2.375.96
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rata-Rata Tingkat capaian pembangunan Bidang Ekonomi	70%	75%	2.250.00	78%	3.250.00	81%	3.494.85	84%	3.746.04	88%	4.017.16	90%	4.304.46	90%	4.592.51
Program perencanaan bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat	Rata-Rata Tingkat capaian pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat	70%	75%	2.600.00	78%	3.300.00	81%	3.548.62	84%	3.803.67	88%	4.078.96	90%	4.370.68	90%	4.662.93
Program Perencanaan prasarana wlayah dan sumber daya alam	Rata-Rata Tingkat capaian pembangunan Bidang Sarana Prasarana dan pengembangan wlayah	70%	75%	4.950.00	78%	5.000.00	81%	5.376.69	84%	5.763.14	88%	6.180.25	90%	6.622.24	90%	7.092.32
Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur	Rata-Rata Tingkat capaian pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	70%	75%	2.300.00	78%	2.000.00	81%	2.150.68	84%	2.305.25	88%	2.472.10	90%	2.648.90	90%	2.836.93
Program Pelayanan Administrasi	Cekupan layanan administrasi	100%	100%	4.973.71	100%	5.000.00	100%	5.376.69	100%	5.763.14	100%	6.180.25	100%	6.622.24	100%	7.092.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparat	75%	75%	783.99	75%	-	80%	-	85%	-	90%	-	95%	-	95%	783.99
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cekupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	58%	60%	400.00	70%	500.00	75%	537.67	80%	576.31	85%	618.02	90%	662.22	90%	703.23
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cekupan peningkatan sarana dan prasarana aparat	100%	100%	5.213.32	88%	5.000.00	89%	5.376.69	90%	5.763.14	92%	6.180.25	93%	6.622.24	93%	7.092.64
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Tingkat kecapaian waktu pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	100%	16%	670.00	16%	670.00	15%	720.48	15%	772.26	16%	828.15	15%	887.38	77%	938.27
Program Kerjasama Pembiayaan Pembangunan Daerah	Persentase penerapan MOU Kerjasama Pembiayaan pembangunan daerah melalui Swasta	n.a	-	647.00	16	647.00	16	705.70	16	756.11	16	810.79	16	868.66	80	918.26
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																
URUSAN WAIB STATISTIK																
Program pengembangan daefiniformasisistatistik daerah	Cekupan data Statistik daerah		12	3.150.00	10%	4.000.00	10%	4.301.36	11%	4.610.51	10%	4.944.20	10%	5.297.79	51%	5.693.86
DIAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR																
URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Program Pelayanan Administrasi Bekantoran	Cekupan layanan administrasi bekantoran	100%	100 %	11.580.97	100%	4.000.00	100%	4.301.36	100%	4.610.51	100%	4.944.20	100%	5.297.79	100%	5.693.83
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparat	100%	0%	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	0	-	0	-	100%	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cekupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	453.13	100 %	200.00	100 %	215.07	100 %	230.53	100 %	247.21	100 %	264.89	100 %	281.82
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cekupan peningkatan sarana dan prasarana aparat	100%	100 %	2.680.09	100 %	1.000.00	100 %	1.075.34	100 %	1.152.63	100 %	1.236.05	100 %	1.324.45	100 %	1.418.55
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Tingkat kecapaian waktu pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	100%	100%	481.77	100 %	150.00	100 %	161.30	100 %	172.89	100 %	185.41	100 %	198.67	100 %	210.04
Program Peningkatan Sistem Jangnan Irigasi Pertanian	Persentase Jangnan Irigasi Kondisi Baik	n.a	-	-	70.98%	67.885.53	85.71%	175.050.00	90.58%	131.725.00	96.79%	126.150.00	100%	53.850.00	100%	554.860.53
Program Pengendalian Sumber Daya Air	Cekupan sumber daya air yang di kelola	82%	-	126.900.84	50.00%	11.970.05	66.67%	12.500.00	83.33%	15.000.00	93.33%	17.500.00	100%	20.000.00	100%	22.500.05
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase terluasnya antar wlayah di Kabupaten Kutai Kalimantan	82%	-	126.900.84	85.6%	65.000.00	88.2%	70.000.00	92.8%	75.000.00	96.4%	80.000.00	100%	90.000.00	100%	95.000.84
	Panjang Jalan Kolektor yang dibangun (Km)	1.792.60	0	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	2.193

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program peningkatan jalan dan jembatan	Penjumlahan Jalan menuju Pelabuhan Perikanan (KM)	0	0	-	0,2	-	1,5	-	0	-	0	-	0	-	2	-
	Cakupan jalan dan jembatan dalam kondisi baik	67,1%	67,1%	623.828,90	73,6%	72.368,02	80,2%	65.417,20	86,8%	76.359,40	93,4%	84.640,98	100%	94.516,24	100 %	1.017.130,74
	Cakupan jalan dan jembatan kepariwisataan dalam kondisi baik	na	na	-	20%	15.000,00	40%	17.500,00	60%	17.500,00	80%	20.000,00	100%	22.500,00	100 %	92.500,00
	Cakupan jalan dan jembatan pendidikan dalam kondisi baik	na	na	-	20%	15.000,00	40%	17.500,00	60%	17.500,00	80%	20.000,00	100%	22.500,00	100 %	92.500,00
	Cakupan jalan dan jembatan kesehatan dalam kondisi baik	0	0	-	100%	2.200,00	0	2.200,00	0	2.200,00	-	2.200,00	100 %	2.500,00	100 %	11.300,00
	Cakupan jalan dan jembatan industri dalam kondisi baik	0	0	-	0	-	0,5	5.000,00	100%	5.000,00	-	5.000,00	100 %	-	100 %	15.000,00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan yang diperbaiki	84%	84%	11.400,00	87%	15.000,00	91%	20.000,00	94%	25.000,00	97%	27.641,29	100%	30.000,00	100 %	129.041,29
	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan	0	-	770,64	60%	3.200,00	80%	3.200,00	100%	3.200,00	-	-	100 %	-	100 %	10.370,64
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran lainnya	Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	62,49%	66,93%	74.528,53	-	-	-	-	-	-	-	-	66,93%	74.528,53	-	-
	Cakupan sumber daya air yang di kelola	40%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Program Pengembangan Banjir	Cakupan penanganan banjir	15,00%	18,20%	5.000,00	22,00%	7.500,00	33,00%	7.500,00	44,00%	7.500,00	56,00%	7.500,00	56,00%	10.000,00	56,00%	45.000,00
	Cakupan drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik	-	20,00%	18.884,31	22,00%	7.500,00	33,00%	7.500,00	44,00%	7.500,00	56,00%	7.500,00	56,00%	10.000,00	100 %	58.694,31
Program pembangunan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong dalam kondisi baik	40,00%	-	55.801,39	41,40%	7.500,00	44,70%	7.500,00	48,90%	7.500,00	53,10%	7.500,00	53,87%	10.000,00	100 %	95.801,39
Program perbaikan pengusahaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase ketersediaan lahan untuk jalan dan jembatan	n.a	21,20%	97.664,30	45,76%	7.500,00	100,00%	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	100 %	-	100 %	135.164,30
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Cakupan jalan dan jembatan yang di inspeksi	-	0	-	0,1656	1.300,00	0,4056	1.300,00	0,6456	1.300,00	0,8456	1.300,00	100 %	1.300,00	100 %	6.500,00

DINAS CPTA KARYA DAN TATA RUANG

URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	94,44%	100 %	33.905,32	100%	29.000,00	100%	31.184,82	100%	33.426,19	100%	35.846,45	100%	38.409,01	100%	201.770,80
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	100 %	300,00	100 %	200,00	100 %	215,07	100 %	230,53	100 %	247,21	100 %	264,89	100 %	1.457,69
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Alat-alat	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana alat-alat	99,40 %	100 %	1.658,99	100 %	1.000,00	100 %	1.075,34	100 %	1.152,63	100 %	1.236,05	100 %	1.324,45	100 %	7.447,45
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kecapaian waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95,60 %	100 %	1.163,30	100 %	150,00	100 %	161,30	100 %	172,89	100 %	186,41	100 %	196,67	100 %	2.031,57
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kecapaian waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95,60 %	100 %	1.163,30	100 %	150,00	100 %	161,30	100 %	172,89	100 %	186,41	100 %	198,67	100 %	2.031,57
Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Lapangan olah raga	n.a	1 Lapangan	12.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Lapangan	12.150,00
Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kepariwisata	Cakupan bangunan kepariwisataan dalam kondisi baik	n.a	17,99	12.350,00	17,99	5.000,00	17,99	5.000,00	17,99	5.000,00	17,99	5.000,00	17,99	7.500,00	17,99	39.950,00
Program Peningkatan Efisiensi Pendidikan Dalam Negeri	Jumlah Pesar yang dibangun	2 Pesar	3 Pesar	15.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 Pesar	15.850,00
Program Pengembangan Data / Informasi Kecerdikan	Cakupan bahan kebijakan perencanaan keciptakayaan	0%	100%	-	100%	525,00	100%	525,00	100%	525,00	100%	525,00	100%	825,00	100%	2.925,00
Program peningkatan Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	Cakupan jalan lingkungan dan jembatan dalam kondisi baik	52,91%	55,41%	17.261,22	59,91	15.000,00	68,41	17.500,00	76,91	20.000,00	85,41	20.000,00	93,91	22.500,00	93,91%	112.261,22
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang diperbaiki	47,10%	40,09%	21.000,00	33,09%	15.000,00	26,09%	17.500,00	19,09%	20.000,00	12,09%	20.000,00	5,09%	21.000,00	5,09%	114.500,00

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	27%	29%	4.192.50	45,30	5.000,00	63,55	5.000,00	81,90	5.000,00	100%	7.500,00	-	-	100%	26.692,50
Program Pencekungan Rata Ruang	Jumlah Kecamatan yang memiliki RDI/R	0%	0%	2.300,00	2.300,00	17 Kecamatan	2.300,00	18 Kecamatan	18 Kecamatan	2.300,00	18 Kecamatan	5.000,00	18 Kecamatan	5.000,00	18 Kecamatan	19.200,00
Program Pemertanian Ruang	Jumlah Kecamatan yang menatakn RDI/R	0%	0%	-	750,00	17 Kecamatan	750,00	18 Kecamatan	18 Kecamatan	750,00	18 Kecamatan	1.000,00	18 Kecamatan	1.500,00	18 Kecamatan	4.750,00
Program Pengendalian Pemertanian Ruang	Ruang publik yang berubah pemertannya	2 kawasan	2 kawasan	-	750,00	-	750,00	-	750,00	750,00	-	1.000,00	1.250,00	1.250,00	4.500,00	4.500,00
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Cakupan drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik	52,91%	55,41%	2.325,00	59,91%	2.000,00	68,41%	2.000,00	76,91%	2.000,00	85,41%	2.500,00	93,91%	2.500,00	93,91%	13.325,00
Program Wajit Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Sekolah pendidikan SD/MI dalam kondisi baik	n/a	52	15.010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.010,00
Program Pendidikan Menengah	Sekolah pendidikan SMP/MTs dalam kondisi baik	n/a	15	2.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.750,00
Program pembangunan turajaludibronjong	Cakupan Turajaludibronjong dalam kondisi baik	0,471	40,09%	4.800,00	33,09%	2.000,00	26,09%	2.000,00	0,1909	2.000,00	0,1209	2.000,00	5,09%	2.000,00	5,09%	14.800,00
Program pengelodaan areal pemukiman	Rasio tempat pemukiman umum per satuan penduduk	100	224	16.450,00	2.500,00	0	2.500,00	0	3.000,00	0	0	5.000,00	0	7.500,00	0	36.950,00
Program pengelodaan ruang hijau	Prosentase pemertanian Ruang Terbuka Hijau terhadap luas pemukiman	87,17	87,67%	6.860,00	89,74%	2.500,00	92,22%	2.500,00	94,65%	3.000,00	97,30%	3.250,00	100%	7.500,00	100%	25.610,00
Program Pembangunan / Pemertanian Ruang	Kecakupan sarana pemertanian	-	50,00%	-	2,07%	-	2,48%	-	2,44%	-	2,64%	-	2,70%	-	2,70%	25.610,00
Peningkatan Bangunan Negara	Kecakupan sarana pemertanian	20,87%	23,05%	130.510,00	26,17%	7.500,00	29,28%	9.226,43	32,39%	12.207,05	35,51%	15.000,00	38,62%	19.870,00	38,62%	194.313,48

DINAS CPTA KARYA DAN TATA RUANG

URUSAN WAIB PERUMAHAN RAKAT DAN KAWASAN PERUMUKAN

Program Badan Ruman	Cakupan Ruman Tiok Layak Huni yang di Renovasi	2.480 unit	-	-	2,830	42.000,00	3,225	49.000,00	3,660	51.000,00	4,140	60.000,00	4,660	67.000,00	4,660	269.000,00
		0,8952	-	-	0,9082	-	0,9147	-	0,9212	-	0,9278	-	0,9353	-	0,9353	-
Program Pengembangan Pemertanian	Cakupan Ruman layak huni	2.480 unit	-	-	367 unit	-	430 unit	-	444 unit	-	524 unit	-	580 unit	-	580 unit	2.345 Unit
		2.480 unit	2980	57.239,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.239,76
		0,8952	0,9017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9017
		2.480 unit	500 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 unit
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk berakses air bersih	60,80%	70,60%	108.554,59	80,40%	58.230,04	90,20%	67.850,95	100%	70.871,36	100%	71.090,86	100%	72.596,67	100%	449.164,47
		n/a	1,85%	15.000,00	25,00%	50.000,00	48,15%	50.000,00	71,30%	50.000,00	100%	50.000,00	100%	50.000,00	100%	265.000,00
Program Lingkungan Sehat Pemertanian	Rumah Tangga Bersantitas	73%	74%	15.000,00	76%	15.000,00	78%	15.000,00	80%	17.500,00	80%	20.000,00	80%	22.500,00	80%	105.000,00
		65%	68%	80.000,00	70%	22.500,00	73%	25.000,00	75%	30.000,00	78%	35.000,00	80%	40.000,00	80%	232.500,00
		172,67 Ha	0	-	65%	20.000,00	32%	30.000,00	0%	31.000,00	0%	32.500,00	0%	35.000,00	0%	148.500,00

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIMISATA

URUSAN WAIB KEBUDAYAAN

Program Pelayanan Administrasi Pektoran	Cakupan layanan administrasi pektoran	100%	100%	3.572,73	100%	2.400,00	100%	2.580,81	100%	2.766,31	100%	2.966,52	100%	3.178,68	100%	17.465,05
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparat	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	-	100,00	-	107,53	-	115,26	-	123,60	-	132,44	-	132,44	578,85
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparat	100%	100%	594,17	250,00	100%	288,53	100%	288,16	100%	309,01	100%	331,11	100%	331,11	2.041,29
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kepatuhan waku pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	834,04	150,00	100%	161,30	100%	172,89	100%	185,41	100%	198,67	100%	198,67	1.702,91
Program Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata	1,5%	2%	4.105,00	3,0%	11.832,61	4%	17.269,47	5,0%	11.946,38	6,5%	8.690,30	7,0%	15.046,15	7%	68.889,90
		n/a	25	-	30	-	50	-	50	-	80	-	85	-	100	-
		n/a	20	-	30	-	30	-	50	-	50	-	80	-	80	-
		5 Objek wisata	16	-	20	-	21	-	25	-	26	-	28	-	28	-

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL		2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
		2015		KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Pengembangan Pemukiman Petani	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	1.367.542 orang	17%	11.795.52	9.877,78	19%	5.892.64	21%	5.892.64	23%	11.973.19	25%	16.417.12	27%	6.376.12	27%	62.332.36
Program Pengembangan Kerajinan	Pertumbuhan usaha ekonomi kreatif	n/a	0	-	-	1%	-	2%	-	3%	-	4%	-	5%	-	5%	-
Program Pengembangan Kerajinan	Jumlah mitra kelompok	6 kelompok	11 kelompok	1.250.00	1.118.08	12 kelompok	739.65	12 kelompok	1.764.41	12 kelompok	2.502.38	12 kelompok	8.229.55	12 kelompok	15.604.07	-	-
Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan pembinaan seni budaya	0	100%	1.600.00	1.674.38	100%	1.509.78	100%	1.600.41	100%	1.656.44	100%	1.932.90	100%	9.973.51	-	-
Program Pengembangan Kebudayaan Budaya	Cakupan Kajian Seni Budaya	100%	37%	-	-	51%	-	61%	-	72%	-	83%	-	93%	-	93%	-
Program Pengembangan Kebudayaan Budaya	Cakupan misi kesenian	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	6	-
Program Pengembangan Kebudayaan Budaya	Cakupan fasilitasi seni budaya	100%	62%	25.210.00	3.052.38	74%	3.609.57	78%	4.076.40	87%	4.259.25	91%	5.004.80	100%	45.212.69	-	-
Program Pengembangan Kebudayaan Budaya	Cakupan Gelar Seni budaya	0	0	-	632.07	1	679.25	0	788.70	0	-	0	-	0	-	0	-
Program Pengembangan Kebudayaan Budaya	Jumlah Grup Kesenian	83	83	-	-	90	-	95	-	98	-	100	-	105	-	571	-
Program Pengembangan Kebudayaan Budaya	Jumlah benda, situs, cagar budaya, yang dikelola	39 cagar budaya	39 cagar budaya	770.00	1.163.01	41 cagar budaya	1.315.27	53 Cagar Budaya	1.156.77	60 Cagar Budaya	1.454.31	72 Cagar Budaya	909.60	72	6.768.95	-	-
	Jumlah museum yang dikelola	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	-	-

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program Pelayanan Administrasi Perikanan	Cakupan layanan administrasi perikanan	12 Bulan	12 Bulan	4.340.05	3.400.00	12 Bulan	3.656.15	12 Bulan	3.918.93	12 Bulan	4.202.57	12 Bulan	4.503.13	12 Bulan	24.020.83	-	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	90% (207 Orang)	92% (212 Aparatur)	681.60	-	95% (219 Aparatur)	-	96% (221 Aparatur)	-	98% (225 Aparatur)	-	99% (228 Aparatur)	-	100% (228 Aparatur)	-	100% (228 Aparatur)	681.60
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyemase Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan mengisi Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya	80% (184 Aparatur)	82% (189 Aparatur)	-	100.00	85% (196 Aparatur)	100.00	87% (200 Aparatur)	101.53	90% (207 Aparatur)	115.26	92% (212 Aparatur)	123.60	95% (219 Aparatur)	132.44	95% (219 Aparatur)	578.85
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 Aparatur	120 Aparatur	2.233.90	800.00	140 Aparatur	860.27	160 Aparatur	922.10	200 Aparatur	988.84	220 Aparatur	1.059.56	220 Aparatur	6.864.67	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kecapaian waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	28 Dokumen	6 Dokumen	1.434.67	150.00	7 Dokumen	161.30	7 Dokumen	172.89	7 Dokumen	185.41	7 Dokumen	198.67	35 Dokumen	2.302.94	-	-
Program Peningkatan Kemitraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Cakupan nelayan kecil yang Mendapat Bantuan Modal Usaha	551 Nelayan Miskin	0	-	3.000.00	100 Nelayan Miskin	3.000.00	100 Nelayan Miskin	3.000.00	100 Nelayan Miskin	3.000.00	100 Nelayan Miskin	3.000.00	100 Nelayan Miskin	3.000.00	500 Nelayan Miskin	15.000.00
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Cakupan Pembudaya kecil yang Mendapat Bantuan Modal Usaha	62 Pembudaya Miskin	0	-	2.000.00	100 Pembudaya Miskin	2.172.00	100 Pembudaya Miskin	2.000.00	100 Pembudaya Miskin	2.000.00	100 Pembudaya Miskin	2.000.00	100 Pembudaya Miskin	2.000.00	500 Pembudaya Miskin	10.172.00
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap :	1.4%	4.05%	63.778.60	27.670.00	5%	16.500.00	5%	25.500.00	6%	30.453.82	6.17%	39.500.00	30%	538.899.100	30%	203.402.42
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Per. Umum	0.9%	1%	-	-	1%	-	1%	-	1%	-	1%	-	1%	-	6.7%	-
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Perairan Laut	1.8%	3%	(33.159.8 Ton)	-	3%	(36.224 Ton)	3%	(37.321 Ton)	3%	(38.440 Ton)	3%	(39.594 Ton)	18.4%	(299.173 Ton)	18.4%	-
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Cakupan Tempat Pelelangan Ikan	2 Unit TPI	1 Unit TPI	-	-	1 Unit TPI	-	1 Unit TPI	-	1 Unit TPI	-	0	-	0	-	5 Unit TPI	-
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rasio ketersediaan Armada Modern	1.1%	0.0%	(0 Unit Kapal)	-	1%	(15 Unit Kapal)	1%	(15 Unit Kapal)	1%	(15 Unit Kapal)	1%	(15 Unit Kapal)	1%	(15 Unit Kapal)	7%	-
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya :	7.3% (75.290.4 Ton)	10% (82.818 Ton)	33.243.93	28.775.00	11%	18.500.00	14%	45.500.00	15%	28.453.82	16%	26.340.00	16%	(697.818 Ton)	16%	180.812.75
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya Keramba (Ton/Tahun)	5.1%	11%	(40.583.1 Ton)	-	13%	(51.267 Ton)	15%	(55.908 Ton)	15%	(57.593 Ton)	15%	(58.720 Ton)	15%	(59.881 Ton)	15%	-
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya Tambak (Ton/Tahun)	3.8%	6%	(32.536.2 Ton)	-	6%	(36.816 Ton)	9%	(40.274 Ton)	9%	(43.762 Ton)	9%	(47.545 Ton)	9%	(51.587 Ton)	28%	(254.252 Ton)
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya Kolam (Ton/Tahun)	10%	20%	(61.18 Ton)	-	20%	(68.84 Ton)	20%	(73.7 Ton)	20%	(80.1 Ton)	20%	(87.2 Ton)	20%	(94.3 Ton)	149%	(6.097 Ton)
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya Kolam Terpal (Ton/Tahun)	20%	25%	(428 Ton)	-	25%	(586 Ton)	25%	(732 Ton)	25%	(916 Ton)	25%	(1.144 Ton)	25%	(1.427 Ton)	16.7%	-

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Pengembangan Ikan Spesifik Lokal	Perumbuhan Produk Perikanan Budidaya Laut (Ton/Tahun)	25% (1.159,3 Ton)	52% (1.758 Ton)	-	57% (2.752 Ton)	-	58% (4.348 Ton)	-	58% (6.852 Ton)	-	58% (10.823 Ton)	-	57% (17.021 Ton)	-	385% (43.554 Ton)	-
	Perumbuhan Produk Benih (Ekor/Tahun)	5,2% (289.698.539 Ekor Benih)	10% (318.668.393 Ekor)	-	10% (350.535.232 Ekor Benih)	-	10% (385.588.755 Ekor Benih)	-	10% (424.147.631 Ekor Benih)	-	10% (466.562.239 Ekor Benih)	-	10% (513.218.633 Ekor Benih)	-	61% (2.458.720 Ekor Benih)	-
	Perumbuhan Produk Budidaya Ikan Spesifik Lokal	20% (500 KG)	50% (300.000 KG)	-	50% (1.500.000 KG)	-	100% (3.000 KG)	-	100% (1.500.000 KG)	-	100% (12.000 KG)	-	100% (24.000 KG)	-	4.700% (8.800 KG)	-
	Cakupan Jenis Komoditas Ikan Lokal dibudidayakan (Ikan Jelawat, Buri, Beluk, Bang, dan Uluang Galah)	0	1 Jenis komoditi	-	1 Jenis komoditi	-	1 Jenis komoditi	-	1 Jenis komoditi	-	1 Jenis komoditi	-	1 Jenis komoditi	-	5Jenis komoditi	-
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemastian Produk Perikanan	1,5% (6.496 Ton)	3% (6.590 Ton)	3.131,50	3% (6.892 Ton)	4.950,00	3% (7.098 Ton)	3.500,00	3% (7.311 Ton)	3.500,00	3% (7.531 Ton)	3.500,00	3% (7.757 Ton)	6.000,00	18% (43.279 Ton)	24.581,50
	Hasil Perikanan	-	-	-	-	-	4% (Rp. 362.934.644.800)	-	4% (Rp. 377.452.030.592)	-	4% (Rp. 382.550.111.816)	-	4% (Rp. 408.252.116.288)	-	4% (Rp. 441.565.488.977)	-
	Perumbuhan Nilai Produk Kelautan dan Perikanan	348.975.620.000	-	-	377.452.030.592	-	382.550.111.816	-	392.550.111.816	-	424.582.200.940	-	441.565.488.977	-	2.407.336.593.413	-
	Persentase Penurunan Disparitas Harga Tingkat Produsen dan Konsumen	100% (Rp.15.000/Kg)	95% (Rp. 14.250)	-	93% (Rp.14.000/Kg)	-	87% (Rp.13.000/Kg)	-	73% (Rp.11.000/Kg)	-	60% (Rp.9.000/Kg)	-	47% (Rp.7.000/Kg)	-	455% (Rp. 6.8250/Kg)	-
	Persentase UPI yang Memenuhi Persyaratan dan Keamanan Pangan	32% (48 UPI)	2% (3 UPI)	-	3% (5 UPI)	-	7% (10 UPI)	-	10% (15 UPI)	-	13% (20 UPI)	-	17% (25 UPI)	-	82% (84 UPI)	-
	Cakupan Kemalkan Tingkatkan Kelas POKLAHSAR	0	1	-	1	-	1	-	2	-	2	-	3	-	9	-
Program Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase kelompok Masyarakat Kelautan Perikanan yang Terbiasa	20% (100 kelompok)	0	-	10% (50 kelompok)	870,00	10% (50 kelompok)	1.070,00	10% (50 kelompok)	1.070,00	10% (50 kelompok)	1.070,00	10% (50 kelompok)	1.570,00	70% (350 kelompok)	5.650,00
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Cakupan Kelompok Terbiasa Olah UPTD	34 Kelompok	85 Kelompok	1.320,00	0	1.275,00	0	1.275,00	0	1.275,00	0	1.275,00	0	1.275,00	85 Kelompok	7.695,00
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Cakupan Penurunan Kasus legal Fishing	80 Kasus	75 Kasus	700,00	50 Kasus	625,00	40 Kasus	625,00	30 Kasus	625,00	20 Kasus	625,00	10 Kasus	1.000,00	10 Kasus	4.200,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Persentase kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif dalam Pengawasan SDKP	40% (20 POKMASWAS)	6% (3 POKMASWAS)	675,00	10% (1.000,00)	5 POKMASWAS)	10% (1.000,00)	10% (5 POKMASWAS)	10% (1.000,00)	10% (5 POKMASWAS)	10% (1.000,00)	10% (5 POKMASWAS)	10% (1.000,00)	10% (5 POKMASWAS)	90% (45 POKMASWAS)	6.175,00
Program Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Konservasi	Cakupan Kawasan Konservasi yang dikelola Secara Berkelanjutan	3 Kawasan	0	-	1 Kawasan	-	1 Kawasan	1.975,00	1 Kawasan	2.000,00	1 Kawasan	2.000,00	1 Kawasan	2.500,00	8 Kawasan	10.250,00
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Cakupan Kemahiran (kelompok Masyarakat) yang Mendukung Pengelolaan Efektif Kawasan Konservasi.	0	2 Kelompok	850,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 Kelompok	850,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL																
URUSAN WAJIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
Program Pelayanan Administrasi per Kantoran	Cakupan layanan administrasi per Kantoran	100%	100%	3.617,93	100%	1.600,00	100%	1.720,54	100%	1.844,20	100%	1.977,68	100%	2.119,12	100%	12.879,47
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	-	-	90 Pasang	-	90 Pasang	-	90 Pasang	-	90 Pasang	-	90 Pasang	-	543 Pasang/Steil	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	386,77	100%	100,00	100%	107,53	100%	115,26	100%	123,60	100%	132,44	100%	965,61
Program Peningkatan Sarana dan Peralatan Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.061,21	100%	500,00	100%	537,67	100%	576,31	100%	618,02	100%	662,22	100%	3.955,44
Program Peningkatan Sistem Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	634,00	100%	150,00	100%	161,30	100%	172,69	100%	185,41	100%	198,67	100%	1.602,27
Program Keterampilan Keahlian Kependudukan	Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	-	-	100%	1.000,00	100%	1.075,34	100%	1.152,63	100%	1.236,05	100%	1.324,45	100%	5.786,46
Program Peningkatan Administrasi Kependudukan	Rasio Penduduk ber KTP elektronik per satu penduduk	71%	81%	2.025,34	91%	2.000,00	94%	2.150,68	96%	2.305,25	98%	2.472,10	100%	2.648,90	100%	13.602,27
Program Peningkatan Administrasi Kependudukan	Rasio Pasangan Non Muslim berakta Nikah	63%	68%	216,88	73%	200,00	78%	215,07	83%	230,53	88%	247,21	92%	264,89	88%	1.374,57

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
DINAS KESEHATAN	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	0,26%	-	-	25%	200,00	50%	215,07	75%	230,53	80%	247,21	100%	264,89	100%	1.157,69
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	89%	91%	1.375,57	93%	1.350,00	95%	1.451,71	97%	1.556,05	98%	1.668,67	100%	1.788,01	100%	9.190,00
	Cakupan RT memiliki lapdap	N/A	-	-	1.127 RT	15.000,00	1.931 RT	16.130,08	-	17.289,41	-	18.540,75	-	19.866,73	-	86.826,97
	Cakupan RT yang mempunyai Aplikasi Teknis Keperawatan	N/A	-	-	1.127 RT	1.000,00	1.931 RT	1.075,34	-	1.152,63	-	1.236,05	-	1.324,45	-	5.788,46
	Cakupan Pelayanan Administrasi Keperawatan di tingkat RT berbasis SI/AK	N/A	-	-	1.127 RT	676,20	1.931 RT	727,14	-	779,41	-	836,82	-	895,59	-	3.914,16
	Cakupan Layanan Informasi Administrasi Keperawatan	100%	100%	1.998,70	-	1.800,00	-	1.935,61	-	2.074,73	-	2.224,89	-	2.384,01	-	12.417,94

URUSAN WAJIB KESEHATAN																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	41.164,40	100%	38.300,00	100%	41.410,09	100%	44.749,31	100%	47.527,79	100%	50.839,67	100%	283.991,26
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	513,00	100%	500,00	100%	537,67	100%	576,31	100%	618,02	100%	662,22	100%	3.407,23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35%	45%	3.726,19	55%	500,00	65%	537,67	75%	576,31	85%	618,02	100%	662,22	100%	6.620,42
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	70%	35.406,26	70%	9.000,00	75%	9.678,05	80%	10.373,65	85%	11.124,45	90%	11.920,04	90%	87.502,45
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	1.373,97	100%	150,00	100%	161,30	100%	172,89	100%	186,41	100%	198,67	100%	2.242,24
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	-	> 80	45.280,36	> 80	34.280,19	> 80	35.064,79	> 80	43.074,40	> 80	55.721,39	> 80	60.615,72	> 90	274.046,85
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase perawatan gizi balita	100%	100%	11.250,00	100%	11.250,00	100%	11.250,00	100%	12.450,00	100%	15.300,00	100%	18.700,00	100%	80.200,00
Program Pengendalian Penyakit dan Surveilans	Persentase desakelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan < 24 jam	100%	100%	500,00	100%	500,00	100%	500,00	100%	1.197,20	100%	1.597,20	100%	1.716,92	100%	6.011,32
Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan jaringannya yang terakreditasi	0%	15.625	114.345,76	41	103.352,78	68	103.252,66	92	112.441,70	95	106.023,45	100	106.568,35	100	645.979,70
Program pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit panti-ruah sakit jiwa/rumah sakit panti-ruah sakit mata	RSUD baru yang dibangun	3	0	3.500,00	1	45.537,74	1	66.000,00	40.652,64	22.907,87	26.152,50	5	204.750,75			
Program obat dan perbekalan Kesehatan	Persentase penggunaan obat dan perbekalan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	100%	100%	9.620,00	100%	9.277,00	100%	9.277,00	100%	14.277,00	100%	25.572,00	100%	25.626,60	100%	93.649,60
Program Kemirraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jaminan Kesehatan Penduduk Kategori Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	100%	100%	17.375,67	100%	69.000,00	100%	71.070,00	100%	73.202,10	100%	75.398,16	100%	76.660,11	100%	382.706,04
Program Pengawasan Obat dan makanan	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang melakukan pengawasan obat	100%	100%	250,00	100%	250,00	100%	250,00	100%	250,00	100%	650,00	100%	650,00	100%	2.300,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Siaga Aktif (Desa Sehat Mandiri)	65%	68,00%	2.223,25	71%	2.223,25	74%	2.223,25	77%	2.223,25	80%	3.671,30	80%	3.771,30	80%	16.335,59
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase desakelurahan yang melakukan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	9,70%	21,50%	3.140,00	40%	3.140,00	53%	3.140,00	62%	3.140,00	71%	5.714,98	80%	5.714,98	> 80	23.989,95
	Persentase tatanan kawasan sehat	0%	33,30%	-	50%	-	67%	-	88%	-	100%	-	100%	-	100%	-

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase perempuan kasus penyakit menular (parameter yang diukur adalah penderita baru TB Paru BTA (+)	52%	56%	1.100.00	58%	1.100.00	60%	1.100.00	62%	1.100.00	65%	1.500.00	65%	1.765.27	65%	7.665.27
	Persentase desakeutanan Universal Child Immunization (UCI)	74%	75%	-	80%	-	85%	-	90%	-	95%	-	95%	-	95%	-
Program pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FK-TP) yang melaksanakan pelayanan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	74%	75%	200.00	80%	200.00	85%	200.00	90%	200.00	95%	500.00	95%	599.00	95%	1.899.00
	Persentase Cakupan Penanganan KLB	100%	0%	700.00	100%	700.00	100%	700.00	100%	700.00	100%	1.000.00	100%	1.550.00	100%	5.350.00
Program Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan BerencanaWabah	Persentase Kunjungan Ibu Hamil (K4)	85%	87%	7.439.40	89%	5.804.15	91%	5.200.60	93%	4.388.00	95%	4.295.00	97%	5.549.50	97%	32.676.65
	Persentase pelayanan Ibu Nifas	87%	88%	-	90%	-	92%	-	93%	-	95%	-	95%	-	95%	-
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	Persentase pelayanan bayi	80%	82%	-	84%	-	86%	-	88%	-	90%	-	90%	-	90%	-
	Persentase Peserta KB Aktif	56%	59%	-	62%	-	64%	-	67%	-	70%	-	70%	-	70%	-
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase Stimulasi, Deplesi dan intervensi Dini Turbuh Kembang Anak (SDOTK)	0%	53.4%	1.289.22	62.8%	844.00	77.2%	844.00	81.6%	830.00	90%	1.223.00	90%	1.022.80	90%	6.153.02
	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FK-TP) dan jalmgannya yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	30%	30%	-	40%	400.00	55%	400.00	60%	590.00	70%	650.00	80%	750.00	80%	2.790.00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Cakupan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FK-TP) yang melaksanakan pelayanan yang terstandarisasi	100%	100%	3.037.96	100%	2.771.27	100%	2.771.27	100%	2.771.27	100%	3.784.31	100%	3.984.31	100%	19.120.29
	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FK-TP) dan UPTD yang menerapkan sistem manajemen mutu	44%	53%	1.864.76	65%	1.864.76	77%	1.864.76	89%	1.864.76	100%	2.150.00	100%	2.655.00	100%	12.264.02
Program Kelangkaan dan Manajemen Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FK-TP) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLU)	0%	63%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
	Persentase pemberian unjangan penghasilan tenaga kesehatan di daerah terpencil dan pedalaman	0%	0%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
RSUD ABADI SAMBOJA																
URUSAN WAJIB KESEHATAN																
Program Pelayanan Administrasi	Cekupan layanan administrasi kesehatan	100%	100%	21.956.50	100%	18.300.00	100%	19.903.32	100%	21.696.77	100%	22.806.79	100%	24.350.69	100%	129.014.07
	Cekupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60%	65%	1.705.00	70%	500.00	75%	537.67	80%	576.31	90%	618.02	100%	662.22	100%	4.599.23
Program Peningkatan Sarana dan Fasilitas Aparatur	Cekupan peningkatan sarana dan prasarana alat	100%	100%	1.835.00	100%	1.000.00	100%	1.075.34	100%	1.152.63	100%	1.236.05	100%	1.324.45	100%	7.623.46
	Tingkat kecapaian waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	536.00	100%	150.00	100%	161.30	100%	172.89	100%	186.41	100%	196.67	100%	1.404.27
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakti Umum Daerah yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Rumah Sakti (KARS)	100%	100%	1.086.00	100%	1.370.00	100%	1.370.00	100%	640.00	100%	940.00	100%	940.00	100%	6.346.00
	Tingkat kepatuhan terhadap SOP	60	65	150.00	70	200.00	75	200.00	80	200.00	90	200.00	100	-	100	950.00

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakti Umum Daerah yang melaksanakan Sistem Manajemen Mutu (ISO : 9000 : 2008)	100	100	100.00	100	100.00	100	100.00	100	100.00	100	100.00	100	100.00	100	600.00
	Tingkat kepuasan Pasien	40%	50%	1.230.00	60%	1.230.00	70%	1.230.00	80%	1.230.00	90%	3.200.00	100%	6.200.00	100%	14.320.00
Program Pengadaan, prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru- paru/ rumah sakit mata	Kecelakaan Mati Praktek (Patient Safety)	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	600.00
	Cakupan Penanganan Penyakit Rumah Sakit	90	100	100.00	100	50.00	100	50.00	100	50.00	100	50.00	100	50.00	100	350.00
Program pembinaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru- paru/ rumah sakit mata	Penyensean peralatan sesuai standar rumah sakit kelas C	60%	65%	40.000.00	75%	15.000.00	80%	15.000.00	90%	20.000.00	100%	15.000.00	3.7	15.000.00	3.7	120.000.00
	Program pembinaan sarana dan prasarana yang sesuai standar dan dipelihara	71.52	75%	1.480.00	77.5	740.00	80%	740.00	82.5	5.570.00	85%	1.600.00	87.5	1.600.00	87.5	11.730.00
Program Pencegahan dan Perangulangan Penyakit Menular	prosentasi sarana dan prasarana yang sesuai standar dan dipelihara	85	90	1.000.00	95	600.00	100	600.00	100	600.00	100	1.000.00	100	800.00	100	4.600.00
	Cakupan Pelayanan (Penemuan dan penanganan) HIV AIDS, TB Paru, dan Malaria	60%	65%	350.00	75%	250.00	85%	250.00	90%	50.00	95%	50.00	100%	50.00	100%	1.000.00
RSUD AMI. PARIKESIT	Penyensean kesihatan dan kematian akibat penyakit menular langsung	1.2	1	200.00	0.8	150.00	0.6	150.00	0.4	150.00	0.2	150.00	0	-	0	800.00
	prosentasi pencegahan dan penularan penyakit bersumber binatang	70	80	200.00	90	150.00	100	150.00	100	150.00	100	150.00	100	-	100	800.00
URUSAN WAJIB KESEHATAN																
Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	40%	45%	44.205.05	50%	39.300.00	55%	42.485.43	60%	45.901.94	70%	48.763.84	80%	52.164.11	80%	272.820.38
	Tingkat kepatuhan aparatur	50%	100%	-	100%	400.00	100%	430.14	100%	461.05	100%	494.42	100%	529.78	100%	2.315.39
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50%	75%	4.050.00	75%	500.00	80%	537.67	80%	576.31	85%	618.02	90%	662.22	90%	6.944.23
	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	80.00	100%	150.00	100%	161.30	100%	172.89	100%	185.41	100%	198.67	100%	948.27
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan unit yang telah menerapkan Standar Pelayanan	50	75	-	80	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
	Cakupan unit yang telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	≤ 8 Menit	≤ 8 Menit	-	≤ 8 Menit	-	≤ 8 Menit	-	≤ 8 Menit	-	≤ 8 Menit	-	≤ 8 Menit	-	≤ 8 Menit	-
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk setiap proses bisnis	10	80	-	80	-	90	-	95	-	100	-	100	-	100	-
	Cakupan Manajemen dan Penggunaan Obat (MPO) 80%	25	80	-	80	100.00	80	100.00	80	100.00	80	100.00	80	100.00	80	500.00
Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) 80%	Cakupan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)	25	80	-	80	100.00	80	100.00	80	100.00	80	100.00	80	100.00	80	500.00
	Cakupan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) 80%	25	80	-	80	200.00	80	200.00	80	200.00	80	200.00	80	200.00	80	1.000.00
Program Akses ke Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK) 80%	Cakupan Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI) 80%	25	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-
	Cakupan Akses ke Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK) 80%	25	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-
Program Asesmen Pasien (AP) 80%	Cakupan Asesmen Pasien (AP)	25	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-
	Cakupan Asesmen Pasien (AP) 80%	25	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Cakupan Pelayanan Pasien (PP) 80%	25	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-
	Cakupan Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB) 80%	25	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-
	Cakupan Hak Pasien dan Keluarga (HPK) 80%	25	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-
	Cakupan Pendidikan pasien dan Keluarga (PKK) 80%	25	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-
	Cakupan Pencapaian dan pengendalian infeksi (PPI) 80%	25	80	-	80	200.00	80	200.00	80	200.00	80	200.00	80	200.00	80	1.000.00
	Cakupan Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) 80%	25	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-
	Cakupan Sasaran Program MDGs 90%	25	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-
	Dokumen Rensra, RSB dan RBA/Renja yang SMART (Specific-Measurable-Achievable-Relevant-Timey), definitif dan terat waktu	-	Rensra, RSB dan RBA/Renja		RBA/Renja		RBA/Renja		RBA/Renja		RBA/Renja		RBA/Renja		Rensra, RSB dan RBA/Renja	
	Rasio Kas (Cash Ratio) sebesar 241% s/d 300%	180%	241% s/d 300%	-	241% s/d 300%	-	241% s/d 300%	-	241% s/d 300%	-	241% s/d 300%	-	241% s/d 300%	-	241% s/d 300%	-
	Rasio Lancar (Current Ratio) sebesar 481% s/d 600%	360%	481% s/d 600%	-	481% s/d 600%	-	481% s/d 600%	-	481% s/d 600%	-	481% s/d 600%	-	481% s/d 600%	-	481% s/d 600%	-
	Periode Pengalihan Piutang (Collection Period) kurang dari 30 hari	59 hari	< 30 hari	-	< 30 hari	-	< 30 hari	-	< 30 hari	-	< 30 hari	-	< 30 hari	-	< 30 hari	-
	Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) sebanyak 30 s/d 35 kali	15 kali	30 s/d 35 kali	-	30 s/d 35 kali	-	30 s/d 35 kali	-	30 s/d 35 kali	-	30 s/d 35 kali	-	30 s/d 35 kali	-	30 s/d 35 kali	-
	Imbalan Ekuitas (Return on Equity) sebesar ≥ 8%	3%	≥ 8%	-	≥ 8%	-	≥ 8%	-	≥ 8%	-	≥ 8%	-	≥ 8%	-	≥ 8%	-
	Rasio Subsidi Biaya Pasien sebesar 11% s/d 15%	0%	11% s/d 15%	-	11% s/d 15%	-	11% s/d 15%	-	11% s/d 15%	-	11% s/d 15%	-	11% s/d 15%	-	11% s/d 15%	-
	Omni laporan keuangan BLUD	WTP	WTP	70.00	WTP	80.00	WTP	90.00	WTP	100.00	WTP	110.00	WTP	120.00	WTP	570.00
Program Uraya Kesehatan Masyarakat	Kinerja BLUD Baik	A	AA	-	AAA	-	AAA	-	AAA	-	AAA	-	AAA	-	AAA	-
	Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPR	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
	Cakupan Pengabdian Aset	50%	75%	-	80%	-	85%	-	90%	-	95%	-	95%	-	95%	-
	Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset TurnOver) sebesar > 20%	10%	> 20%	-	> 20%	-	> 20%	-	> 20%	-	> 20%	-	> 20%	-	> 20%	-
	Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset) sebesar > 6%	2.5%	>6%	-	>6%	-	>6%	-	>6%	-	>6%	-	>6%	-	>6%	-
	Gedapan Akuntabilitas Baik	CUKUP BAIK	BAIK	-	BAIK	-	BAIK	-	BAIK	-	BAIK	-	BAIK	-	BAIK	-
	Cakupan uraian tugas yang telah dimutakhirkan	30	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
	Sinkronnya kebijakan antar unit	50%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
	Cakupan modul SIM-RS yang diimplementasi	40	50	60.00	80	80.00	90	90.00	90	95.00	100	100.00	100	50.00	100	475.00
	Rasio Pendapatan BLUD terhadap Biaya Operasional	35	35	-	40	-	45	-	50	-	>65	-	>65	-	>65	-
	Persentase Tingkat kemardindian Anggaran rumah sakit diluar biaya investasi dan belanja pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kesipaan menuju rumah sakit kelas B pendidikan	50	60	-	80	300.00	85	300.00	90	300.00	100	-	100	-	100	900.00
	Penanganan pengaduan/ke complaint > 70%	50	. 70	-	. 70	-	. 70	-	. 70	-	. 70	-	. 70	-	. 70	-
	Persentase Kepuasan Pasien	79	80	50.00	82	60.00	82	70.00	82	80.00	82	90.00	82	100.00	82	450.00
	Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat jalan sebesar ± 1.1	0	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	60

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Kesehatan	Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat darul sebesar ≥ 1,1	0	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	60	-
	Pertumbuhan hari perawatan rawat inap sebesar ≥ 1,1	0	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	60	-
	Pertumbuhan pemeriksaan radiologi sebesar ≥ 1,1	0	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	60	-
	Pertumbuhan pemeriksaan laboratorium sebesar ≥ 1,1	0	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	60	-
	Pertumbuhan operasi sebesar ≥ 1,1	0	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	60	-
	Pertumbuhan rehab medik sebesar ≥ 1,1	0	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	60	-
	Cakupan penanggulangan masalah kesehatan pada masyarakat tanpa jaminan kesehatan yang diterima	-	-	-	80%	-	85%	-	85%	-	85%	-	85%	-	85%	-
	Cakupan pelayanan dengan CDB	0%	0%	-	10%	-	10%	-	10%	-	10%	-	10%	-	10%	-
	Cakupan sarana pelayanan kesehatan yang diterima	-	3 FKTP	-	4 FKTP	-	5 FKTP	-	6 FKTP	-	7 FKTP	-	8 FKTP	-	8 FKTP	-
	Terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit	10	20	8.180.00	30	3.700.00	50	11.100.00	70	12.740.00	85	21.860.00	100	31.800.00	100	89.880.00
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata																
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit	80	80	1.150.00	100	700.00	100	700.00	100	7.050.00	100	10.300.00	100	15.600.00	100	35.500.00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan bayi baru lahir sehat yang mendapat ASI Eksklusif	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
	Angka Kematian Ibu di rumah sakit < 1%	<2%	<2%	-	<2%	-	<1%	-	<1%	-	<1%	-	<1%	-	<1%	-
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Karyawan RS risiko tinggi yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	100	100	220.00	100	300.00	100	300.00	100	300.00	100	500.00	100	580.00	100	2.200.00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Pelaksanaan General Check Up pada Pemangku Kepentingan (Bupati dan Wakil Bupati, Anggota DPRD dan Keluarga)	100%	100%	200.00	100%	350.00	100%	350.00	100%	350.00	100%	500.00	100%	600.00	100%	2.350.00
RSUD DAYAKU RAJA																
URUSAN WAJIB KESEHATAN																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	75%	80%	19.232.00	85%	18.300.00	95%	19.903.32	100%	21.696.77	100%	22.806.79	100%	24.350.69	100%	126.289.57
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur			-	100%	400.00	100%	430.14	100%	461.05	100%	494.42	100%	529.78	100%	2.315.39
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40	50	3.200.00	60	500.00	70	537.67	80	576.31	90	618.02	100	662.22	100%	6.094.23
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2.500.00	100%	1.000.00	100%	1.075.34	100%	1.152.63	100%	1.236.05	100%	1.324.45	100%	8.288.46
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	10.00	100%	150.00	100%	161.30	100%	172.89	100%	186.41	100%	198.67	100%	878.27
Program Standartasi Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS)	0	0	1.225.00	50%	1.500.00	60%	1.500.00	70%	1.500.00	80%	3.525.00	100%	4.525.00	100%	13.775.00
Program Usaha Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan Pasien	0%	0%	-	60%	620.00	70%	620.00	80%	1.500.00	90%	6.000.00	100%	8.200.00	100%	16.940.00
	Keluhan Masyarakat	-	-	-	70%	-	80%	-	90%	-	100%	-	100%	-	100%	-
	Pencapaian Keselamatan Pasien (Patient Safety)	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
	Cakupan Penanganan Pengaduan Rumah Sakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program pengabdian, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru- paru/ rumah sakit mata	Persentase peralatan sesuai standar rumah sakit kelas C	40%	50%	3.200.00	60%	1.500.00	70%	1.500.00	80%	4.400.00	90%	5.400.00	100%	5.400.00	100%	21.400.00
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru- paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang sesuai standar dan dipelihara	30%	50%	5.100.00	60%	1.500.00	80%	1.500.00	90%	4.400.00	100%	5.500.00	100%	5.500.00	100%	23.500.00
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	Presentasi pelayanan ibu	0	0	650.00	75%	350.00	80%	350.00	90%	650.00	100%	650.00	100%	650.00	100%	3.300.00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya logistik RS tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu	70%	80%	5.100.00	90%	5.100.00	100%	5.100.00	100%	6.650.00	100%	7.650.00	100%	-	100%	29.600.00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase karyawan RS yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Cakupan customer yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Pelayanan Medis dan Non Medis	Tersedianya pelayanan sesuai RS kelas C	50%	50%	1.500.00	80%	1.500.00	90%	1.500.00	100%	1.500.00	100%	1.500.00	100%	1.500.00	100%	9.000.00
SEKRETARIAT DAERAH																
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: SEKRETARIAT DAERAH																
Program Pemanipulan Reformasi Birokrasi	Memangkanya kepatuhan terhadap pengendalian keuangan negara	n.a	-	-	100%	250.00	100%	288.83	100%	288.16	100%	309.01	100%	331.11	100%	1.447.12
	Memangkanya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah	n.a	-	-	100%	250.00	100%	288.83	100%	288.16	100%	309.01	100%	331.11	100%	1.447.12
	Memangkanya Kualitas Pelayanan Publik	n.a	-	-	100%	250.00	100%	288.83	100%	288.16	100%	309.01	100%	331.11	100%	1.447.12
	Memurumnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah	n.a	-	-	100%	250.00	100%	288.83	100%	288.16	100%	309.01	100%	331.11	100%	1.447.12
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Bekas	n.a	-	-	100%	3.000.00	100%	3.226.02	100%	3.457.68	100%	3.708.15	100%	3.973.35	100%	17.265.39
	Persentase jumlah penyelesaian tata batas antar kabupaten, antar kecamatan dan antar Desa/kelurahan	100%	100%	2.000.00	100%	2.000.00	100%	2.190.68	100%	2.305.25	100%	2.472.10	100%	2.646.90	100%	13.576.93
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Regulasi Daerah yang disosialisasikan	100%	100%	9.522.69	100%	1.000.00	100%	1.075.34	100%	1.152.63	100%	1.236.05	100%	1.324.45	100%	15.311.16
	Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	4.003.99	100%	1.000.00	100%	1.075.34	100%	1.152.63	100%	1.236.05	100%	1.324.45	100%	9.792.45
	Persentase peraturan daerah yang disosialisasikan	-	-	-	100%	500.00	100%	537.67	100%	576.31	100%	618.02	100%	662.22	100%	2.894.23
	Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan	-	-	-	100%	500.00	100%	537.67	100%	576.31	100%	618.02	100%	662.22	100%	2.894.23
Program Mengintensikan Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Penyelesaian pengaduan pelayanan pemerintah	100%	100%	400.00	100%	400.00	100%	430.14	100%	461.05	100%	494.42	100%	529.78	100%	2.715.39
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga	100%	100%	500.00	100%	500.00	-	537.67	-	576.31	-	618.02	-	662.22	100%	3.394.23
	Persentase Jumlah Kerjasama Antar Daerah	100%	100%	753.83	100%	500.00	100%	537.67	100%	576.31	100%	618.02	100%	662.22	100%	3.648.06
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	100%	100%	-	100%	250.00	100%	288.83	100%	288.16	100%	309.01	100%	331.11	100%	1.447.12

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Keprotokolan Daerah	Cakupan Keprotokolan Daerah	100%	100%	3.164.63	100%	3.000.00	100%	3.226.02	100%	3.457.88	100%	3.708.15	100%	3.973.35	100%	20.530.03
Program Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	100%	-	-	100%	3.000.00	100%	3.226.02	100%	3.457.88	100%	3.708.15	100%	3.973.35	100%	17.565.39
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Tingkat Layanan Masyarakat	100%	100%	40.228.62	100%	39.000.00	100%	41.938.21	100%	44.952.46	100%	48.205.95	100%	51.653.50	100%	285.978.74
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	52.966.26	100%	17.000.00	100%	18.280.76	100%	19.594.66	100%	21.012.85	100%	22.515.63	100%	151.560.16
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	10.400.00	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	10.400.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	6.003.08	100%	500.00	100%	537.67	100%	576.31	100%	618.02	100%	662.22	100%	8.897.31
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	53.976.62	100%	5.000.00	100%	5.376.69	100%	5.763.14	100%	6.180.25	100%	6.622.24	100%	82.918.94
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	3.553.27	100%	1.000.00	100%	1.075.34	100%	1.152.63	100%	1.236.05	100%	1.324.45	100%	9.341.74
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Cakupan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	100%	100%	3.309.00	100%	552.62	100%	594.25	100%	636.96	100%	683.06	100%	731.91	100%	6.507.80
Program Penataan dan Pemurnaan Kelengkapan Sistem dan Prosedur Pengarsipan	Cakupan obyek kegiatan dan anggaran yang diawasi	100%	100%	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	75.00
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Cakupan Peningkatan Pelaksanaan kebijakan KDH	100%	100%	5.444.89	100%	9.404.25	100%	10.112.75	100%	10.839.59	100%	11.624.12	100%	12.455.44	100%	59.881.05
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketaepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	4.811.60	100%	500.00	100%	537.67	100%	576.31	100%	618.02	100%	662.22	100%	7.705.83
SEKRETARIAT DAERAH																
URUSAN WAIB PERSANDIAN																
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tingkat Capaian kinerja otomoni daerah, pemerintahan umum, dan persandian	100%	100%	20.688.67	100%	500.00	100%	537.67	100%	576.31	100%	618.02	100%	662.22	100%	23.582.90
SEKRETARIAT DAERAH																
URUSAN WAIB PERTANAHAN																
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	Program terbit administrasi pengusahaan tanah	100%	100%	1.750.00	100%	1.000.00	100%	1.075.34	100%	1.152.63	100%	1.236.05	100%	1.324.45	100%	7.538.46
Program Penataan Pengurusan, Pengiklan, Pengukuran dan Pemanfaatan Tanah	Program Penataan Pengurusan, Pengiklan, Pengukuran dan Pemanfaatan Tanah	100%	100%	6.515.47	100%	1.000.00	100%	1.075.34	100%	1.152.63	100%	1.236.05	100%	1.324.45	100%	12.303.93
Program Penyelesaian Konflik Perdataan	Persentase Penyelesaian kasus perdataan	100%	100%	200.00	100%	200.00	100%	215.07	100%	230.53	100%	247.21	100%	264.89	100%	1.357.69
SEKRETARIAT DP KORPRI																
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: SEKRETARIAT DP KORPRI																
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tingkat kesediaan obat dan perbekalan kesehatan	100%	100%	500.00	-	500.00	-	537.67	-	576.31	-	618.02	-	662.22	100%	3.394.23
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah event kompetisi	100%	100%	300.00	-	250.00	-	288.83	-	288.16	-	309.01	-	331.11	100%	1.747.12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.424.97	100%	750.00	100%	806.50	100%	864.47	100%	927.04	100%	993.34	100%	5.765.32
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	300.00	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	300.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	356.05	100%	25.00	100%	26.88	100%	28.82	100%	30.90	100%	33.11	100%	500.76
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.451.58	100%	175.00	100%	188.18	100%	201.71	100%	216.31	100%	231.78	100%	2.464.56
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Cakupan Peningkatan Sistem Pengawasan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	100%	100%	500.00	-	250.00	-	268.83	-	288.16	-	309.01	-	331.11	100%	1.947.12

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kecapaian waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	165.00	100%	100.00	100%	107.53	100%	115.26	100%	123.60	100%	132.44	100%	743.85
SEKRETARIAT DPRD																
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: SEKRETARIAT DPRD																
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Tingkat kinerja Pelayanan pada Alat Kelengkapan dan Anggota DPRD	100%	100%	41.622.50	100%	39.000.00	100%	41.938.21	100%	44.952.46	100%	48.205.95	100%	51.653.50	100%	267.572.63
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	13.281.34	100%	12.000.00	100%	12.904.07	100%	13.831.53	100%	14.832.60	100%	15.889.38	100%	82.742.91
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	661.27	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	661.27
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	-	100%	3.000.00	100%	3.226.02	100%	3.457.88	100%	3.708.15	100%	3.973.35	100%	17.365.39
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	14.557.92	100%	10.000.00	100%	10.753.39	100%	11.526.27	100%	12.380.50	100%	13.244.49	100%	72.442.57
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KPDH	Cakupan Peningkatan Sistem pengawasan pengendalian pelaksanaan kebijakan KPDH	100%	100%	3.698.00	100%	3.500.00	100%	3.763.69	100%	4.034.20	100%	4.326.17	100%	4.635.57	100%	23.957.63
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kecapaian waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	3.518.30	100%	1.500.00	100%	1.613.01	100%	1.728.94	100%	1.854.07	100%	1.986.67	100%	12.201.00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
URUSAN WAIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	7.559.82	100%	4.300.00	100%	4.623.96	100%	4.956.30	100%	5.315.01	100%	5.695.13	100%	32.450.22
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	140.00	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	140.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	-	100%	100.00	100%	107.53	100%	115.26	100%	123.60	100%	132.44	100%	578.85
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	5.716.96	100%	500.00	100%	537.67	100%	576.31	100%	618.02	100%	662.22	100%	8.611.09
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Tingkat kecapaian waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	351.34	100%	150.00	100%	161.30	100%	172.89	100%	185.41	100%	198.67	100%	1.219.61
Program Penyburluasan Informasi Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional	100%	100%	2.332.95	100%	2.332.95	100%	2.332.95	100%	2.332.95	100%	2.332.95	100%	5.114.61	100%	16.779.36
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan layanan E-Government	48%	48%	2.800.26	57%	3.755.56	68%	3.050.00	78%	6.044.00	89%	4.050.00	100%	3.250.00	100%	22.949.81
	Cakupan wilayah yang terlayani Jaringan Telekomunikasi Sekolah	31%	31%	816.81	39%	950.00	46%	1.100.00	53%	1.200.00	62%	1.250.00	69%	1.350.00	100%	6.666.81
	Cakupan Layanan Internet/Ke Sekolah-sekolah	35%	35%	6.550.00	48%	8.300.00	61%	7.158.83	74%	6.260.00	87%	9.823.54	100%	6.510.00	100%	44.608.37
	Tingkat Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang Dan Jasa	n.a	100%	429.68	100%	850.00	100%	600.00	100%	600.00	100%	600.00	100%	600.00	100%	3.679.68
	Rasio Waret / Wamet terhadap Penduduk	0.02%	-	-	0.02%	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	300.00
	Cakupan Layanan Pos dan Telekomunikasi	7%	7%	178.00	48%	1.100.00	61%	350.00	74%	350.00	87%	350.00	100%	350.00	100%	2.678.00
	Cakupan Layanan internet di Kecamatan/Desa/keurahan	31%	31%	1.189.46	50%	1.950.00	65%	2.300.00	80%	2.100.00	90%	2.500.00	100%	2.250.00	100%	12.289.46
Program Fasilitas Peningkatan SDA Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah Aplikasi Teknologi Informasi Layanan SKPD	46%	46%	135.22	57%	800.00	68%	800.00	78%	800.00	89%	800.00	100%	800.00	100%	4.135.22
Program Penguatan Kelembagaan Komunikasi	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KMI	65%	65%	130.47	72%	600.00	79%	600.00	86%	600.00	93%	600.00	100%	600.00	100%	3.130.47
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA																
URUSAN WAIB PEMUDA DAN OLAHRAGA																

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	9.183.28	100%	5.800.00	100%	6.236.96	100%	6.685.24	100%	7.169.09	100%	7.681.80	100%	42.756.38
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	725.00	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	725.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	2.015.00	100%	100.00	100%	107.53	100%	115.26	100%	123.60	100%	132.44	100%	2.593.85
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	3.970.38	100	500.00	100	537.67	100	576.31	100	618.02	100	662.22	100	6.866.22
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kecapaian waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	1.472.34	100%	150.00	100%	161.30	100%	172.89	100%	186.41	100%	198.67	100%	2.341.20
Program Peningkatan Peran Serta Keperumudaan	Cakupan Bina Keperumudaan	14.69%	16%	7.280.00	18.7%	2.800.00	20%	2.800.00	24%	2.800.00	26%	2.800.00	28%	2.800.00	28%	21.280.00
Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keperumudaan	Cakupan Organisasi Keperumudaan Aktif	n.a	n.a	-	100%	1.300.00	100%	1.000.00	100%	1.000.00	100%	1.000.00	100%	1.000.00	100%	5.300.00
Program Peningkatan Upraya Penumbuhan kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Facilitas Penumbuhan Wirausaha Pemuda mandiri	1.200	150	5.250.00	1.00%	1.200.00	1.00%	900.00	1.00%	900.00	1.00%	2.550.00	1.00%	1.399.00	5.150	12.199.00
	Facilitas Pengembangan Wirausaha Pemuda menjadi usaha yang mandiri	n.a	-	-	5	-	25	-	25	-	25	-	25	-	105	-
Program Upraya Pencapaian Pengetahuan Narkotika	Facilitas Pemuda Dalam Pembangunan Karakter dan Peningkatan Kualitas Jasmani	0.91	3%	350.00	4%	200.00	8%	200.00	12%	200.00	16%	200.00	18%	200.00	18%	1.350.00
Program Pembinaan dan Pemasalahan Olah Raga	Cakupan Bina atlet lokal	17.51	20	26.675.00	30	8.950.00	35	8.950.00	40	8.950.00	45	10.000.00	50	10.000.00	50	73.525.00
	Atlet Pelajar Yang Di Bina	300	40	-	56	-	70	-	80	-	120	-	150	-	436	-
	Atlet Olahraga Tradisional yang berprestasi	20	30	-	35	-	45	-	50	-	50	-	55	-	215	-
Program Pengembangan Keahlian dan Manajemen Olah Raga	Persentase penduduk yang melakukan kegiatan olahraga bersertifikasi	74.76	75.21	-	77	-	78.43	-	80	-	81.5	-	82	-	82	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	94.37	-	18.275.00	95.49	1.669.01	96.62	3.671.22	97.74	5.190.49	98.8	2.225.58	100	4.150.49	100	35.181.79
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keperumudaan	Kecamatan yang memiliki Sarana dan prasarana Keperumudaan	1	-	2.875.00	3	100.00	3	100.00	3	300.00	4	350.00	4	550.00	17	4.275.00
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase Sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	100	100	7.075.00	100	6.000.00	100	6.000.00	100	6.000.00	100	7.000.00	100	8.000.00	100	40.075.00
DINAS PENDAPATAN DAERAH																
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	8.470.72	100%	3.200.00	100%	3.441.08	100%	3.888.41	100%	3.955.36	100%	4.288.24	100%	26.993.81
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	1.857.15	100%	300.00	100%	322.60	100%	345.79	100%	370.81	100%	397.33	100%	3.593.69
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	5.455.41	100%	500.00	100%	537.67	100%	576.31	100%	618.02	100%	662.22	100%	8.349.64
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kecapaian waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	2.614.16	100%	500.00	100%	537.67	100%	576.31	100%	618.02	100%	662.22	100%	5.508.39
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pertumbuhan PAD (pak, retribusi daerah, laba BUMD/Perusda, dan Lain-lain PAD yang sah)	-	5.49%	6.434.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.434.40
Program Peningkatan PAD	Pertumbuhan Kontribusi PAD	-	5.49%	-	6.65%	10.783.38	7.81%	11.761.71	8.97%	12.601.78	10.13%	13.513.10	11.29%	14.477.60	11.29%	63.137.57
	Pertumbuhan APBD	-	-30.44%	-	12.44%	-	10.00%	-	3.63%	-	5.26%	-	3.33%	-	3.33%	-
	Persentase Pertumbuhan Pajak Retribusi	-	34.18%	-	23.21%	-	10.00%	-	9.09%	-	8.33%	-	7.69%	-	7.69%	-
	Persentase Pertumbuhan Bagi Hasil	-	-33.31%	-	-5.17%	-	1.31%	-	1.29%	-	8.95%	-	5.35%	-	5.35%	-

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	KONDISI AKHIR 2021							
URUSAN WAJIB PENDIDIKAN																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	94.701.73	100%	89.000.00	100%	95.705.15	100%	102.583.83	100%	110.008.44	100%	117.875.94	100%	609.875.09
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	912.88	100%	500.00	100%	537.67	100%	576.31	100%	618.02	100%	662.22	100%	3.807.11
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.777.72	100%	500.00	100%	537.67	100%	576.31	100%	618.02	100%	662.22	100%	4.671.95
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	1.023.39	100%	150.00	100%	161.30	100%	172.89	100%	185.41	100%	198.67	100%	1.891.66
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	77.39	80	6.360.80	83	6.060.80	86	6.060.80	90	7.660.80	93	9.060.80	95	9.060.80	95	44.264.80
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			114.748.37		221.294.46		244.313.95		250.984.01		268.310.37		293.162.63		1.392.813.79
	APK SD/MI	100.06	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
	APK SMP/MTs	93	94	-	94.50	-	95	-	95.50	-	96	-	96.50	-	96.50	-
	APM SD/MI	99.65	99.66	-	99.67	-	99.68	-	99.69	-	99.70	-	99.71	-	99.71	-
	APM SMP/MTs	91.19	91.50	-	91.75	-	92	-	92.25	-	92.50	-	92.75	-	92.75	-
	Angka Putus Sekolah SD/MI	0.005	0.004	-	0.003	-	0.002	-	0.001	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0.011	0.010	-	0.09	-	0.08	-	0.07	-	0.06	-	0.05	-	0.05	-
	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	100.02	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
	Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI	1 : 202	1 : 221	-	1 : 240	-	1 : 259	-	1 : 278	-	1 : 297	-	1 : 320	-	1 : 320	-
	Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs	1 : 273	1 : 280	-	1 : 287	-	1 : 294	-	1 : 301	-	1 : 308	-	1 : 320	-	1 : 320	-
	Rasio guru/murid SD/MI	1 : 15	1 : 16	-	1 : 17	-	1 : 18	-	1 : 19	-	1 : 20	-	1 : 22	-	1 : 22	-
	Rasio guru/murid SMP/MTs	1 : 16	1 : 17	-	1 : 18	-	1 : 19	-	1 : 20	-	1 : 21	-	1 : 23	-	1 : 23	-
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	28.67	30	-	40	-	50	-	60	-	70	-	80	-	80	-
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	65	67	-	75	-	80	-	85	-	90	-	95	-	95	-
	Satu guru satu rumah	0	0	-	100 rumah	-	100 rumah	-	100 rumah	-	100 rumah	-	100 rumah	-	100 rumah	-
	Persentase sekolah yang memiliki komputer dan Peralatan Bantu mengajar Modern dan Layak	17%	17%	-	25%	-	30%	-	40%	-	50%	-	60%	-	60%	-
Program Pendidikan Menengah	Pendidikan Menengah			800.00		59.750.00		61.880.00		88.581.59		88.570.74		91.179.75		390.762.07
	APK SMA/MA/SMK	88.98	90.00	-	90.10	-	90.15	-	90.20	-	90.25	-	90.30	-	90.30	-
	APM SMA/MA/SMK	78.60	78.60	-	78.65	-	78.70	-	78.75	-	78.80	-	78.85	-	78.85	-
	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	0.14	0.13	-	0.12	-	0.11	-	0.10	-	0.09	-	0.08	-	0.08	-
	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs/SMA/MA/SMK	99.23	99.25	-	99.27	-	99.30	-	99.32	-	99.35	-	99.40	-	99.40	-
	Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK	1 : 266	1 : 282	-	1 : 298	-	1 : 314	-	1 : 330	-	1 : 346	-	1 : 362	-	1 : 362	-
	Rasio guru/murid SMA/MA/SMK	1 : 18	1 : 19	-	1 : 20	-	1 : 21	-	1 : 21	-	1 : 22	-	1 : 24	-	1 : 24	-
	Sekolah pendidikan SMA/MA/SMK kondisi bangunan baik	75%	78	-	86	-	87	-	88	-	89	-	92	-	92	-
Program Pendidikan Luar Biasa	Pendidikan Luar Biasa	25	30	1.050.00	35	10.769.21	40	10.769.21	45	1.050.00	50	1.050.00	55	1.050.00	55	25.738.41
Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan Non Formal dan Informal		100.00	-	1.185.00	-	1.585.00	-	1.685.00	-	1.885.00	-	1.875.00	-	8.315.00	-

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Melek Huruf	99,89	99,90	-	-	-	-	99,93	-	99,94	-	99,95	-	99,96	-	99,96
	Jumlah Desa Pinar dan Pemustakaan Kampung	0	1	-	-	3	-	3	-	3	-	4	-	4	-	18
	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan															
	Angka Lulusan SDMI	99,10	99,11	-	-	-	-	99,13	-	99,14	-	99,15	-	99,16	-	99,16
	Angka Lulusan SMP/MTs	99,98	99,99	-	-	-	-	99,99	-	99,99	-	99,99	-	99,99	-	99,99
	Angka Lulusan SMA/MA/SMK	99,54	99,55	-	-	-	-	99,56	-	99,56	-	99,56	-	99,56	-	99,60
	Rata-rata Nilai UN SDMI	66,17	66,22	-	-	-	-	66,26	-	66,26	-	66,30	-	66,35	-	66,35
	Rata-rata Nilai UN SMP/MTs	50,90	60,12	-	-	-	-	60,13	-	60,14	-	60,20	-	65	-	65
	Rata-rata Nilai UN SMA/MA/SMK	60,90	61	-	-	-	-	65	-	67	-	70	-	70	-	70
	Guru berkualifikasi SI / D 4	89	91	-	-	-	-	93	-	94	-	95	-	96	-	96
Program Manajemen Layanan Pendidikan	Guru bersertifikasi Pendidik	55	60	-	-	-	-	70	-	75	-	80	-	85	-	85
	Kepala Sekolah memiliki nomor unik kepala sekolah (NUKS)	62	65	-	-	70	-	75	-	80	-	85	-	90	-	90
	Guru penerima tambahan pengespasian pada sekolah terpencil	2,87	3,50	-	-	-	-	5	-	6	-	7	-	8	-	8
	Persentase sekolah di daerah miskin dan terpencil yang memiliki Guru berkualifikasi SI/D 4	2	3	-	-	-	-	4	-	5	-	6	-	7	-	8
	Persentase Anak bisa membaca Al-Quran	85	86	-	-	-	-	87	-	88	-	89	-	90	-	91
	Manajemen Layanan Pendidikan															
	Sekolah Terakreditasi	92	93	-	-	-	-	94	-	95	-	96	-	97	-	98
	Sistem informasi manajemen pendidikan terpadu (SIMPEDU)	7	9	-	-	-	-	11	-	13	-	15	-	17	-	18
	Persentase Siswa penerima beasiswa KUKAR CERDAS	10	11	-	-	-	-	12	-	13	-	14	-	15	-	16
	DINAS PERHUBUNGAN															
URUSAN WALIB PERHUBUNGAN																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	6.463,21	100%	5.000,00	100%	5.376,69	100%	5.763,14	100%	6.180,25	100%	6.622,24	100%	35.405,53
Program Peningkatan Displin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	400,00	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	400,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	67%	67%	-	74%	100,00	80%	107,53	87%	115,26	93%	123,60	100%	132,44	100%	578,85
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.500,00	100%	500,00	100%	537,67	100%	576,31	100%	618,02	100%	662,22	100%	4.394,23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	100%	150,00	100%	161,30	100%	172,89	100%	185,41	100%	198,67	100%	866,27
Program peningkatan pelayanan angkutan umum	Jumlah arus penumpang angkutan umum	994.892	995.407	1.350,00	995.807	9.350,00	996.657	2.625,00	997.057	3.000,00	998.017	3.175,00	999.157	3.350,00	999.157	22.850,00
Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ	Persentase Jumlah Terminal yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	0%	0%	-	50%	850,00	67%	-	83%	-	100%	850,00	100%	-	100%	1.700,00
	Persentase Jumlah Peleubuh/ Dermaga yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	33%	40%	-	53%	750,00	67%	-	87%	750,00	100%	750,00	100%	750,00	100%	3.000,00
	Persentase Jumlah Fasalain Darat yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	20%	23%	400,00	40%	450,00	60%	500,00	80%	550,00	100%	600,00	100%	650,00	100%	3.150,00
	Persentase Jumlah Rambu Laui/ Sungai yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	0%	0%	800,00	25%	900,00	50%	1.000,00	75%	1.100,00	100%	1.200,00	100%	1.300,00	100%	6.300,00
	Persentase Jumlah Alat Uji yang di Kalibrasi	100%	100%	-	100%	600,00	100%	250,00	100%	700,00	100%	250,00	100%	250,00	100%	2.050,00
	Program pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan	Jumlah Peleubuhan Laui/ Udara/ Terminal Bis	38	7	-	7	1.000,00	7	1.000,00	7	1.000,00	9	1.000,00	9	1.000,00	46

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program peningkatan dan pemeliharaan lalu lintas	Persentase Cakupan Sarana dan Prasarana Perhubungan antar Kecamatan (Pelabuhan/ Dermaga)	70%	81%	13.050.00	84%	15.000.00	88%	15.000.00	91%	15.000.00	98%	15.000.00	98%	15.000.00	98%	88.050.00
	Persentase Cakupan Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Perhubungan	100%	100%	-	100%	350.00	100%	625.00	100%	900.00	100%	975.00	100%	1.050.00	100%	3.900.00
	Kelengkapan rambu-rambu lalu lintas menuju obyek wisata (sesuai RPDA)	29%	29%	3.850.00	43%	12.650.00	56%	21.450.00	63%	30.250.00	69%	39.050.00	100%	47.650.00	100%	155.100.00
	Persentase Cakupan Kebersihan Rambu Lalu Rambu Sempal, Dauru dan Penyevelangan	53%	66%	2.090.00	74%	6.000.00	83%	11.000.00	92%	6.000.00	100%	6.000.00	100%	6.000.00	100%	37.090.00
Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase cakupan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	100%	91%	250.00	100%	5.400.00	100%	400.00	100%	400.00	100%	400.00	100%	400.00	100%	7.250.00
	Persentase kontribusi PAD sektor perhubungan	100%	100%	800.00	100%	800.00	100%	800.00	100%	800.00	100%	800.00	100%	800.00	100%	4.800.00
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI																
URUSAN WAJIB KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
Program Pelayanan Administrasi pe Kantoran	Cakupan layanan administrasi	100%	100%	8.816.36	100%	6.000.00	100%	6.452.03	100%	6.915.76	100%	7.415.30	100%	7.946.69	100%	43.547.15
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	241.00	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	241.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	207.40	100%	100.00	100%	107.53	100%	115.26	100%	123.60	100%	132.44	100%	786.25
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2.552.48	100%	400.00	100%	430.14	100%	461.05	100%	494.42	100%	529.78	100%	4.867.87
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kepatuhan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	578.40	100%	150.00	100%	161.30	100%	172.89	100%	185.41	100%	198.67	100%	1.446.67
Program Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil	Usaha Mikro dan Kecil	39.456	2.400	-	2.400	2.500.00	1.500	2.500.00	1.500	2.500.00	1.500	2.500.00	1.500	2.500.00	50.256	12.500.00
Mikro Masyarakat Miskin Produktif	Perumbuhan UMKM Wirausaha Baru	1.753	2.400	-	2.400	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	12.553	-
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Perumbuhan koperasi	603	621	1.343.33	640	2.874.17	659	3.033.91	679	3.757.77	699	4.055.18	720	4.351.38	720	19.415.74
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah koperasi aktif	488	503	519	536	552	569	587	597	587	587	587	587	587	53	-
	Jumlah koperasi berprestasi	18	23	-	28	-	33	-	38	-	43	-	48	-	53	-
	Cakupan Bina Koperasi	302	311	-	320	-	329	-	339	-	350	-	360	-	360	-
	Jumlah Mitra Koperasi	20	5	2.400.00	5	2.330.41	5	2.665.67	5	2.566.49	5	2.927.33	5	3.213.89	5	16.103.78
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Cakupan Bina UMKM dengan Bank	9.864	1.644	-	1.644	-	1.644	-	1.644	-	1.644	-	1.644	-	19.728	-
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Cakupan Lembaga Keuangan non LKM / LKM terbenruk	10	13	4.715.80	13	4.579.05	13	4.971.67	14	5.109.18	14	5.277.76	14	5.570.07	81	30.223.53
URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN	Jumlah LKM	-	3	-	3	-	3	-	4	-	4	-	4	-	21	-
	Perumbuhan UMKM Tani dan Nelayan	-	200	-	300	-	300	-	300	-	300	-	300	-	1.700	-
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI																
URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN																
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pasar yang dibangun di kecamatan, kabupaten dan desa	14	-	2.050.00	15	22.528.69	16	25.229.84	15	27.046.15	15	29.387.49	15	34.081.27	90	140.323.46
Program Peningkatan dan Pengembangan Esport	Persentase kontribusi PAD sektor perdagangan	301.000.000	391.300.000	-	508.690.000	-	661.297.000	-	859.686.100	-	1.117.591.930	-	1.452.869.509	-	5.292.434.539	-
	Cakupan jaringan pemasaran/kegiatan produk pertanian dalam arti luas	-	-	-	3 Daerah (Regional)	-	4 Daerah (Regional)	-	4 Daerah (Regional)	-	4 Daerah (Regional)	-	4 Daerah (Regional)	-	4 Daerah (Regional)	-
Program Peningkatan dan Pengembangan Esport	Esport bersih perdagangan	2.370.984.591	2.418.404.283	342.12	2.466.772.368	823.63	2.516.107.816	839.72	2.566.429.972	752.38	2.617.758.571	867.02	2.617.758.571	620.85	2.617.758.571	4.245.73
Program pembinaan pedagang kecil lima dan asongan	Cakupan dina kelompok pedagang/usaha informal	-	-	509.74	20%	436.04	20%	383.22	20%	611.67	20%	454.50	20%	325.45	100%	2.720.63

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Informasi harga, komoditas dan jenis produk	-	-	1.289,50	18 Kecamatan	2.301,32	18 Kecamatan	2.003,88	18 Kecamatan	2.078,95	18 Kecamatan	1.985,02	18 Kecamatan	-	18 Kecamatan	9.655,68
	Stabilitas harga jagung	-	-	-	-	-	18 Kecamatan	-	18 Kecamatan	-	18 Kecamatan	-	18 Kecamatan	-	18 Kecamatan	-
	Cakupan penyelesaian masalah	-	-	-	-	-	18 Kecamatan	-	18 Kecamatan	-	18 Kecamatan	-	18 Kecamatan	-	18 Kecamatan	-
	Cakupan penyelesaian masalah	-	-	-	-	-	18 Kecamatan	-	18 Kecamatan	-	18 Kecamatan	-	18 Kecamatan	-	18 Kecamatan	-
	pengaduan konsumen	-	-	-	-	-	18 Kecamatan	-	18 Kecamatan	-	18 Kecamatan	-	18 Kecamatan	-	18 Kecamatan	-
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI																
URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN																
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Persentase kontribusi PAD sektor perindustrian	3,71	4,12	-	4,57	2,362,90	5,08	3,037,10	5,63	3,809,64	6,25	3,592,64	6,94	4,276,75	6,94	17.081,03
	Rasio sentra IKM terhadap ODTW (1 ODTW : 1 Sentra IKM)	-	8 : 1	-	8 : 2	-	8,3	-	8,5	-	8,7	-	8,8	-	8,8	-
	Pertumbuhan IKM berbasis komoditas pertanian	5,163	5,372	-	5,629	-	5,908	-	6,232	-	6,594	-	6,594	-	6,594	-
	Pertumbuhan omzet IKM berbasis komoditas pertanian	137.558.000,000	146.187.000,000	-	156.011.000,000	-	167.934.000,000	-	181.551.000,000	-	197.123.000,000	-	197.123.000,000	-	197.123.000,000	-
	Pertumbuhan Industri Kecil Rumah Tangga berbasis komoditas pertanian	5,162	5,371	-	5,624	-	5,907	-	6,231	-	6,593	-	6,593	-	6,593	-
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan omzet Industri Kecil Rumah Tangga berbasis komoditas pertanian	121.423.000,000	129.872.000,000	-	139.876.000,000	-	151.799.000,000	-	165.416.000,000	-	180.988.000,000	-	180.988.000,000	-	180.988.000,000	-
	Jumlah Kemitraan IKM dengan Bank	5	14	1.628,41	10	5,458,77	14	6,306,04	17	7,414,07	20	8,240,42	20	9,158,13	100	38.205,84
	Jumlah unit usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM)	8,656	8,956	-	9,226	-	9,503	-	9,883	-	10,327	-	10,327	-	10,327	-
	Jumlah jenis usaha Industri kecil dan menengah (IKM)	17,312	17,912	-	18,462	-	19,006	-	19,766	-	20,654	-	20,654	-	20,654	-
	Jumlah IKM yang berkembang terus-menerus pada IKM	1	1	-	3	-	3	-	4	-	4	-	4	-	4	-
Program Peningkatan Struktur Industri	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pada IKM	22,279	23,039	-	23,876	-	2,477	-	25,748	-	26,848	-	26,848	-	26,848	-
	Jumlah Kawasan Industri	-	-	175,00	3	2,507,56	-	1,808,35	-	473,57	1	772,06	-	-	-	5,736,54
	Pertumbuhan Industri	8,656	8,951	-	9,275	-	9,621	-	10,001	-	10,426	-	10,426	-	10,426	-
	Cakupan dina kelompok pengrajin	34,624	35,824	-	36,904	-	38,012	-	39,592	-	41,308	-	41,308	-	41,308	-
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	-	10%	315,00	10%	1,085,00	20%	1,298,30	20%	1,641,72	20%	1,698,53	20%	1,887,68	100%	7.926,24
DINAS PERKEBUNYAN DAN KEHUTANAN																
URUSAN PILIHAN PERTANIAN																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	4.885,68	12 Bulan	3.200,00	12 Bulan	3.441,08	12 Bulan	3.688,41	12 Bulan	3.955,36	12 Bulan	4.238,24	72 bulan	23.408,77
	Tingkat kepatuhan aparatur	90% (288 Pegawai)	92% (294 Pegawai)	874,95	95% (304 Pegawai)	-	96% (307 Pegawai)	-	97% (310 Pegawai)	-	98% (314 Pegawai)	-	100% (320 Pegawai)	-	100% (320 Pegawai)	874,95
	Persentase Aparatur mengisi Jabatan Fungsional sesuai dengan bidangnya	43% (137 Pegawai)	50% (160 Pegawai)	643,29	60% (192 Pegawai)	100,00	70% (224 Pegawai)	107,53	80% (256 Pegawai)	115,26	90% (288 Pegawai)	123,60	100% (320 Pegawai)	132,44	100% (320 Pegawai)	1.222,14
	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 Aparatur	120 Aparatur	4.618,00	140 Aparatur	500,00	160 Aparatur	537,67	180 Aparatur	576,31	200 Aparatur	618,02	220 Aparatur	662,22	220 Aparatur	7.512,24
	Tingkat kegunaan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP : C	Nilai LAKIP : CC	1.336,95	Nilai LAKIP : B	150,00	Nilai LAKIP : B	161,30	Nilai LAKIP : BB	172,89	Nilai LAKIP : BB	185,41	Nilai LAKIP : A	198,67	Nilai LAKIP : A	2.205,22
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pekebun Miskin Yang Mendapat Bantuan Modal Usaha (OMU pekebun)	0	0	-	108 Pekebun	765,00	108 Pekebun	970,00	108 Pekebun	1.220,00	108 Pekebun	1.800,00	108 Pekebun	1.800,00	540 Pekebun	6.555,00
	Pertumbuhan Nilai Tukar Petani (NTT) Pekebun	96 (2%)	98,5 (3%)	1.810,00	101,6 (3%)	5,180,00	105,3 (4%)	2,500,00	109,6 (4%)	3,500,00	114,6 (5%)	4,000,00	120,4 (5%)	6,566,01	120,4	23.846,01
	Pertumbuhan Jumlah Petani Pekebun (KK)	Rakyat: 31.657 KK, Plasma: 14.770 KK, Total: 46.427 KK (3%)	Rakyat: 30.785 KK, Plasma: 16.873 KK, Total: 47.658 KK (3%)	-	Rakyat: 31.642 KK, Plasma: 18.922 KK, Total: 50.565 KK (6%)	-	Rakyat: 32.652 KK, Plasma: 21.362 KK, Total: 54.015 KK (7%)	-	Rakyat: 33.721 KK, Plasma: 24.400 KK, Total: 58.122 KK (8%)	-	Rakyat: 34.797 KK, Plasma: 28.138 KK, Total: 62.935 KK (8%)	-	Rakyat: 35.943 KK, Plasma: 32.676 KK, Total: 68.620 KK (9%)	-	Rakyat: 36.943 KK, Plasma: 32.676 KK, Total: 68.620 KK	-
	Pertumbuhan Nilai Tukar Petani Pekebun (KK)	Rakyat: 31.657 KK, Plasma: 14.770 KK, Total: 46.427 KK (3%)	Rakyat: 30.785 KK, Plasma: 16.873 KK, Total: 47.658 KK (3%)	-	Rakyat: 31.642 KK, Plasma: 18.922 KK, Total: 50.565 KK (6%)	-	Rakyat: 32.652 KK, Plasma: 21.362 KK, Total: 54.015 KK (7%)	-	Rakyat: 33.721 KK, Plasma: 24.400 KK, Total: 58.122 KK (8%)	-	Rakyat: 34.797 KK, Plasma: 28.138 KK, Total: 62.935 KK (8%)	-	Rakyat: 35.943 KK, Plasma: 32.676 KK, Total: 68.620 KK (9%)	-	Rakyat: 36.943 KK, Plasma: 32.676 KK, Total: 68.620 KK	-
	Pertumbuhan Nilai Tukar Petani Pekebun (KK)	Rakyat: 31.657 KK, Plasma: 14.770 KK, Total: 46.427 KK (3%)	Rakyat: 30.785 KK, Plasma: 16.873 KK, Total: 47.658 KK (3%)	-	Rakyat: 31.642 KK, Plasma: 18.922 KK, Total: 50.565 KK (6%)	-	Rakyat: 32.652 KK, Plasma: 21.362 KK, Total: 54.015 KK (7%)	-	Rakyat: 33.721 KK, Plasma: 24.400 KK, Total: 58.122 KK (8%)	-	Rakyat: 34.797 KK, Plasma: 28.138 KK, Total: 62.935 KK (8%)	-	Rakyat: 35.943 KK, Plasma: 32.676 KK, Total: 68.620 KK (9%)	-	Rakyat: 36.943 KK, Plasma: 32.676 KK, Total: 68.620 KK	-

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
				KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Pertumbuhan Produksi Komoditi Perkebunan	Sawit: 225.943 - PBS: 1.285.260. Karet: 9.084, Lada: 4.763, Kopi: 100. Kelapa: 6.486 Kakao: 70. Aren: 70 Total: 1.531.775 (6%)	Sawit: 285.000 - PBS: 1.349.522. Karet: 10.000. Lada: 4.800, Kopi: 105, Kelapa: 8.100, Kakao: 75. Aren: 300 Total: 1.657.902 (8%)	-	12.047,99	Sawit: 335.000 - PBS: 1.443.989. Karet: 11.000. Lada: 4.900, Kopi: 115, Kelapa: 8.200, Kakao: 100. Aren: 340 Total: 1.803.644 (9%)	20.064,00	Sawit: 375.000 - PBS: 1.588.388. Karet: 12.500. Lada: 5.050, Kopi: 125, Kelapa: 8.300, Kakao: 130. Aren: 400 Total: 1.989.893 (10%)	13.180,48	Sawit: 425.000 - PBS: 1.747.227. Karet: 14.000. Lada: 5.200, Kopi: 135, Kelapa: 8.400, Kakao: 160. Aren: 480 Total: 2.200.602 (11%)	15.000,00	Sawit: 475.000 - PBS: 1.956.894. Karet: 15.500. Lada: 5.450, Kopi: 145, Kelapa: 8.550, Kakao: 230. Aren: 600 Total: 2.462.389 (12%)	24.732,04	Sawit: 520.000 - PBS: 2.230.859. Karet: 17.500. Lada: 5.700, Kopi: 169, Kelapa: 8.700, Kakao: 310. Aren: 780 Total: 2.784.018 (13%)	26.838,25	Sawit: 2.415.000 ton - PBS: 10.316.879 ton, Karet: 80.500 ton, Lada: 31.100 ton, Kopi: 794 ton, Kelapa: 50.250 ton, Kakao: 1.005. Aren: 2.900 Total: 12.898.428 ton	111.862,75
Program Peningkatan Pemerasan Hasil Produksi Perkebunan	Cakupan Teknologi Budidaya Yang Diterapkan (Aren)	-	-	-	-	50% dari rekomendasi	-	65% dari rekomendasi	-	75% dari rekomendasi	-	85% dari rekomendasi	-	90% dari rekomendasi	-	85% dari rekomendasi	-
Program Peningkatan Teknologi Perkebunan	Cakupan Paket Teknologi Integrasi Budidaya Tanaman Sawit dengan Sap Prodig Komoditi Perkebunan	-	-	-	-	50% dari rekomendasi	-	65% dari rekomendasi	-	75% dari rekomendasi	-	85% dari rekomendasi	-	90% dari rekomendasi	-	85% dari rekomendasi	-
Program Peningkatan Pemertanian Hasil Produksi Perkebunan	Pertumbuhan Produktivitas Komoditi Perkebunan	Sawit: 17.565. Karet: 1.386, Lada: 1.201, Kopi: 344, Kelapa: 963. Kakao: 1.190. Aren: 464 (3%)	Sawit: 18.100. Karet: 1.430, Lada: 1.220, Kopi: 350, Kelapa: 1.000, Kakao: 1.195. Aren: 600 (6%)	-	2.850,00	Sawit: 18.700. Karet: 1.470, Lada: 1.250, Kopi: 360, Kelapa: 1.060, Kakao: 1.205. Aren: 780 (7%)	3.980,00	Sawit: 19.300. Karet: 1.530, Lada: 1.310, Kopi: 375, Kelapa: 1.120, Kakao: 1.220. Aren: 1.020 (8%)	2.700,00	Sawit: 20.000. Karet: 1.590, Lada: 1.380, Kopi: 395, Kelapa: 1.220, Kakao: 1.240. Aren: 1.350 (9%)	1.942,85	Sawit: 20.700. Karet: 1.670, Lada: 1.460, Kopi: 420, Kelapa: 1.330, Kakao: 1.270. Aren: 1.790 (10%)	3.421,00	Sawit: 21.500. Karet: 1.750, Lada: 1.560, Kopi: 500, Kelapa: 1.480, Kakao: 1.310. Aren: 2.000 (11%)	6.000,00	Sawit: 21.500. Karet: 1.750, Lada: 1.560, Kopi: 500, Kelapa: 1.480, Kakao: 1.310. Aren: 2.000 (11%)	20.893,85
Program Perluasan Komoditas Perkebunan	Pertumbuhan Luas Areal Komoditi Perkebunan	Kebun Rakyat: 59.435 Ha, PBS: 170.404 Ha, Total: 229.839 Ha (4%)	Kebun Rakyat: 58.432 Ha, PBS: 191.438 Ha, Total: 249.870 Ha (8%)	0	-	15 Km Jin Produk & 4 Unit sarana pertanian	17.940,00	10 Km Jin Produk & 6 Unit sarana pertanian	10.000,00	22 Km Jin Produk & 10 sarana pertanian	13.000,00	30 Km Jin Produk & 12 Unit sarana pertanian	35.000,00	40 Km Jin Produk & 14 Unit sarana pertanian	50.000,00	194 Km Jin Produk & 46 Unit sarana pertanian	92.053,79
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkebunan	0	0	-	-	15 Km Jin Produk & 4 Unit sarana pertanian	17.940,00	10 Km Jin Produk & 6 Unit sarana pertanian	10.000,00	22 Km Jin Produk & 10 sarana pertanian	13.000,00	30 Km Jin Produk & 12 Unit sarana pertanian	35.000,00	40 Km Jin Produk & 14 Unit sarana pertanian	50.000,00	194 Km Jin Produk & 46 Unit sarana pertanian	137.653,99
Program Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan	Persentase Penurunan Serangan Tanaman (OPT) Perkebunan	689,65 Ha (439%)	154,8 Ha (22%)	937,16		145 Ha (94%)	1.650,00	130 Ha (90%)	1.500,00	110 Ha (85%)	1.500,00	85 Ha (77%)	1.500,00	50 Ha (59%)	1.500,00	674,8 Ha	8.587,16
Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	Persentase Penurunan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	17 Kasus (189%)	23 Kasus (135%)	247,17		21 Kasus (91%)	800,00	19 Kasus (90%)	665,00	17 Kasus (89%)	800,00	15 Kasus (88%)	950,00	13 Kasus (87%)	1.500,00	108 Kasus	4.962,17
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI																	
URUSAN PILIHAN KEHUTANAN																	
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pertumbuhan Luas Penghijauan	230 Ha (63%)	210 Ha	7.783,50	-		-		-		-		-		-	210 Ha	7.783,50
Program Rehabilitasi Lahan Kritis	Pertumbuhan Luas Penghijauan			-	-	80 Ha	2.504,83	107 Ha (46%)	3.051,22	163 Ha (64%)	3.868,48	324 Ha (81%)	4.724,36	571 Ha (83%)	4.857,08	488 Ha	19.005,98
Program Pembinaan dan Pemberian Insentif Hasil Hutan	Sektor Kehutanan	70 Milyar (64%)	23,5 Milyar (33%)	984,15	-		-		-		-		-		-	23,5 Milyar (33%)	984,15
Program Optimalisasi Penerimaan Daerah Dari Sektor Kehutanan	Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Sektor Kehutanan			-	-	24 Milyar (2%)	500,00	24,8 Milyar (3%)	500,00	25,8 Milyar (4%)	500,00	27,1 Milyar (5%)	500,00	28,8 Milyar (6%)	500,00	154 Milyar	2.500,00
Program Pemantauan Potensi Sumber Daya Hutan	Pertumbuhan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Gaharu: 460 Ptn, Madu: 200 Ltr, Jamur: 10 Ton (2%)	Gaharu: 510 Ptn, Madu: 205 Ltr, Jamur: 11 Ton (8%)	9.101,44	-		-		-		-		-		-	Gaharu: 510 Ptn, Madu: 205 Ltr, Jamur: 11 Ton (8%)	9.101,44
Program Pemantauan Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu	Pertumbuhan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)			-	-	Gaharu: 450 Ptn, Madu: 155 Ltr, Jamur: 9 Ton (15%)	2.200,00	Gaharu: 810 Ptn, Madu: 230 Ltr, Jamur: 13 Ton (26%)	2.300,00	Gaharu: 1.210 Ptn, Madu: 250 Ltr, Jamur: 14 Ton (40%)	2.500,00	Gaharu: 1.910 Ptn, Madu: 275 Ltr, Jamur: 15 Ton (49%)	2.500,00	Gaharu: 3.110 Ptn, Madu: 305 Ltr, Jamur: 16 Ton (66%)	3.000,00	Gaharu: 8.160 Ptn, Madu: 1.480 Ltr, Jamur: 81 Ton	12.500,00
Program Perindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Penurunan Kebakaran Hutan di Wilayah Tahun	n.a	75 Tikik Hotspot (100%)	2.518,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 Tikik Hotspot (100%)	2.518,71
Program Perindungan Wilayah Tahun	Penurunan Kebakaran Hutan di Wilayah Tahun	n.a	0	-	-	0	-	0	-	30 Tikik Hotspot (100%)	899,50	25 Tikik Hotspot (83%)	1.009,00	15 Tikik Hotspot (60%)	1.000,00	70 Tikik Hotspot	2.908,50
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI																	
URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																	

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	2.803,45	12 bulan	1.700,00	12 bulan	1.828,08	12 bulan	1.959,47	12 bulan	2.101,28	12 bulan	-	100%	12.643,84
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	90%	90%	540,04	90%	-	90%	-	90%	-	90%	-	90%	-	90%	540,04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	400,00	100%	100,00	100%	107,53	100%	115,26	100%	123,60	100%	132,44	100%	978,85
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	238,20	100%	300,00	100%	322,60	100%	345,79	100%	370,81	100%	397,33	100%	1.974,74
Program Peningkatan Sistem Pengendalian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6 dok/lep	32 dok/lep	310,10	31 dok/lep	200,00	31 dok/lep	215,07	31 dok/lep	230,53	231 dok/lep	247,21	31 dok/lep	264,89	13 dok/lep	1.467,79
Program Pembiayaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistikan	Persentase Rumah Tangga Berlistrik /Rumah Tangga Berlistrik PLN dan Non PLN dibandingkan Total KK Tahun 2015 sebanyak 205.550 KK	68% (140.066 KK)	70% (143.888 KK)	531,42	73% (149.066 KK)	500,00	77% (158.066 KK)	600,00	81% (167.066 KK)	600,00	86% (176.066 KK)	600,00	90% (185.066 KK)	600,00	90,00%	3.431,42
Program Pengembangan Energi Bau Terpadukan	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan EBT	2,2 % (4.573 Rumah)	2,4% (4.933 Rumah)	41.472,45	2,78 % (5.573 Rumah)	50.887,05	3,33 % (6.573 Rumah)	53.142,84	3,89 % (7.573 Rumah)	58.361,06	4,44 % (8.573 Rumah)	67.737,19	5 % (9.573 Rumah)	73.940,33	5 % (9.573 Rumah)	345.540,93
Program Pemeliharaan Sumber Air Bawah Tanah	Cakupan Penyediaan Air Bersih Melalui Pengteoran Air Tanah	n/a	18%	349,97	22%	3.200,00	20%	2.620,00	20%	2.720,00	20%	2.620,00	20%	2.780,00	100% (52 Tiik Sumur Boy)	14.289,97
Program Pengembangan Data/informasi Pertambangan	Cakupan Jenis Data hasil Penjualan (Data Produksi, Penjualan dan kewajiban royalti hasil tambang)	n/a	3 jenis data	2.050,81	3 jenis data	300,00	3 jenis data	250,00	3 jenis data	250,00	100%	250,00	3 jenis data	250,00	18 jenis data	3.350,81
Program Pembiayaan dan Pengembangan Panas Bumi	Cakupan Perusahaan berizin yang meningkat secara kualitas maupun kuantitas	n/a	-	-	5 Berizin	250,00	3 Berizin	220,44	3 Berizin	225,00	3 Berizin	225,00	3 Berizin	225,00	15 Berizin	1.145,44
Program Penyediaan Data & Informasi BBM Terentu & LPG	Cakupan Jenis Data Informasi	n/a	-	-	3 Jenis Data	350,00	3 Jenis Data	350,00	3 Jenis Data	350,00	3 Jenis Data	350,00	3 Jenis Data	350,00	18 Jenis data	1.750,00
Program Pemeliharaan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan	Cakupan Pemeliharaan dan Pengembangan LPU	n/a	4 Kecamatan	14.360,00	4 Kecamatan	12.800,00	4 Kecamatan	17.300,00	4 Kecamatan	17.300,00	4 Kecamatan	13.800,00	4 Kecamatan	13.550,00	4 Kecamatan	89.110,00
Program Pembiayaan dan Pengembangan Aparatur	Cakupan Pembiayaan dan Pengembangan Aparatur	100%	0%	-	100%	60,00	100%	64,56	100%	66,30	100%	66,30	100%	66,30	100%	323,46
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																
URUSAN PILIHAN PERTANIAN																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	4.941,55	12 bulan	3.100,00	12 bulan	3.333,55	12 bulan	3.573,14	12 bulan	3.831,75	12 bulan	4.105,79	72 bulan	22.885,77
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	90% (203 ORG)	90% (203 ORG)	209,88	90% (203 ORG)	-	95% (214 ORG)	-	95% (214 ORG)	-	100 % (225 ORG)	-	100 % (225 ORG)	-	100%	203,88
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	55% (124 ORG)	60% (135 ORG)	520,74	70% (158 ORG)	100,00	80% (180 ORG)	107,53	90% (203 ORG)	115,26	95 (214 ORG)	123,60	100 % (225 ORG)	132,44	100%	1.099,58
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	150	160	4.190,61	175	450,00	175	483,90	200	518,68	200	556,22	225	596,00	225	6.795,42
Program Peningkatan Sistem Pengendalian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	29 lap/tdk	86 lap/tdk	1.450,62	10 dok/lep	150,00	10 dok/lep	161,30	10 dok/lep	172,89	10 dok/lep	185,41	10 dok/lep	198,67	136 dok/lep	2.318,89
Program Penguatngkatan Kersniskan Bidang Pertanian	Persentase petani mislin yang mendapat bantuan modal usaha (org)	14,21 % (3.500 petani TPK mislin dibagi 2468 orang petani TPK)	0	-	11,31 % (2.785 petani TPK)	4.235,00	17,4 % (4.285 orang petani TPK)	4.508,00	23,48 % (5.500 orang petani TPK)	4.430,00	26,58 % (7.050 orang petani TPK)	4.500,00	30,98 % (7.600 orang petani TPK)	4.500,00	30,98 % (7.600 orang petani TPK)	22.173,00
Program Revolusi Jagung	Pertumbuhan Produksi tanaman jagung	1.576 Ton	1.970 ton (25 %)	-	3.349 ton (70 %)	8.738,23	5.688 ton (70%)	10.000,00	9.555 ton (75 %)	12.000,00	17.421 ton (75 %)	18.000,00	30.486 ton (75 %)	30.000,00	68.469 Ton (75%)	78.738,23

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	3.117,22	12 bulan	2.750,00	12 bulan	2.957,18	12 bulan	3.169,73	12 bulan	3.399,14	12 bulan	3.642,23	60	19.035,49
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	90%/247 Aparatur	92%/252 Aparatur	524,21	95%/260 Aparatur	-	96%/263 Aparatur	-	97%/266 Aparatur	-	98%/269 Aparatur	-	100%/274 Aparatur	-	100%/274 Aparatur	524,21
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan aparatur Disnakeswan yang mengikuti pelatihan dan sosialisasi (org)	500	-	-	80	100,00	80	107,53	80	115,26	80	123,60	80	132,44	400	578,85
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	12 bulan	5.722,63	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	60 bulan	5.722,63
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	280	160	930,00	160	150,00	160	161,30	160	172,89	160	185,41	160	198,67	800	1.798,27
Program Peningkatan Kemiskinan Bidang Pemukiman	Cakupan Penurunan Kemiskinan masyarakat Pemukiman (org)	0	150	-	100	3.000,00	150	4.350,00	150	4.350,00	120	3.700,00	120	3.700,00	840 Orang	19.100,00
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pemertakan	Cakupan Rumah Tangga Pemertakan yang menerapkan Teknologi (RTT/Plahun)	354	70	1.121,80	125	4.000,00	70	2.500,00	70	3.000,00	70	3.000,00	70	5.000,00	350	18.621,80

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Pengcetakan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase derajat kesehatan Ternak Sapi potong pada Masayarakat 35%/tahun	9.628	10591 (35%)	2.350.00	11650 (35%)	3.350.00	12815 (35%)	3.350.00	14096 (35%)	3.350.00	15506 (35%)	3.350.00	17056 (35%)	5.000.00	81.714 Ekor (210%)	20.750.00
Program Peningkatan Produksi Hasil Peenekan	pertumbuhan populasi ternak sapi Potong (ekor) pertumuhan Produk daging ternak 15% per tahun(ton)	27508 (4%)	30258 (10%)	31.597.27	34285 (13.31%)	24.050.00	39085 (14%)	20.500.00	44557 (14%)	24.000.00	50795 (14%)	33.300.00	59906 (14%)	51.369.42	59906 Ekor(83%)	184.816.70
			14165 (3.7%)		18738 (15%)	-	21543 (15%)	-	24755 (15%)	-	28491 (15%)	-	32765 (15%)	-	142.577 Ton (90 %)	-
			3522 (2.83%)	4050 (15%)	4657 (15%)	-	5357 (15%)	-	6160 (15%)	-	7084 (15%)	-	8147 (15%)	-	354.55 Ton (90 %)	-
Program Pedestarian Sumber Daya Lokal Komoditas Peternakan	perubahan populasi ternak kambing dan sapi kandang (10%/tahun)	1257	1383 (20%)	-	1521 (10%)	3.350.00	1673 (10%)	3.350.00	1840 (10%)	3.350.00	2024 (10%)	3.350.00	2227 (10%)	3.350.00	10.668 Ekor(70%)	16.750.00
Program Peningkatan Kesejahteraan Peternak	Indeks Nilai Tukar Peternak	107	111 (2%)	2.385.00	113 (2%)	4.400.00	115 (2%)	3.000.00	118 (2%)	3.000.00	120 (2%)	3.275.45	122 (2%)	5.000.00	122 (10%)	21.060.45
Program Peningkatan Pemastaran Hasil Produksi Peternakan	Cakupan Usaha Pengolahan Hasil Produk Peternakan 15%/tahun (kdp)	25	28	650.00	32	1.200.00	37	1.200.00	43	930.00	49	1.200.00	57	2.000.00		7.180.00
DINAS SOSIAL																
URUSAN WAIB SOSIAL																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.182.66	100%	1.800.00	100%	1.935.61	100%	2.074.73	100%	2.224.89	100%	2.384.01	100%	12.601.89
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0%	100%	200.00	100%	100.00	100%	107.53	100%	115.26	100%	123.60	100%	132.44	100%	778.85
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	7.222.91	100%	500.00	100%	537.67	100%	576.31	100%	618.02	100%	662.22	100%	10.117.15
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kecapaian waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	CC	CC	301.02	CC	150.00	B	161.30	BB	172.89	BB	185.41	A	196.67	A	1.169.29
Program Bina Kampung Eiam (Desa Berketahanan Sosial)	Persentase Desa Berketahanan Sosial	-	-	500.00	21	3.607.36	41	3.761.33	60	3.850.89	80	4.036.98	100	4.488.78	100	20.245.34
Program pembinaananti asuhan/anti jompo	Cakupan pembinaan anti asuhan/anti jompo	100%	-	-	100%	3.008.63	100%	3.228.45	100%	3.356.31	100%	3.621.99	100%	4.038.71	100%	17.254.08
Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang menerima bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial	68	100	3.356.73	100	5.001.44	100	5.366.88	100	5.579.43	100	6.221.07	100	6.381.34	100	31.906.89
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase rehabilitasi sosial bagi korban bencana, korban tindak kekerasan dan pelanggaran	70	50	2.387.23	60	1.991.73	60	2.315.33	70	2.187.23	75	2.336.61	75	2.358.47	75	13.586.61
Program Pemberdayaan F'air Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase pemberdayaan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	58.2	10	1.705.88	25	2.039.08	40	2.580.48	55	2.498.02	70	3.095.04	85	2.901.67	85	14.519.97
Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase pembinaan sosial bagi anak terlantar	45	15	2.527.53	25	1.056.44	35	1.311.71	45	1.343.85	62	1.410.65	79	1.265.14	79	8.915.32
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase pembinaan sosial bagi penyandang cacat dan eks trauma	42.6	10	2.185.28	20	1.705.06	30	1.829.64	43	1.902.10	60	2.252.67	77	2.175.49	77	12.050.23
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang Tuna Sosial	38.32	20	848.66	35	2.529.20	50	2.713.99	65	2.821.48	75	3.044.82	85	3.227.00	85	15.185.16
Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Persentase partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	40.82%	14%	1.754.12	24%	1.502.07	39%	1.611.82	54%	1.675.66	69%	1.808.29	84%	1.915.49	84%	10.268.46

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Sosial	Cakupan penyuluhan sosial	2 kali	20 Kali	550.00	41 Kali	1.006.06	62 Kali	1.237.95	83 Kali	767.17	104 Kali	1.027.90	125 Kali	1.197.41	125 Kali	5.786.50
Program Pelestaran Nilai-nilai Kearifan, Kepertinisan dan Kesetiaan Sosial	Persentase pelestarian nilai-nilai kearifan, kepertinisan dan kesetiaan sosial	85.7	100	5.949.38	100	5.007.13	100	1.080.72	100	5.585.77	100	1.412.45	100	1.285.00	100	20.320.45
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengembangan Sistem pelayanan	Jumlah dokumen sistem pelayanan SKPD	10 dokumen	10 dokum	1.268.92	6 dokumen	800.00	6 dokumen	1.058.45	6 dokumen	1.192.45	6 dokumen	1.063.10	6 dokumen	1.020.72	30 dokumen	6.403.64
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																
URUSAN WAIB KETENAGAKERJAAN																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	3.717.00	100%	1.700.00	100%	1.828.08	100%	1.959.47	100%	2.101.28	100%	2.251.56	100%	13.557.39
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	620.00	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	620.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	309.00	100%	100.00	100%	107.53	100%	115.26	100%	123.60	100%	132.44	100%	887.85
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	3.611.00	100%	350.00	100%	376.37	100%	403.42	100%	432.62	100%	463.56	100%	5.636.96
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kecapaian waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	185.00	100%	150.00	100%	161.30	100%	172.89	100%	186.41	100%	198.67	100%	1.053.27
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktifitas	Cakupan Pelatihan Pencari Kerja yang dilatih berbasis kompetensi di 9 kelompok Lapangan Usaha (KLU)	0.15%	3%	38.769.85	3%	6.150.00	3%	6.650.00	3%	7.000.00	3%	7.600.00	3%	7.800.00	3%	73.969.85
	Cakupan Pencari Kerja yang dilatih produktivitasnya dengan berbasis kewirausahaan di 9 kelompok Lapangan Usaha (KLU)	0.30%	3%	650.00	3%	662.67	3%	797.48	3%	893.66	3%	937.05	3%	952.99	3%	4.893.86
Program Pemetaan Pemberdayaan Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapat fasilitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	n.a	9.880	1.406.00	8.907.00	8.900.00	9.721.00	9.600.00	9.526.00	10.100.00	9.891.00	10.700.00	9.486.00	11.700.00	57.411.00	52.406.00
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Cakupan Pelayanan Penyelesaian Perselesaian Hubungan Industrial	100%	100	3.857.00	100	1.200.00	100	1.200.00	100	1.400.00	100	1.400.00	100	1.500.00	100	10.557.00
	Cakupan Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	100%	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																
URUSAN PILIHAN KETRAMMIGRASIAN																
Program Pengembangan Kawasan Desa/ Kintirans	Jumlah kawasan/Desa/Kintirans yang dlatat/dibangun	47	47	2.141.00	47	1.000.00	48	1.500.00	49	2.000.00	51	2.200.00	52	2.500.00	52	11.941.00
INSPEKTORAT																
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	3.521.23	100%	4.500.00	100%	4.839.02	100%	5.186.62	100%	5.562.22	100%	5.960.02	100%	29.563.32
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	754.84	230.00	288.83	288.83	288.83	288.16	309.01	309.01	309.01	309.01	331.11		2.201.95
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.962.49	1.000.00	1.000.00	1.00%	1.075.34	100%	1.152.63	100%	1.236.05	100%	1.324.45	100%	7.750.95
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Cakupan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Desa	100%	100%	7.138.32	1.000.00	1.000.00	100%	1.075.34	100%	1.152.63	100%	1.236.05	100%	1.324.45	100%	12.926.78
	Cakupan Pengawasan terhadap pengelolaan tugas dan fungsi keuangan barang, kepegawaian dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.	100%	100%	-	1.000.00	100%	1.075.34	100%	1.152.63	100%	1.236.05	100%	1.324.45	100%	1.324.45	5.788.46
	Cakupan Implementasi SPKD	n.a	-	-	100%	500.00	100%	537.67	100%	576.31	100%	618.02	100%	662.22	100%	2.894.23

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
	Cakupan review dokumen Anggaran SKPD dan reviu LKPD	100%	100%	1.315.80	100%	1.000.00	1.075.34	1.152.63	100%	1.236.05	100%	1.324.45	100%	1.324.45	100%	7.104.27
	Cakupan Evaluasi SAKIP SKPD	100%	100%	1.076.66	100%	500.00	537.67	576.31	100%	618.02	100%	662.22	100%	662.22	100%	3.970.89
	Cakupan Monitoring LPD SKPD	100%	100%	2.583.26	100%	500.00	537.67	576.31	100%	618.02	100%	662.22	100%	662.22	100%	5.477.50
	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BKR RI	52%	60%	627.19	500.00	65%	537.67	576.31	75%	618.02	80%	662.22	80%	662.22	80%	3.324.42
	Tindak lanjut Hasil Pengawasan APD	90%	100%	1.987.02	500.00	100%	537.67	576.31	100%	618.02	100%	662.22	100%	662.22	100%	4.881.26
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Cakupan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Pengawas	100%	100%	3.800.00	1.000.00	100%	1.075.34	1.152.63	100%	1.236.05	100%	1.324.45	100%	1.324.45	100%	9.586.46
Program Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	100%	100%	264.19	500.00	100%	537.67	576.31	100%	618.02	100%	662.22	100%	662.22	100%	3.158.42
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	490.00	300.00	100%	322.60	345.79	100%	370.81	100%	397.33	100%	397.33	100%	2.226.54

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

URUSAN WAJIB KETERERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	9.456.24	5.000.00	100%	5.376.69	5.763.14	100%	6.180.25	100%	6.622.24	100%	6.622.24	100%	38.398.56
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	1.615.00	-	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	1.615.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	1.304.38	50.00	100%	53.77	57.63	100%	61.80	100%	66.22	100%	66.22	100%	1.593.80
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.147.27	500.00	100%	537.67	576.31	100%	618.02	100%	662.22	100%	662.22	100%	4.041.50
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	220.00	150.00	100%	161.30	172.89	100%	186.41	100%	198.67	100%	198.67	100%	1.088.27
Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan penanganan kamtibmas	100%	100%	950.00	750.00	100%	806.50	864.47	100%	927.04	100%	993.34	100%	993.34	100%	5.291.35
	Cakupan patroli sapa ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	100%	100%	-	500.00	100%	537.67	576.31	100%	618.02	100%	662.22	100%	662.22	100%	2.894.23
	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	100%	100%	-	500.00	100%	537.67	576.31	100%	618.02	100%	662.22	100%	662.22	100%	2.894.23
	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten	100%	60%	426.47	1.000.00	100%	1.075.34	1.152.63	100%	1.236.05	100%	1.324.45	100%	1.324.45	100%	6.214.93
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekas)	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (kelemban, keselamatan, keindahan) di Kabupaten	100%	70%	-	500.00	100%	537.67	576.31	90%	618.02	90%	662.22	90%	662.22	90%	2.894.23
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan pengamanan lingkungan	100%	100%	1.950.00	500.00	100%	537.67	576.31	100%	618.02	100%	662.22	100%	662.22	100%	4.844.23
	Cakupan rasio petugas linmas di Kabupaten	n/a	-	-	350.00	100%	376.37	403.42	100%	432.62	100%	463.56	100%	463.56	100%	2.025.96

KECAMATAN ANGGANA

PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KECAMATAN

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Cakupan pelayanan perbaikan dan non perbaikan (kecamatan)	100%	100%	48.00	50.00	100%	53.77	57.63	100%	61.80	100%	66.22	100%	66.22	100%	337.42
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Rata-rata Kinerja Kecamatan Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	-	693.02	100%	1.161.71	1.245.21	100%	1.335.33	100%	1.430.83	100%	1.430.83	100%	6.946.41

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan pelijian dan non pelijian (kecamatan)	100%	100%	241.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	241.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.335.47	100%	2.350.00	2.527.05	100%	2.708.67	100%	2.904.72	100%	3.112.45	100%	14.938.36	14.938.36
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	45.00	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	45.00	45.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	-	100%	50.00	53.77	100%	57.63	100%	61.80	-	66.22	100%	289.42	289.42
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	567.28	100%	1.126.11	1.210.95	100%	1.297.99	100%	1.391.93	100%	1.491.48	100%	7.085.75	7.085.75
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kecapaian waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	60.00	100%	150.00	161.30	100%	172.89	100%	185.41	100%	196.67	100%	928.27	928.27

KECAMATAN ANGANA

URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	50%	-	-	10%	320.00	320.00	10%	320.00	10%	320.00	10%	320.00	10%	320.00	1.600.00
Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	60%	5%	75.00	5%	750.00	1.000.00	10%	700.00	10%	400.00	10%	350.00	100%	3.275.00	3.275.00
Program Pembangunan Jalan dan Jambatan Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	40%	10%	75.00	10%	750.00	1.000.00	10%	700.00	10%	350.00	10%	350.00	100%	3.225.00	3.225.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	45%	5%	600.00	10%	750.00	1.000.00	10%	700.00	10%	350.00	10%	350.00	100%	3.750.00	3.750.00
Program Pembangunan Turap/Tlaud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	Cakupan Turap/Tlaud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	40%	-	-	15%	750.00	1.000.00	10%	700.00	10%	350.00	10%	350.00	100%	3.150.00	3.150.00

KECAMATAN KEMBAR JANGGUT

PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN : KECAMATAN

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Cakupan pelayanan pelijian dan non pelijian (kecamatan)	100%	-	-	100%	40.68	43.74	100%	46.99	100%	50.28	100%	53.88	100%	235.47	235.47
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Rata-rata Kinerja Kecamatan Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan yang aktif	100%	-	-	100%	143.93	154.77	100%	165.90	100%	177.90	100%	190.63	100%	833.13	833.13
Program Peningkatan Pelayanan P-ublik	Cakupan pelayanan pelijian dan non pelijian (kecamatan)	100%	100%	372.94	100%	612.94	659.01	100%	706.37	100%	757.50	100%	811.67	100%	3.920.23	3.920.23
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	927.62	100%	1.950.00	2.096.91	100%	2.247.62	100%	2.410.30	100%	2.562.68	100%	12.215.13	12.215.13
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	100%	-	-	-	100%	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	-	-	50.00	53.77	100%	57.63	100%	61.80	-	66.22	100%	289.42	289.42
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	742.12	100%	200.00	215.07	100%	230.53	100%	247.21	100%	264.89	100%	1.899.81	1.899.81
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kecapaian waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	81.33	100%	150.00	161.30	100%	172.89	100%	185.41	100%	196.67	100%	949.60	949.60

KECAMATAN KEMBAR JANGGUT

URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	70%	-	-	-	-	-	15%	225.00	-	-	15%	225.00	100%	450.00	450.00

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	60%	4%	68.92	-	-	-	12%	225.00	12%	225.00	12%	225.00	100%	743.82	743.82
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	80%	-	-	4%	860.00	4%	860.00	4%	860.00	4%	860.00	4%	1.198.31	4.638.31	4.638.31
Program Rehabilitasi/Perbaikan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	80%	5%	342.97	-	-	5%	275.00	5%	275.00	5%	275.00	-	-	100%	1.167.87

KECAMATAN KENOAH

PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KECAMATAN

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	65.00	100%	65.00	100%	69.90	100%	74.92	100%	80.34	100%	86.09	100%	441.25
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/ Kelurahan	Rata-rata Kinerja Kecamatan Cakupan Lembaga Kesyarakatan yang aktif	Na	Na	-	100%	100.00	100%	107.53	100%	115.26	100%	123.60	100%	132.44	100%	576.85
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.250.95	100%	2.200.00	100%	2.365.75	100%	2.535.78	100%	2.719.31	100%	2.913.79	100%	13.985.48
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	0%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	60.00	100%	50.00	100%	53.77	100%	57.63	100%	61.80	100%	66.22	100%	349.42
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparat	100%	100%	903.69	100%	200.00	100%	215.07	100%	230.53	100%	247.21	100%	264.89	100%	2.061.38
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kepatuhan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	60.00	100%	150.00	100%	161.30	100%	172.89	100%	185.41	100%	196.67	100%	926.27

KECAMATAN KENOAH

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong dan Jamban	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	50%	0%	-	10%	200.00	10%	200.00	10%	200.00	10%	200.00	10%	200.00	100%	1.000.00
Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	50%	0%	-	10%	200.00	10%	200.00	10%	200.00	10%	200.00	10%	200.00	100%	1.000.00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	50%	0%	-	10%	200.00	10%	200.00	10%	200.00	10%	200.00	10%	200.00	100%	1.000.00
Program Rehabilitasi/Perbaikan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	50%	0%	-	14%	200.00	9%	200.00	9%	200.00	9%	200.00	9%	200.00	100%	1.000.00
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Cakupan Turap/Talud/bronjong Kecamatan/ Kelurahan Dalam Kondisi Baik	50%	0%	-	10%	200.00	10%	200.00	10%	200.00	10%	200.00	10%	200.00	100%	1.000.00

KECAMATAN KOTA BANGUN

PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KECAMATAN

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	n.a	-	-	100%	50.00	100%	53.77	100%	57.63	100%	61.80	100%	66.22	100%	289.42
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/ Kelurahan	Rata-rata Kinerja Kecamatan Cakupan Lembaga Kesyarakatan yang aktif	n.a	-	-	100%	407.25	100%	437.93	100%	469.41	100%	503.38	100%	539.38	100%	2.357.35
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	Na	100%	370.78	100%	871.39	100%	937.04	100%	1.004.39	100%	1.077.08	100%	1.154.11	100%	5.414.79
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	n.a	100%	148.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	148.41
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	n.a	100%	1.959.89	100%	3.000.00	100%	3.226.02	100%	3.457.88	100%	3.708.15	100%	3.973.35	100%	19.325.29

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	n.a	100%	27.00	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	27.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	n.a	-	-	100%	50.00	100%	53.77	100%	57.63	100%	61.80	100%	66.22	100%	289.42
Program Peningkatan Sarana dan Peralatan Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan peralatan aparatur	n.a	100%	262.10	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	262.10
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kepatuhan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	n.a	100%	10.05	100%	150.00	100%	161.30	100%	172.89	100%	186.41	100%	198.67	100%	876.32

KECAMATAN KOTA BANGUN

URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dicat	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dicat	n.a	-	-	0%	-	-	95%	400.00	95%	400.00	-	-	-	95%	800.00
Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	n.a	95%	150.00	95%	400.00	95%	750.00	-	-	-	-	-	-	95%	1.300.00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	n.a	-	-	95%	400.00	95%	750.00	95%	400.00	-	-	-	-	95%	1.550.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	n.a	95%	1.076.97	95%	400.00	95%	1.702.26	95%	400.00	95%	400.00	-	-	95%	3.979.23

KECAMATAN LOA JANAN

PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KECAMATAN

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Cakupan pelayanan perbaikan dan non perbaikan (kecamatan)	100%	-	-	100%	50.00	100%	53.77	100%	57.63	100%	61.80	100%	66.22	100%	289.42
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Rata-rata Kinerja Kecamatan Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	-	-	100%	586.00	100%	630.15	100%	675.44	100%	724.33	100%	776.13	100%	3.392.04
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perbaikan non perbaikan (kecamatan)	100%	100%	365.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	365.90
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.402.31	100%	2.300.00	100%	2.473.28	100%	2.651.04	100%	2.842.91	100%	3.046.23	100%	14.715.78
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	205.50	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	205.50
Program Peningkatan Sarana dan Peralatan Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan peralatan aparatur	100%	100%	296.50	100%	200.00	100%	215.07	100%	230.53	100%	247.21	100%	264.89	100%	1.454.19
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kepatuhan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	220.32	100%	150.00	100%	161.30	100%	172.89	100%	186.41	100%	198.67	100%	1.088.59
Program Peningkatan Administrasi Kependudukan	Rasio penduduk berKTP per satu penduduk	100%	100%	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	25.00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio penduduk berKTP per satu penduduk	100%	100%	89.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	89.18
Program Peningkatan dan fasilitas pengediaan keuangan desa	Persentase terbit administrasi desa	100%	100%	130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	130.00

KECAMATAN LOA JANAN

URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong dicat	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dicat	46%	8%	480.00	8%	750.00	8%	750.00	8%	500.00	8%	500.00	8%	500.00	100%	3.480.00

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	40%	10%	150.00	10%	750.00	10%	750.00	10%	750.00	10%	750.00	10%	750.00	100%	3.900.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	46%	8%	3.285.00	8%	750.00	8%	750.00	8%	375.00	8%	500.00	8%	500.00	100%	6.160.00
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	55%	9%	150.00	9%	295.00	9%	295.00	9%	240.00	9%	240.00	9%	240.00	100%	1.460.00

KECAMATAN LOA KULU

PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KECAMATAN

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Cakupan Layanan Perijinan dan Non Perijinan	100%	-	-	100%	100.00	100%	107.53	100%	115.26	100%	123.60	100%	132.44	100%	576.85
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Rata-rata Kinerja Kecamatan	100%	-	-	100%	385.88	100%	393.22	100%	421.49	100%	451.99	100%	484.32	100%	2.116.70
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Lembaga Kesyayakatan yang aktif	100%	100%	715.28	100%	1.240.28	100%	1.333.72	100%	1.429.57	100%	1.531.04	100%	1.642.68	100%	7.894.56
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan Layanan Perijinan dan Non Perijinan	100%	100%	163.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	163.30
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.540.14	100%	2.500.00	100%	2.688.35	100%	2.881.57	100%	3.090.12	100%	3.311.12	100%	16.011.30
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	34.08	100%	-	100%	-	100%	-	-	-	100%	-	100%	34.08
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	100%	75.01	100%	50.00	100%	53.77	-	57.63	-	61.80	-	66.22	100%	364.43
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	665.59	100%	200.00	100%	215.07	100%	230.53	100%	247.21	100%	264.89	100%	1.613.28
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kepatuhan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	97.10	100%	150.00	100%	161.30	100%	172.89	100%	185.41	100%	198.67	100%	965.36

KECAMATAN LOA KULU

URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong dibangun	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	60%	8%	457.75	8%	250.00	8%	250.00	8%	250.00	8%	250.00	8%	250.00	100%	1.707.75
Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	50%	10%	124.00	20%	250.00	10%	350.00	10%	350.00	-	-	-	-	100%	1.074.00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	45%	5%	300.00	10%	250.00	10%	250.00	10%	250.00	10%	250.00	10%	250.00	100%	1.550.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	60%	8%	8.232.99	8%	250.00	8%	250.00	8%	250.00	8%	250.00	8%	185.26	100%	9.416.25
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	50%	-	-	10%	250.00	10%	250.00	10%	250.00	10%	250.00	10%	250.00	100%	1.250.00

KECAMATAN MARANG KAYU

PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KECAMATAN

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (kecamatan)	100%	-	-	100%	35.00	100%	37.64	100%	40.34	100%	43.26	100%	46.36	100%	202.60
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Rata-rata Kinerja Kecamatan	100%	-	-	100%	357.25	100%	384.16	100%	411.78	100%	441.58	100%	472.16	100%	2.067.93
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Lembaga Kesyayakatan yang aktif	100%	100%	237.35	100%	612.10	100%	658.21	100%	705.52	100%	756.59	100%	810.70	100%	3.780.47
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	98.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	98.85

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.559.31	100%	2.600.00	100%	2.795.88	100%	2.996.83	100%	3.213.73	100%	3.443.57	100%	16.609.32
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	122.00	100%	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	122.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	55.00	100%	50.00	100%	53.77	100%	57.63	100%	61.80	100%	66.22	100%	344.42
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.367.59	100%	200.00	100%	215.07	100%	230.53	100%	247.21	100%	264.89	100%	2.515.29
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kepatuhan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	58.85	100%	150.00	100%	161.30	100%	172.89	100%	185.41	100%	198.67	100%	927.12

KECAMATAN MARANG KAYU

URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	50%	50%	1.100.00	10%	1.250.00	10%	1.500.00	10%	1.500.00	10%	1.250.00	10%	816.26	100%	7.416.26
Kecamatan/Kelurahan																
Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	35%	15%	946.74	35%	1.250.00	15%	235.00	-	-	-	-	-	-	100%	2.431.74
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	40%	5%	300.00	15%	1.250.00	10%	1.500.00	10%	1.500.00	10%	1.250.00	10%	1.250.00	100%	7.050.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	45%	5%	575.00	10%	1.250.00	10%	1.500.00	10%	1.500.00	10%	1.250.00	10%	1.250.00	100%	7.325.00
Program Pembangunan Turap/ laudBronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/laudBronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	50%	50%	775.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	775.00

KECAMATAN MUARA BADAQ

PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KECAMATAN

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Cakupan pelayanan perbaikan dan non perbaikan (Kecamatan)	100%	-	-	100%	125.00	100%	134.42	100%	144.08	100%	154.51	100%	165.56	100%	723.56
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Rata-rata Kinerja Kecamatan Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan yang aktif	100%	-	-	100%	310.00	100%	333.36	100%	357.31	100%	383.18	100%	410.58	100%	1.794.42
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perbaikan dan non perbaikan (Kecamatan)	100%	497.72	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	497.72
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	1.732.87	100%	2.750.00	100%	2.957.18	100%	3.169.73	100%	3.399.14	100%	3.642.23	100%	3.842.23	17.651.15
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	196.80	100%	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	196.80
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	114.60	100%	50.00	100%	53.77	100%	57.63	100%	61.80	100%	66.22	100%	66.22	404.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	729.01	100%	200.00	100%	215.07	100%	230.53	100%	247.21	100%	264.89	100%	264.89	1.886.71
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kepatuhan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	30.29	100%	150.00	100%	161.30	100%	172.89	100%	185.41	100%	198.67	100%	198.67	898.56

KECAMATAN MUARA BADAQ

URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	40%	10%	360.00	10%	1.000.00	10%	1.000.00	10%	1.000.00	10%	1.000.00	10%	750.00	100%	5.110.00
Kecamatan/Kelurahan																
Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	40%	10%	168.00	10%	1.000.00	10%	1.000.00	10%	1.000.00	10%	1.082.00	10%	750.00	100%	5.000.00

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	60%	8%	220.00	8%	1.000.00	8%	1.000.00	8%	1.000.00	8%	1.000.00	8%	750.00	100%	4.970.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	40%	10%	420.00	10%	1.000.00	10%	1.000.00	10%	1.000.00	10%	1.000.00	10%	750.00	100%	5.170.00
Kecamatan/Kelurahan																
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan dalam Kondisi Baik	50%	-	-	10%	1.000.00	10%	1.000.00	10%	1.000.00	10%	1.000.00	10%	750.00	100%	4.750.00

KECAMATAN MUARA JAWA

PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KECAMATAN

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	-	100%	150.00	100%	161.30	100%	172.89	100%	185.41	100%	196.67	100%	866.27
	Rata-rata Kinerja Kecamatan	100%	-	100%	240.00	100%	258.08	100%	276.63	100%	296.65	100%	317.87	100%	1.389.23
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	5.041.80	100%	6.622.33	100%	7.121.25	100%	7.633.08	100%	8.185.53	100%	8.770.94	100%	43.574.92
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	1.747.31	100%	7.500.00	100%	8.065.04	100%	8.644.70	100%	9.270.37	100%	9.833.37	100%	45.160.79
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	50.00	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	50.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	100%	50.00	100%	53.77	100%	57.63	100%	61.80	100%	66.22	100%	289.42
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	269.50	100%	677.48	100%	728.52	100%	780.88	100%	837.39	100%	897.28	100%	4.191.04
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	49.50	100%	150.00	100%	161.30	100%	172.89	100%	185.41	100%	196.67	100%	917.77

KECAMATAN MUARA JAWA

URUSAN WAIB PENERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	40%	10%	380.00	10%	750.00	10%	750.00	10%	750.00	10%	750.00	10%	750.00	100%	4.130.00
Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	100%	100%	660.00	20%	500.00	40%	500.00	60%	500.00	80%	500.00	100%	500.00	100%	3.160.00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	40%	10%	665.00	10%	1.500.00	10%	1.500.00	10%	1.500.00	10%	1.500.00	10%	1.500.00	100%	8.165.00
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	45%	5%	2.770.00	10%	6.500.00	10%	6.500.00	10%	6.500.00	10%	6.500.00	10%	5.775.00	100%	34.545.00

KECAMATAN MUARA KAMAN

PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KECAMATAN

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	-	100%	35.00	100%	37.64	100%	40.34	100%	43.26	100%	46.36	100%	202.60
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Rata-rata Kinerja Kecamatan Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	-	100%	335.00	100%	360.24	100%	386.13	100%	414.08	100%	443.69	100%	1.939.14
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	432.70	100%	532.70	100%	572.83	100%	614.00	100%	658.44	100%	705.53	100%	3.516.22
Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100.00
		100%	1,777.23	100%	2.830.00	100%	3,043.21	100%	3,261.94	100%	3,498.02	100%	3,748.19	100%	18,158.59

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	50.00	100%	53.77	100%	57.63	100%	61.80	100%	66.22	100%	68.99	100%	289.42
Program Peningkatan Sarana dan Peralatan Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	417.50	200.00	20%	215.07	20%	230.53	20%	247.21	20%	264.89	20%	264.89	100%	1.575.19
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kepatuhan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	125.00	150.00	100%	161.30	100%	172.89	100%	186.41	100%	198.67	100%	198.67	100%	993.27

KECAMATAN MUARA KAMAN

URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	50%	-	200.00	100%	200.00	100%	200.00	100%	200.00	100%	300.00	100%	300.00	100%	1.200.00
Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	35%	30%	542.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65%	542.77
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	50%	-	200.00	10%	200.00	10%	200.00	10%	300.00	10%	247.23	100%	247.23	100%	1.147.23
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	80%	20%	690.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	690.00
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan dalam kondisi Baik	35%	20%	1.220.00	10%	200.00	10%	200.00	10%	300.00	10%	300.00	5%	300.00	100%	2.420.00

KECAMATAN MUARA MUNTAI

PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KECAMATAN

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	-	50.00	-	53.77	100%	57.63	100%	61.80	100%	66.22	100%	66.22	100%	289.42
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Rata-rata Kinerja Kecamatan Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan yang aktif	100%	100%	40.00	100%	602.19	100%	645.47	100%	692.19	100%	741.69	100%	741.69	100%	3.811.54
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	373.00	100%	1.033.75	100%	1.191.53	100%	1.277.77	100%	1.369.15	100%	1.369.15	100%	6.356.83
Program Pelayanan Administrasi Pelatukan	Cakupan layanan administrasi pelatukan	100%	100%	1.613.79	100%	2.795.88	100%	2.996.83	100%	3.213.73	100%	3.443.57	100%	3.443.57	100%	16.663.80
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	51.70	-	-	100%	-	100%	-	-	-	-	-	100%	51.70
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	50.00	100%	53.77	100%	57.63	100%	61.80	100%	66.22	100%	66.22	100%	289.42
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	286.79	200.00	100%	215.07	100%	230.53	100%	247.21	100%	264.89	100%	264.89	100%	1.444.48
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kepatuhan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	30.00	150.00	100%	161.30	100%	172.89	100%	186.41	100%	198.67	100%	198.67	100%	898.27

KECAMATAN MUARA MUNTAI

URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	40%	-	200.00	15%	270.00	15%	230.00	15%	200.00	-	-	100%	-	100%	900.00
Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	50%	-	200.00	20%	300.00	20%	200.00	10%	-	-	-	100%	-	100%	700.00

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	50%	-	-	100%	200.00	100%	300.00	100%	200.00	100%	200.00	100%	200.00	100%	1.100.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	20%	-	-	100%	200.00	100%	300.00	20%	300.00	20%	200.00	20%	200.00	100%	1.200.00
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	50%	-	-	100%	200.00	100%	300.00	100%	200.00	100%	200.00	100%	200.00	100%	1.100.00

KECAMATAN MUARA WIS

PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KECAMATAN

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	n.a	-	-	100%	10.00	100%	10.75	100%	11.53	100%	12.36	100%	13.24	100%	57.88
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Rata-rata Kinerja Kecamatan	n.a	-	-	100%	335.00	100%	360.24	100%	386.13	100%	414.08	100%	443.69	100%	1.839.14
	Cakupan lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	403.80	100%	825.20	100%	887.37	100%	951.15	100%	1.019.99	100%	1.092.94	100%	5.180.44	
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	107.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	107.40
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	1.344.00	100%	2.350.00	100%	2.527.05	100%	2.708.67	100%	2.904.72	100%	3.112.45	100%	14.946.89	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	42.92	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	42.92	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	11.55	100%	50.00	100%	53.77	100%	57.63	100%	61.80	100%	66.22	100%	300.97	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	622.74	100%	200.00	100%	215.07	100%	230.53	100%	247.21	100%	264.89	100%	1.780.43	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	37.80	100%	150.00	100%	161.30	100%	172.89	100%	185.41	100%	198.67	100%	906.07	

KECAMATAN MUARA WIS

URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	40%	-	-	20%	200.00	20%	200.00	20%	200.00	-	-	-	-	100%	600.00
Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	50%	-	-	100%	200.00	100%	200.00	100%	200.00	100%	400.00	100%	400.00	100%	1.400.00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	60%	-	-	8%	200.00	8%	200.00	8%	200.00	8%	200.00	8%	200.00	100%	1.000.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	60%	-	-	8%	200.00	8%	200.00	8%	200.00	8%	200.00	8%	200.00	100%	1.000.00
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	10%	-	-	18%	200.00	18%	200.00	18%	200.00	18%	200.00	18%	200.00	100%	1.000.00

KECAMATAN SAMBOJA

PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KECAMATAN

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (kecamatan)	100%	-	-	100%	183.60	100%	197.43	100%	211.62	100%	226.94	100%	243.17	100%	1.062.76
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Rata-rata Kinerja Kecamatan Cakupan lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	-	-	100%	250.00	100%	268.83	100%	288.16	100%	306.01	100%	331.11	100%	1.447.12
		100%	10.147.29	100%	12.554.32	100%	13.500.15	100%	14.470.45	100%	15.517.77	100%	16.627.55	100%	16.627.55	82.617.53

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan pelijian dan non pelijian (kecamatan)	100%	100%	183.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	183.60
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.533.08	9.250.00	100%	9.946.88	100%	10.661.80	100%	11.433.46	100%	12.251.15	-	100%	56.076.38
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	150.00	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	100%	150.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	250.00	50.00	100%	53.77	100%	57.63	100%	61.80	100%	66.22	-	100%	539.42
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	809.05	1.617.45	100%	1.739.31	100%	1.864.32	100%	1.993.25	100%	2.142.23	-	100%	10.171.62
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kecapaian waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	93.15	150.00	100%	161.30	100%	172.89	100%	185.41	100%	196.67	-	100%	963.42

KECAMATAN SAMBOJA

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong dan Jembatan/Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	48%	2%	950.00	750.00	10%	750.00	10%	2.200.00	10%	2.420.00	10%	2.662.00	10%	2.928.20	100%	11.910.20
Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	50%	10%	1.080.00	750.00	10%	3.025.00	10%	750.00	5%	750.00	5%	3.774.85			100%	10.129.85
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	60%	5%	180.00	750.00	7%	1.100.00	7%	750.00	7%	1.331.00	7%	1.464.10			100%	5.575.10
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	45%	5%	2.557.00	750.00	10%	2.200.00	10%	2.420.00	10%	2.662.00	10%	2.928.20			100%	13.517.20
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	30%	5%	460.00	750.00	15%	1.650.00	10%	1.815.00	10%	1.996.50	10%	2.196.15			100%	8.867.65

KECAMATAN SANGA-SANGA

PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN : KECAMATAN

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Cakupan pelayanan pelijian dan non pelijian (kecamatan)	100%	-	-	25.00	100%	26.88	100%	28.82	100%	30.90	100%	33.11	-	100%	144.71
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Rata-rata Kinerja Kecamatan Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan yang aktif	100%	-	-	887.50	100%	739.30	100%	792.43	100%	846.78	100%	910.56	-	100%	3.979.57
Program Peningkatan Pelayanan P-udik	Cakupan pelayanan pelijian dan non pelijian (kecamatan)	100%	100%	625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	625.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.353.07	3.200.00	100%	3.441.08	100%	3.868.41	100%	3.955.36	100%	4.238.24	-	100%	19.876.16
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	43.99	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	-	100%	43.99
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	-	50.00	100%	53.77	100%	57.63	100%	61.80	100%	66.22	-	100%	289.42
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	247.24	200.00	100%	215.07	100%	230.53	100%	247.21	100%	264.89	-	100%	1.404.93
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kecapaian waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	52.50	150.00	100%	161.30	100%	172.89	100%	185.41	100%	196.67	-	100%	920.77

KECAMATAN SANGA-SANGA

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong dibangun	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	50%	5%	1.246.04	350.00	5%	350.00	-	-	-	10%	485.52	10%	350.00	100%	2.431.56

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	55%	-	-	15%	350.00	10%	350.00	10%	350.00	-	-	10%	350.00	100%	1.400.00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	40%	5%	89.81	5%	406.98	10%	430.55	10%	505.60	10%	395.00	10%	458.20	100%	2.286.14
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	45%	5%	382.30	10%	350.00	10%	350.00	10%	350.00	10%	350.00	10%	350.00	100%	2.132.30
Program Pembangunan Turap/ laud/Brongjong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Turap/ laud/Brongjong Kecamatan/ Kelurahan dalam kondisi Baik	35%	-	-	15%	350.00	15%	350.00	15%	350.00	10%	350.00	10%	350.00	100%	1.750.00

KECAMATAN SEBULU

PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KECAMATAN

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Cakupan pelayanan perbaikan dan non perbaikan (Kecamatan)	100%	-	-	100%	97.40	100%	104.74	100%	112.27	120.39	120.39	100%	563.80
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/ Kelurahan	Rata-rata Kinerja Kecamatan Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/ Kelurahan yang aktif	100%	-	8.796.07	100%	431.07	100%	463.55	100%	496.86	532.82	570.93	100%	11.291.30
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perbaikan dan non perbaikan (Kecamatan)	100%	287.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	287.79
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	1.158.83	100%	2.150.00	100%	2.311.98	100%	2.478.15	2.657.51	2.657.51	2.847.56	100%	13.604.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	68.60	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	68.60
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	746.21	100%	200.00	100%	215.07	100%	230.53	247.21	247.21	264.89	100%	1.803.90
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	50.50	100%	150.00	100%	161.30	100%	172.89	185.41	185.41	198.67	100%	918.77

KECAMATAN SEBULU

URUSAN WAIB PENERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong dan bangunan	Cakupan Saluran Drainase/ Gorong-gorong yang dibangun	50%	-	-	10%	500.00	10%	500.00	10%	500.00	10%	400.00	10%	400.00	100%	2.300.00
Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	70%	30%	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	125.00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	60%	40%	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	400.00
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	50%	10%	1.800.00	10%	500.00	10%	500.00	10%	500.00	5%	475.00	5%	400.00	100%	4.175.00

KECAMATAN TABANG

PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KECAMATAN

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Cakupan pelayanan perbaikan dan non perbaikan (Kecamatan)	100%	43.80	100%	60.00	100%	64.52	100%	69.16	100%	74.16	100%	79.47	100%	391.11
	Rata-rata kinerja Kecamatan	100%	-	100%	305.00	100%	327.98	100%	351.55	100%	377.00	100%	403.96	100%	1.765.48
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	425.32	100%	425.32	100%	457.36	100%	490.24	100%	525.72	100%	563.31	100%	2.887.27
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perbaikan dan non perbaikan (Kecamatan)	100%	249.15	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	249.15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	1.245.06	100%	2.250.00	100%	2.419.51	100%	2.593.41	100%	2.781.11	100%	2.980.01	100%	14.269.11

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Peningkatan Displin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	50.00	100%	53.77	100%	57.63	100%	61.80	100%	66.22	100%	289.42	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Peralatan Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	1.050.68	200.00	100%	215.07	100%	230.53	100%	247.21	100%	264.89	100%	2.208.37	2.208.37	2.208.37
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kecapaian waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	84.99	150.00	100%	161.30	100%	172.89	100%	186.41	100%	198.67	100%	953.26	953.26	953.26

KECAMATAN TABANG

URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	55%	-	350.00	15%	320.00	15%	330.00	15%	-	-	-	100%	1.000.00	1.000.00	1.000.00
Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	50%	-	500.00	10%	500.00	10%	500.00	10%	400.00	10%	350.00	100%	2.250.00	2.250.00	2.250.00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	40%	-	-	-	500.00	15%	500.00	15%	500.00	15%	350.00	100%	1.850.00	1.850.00	1.850.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	40%	800.00	350.00	10%	350.00	10%	350.00	10%	350.00	10%	500.00	100%	2.700.00	2.700.00	2.700.00
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan dalam kondisi Baik	50%	-	350.00	10%	500.00	10%	500.00	10%	500.00	10%	500.00	10%	350.00	100%	2.200.00

KECAMATAN TENGGARONG

PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KECAMATAN

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	-	86.63	100%	93.16	100%	99.96	100%	107.08	100%	114.74	100%	501.48	501.48	501.48
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Rate/rata Rata Kinerja Kecamatan Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan yang aktif	100%	-	647.65	100%	696.44	100%	746.50	100%	800.52	100%	857.78	100%	3.748.88	3.748.88	3.748.88
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Kemasy/arakatan yang aktif	100%	9.892.95	1.915.17	100%	2.059.46	100%	2.207.48	100%	2.367.24	100%	2.536.54	100%	20.978.84	20.978.84	20.978.84
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasy/arakatan yang aktif	100%	355.20	1.030.20	100%	1.107.81	100%	1.187.44	100%	1.273.38	100%	1.364.45	100%	6.318.48	6.318.48	6.318.48
Program Peningkatan pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	120.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.67	120.67	120.67
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	1.423.50	7.200.00	100%	7.742.44	100%	8.298.92	100%	8.899.56	100%	9.536.03	100%	43.100.44	43.100.44	43.100.44
Program Peningkatan Displin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	198.95	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	198.85	198.85	198.85
Program Peningkatan Sarana dan Peralatan Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	590.00	200.00	100%	215.07	100%	230.53	100%	247.21	100%	264.89	100%	1.747.69	1.747.69	1.747.69
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kecapaian waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	141.33	150.00	100%	161.30	100%	172.89	100%	186.41	100%	198.67	100%	1.009.60	1.009.60	1.009.60

KECAMATAN TENGARONG

URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	45%	5%	200.00	10%	750.00	10%	1.100.00	10%	1.000.00	10%	1.000.00	10%	1.000.00	100%	5.050.00
Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	45%	-	-	15%	750.00	20%	1.100.00	20%	1.000.00	-	-	-	100%	2.950.00	2.950.00

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	50%	-	-	100%	750.00	100%	1,100.00	100%	1,000.00	100%	1,000.00	100%	950.00	100%	4,800.00
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	50%	5%	2,240.00	5%	750.00	10%	1,100.00	10%	1,000.00	10%	1,000.00	10%	1,000.00	100%	7,090.00
Program Pembangunan Turap/ Talud/ Brongjong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Turap/ Talud/ Brongjong Kecamatan/ Kelurahan dalam Kondisi Baik	60%	5%	360.00	5%	750.00	5%	1,100.00	5%	1,000.00	10%	1,000.00	10%	1,000.00	100%	5,210.00
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG																
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KECAMATAN																
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (kecamatan)	100%	-	-	100%	60.00	100%	64.52	100%	69.16	100%	74.16	100%	79.47	100%	347.31
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Rata-rata Kinerja Kecamatan Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (kecamatan)	100%	-	179.06	100%	625.00	100%	672.09	100%	720.39	100%	772.53	100%	827.78	100%	3,617.79
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	1,326.45	100%	2,350.00	100%	2,527.05	100%	2,708.67	100%	2,904.72	100%	3,112.45	100%	14,929.34
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	110.30	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	110.30
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	-	100%	50.00	100%	53.77	100%	57.63	100%	61.80	100%	66.22	100%	289.42
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparat	100%	100%	1,031.27	100%	200.00	100%	215.07	100%	230.53	100%	247.21	100%	264.89	100%	2,188.97
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kepatuhan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	75.00	100%	150.00	100%	161.30	100%	172.89	100%	185.41	100%	196.67	100%	943.27
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG																
URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/ Gorong-gorong yang dibangun	100%	-	-	100%	750.00	100%	750.00	100%	750.00	100%	750.00	100%	700.00	100%	3,700.00
Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	100%	-	-	100%	600.00	100%	600.00	100%	600.00	100%	600.00	100%	550.00	100%	2,950.00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	100%	-	-	100%	900.00	100%	1,300.00	100%	1,300.00	100%	1,200.00	100%	1,100.00	100%	5,800.00
Program Pembangunan Turap/ Talud/ Brongjong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Turap/ Talud/ Brongjong Kecamatan/ Kelurahan dalam Kondisi Baik	100%	100%	200.00	100%	500.00	100%	500.00	100%	500.00	100%	500.00	100%	350.00	100%	2,550.00
KELURAHAN AMBORAWANG DARAT																
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KELURAHAN																
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Lembaga Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/ Kelurahan	100%	100%	15.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	503.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503.43
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparat	100%	100%	130.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.50
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	73.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.50
KELURAHAN AMBORAWANG DARAT																
URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	35%	20%	61.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	61.30
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	35%	20%	145.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	145.62
Program Pembangunan Kecamatan/Kelurahan	Cakupan TurapTaliudBronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	20%	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	150.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan jembatan dalam kondisi baik	37%	4%	270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	270.00
KELURAHAN AMBORAWANG LAUT																
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KELURAHAN																
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	5.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	5.65
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	446.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	446.11
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	479.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	479.72
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	42.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	42.45
KELURAHAN AMBORAWANG LAUT																
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	37%	4%	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	100.00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	35%	20%	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	150.00
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	35%	20%	166.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	166.07
Program Pembangunan Turap/Taliud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Taliud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	20%	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	75.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	60.00
KELURAHAN ARGOSARI																
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KELURAHAN																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	528.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	528.01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	243.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	243.87
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	88.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	88.13
KELURAHAN ARGOSARI																
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	35%	20%	270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	270.00

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	70.00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

KELURAHAN BARU

PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KELURAHAN

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	37%	43.10	4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	925.67	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	348.72	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	8.40	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

KELURAHAN BARU

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	37%	829.35	4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	35%	1.569.64	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	37%	201.06	4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	42%	3.274.07	5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%

KELURAHAN BUKIT BIRU

PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KELURAHAN

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	37%	35.00	4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	334.76	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	110.24	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	15.00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

KELURAHAN BUKIT BIRU

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	37%	205.00	4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	42%	180.00	5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	37%	410.00	4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	35%	510.00	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%

KELURAHAN BUKIT MERDEKA

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	KONDISI AKHIR 2021		
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KELURAHAN											
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	524.88	-	-	-	-	-	100%	524.88
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	416.12	-	-	-	-	-	100%	416.12
KELURAHAN BUKIT MERDEKA											
URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	100%	100%	119.00	-	-	-	-	-	100%	119.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	140.00	-	-	-	-	-	100%	140.00
KELURAHAN DONDANG											
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KELURAHAN											
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Lembaga Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/ Kelurahan yang aktif	37%	4%	15.00	-	-	-	-	-	4%	15.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	486.90	-	-	-	-	-	100%	486.90
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	7.50	-	-	-	-	-	100%	7.50
KELURAHAN DONDANG											
URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	42%	5%	250.20	-	-	-	-	-	5%	250.20
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	37%	4%	425.00	-	-	-	-	-	4%	425.00
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	100%	100%	260.00	-	-	-	-	-	100%	260.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	35%	20%	750.00	-	-	-	-	-	20%	750.00
KELURAHAN HANDIL BARU											
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KELURAHAN											
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Lembaga Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/ Kelurahan yang aktif	35%	20%	37.83	-	-	-	-	-	20%	37.83
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan pelanggan dan non pelanggan di Kelurahan	35%	20%	47.50	-	-	-	-	-	20%	47.50
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	575.07	-	-	-	-	-	100%	575.07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	299.60	-	-	-	-	-	100%	299.60
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	30.00	-	-	-	-	-	100%	30.00
KELURAHAN HANDIL BARU											
URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	35%	20%	335.00	-	-	-	-	-	20%	335.00

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	37%	4%	350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	350.00
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	100%	100%	225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	225.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	525.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	525.00
KELURAHAN HANDIL BARU DARAT																
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KELURAHAN																
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	65.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	65.00
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan pelanggan dan non pelanggan di Kelurahan	100%	100%	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	40.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	531.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	531.89
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	528.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	528.11
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	35%	20%	35.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	35.00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Cakupan lembaga kemasyarakatan yang aktif	42%	5%	25.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	25.70
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	518.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	518.67
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	239.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	239.33
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	35%	20%	35.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	35.41
KELURAHAN JAHAB																
URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	380.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	380.90
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	37%	4%	735.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	735.00
KELURAHAN JAWA																
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KELURAHAN																
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	8.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	533.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	533.34
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	365.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	365.23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	29.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	29.98
KELURAHAN JAWA																
URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	37%	4%	68.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	68.45
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	20%	65.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	65.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	42%	5%	130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	130.00
KELURAHAN KAMPUNG LAMA																
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KELURAHAN																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	496.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	496.50
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	80.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	22.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	22.50
KELURAHAN KAMPUNG LAMA																
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	35%	20%	256.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	256.00
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	35%	20%	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	60.00
Program Pembangunan Turap/ Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	37%	4%	65.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	65.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	220.00
KELURAHAN KARYA MERDEKA																
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KELURAHAN																
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Lembaga Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan yang aktif	35%	20%	9.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	9.30
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan pemilihan dan non pemilihan di Kelurahan	100%	100%	36.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	36.30
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	459.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	459.14
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	174.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	174.12
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	22.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	22.78
KELURAHAN KARYA MERDEKA																
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	37%	4%	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	50.00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	100%	100%	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100.00
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	35%	20%	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	360.00

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	20%	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	250.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	37%	4%	2.178.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	2.178.36
KELURAHAN LOA IPUH																
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KELURAHAN																
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	35%	20%	27.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	27.54
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di Kelurahan	100%	100%	100.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100.51
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	511.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	511.18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	160.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	160.61
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kecapaian waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	23.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	23.00
KELURAHAN LOA IPUH																
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	42%	5%	797.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	797.16
KELURAHAN LOA IPUH DARAT																
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KELURAHAN																
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	404.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	404.89
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di Kelurahan	35%	20%	71.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	71.80
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	531.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	531.62
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	255.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	255.65
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kecapaian waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	56.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	56.04
KELURAHAN LOA IPUH DARAT																
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	37%	4%	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	30.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	42%	5%	404.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	404.45
KELURAHAN LOA TEBU																
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KELURAHAN																
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	46.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	46.30
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	635.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	635.19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	12.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	12.02

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kecepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	33.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	33.69
KELURAHAN LOA TEBU																
URUSAN WAIB PENERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	42%	5%	212.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	212.81
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	37%	4%	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	360.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	35%	20%	1.050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	1.050.00
KELURAHAN MAULU																
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KELURAHAN																
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	35%	20%	71.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	71.48
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan jejalinan dan non jejalinan di Kelurahan	100%	100%	98.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	98.69
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	512.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	512.69
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	162.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	162.70
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kecepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	44.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	44.02
KELURAHAN MAULU																
URUSAN WAIB PENERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	100%	100%	98.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	98.00
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	42%	5%	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	200.00
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	100%	100%	1.262.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.262.42
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	505.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	505.00
KELURAHAN MANGKURAWANG																
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KELURAHAN																
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	42%	5%	47.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	47.25
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	497.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	497.29
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	373.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	373.93
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kecepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	56.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	56.52
KELURAHAN MANGKURAWANG																

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	KONDISI AKHIR 2021		
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	35%	200.00	-	-	-	-	-	-	20%	200.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	425.00	-	-	-	-	-	-	100%	425.00
KELURAHAN MARGOMULYO											
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KELURAHAN											
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	6.75	-	-	-	-	-	-	100%	6.75
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	484.11	-	-	-	-	-	-	100%	484.11
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	290.00	-	-	-	-	-	-	100%	290.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	35.83	-	-	-	-	-	-	100%	35.83
KELURAHAN MARGOMULYO											
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase infrastruktur di Wilayah Kecamatan	37%	78.00	-	-	-	-	-	-	4%	78.00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	35%	50.00	-	-	-	-	-	-	20%	50.00
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang dibangun Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	100%	48.00	-	-	-	-	-	-	100%	48.00
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kondisi Baik	35%	97.32	-	-	-	-	-	-	20%	97.32
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	35%	460.00	-	-	-	-	-	-	20%	460.00
KELURAHAN MELAYU											
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KELURAHAN											
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	42%	91.54	-	-	-	-	-	-	5%	91.54
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di Kelurahan	35%	57.46	-	-	-	-	-	-	20%	57.46
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	723.10	-	-	-	-	-	-	100%	723.10
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	275.12	-	-	-	-	-	-	100%	275.12
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	52.78	-	-	-	-	-	-	100%	52.78
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	80.33	-	-	-	-	-	-	100%	80.33
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	566.12	-	-	-	-	-	-	100%	566.12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	18.08	-	-	-	-	-	-	100%	18.08

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	19.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	19.23
KELURAHAN MUARA JAWA ILIR																
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	42%	5%	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	24.00
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	37%	4%	938.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	938.24
Program Pembangunan Turap/ audebrongong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/brongong Kecamatan/Kelurahan Dalam kondisi Baik	37%	4%	125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	125.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	35%	20%	1.479.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	1.479.00
KELURAHAN MUARA JAWA PESIR																
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN : KELURAHAN																
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Lembaga Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan yang aktif	35%	20%	25.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	25.24
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	515.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	515.31
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	320.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	320.44
Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	26.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	26.50
KELURAHAN MUARA JAWA PESIR																
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	312.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	312.51
KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH																
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN : KELURAHAN																
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Kemasy/akekatan yang aktif	100%	100%	22.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	22.26
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di Kelurahan perkantoran	37%	4%	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	30.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	506.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	506.25
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	122.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	122.49
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	19.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	19.00
KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH																
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	100%	100%	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	300.00

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	20%	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	100.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	42%	5%	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	100.00
KELURAHAN MUARA JAWA ULU																
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KELURAHAN																
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan pelanggan dan non pelanggan di Kelurahan	37%	4%	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	20.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	475.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	475.30
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	50.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	50.04
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kepatatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	30.00
KELURAHAN MUARA JAWA ULU																
URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	37%	4%	84.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	84.00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	100%	100%	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	60.00
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	35%	20%	272.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	272.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	42%	5%	208.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	208.65
KELURAHAN MUARA KEMBANG																
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KELURAHAN																
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Lembaga Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan yang aktif	100%	100%	12.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	12.50
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	447.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	447.73
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	146.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	146.50
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kepatatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	16.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	16.81
KELURAHAN MUARA KEMBANG																
URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	42%	5%	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	75.00
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	20%	130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	130.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	37%	4%	371.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	371.46
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KELURAHAN																

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	419.00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	419.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	611.00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	611.00
KELURAHAN MUARA SEMBILANG																
URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	37%	200.00	4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	200.00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	100%	120.00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	120.00
Program Pembangunan Turap/ Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	100%	100.00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	35%	355.00	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	355.00
KELURAHAN PANAI																
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN : KELURAHAN																
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	37%	57.00	4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	57.00
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di Kelurahan	42%	28.00	5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	28.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	739.15	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	739.15
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	132.05	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	132.05
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kecapaian waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	19.10	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	19.10
KELURAHAN PANAI																
URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Program Pembangunan Turap/ Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	105.00	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	105.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	37%	119.70	4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	119.70
KELURAHAN PENDINGIN																
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN : KELURAHAN																
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	12.00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	12.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	442.26	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	442.26
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	288.44	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	288.44
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kecapaian waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	33.92	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	33.92
KELURAHAN PENDINGIN																
URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	35%	139.80	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	139.80

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	37%	425.00	4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425.00	4%
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	42%	408.57	5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	408.57	5%

KELURAHAN SALOK API DARAT

PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KELURAHAN

Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan pelanggan dan non pelanggan di Kelurahan	37%	6.54	4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.54	4%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	481.04	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481.04	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	231.69	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231.69	100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kepatatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	67.00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.00	100%

KELURAHAN SALOK API DARAT

URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	37%	20.48	4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.48	4%
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	100%	321.50	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321.50	100%
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	35%	71.75	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.75	20%

KELURAHAN SALOK API LAUT

PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KELURAHAN

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Lembaga Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	100%	28.77	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.77	100%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	420.91	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.91	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	74.42	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.42	100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kepatatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	69.94	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.94	100%

KELURAHAN SALOK API LAUT

URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	35%	59.49	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.49	20%
Program Pembangunan Saran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	Cakupan Saruran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	35%	64.87	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.87	20%
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	37%	481.60	4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481.60	4%

KELURAHAN SAMBOJA KUALA

PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KELURAHAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	476.86	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476.86	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	337.26	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337.26	100%

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU		
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	35%	20%	101.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	101.88
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	100%	100%	384.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	384.00
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	37%	4%	275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	275.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	520.00
KEURAHAN SANGA-SANGA DALAM																
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KEURAHAN																
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	37%	4%	12.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	12.50
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	583.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	583.85
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	102.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	102.15
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	39.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	39.50
KEURAHAN SANGA-SANGA DALAM																
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	35%	20%	132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	132.00
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	42%	5%	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	66.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	264.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	264.00
KEURAHAN SANGA-SANGA MUARA																
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KEURAHAN																
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	10.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	10.64
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan penilaian dan non penilaian di Kelurahan	35%	20%	7.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	7.68
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	510.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	510.46
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	129.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	129.36
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	22.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	22.63
KEURAHAN SANGA-SANGA MUARA																
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	42%	5%	319.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	319.15

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	37%	120.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	120.15
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	42%	477.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	477.95
KELURAHAN SANIPAH																
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KELURAHAN																
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	15.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	15.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	502.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	502.91
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	332.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	332.09
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	30.00
KELURAHAN SANIPAH																
URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	37%	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	75.00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	37%	370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	370.00
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	35%	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	450.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	37%	405.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	405.00
KELURAHAN SARUJAYA																
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KELURAHAN																
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	42%	4.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	4.80
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	440.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	440.94
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	357.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	357.51
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	31.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	31.75
KELURAHAN SARUJAYA																
URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	37%	203.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	203.30
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	100%	86.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	86.85
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	74.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	74.86
KELURAHAN SUKARAME																

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	KONDISI AKHIR 2021		
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN : KELURAHAN											
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Cakupan lembaga Kemasyarakatan yang aktif	37%	4%	73.09	-	-	-	-	-	4%	73.09
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di Kelurahan	37%	4%	121.67	-	-	-	-	-	4%	121.67
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	602.02	-	-	-	-	-	100%	602.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	100%	100%	198.26	-	-	-	-	-	100%	198.26
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	124.70	-	-	-	-	-	100%	124.70
KELURAHAN SUKARAME											
URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	100%	100%	360.20	-	-	-	-	-	100%	360.20
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	20%	200.00	-	-	-	-	-	20%	200.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	37%	4%	720.07	-	-	-	-	-	4%	720.07
KELURAHAN SUNGAI MERDEKA											
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN : KELURAHAN											
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Cakupan lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	16.95	-	-	-	-	-	100%	16.95
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di Kelurahan	37%	4%	50.00	-	-	-	-	-	4%	50.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	489.44	-	-	-	-	-	100%	489.44
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	183.38	-	-	-	-	-	100%	183.38
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	10.22	-	-	-	-	-	100%	10.22
KELURAHAN SUNGAI MERDEKA											
URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	35%	20%	50.00	-	-	-	-	-	20%	50.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	37%	4%	400.00	-	-	-	-	-	4%	400.00
KELURAHAN SUNGAI SELUANG											
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN : KELURAHAN											
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	525.07	-	-	-	-	-	100%	525.07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	292.18	-	-	-	-	-	100%	292.18
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	35.75	-	-	-	-	-	100%	35.75
KELURAHAN SUNGAI SELUANG											
URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	20%	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	200.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	447.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	447.00
KEURAHAN TAMAPOLE																
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KELURAHAN																
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	37%	4%	17.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	17.50
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	420.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	420.57
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	264.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	264.83
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kecapaian waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	31.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	31.60
KEURAHAN TAMAPOLE																
URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	42%	5%	78.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	78.63
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	35%	20%	44.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	44.84
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	342.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	342.03
KEURAHAN TANJUNG HARAPAN																
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KELURAHAN																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	415.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	415.18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	463.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	463.30
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kecapaian waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	37%	4%	21.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	21.53
KEURAHAN TANJUNG HARAPAN																
URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	100%	100%	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	75.00
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dicampur/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	37%	4%	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	75.00
Program Pembangunan Turap/ Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	20%	275.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	275.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	200.00
KEURAHAN TELUK DALAM																
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KELURAHAN																

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	42%	5%	13.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	13.50
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	547.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	547.63
Program Peningkatan Sarana dan Peralatan Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	137.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	137.37
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kepatatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	6.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	6.50
KEURAHAN TELUK DALAM																
URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	35%	20%	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	150.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	345.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	345.00
KEURAHAN TELUK PEMEDAS																
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN : KEURAHAN																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	446.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	446.80
Program Peningkatan Sarana dan Peralatan Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	95.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	95.05
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kepatatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	25.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	25.65
KEURAHAN TELUK PEMEDAS																
URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	37%	4%	158.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	158.25
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	37%	4%	79.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	79.00
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	100%	100%	237.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	237.25
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	35%	20%	158.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	158.00
KEURAHAN TIMBAU																
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN : KEURAHAN																
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan	Cakupan lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	98.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	98.38
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di Kelurahan	42%	5%	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	20.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	465.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	465.95
Program Peningkatan Sarana dan Peralatan Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	396.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	396.17
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kepatatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	35%	20%	145.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	145.20
KEURAHAN TIMBAU																
URUSAN WAIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																

URUSAN/ BIDANG/ SKPD / PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR 2021	
			KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU	KINERJA	PAGU
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	37%	4%	310.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	310.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	37%	4%	1.564.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	1.564.30
KELURAHAN WONOTIRTO																
PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KELURAHAN																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	590.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	590.66
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	309.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	309.34
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Program Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Kelurahan	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	35%	20%	260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20%	260.00
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kecamatan/ Kelurahan	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	100%	100%	540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	540.00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	150.00

BAB 9 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini menjelaskan Kerangka Indikator Kinerja yang menjadi ukuran pelaksanaan program pembangunan daerah di berbagai bidang kewenangan

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome/hasil*) dari kegiatan (*output/keluaran*). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berlangsungnya keluaran kegiatan pada jangka menengah (*efek langsung*). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*).

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana Tabel berikut:

TABEL 9.1 INDIKATOR KINERJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2021

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015		KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021		SKPD PENANGGUNG JAWAB
1			URUSAN WAJIB PENDIDIKAN		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
2	Tingkat kepatuhan aparaturnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
3	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
4	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
5	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan	
6	Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partispasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	77.39	80	83	86	90	93	95	95	95	Dinas Pendidikan	
	Pendidikan Dasar Sembilan Tahun											Dinas Pendidikan	
7	APK SD/MI	100.06	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan	
8	APK SMP/MTs	93	94	94.50	95	95.50	96	96.50	96.50	96.50	96.50	Dinas Pendidikan	
9	APM SD/MI	99.65	99.66	99.67	99.68	99.69	99.70	99.71	99.71	99.71	99.71	Dinas Pendidikan	
10	APM SMP/MTs	91.19	91.50	91.75	92	92.25	92.50	92.50	92.75	92.75	92.75	Dinas Pendidikan	
11	Angka Putus Sekolah SD/MI	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.00	0.00	0.00	Dinas Pendidikan	
12	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0.011	0.010	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	Dinas Pendidikan	
13	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	100.02	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan	
14	Rasio Keterseediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI	1 : 202	1 : 221	1 : 240	1 : 259	1 : 278	1 : 297	1 : 320	1 : 320	1 : 320	1 : 320	Dinas Pendidikan	
15	Rasio Keterseediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs	1 : 273	1 : 280	1 : 287	1 : 294	1 : 301	1 : 308	1 : 320	1 : 320	1 : 320	1 : 320	Dinas Pendidikan	
16	Rasio guru/murid SD/MI	1 : 15	1 : 16	1 : 17	1 : 18	1 : 19	1 : 20	1 : 20	1 : 22	1 : 22	1 : 22	Dinas Pendidikan	
17	Rasio guru/murid SMP/MTs	1 : 16	1 : 17	1 : 18	1 : 19	1 : 20	1 : 21	1 : 23	1 : 23	1 : 23	1 : 23	Dinas Pendidikan	
18	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	28.67	30	40	50	60	70	80	80	80	80	Dinas Pendidikan	
19	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	65	67	75	80	85	90	95	95	95	95	Dinas Pendidikan	
20	Satu guru satu rumah	0	0	100 rumah	100 rumah	100 rumah	100 rumah	100	100 rumah	500	500	Dinas Pendidikan	
21	Persentase sekolah yang memiliki Komputer dan Peralatan Bantu mengajar Modern dan Layak	17%	17%	25%	30%	40%	50%	60%	60%	60%	60%	Dinas Pendidikan	
	Pendidikan Menengah											Dinas Pendidikan	
22	APK SMA/MA/SMK	88.98	90.00	90.10	90.15	90.20	90.25	90.30	90.30	90.30	90.30	Dinas Pendidikan	
23	APM SMA/MA/SMK	78.53	78.60	78.65	78.70	78.75	78.80	78.85	78.85	78.85	78.85	Dinas Pendidikan	
24	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	Dinas Pendidikan	
25	Angka Melanjutkan dari SMP/MTsSMA/MA/SMK	99.23	99.25	99.27	99.30	99.32	99.35	99.40	99.40	99.40	99.40	Dinas Pendidikan	
26	Rasio Keterseediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK	1 : 266	1 : 282	1 : 298	1 : 314	1 : 330	1 : 346	1 : 362	1 : 362	1 : 362	1 : 362	Dinas Pendidikan	
27	Rasio guru/murid SMA/MA/SMK	1 : 18	1 : 19	1 : 20	1 : 21	1 : 21	1 : 22	1 : 24	1 : 24	1 : 24	1 : 24	Dinas Pendidikan	
28	Sekolah pendidikan SMA/MA/SMK kondisi bangunan baik	75%	78	86	87	88	89	92	92	92	92	Dinas Pendidikan	
	Pendidikan Luar Biasa											Dinas Pendidikan	
29	Prosentase anak berkebutuhan khusus terlayani pendidikan	25	30	35	40	45	50	55	55	55	55	Dinas Pendidikan	
	Pendidikan Non Formal dan Informal											Dinas Pendidikan	
30	Angka Melek Huruf	99.89	99.90	99.92	99.93	99.94	99.95	99.96	99.96	99.96	99.96	Dinas Pendidikan	
31	Jumlah Desa Pintar dan Perpustakaan Kampung	0	1	3	3	3	4	4	4	4	18	Dinas Pendidikan	
	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan											Dinas Pendidikan	
32	Angka Lulusan SD/MI	99.10	99.11	99.12	99.13	99.14	99.15	99.16	99.16	99.16	99.16	Dinas Pendidikan	
33	Angka Lulusan SMP/MTs	99.98	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	Dinas Pendidikan	
34	Angka Lulusan SMA/MA/SMK	99.54	99.55	99.56	99.57	99.58	99.59	99.60	99.60	99.60	99.60	Dinas Pendidikan	

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMANGGUAN DAERAH		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015		KINERJA							KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021					
35	Rata-rata Nilai UN SDMI	66.17	66.20	66.22	66.25	66.25	66.28	66.30	66.35	Dinas Pendidikan	66.35	Dinas Pendidikan		
36	Rata-rata Nilai UN SMP/MTs	50.90	60	60.12	60.13	60.13	60.14	60.20	65	Dinas Pendidikan	65	Dinas Pendidikan		
37	Rata-rata Nilai UN SMA/MA/SMK	60.90	61	63	65	67	67	68	70	Dinas Pendidikan	70	Dinas Pendidikan		
38	Guru berkualifikasi S1 / D 4	89	91	92	93	94	94	95	96	Dinas Pendidikan	96	Dinas Pendidikan		
39	Guru bersertifikasi Pendidik	55	60	65	70	75	80	85	90	Dinas Pendidikan	85	Dinas Pendidikan		
40	Kepala Sekolah memiliki nomor unik kepala sekolah (NUKS)	< 62	65	70	75	80	80	85	90	Dinas Pendidikan	90	Dinas Pendidikan		
41	Guru penerima tambahan penghasilan pada sekolah terpencil	2.87	3.50	4	5	5	6	7	8	Dinas Pendidikan	8	Dinas Pendidikan		
42	Persentase sekolah di daerah miskin dan terpencil yang memiliki Guru berkualifikasi S1/D4	2	3	4	5	6	6	7	8	Dinas Pendidikan	8	Dinas Pendidikan		
43	Persentase Anak bisa membaca Al-Quran	85	86	87	88	89	89	90	91	Dinas Pendidikan	91	Dinas Pendidikan		
Manajemen Layanan Pendidikan														
44	Sekolah Terakreditasi	92	93	94	95	96	96	97	98	Dinas Pendidikan	98	Dinas Pendidikan		
45	Sistem informasi manajemen pendidikan terpadu (SIMPEDU)	7	9	11	13	15	15	17	18	Dinas Pendidikan	18	Dinas Pendidikan		
46	Persentase Siswa penerima beasiswa KUKAR CERDAS	10	11	12	13	14	15	15	16	Dinas Pendidikan	16	Dinas Pendidikan		
2 URUSAN WAJIB KESEHATAN														
1	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	RSUD Abadi Samboja	
2	Cakupan layanan administrasi perkantoran	40%	45%	50%	55%	60%	60%	70%	80%	80%	80%	80%	RSUD AM. Parikesit	
3	Cakupan layanan administrasi perkantoran	75%	80%	85%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	RSUD Dayaku Raja	
4	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
5	Tingkat kepatuhan aparatur	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	RSUD AM. Parikesit	
6	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	RSUD Dayaku Raja	
7	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
8	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60%	65%	70%	75%	80%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	RSUD Abadi Samboja	
9	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50%	75%	75%	80%	80%	80%	85%	90%	90%	90%	90%	RSUD AM. Parikesit	
10	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40	50	60	70	80	80	90	100	100	100	100	RSUD Dayaku Raja	
11	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35%	45%	55%	65%	75%	75%	85%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
12	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	RSUD Abadi Samboja	
13	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	RSUD Dayaku Raja	
14	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	70%	70%	75%	80%	80%	85%	90%	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	
15	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	RSUD Abadi Samboja	
16	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	RSUD AM. Parikesit	
17	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	RSUD Dayaku Raja	
18	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
19	Indeks kepuasan masyarakat	-	> 80	> 80	> 80	> 80	> 90	> 90	> 90	> 90	> 90	> 90	Dinas Kesehatan	
20	Persentase perawatan gizi balia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
21	Persentase desakelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyidikan < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
22	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan lainnya yang terakreditasi	0%	15.625	41	68	92	92	95	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
23	RSUD baru yang dibangun	3	0	1	1								5 Dinas Kesehatan	

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
24	Persentase penggunaan obat dan perawatan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
25	Jaminan Kesehatan Penduduk Kategori Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
26	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang melakukan pengawasan obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
27	Persentase Desa Siaga Adir (Desa Sehat Mandiri)	65%	68.00%	7.1%	7.4%	7.7%	80%	80%	Dinas Kesehatan
28	Persentase desakeurahan yang melakukan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	9.70%	21.50%	40%	53%	62%	71%	80%	> 80 Dinas Kesehatan
29	Persentase latianan kawasan sehat	0%	33.30%	50%	67%	88%	100%	100%	Dinas Kesehatan
30	Persentase pemenuhan kasus penyakit menular (parameter yang diukur adalah penderita baru TB Paru BTA (+)	52%	56%	58%	60%	62%	65%	65%	Dinas Kesehatan
31	Persentase desakeurahan Universal Child Immunization (UCI)	74%	75%	80%	85%	90%	95%	95%	Dinas Kesehatan
32	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang melaksanakan pelayanan pencegahan dan penanganan Penyakit Tidak Menular (PTM)	74%	75%	80%	85%	90%	95%	95%	Dinas Kesehatan
33	Persentase Cakupan Peranangan KLB	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
34	Persentase Kunjungan Ibu Hamil (K4)	85%	87%	89%	91%	93%	95%	97%	Dinas Kesehatan
35	Persentase pelayanan Ibu Nitas	87%	88%	90%	92%	93%	95%	95%	Dinas Kesehatan
36	Persentase pelayanan bayi	80%	82%	84%	86%	88%	90%	90%	Dinas Kesehatan
37	Persentase Peserta KB Aktif	56%	59%	62%	64%	67%	70%	70%	Dinas Kesehatan
38	Persentase Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDIDTK)	0%	53.4%	62.8%	77.2%	81.6%	90%	90%	Dinas Kesehatan
39	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan jaringannya yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	30%	30%	40%	55%	60%	70%	80%	Dinas Kesehatan
40	Persentase Cakupan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang melaksanakan pelayanan yang terstandarisasi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
41	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan UPTD yang menerapkan sistem manajemen mutu	44%	53%	65%	77%	89%	100%	100%	Dinas Kesehatan
42	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)	0%	63%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
43	Persentase pemberian tunjangan penghasilan tenaga kesehatan di daerah terpencil dan pedalanaan	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
44	Cakupan unit yang telah menerapkan Standar Pelayanan	50	75	80	100	100	100	100	RSUD AM, Parikesit
45	Cakupan unit yang telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	≤ 8 Menit	≤ 8 Menit	≤ 8 Menit	≤ 8 Menit	≤ 8 Menit	≤ 8 Menit	≤ 8 Menit	RSUD AM, Parikesit
46	Cakupan Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk setiap Proses Bisnis	10	80	80	90	95	100	100	100 RSUD AM, Parikesit
47	Cakupan Manajemen dan Penggunaan Obat (MPO)	25	80	80	80	80	80	80	80 RSUD AM, Parikesit
48	Cakupan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) 80%	25	80	80	80	80	80	80	80 RSUD AM, Parikesit
49	Cakupan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MKK) 80%	25	80	80	80	80	80	80	80 RSUD AM, Parikesit
50	Cakupan Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI) 80%	25	80	80	80	80	80	80	80 RSUD AM, Parikesit

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
51 Cakupan Akses ke Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK) 80%	25	80	80	80	80	80	80	80	RSUD AM, Parikrest
52 Cakupan Asesmen Pasien (AP) 80%	25	80	80	80	80	80	80	80	RSUD AM, Parikrest
53 Cakupan Pelayanan Pasien (PP) 80%	25	80	80	80	80	80	80	80	RSUD AM, Parikrest
54 Cakupan Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB) 80%	25	80	80	80	80	80	80	80	RSUD AM, Parikrest
55 Cakupan Hak Pasien dan Keluarga (HPK) 80%	25	80	80	80	80	80	80	80	RSUD AM, Parikrest
56 Cakupan Pendidikan pasien dan keluarga (PPK) 80%	25	80	80	80	80	80	80	80	RSUD AM, Parikrest
57 Cakupan Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) 80%	25	80	80	80	80	80	80	80	RSUD AM, Parikrest
58 Cakupan Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) 80%	25	80	80	80	80	80	80	80	RSUD AM, Parikrest
59 Cakupan Sasaran Program MDGs 80%	25	80	80	80	80	80	80	80	RSUD AM, Parikrest
60 Dokumen Renstra, RSB dan RBA/Renja yang SMART (Specific-Measurable-Achievable-Relevant-Time), definit dan tepat waktu	-	Renstra, RSB dan RBA/Renja	RBA/Renja	RBA/Renja	RBA/Renja	RBA/Renja	Renstra, RSB dan RBA/Renja	80 RSUD AM, Parikrest	
61 Rasio Kas (Cash Ratio) sebesar 241% s/d 300%	180%	241% s/d 300%	241% s/d 300%	241% s/d 300%	241% s/d 300%	241% s/d 300%	241% s/d 300%	RSUD AM, Parikrest	
62 Rasio Lancar (Current Ratio) sebesar 481% s/d 600%	360%	481% s/d 600%	481% s/d 600%	481% s/d 600%	481% s/d 600%	481% s/d 600%	481% s/d 600%	RSUD AM, Parikrest	
63 Periode Penagihan Piutang (Collection Period) kurang dari 30 hari	59 Hari	< 30 hari	< 30 hari	< 30 hari	< 30 hari	< 30 hari	< 30 hari	RSUD AM, Parikrest	
64 Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) sebanyak 30 s/d 35 kali	15 kali	30 s/d 35 kali	30 s/d 35 kali	30 s/d 35 kali	30 s/d 35 kali	30 s/d 35 kali	30 s/d 35 kali	RSUD AM, Parikrest	
65 Imbalan Ekuitas (Return on Equity) sebesar ≥ 8%	3%	≥ 8%	≥ 8%	≥ 8%	≥ 8%	≥ 8%	≥ 8%	RSUD AM, Parikrest	
66 Rasio Subsidi Biaya Pasien sebesar 11% s/d 15%	0%	11% s/d 15%	11% s/d 15%	11% s/d 15%	11% s/d 15%	11% s/d 15%	11% s/d 15%	RSUD AM, Parikrest	
67 Opini laporan keuangan BLUD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	RSUD AM, Parikrest	
68 Kinerja BLUD Baik	A	AA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	RSUD AM, Parikrest	
69 Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	RSUD AM, Parikrest	
70 Cakupan Pengelobahan Aset	50%	75%	80%	85%	90%	95%	95%	RSUD AM, Parikrest	
71 Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset TurnOver) sebesar > 20%	10%	> 20%	> 20%	> 20%	> 20%	> 20%	> 20%	RSUD AM, Parikrest	
72 Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset) sebesar > 6%	2.5%	>6%	>6%	>6%	>6%	>6%	>6%	RSUD AM, Parikrest	
73 Capaian Akuntabilitas Baik	CUKUP BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	RSUD AM, Parikrest	
74 Cakupan uraian tugas yang telah dimutakhirkan	30	100	100	100	100	100	100	RSUD AM, Parikrest	
75 Sinkronnya kebijakan antar unit	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	RSUD AM, Parikrest	
76 Cakupan modul SIM-RS,yang diimplementasi	40	50	80	90	90	100	100	RSUD AM, Parikrest	
77 Rasio Pendapatan BLUD terhadap Biaya Operasional sebesar > 65%	35	35	40	45	50	>65	>65	RSUD AM, Parikrest	
78 Persentase Tingkat kemandirian Anggaran rumah sakit diluar biaya investasi dan belanja pegawai	0	0	0	0	0	0	0	RSUD AM, Parikrest	
79 Kesiapan menuju rumah sakit kelas B pendidikan	50	60	80	85	90	100	100	RSUD AM, Parikrest	
80 Peningkatan pengaduan/komplain > 70%	50	70	70	70	70	70	70	RSUD AM, Parikrest	
81 Persentase Kepuasan Pasien	79	80	82	82	82	82	82	RSUD AM, Parikrest	
82 Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat jalan sebesar ≥ 1,1	0	10	10	10	10	10	10	RSUD AM, Parikrest	
83 Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat darurat sebesar ≥ 1,1	0	10	10	10	10	10	10	RSUD AM, Parikrest	
84 Pertumbuhan hari perawatan rawat inap sebesar ≥ 1,1	0	10	10	10	10	10	10	RSUD AM, Parikrest	
85 pertumbuhan pemeriksaan radiologi sebesar ≥ 1,1	0	10	10	10	10	10	10	RSUD AM, Parikrest	

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
86	pertumbuhan pemeriksaan laboratorium sebesar $\geq 1,1$	0	10	10	10	10	10	60	RSUD AM, Parikesit	
87	Pertumbuhan operasi sebesar $\geq 1,1$	0	10	10	10	10	10	60	RSUD AM, Parikesit	
88	Pertumbuhan rehab medik sebesar $\geq 1,1$	0	10	10	10	10	10	60	RSUD AM, Parikesit	
89	Cakupan penanggulangan masalah kesehatan pada masyarakat tanpa jaminan	-	-	80%	85%	85%	85%	85%	RSUD AM, Parikesit	
90	Cakupan kunjungan pasien dengan COB	0%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	RSUD AM, Parikesit	
91	Sarana pelayanan kesehatan yang dibina	-	3 FKTP	4 FKTP	5 FKTP	6 FKTP	7 FKTP	8 FKTP	8 FKTP RSUD AM, Parikesit	
92	Terpenuhiya sarana dan prasarana rumah sakit	10	20	30	50	70	85	100	100 RSUD AM, Parikesit	
93	Terpelihatanya sarana dan prasarana rumah sakit	80	80	100	100	100	100	100	100 RSUD AM, Parikesit	
94	Cakupan bayi baru lahir sehat yang mendapat ASI Eksklusif	-	100	100	100	100	100	100	100 RSUD AM, Parikesit	
95	Angka kematian ibu di rumah sakit $< 1\%$	$<2\%$	$<2\%$	$<2\%$	$<1\%$	$<1\%$	$<1\%$	$<1\%$	$<1\%$ RSUD AM, Parikesit	
96	Cakupan Karyawan RS risiko tinggi yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	100	100	100	100	100	100	100	100 RSUD AM, Parikesit	
97	Pelayanan General Check Up pada Pemangku Kepentingan (Bupati dan Wabup, Anggota DPRD dan Keluaga)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% RSUD AM, Parikesit	
98	Rumah Sakit Umum Daerah yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% RSUD Abadi Samboja	
99	Tingkat Kepatuhan terhadap SOP	60	65	70	75	80	90	100	100 RSUD Abadi Samboja	
100	Rumah Sakit Umum Daerah yang melaksanakan Sistem Manajemen Mutu (ISO : 9000 : 2008)	100	100	100	100	100	100	100	100 RSUD Abadi Samboja	
101	Tingkat kepuasan Pasien	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100% RSUD Abadi Samboja	
102	Keladain Mal Praktek	-	-	-	-	-	-	-	- RSUD Abadi Samboja	
103	Pencapaian Keselamatan Pasien (Patient Safety)	50	60	70	80	90	100	100	100 RSUD Abadi Samboja	
104	Cakupan Peningkatan Pengabdian Rumah Sakit	90	100	100	100	100	100	100	100 RSUD Abadi Samboja	
105	Persentase peralatan sesuai standar rumah sakit kelas C	60%	65%	75%	80%	90%	100%	3,7	3,7 RSUD Abadi Samboja	
106	Persentase sarana dan prasarana yang sesuai standar dan dipelihara	71,52	75%	77,5	80%	82,5	85%	87,5	87,5 RSUD Abadi Samboja	
107	prosentasi sarana dan prasarana yang sesuai standar dan dipelihara	85	90	95	100	100	100	100	100 RSUD Abadi Samboja	
108	Cakupan Pelayanan (Penemuan dan penanganan) HIV AIDS, TB Paru, dan Malaria	60%	65%	75%	85%	90%	95%	100%	100% RSUD Abadi Samboja	
109	Persentase kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung	1,2	1	0,8	0,6	0,4	0,2	0	0 RSUD Abadi Samboja	
110	prosentasi pencegahan dan penularan penyakit bersumber binatang	70	80	90	100	100	100	100	100 RSUD Abadi Samboja	
111	Rumah Sakit Umum Daerah yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS)	0	0	50%	60%	70%	80%	100%	100% RSUD Dayaku Raja	
112	Tingkat kepuasan Pasien	0%	0%	60%	70%	80%	90%	100%	100% RSUD Dayaku Raja	
113	Keladain Mal Praktek	-	-	-	-	-	-	-	- RSUD Dayaku Raja	
114	Pencapaian Keselamatan Pasien (Patient Safety)	-	-	70%	80%	90%	100%	100%	100% RSUD Dayaku Raja	
115	Cakupan Peningkatan Pengabdian Rumah Sakit	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100% RSUD Dayaku Raja	
116	Persentase peralatan sesuai standar rumah sakit kelas C	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100% RSUD Dayaku Raja	
117	Persentase sarana dan prasarana yang sesuai standar dan dipelihara	30%	50%	60%	80%	90%	100%	100%	100% RSUD Dayaku Raja	
118	Persentase pelayanan ibu	0	0	75%	80%	90%	100%	100%	100% RSUD Dayaku Raja	
119	Tersedianya logistik RS tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100% RSUD Dayaku Raja	

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
2016	2017	2018	2019	2020	2021				
120	Persentase Karawan RS yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	-	-	-	-	-	-	-	- RSUD Dayaku Raja
121	Cakupan customer yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	-	-	-	-	-	-	-	- RSUD Dayaku Raja
122	Tersedianya pelayanan sesuai RS kelas C	50%	50%	80%	90%	100%	100%	100%	100% RSUD Dayaku Raja
3 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100% Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
2	Cakupan layanan administrasi perkantoran	94.44%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100% Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
3	Tingkat keputihan aparatur	100%	0%	100 %	100 %	0	0	0	100% Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
4	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
5	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
6	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
7	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	99.40 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
8	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
9	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95.60 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
10	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95.60 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
11	Lapangan olah raga	n.a	1 Lapangan	-	-	-	-	-	1 Lapangan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
12	Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	n.a	70.98%	85.71%	90.58%	96.79%	100%	100%	100% Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
13	Cakupan bangunan kepariwisataan dalam kondisi baik	n.a	17.99	17.99	17.99	17.99	17.99	17.99	17.99 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
14	Jumlah Pasar yang dibangun	2 Pasar	3 Pasar	-	-	-	-	-	3 Pasar Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
15	Cakupan sumber daya air yang di kelola			50.00%	66.67%	83.33%	93.33%	100%	100% Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
16	Persentase terhubungnya antar wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara	82%	-	85.6%	89.2%	92.8%	96.4%	100%	100% Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
17	Parang Jalan Kolektor yang dibangun (km)	1,792.60	0	80	80	80	80	80	2,193 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
18	Parang Jalan menuju Pelembutan Perikanan (Km)	0	0	0.2	1.5	0	0	0	2 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
19	Cakupan jalan dan jembatan dalam kondisi baik	67.1%	67.1%	73.6%	80.2%	86.8%	93.4%	100%	100 % Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
20	Cakupan jalan dan jembatan kepariwisataan dalam kondisi baik	na	na	20%	40%	60%	80%	100%	100 % Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
21	Cakupan jalan dan jembatan pendidikan dalam kondisi baik	na	na	20%	40%	60%	80%	100%	100 % Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
22	Cakupan jalan dan jembatan kesehatan dalam kondisi baik	0	0	100%	0	0	-	-	100 % Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
23	Cakupan jalan dan jembatan industri dalam kondisi baik	0	0	0	0.5	100%	-	-	100 % Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
24	Persentase jalan dan jembatan yang dipelihara	84%	84%	87%	91%	94%	97%	100%	100 % Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
25	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kehutanan	0	-	60%	80%	100%	-	-	100 % Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
26	Persentase jaringan Irigasi Kondisi Baik	62,49%	66,93%					66,93%	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	
27	Cakupan sumber daya air yang di kelola	40%	0%					0	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	
28	Cakupan penanganan banjir	15,00%	18,20%	22,00%	33,00%	44,00%	56,00%	56,00%	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	
29	Cakupan drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik		20,00%	22,00%	33,00%	44,00%	56,00%	56,00%	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	
30	Cakupan Turap/Talud/Bronjong dalam kondisi baik	40,00%		41,40%	44,70%	48,90%	53,10%	53,87%	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	
31	Persentase ketersediaan bahan untuk jalan dan jembatan	n.a	21,20%	45,76%	100,00%			100 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	
32	Cakupan Jalan dan jembatan yang di inspeksi		0	0,1656	0,4056	0,6456	0,8456	100 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	
33	Cakupan bahan kebijakan perencanaan kepelaksanaan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
34	Cakupan jalan lingkungan dan jembatan dalam kondisi baik	52,91%	55,41%	59,91	66,41	76,91	85,41	93,91	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
35	Persentase jalan yang dipelihara	47,10%	40,09%	33,09%	26,09%	19,09%	12,09%	5,09%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
36	Persentase penanganan sampah	27%	29%	45,30	63,55	81,80	100%	-	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
37	Jumlah Kecamatan yang memiliki RDTR	0%	0%	2 Kecamatan	17 Kecamatan	18 Kecamatan	18 Kecamatan	18 Kecamatan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
38	Jumlah Kecamatan yang memanfaatkan RDTR	0%	0%	2 Kecamatan	17 Kecamatan	18 Kecamatan	18 Kecamatan	18 Kecamatan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
39	Ruang publik yang berubah peruntukannya	2 kawasan	2 kawasan						Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
40	Cakupan drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik	52,91%	55,41%	59,91%	68,41%	76,91%	85,41%	93,91%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
41	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	n.a	52						Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
42	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	n.a	15						Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
43	Cakupan Turap/talud/bronjong dalam kondisi baik	0,471	40,09%	33,09%	26,09%	0,1909	0,1209	5,09%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
44	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	100	224		0	0	0	0	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
45	Persentase pemenuhan Ruang Terbuka Hijau terhadap luas perkotaan	87,17	87,67%	89,74%	92,22%	94,65%	97,30%	100%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
46	Kecukupan sarana perkantoran Pemerintah Daerah	20,87%	23,05%	26,17%	29,28%	32,39%	35,51%	38,62%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
47	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	40%	-	20%	20%	20%	-	-	Kecamatan Muara Wis	
48	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	n.a	-	0%	-	95%	95%	-	Kecamatan Kota Bangun	
49	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	45%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	Kecamatan Tenggaraong	
50	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	50%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	Kecamatan Kenihan	
51	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	70%	-	-	-	15%	-	15%	Kecamatan Kembang Janggut	
52	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	50%	-	10%	10%	10%	10%	10%	Kecamatan Muara Kaman	
53	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	48%	2%	10%	10%	10%	10%	10%	Kecamatan Sanjoja	
54	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	50%	5%	5%	-	-	10%	10%	Kecamatan Sanga-Sanga	

55	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	40%	KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
56	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	50%	-	10%	10%	10%	10%	10%	100%	Kecamatan Muara Muntai
57	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	46%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Kecamatan Loa Janan
58	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	60%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Kecamatan Loa Kulu
59	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	40%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	Kecamatan Muara Badak
60	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	55%	-	15%	15%	15%	-	-	100%	Kecamatan Tabang
61	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	40%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	Kecamatan Muara Jawa
62	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Tenggarong
63	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	50%	-	10%	10%	10%	10%	10%	100%	Kecamatan Anggana Seberang
64	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	50%	50%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	Kecamatan Marangkayu
65	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	50%	-	10%	10%	10%	10%	10%	100%	Kecamatan Muara Wis
66	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	n.a	95%	95%	95%	-	-	-	95%	Kecamatan Kota Bangun
67	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	45%	-	15%	20%	20%	-	-	100%	Kecamatan Tenggarong
68	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	50%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	Kecamatan Kenohan
69	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	35%	30%	-	-	-	-	-	65%	Kecamatan Muara Kaman
70	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	50%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	100%	Kecamatan Sambaja
71	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	55%	-	15%	10%	10%	10%	10%	100%	Kecamatan Sanga-Sanga
72	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	50%	-	20%	20%	10%	-	-	100%	Kecamatan Muara Muntai
73	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	35%	15%	35%	15%	-	-	-	100%	Kecamatan Marangkayu
74	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	70%	30%	-	-	-	-	-	100%	Kecamatan Sebulu
75	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	40%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	Kecamatan Loa Janan
76	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	50%	10%	20%	10%	10%	-	-	100%	Kecamatan Loa Kulu
77	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	40%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	Kecamatan Muara Badak
78	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	50%	-	10%	10%	10%	10%	10%	100%	Kecamatan Tabang
79	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	100%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	Kecamatan Muara Jawa
80	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Tenggarong Seberang
81	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	60%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	100%	Kecamatan Anggana
82	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	60%	4%	-	-	12%	12%	12%	100%	Kecamatan Kembang Janggut
83	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	60%	-	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Kecamatan Muara Wis
84	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	n.a	-	95%	95%	95%	-	-	95%	Kecamatan Kota Bangun
85	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	50%	-	10%	10%	10%	10%	10%	100%	Kecamatan Tenggarong
86	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	50%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	Kecamatan Kenohan
87	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	80%	-	4%	4%	4%	4%	4%	100%	Kecamatan Kembang Janggut
88	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	50%	-	10%	10%	10%	10%	10%	100%	Kecamatan Muara Kaman
89	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	60%	5%	7%	7%	7%	7%	7%	100%	Kecamatan Sambaja
90	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	40%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	Kecamatan Sanga-Sanga
91	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	50%	-	10%	10%	10%	10%	10%	100%	Kecamatan Muara Muntai
92	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	40%	5%	15%	10%	10%	10%	10%	100%	Kecamatan Marangkayu
93	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	60%	40%	-	-	-	-	-	100%	Kecamatan Sebulu
94	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	45%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	Kecamatan Loa Kulu
95	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	60%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Kecamatan Muara Badak
96	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	40%	-	-	15%	15%	15%	15%	100%	Kecamatan Tabang
97	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	40%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	Kecamatan Muara Jawa

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
98	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	100%	-					100%	Kecamatan Tenggarong Seberang	
99	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	40%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	Kecamatan Anggana	
100	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	60%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Kecamatan Muara Wis	
101	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	n.a	95%	95%	95%	95%	-	95%	Kecamatan Kota Bangun	
102	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	50%	5%	10%	10%	10%	10%	100%	Kecamatan Tenggarong	
103	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	50%	0%	14%	9%	9%	9%	100%	Kecamatan Kenohlan	
104	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	80%	5%	5%	5%	5%	5%	100%	Kecamatan Kembarang Janggut	
105	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	80%	20%	-	-	-	-	100%	Kecamatan Muara Kaman	
106	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	45%	5%	10%	10%	10%	10%	100%	Kecamatan Sambaja	
107	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	45%	5%	10%	10%	10%	10%	100%	Kecamatan Sanga-Sanga	
108	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	20%	-	10%	20%	20%	20%	100%	Kecamatan Muara Murai	
109	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	45%	5%	10%	10%	10%	10%	100%	Kecamatan Marangkayu	
110	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	50%	10%	10%	10%	5%	5%	100%	Kecamatan Sebulu	
111	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	46%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Kecamatan Loa Jahan	
112	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	60%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Kecamatan Loa Kulu	
113	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	40%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	Kecamatan Muara Badak	
114	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	40%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	Kecamatan Tabang	
115	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	45%	5%	10%	10%	10%	10%	100%	Kecamatan Arangana	
116	Cakupan Turap/Traud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	10%	-	18%	18%	18%	18%	100%	Kecamatan Muara Wis	
117	Cakupan Turap/Traud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	60%	5%	5%	5%	10%	10%	100%	Kecamatan Tenggarong	
118	Cakupan Turap/Traud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	50%	0%	10%	10%	10%	10%	100%	Kecamatan Kenohlan	
119	Cakupan Turap/Traud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	20%	10%	10%	10%	5%	100%	Kecamatan Muara Kaman	
120	Cakupan Turap/Traud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	30%	5%	15%	10%	10%	10%	100%	Kecamatan Sambaja	
121	Cakupan Turap/Traud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	-	15%	15%	10%	10%	100%	Kecamatan Sanga-Sanga	
122	Cakupan Turap/Traud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	50%	-	10%	10%	10%	10%	100%	Kecamatan Muara Murai	
123	Cakupan Turap/Traud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	50%	50%	-	-	-	-	100%	Kecamatan Marangkayu	
124	Cakupan Turap/Traud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	55%	9%	9%	9%	9%	9%	100%	Kecamatan Loa Jahan	
125	Cakupan Turap/Traud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	50%	-	10%	10%	10%	10%	100%	Kecamatan Loa Kulu	
126	Cakupan Turap/Traud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	50%	-	10%	10%	10%	10%	100%	Kecamatan Muara Badak	
127	Cakupan Turap/Traud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	50%	-	10%	10%	10%	10%	100%	Kecamatan Tabang	

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA							KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
128	Cakupan Turap/Tlaud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	45%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	Kecamatan Muara Jawa
129	Cakupan Turap/Tlaud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Tenggalong
130	Cakupan Turap/Tlaud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	40%	-	15%	15%	10%	10%	10%	10%	100%	Seberang Kecamatan Anggana
131	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	37%	4%	-	-	-	-	-	-	4%	Kelurahan Sarigaya
132	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	42%	5%	-	-	-	-	-	-	5%	Kelurahan Tamapole
133	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	37%	4%	-	-	-	-	-	-	4%	Kelurahan Muara Jawa Ulu
134	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	42%	5%	-	-	-	-	-	-	5%	Kelurahan Dondang
135	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	35%	20%	-	-	-	-	-	-	20%	Kelurahan Teluk Dalam
136	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	37%	4%	-	-	-	-	-	-	4%	Kelurahan Bukit Baru
137	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	37%	4%	-	-	-	-	-	-	4%	Kelurahan Baru
138	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	35%	20%	-	-	-	-	-	-	20%	Kelurahan Samboja Kuala
139	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	37%	4%	-	-	-	-	-	-	4%	Kelurahan Teluk Pemedas
140	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	37%	4%	-	-	-	-	-	-	4%	Kelurahan Sambah
141	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	37%	4%	-	-	-	-	-	-	4%	Kelurahan Kaya Merdeka
142	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	37%	4%	-	-	-	-	-	-	4%	Kelurahan Salak Api Darat
143	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	37%	4%	-	-	-	-	-	-	4%	Kelurahan Mangunju
144	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	35%	20%	-	-	-	-	-	-	20%	Kelurahan Handil Baru
145	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	37%	4%	-	-	-	-	-	-	4%	Kelurahan Muara Sembilang
146	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	35%	20%	-	-	-	-	-	-	20%	Kelurahan Wonotito
147	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	35%	20%	-	-	-	-	-	-	20%	Kelurahan Ambrawang Darat
148	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	35%	20%	-	-	-	-	-	-	20%	Kelurahan Salak Api Laut
149	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	37%	4%	-	-	-	-	-	-	4%	Kelurahan Ambrawang Laut
150	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	35%	20%	-	-	-	-	-	-	20%	Kelurahan Pendangin
151	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	35%	20%	-	-	-	-	-	-	20%	Kelurahan Sanga-Sanga Dalam
152	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	42%	5%	-	-	-	-	-	-	5%	Kelurahan Muara Kembarang
153	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	35%	20%	-	-	-	-	-	-	20%	Kelurahan Tamapole
154	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	42%	5%	-	-	-	-	-	-	5%	Kelurahan Muara Jawa Ilir
155	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	100%	100%	-	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Muara Jawa Ulu
156	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	37%	4%	-	-	-	-	-	-	4%	Kelurahan Dondang
157	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	100%	100%	-	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Mahuli
158	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	42%	5%	-	-	-	-	-	-	5%	Kelurahan Bukit Baru
159	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	35%	20%	-	-	-	-	-	-	20%	Kelurahan Mangkurawang
160	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	100%	100%	-	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Samboja Kuala
161	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	37%	4%	-	-	-	-	-	-	4%	Kelurahan Teluk Pemedas
162	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	37%	4%	-	-	-	-	-	-	4%	Kelurahan Sangah
163	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	35%	20%	-	-	-	-	-	-	20%	Kelurahan Sungai Merdeka
164	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	100%	100%	-	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Tanjung Harapan
165	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	100%	100%	-	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Kaya Merdeka
166	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	35%	20%	-	-	-	-	-	-	20%	Kelurahan Mangunju
167	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	100%	100%	-	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Muara Sembilang
168	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	35%	20%	-	-	-	-	-	-	20%	Kelurahan Kampung Lama
169	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	35%	20%	-	-	-	-	-	-	20%	Kelurahan Ambrawang Darat
170	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	35%	20%	-	-	-	-	-	-	20%	Kelurahan Ambrawang Laut
171	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	37%	4%	-	-	-	-	-	-	4%	Kelurahan Jawa
172	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	100%	100%	-	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Sarigaya
173	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	42%	5%	-	-	-	-	-	-	5%	Kelurahan Sanga-Sanga Muara

174	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	100%	KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
175	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	37%	4%	-	-	-	-	-	100%	Keleurahan Muara Jawa Tengah
176	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	35%	20%	-	-	-	-	-	4%	Keleurahan Muara Jawa Ilir
177	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	100%	100%	-	-	-	-	-	20%	Keleurahan Muara Jawa Ulu
178	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	42%	5%	-	-	-	-	-	100%	Keleurahan Dondang
179	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	35%	20%	-	-	-	-	-	5%	Keleurahan Mahulu
180	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	37%	4%	-	-	-	-	-	20%	Keleurahan Baru
181	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	42%	5%	-	-	-	-	-	4%	Keleurahan Timbau
182	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	100%	100%	-	-	-	-	-	5%	Keleurahan Loa Tebu
183	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	35%	20%	-	-	-	-	-	100%	Keleurahan Sukrame
184	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	37%	4%	-	-	-	-	-	20%	Keleurahan Angosari
185	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	100%	100%	-	-	-	-	-	20%	Keleurahan Samboja Kuala
186	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	35%	20%	-	-	-	-	-	100%	Keleurahan Teluk Pemedas
187	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	37%	4%	-	-	-	-	-	20%	Keleurahan Sanpahn
188	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	35%	20%	-	-	-	-	-	4%	Keleurahan Tanjung Harapan
189	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	100%	100%	-	-	-	-	-	20%	Keleurahan Karya Merdeka
190	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	37%	4%	-	-	-	-	-	100%	Keleurahan Marjomulyo
191	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	35%	20%	-	-	-	-	-	4%	Keleurahan Handil Baru
192	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	100%	100%	-	-	-	-	-	20%	Keleurahan Kampung Lama
193	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keleurahan Wonodito
194	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	35%	20%	-	-	-	-	-	100%	Keleurahan Bukit Merdeka
195	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	35%	20%	-	-	-	-	-	20%	Keleurahan Saik Apl Laut
196	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	20%	-	-	-	-	-	20%	Keleurahan Ambrawang Laut
197	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	37%	4%	-	-	-	-	-	20%	Keleurahan Jawa
198	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	20%	-	-	-	-	-	4%	Keleurahan Pendangin
199	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	37%	4%	-	-	-	-	-	20%	Keleurahan Saripya
200	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	42%	5%	-	-	-	-	-	4%	Keleurahan Sanga-Sanga Muara
201	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	20%	-	-	-	-	-	5%	Keleurahan Sanga-Sanga Dalam
202	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	20%	-	-	-	-	-	20%	Keleurahan Muara Kembar
203	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	37%	4%	-	-	-	-	-	20%	Keleurahan Muara Jawa Tengah
									4%	Keleurahan Muara Jawa Ilir

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
204	Cakupan Turap/Traud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	100%	100%	-	-	-	-	100%	Kelurahan Mahulu
205	Cakupan Turap/Traud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	37%	4%	-	-	-	-	4%	Kelurahan Loa Ipuh Darat
206	Cakupan Turap/Traud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	37%	4%	-	-	-	-	4%	Kelurahan Bukit Bru
207	Cakupan Turap/Traud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	37%	4%	-	-	-	-	4%	Kelurahan Baru
208	Cakupan Turap/Traud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	37%	4%	-	-	-	-	4%	Kelurahan Loa Tebu
209	Cakupan Turap/Traud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	20%	-	-	-	-	20%	Kelurahan Panji
210	Cakupan Turap/Traud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	20%	-	-	-	-	20%	Kelurahan Sukrame
211	Cakupan Turap/Traud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	20%	-	-	-	-	20%	Kelurahan Sungai Seluang
212	Cakupan Turap/Traud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	20%	-	-	-	-	20%	Kelurahan Tanjung Harapan
213	Cakupan Turap/Traud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	20%	-	-	-	-	20%	Kelurahan Karya Merdeka
214	Cakupan Turap/Traud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	100%	100%	-	-	-	-	100%	Kelurahan Saik Api Darat
215	Cakupan Turap/Traud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	20%	-	-	-	-	20%	Kelurahan Margomulyo
216	Cakupan Turap/Traud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	100%	100%	-	-	-	-	100%	Kelurahan Handil Baru
217	Cakupan Turap/Traud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	100%	100%	-	-	-	-	100%	Kelurahan Muara Sembilang
218	Cakupan Turap/Traud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	37%	4%	-	-	-	-	4%	Kelurahan Kampung Lama
219	Cakupan Turap/Traud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	20%	-	-	-	-	20%	Kelurahan Ambrawang Darat
220	Cakupan Turap/Traud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	35%	20%	-	-	-	-	20%	Kelurahan Ambrawang Laut
221	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	42%	5%	-	-	-	-	5%	Kelurahan Jawa
222	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	42%	5%	-	-	-	-	5%	Kelurahan Pendangin
223	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	42%	5%	-	-	-	-	5%	Kelurahan Sanga-Sanga
224	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	-	-	-	-	100%	Kelurahan Sanga-Sanga Dalam
225	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	37%	4%	-	-	-	-	4%	Kelurahan Muara Kembang
226	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	-	-	-	-	100%	Kelurahan Tanapole
227	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	-	-	-	-	100%	Kelurahan Muara Jawa Pesisir
228	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	42%	5%	-	-	-	-	5%	Kelurahan Muara Jawa Tengah
229	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	35%	20%	-	-	-	-	20%	Kelurahan Muara Jawa Ilir
230	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	42%	5%	-	-	-	-	5%	Kelurahan Muara Jawa Ulu
231	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	35%	20%	-	-	-	-	20%	Kelurahan Dondang
232	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	-	-	-	-	100%	Kelurahan Teuk Dalam
233	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	-	-	-	-	100%	Kelurahan Mahulu

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNGAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
234	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	42%	5%	-	-	-	-	5%	Kelurahan Loa Ipuh Darat
235	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	35%	20%	-	-	-	-	20%	Kelurahan Bukit Baru
236	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	-	-	-	-	100%	Kelurahan Jahab
237	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	37%	4%	-	-	-	-	4%	Kelurahan Jahab
238	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	42%	5%	-	-	-	-	5%	Kelurahan Baru
239	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	-	-	-	-	100%	Kelurahan Mangkurwang
240	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	37%	4%	-	-	-	-	4%	Kelurahan Timbau
241	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	42%	5%	-	-	-	-	5%	Kelurahan Loa Ipuh
242	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	35%	20%	-	-	-	-	20%	Kelurahan Loa Tebu
243	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	37%	4%	-	-	-	-	4%	Kelurahan Panji
244	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	37%	4%	-	-	-	-	4%	Kelurahan Sukarame
245	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	-	-	-	-	100%	Kelurahan Agosari
246	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	-	-	-	-	100%	Kelurahan Samboja Kuala
247	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	35%	20%	-	-	-	-	20%	Kelurahan Teluk Pemedas
248	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	37%	4%	-	-	-	-	4%	Kelurahan Sanpan
249	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	-	-	-	-	100%	Kelurahan Sungai Seluang
250	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	37%	4%	-	-	-	-	4%	Kelurahan Sungai Merdeka
251	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	-	-	-	-	100%	Kelurahan Tanjung Harapan
252	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	37%	4%	-	-	-	-	4%	Kelurahan Karya Merdeka
253	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	35%	20%	-	-	-	-	20%	Kelurahan Saik Api Darat
254	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	35%	20%	-	-	-	-	20%	Kelurahan Matgomulyo
255	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	-	-	-	-	100%	Kelurahan Handil Baru
256	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	35%	20%	-	-	-	-	20%	Kelurahan Muara Sembilang
257	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	-	-	-	-	100%	Kelurahan Kampung Lama
258	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	-	-	-	-	100%	Kelurahan Wonotito
259	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	37%	4%	-	-	-	-	4%	Kelurahan Ambarawang Darat
260	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	-	-	-	-	100%	Kelurahan Bukit Merdeka
261	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	37%	4%	-	-	-	-	4%	Kelurahan Saik Api Laut
262	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	100%	100%	-	-	-	-	100%	Kelurahan Ambarawang Laut
4 URUSAN WAJIB PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015		KINERJA							KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
1	Cakupan Rumah Tidak Layak Huni yang di Renovasi	2.480 unit		2.830	3.225	3.660	4.140	4.660			4.660	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang		
		0.8952		0.9082	0.9147	0.9212	0.9278	0.9353			0.9353	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang		
		2.480 unit		367 unit	430 unit	444 unit	524 unit	580 unit			2.345 Unit	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang		
2	Cakupan Rumah layak huni	2.480 unit	2980	-	-	-	-	-			2980	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang		
		0.8952	0.9017	-	-	-	-	-			0.9017	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang		
		2.480 unit	500 unit	-	-	-	-	-			500 unit	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang		
3	Persentase penduduk berakses air bersih	60.80%	70.60%	80.40%	90.20%	100%	100%	100%			100%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang		
4	Cakupan Penduduk Berakses Air Minum Berbasis Masyarakat	n.a	1.85%	25.00%	48.15%	71.30%	100%	100%			100%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang		
5	Rumah Tangga Bersantias	73%	74%	76%	78%	80%	80%	80%			80%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang		
6	Persentase Luas pemukiman yang tertata	65%	68%	70%	73%	75%	78%	80%			80%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang		
7	Cakupan Lingkungan Permukiman Kumuh	172.67 ha	0	65%	32%	0%	0%	0%			0%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang		
5 URUSAN WAJIB KETERTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT														
1	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat		
2	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
3	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja		
4	Tingkat kepatuhan aparat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat		
5	Tingkat kepatuhan aparat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
6	Tingkat kepatuhan aparat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja		
7	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat		
8	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
9	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja		
10	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat		
11	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
12	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja		
13	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat		
14	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
15	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja		
16	Cakupan penanganan konflik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat		
17	Cakupan penanganan gejolak masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat		
18	Jumlah kasus penyakit masyarakat	224 kasus	220 kasus	220 kasus	210 kasus	205 kasus	200 kasus	190 kasus			190 kasus	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat		

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015		KINERJA							KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021							
19	Partisipasi masyarakat dalam pemilu	58,75%	65%	65%	67%	70%	71%	75%	75%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat	100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat	100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat	
20	Persentase omas yang terbit administrasi	50%	70%	70%	75%	80%	90%	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat	100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat	100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat	
21	Persentase pandol yang terbit administrasi	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat	100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat	100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat	
22	Persentase aparaturnya dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	100%	20%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat	100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat	100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat	
23	Persentase aparaturnya dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%	20%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat	100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat	100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat	
24	Cakupan penanganan kamtibmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	
25	Cakupan patroli siaga kerentanan umum dan kerentanan masyarakat	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	
26	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	
27	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten	100%	50%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	
28	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketertarikan, keindahan) di Kabupaten	100%	-	60%	70%	80%	90%	90%	90%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	90%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	90%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	
29	Cakupan pengamanan lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	
30	Cakupan rasio petugas linmas di Kabupaten	n.a	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	
31	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
32	Cakupan Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Bencana	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
33	Cakupan Deteksi Dini Bencana alam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
34	Cakupan pelayanan penanganan korban bencana alam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
35	Persentase penanganan bencana	89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
36	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
37	Hunian yang mendapat bantuan	50	50	60	60	60	60	60	60	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	350	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	350	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
6 URUSAN WAJIB SOSIAL															
1	Cakupan layanan administrasi pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial	100%	Dinas Sosial	100%	Dinas Sosial	
2	Tingkat keputihan aparaturnya	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial	100%	Dinas Sosial	100%	Dinas Sosial	
3	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial	100%	Dinas Sosial	100%	Dinas Sosial	
4	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial	100%	Dinas Sosial	100%	Dinas Sosial	
5	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	CC	CC	CC	B	BB	BB	A	A	Dinas Sosial	A	Dinas Sosial	A	Dinas Sosial	
6	Persentase Desa Berkeadilan Sosial	-	-	21	41	60	80	100	100	Dinas Sosial	100	Dinas Sosial	100	Dinas Sosial	
7	Cakupan pembinaan panti asuhan / panti jompo	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial	100%	Dinas Sosial	100%	Dinas Sosial	
8	Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang menerima bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial	68	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial	100	Dinas Sosial	100	Dinas Sosial	
9	Persentase rehabilitasi sosial bagi korban bencana, korban tindak kekerasan dan perlakuan salah	70	50	60	60	70	75	75	75	Dinas Sosial	75	Dinas Sosial	75	Dinas Sosial	

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
10	Persentase pemberdayaan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	58,2	10	25	40	55	70	85	85	Dinas Sosial
11	Persentase pembinaan sosial bagi anak terlantar	45	15	25	35	45	62	79	79	Dinas Sosial
12	Persentase pembinaan sosial bagi penyandang cacat dan eks trauma	42,6	10	20	30	43	60	77	77	Dinas Sosial
13	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang Tuna Sosial	38,32	20	35	50	65	75	85	85	Dinas Sosial
14	Persentase partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	40,82%	14%	24%	39%	54%	69%	84%	84%	Dinas Sosial
15	Cakupan penyuluhan sosial	2 kali	20 kali	41 kali	62 kali	83 kali	104 kali	125 kali	125 kali	Dinas Sosial
16	Persentase pelestarian nilai-nilai keperintisan dan keselakawanan sosial	85,7	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
17	Jumlah dokumen sistem pelayanan SKPD	10 dokumen	10 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	30 dokumen	Dinas Sosial
7 URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN										
1	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5	Tingkat ketepatan waktu pelepasan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6	Cakupan Pelayanan Pencari Kerja yang dilatih berbasis kompetensi di 9 kelompok Lapangan Usaha (KLU)	0,15%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7	Cakupan Pencari Kerja yang ditingkat produktivitasnya dengan berbasis kewirausahaan di 9 kelompok Lapangan Usaha (KLU)	0,30%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8	Jumlah pencari kerja yang mendapat fasilitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	n.a	9.880	8.907,00	9.721,00	9.526,00	9.891,00	9.486,00	57.411,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9	Cakupan Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10	Cakupan Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	100%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
1	Persentase SKPD yang Melaksanakan ARG dan PPRG	69,77	74,42	79,07	83,72	88,37	93,02	100,00	100,00	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Partisipasi anak dalam pembangunan (musrenbang)	5,16	9,48	26,07	42,65	59,24	76,67	100,00	100,00	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan(KDRT yang Dilangan)	76,31	72,50	69,23	68,31	60,13	55,63	51,22	51,22	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Cakupan Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan Sektor Formal	-	16,67	33,33	50,00	66,67	83,33	100,00	100,00	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Cakupan Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan Sektor Non Formal	-	8,33	25,00	41,67	58,33	75,00	100,00	100,00	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Tingkat Organisasi Perempuan yang di Bina	2	1	5	5	5	6	6	30	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMANGGUNGAN DAERAH		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
7	Kabupaten Layak Anak (KLA)	5,6	16,7	33,3	50,0	66,7	83,3	100,0	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Persentase calon Legislatif dan Legislatif perempuan	8,8	-	25%	26%	27%	28%	30%	30% Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Jumlah Kader Perempuan Jabatan Publik dan Politik	7	-	50	50	50	50	50	250 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Presentase anak korban kekerasan yang di layani	76,31	72,50	69,23	68,31	60,13	55,63	51,22	51,22 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	Persentase Ruang Publik Ramah Anak (RPPRA) tingkat kecamatan	5,56	16,67	33,33	50,00	66,67	83,33	100,00	100 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12	Persentase fasilitas layanan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	5	14,45	28,90	43,35	57,80	72,25	100,00	100 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Persentase Kelompok Usaha Bersama Perempuan (KUBP) Aktif	35	38,6	53,6	63,6	73,6	85,6	100	100 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9 URUSAN WAJIB PANGAN									
1	Cakupan layanan administrasi perkantoran		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
2	Tingkat kepatuhan aparatur	85% (303 org)	87% (310 org)	90% (320 org)	95%(338 org)	90% (320 org)	100% (356 org)	100%	100% Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
3	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80 % (285 org)	80 % (285 org)	85% (303 org)	87% (310 org)	90% (320 org)	90% (320 org)	90%	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
4	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	213	231	267	267	285	300	300	100% Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
5	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan		24 dok/lap : 19 obyek	24 dok/lap : 45 obyek	24 dok/lap : 45 obyek	24 dok/lap : 45 obyek	24 dok/lap : 45 obyek	144 dok/obyek : 45 obyek	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
6	Cakupan Regulasi Ketahanan Pangan	1 regulasi	-	1 regulasi	1 regulasi	2 regulasi	1 regulasi	1 regulasi	6 regulasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
7	Persentase Ketersediaan pangan utama Beras (%)	128,73%	129,71%	130,71%	131,35%	132,21%	133,29%	135,04%	135,04% Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
8	Ketersediaan (ton)	105.041,60	108.317,93	116.633,40	114.643,86	117.844,59	121.262,31	125.311,18	125.311,18 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
9	Jumlah Penduduk (jiwa)	722.100	739.000	755.800	772.400	788.800	805.100	821.200	821.200 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
10	Kebutuhan (gini period x 113 kg/kp/rt)	81.597,30	83.507,00	85.405,40	87.281,20	89.134,40	90.976,30	92.795,60	92.795,60 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
11	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	87,28	89,72	92,04	94,27	95,32	96,32	97,15	97,15 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
12	Persentase desa berstatus swasembada pangan utama (beras) (%)	19,83% (47 desa)	20,67% (49 desa)	21,94% (52 Desa)	22,78% (54 Desa)	23,62% (56 Desa)	24,47% (58 Desa)	25,32% (60 Desa)	(60 Desa) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
13	Cakupan Desa mandiri pangan (DESA) (%)	18,56% (44 desa)	18,98% (45 desa)	19,41% (46 desa)	20,25% (48 Desa)	21,10% (50 Desa)	21,94% (52 Desa)	22,78% (54 Desa)	(54 Desa) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
14	Cakupan nilai (score) Pola Pangan Harapan konsumsi.	91,30	91,60	91,90	92,20	92,50	92,80	93,00	93,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
15	Cakupan Keamanan Pangan segar (%)	82	83	84	85%	86%	87%	88%	88% Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
16	Cakupan Bina Kelompok Tani (Madya dan Utama)	59	65	71	93	120	147	184	217 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
17	kelas Madya		67	83	100	117	144	167	167 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
18	kelas Utama		4	10	20	30	40	50	50 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
19	Cakupan Pelayanan Penyuluhan Pertanian Satu Desa Satu Penyuluhan		2016	2017 70% (165 desa berpenyuluhan)	2018 75% (177 desa berpenyuluhan)	2019 80% (190 desa berpenyuluhan)	2020 90% (213 desa)	2021 95% (225 desa berpenyuluhan)	Penyuluhan
10 URUSAN WAJIB PERTANAHAN									
1	Cakupan terbit administrasi penguasaan tanah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
2	Persentase luas lahan bersertifikat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
3	Persentase Penyelesaian kasus pertanahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
11 URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP									
1	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Lingkungan Hidup Daerah
2	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Lingkungan Hidup Daerah
3	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Lingkungan Hidup Daerah
4	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Lingkungan Hidup Daerah
5	Tingkat ketepatan waktu peleporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Lingkungan Hidup Daerah
6	Persentase Bank Sampah yang terbentuk di setiap desa/kelurahan	0,39 % (9)	0,42% (10)	0,63% (15)	12,77%(30)	15% (35)	29%(68)	29%(68)	1 Badan Lingkungan Hidup Daerah
7	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL	210 Kegiatan Usaha (42%)	95 Kegiatan Usaha (19%)	190 Kegiatan Usaha (38%)	285 Kegiatan Usaha (57%)	380 Kegiatan Usaha (76%)	475 Kegiatan Usaha (95%)	500 Kegiatan Usaha (100%)	1 Badan Lingkungan Hidup Daerah
8	Pemenuhan Status Mutu Air	12 anak sungai (40 %)	12 anak sungai (40 %)	12 anak sungai (40 %)	18 anak sungai (60 %)	20 anak sungai (67 %)	25 anak sungai (83 %)	30 anak sungai (100 %)	30 anak sungai Daerah
9	Persentase luasan lahan darat/au tanah untuk produk/biomassa yang telah ditetapkan dan diformasikan status kesuksesannya	2.139.814 ha (50,80%)	3.238.874 ha (76%)	3.238.874 ha (84%)	3.238.874 ha (96,24%)	3.238.874 (100%)	3.238.874 (100%)	3.238.874 (100%)	1 Badan Lingkungan Hidup Daerah
10	Cakupan Peningkatan Status Lingkungan Hidup Daerah	100% (18 Kecamatan)	100% (18 Kecamatan)	100% (18 Kecamatan)	100% (18 Kecamatan)	100% (18 Kecamatan)	100% (18 Kecamatan)	100% (18 Kecamatan)	Badan Lingkungan Hidup Daerah
11	Persentase Jumlah Usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75	0,77	0,79	1 Badan Lingkungan Hidup Daerah
12	Luasan Wilayah Pesisir yang di konservasi	64 ha	20 ha	20 ha	18 ha	15 ha	15 ha	15 ha	Badan Lingkungan Hidup Daerah
13	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (CO2)	0,44	0,4	0,35	0,3	0,25	0,19	0,19	Badan Lingkungan Hidup Daerah
12 URUSAN WAJIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	-	90 Pasang	90 Pasang	90 Pasang	90 Pasang	90 Pasang	543 Pasang/Stell Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
4	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5	Tingkat ketepatan waktu peleporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6	Cakupan layanan informasi Administrasi Kependudukan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
7	Rasio Penduduk ber KTP elektronik persatuan penduduk	71%	81%	91%	94%	96%	98%	100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
8	Rasio Pasangan Non Muslim berakta Nikah	63%	68%	73%	78%	83%	88%	92%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
9	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	0,26%	-	25%	50%	75%	80%	100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
10	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	89%	91%	93%	95%	97%	98%	100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015		KINERJA							KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
11	Cakupan RT memiliki laptop	N/A	-	1.127 RT	1.931 RT	-	-	3.058 RT	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			
12	Cakupan RT yang menguasai Aplikasi Teknis Kependudukan	N/A	-	1.127 RT	1.931 RT	-	-	3.058 RT	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			
13	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan di tingkat RT berbasis SI-AK	N/A	-	1.127 RT	1.931 RT	-	-	3.058 RT	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			
14	Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	-	-	-	-	100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			
13 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
1	Cakupan Fasilitas Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Aparatur pemerintahan Desa	1.109	500	100	100	100	109	509	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			
2	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			
3	Tingkat kepatuhan aparatur	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			
4	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			
5	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			
6	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			
7	Cakupan Fasilitas dan partisipasi lembaga kemasyarakatan (RT, LPM, PKK, Karang Taruna, Lembaga Adat) dalam Musyawarah Pembangunan Desa	40	50	60	70	80	90	100	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			
8	Cakupan Fasilitas dan Pembinaan Pemberdayaan Peran Perempuan dan anak dalam kesejahteraan keluarga	480	80	80	80	80	80	480	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			
9	Cakupan Fasilitas Pembinaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			
10	Cakupan Fasilitas dan Jumlah, Partisipasi Swadaya Masyarakat	50	55	60	65	70	75	80	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			
11	Pemeliharaan dan Fasilitas Pasca Program pemberdayaan masyarakat (Usaha Kelompok Masyarakat)	450	0	90	90	90	90	450	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			
12	Cakupan Fasilitas Laporan Pengelolaan Keuangan, Aset, Pendapatan, dan Transfer Dana Desa	193	30	30	30	40	23	193	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			
13	Cakupan Fasilitas Pembentukan, Peningkatan, Pengembangan, dan Pemastaran Hasil Usaha serta Kewirausahaan								Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			
14	Jumlah BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) yang aktif	97	20	20	20	10	7	97	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			
15	Jumlah Kelompok Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pedesaan yang aktif	36	0	10	10	10	0		Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			
16	Cakupan Fasilitas dan Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)								Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
17	Jumlah Pengguna Pemantauan Teknologi Tepat Guna	148	163	179	196	215	236	259	259	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
18	Cakupan Fasilitas Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Desa dan pemberdayaan Desa/kei (Desa Mandiri)	14	0	5	6	7	8	9	30	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
14 URUSAN WAJIB PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
1	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Tingkat kepatuhan aparatur			97		117			214	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	225%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3,2	3,1	3	2,62	2,5	2,25	2	2	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Persentase Peserta KB Aktif	73,87%	73,88%	73,89%	73,90%	73,91%	73,92%	73,93%	73,93%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Cakupan Pasangan Usia subur yg isetirnya dibawah 20 thn	6,22	6%	5%	4%	3,5%	3%	2,50%	2,50%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Jumlah Informasi Keperundukan yang dipublikasikan	-	1	1	1	1	1	1	6	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Cakupan Petugas Lapangan KB/Perujuk KB (PLK/PRKB) 1 petugas 2 Desa	36,97	39,08	41,18	43,28	45,38	47,48	50,00	50,00	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBB) per desa	80	83%	85%	87%	90%	92%	95%	97%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12	Cakupan Pelayanan KB Keluarga Miskin	29,5	29,49%	28,99%	28,49%	27,99%	27,49%	26,99%	26,99%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	5%	30	30	30	30	30	30	30	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Tingkat Ketersediaan Kampung KB	0	1	2	3	4	4	4	18	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16	Cakupan Pus Peserta KB Anggota Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yg Ber-KB	80	87%	87%	87%	87%	87%	91%	91%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17	keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I	70%	75%	79%	83%	87%	91%	96%	96%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
18	Cakupan Keluarga Anggota BKB, BKR, BKL yang ber KB	30.25		47.48	60.50	73.67	86.83	100	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
19	Cakupan Pelayanan KB Jalur Swasta	38.85%	39.99%	40.49	40.99%	41.49%	41.99%	42.49%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
15 URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN										
1	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan	
2	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan	
3	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	67%	67%	74%	80%	87%	93%	100%	Dinas Perhubungan	
4	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan	
5	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan	
6	Jumlah arus penumpang angkutan umum	994.892	995.407	995.807	996.657	997.057	998.017	999.157	Dinas Perhubungan	
7	Persentase Jumlah Terminal yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	0%	0%	50%	67%	83%	100%	100%	Dinas Perhubungan	
8	Persentase Jumlah Pelabuhan Dermaga Yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	33%	40%	53%	67%	87%	100%	100%	Dinas Perhubungan	
9	Persentase Jumlah Fasilitas Darat yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	20%	23%	40%	60%	80%	100%	100%	Dinas Perhubungan	
10	Persentase Jumlah Rambau Laut/ Sungai yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	0%	0%	25%	50%	75%	100%	100%	Dinas Perhubungan	
11	Persentase Jumlah Alat Uji yang di Kalibrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan	
12	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis	38	7	7	7	7	9	9	46 Dinas Perhubungan	
13	Persentase Cakupan Sarana dan Prasarana Perhubungan antar Kecamatan (Pelabuhan/ Dermaga)	70%	81%	84%	88%	91%	98%	98%	Dinas Perhubungan	
14	Persentase Cakupan Kegiatan Penunjang Sarana dan Prasarana Perhubungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan	
15	Keleengkapan rambu-rambu lalu lintas menuju obyek wisata (sesuai RIPDA)	29%	29%	43%	56%	63%	69%	100%	Dinas Perhubungan	
16	Persentase Cakupan Ketersediaan Rambau Laut/ Rambau Sungai, Danau dan Penyebangan	53%	66%	74%	83%	92%	100%	100%	Dinas Perhubungan	
17	Persentase Cakupan Kegiatan Manajemen pengamanan lalu lintas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan	
18	Persentase cakupan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	100%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan	
19	Persentase kontribusi PAD sektor perhubungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan	
16 URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
3	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
4	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
5	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
6	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
7	Cakupan Layanan E-Government	46%	46%	57%	68%	78%	89%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
8	Cakupan wilayah yang terlayani Jaringan Telekomunikasi Seluler	31%	31%	39%	46%	53%	62%	69%	Dinas Komunikasi dan Informatika	

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA							KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
9	Cakupan Layanan Internet Ke Sekolah-sekolah	35%	35%	48%	61%	74%	87%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Tingkat Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang Dan Jasa	n.a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Rasio Warrel / Warrel terhadap Penduduk	0.02%	-	0.02%	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
12	Cakupan Layanan Pos dan Telekomunikasi	7%	7%	48%	61%	74%	87%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Cakupan Layanan Internet di Kecamatan/Desa/Kelurahan	31%	31%	50%	65%	80%	90%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
14	Jumlah Aplikasi Teknologi Informasi Layanan SKPD	46%	46%	57%	68%	78%	89%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM	65%	65%	72%	79%	86%	93%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
17 URUSAN WAJIB KOOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
1	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	100%	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
2	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	100%	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
3	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	100%	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
4	Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	100%	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
5	Tingkat ketaatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	100%	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
6	Usaha Mikro dan Kecil	39,456	2,400	2,400	1,500	1,500	1,500	1,500	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	50,256	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
7	Pertumbuhan UMKM Wirausaha Baru	1,753	2,400	2,400	1,500	1,500	1,500	1,500	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	12,553	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
8	Pertumbuhan koperasi	603	621	640	659	679	699	720	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	720	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
9	Jumlah koperasi aktif	488	503	519	535	552	569	587	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	587	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
10	Jumlah koperasi berprestasi	18	23	28	33	38	43	48	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	53	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
11	Cakupan Bina Koperasi	302	311	320	329	339	350	360	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	360	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
12	Jumlah Kemitraan Koperasi dengan Bank	20	5	5	5	5	5	5	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	50	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
13	Cakupan Bina UMKM	9,864	1,644	1,644	1,644	1,644	1,644	1,644	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	19,728	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
14	Cakupan Lembaga Keuangan non LKM / LKM tertentu	10	13	13	13	14	14	14	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	81	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
15	Jumlah LKM	-	3	3	3	4	4	4	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	21	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
16	Pertumbuhan UMKM Tani dan Nelayan	-	200	300	300	300	300	300	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	1,700	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
18 URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL											
1	Indek Kepuasan Masyarakat	7,6	7,8 (Baik)	8,1 (Baik)	(8,5) Baik	(8,7) Baik	(9,1) Sangat Baik	(9,4) Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
2	Persentase layanan perizinan dan non perizinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
3	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
4	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Pemananan Modal dan Promosi Daerah
5	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
6	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah	
7	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	
8	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah	
9	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	
10	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah	
11	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	
12	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah	
13	Rasio daya serap tenaga kerja								Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah	
14	Pertumbuhan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	5.454	8.618	9.999	111.380	12.996	14.236	15.360	15.360	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah
15	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	47	36	38	40	42	44	48	48	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah
16	Persentase Realisasi Investasi		80%	85%	87%	90%	95%	100%	100%	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah
17	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	6.252	7.985	8.353	8.738	9.140	9.562	10.002	53.780	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah
19 URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAHRAGA										
1	Cakupan layanan administrasi perantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pemuda dan Olahraga
4	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
5	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pemuda dan Olahraga
6	Cakupan Bina Kepemudaan	14.69%	16%	18.7%	20%	24%	26%	28%	28%	Dinas Pemuda dan Olahraga
7	Cakupan Organisasi Kepremukaan Aktif	n.a	n.a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pemuda dan Olahraga
8	Fasilitas Penumbuhan Wirausaha Pemuda mandiri	1.200	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.150	Dinas Pemuda dan Olahraga
9	Fasilitas Pengembangan Wirausaha Pemuda menjadi usaha yang mandiri	n.a	-	5	25	25	25	25	105	Dinas Pemuda dan Olahraga
10	Fasilitas Pemuda Dalam Pembangunan Karakter dan Peningkatan Kualitas Jasmani	0.91	3%	4%	8%	12%	16%	18%	18%	Dinas Pemuda dan Olahraga
11	Cakupan bina atlet lokal	17.51	20	30	35	40	45	50	50	Dinas Pemuda dan Olahraga
12	Atlet Pelajar yang di Bina	310	40	56	70	80	120	150	436	Dinas Pemuda dan Olahraga
13	Atlet Olahraga Tradisional yang berprestasi	20	30	35	45	50	50	55	215	Dinas Pemuda dan Olahraga
14	Persentase penduduk yang melakukan kegiatan olahraga	74.76	75.21	77	78.43	80	81.5	82	82	Dinas Pemuda dan Olahraga
15	Tenaga keolahragaan yang bersertifikasi	422	80	90	90	120	120	150	430	Dinas Pemuda dan Olahraga
16	Persentase ketersediaan Sarana dan prasarana olahraga	94.37	-	95.49	96.62	97.74	98.8	100	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
17	Kecamatan yang memiliki Sarana dan prasarana kepemudaan	1	-	3	3	3	4	4	17	Dinas Pemuda dan Olahraga
18	Persentase Sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
20 URUSAN WAJIB STATISTIK										
1	Cakupan data Statistik daerah	12	10%	10%	10%	11%	10%	10%	51%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
21 URUSAN WAJIB PERSANDIAN									
1	Tingkat Capaian kinerja otonomi daerah, pemerintahan umum, dan persandian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
22 URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN									
1	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6	Cakupan pembinaan seni budaya	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7	Cakupan Kajian Seni Budaya	100%	37%	51%	61%	72%	83%	93%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8	Cakupan misi kesenian	-	1	1	1	1	1	1	6 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9	Cakupan fasilitas seni budaya	100%	62%	74%	78%	87%	91%	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
10	Cakupan Gelar Seni	1	-	0	0	0	0	0	0 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
11	Jumlah kerjasama pengelolaan budaya	0	0	1	1	1	1	1	1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
12	Jumlah Grup Kesenian	83	83	90	95	98	100	105	57.1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
13	Jumlah benda, situs, cagar budaya, yang dikelola	39 cagar budaya	39 cagar budaya	39 cagar budaya	41 cagar budaya	53 Cagar Budaya	60 Cagar Budaya	72 Cagar Budaya	72 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
14	Jumlah museum yang dikelola	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
23 URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN									
1	Pertumbuhan pengunjung perpustakaan per tahun	28.010 orang	3.44	3.64	3.89	3.93	4.16	4.35	218.000 orang
2	Jumlah perpustakaan/taman baca	73 Unit	32 unit	32 unit	32 unit	32 unit	32 unit	32 unit	265 unit
3	Tingkat Ketersediaan Saproas Perpustakaan Desa/Kelurahan (Kampung Pinter)	30%	45%	55%	65%	75%	85%	100%	100%
4	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	66.504 Eksp	2.000 Eksp	2.000 Eksp	2.000 Eksp	2.000 Eksp	2.000 Eksp	2.000 eksp	78.504 Eksp
24 URUSAN WAJIB KEARSIPAN									
1	Jumlah Informasi Asip Daerah	20 dok	520 dok	10.020 dok	10.030 dok	10.030 dok	10.040 dok	10.040 dok	50.680 dok
2	Jumlah asip yang dilestarikan	74.716 dok	74.716 dok	79.286.00	83.868.00	88.448	93.038	97.628	97.628
3	Persentase SKPD yang menerapkan pengelolaan asip secara baku	60%	60%	70%	80%	90%	95%	100%	100%
4	Rasio Kecukupan SDM Pengelola Kearsipan SKPD Kabupaten	2.16	3.12	4.10	8.10	1.2 : 1	1.6.1	2 : 1	2 : 1
5	Cakupan SKPD yang terkoneksi dengan Sistem Informasi Kearsipan	n.a	-	25%	25%	20%	20%	10%	100%
6	Jumlah Pemeliharaan dan Pengamanan Sarana dan Prasarana Kearsipan	80%	100%	-	-	-	-	-	100%
7	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
8	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Kearsipan dan Perpustakaan
9	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Kearsipan dan Perpustakaan
10	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Kearsipan dan Perpustakaan
11	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Kearsipan dan Perpustakaan
25 URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Cakupan layanan administrasi perikanan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Tingkat Kepatuhan aparatur	90% (207 Orang)	92% (212 Aparatur)	95% (219 Aparatur)	96% (221 Aparatur)	97% (223 Aparatur)	98% (225 Aparatur)	100% (228 Aparatur)	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Persentase Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan mengisi Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya	80% (184 Aparatur)	82% (189 Aparatur)	85% (196 Aparatur)	87% (200 Aparatur)	90% (207 Aparatur)	92% (212 Aparatur)	95%(219 Aparatur)	Dinas Kelautan dan Perikanan
4	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 Aparatur	120 Aparatur	140 Aparatur	160 Aparatur	180 Aparatur	200 Aparatur	220 Aparatur	Dinas Kelautan dan Perikanan
5	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	28 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	Dinas Kelautan dan Perikanan
6	Cakupan Nelayan Kecil yang Mendapat Bantuan Modal Usaha	551 Nelayan Miskin)		0	100 (Nelayan Miskin)	100 Nelayan Miskin)	100 Nelayan Miskin)	100 Nelayan Miskin)	Dinas Kelautan dan Perikanan
7	Cakupan Pembudidaya Kecil yang Mendapat Bantuan Modal Usaha	62 Pembudidaya Miskin)	0	100 (Pembudidaya Miskin)	100 Pembudidaya Miskin)	100 Pembudidaya Miskin)	100 Pembudidaya Miskin)	100 Pembudidaya Miskin)	Dinas Kelautan dan Perikanan
8	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap :	1,4% (66.392,9 Ton)	4,05% (69.079 Ton)	5% (72.533 Ton)	5% (76.160 Ton)	5% (79.968 Ton)	6% (84.766 Ton)	6,17% (90.000 Ton)	30% (538.899 Ton)
9	Pertumbuhan Produksi P erikanan Tangkap Per- Umum	0,9% (33.233,1 Ton)	1% (33.565 Ton)	1% (33.901 Ton)	1% (34.240 Ton)	1% (34.582 Ton)	1% (34.928 Ton)	1% (35.277 Ton)	6,7% (239.726 Ton)
10	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Perairan Laut	1,8% (33.159,8 Ton)	3% (34.155 Ton)	3% (35.178 Ton)	3% (36.234 Ton)	3% (37.321 Ton)	3% (38.440 Ton)	3% (39.594 Ton)	18,4% (299.173 Ton)
11	Cakupan Tempat Pelelangan Ikan	2 Unit TPI)	1 Unit TPI)	1 Unit TPI)	1 Unit TPI)	1 Unit TPI)	0	0	5 Unit TPI)
12	Rasio Ketersediaan Armada Modern	1,1% (16 Unit Kapal)	0,0% (0 Unit Kapal)	1% (15 Unit Kapal)	1% (15 Unit Kapal)	1% (15 Unit Kapal)	1% (15 Unit Kapal)	3% (45 Unit Kapal)	7% (105 Unit Kapal)
13	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya :	7,3% (75.290,4 Ton)	10% (82.818 Ton)	11% (92.000 Ton)	14% (105.000Ton)	14% (120.000Ton)	15% (138.000 Ton)	16% (160.000 Ton)	93% (697.818 Ton)
14	Pertumbuhan Produksi P erikanan Budidaya Keramba (Ton/Tahun)	5,1% (40.683,1 Ton)	11% (45.351 Ton)	13% (51.226Ton)	15% (65.58.908 Ton)	15% (67.593 Ton)	15% (77.482 Ton)	15% (88.720 Ton)	62% (389.280 Ton)
15	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya Tambak (Ton/Tahun)	3,8% (32.636,2 Ton)	6% (34.268 Ton)	6% (36.816 Ton)	9% (40.274 Ton)	9% (43.762 Ton)	9% (47.545 Ton)	9% (51.587 Ton)	26% (254.252 Ton)
16	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya Kolam (Ton/Tahun)	10% (511,8 Ton)	20% (613 Ton)	20% (737 Ton)	20% (884 Ton)	20% (1.061 Ton)	20% (1.274 Ton)	20% (1.528 Ton)	149% (6.097 Ton)
17	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya Kolam Tempal (Ton/Tahun)	20% (300 Ton)	25% (428 Ton)	25% (469 Ton)	25% (586 Ton)	25% (732 Ton)	25% (916 Ton)	25% (1.144 Ton)	167% (4.275 Ton)
18	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya Laut (Ton/Tahun)	25% (1.159,3 Ton)	52% (1.758 Ton)	57% (2.152 Ton)	58% (4.348 Ton)	58% (6.852 Ton)	58% (10.823 Ton)	57% (17.021 Ton)	396% (43.554 Ton)
19	Pertumbuhan Produksi Benih (Ekor/Tahun)	5,2% (289.698.539 Ekor Benih)	10% (318.668.393 Ekor)	10% (350.535.232 Ekor Benih)	10% (385.588.755 Ekor Benih)	10% (424.147.631 Ekor Benih)	10% (466.562.239 Ekor Benih)	10% (513.218.633 Ekor Benih)	61% (2.458.720 Ekor Benih)
20	Pertumbuhan Produksi Budidaya Ikan Spesifik Lokal	20% (500 Kg)	50% (750 Kg)	50% (1.500 Kg)	100% (3.000 Kg)	100% (6.000 Kg)	100% (12.000 Kg)	100% (24.000 Kg)	4.709% (24.000 Kg)
21	Cakupan Jenis Komoditas Ikan Lokal dibudidayakan (Ikan Jelawat, Beutui, Beioik, Baung, dan Uduang Galah)	0	1 Jenis Komoditi	1 Jenis Komoditi	1 Jenis Komoditi	1 Jenis Komoditi	1 Jenis Komoditi	1 Jenis Komoditi	5Jenis Komoditi
22	Pertumbuhan Produksi Olahan Hasil Perikanan	1,5% (6.496 Ton)	3% (6.690 Ton)	3% (6.892 Ton)	3% (7.098 Ton)	3% (7.311 Ton)	3% (7.531 Ton)	3% (7.757 Ton)	18% (43.279 Ton)
23	Pertumbuhan Nilai Produk Kelautan dan Perikanan	Rp. 348.975.620.000	4% (Rp. 362.934.644.800)	4% (Rp. 377.452.030.592)	4% (Rp. 392.550.111.816)	4% (Rp. 408.252.116.288)	4% (Rp. 424.582.200.940)	4% (Rp. 441.565.488.977)	24% (Rp. 2.407.336.593.413)
24	Persentase Penurunan Disparitas Harga Tingkat Produsen dan Konsumen	100% (Rp.15.000/Kg)	95% (Rp. 14.250)	93% (Rp.14.000/Kg)	87% (Rp.13.000/Kg)	73% (Rp.11.000/Kg)	60% (Rp.9.000/Kg)	47% (Rp.7.000/Kg)	455% (Rp.6.8250/Kg)

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA							KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
25	Persentase UPT yang Memenuhi Persyaratan dan Keamanan Pangan	32% (48 UPT)	2% (3 UPT)	3% (5 UPT)	7% (10 UPT)	10% (15 UPT)	13% (20 UPT)	17% (25 UPT)	82% (84 UPT)	Dinas Kelautan dan Perikanan	
26	Cakupan Kenaikan Tingkat Kelas POKLAHSAR	0	1	1	1	2	2	3	9	Dinas Kelautan dan Perikanan	
27	Persentase Kelompok Masyarakat Kelautan Perikanan yang Terbina	20% (100 Kelompok)	0	10% (50 Kelompok)	10% (50 Kelompok)	10% (50 Kelompok)	10% (50 Kelompok)	10% (50 Kelompok)	70% (350 Kelompok)	Dinas Kelautan dan Perikanan	
28	Cakupan Kelompok Terbina Oleh UPTD	34 Kelompok	85 Kelompok	0	0	0	0	0	85 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan	
29	Cakupan Penurunan Kasus Illegal Fishing	80 Kasus	75 Kasus	50 Kasus	40 Kasus	30 Kasus	20 Kasus	10 Kasus	10 Kasus	Dinas Kelautan dan Perikanan	
30	Persentase Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif dalam Pengawasan SDKP	40% (20 POKMASWAS)	6% (3 POKMASWAS)	10% (5 POKMASWAS)	10% (5 POKMASWAS)	10% (5 POKMASWAS)	10% (5 POKMASWAS)	10% (5 POKMASWAS)	90% (45 POKMASWAS)	Dinas Kelautan dan Perikanan	
31	Cakupan Kawasan Konservasi yang dikelola Secara Berkelanjutan	3 Kawasan	0	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	8 Kawasan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
32	Cakupan Kemitraan (Kelompok Masyarakat) yang Mendukung Pengelolaan Elektrik Kawasan Konservasi	0	2 Kelompok	0	0	0	0	0	2 Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan	
26 URUSAN PILIHAN PARMISATA											
1	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata	1.5%	2%	3.0%	4%	5.0%	6.5%	7.0%	7%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2	Jumlah penyedia usaha jasa pariwisata	n.a	25	30	50	50	80	85	100	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
3	Jumlah asosiasi kepariwisataan	n.a	20	30	30	50	50	80	80	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
4	Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan	5 Objek wisata	16	20	21	25	26	28	28	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
5	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	1.367.542 orang	17%	19%	21%	23%	25%	27%	27%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
6	Pertumbuhan usaha ekonomi kreatif	n.a	0	1%	2%	3%	4%	5%	5%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
7	Jumlah mitra kelompok	6 kelompok	11 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
27 URUSAN PILIHAN PERTANIAN											
1	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	72 bulan	Dinas Perkebunan dan Kehutanan	
2	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	72 bulan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	60	Dinas Pertanian Tanaman Kesehatan Hewan	
4	Tingkat kepatuhan aparat	90% (288 Pegawai)	92% (294 Pegawai)	95% (304 Pegawai)	96% (307 Pegawai)	97% (310 Pegawai)	98% (314 Pegawai)	100% (320 Pegawai)	100% (320 Pegawai)	Dinas Perkebunan dan Kehutanan	
5	Tingkat kepatuhan aparat	90% (203 Org)	90% (203 Org)	90% (203 Org)	95% (214 org)	95% (214 org)	100 % (225 org)	100 % (225 org)	100%	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	
6	Tingkat kepatuhan aparat	90%:247 Aparatur	92%:252 Aparatur	95%:260 Aparatur	96%:263 Aparatur	97%:266 Aparatur	98%:269 Aparatur	100%:274 Aparatur	100%:274 Aparatur	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	
7	Persentase Aparatur mengisi Jabatan Fungsional sesuai dengan bidangnya	43% (137 Pegawai)	50% (160 Pegawai)	60% (192 Pegawai)	70% (224 Pegawai)	80% (256 Pegawai)	90% (288 Pegawai)	100% (320 Pegawai)	100% (320 Pegawai)	Dinas Perkebunan dan Kehutanan	
8	Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	55% (124 ORG)	60% (135 org)	70% (158 org)	80% (180 org)	90% (203 org)	95 (214 org)	100 % (225 org)	100%	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	
9	Cakupan aparatur Disnarkeswan yang mengikuti pelatihan dan sosialisasi (org)	500	-	80	80	80	80	80	400	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	
10	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparat	100 Aparatur	120 Aparatur	140 Aparatur	160 Aparatur	180 Aparatur	200 Aparatur	220 Aparatur	220 Aparatur	Dinas Perkebunan dan Kehutanan	
11	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparat	150	160	175	175	200	200	225	225	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	
12	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	60 bulan	Dinas Kesehatan Hewan	

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
13	Tingkat ketepatan waktu peleporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP : C	Nilai LAKIP : CC	Nilai LAKIP : B	Nilai LAKIP : B	Nilai LAKIP : BB	Nilai LAKIP : BB	Nilai LAKIP : A	Nilai LAKIP : A Dinas Perkebunan dan Kehutanan
14	Tingkat ketepatan waktu peleporan capaian kinerja dan keuangan	29 lap/dok	86 lap/dok	10 dok/lap.	10 dok/lap.	10 dok/lap.	10 dok/lap.	10 dok/lap.	136 dok/lap. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
15	Tingkat ketepatan waktu peleporan capaian kinerja dan keuangan	280	160	160	160	160	160	160	800 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
16	Persentase petani miskin yang mendapat bantuan modal usaha (org)	14,21 % (3.500 petani TPH miskin dibagi 24,68 orang petani TPH)	0	11,31 % (2.785 petani TPH)	17,4 % (4.285 orang petani TPH)	23,49 % (5.500 orang petani TPH)	26,58 % (7.050 orang petani TPH)	30,98 % (7.600 orang petani TPH)	30,98 % (7.600 orang petani TPH) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
17	Cakupan Pektibun Miskin Yang Mendapat Bantuan Modal Usaha (Org pektibun)	0	0	108 Pektibun	108 Pektibun	108 Pektibun	108 Pektibun	108 Pektibun	540 Pektibun Dinas Perkebunan dan Kehutanan
18	Cakupan Penurunan Kemiskinan masy/arakat Peternakan (org)	0	150	100	150	150	120	120	840 Orang Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
19	Pertumbuhan Produksi tanaman jagung	1.576 Ton	1.970 ton (25 %)	3.349 ton (70 %)	5.688 ton (70%)	9.555 ton (75 %)	17.421 ton (75 %)	30.486 ton (75 %)	68.469 Ton (75%) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
20	Cakupan produktivitas Tanaman jagung(KW/ Hektar)	37.52	38.64	39.4	40.99	42.22	43.49	44.79	44.79 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
21	Index Harga Yang Diterima Petani	176.62	188.87	201.12	213.37	225.62	237.87	250.12	250.12 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
22	Cakupan penerapan teknologi budidaya, panen dan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura (Rasio ketersediaan asitman)	59,38 % (2.989 buah dari kebutuhan 5000 buah)	61,24% (3.034 Buah)	65,98% (3.299 Buah)	67% (3.359 Buah)	69% (3.439 Buah)	70% (3.539 Buah)	72,38% (3.619 Buah)	72,38% (3.619 Buah) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
23	Pertumbuhan nilai pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Rp. 2.627.173.415.000	15,04%(3.022.251.322.115)	12,3%(3.393.847.660.258)	12,33%(3.812.299.421.725)	12,4%(4.284.951.069.069)	12,45%(4.818.433.659.730)	12,51%(5.421.220.556.325)	24.753.003.689.222(77,03%) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
24	Cakupan Kelempokkani yang terbina	250 kel. tanh	250 kel. tanh	275 kel. tanh	275 kel. tanh	300 kel. tanh	300 kel. tanh	300 kel. tanh	1.700 kel. tanh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
25	Cakupan produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal (Kw/ha)								Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
26	Padi Sawah	51.13	51.14	52.63	54.13	55.63	57.13	58.63	58.63 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
27	Padi Ladang	32.45	32.47	34.09	35.48	36.76	37.13	38.87	38.87 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
28	Kedelai	14.40	14.31	14.44	14.58	14.71	14.85	14.99	14.99 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
29	Kacang Tanah	13.27	12.90	12.92	12.95	12.98	13.01	13.03	13.03 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
30	Ubi Kayu	226.52	227.52	238.90	255.62	278.63	309.28	349.49	349.49 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
31	Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.	306.550 Ton	325.033 (6,03 %)	350.185 (7,14 %)	377.981 (7,94 %)	410.308 (8,55 %)	445.577 (8,60%)	484.244 (8,68 %)	2.393.328 (47,54 %) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
32	Padi Sawah (Ton)	173.848	187.944	205.644	223.404	235.628	248.179	258.884	1.359.683 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
33	Padi Ladang(Ton)	12.982	13.637	15.000	16.321	18.645	18.565	20.212	102.380 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
34	Kedelai (Ton)	154	418	446	476	509	543	580	2.972 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
35	Kacang tanah (Ton)	463	656	659	662	665	668	671	3.981 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
36	Ubi Kayu (Ton)	21.701	22.459	27.006	35.176	49.818	62.678	78.352	275.489 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
37	Ubi Jalar (Kw/ha)	5.214	6.040	6.041	6.042	6.043	6.044	6.045	36.255 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
38	Tanaman Buah (Ton)	62.156	62.691	63.000	63.500	64.000	69.400	75.000	397.591 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
39	Tanaman Sayuran Dataran Rendah (Ton)	30.032	31.188	32.389	32.400	35.000	39.500	44.500	214.977 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
40	Cakupan Demplo Budidaya Tanaman Jagung	40% dari rekomendasi		50% dari rekomendasi	65% dari rekondasi	75% dari rekomendasi	85% dari rekomendasi	90% dari rekomendasi	90% dari rekomendasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
41	Cakupan Paket Teknologi Budidaya Tanaman Jagung	-	-	60 % dari rekomendasi	70 % dari rekomendasi	80 % dari rekomendasi	90 % dari rekomendasi	95 % dari rekomendasi	95 % dari rekomendasi	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
42	Cakupan Paket Teknologi Pasca Panen Dan Agromodisiti Komoditas Jagung	-	-	50% dari rekomendasi	65% dari rekomendasi	75% dari rekomendasi	85% dari rekomendasi	90% dari rekomendasi	90% dari rekomendasi	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
43	Cakupan Teknologi Budidaya Yang Diterapkan (Padi, Kedelai)	-	-	60 % dari rekomendasi	70 % dari rekomendasi	80 % dari rekomendasi	90 % dari rekomendasi	95 % dari rekomendasi	95 % dari rekomendasi	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
44	Cakupan Paket Teknologi Budidaya dan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan & Hortikultura	-	-	50% dari rekomendasi	65% dari rekomendasi	75% dari rekomendasi	85% dari rekomendasi	90% dari rekomendasi	90% dari rekomendasi	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
45	Cakupan Teknologi Budidaya Yang Diterapkan (Aren)	-	-	50% dari rekomendasi	65% dari rekomendasi	75% dari rekomendasi	85% dari rekomendasi	90% dari rekomendasi	90% dari rekomendasi	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
46	Cakupan Paket Teknologi Integrasi Budidaya Tanaman Sawit dengan Sapi Potong	-	-	50% dari rekomendasi	65% dari rekomendasi	75% dari rekomendasi	85% dari rekomendasi	90% dari rekomendasi	90% dari rekomendasi	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
47	Cakupan Paket Teknologi Budidaya dan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan & Hortikultura	-	-	50% dari rekomendasi	65% dari rekomendasi	75% dari rekomendasi	85% dari rekomendasi	90% dari rekomendasi	90% dari rekomendasi	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
48	Cakupan luas ternaam komoditas tanaman buah lokal(spesifik lokasi (ha)	2 Ha	-	75	75	75	75	75	375	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
49	Perambahan luas areal pertanian yang terlayani jaringan irigasi dan jalan pertanian	0,7 % (Perambahan luas areal terlayani = 119 Ha. dari 16.000 Ha lahan)	2,60%	3,12%	2,80%	3,00%	3,12%	6,12%	20%	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
50	Pertumbuhan Nilai Tukar Petani (NTP) Pekebun	96 (2%)	98,5 (3%)	101,6 (3%)	105,3 (4%)	109,6 (4%)	114,6 (5%)	120,4 (5%)	120,4	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
51	Pertumbuhan Jumlah Petani Pekebun (KK)	Rakyat: 31.657 KK, Plasma: 14.770 KK, Total: 46.427 KK (3%)	Rakyat: 30.785 KK, Plasma: 16.873 KK, Total: 47.658 KK (3%)	Rakyat: 31.642 KK, Plasma: 18.922 KK, Total: 50.565 KK (6%)	Rakyat: 32.652 KK, Plasma: 21.362 KK, Total: 54.015 KK (7%)	Rakyat: 33.721 KK, Plasma: 24.400 KK, Total: 58.122 KK (8%)	Rakyat: 34.797 KK, Plasma: 28.138 KK, Total: 62.935 KK (8%)	Rakyat: 35.943 KK, Plasma: 32.676 KK, Total: 68.620 KK (9%)	Rakyat: 35.943 KK, Plasma: 32.676 KK, Total: 68.620 KK (9%)	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
52	Pertumbuhan Produksi Komoditi Perkebunan	Sawit: 225.943 -PBS: 1.285.260, Karet: 9.084, Lada: 4.763, Kopi: 100, Kelapa: 6.486, Kakao: 70, Aren: 70, Total: 1.531.775 (6%)	Sawit: 285.000 -PBS: 1.349.522, Karet: 10.000, Lada: 4.800, Kopi: 105, Kelapa: 8.100, Kakao: 75, Aren: 300, Total: 1.657.902 (8%)	Sawit: 335.000 -PBS: 1.443.989, Karet: 11.000, Lada: 4.900, Kopi: 115, Kelapa: 8.200, Kakao: 100, Aren: 340, Total: 1.803.644 (9%)	Sawit: 375.000 -PBS: 1.588.388, Karet: 12.500, Lada: 5.050, Kopi: 125, Kelapa: 8.300, Kakao: 130, Aren: 400, Total: 1.989.893 (10%)	Sawit: 425.000 -PBS: 1.747.227, Karet: 14.000, Lada: 5.200, Kopi: 135, Kelapa: 8.400, Kakao: 160, Aren: 480, Total: 2.200.602 (11%)	Sawit: 475.000 -PBS: 1.956.894, Karet: 15.500, Lada: 5.450, Kopi: 145, Kelapa: 8.550, Kakao: 230, Aren: 600, Total: 2.462.369 (12%)	Sawit: 520.000 -PBS: 2.230.859, Karet: 17.500, Lada: 5.700, Kopi: 169, Kelapa: 8.700, Kakao: 310, Aren: 780, Total: 2.784.018 (13%)	12.898.428 ton	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
53	Cakupan Teknologi Budidaya Yang Diterapkan (Aren)	-	-	50% dari rekomendasi	65% dari rekomendasi	75% dari rekomendasi	85% dari rekomendasi	90% dari rekomendasi	85% dari rekomendasi	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
54	Cakupan Paket Teknologi Integrasi Budidaya Tanaman Sawit dengan Sapi Potong	-	-	50% dari rekomendasi	65% dari rekomendasi	75% dari rekomendasi	85% dari rekomendasi	90% dari rekomendasi	90% dari rekomendasi	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
55	Pertumbuhan Nilai Produk Komoditi Perkebunan	2.390.421.916,321 (5%)	2.640.000.000,000 (10%)	2.960.000.000,000 (12%)	3.400.000.000,000 (15%)	4.000.000.000,000 (18%)	4.850.000.000,000 (21%)	6.000.000.000,000 (24%)	23.850.000.000,000	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
56	Pertumbuhan Produktivitas Komoditi Perkebunan	Sawit: 17.565, Karet: 1.386, Lada: 1.201, Kopi: 344, Kelapa: 963, Kakao: 1.190, Aren: 464 (3%)	Sawit: 18.100, Karet: 1.430, Lada: 1.220, Kopi: 350, Kelapa: 1.000, Kakao: 1.195, Aren: 600 (6%)	Sawit: 18.700, Karet: 1.470, Lada: 1.260, Kopi: 360, Kelapa: 1.060, Kakao: 1.205, Aren: 780 (7%)	Sawit: 19.300, Karet: 1.530, Lada: 1.310, Kopi: 375, Kelapa: 1.130, Kakao: 1.220, Aren: 1.020 (8%)	Sawit: 20.000, Karet: 1.590, Lada: 1.380, Kopi: 395, Kelapa: 1.220, Kakao: 1.240, Aren: 1.350 (9%)	Sawit: 20.700, Karet: 1.670, Lada: 1.460, Kopi: 420, Kelapa: 1.330, Kakao: 1.270, Aren: 1.790 (10%)	Sawit: 21.500, Karet: 1.750, Lada: 1.560, Kopi: 500, Kelapa: 1.480, Kakao: 1.310, Aren: 2.000 (11%)	Sawit: 21.500, Karet: 1.750, Lada: 1.560, Kopi: 500, Kelapa: 1.480, Kakao: 1.310, Aren: 2.000 (11%)	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
57	Pertumbuhan Luas Areal Komoditi Perkebunan	Kebun Rakyat: 59.435 Ha, PBS: 170.404 Ha, Total: 229.839 Ha (4%)	Kebun Rakyat: 58.432 Ha, PBS: 191.438 Ha, Total: 249.870 Ha (9%)	Kebun Rakyat: 59.965 Ha, PBS: 211.927 Ha, Total: 271.892 Ha (9%)	Kebun Rakyat: 61.639 Ha, PBS: 236.330 Ha, Total: 297.969 Ha (10%)	Kebun Rakyat: 63.431 Ha, PBS: 266.710 Ha, Total: 330.141 Ha (11%)	Kebun Rakyat: 65.284 Ha, PBS: 304.090 Ha, Total: 369.374 Ha (12%)	Kebun Rakyat: 67.377 Ha, PBS: 349.470 Ha, Total: 416.847 Ha (13%)	Kebun Rakyat: 67.377 Ha, PBS: 349.470 Ha, Total: 416.847 Ha	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
58	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkebunan	0	0	15 Km Jin Produksi & 4 Unit sarana pertanian	10 Km Jin produksi & 6 Unit sarana pertanian	22 Km Jin Produksi & 10 sarana pertanian	30 Km Jin Produksi & 12 Unit sarana pertanian	40 Km Jin Produksi & 14 Unit sarana pertanian	194 Km Jin Produksi & 46 Unit sarana pertanian	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
59	Persentase Penurunan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan	689,65 Ha (439%)	154,8 Ha (22%)	145 Ha (94%)	130 Ha (90%)	110 Ha (85%)	85 Ha (77%)	50 Ha (59%)	674,8 Ha	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
60	Persentase Penurunan Komplik dan Gangguan Usaha Perkebunan	17 Kasus (189%)	23 Kasus (135%)	21 Kasus (91%)	19 Kasus (90%)	17 Kasus (89%)	15 Kasus (88%)	13 Kasus (87%)	108 Kasus	Dinas Perkebunan dan Kehutanan

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
61	Cakupan Rumah Tangga Peternakan yang menerapkan Teknologi (RTP/tahun)	354	70	125	70	70	70	350	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
62	Persentase derajat kesehatan Ternak Sapi potong pada Masyarakat 35%/tahun	9,628	10591 (35%)	11650 (35%)	12815 (35%)	14096 (35%)	15506 (35%)	17056 (35%)	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
63	pertumbuhan populasi ternak sapi Potong (ekor)	27508 (4%)	30258 (10%)	34285 (13.31%)	39085 (14%)	44557 (14%)	50795 (14%)	59906 (14%)	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
64	pertumbuhan Produkasi daging ternak 15% per tahun(ton)	14165 (3.7%)	16290 (15%)	18733 (15%)	21543 (15%)	24755 (15%)	28491 (15%)	32765 (15%)	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
65	pertumbuhan Produkisi telur 15% per tahun (ton)	3522 (2.83%)	4050 (15%)	4657 (15%)	5357 (15%)	6160 (15%)	7084 (15%)	8147 (15%)	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
66	pertumbuhan populasi ternak Kerbau dan sapi Kalang (100%/Tahun)	1257	1388 (20%)	1521 (10%)	1673 (10%)	1840 (10%)	2024 (10%)	2227 (10%)	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
67	Indeks Nilai Tukar Peternak	107	111 (2%)	113 (2%)	115 (2%)	118 (2%)	120 (2%)	122 (2%)	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
68	Cakupan Usaha Pengolahan Hasil Produk Peternakan 15%/tahun (Kp)	25	28	32	37	43	49	57	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
28 URUSAN PIUHAN KEHUTANAN									
1	Pertumbuhan Luas Penghijauan	230 Ha (63%)	210 Ha					210 Ha	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
2	Pertumbuhan Luas Penghijauan			80 Ha	107 Ha (46%)	163 Ha (64%)	324 Ha (81%)	571 Ha (83%)	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
3	Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Sektor Kehutanan	70 Milyar (64%)	23.5 Milyar (33%)					23.5 Milyar (33%)	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
4	Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Sektor Kehutanan			24 Milyar (2%)	24.8 Milyar (3%)	25.8 Milyar (4%)	27.1 Milyar (5%)	28.8 Milyar (6%)	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
5	Pertumbuhan Produkisi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Gaharu : 460 Ptn, Madu : 200 Ltr, Jamur : 10 Ton (2%)	Gaharu : 510 Ptn, Madu : 205 Ltr, Jamur : 11 Ton (8%)					Gaharu : 510 Ptn, Madu : 205 Ltr, Jamur : 11 Ton (8%)	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
6	Pertumbuhan Produkisi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)			Gaharu : 450 Ptn, Madu : 155 Ltr, Jamur : 9 Ton (15%)	Gaharu : 810 Ptn, Madu : 230 Ltr, Jamur : 13 Ton (26%)	Gaharu : 1.210 Ptn, Madu : 250 Ltr, Jamur : 14 Ton (40%)	Gaharu : 1.910 Ptn, Madu : 275 Ltr, Jamur : 15 Ton (49%)	Gaharu : 3.110 Ptn, Madu : 305 Ltr, Jamur : 16 Ton (56%)	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
7	Penurunan kebakaran Hutan di Wilayah Tahura	n.a	75 Titik Hotspot (100%)	-	-	-	-	-	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
8	Penurunan kebakaran Hutan di Wilayah Tahura	n.a	0	0	0	30 Titik Hotspot (100%)	25 Titik Hotspot (83%)	15 Titik Hotspot (60%)	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
29 URUSAN PIUHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
1	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Dinas Pertambangan dan Energi
2	Tingkat kepatuhan aparatur	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Dinas Pertambangan dan Energi
3	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pertambangan dan Energi
4	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pertambangan dan Energi
5	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6 doklap.	32 doklap.	31 doklap.	31 doklap.	31 doklap.	231 doklap.	31 doklap.	Dinas Pertambangan dan Energi
6	Persentase Rumah Tangga Berlistrik	68% (140,066 KK /Rumah Tangga Berlistrik PLN dan Non PLN dibandingkan Total KK Tahun 2015 sebanyak 205,550 KK)	70% (143,888 KK /Rumah Tangga Berlistrik PLN dan Non PLN dibandingkan Total KK Tahun 2015 sebanyak 205,550 KK)	73% (149,066 KK /Rumah Tangga Berlistrik PLN dan Non PLN dibandingkan Total KK Tahun 2015 sebanyak 205,550 KK)	77% (158,066 KK /Rumah Tangga Berlistrik PLN dan Non PLN dibandingkan Total KK Tahun 2015 sebanyak 205,550 KK)	81% (167,066 KK /Rumah Tangga Berlistrik PLN dan Non PLN dibandingkan Total KK Tahun 2015 sebanyak 205,550 KK)	86% (176,066 KK /Rumah Tangga Berlistrik PLN dan Non PLN dibandingkan Total KK Tahun 2015 sebanyak 205,550 KK)	90% (185,066 KK /Rumah Tangga Berlistrik PLN dan Non PLN dibandingkan Total KK Tahun 2015 sebanyak 205,550 KK)	Dinas Pertambangan dan Energi
7	Persentase Rumah Tangga Yang menggunakan EBT	2.2 % (4,573 Rumah Tangga yang menggunakan EBT dari Total KK Tahun 2015 = 205,550 KK)	2.4% (4,933 Rumah Tangga yang menggunakan EBT dari Total KK Tahun 2015)	2.78 % (5,573 Rumah Tangga yang menggunakan EBT dari Total KK Tahun 2015)	3.33 % (6,573 Rumah Tangga yang menggunakan EBT dari Total KK Tahun 2015)	3.88 % (7,573 Rumah Tangga yang menggunakan EBT dari Total KK Tahun 2015)	4.44 % (8,573 Rumah Tangga yang menggunakan EBT dari Total KK Tahun 2015)	5 % (9,573 Rumah Tangga yang menggunakan EBT dari Total KK Tahun 2015)	Dinas Pertambangan dan Energi

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
8	Cakupan Penyediaan Air Bersih Melalui Pengebooran Air Tanah	n.a	18%	22%	20%	20%	20%	100% (52 Titik Sumur Boj)	Dinas Perimbangan dan Energi
9	Cakupan Jenis Data hasil Tambang (Data Produksi, Penjualan dan kewajiban royalti/ hasil tambang)	n.a	3 jenis data	3 jenis data	3 jenis data	100%	3 jenis data	18 Jenis data	Dinas Perimbangan dan Energi
10	Cakupan Perusahaan Benzin yang meningkat secara kualitas maupun kuantitas	n.a	-	5 Benzin	3 Benzin	3 Benzin	3 Benzin	15 Benzin	Dinas Perimbangan dan Energi
11	Cakupan Jenis Data Informasi	n.a	-	3 Jenis Data	3 Jenis Data	3 Jenis Data	3 Jenis Data	18 Jenis data	Dinas Perimbangan dan Energi
12	Cakupan Pemeliharaan dan Pengembangan LPJU	n.a	4 Kecamatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan	Dinas Perimbangan dan Energi
13	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perimbangan dan Energi
30 URUSAN PILIHAN PERAGANGAN									
1	Jumlah pasar yang dibangun di Kecamatan, Kelurahan dan Desa.	14	-	15	16	15	15	15	90 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
2	Persentase kontribusi PAD sektor perdagangan	301.000.000	391.300.000	508.690.000	661.297.000	859.686.100	1.117.591.930	1.452.869.509	5.292.434.539 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
3	Cakupan jaringan pemasaran/kemitraan produk pertanian dalam arti luas	-	-	3 Daerah (Regional)	4 Daerah (Regional)	4 Daerah (Regional)	4 Daerah (Regional)	4 Daerah (Regional)	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
4	Ekspor bersih perdagangan	2.370.984.591	2.418.404.283	2.466.772.368	2.516.107.816	2.566.429.972	2.617.758.571	2.617.758.571	2.617.758.571 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
5	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	-	-	20%	20%	20%	20%	100%	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
6	Informasi harga, komoditas dan jenis produk	-	-	18 Kecamatan	18 Kecamatan	18 Kecamatan	18 Kecamatan	18 Kecamatan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
7	Stabilitas harga jagung	-	-	18 Kecamatan	18 Kecamatan	18 Kecamatan	18 Kecamatan	18 Kecamatan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
8	Cakupan penyelesaian masalah perdagangan konsumen	-	-	18 Kecamatan	18 Kecamatan	18 Kecamatan	18 Kecamatan	18 Kecamatan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
31 URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN									
1	Persentase kontribusi PAD sektor perindustrian	3.711	4.112	4.57	5.08	5.63	6.25	6.94	6.94 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
2	Rasio sentra IKM terhadap ODWT (1 ODWT : 1 Sentra IKM)	-	8 : 1	8 : 2	8:3	8:5	8:7	8:8	8:8 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
3	Pertumbuhan IKM berbasis komoditas pertanian	5.163	5.372	5.625	5.908	6.232	6.594	6.594	6.594 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
4	Pertumbuhan omzet IKM berbasis komoditas pertanian	137.558.000.000	146.187.000.000	156.011.000.000	167.934.000.000	181.551.000.000	197.123.000.000	197.123.000.000	197.123.000.000 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
5	Pertumbuhan industri kecil Rumah Tangga berbasis komoditas pertanian	5.162	5.371	5.624	5.907	6.231	6.593	6.593	6.593 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
6	Pertumbuhan omzet industri kecil Rumah Tangga berbasis komoditas pertanian	121.423.000.000	129.872.000.000	139.876.000.000	151.799.000.000	165.416.000.000	180.988.000.000	180.988.000.000	180.988.000.000 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
7	Jumlah Kemitraan IKM dengan Bank	5	14	10	14	17	20	20	100 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
8	Jumlah unit usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM)	8.656	8.956	9.226	9.503	9.883	10.327	10.327	10.327 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
9	Jumlah jenis usaha industri kecil dan menengah (IKM)	17.312	17.912	18.452	19.006	19.766	20.654	20.654	20.654 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
10	Jumlah IKM yang berkembang	1	1	3	3	4	4	4	20 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
11	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pada IKM	22.279	23.039	23.876	24.477	25.748	26.848	26.848	26.848 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
12	Jumlah Kawasan Industri	-	-	3	-	-	1	-	4 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
13	Pertumbuhan industri	8.656	8.951	9.275	9.621	10.001	10.426	10.426	10.426 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
14	Cakupan bina kelompok pengrajin	34.624	35.824	36.904	38.012	39.532	41.308	41.308	41.308 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
15	Cakupan Bina Industri/Perusahaan	-	10%	10%	20%	20%	20%	20%	100% Perdagangan dan Koperasi
32 URUSAN PILIHAN KETRANSMIGRASIAN									
1	Jumlah KawasanDesakKintaras yang ditata/dibangun	47	47	47	48	49	51	52	52 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: SEKRETARIAT DAERAH									
1	Memungkanya kebutuhan ternhadap pengelolaan keuangan negara	n.a	-	100%	100%	100%	100%	100%	100% Sekretariat Daerah
2	Memungkanya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintahan	n.a	-	100%	100%	100%	100%	100%	100% Sekretariat Daerah
3	Memungkanya Kualitas Pelayanan Publik	n.a	-	100%	100%	100%	100%	100%	100% Sekretariat Daerah
4	Menurunnya tingkat penyalangunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah	n.a	-	100%	100%	100%	100%	100%	100% Sekretariat Daerah
5	Bekas	n.a	-	100%	100%	100%	100%	100%	100% Sekretariat Daerah
6	Persentase jumlah penyelesaian tata batas antar kabupaten, antar Kecamatan dan antar Desa/Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Sekretariat Daerah
7	Persentase Regulasi Daerah yang disosialisasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Sekretariat Daerah
8	Hamomisasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Sekretariat Daerah
9	Persentase peraturan daerah yang disosialisasikan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100% Sekretariat Daerah
10	Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100% Sekretariat Daerah
11	Penyelesaian pengaduan pelayanan pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Sekretariat Daerah
12	Persentase Jumlah Keljasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga	100%	100%	100%	-	-	-	-	100% Sekretariat Daerah
13	Persentase Jumlah Keljasama Antar Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Sekretariat Daerah
14	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Sekretariat Daerah
15	Cakupan Keptokolan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Sekretariat Daerah
16	Pelayanan Pengaduan Barang/Jasa Pemerintah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100% Sekretariat Daerah
17	Tingkat Layanan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Sekretariat Daerah
18	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Sekretariat Daerah
19	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Sekretariat Daerah
20	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Sekretariat Daerah
21	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Sekretariat Daerah
22	Cakupan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Sekretariat Daerah
23	Cakupan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Sekretariat Daerah
24	Cakupan obyek kegiatan dan anggaran yang diawasi	100%	100%	-	-	-	-	-	100% Sekretariat Daerah
25	Cakupan Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan KDH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Sekretariat Daerah
26	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Sekretariat Daerah
1 PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: SEKRETARIAT DP KORPRI									
1	Tingkat kesediaan obat dan pembekalan kesehatan	100%	100%	-	-	-	-	-	100% Sekretariat DP KORPRI
2	Jumlah event kompetisi	100%	100%	-	-	-	-	-	100% Sekretariat DP KORPRI
3	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% Sekretariat DP KORPRI

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
4	Tingkat keptuhan aparatur	100%	2016	2017	2018	2019	2020	2021	100%	Sekretariat DP KORPRI
5	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DP KORPRI
6	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DP KORPRI
7	Cakupan Peningkatan Sistem pengawasan pengendalian pelaksanaan ketijlakan KDH	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Sekretariat DP KORPRI
8	Tingkat ketepatan waktu peleporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DP KORPRI
1 PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: SEKRETARIAT DPRD										
1	Tingkat Kinerja Pelayanan pada Alat Kelengkapan dan Anggota DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
2	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
3	Tingkat keptuhan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
4	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
5	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
6	Cakupan Peningkatan Sistem pengawasan pengendalian pelaksanaan ketijlakan KDH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
7	Tingkat ketepatan waktu peleporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
1 PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KECAMATAN										
1	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	n.a	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Wis
2	Rata-rata Kinerja Kecamatan	n.a	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Wis
3	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	n.a	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Kota Bangun
4	Rata-rata Kinerja Kecamatan	n.a	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Kota Bangun
5	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Tenggarong
6	Rata-rata Kinerja Kecamatan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Tenggarong
7	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Kenohan
8	Rata-rata Kinerja Kecamatan	Na	Na	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Kenohan
9	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Kembang Janggut
10	Rata-rata Kinerja Kecamatan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Kembang Janggut
11	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Kaman
12	Rata-rata Kinerja Kecamatan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Kaman
13	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Sambaja
14	Rata-rata Kinerja Kecamatan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Sambaja
15	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Sanga-Sanga
16	Rata-rata Kinerja Kecamatan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Sanga-Sanga
17	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Muriai
18	Rata-rata Kinerja Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Muriai
19	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Marangkayu
20	Rata-rata Kinerja Kecamatan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Marangkayu
21	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Sebulu
22	Rata-rata Kinerja Kecamatan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Sebulu

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA							KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
23	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Loa Janan
24	Rata-rata Kinerja Kecamatan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Loa Janan
25	Cakupan Layanan Perijinan dan Non Perijinan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Loa Kulu
26	Rata-rata Kinerja Kecamatan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Loa Kulu
27	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Badak
28	Rata-rata Kinerja Kecamatan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Badak
29	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Tabang
30	Rata-rata Kinerja Kecamatan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Tabang
31	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Jawa
32	Rata-rata Kinerja Kecamatan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Jawa
33	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Tenggarong Seberang
34	Rata-rata Kinerja Kecamatan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Tenggarong Seberang
35	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Anggana
36	Rata-rata Kinerja Kecamatan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Anggana
37	Cakupan lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Wis
38	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Na	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Kota Bangun
39	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Tenggarong
40	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Kenohan
41	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Kembang Janggut
42	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Kaman
43	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Sambaja
44	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Na	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Sanga-Sanga
45	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Na	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Murai
46	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Marangkayu
47	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Sebulu
48	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Loa Janan
49	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Loa Kulu
50	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Badak
51	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Tabang
52	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Jawa
53	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Tenggarong
54	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Anggana
55	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	-	-	-	-	-	-	100%	Kecamatan Muara Wis
56	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	-	-	-	-	-	-	100%	Kecamatan Sanga-Sanga
57	Cakupan Layanan Perijinan dan Non Perijinan (Kecamatan)	100%	100%	-	-	-	-	-	-	100%	Kecamatan Loa Kulu
58	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	n.a	100%	-	-	-	-	-	-	100%	Kecamatan Kota Bangun
59	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	-	-	-	-	-	-	100%	Kecamatan Tenggarong
60	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	-	-	-	-	-	-	100%	Kecamatan Kembang Janggut
61	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	-	-	-	-	-	-	100%	Kecamatan Muara Kaman
62	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	-	-	-	-	-	-	100%	Kecamatan Sambaja
63	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	-	-	-	-	-	-	100%	Kecamatan Muara Murai

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMANGGUAN DAERAH		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
64	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kecamatan Marangkayu
65	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kecamatan Sebulu
66	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kecamatan Loa Jaran
67	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kecamatan Muara Badak
68	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kecamatan Tabang
69	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kecamatan Muara Jawa
70	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kecamatan Tenggarong
71	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kecamatan Anggana Seberang
72	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Wis
73	Cakupan layanan administrasi perkantoran	n.a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Kota Bangun
74	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Tenggarong
75	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Kendahan
76	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Kembang Janggut
77	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Kaman
78	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Sambaja
79	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Sanga-Sanga
80	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Muntai
81	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Marangkayu
82	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Sebulu
83	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Loa Jaran
84	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Loa Kulu
85	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Badak
86	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Tabang
87	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Jawa
88	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Tenggarong Seberang
89	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Anggana
90	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Wis
91	Tingkat kepatuhan aparatur	n.a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Kota Bangun
92	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Tenggarong
93	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Kendahan
94	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	Kecamatan Kembang Janggut
95	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Kaman
96	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Sambaja
97	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Sanga-Sanga
98	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	100%	-	100%	-	-	100%	Kecamatan Muara Muntai
99	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	Kecamatan Marangkayu
100	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	Kecamatan Sebulu
101	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Loa Jaran
102	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	Kecamatan Loa Kulu
103	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Badak
104	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Tabang
105	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Jawa
106	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Tenggarong Seberang
107	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Anggana

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA							KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
108	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Wis
109	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	n.a	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Kota Bangun
110	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Kenohan
111	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	Kecamatan Kembar Janggut
112	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Kaman
113	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Sambaja
114	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Sanga-Sanga
115	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Murai
116	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Marangkayu
117	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Loa Jahan
118	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	Kecamatan Loa Kulu
119	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Badak
120	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Tabang
121	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Jawa
122	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Tenggorong Seberang
123	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	100%	-	100%	-	-	100%	100%	Kecamatan Anggara
124	Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Wis
125	Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	n.a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Kota Bangun
126	Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Tenggarong
127	Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Kenohan
128	Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Kembar Janggut
129	Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%	Kecamatan Muara Kaman
130	Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Sambaja
131	Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Sanga-Sanga
132	Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Murai
133	Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Marangkayu
134	Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Sebuju
135	Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Loa Jahan
136	Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Loa Kulu
137	Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Badak

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMANGUNGAN DAERAH		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015		KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
138	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Tabang	
139	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Jawa	
140	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Tenggarong Seberang	
141	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Anggara	
142	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Wis	
143	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	n.a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Kota Bangun	
144	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Tenggarong	
145	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Samboja	
146	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Muntai	
147	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Marangkayu	
148	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Sebulu	
149	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Loa Janan	
150	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Loa Kulu	
151	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Badak	
152	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Tabang	
153	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Jawa	
154	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Tengarong Seberang	
155	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Anggara	
156	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Kerchan	
157	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Kembang Janggut	
158	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Muara Kaman	
159	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Sanga Sanga	
160	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kecamatan Loa Janan	
161	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kecamatan Loa Janan	
162	Persentase terib administrasi desa	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kecamatan Loa Janan	
1 PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KEURAHAN											
1	Cakupan Lembaga Kemasy/arkatan yang aktif	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Jawa	
2	Cakupan Lembaga Kemasy/arkatan yang aktif	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Pendinjin	
3	Cakupan Lembaga Kemasy/arkatan yang aktif	42%	5%	-	-	-	-	-	5%	Kelurahan Sarikya	
4	Cakupan Lembaga Kemasy/arkatan yang aktif	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Sanga-Sanga Muara	
5	Cakupan Lembaga Kemasy/arkatan yang aktif	37%	4%	-	-	-	-	-	4%	Kelurahan Sanga-Sanga Dalam	
6	Cakupan Lembaga Kemasy/arkatan yang aktif	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Muara Kembang	
7	Cakupan Lembaga Kemasy/arkatan yang aktif	37%	4%	-	-	-	-	-	4%	Kelurahan Tampole	

8	Cakupan Lembaga Kemasyarakan yang aktif	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
9	Cakupan Lembaga Kemasyarakan yang aktif	35%	20%	-	-	-	-	-	20%	Keurutan Muara Jawa Pesisir
10	Cakupan Lembaga Kemasyarakan yang aktif	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurutan Muara Jawa Tengah
11	Cakupan Lembaga Kemasyarakan yang aktif	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurutan Muara Jawa Ilir
12	Cakupan Lembaga Kemasyarakan yang aktif	37%	4%	-	-	-	-	-	4%	Keurutan Dongang
13	Cakupan Lembaga Kemasyarakan yang aktif	42%	5%	-	-	-	-	-	4%	Keurutan Teluk Dalam
14	Cakupan Lembaga Kemasyarakan yang aktif	35%	20%	-	-	-	-	-	20%	Keurutan Mahlu
15	Cakupan Lembaga Kemasyarakan yang aktif	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurutan Loa Ipuh Darat
16	Cakupan Lembaga Kemasyarakan yang aktif	37%	4%	-	-	-	-	-	4%	Keurutan Bukit Bru
17	Cakupan Lembaga Kemasyarakan yang aktif	42%	5%	-	-	-	-	-	5%	Keurutan Jahab
18	Cakupan Lembaga Kemasyarakan yang aktif	37%	4%	-	-	-	-	-	4%	Keurutan Baru
19	Cakupan Lembaga Kemasyarakan yang aktif	42%	5%	-	-	-	-	-	5%	Keurutan Mangkurawang
20	Cakupan Lembaga Kemasyarakan yang aktif	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurutan Timbau
21	Cakupan Lembaga Kemasyarakan yang aktif	35%	20%	-	-	-	-	-	20%	Keurutan Loa Ipuh
22	Cakupan Lembaga Kemasyarakan yang aktif	42%	5%	-	-	-	-	-	5%	Keurutan Melayu
23	Cakupan Lembaga Kemasyarakan yang aktif	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurutan Loa Tebu
24	Cakupan Lembaga Kemasyarakan yang aktif	37%	4%	-	-	-	-	-	4%	Keurutan Parij
25	Cakupan Lembaga Kemasyarakan yang aktif	4%	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Cakupan Lembaga Kemasyarakan yang aktif	37%	4%	-	-	-	-	-	4%	Keurutan Sukrame
27	Cakupan Lembaga Kemasyarakan yang aktif	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurutan Mangkurawang
28	Cakupan Lembaga Kemasyarakan yang aktif	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurutan Sungai Merdeka
29	Cakupan Lembaga Kemasyarakan yang aktif	35%	20%	-	-	-	-	-	20%	Keurutan Kaya Merdeka
30	Cakupan Lembaga Kemasyarakan yang aktif	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurutan Handil Baru
31	Cakupan Lembaga Kemasyarakan yang aktif	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurutan Amborawang Darat
32	Cakupan Lembaga Kemasyarakan yang aktif	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurutan Saik Api Laut
33	Cakupan Lembaga Kemasyarakan yang aktif	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurutan Amborawang Laut
34	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di keurutan	35%	20%	-	-	-	-	-	20%	Keurutan Handil Baru Darat
35	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di keurutan	37%	4%	-	-	-	-	-	4%	Keurutan Sanga-Sanga Muara
36	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di keurutan	37%	4%	-	-	-	-	-	4%	Keurutan Muara Jawa Tengah
37	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di keurutan	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurutan Muara Jawa Ulu
38	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di keurutan	35%	20%	-	-	-	-	-	20%	Keurutan Mahlu
39	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di keurutan	42%	5%	-	-	-	-	-	5%	Keurutan Loa Ipuh Darat
40	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di keurutan	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurutan Timbau
41	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di keurutan	35%	20%	-	-	-	-	-	20%	Keurutan Loa Ipuh
42	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di keurutan	42%	5%	-	-	-	-	-	5%	Keurutan Melayu
43	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di keurutan	37%	4%	-	-	-	-	-	4%	Keurutan Parij
44	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di keurutan	37%	4%	-	-	-	-	-	4%	Keurutan Sukrame
45	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di keurutan	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurutan Sungai Merdeka
46	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di keurutan	37%	4%	-	-	-	-	-	4%	Keurutan Kaya Merdeka
47	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di keurutan	35%	20%	-	-	-	-	-	20%	Keurutan Saik Api Darat

48	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan di kelurahan	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
49	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Handil Baru Darat
50	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Jawa
51	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Pendangin
52	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Sarigaya
53	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Sanga-Sanga Muara
54	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Sanga-Sanga Dalam
55	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Muara Kembang
56	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Tamapole
57	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Muara Jawa Pesisir
58	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Muara Jawa Tengah
59	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Muara Jawa Ilir
60	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Muara Jawa Ulu
61	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Dondang
62	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Teluk Dalam
63	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Mahuli
64	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Loa Ipuh Darat
65	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Bukit Baru
66	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Janab
67	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Baru
68	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Mangkuwang
69	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Timbuu
70	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Loa Ipuh
71	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Melayu
72	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Loa Tebu
73	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Panji
74	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Sukarame
75	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Sukarame
76	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Samboja Kuala
77	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Samboja Kuala
78	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Samboja Kuala
79	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Sungai Selang
80	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Sungai Merdeka
81	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Tanjung Harapan
82	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Kayu Merdeka
83	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Salak Api Darat
84	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Magomulyo
85	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Handil Baru
86	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Muara Sembilang
87	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Handil Baru Darat
88	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Kampung Lama
89	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Wonotito
90	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Amborawang Darat
91	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Bukit Merdeka
92	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Salak Api Laut
93	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Amborawang Laut
94	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Keurathnan Jawa

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
95	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%		-		-		100%	Keurutan Sarifaya
96	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurutan Sanga-Sanga Muara
97	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurutan Sanga-Sanga Dalam
98	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurutan Muara Kembang
99	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurutan Tamapole
100	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurutan Muara Jawa Pesisir
101	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurutan Muara Jawa Tengah
102	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurutan Muara Jawa Ilir
103	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurutan Muara Jawa Ulu
104	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurutan Teluk Dalam
105	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurutan Mahlu
106	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurutan Loa Ipuh Darat
107	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurutan Bukit Baru
108	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurutan Jahab
109	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurutan Baru
110	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurutan Mangkurawang
111	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurutan Timbau
112	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurutan Loa Ipuh
113	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurutan Melayu
114	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurutan Loa Tebu
115	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurutan Panji
116	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurutan Sukarame
117	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurutan Agosari
118	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurutan Samoja Kuala
119	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurutan Teluk Pemedas
120	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurutan Sanipah
121	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurutan Sungai Selang
122	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurutan Sungai Merdeka
123	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurutan Tanjung Harapan
124	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurutan Karya Merdeka

	BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
125	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Saik Api Darat
126	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Mangmuljo
127	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Handil Baru
128	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Muara Sembilang
129	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Handil Baru Darat
130	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Kampung Lama
131	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Wonotito
132	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Amborawang Darat
133	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Bukit Merdeka
134	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Saik Api Laut
135	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Amborawang Laut
136	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Jawa
137	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Pendingin
138	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Sarigaya
139	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Sanga-Sanga Muara
140	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Sanga-Sanga Dalam
141	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Muara Kembang
142	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Tampole
143	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Muara Jawa Pesisir
144	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Muara Jawa Tengah
145	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Muara Jawa Ilir
146	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Muara Jawa Ulu
147	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Dondang
148	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Teluk Dalam
149	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Mahlu
150	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Loa Ipuh Darat
151	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Bukit Bru
152	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	35%	20%	-	-	-	-	-	20%	Kelurahan Janab
153	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Baru
154	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	-	100%	Kelurahan Mangkuwang

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
155	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	35%	20%	-	-	-	-	20%	Keurahan Timbau	
156	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurahan Loa Ipuh	
157	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurahan Melayu	
158	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurahan Loa Tebu	
159	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurahan Panji	
160	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurahan Sukrame	
161	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurahan Agosari	
162	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurahan Teluk Pemedas	
163	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurahan Sampan	
164	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurahan Sungai Selang	
165	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurahan Sungai Merdeka	
166	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	37%	4%	-	-	-	-	4%	Keurahan Tanjung Harapan	
167	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurahan Karya Merdeka	
168	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurahan Salok Api Darat	
169	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurahan Margomulyo	
170	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurahan Handil Baru	
171	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	35%	20%	-	-	-	-	20%	Keurahan Handil Baru Darat	
172	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurahan Kampung Lama	
173	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurahan Amborawang Darat	
174	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurahan Salok Api Laut	
175	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-	100%	Keurahan Amborawang Laut	
2 PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN										
1	Tingkat ketersediaan Data Pembangunan	34%	40%	45%	60%	75%	80%	85%	85%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Tingkat kesesuaian antara RPJMD-RKPD	50%	70%	75%	75%	85%	85%	90%	90%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Tingkat Capaian Kinerja Fisk Pembangunan Daerah	60%	70%	75%	75%	85%	85%	90%	90%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Cakupan Fasilitas Kerjasama Perencanaan Antar Daerah (%)	0	5	5	5	5	5	5	30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Rata-Rata Tingkat capaian pembangunan Bidang Ekonomi	70%	75%	78%	81%	84%	88%	90%	90%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6	Rata-Rata Tingkat capaian pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat	70%	75%	78%	81%	84%	88%	90%	90%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Rata-Rata Tingkat capaian pembangunan Bidang Sarana Prasarana dan pengembangan wilayah	70%	75%	78%	81%	84%	88%	90%	90%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
8	Rata-Rata Tingkat capaian pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	70%	75%	78%	81%	84%	88%	90%	90%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10	Tingkat keputihan aparatur	75%	75%	75%	80%	85%	90%	95%	54%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	58%	60%	70%	75%	80%	85%	90%	90%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	88%	89%	90%	92%	93%	93%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
13	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	16%	16%	15%	15%	16%	15%	77%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
14	Persentase penerapan MoU Kerjasama Pembiayaan pembangunan daerah melalui Swasta	n.a	-	16	16	16	16	16	80	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3 PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
1	Cakupan sistem Inovasi Daerah	n.a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
2	Persentase Kajian Penguatan Kecamatan	n.a	-	2 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
3	Jumlah kawasan pertanian yg menerapkan sikikal terpadu	n.a	-	3 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
4	Cakupan Paket Teknologi Budidaya Tanaman Jagung	n.a	-	2 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5	Cakupan Paket Teknologi Pasca Panen Dan Agribisnis Komoditas Jagung	n.a	-	7 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	11 Dokumen	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
6	Ketersediaan rekomendasi kebijakan daerah	24 Dokumen	26 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	51 Dokumen	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
7	Cakupan Penelitian di bidang Pemerintahan dan Hukum	-	-	9 Dokumen	7 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	37 Dokumen	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
8	Cakupan Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan	-	-	9 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	18 Dokumen	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
9	Cakupan Penelitian di bidang SDA dan Teknologi	-	-	12 Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	27 Dokumen	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
10	Cakupan Penelitian di bidang Sosial budaya dan Kemasyarakatan	-	-	5 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	21 Dokumen	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
11	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
12	Tingkat keputihan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
13	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
14	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
15	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
4 PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN KEPENGAWAIAAN										
1	Persentase peningkatan kemampuan manajerial, keahlian dan keterampilan pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Kepegawaian Daerah
2	Cakupan pembinaan agen bekas (beberapa etam kuatkan kinerja aparatur sipil negara)	n.a	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Kepegawaian Daerah
3	Cakupan layanan administrasi kepegawaian ASN	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Kepegawaian Daerah
4	Cakupan Ketersediaan Data/informasi Kepegawaian	50%	66%	73%	81%	88%	100%	100%	100%	Badan Kepegawaian Daerah
5	Persentase pegawai yang ditempatkan dalam jabatan berdasarkan merit system	48%	55%	64%	73%	82%	91%	100%	100%	Badan Kepegawaian Daerah
6	Persentase Batas Pelanggaran Disiplin Pegawai	<2%	<2%	<2%	<2%	<2%	<2%	<2%	<2%	Badan Kepegawaian Daerah
7	Cakupan layanan administrasi perkantoran	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Kepegawaian Daerah

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA							KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
8	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	2016	2017	2018	2019	2020	2021		100%	Badan Kepegawaian Daerah
9	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	92%	-	100%	100%	100%	100%	100%		100%	Badan Kepegawaian Daerah
10	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	82%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	Badan Kepegawaian Daerah
11	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	Badan Kepegawaian Daerah
5 PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN											
1	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2	Cakupan layanan administrasi perkantoran										Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	Dinas Pendapatan Daerah
4	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
6	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	Dinas Pendapatan Daerah
7	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
8	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur										Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
9	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	Dinas Pendapatan Daerah
10	Penyampaian LKPD Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
11	Tertib Administrasi BMD										Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
12	Cakupan Pemantauan BMD yang potensial										Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
13	Tingkat standarsasi belanja SKPD										Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
14	cakupan layanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
15	cakupan penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	85%									Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
16	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
17	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan										Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
18	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	Dinas Pendapatan Daerah
19	Pertumbuhan PAD (pejak, retribusi daerah, laba BUMD/Perusda, dan lain-lain PAD yang sah)	-	5.49%	-	-	-	-	-		-	Dinas Pendapatan Daerah
20	Pertumbuhan Kontribusi PAD Terhadap APBD	-	5.49%	6.65%	7.81%	8.97%	10.13%	11.29%		11.29%	Dinas Pendapatan Daerah
21	Persentase Pertumbuhan Pajak	-	-30.44%	12.44%	10.00%	3.63%	5.26%	3.33%		3.33%	Dinas Pendapatan Daerah
22	Persentase Pertumbuhan Retribusi	-	34.18%	23.21%	10.00%	9.09%	8.33%	7.69%		7.69%	Dinas Pendapatan Daerah
23	Persentase Pertumbuhan Bagi Hasil	-	-33.31%	-5.17%	1.31%	1.29%	8.95%	5.35%		5.35%	Dinas Pendapatan Daerah
6 PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN											
1	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	Inspektoral
2	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%								Inspektoral
3	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	Inspektoral

BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2015	KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2021	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
4 Cakupan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektoral
5 Cakupan Pengawasan terhadap pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian dan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektoral
6 Cakupan Implementasi SPKD	n.a	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektoral
7 Cakupan review dokumen Anggaran SKPD dan reviu LKPD.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektoral
8 Cakupan Evaluasi SAKIP SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektoral
9 Cakupan Monitoring LPD SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektoral
10 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI	52%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	80%	Inspektoral
11 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APSP	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektoral
12 Cakupan Implementasi SPSP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektoral
13 Cakupan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Pengawas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektoral
14 Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektoral
15 Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektoral

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN

Bab ini menjelaskan pedoman transisi dan kaedah pelaksanaan RPJMD Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini berisi penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati periode 2016-2021, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, dan RPJM Nasional. Selain itu, RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 harus memuat kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi.

10.1 PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

- 1) *RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya;*
- 2) *RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;*
- 3) *Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.*

10.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. *Seluruh SKPD/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya; Setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun Renstra-SKPD yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJMD ini;*
2. *Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi peru-*

bahan capaian sasaran tahunan disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

- 3. Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dimaksud, seperti perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- 4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2016-2021 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;*
- 5. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan menggunakan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survey yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara serta melaporkan hasilnya kepada Bupati;*
- 6. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara yang dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);*
- 7. Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang desa, Musrenbang kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten;*
- 8. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);*
- 9. Terhadap SOTK baru yang dibentuk setelah RPJMD ditetapkan, dapat diusulkan program/kegiatan baru di luar yang ada dalam dokumen RPJMD.*

BAB 11 PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, sebagai penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati, disusun selain dengan pendekatan teknokratik yaitu proses persiapan penyusunan yang dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, *top-down bottom-up* yaitu metode penyusunan yang saling berkaitan antara rancangan RPJMD dengan rancangan Rencana Strategis SKPD, pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan *stakeholders* yaitu melalui proses Konsultasi, *Focus Group Discussion* (FGD), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta pendekatan politis, yaitu proses penetapan didalam kerangka penetapan RPJMD sebagai Peraturan Daerah.

Untuk menjamin pencapaian visi, misi, program yang telah di susun, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 menjadi tanggung jawab bersama diantara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dengan menekankan kepada kerja cerdas pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Keberhasilan pencapaian RPJMD ini akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan melalui upaya yang sungguh-sungguh dengan prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas bagi :

**TERWUJUDNYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG MAJU, MANDIRI,
SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN**



Bidang Preservasi dan Pelestarian Dokumen
Kebudayaan Katolik Kementerian
D. Satrio Mangrakah (d) satrio@kemdikbud.go.id
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jakarta <http://puspres.kemdikbud.go.id/>